WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan

Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dam pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangungan jangka menengah nasional.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:
a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
b. penyusunan RKPD; dan
c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

(2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan program RPJMD oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

(2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan kooordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
   a. bencana alam;
   b. goncangan politik;
   c. krisis ekonomi;
   d. konflik sosial budaya;
   e. gangguan keamanan;
   f. pemekaran Daerah; atau
   g. perubahan kebijakan nasional.
(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.71/32/6/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian RPJMD merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2025 hingga Tahun 2029.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 81

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

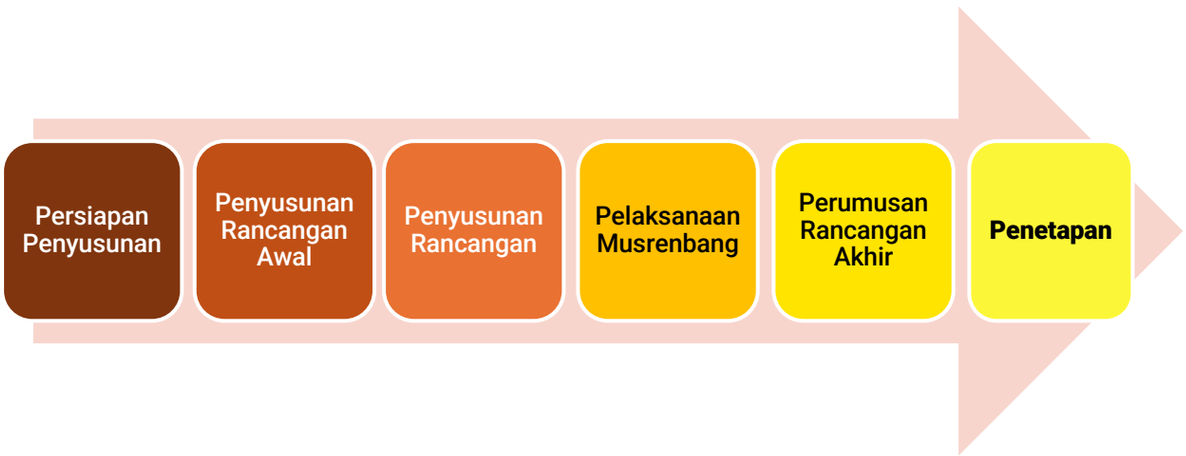
1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kota Balikpapan memasuki tahap pertama di dalam rangkaian pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Tahap pertama ini merupakan tahapan krusial karena menentukan agenda transformasi pembangunan untuk 20 tahun mendatang. Visi pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan, yaitu “Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman”. Visi tersebut salah satunya diwujudkan melalui agenda pembangunan tahap pertama yang memiliki tema berupa “Penguatan Fondasi Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif.”

Dalam rangka menyongsong periode pembangunan lima tahun mendatang, maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. RPJMD merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat berbagai ketentuan seperti visi, misi, dan program Kepala Daerah. Ketiga aspek ini dijabarkan melalui berbagai komponen perencanaan seperti tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah. RPJMD juga memuat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang bersifat indikatif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam penyusunannya, RPJMD memiliki beberapa tahapan yang perlu dilalui. Dokumen RPJMD merupakan langkah lanjutan proses integrasi antara dokumen rancangan teknokratik RPJMD dengan visi, misi, dan program unggulan yang ditawarkan oleh kepala daerah terpilih. Dokumen RPJMD bertujuan untuk

menjabarkan secara lebih rinci dari perencanaan-perencanaan lain yang perlu diacu dalam proses perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, diantaranya adalah RPJPD, RTRW, dan dokumen perencanaan lain yang relevan. Secara umum, berikut merupakan proses tahapan penyusunan RPJMD yang akan dilalui hingga penetapannya:



Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RPJMD

Berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kota Balikpapan sebelumnya, yaitu RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 mendorong dibutuhkannya perencanaan pembangunan jangka menengah yang baru. Proses penyusunan RPJMD dimulai dengan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Rancangan RPJMD nantinya disusun dengan memerhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang akan direspon melalui rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah. Nantinya, substansi dari ketetapan-ketetapan yang telah termuat dalam RPJMD akan menjadi acuan dasar bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam merumuskan kebijakan perencanaan strategis instansi daerah melalui rencana strategis perangkat daerah. Oleh karenanya, RPJMD memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

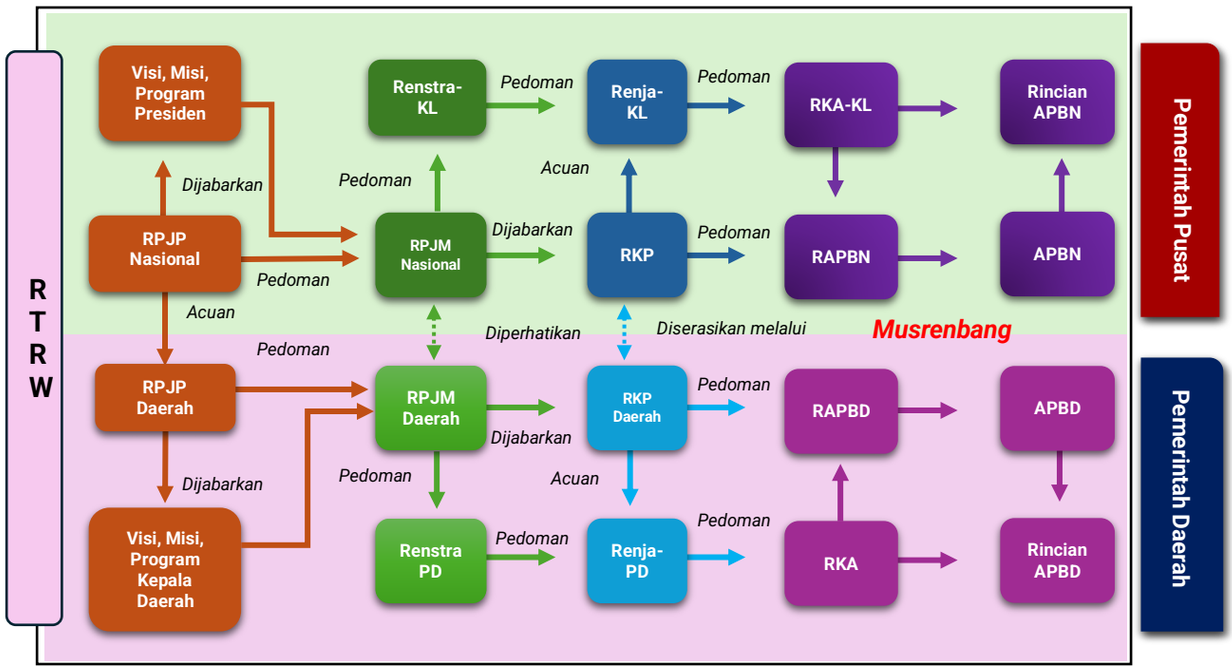
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD terdiri dari beberapa tahapan, mulai tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, rancangan akhir hingga penetapan Perda RPJMD. Dalam proses penyusunan RPJMD utuh, seluruh pendekatan perencanaan digunakan dan dipadukan di dalam dokumen. Selain pendekatan yang berorientasi proses, pendekatan perencanaan yang berorientasi substansi juga digunakan. Pendekatan ini berupa tematik-holistik, integratif dan spasial. Melalui pendekatan ini, dokumen RPJMD harus memiliki keterkaitan kuat dengan rencana tata ruang wilayah. Gambaran hubungan RPJMD dengan seluruh dokumen perencanaan makro dan tata ruang sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan hubungan antar dokumen seperti terdapat di dalam Gambar 1.1, maka penjelasan hubungan antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan sebagai berikut:

1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045

Sebagai penjabaran tahap pertama perencanaan jangka panjang, maka dokumen RPJMD mulai mengacu pada substansi dokumen RPJPD. Substansi RPJPD yang ditelaah dan diacu antara lain isu-isu strategis jangka panjang, visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan periode pertama dan sasaran pokok. Telaah tersebut diharapkan mampu merumuskan isu strategis jangka menengah dalam rangka merespon isu jangka panjang, serta perumusan rekomendasi kebijakan sebagai bagian dari penjabaran arah kebijakan periode pertama pembangunan jangka panjang.

1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD berkesesuaian waktu dengan RPJMN. Kondisi ini merupakan modal penting untuk membangun sinergi antara pembangunan jangka menengah daerah dengan nasional. RPJMN tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari RPJPN yang memiliki tema periode berupa “perkuatan fondasi transformasi”. Pembangunan jangka menengah daerah dengan demikian juga memiliki agenda besar berupa perkuatan fondasi transformasi daerah.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan RPJMD berkesesuaian waktu dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memiliki peran penting untuk mewujudkan tema pembangunan Pulau Kalimantan berupa “Superhub Ekonomi Nusantara”,

serta tema Provinsi Kalimantan Timur "Penggerak Utama Ekonomi Kawasan Timur Indonesia". Provinsi Kalimantan Timur memiliki target pembangunan makro tahun 2029, yaitu share PDRB 5,0 persen; LPE 5,6-6,9 persen; kemiskinan 1,62-2,12 persen; gini ratio 0,309-0,312; dan TPT 4,54-5,31 persen.

1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan RTRW Kota Balikpapan

RPJMD harus mulai membangun sinkronisasi antara perencanaan makro dengan perencanaan tata ruang. Berdasarkan perkembangan Balikpapan yang dinamis, maka RTRW Kota Balikpapan mengalami perubahan. RTRW Kota Balikpapan memiliki tujuan berupa mewujudkan daerah sebagai kota jasa yang dinamis, selaras, berwawasan lingkungan dan berketahanan bencana guna mendukung fungsinya sebagai pusat pertumbuhan nasional dan bagian dari superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara.

1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan KLHS RPJMD Kota Balikpapan

KLHS akan mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan yang kemudian akan menjadi salah satu landasan bagi perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Selain itu, seluruh rekomendasi pembangunan berkelanjutan dari KLHS akan menjadi landasan dan diintegrasikan ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD. Dengan demikian, Integrasi dokumen KLHS di dalam RPJMD untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) telah menjadi landasan di dalam perencanaan pembangunan.

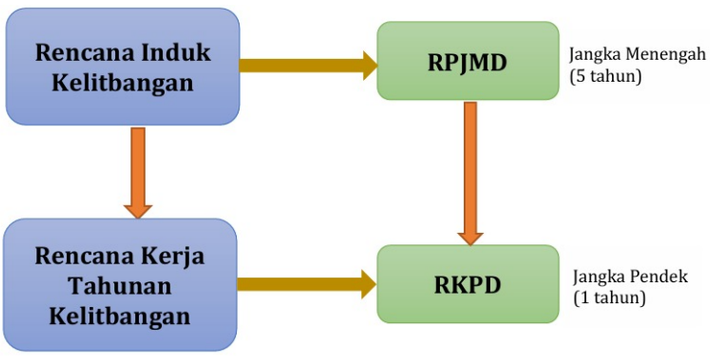
1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan RKPD, Renstra, Renja dan APBD

RPJMD harus membangun keterhubungan yang sinergis dengan perencanaan lebih operasional di dalam Renstra maupun perencanaan dan penganggaran tahunan. Keterhubungan ini membangun perencanaan yang sinergis mulai dari jangka panjang, menengah hingga tahunan dan penganggaran. Dengan demikian diharapkan tercapai pendekatan perencanaan dan penganggaran berupa *money follow program, program follow result*, serta penganggaran berbasis kinerja.

1.3.7 Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemetaan IPTEK Daerah (RIPJPID)

RIPJPID merupakan dokumen untuk mengidentifikasi arah serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pemajuan teknologi. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan yang merinci langkah-langkah operasional dalam pengembangan dan penerapan IPTEK yang relevan dengan kebutuhan daerah, dengan menetapkan tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek, serta menyediakan program dan proyek konkret yang harus dijalankan. RIPJPID juga memberikan pedoman mengenai inovasi

teknologi yang akan diadopsi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang IPTEK, serta penguatan lembaga riset dan pengembangan di daerah. Sementara itu, RPJMD menyediakan kerangka dasar bagi pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, RIPJPID berperan sebagai alat yang merinci langkah-langkah konkret untuk mengakselerasi pencapaian tujuan RPJMD, khususnya dalam pengembangan IPTEK. Sejalan dengan hal ini, pada tahun 2025 Kota Balikpapan sedang menyusun RIPJPID 2025-2029 untuk lebih memfokuskan upaya pemajuan IPTEK daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang, namun Kota Balikpapan telah memiliki dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) tahun 2021-2025 yang menjadi dasar penyelarasan RPJMD dengan Rencana Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah. Melalui integrasi yang baik antara RPJMD dan RIPJPID, daerah akan dapat mengoptimalkan potensi IPTEK untuk meningkatkan daya saing, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Integrasi kedua dokumen ini memastikan bahwa pengembangan IPTEK yang tercantum dalam RPJMD dapat dijalankan secara sistematis dan terukur melalui peta jalan yang dijelaskan dalam RIPJPID.



1.3.8 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencaanan Lainnya

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 juga perlu mengacu pada beberapa dkumen perencanaan lainnya, seperti Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang berisi rekomendasi kinerja dan kerja serta dokumen perencaan pembangunan dan sektoral lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 juga perlu didukung dengan manajemen risiko pembangunan yang berfungsi mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan, sehingga dapat meminimalisir dampak dan memastikan bahwa RPJMD dapat diimplementasikan dengan efektif dan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, yaitu untuk memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. RPJMD Kota

Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Balikpapan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Tersedianya dokumen yang memuat gambaran kinerja pembangunan dan konidsi keuangan daerah yang aktual;
2. Tersedianya dokumen yang memuat pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan rumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
3. Sebagai dasar perumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kota Balikpapan selama lima tahun kedepan;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota sekitar, serta perencanaan sectoral;
6. Menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan periode 2025-2029;
7. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
8. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Balikpapan; dan
9. Menjadi pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN Bab pendahuluan memuat informasi terkait latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum yang relevan, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (RPJPD, RPJMN, RTRW, KLHS, serta rencana sektoral lainnya), maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD, dan sistematika penulisan.
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH Gambaran umum daerah menyajikan data-data dan informasi hasil capaian pembangunan daerah lima tahun terakhir. Penyajian pada bab ini memuat enam aspek antara lain aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis. Aspek geografi dan demografi memuat terkait: 1) posisi dan peran strategis daerah; 2) potensi sumber daya alam; 3) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 4) berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; 5) lingkungan hidup berkualitas; 6) resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta; 7) demografi. Aspek kesejahteraan memuat terkait: 1) kesejahteraan ekonomi; 2) kesehatan untuk semua; 3) pendidikan berkualitas yang merata; 4) perlindungan sosial yang adaptif; 5) beragama maslahat dan berkebudayaan maju, serta 6) keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Aspek daya saing memuat terkait: 1) daya saing sumber daya manusia; 2) iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; 3) penerapan ekonomi hijau dan biru; 4) transformasi digital; 5) integrasi ekonomi domestik dan global; 6) perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan 7) stabilitas ekonomi makro. Aspek pelayanan umum memuat terkait: 1) regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;

	2) hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi substansial; 3) ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar Kawasan; 4) kinerja setiap urusan pemerintahan daerah. Gambaran keuangan daerah memuat terkait realisasi APBD tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun 2026-2030. Permasalahan dan isu strategis memuat permasalahan yang bersifat dominan serta identifikasi isu strategis daerah sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, regional) yang mempengaruhi daerah secara langsung maupun tidak langsung.
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini berisi tentang penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, strategi dan arah kebijakan, serta progam prioritas daerah. Visi dan Misi pada dokumen RPJMD merupakan hasil visi misi kepala daerah terpilih. Visi merupakan rumusan umum mengenai kondisi daerah yang ingin diwujudkan pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. Visi dan misi kemudian diturunkan dalam rumusan tujuan dan sasaran daerah, serta mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Untuk mendukung tercapaianya visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah secara lebih operasional. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam bab VI Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat indikasi kerangka pendanaan yang berasal dari hasil analisis pada BAB III perihal gambaran keuangan daerah.

	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat terkait indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD). IKU merupakan indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang terseleksi. Sedangkan IKD merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025-2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.
BAB V	PENUTUP Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

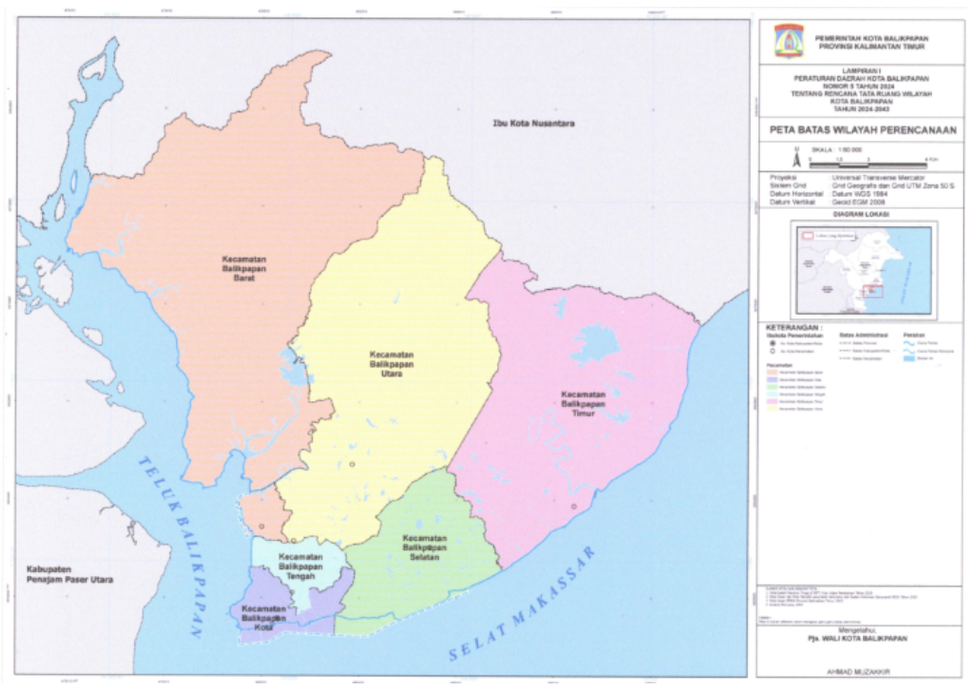
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Sub bab ini menguraikan gambaran umum terkait kondisi Kota Balikpapan dari aspek geografi dan demografi. Kedua aspek tersebut dijelaskan secara rinci dan sistematis secara komprehensif. Gambaran aspek geografi dan demografi di Kota Balikpapan dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Wilayah administratif Kota Balikpapan mencakup daratan dan lautan. Adapun luas keseluruhan Kota Balikpapan sebesar 51.101,24 Ha. Kota Balikpapan berbatasan langsung dengan lautan dan kabupaten lain di sekitarnya, yang mencakup:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN); dan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

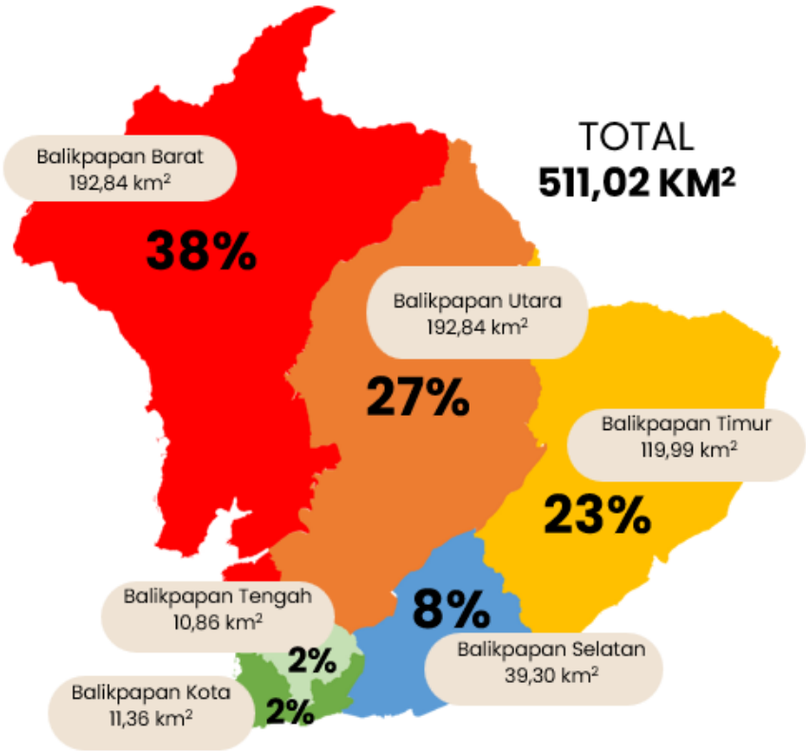


Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Balikpapan

Sumber: Perda RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Kota Balikpapan memiliki enam (6) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan. Kondisi tersebut didasarkan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan. Masing-masing kecamatan dan kelurahan memiliki luas yang

bervariasi. Berikut disajikan proporsi luasan setiap kecamatan terhadap luasan total di Kota Balikpapan.



Gambar 2. 2 Persentase Luas Per Kecamatan di Kota Balikpapan
Sumber: Olah data, 2025

Kecamatan terluas, berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan cakupan area sebesar 38 persen dari luas total daratan Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan oleh banyak dan luasnya hutan lindung yang tersebar pada kecamatan tersebut, termasuk hutan lindung Sungai Wain. Adapun kelurahan terluas di Kecamatan Balikpapan Barat tersebut berada di Kelurahan Kariangau, dengan cakupan sebesar 97,21 persen dari luas total Kecamatan Balikpapan Barat. Adapun kecamatan dengan luas terkecil terletak di Kecamatan Balikpapan Kota. Cakupan luasnya sebesar 2,17 persen dari luas total Kota Balikpapan. Meskipun memiliki luas wilayah terkecil dibandingkan kecamatan lainnya, Kecamatan Balikpapan Kota memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut memiliki keterkaitan dengan aspek Kota Balikpapan sebagai pusat pemerintahan kota, dan juga pusat aktivitas perekonomian.

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Kota Balikpapan dapat diwujudkan dengan pendekatan spasial berdasarkan pengembangan berbasis fungsi kawasan sesuai dengan peruntukan ruang. Pengembangan kawasan budidaya di Kota Balikpapan didukung dengan adanya potensi sumber daya yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sumber daya yang dimaksud meliputi potensi pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan ekowisata. Potensi pertanian tanaman padi yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan termasuk dalam

kategori relatif skala kecil, dengan fokus pada wilayah Kecamatan Balikpapan Timur; utamanya kelurahan Manggar, Lamaru, dan Teritip. Arahan pengelolaan kawasan pertanian di Kota Balikpapan adalah untuk pengembangan pertanian tanaman pangan: kawasan pertanian lestari/sawah lahan basah dan kegiatan pertanian holtikultura. Berikut disajikan produksi dari sektor pertanian di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 1 Produksi pertanian di Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Padi Sawah (Ton)	Jagung (Ton)	Ubi Kayu (Ton)	Ubi Jalar (Ton)	Kacang Tanah (Ton)
2020	358,50	1.358	15.186,80	262,50	42
2021	398,40	735,60	12.085	210	20,40
2022	346,80	422	12.391	435	22
2023	110	150	16.192	375	16
2024	92	126,24	21.008,40	396,72	8,69

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2025

Produksi pertanian di Kota Balikpapan menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024, dengan penurunan signifikan pada komoditas utama seperti padi sawah dan jagung. Produksi padi sawah turun tajam dari 398,40 ton pada 2021 menjadi hanya 92 ton pada 2024, sementara jagung mengalami penurunan drastis dari 1.358 ton pada 2020 menjadi 126,24 ton pada 2024. Sebaliknya, produksi ubi kayu mengalami peningkatan cukup signifikan, dari 12.085 ton pada 2021 menjadi 21.008,40 ton pada 2024, menunjukkan potensi komoditas ini untuk dikembangkan lebih lanjut. Produksi ubi jalar juga cenderung meningkat, meskipun tidak sekuat pertumbuhan ubi kayu. Sementara itu, kacang tanah mengalami penurunan berkelanjutan dari 42 ton pada 2020 menjadi hanya 8,69 ton pada 2024. Secara umum, terjadi pergeseran produktivitas dari komoditas pangan utama ke umbi-umbian, yang bisa mencerminkan perubahan pola tanam atau adaptasi terhadap kondisi iklim dan lahan.

Untuk mengoptimalkan produksi pertanian di Kota Balikpapan, diperlukan Upaya revitalisasi sektor pertanian melalui pendekatan berbasis teknologi, pemetaan lahan pertanian potensial, serta pendampingan intensif kepada petani terkait teknik budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim. Diperukan juga juga diversifikasi komoditas sesuai potensi lokal, seperti penguatan pada produksi ubi kayu yang terbukti mengalami pertumbuhan, dan perlunya pembangunan irigasi serta penyediaan benih unggul untuk meningkatkan kembali hasil padi dan jagung pada wilayah yang potensial. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani harus ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran hasil pertanian secara berkelanjutan.

Perkebunan juga merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan dengan fungsi sebagai penyangga bagi kawasan hutan lindung dengan luasan yang terbatas. Perkebunan di Kota Balikpapan merupakan perkebunan tanaman keras. Tanaman perkebunan yang dikembangkan antara lain tanaman karet, lada, kelapa, kakao, kemiri, kopi, cengkeh, dan tanaman perkebunan lainnya. Peruntukan kawasan perkebunan di Kota Balikpapan mencapai 2.076,17 Ha atau mencapai 4,12 persen luas Kota Balikpapan. Kawasan perkebunan tersebut berlokasi di Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Teritip, Kelurahan Manggar dan Kelurahan Lamaru. Namun, sebagian besar kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur.

Potensi sumber daya terbarukan atau renewable resources dikembangkan pada kawasan pesisir Kota Balikpapan, khususnya pemanfaatan sumber daya perikanan. Tidak hanya di kawasan pesisir dengan potensi perikanan laut, tetapi perikanan budidaya dan perikanan tangkap juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai potensi perikanan darat. Pengembangan kawasan minapolitan juga dimaksudkan untuk mendukung pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Kota Balikpapan.

Sektor industri dan perdagangan di Kota Balikpapan juga berpotensi untuk dikembangkan untuk mendukung tercapainya visi pengembangan Kota Balikpapan yang diarahkan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang potensial dan unggul. Kota Balikpapan yang terletak di wilayah strategis memiliki keunggulan komparatif berdampak pada pertumbuhan industri skala kecil/rumah tangga hingga skala besar yang tersebar di seluruh wilayah Kota Balikpapan. Penetapan kawasan industri Kota Balikpapan yang terletak di ALKI II sekaligus menjadi pintu masuk Provinsi Kalimantan Timur menjadi keunggulan untuk perkembangan industri wilayah yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan.

Potensi alam maupun budaya di Kota Balikpapan juga menarik untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata di Kota Balikpapan seperti hutan lindung, kawasan lindung, kawasan bakau (mangrove), agrowisata, wanawisata, dan lain-lain. Sedangkan potensi wisata budaya yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan meliputi wisata sejarah yang berupa tugu, monumen dan tempat bersejarah, serta bangunan unik.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

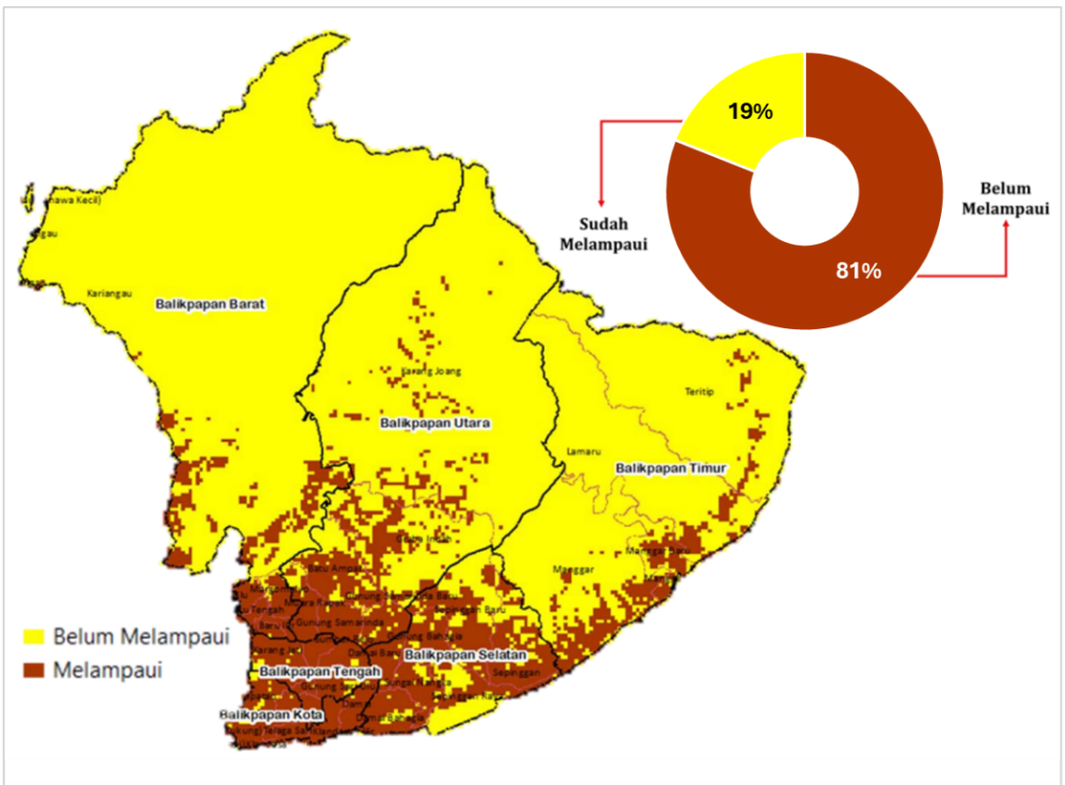
Secara operasional daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan dengan pendekatan jasa ekosistem, dengan asumsi bahwa semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia. Asumsi berikutnya yakni, semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan

lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Lebih lanjut lagi, status daya dukung lingkungan juga dapat diketahui dengan mengidentifikasi proporsi jumlah penduduk suatu wilayah terhadap ambang batas sumber daya eksisting yang tersedia saat ini. Representasi kondisi tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan menghitung dan menganalisis kapasitas daya dukung pangan dan air di Kota Balikpapan. Kedua komponen tersebut digunakan sebagai pendekatan, dengan pertimbangan peranan atas keduanya yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan, khususnya bagi keberlanjutan kehidupan manusia.

2.1.3.1 DDDTLH Pangan

Penentuan status daya dukung penyedia pangan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan membandingkan ambang batas terhadap jumlah penduduk eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk status DDLH pangan terlihat bahwa status daya dukung pangan di Kota Balikpapan Belum Melampaui sebesar 81 persen dan Sudah Melampaui sebesar 19 persen. Berikut disajikan distribusi status daya dukung pangan di Kota Balikpapan.



Gambar 2. 3 Status Daya Dukung Pangan Kota Balikpapan

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas

2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha.

Tabel 2. 2 Status daya dukung pangan Kota Balikpapan

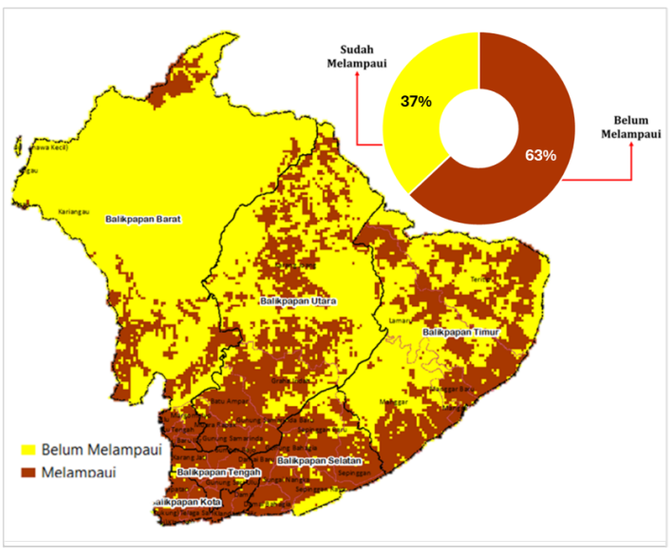
No	Kecamatan	Ketersediaan (Kkal/Tahun)	Kebutuhan (Kkal/Tahun)	Selisih (Kkal/Tahun)	Ambang Batas (Jiwa/Tahun)
1	Balikpapan Barat	355851962292,23	61550296750,00	294301665542,23	453459,02
2	Balikpapan Kota	17309636348,82	60537184500,00	-43227548151,21	22057,52
3	Balikpapan Selatan	59839708148,50	84120491500,00	-24280783351,50	76253,21
4	Balikpapan Tengah	17981253627,96	79236992250,00	-61255738622,07	22913,35
5	Balikpapan Timur	205971870671,05	46788364500,00	159183506171,05	262468,14
6	Balikpapan Utara	259223859518,33	100009324750,00	159214534768,33	330326,68
	Grand Total	**916178290606,89**	**432242654250,00**	**483935636356,83**	**1167477,91**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Upaya untuk mempertahankan daya dukung pangan dapat dilakukan dengan menerapkan pertanian berkelanjutan, meningkatkan produktivitas pangan, dan melindungi lahan pertanian. Dengan demikian, diharapkan ketahanan pangan dapat diwujudkan di Kota Balikpapan, yang selanjutnya dapat menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera.

2.1.3.2 DDDTLH Air

Daya dukung air (*water carrying capacity*) mengacu pada kemampuan sumber daya air (seperti sungai, danau, mata air, dan sumber air lainnya) untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia secara berkelanjutan. Artinya, daya dukung air menjadi parameter yang menunjukkan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Dengan demikian, komponen ini menjadi penting untuk dipertimbangan dalam setiap penyusunan kebijakan pembangunan wilayah.



Gambar 2. 4 Status Daya Dukung Air Kota Balikpapan

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Status daya dukung penyedia air yang sudah melampaui 37 persen, Sedangkan untuk daya dukung air yang belum melampaui 63 persen. Kecamatan yang mempunyai status daya dukung air yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 5.945,92 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung air belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 16.728,04 Ha.

Tabel 2. 3 Status daya dukung air Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Ketersediaan (M3/Tahun)	Kebutuhan (M3/Tahun)	Selisih (M3/Tahun)	Ambang Batas (Jiwa/Tahun)
1	Balikpapan Barat	208478674,78	71655727,90	136822946,89	258209,00
2	Balikpapan Kota	10897248,70	61815593,49	-50918344,78	13695,00
3	Balikpapan Selatan	36595054,51	88885350,79	-52290296,28	45863,00
4	Balikpapan Tengah	11286464,01	81044835,90	-69758371,90	14180,00
5	Balikpapan Timur	116936986,93	92331427,75	24605559,19	145983,00
6	Balikpapan Utara	139953015,05	129892742,34	10060272,72	174504,00
	Grand Total	**524147443,99**	**525625678,16**	**-1478234,17**	**652434,00**

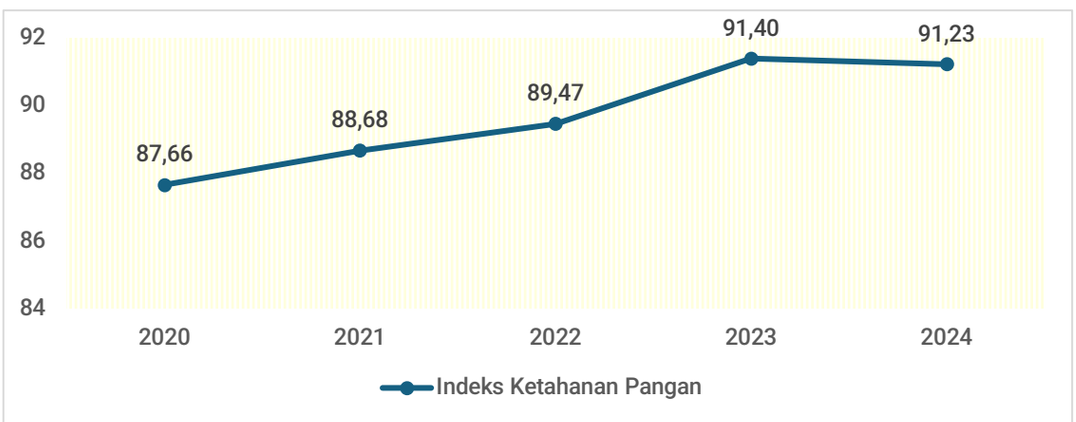
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Kondisi tersebut, menjadikan daya dukung air di Kota Balikpapan memiliki urgensi tinggi untuk dipertahankan, terlebih pada wilayah-wilayah yang telah memiliki status daya dukung air melampui ambang batas. Perlindungan terhadap ketersediaan air dapat dilakukan dengan menjaga daerah tangkapan air, membangun infrastruktur air, dan mendayagunakan air dengan optimal.

2.1.4 Berketananan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan

Kinerja penyelenggaraan pangan di Kota Balikpapan dilihat dari indeks ketahanan pangan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan atau akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan. Perkembangan indeks ketahanan pangan di Kota Balikpapan dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 5 Indeks Ketahanan Pangan Kota Balikpapan 2020-2024

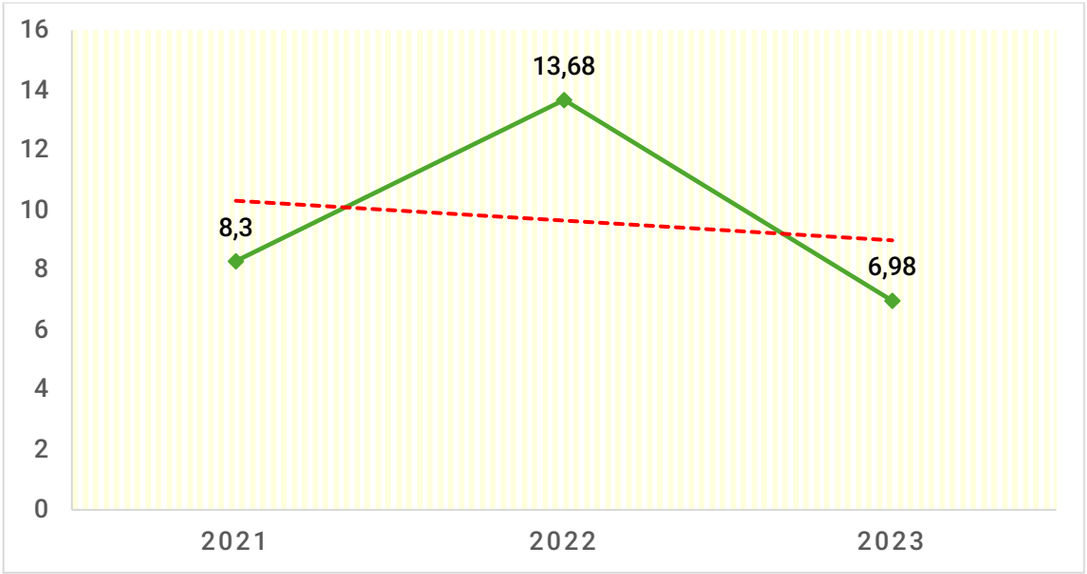
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2020-2024

Grafik tersebut menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan di Kota Balikpapan mengalami tren perkembangan yang terus meningkat, meskipun sedikit menurun pada tahun 2024. Pada tahun 2024, indeks ketahanan pangan Kota Balikpapan turun 0,17 poin menyebabkan penurunan peringkat dari peringkat kedelapan pada tahun 2023, turun ke peringkat lima belas nasional kategori kota. Kota Balikpapan mampu meraih nilai 91,23 meskipun hanya memiliki 15 persen lahan untuk kegiatan pangan dan sumber utama kebutuhan pangan masih mendapat pasokan dari Jawa Timur, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah memaksimalkan penggunaan pekarangan rumah masyarakat untuk ditanami tanaman pangan sehingga menjadi pekarangan pangan lestari (P2L) atau dikenal juga dengan *urban farming*.

2.1.4.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan menunjukkan bahwa masih ada sebagian penduduk yang mengalami kekurangan pangan. Artinya, masih terdapat kondisi ketidakmerataan distribusi pangan atau keterbatasan akses ke sumber pangan yang memadai. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab indikatif terjadinya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah tingginya tingkat kemiskinan, akses terbatas terhadap pangan, produksi pangan yang tidak stabil, kurangnya diversifikasi pangan, krisis pangan dan konflik, keterbatasan pengetahuan terkait gizi, serta kebijakan pertanian dan pangan yang belum optimal dan efektif.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Balikpapan, diketahui tren yang fluktuatif, dan cenderung mengalami penurunan. Artinya, pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan upaya untuk menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, melalui intervensi terhadap komponen-komponen yang menjadi penyebabnya. Namun demikian, apabila disandingkan dengan target nasional, ketercapaian indikator tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang ditentukan. Masih terdapat selisih sebesar 1,98% untuk memenuhi target nasional, yakni 5%. Berikut disajikan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Balikpapan.



Gambar 2. 6 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Balikpapan

Sumber: BPS, Kota Balikpapan 2024

Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Balikpapan yang masih memiliki gap terhadap target yang ditentukan, menjadikan perlunya upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan, untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan aman terhadap pangan yang berkualitas dan bergizi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi alternatif dari pengurangan permasalahan ini diantaranya dengan meningkatkan akses dan ketersediaan pangan melalui pembangunan infrastruktur pertanian, diversifikasi sumber pangan, penanggulangan kemiskinan, penyediaan pendidikan gizi, kebijakan pangan yang mendukung petani kecil.

2.1.4.3 Konsumsi Listrik Per Kapita

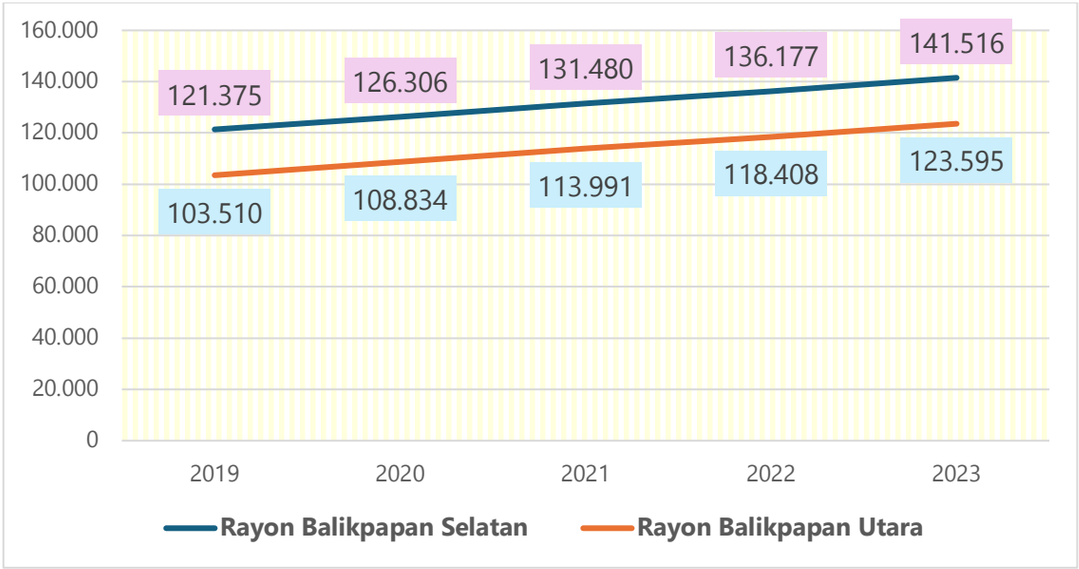
Dalam proses pembangunan suatu daerah, ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, industri, dan fasilitas publik yang ada. Sebagai salah satu kota dengan aktivitas perekonomian yang berkembang di Pulau Kalimantan, kebutuhan listrik Kota Balikpapan sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pelanggan setiap tahunnya. Jumlah pelanggan yang menggunakan listrik terus meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan listrik yang meningkat. Produksi listrik pada tahun 2020 mencapai 1.088.423.119 KWh dan secara bertahap meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 1.504.787.490 KWh pada akhir tahun 2023.

Tabel 2. 4 Kondisi Penyediaan Listrik di Tahun 2019-2023

Indikator	Rayon	2019	2020	2021	2022	2023
Daya Terpasang (KW)	Rayon Balikpapan Selatan	299.155.000	360.275.022	377.332.522	406.911.372	427.407.322
	Rayon Balikpapan Utara	217.322.000	253.489.750	281.048.500	274.779.550	295.334.400
	Jumlah	516.477.000	613.764.772	658.381.022	681.690.922	722.741.722
Produksi Listrik (KWh)	Rayon Balikpapan Selatan	662.436.628	634.329.711	899.728.999	951.983.433	1.004.674.090
	Rayon Balikpapan Utara	434.424.564	454.093.408	537.338.515	500.577.809	500.113.400
	Jumlah	1.096.861.192	1.088.423.119	1.437.067.514	1.452.561.242	1.504.787.490
Listrik Terjual (KWh)	Rayon Balikpapan Selatan	631.029.632	604.699.529	607.878.878	661.337.148	748.359.797
	Rayon Balikpapan Utara	420.782.083	441.608.722	506.627.264	467.315.011	477.217.477
	Jumlah	1.051.811.715	1.046.308.251	1.114.506.142	1.128.652.159	1.225.577.274
Susut/ Hilang (KWh)	Rayon Balikpapan Selatan	31.407.266	29.630.182	34.315.267	38.876.299	43.366.397
	Rayon Balikpapan Utara	13.642.481	12.484.686	19.800.095	17.376.358	17.246.559
	Jumlah	45.049.747	42.114.868	54.115.362	56.252.657	60.612.956

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Jumlah Pelanggan Listrik di wilayah Kota Balikpapan berdasar data PLN Area Balikpapan terdiri dari 2 Rayon yaitu Rayon Balikpapan Selatan dan Rayon Balikpapan Utara. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah pelanggan 2 rayon tersebut mengalami peningkatan sebagaimana tertera pada gambar grafik berikut ini.



Gambar 2. 7 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Rayon di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Hingga tahun 2023, jumlah pelanggan listrik rumah tangga mencapai 238.006, meningkat signifikan dari 204.281 pelanggan listrik rumah tangga pada tahun 2019. Jumlah pelanggan fasilitas publik juga meningkat pesat, mencapai 1.289 pelanggan pada tahun 2023, dari 1.089 pelanggan pada tahun 2019. Sektor bisnis juga mengalami peningkatan jumlah pelanggan setiap tahunnya, rata-rata meningkat 1.331 pelanggan, dengan total 21.711 pelanggan pada tahun 2023.

Tabel 2. 5 Jumlah Pelanggan Listrik Berdasarkan Kelompok Tarif Tahun 2019-2023

Kelompok Tarif	2019	2020	2021	2022	2023
Sosial	3.041	3.233	3.474	3.680	3.913
Rumah Tangga	204.281	213.850	222.361	229.500	238.006
Bisnis	16.388	16.859	18.385	20.064	21.711
Industri	86	85	87	91	94
Publik	1.089	1.113	1.164	1.222	1.289
Jumlah	224.885	235.140	245.471	254.557	265.013

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Lebih lanjut, pada sektor industri pelanggan terdapat 94 pelanggan. Sektor industri memiliki jumlah pelanggan yang paling sedikit dibandingkan dengan sektor lainnya, meningkat sedikit jika dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki 85 pelanggan. Melalui data ini, kelistrikan menjadi modal penting dalam merencanakan strategi pengembangan energi baru terbarukan yang telah menjadi tuntutan secara nasional.

2.1.4.4 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

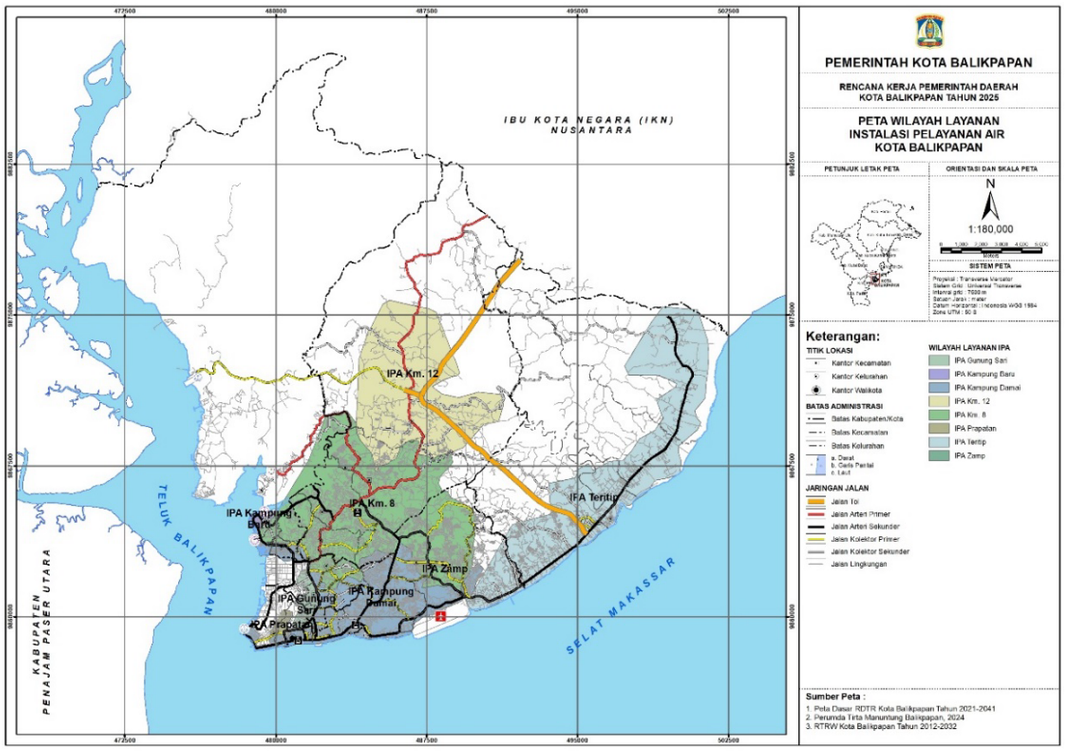
Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah air bersih. Ketersediaan air bersih sangat penting sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Air bersih tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga dapat digunakan untuk produksi, seperti digunakan untuk aktivitas bisnis.

Tabel 2. 6 Konsumen Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2023

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air yang Disalurkan (m^3)	Nilai (Rp)
Sosial	1.583	1.279.314	3.580.888.164
Rumah Tangga	109.069	24.840.419	272.615.673.691
Instansi Pemerintah	263	417.516	2.034.237.393
Niaga	4.913	1.936.764	27.630.525.218
Industri	14	11.891	215.626.657
Khusus	547	335.256	6.423.996.167
Jumlah	116.389	28.821.160	312.500.947.290

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

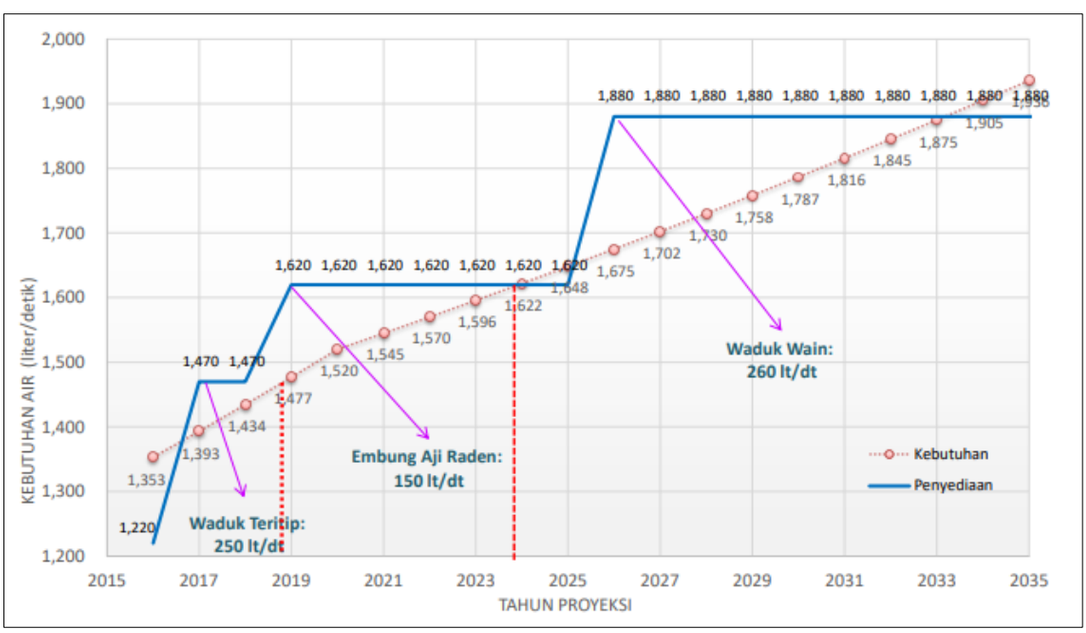
Jumlah pelanggan air bersih di Kota Balikpapan pada tahun 2023 mencapai 116.389 pelanggan. Total pelanggan tersebut didominasi pelanggan rumah tangga sebanyak 109.069 pelanggan dan niaga sebanyak 4.913 pelanggan. Total air yang disalurkan mencapai 28.821.160m^3 dengan total nilai yang dihasilkan sebesar Rp 312.500.947.290. Adapun gambaran wilayah cakupan layanan instalasi air bersih Kota Balikpapan dapat dilihat pada peta berikut ini.



Gambar 2. 8 Peta Wilayah Layanan Instalasi Air Bersih Kota Balikpapan

Sumber: Dokumen RKPD Tahun 2025

Dokumen RISPAM menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan SPAM di daerah masing-masing. Adapun tujuan pengembangan SPAM di antaranya mencakup, tersedianya air dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memenuhi persyaratan air minum, tersedianya air setiap waktu atau kesinambungan dan tersedianya air dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat atau pemakai. Berikut pola skenario penyediaan air minum di Kota Balikpapan pada Tahun 2016-2035.



Gambar 2. 9 Skenario penyediaan air minum Kota Balikpapan

Sumber: RISPAM Kota Balikpapan Tahun 2016-2035

Kondisi eksisting pola penyediaan air minum Kota Balikpapan Tahun 2016 mencakup PDAM (76%), Perpipaan Non PDAM (12%) dan Non Perpipaan (12%). Terdapat tantangan dalam penyediaan air minum Kota Balikpapan, di antaranya keterbatasan sumber air baku, kualitas air permukaan dan air tanah, kehilangan air 30%, topografi berupa 85% berbukit dan keandalan penyediaan listrik. Berikut disajikan analisis pola penyediaan air minum di Kota Balikpapan hingga tahun 2035.

Tabel 2. 7 Pola Penyediaan Air Minum Kota Balikpapan

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan (Liter/detik)	Pemenuhan Kebutuhan		
			PDAM (Liter/detik)	Perpipaan Non PDAM (Liter/detik)	Non Perpipaan (Liter/detik)
2016	625.968	1.781	1.220	214	214
2035	917.996	2.459	1.936	363	121

Sumber: RISPAM Kota Balikpapan Tahun 2016-2035

Kebijakan untuk meningkatkan penyediaan air minum Kota Balikpapan di antaranya dengan meningkatkan layanan PDAM, pengendalian jaringan perpipaan PDAM dengan menggunakan air laut sebagai sumber air baku alternatif (10% air tanah dan 5% air laut), mengendalikan bukan jaringan perpipaan. Peningkatan layanan PDAM di antaranya dengan pemanfaatan *iddle capacity* dari sumber air baku eksisting, pengendalian kehilangan air secara bertahap (0,5% per tahun), dan pembangunan sumber air baku yang mencakup Bendungan Teritip (250 liter/detik), Embung Aji Raden (150 liter/detik) dan Waduk Wain (130 liter/detik) yang ditargetkan beroperasi tahun 2025. Selain itu, dilakukan kerjasama dengan Waduk Semboja (100 liter/detik), Waduk Sepaku Semoi (150 liter/detik), Waduk Lambakan (1000 liter/detik) dan SPAM Regional Tebasabo (1700 liter/detik).

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup merupakan bagian dari urusan wajib non pelayanan dasar yang sangat penting. Saat ini isu lingkungan hidup menjadi isu nasional dan global. Bahkan dalam setiap agenda pembangunan, aspek lingkungan hidup juga menjadi aspek yang selalu dipertimbangkan, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan pengelolaan persampahan menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur pengelolaan lingkungan di suatu daerah.

2.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penilaian kualitas lingkungan hidup di antaranya dapat diukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (*Environmental Quality Index*). IKLH dapat dimaknai sebagai ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kualitas lingkungan dalam suatu daerah. Adapun cakupan dalam IKLH terdiri atas indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

Tabel 2. 8 Capaian parameter indeks kualitas lingkungan hidup Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara	88,92	88,52	84,29	89,98	86,28
Indeks Kualitas Air	40,9	49,4	50,0	54,5	54,49
Indeks Tutupan lahan	65,33	69,49	50,32	48,91	59,2
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,09	69,18	63,96	67,64	68,40

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan mencatat bahwa IKLH Kota Balikpapan memiliki tren yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Kriteria capaian IKLH Kota Balikpapan tergolong sedang dari tahun 2020 hingga 2024. Kriteria IKLH tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Ketiga indikator pembentuk IKLH Kota Balikpapan, memiliki capaian yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2023. Capaian indeks kualitas air didominasi berkategori kurang dari tahun 2020-2024. Kondisi tersebut menunjukkan nilai sekaligus predikat kualitas air di Kota Balikpapan masih perlu untuk dioptimalkan, sehingga dapat memberikan dampak secara nyata terhadap kualitas air di Kota Balikpapan.

Penurunan nilai sekaligus predikat kualitas air tersebut dapat disebabkan karena telah terjadi kontaminasi dari zat pencemar terhadap tubuh air di Kota Balikpapan. Beberapa hal yang menyebabkan pencemaran ini adalah pertambahan jumlah penduduk yang selanjutnya berdampak pada bertambahnya limbah cair domestik. Belum terkelolanya air limbah secara komunal, menjadi persoalan selanjutnya yang memperparah kondisi kualitas air di Kota Balikpapan.

Selain itu, masih terdapat praktik usaha ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kladasan Kecil dan Kladasan II, yang diperkirakan limbahnya masuk ke Sungai Klandasan Kecil. Berdasarkan hasil pengukuran air limbah dari usaha kegiatan tersebut, beberapa parameternya melebihi baku mutu air limbah. Kenyataan tersebut menggambarkan masih adanya usaha ilegal yang limbah kegiatannya secara langsung mencemari Sungai Klandasan Kecil. Meskipun

berada di tengah kota, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air masih sangat kurang. Masih banyak kegiatan komersil, terutama usaha skala kecil seperti rumah makan, bengkel, dan kos-kosan mengolah air limbah dengan sarana dan prasarana yang sangat minim.

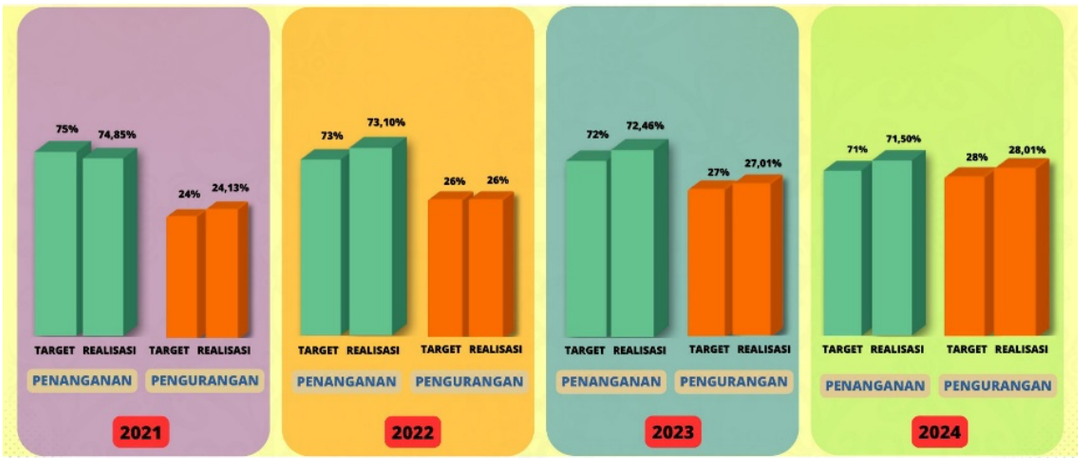
Indeks kualitas udara (IKU) juga mengalami penurunan di tahun 2024. Penurunan indeks kualitas udara tersebut disebabkan karena indikasi pencemaran udara di Kota Balikpapan. Sektor industri merupakan salah satu kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas udara di Kota Balikpapan. Pertumbuhan pembangunan sektor industri yang relatif cepat, memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas udara di Kota Balikpapan melalui emisi yang dihasilkan oleh sektor industri. Tercatat penyumbang emisi terbesar adalah bidang manufaktur sebesar 68,7 persen, kemudian transportasi sebesar 11,7 persen dan permukiman serta usaha dan kelembagaan sebesar 8 persen. Aktivitas pengilangan minyak dari Pertamina Refinery Unit IV juga menyumbangkan emisi yang cukup besar. Dengan demikian, berbagai upaya yang berkaitan untuk menjaga kualitas udara di Kota Balikpapan perlu untuk kembali dipertahankan bahkan ditingkatkan demi terwujudnya penurunan emisi yang signifikan dan berimplikasi terhadap kualitas udara di Kota Balikpapan yang kembali berkategori sangat baik.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) menjadi salah satu aspek yang memiliki nilai fluktuatif dan meningkat di tahun 2024. Namun demikian, peningkatan tersebut, belum menjadikan kualitas tutupan lahan di Kota Balikpapan berada pada kategori sangat baik. Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan belum optimalnya capaian indikator kualitas tutupan lahan di Kota Balikpapan diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penebangan hutan (pengupasan lahan) dan perusakan ekosistem lahan mangrove. Kedua hal tersebut diindikasikan menjadi penghambat capaian IKTL di Kota Balikpapan, sehingga menjadi belum optimal hingga pada tahun 2024. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan regulasi perlindungan hutan dan upaya rehabilitasi lahan kritis perlu untuk dioptimalkan agar dapat lebih meningkatkan capaian IKTL Kota Balikpapan menjadi kategori baik. Adapun penurunan capaian IKTL tahun 2024, dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan terdapat 11 data input ITL yang tidak diakui menjadi IKTL Kota Balikpapan oleh KLHK, yang berimplikasi terhadap perubahan luasan pada RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN) yang semula pada aplikasi IKL seluas 2811,8928 Ha menjadi 618, 3247 Ha.

2.1.5.2 Pengelolaan Sampah dan Limbah

Pengelolaan sampah dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Pengelolaan sampah secara individu (mandiri) dapat diimplementasikan melalui pemilahan sampah maupun pengolahan sampah secara mandiri. Adapun

cara selanjutnya yaitu pengelolaan sampah secara kolektif yang dikelola oleh komunitas hingga level pemerintah. Pengelolaan ini dapat direalisasikan melalui tempat pembuangan sementara (TPS) sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Berikut disajikan capaian volume sampah yang berhasil ditangani di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020.



Gambar 2. 10 Pengelolaan Sampah di Sumbernya

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2021

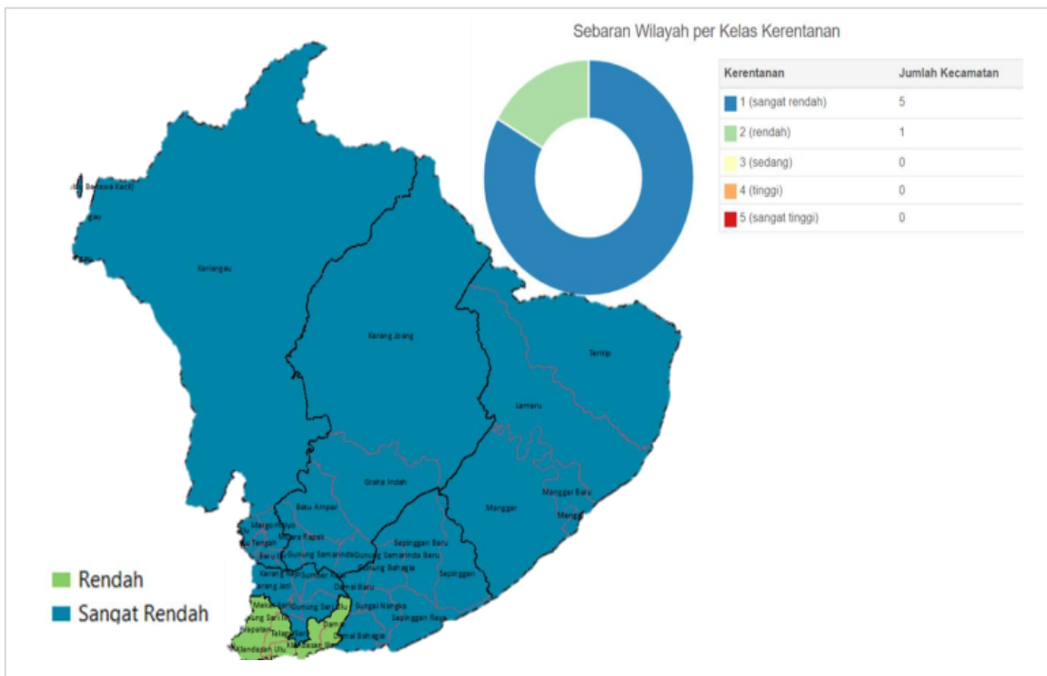
Persentase pengelolaan sampah di sumbernya di Kota Balikpapan belum mencapai hasil yang diharapkan hingga tahun 2024. Masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam pengolahan dan pemilahan sampah menjadi penyebab terhadap masih belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Balikpapan. Kondisi tersebut dibuktikan dengan masih tingginya volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, belum optimalnya pemilahan sampah di *Material Recovery Facility* (MRF), serta banyaknya bank sampah yang tidak aktif.

Ketersediaan pusat daur ulang sampah juga masih minim di Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki Pusat Daur Ulang (PDU) guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan mengontrol harga pasar di bank sampah. Adanya PDU dapat menarik minat masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah karena masyarakat dapat secara langsung melihat dan merasakan manfaat ekonomi dari sampah yang didaur ulang.

Selain persampahan, layanan pengelolaan air limbah di Kota Balikpapan saat ini terdiri dari air limbah terpusat dengan jumlah sambungan rumah 1.308 SR yang dilayani oleh IPAL Margasari. Selebihnya dengan sistem setempat baik yang individu mapun komunal. Prasarana air limbah komunal terdapat di 29 lokasi yang tersebar di Kelurahan Klandasan Ulu (1 unit), Kelurahan Batu Ampar (2 unit), Kelurahan Gunung Bahagia (4 unit), Kelurahan Klandasan Ilir (1 unit), Kelurahan Margo Mulyo (6 unit). Kelurahan Damai (2 unit), Kelurahan Sepinggan (5 unit), Kelurahan Manggar (2 unit), Kelurahan Sungai Nangka (4 unit), Kelurahan Damai Baru (1 unit), Kelurahan Gunung Samarinda (1 unit).

2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Tahun 2019 menjadi tahun tertinggi angka bencana di Kota Balikpapan. Bencana yang paling sering terjadi pada tahun 2019 adalah kebakaran hutan dan lahan yaitu sebanyak 125 kali. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya terjadi 70 kali. Tingginya angka bencana kebakaran hutan dan lahan ini tentu saja mengancam produktivitas lahan di Kota Balikpapan. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tertulis bahwa kebakaran hutan/lahan termasuk dalam bencana alam dan non-alam yang ditulis secara serangkai, sehingga kebakaran hutan dan lahan merupakan satu istilah yang tidak dipisahkan. Jenis bencana lainnya yang juga kerap terjadi adalah kebakaran pemukiman/gedung. Dari data BPBD, kejadian kebakaran pemukiman/gedung terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 39 kali terjadi kebakaran pemukiman/gedung, lalu meningkat tahun 2016 menjadi 44 kali. Hingga tahun 2019, kebakaran pemukiman/gedung di Kota Balikpapan sebanyak 51 kali.



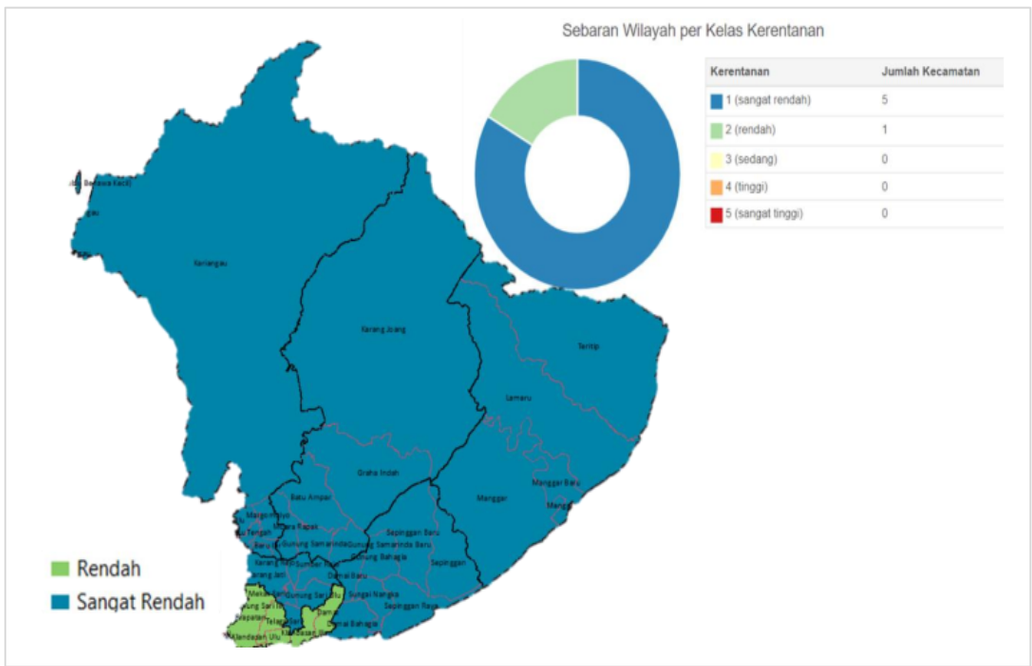
Gambar 2. 11 Peta indeks kerentanan perubahan iklim di Kota Balikpapan

Sumber: KLHS RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029

Selain risiko bencana, Kota Balikpapan juga memiliki potensi dampak perubahan iklim global. Beberapa dampak perubahan iklim tersebut, lebih lanjut lagi juga memberikan dampak kebencanaan bagi suatu daerah termasuk di Kota Balikpapan. Kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, hingga bencana kekeringan merupakan beberapa contoh bencana yang dapat terjadi akibat perubahan iklim di Kota Balikpapan. Dengan demikian berbagai upaya sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di Kota Balikpapan perlu untuk dilakukan.

2.1.6.1 Penurunan Intensitas Emisi GRK

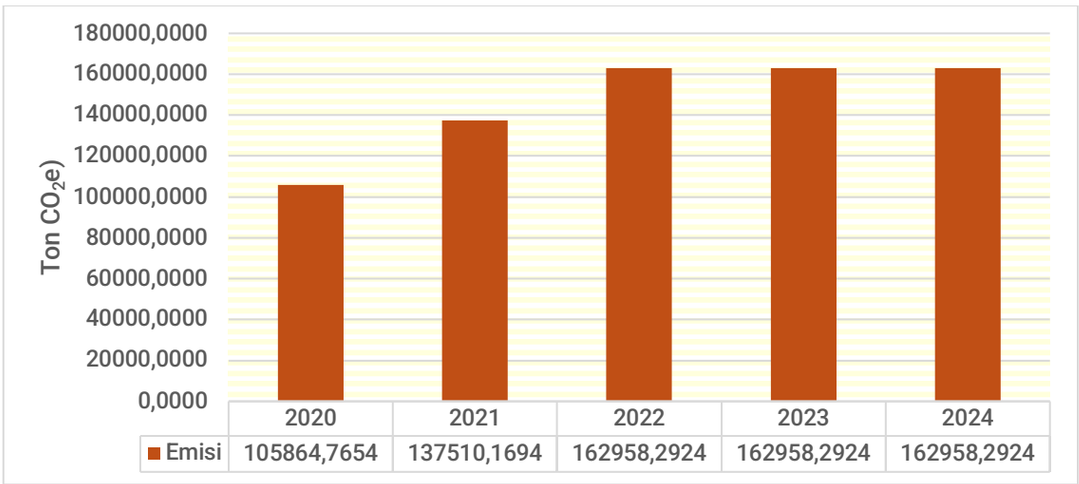
Dalam beberapa tahun terakhir, isu iklim semakin menguat disebabkan oleh peningkatan suhu global, peningkatan kejadian cuaca ekstrem, dan bencana alam. Fenomena ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan, mengingat dampak iklim yang sudah terjadi dan secara langsung dirasakan oleh manusia dan lingkungan hidup. Gangguan yang diakibatkan pada sistem cuaca dan meningkatnya frekuensi kejadian ekstrem diperkirakan akan mengganggu produksi pangan global, memperburuk kelangkaan air, meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan bencana alam, serta mengganggu kenyamanan berkehidupan.



Gambar 2. 12 Peta indeks kerentanan perubahan iklim di Kota Balikpapan

Sumber: KLHS RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029

Salah satu faktor pendorong perubahan iklim, diantaranya peningkatan suhu global, yang mana peningkatan suhu tersebut dipengaruhi oleh beberapa aktivitas, termasuk emisi gas rumah kaca yang meningkat. Kota Balikpapan juga memiliki potensi dampak perubahan iklim global. Sebagai bentuk respon terhadap potensi dampak perubahan iklim tersebut, maka diperlukan upaya yang berkaitan dengan aksi-aksi pernurunan intensitas emisi GRK.



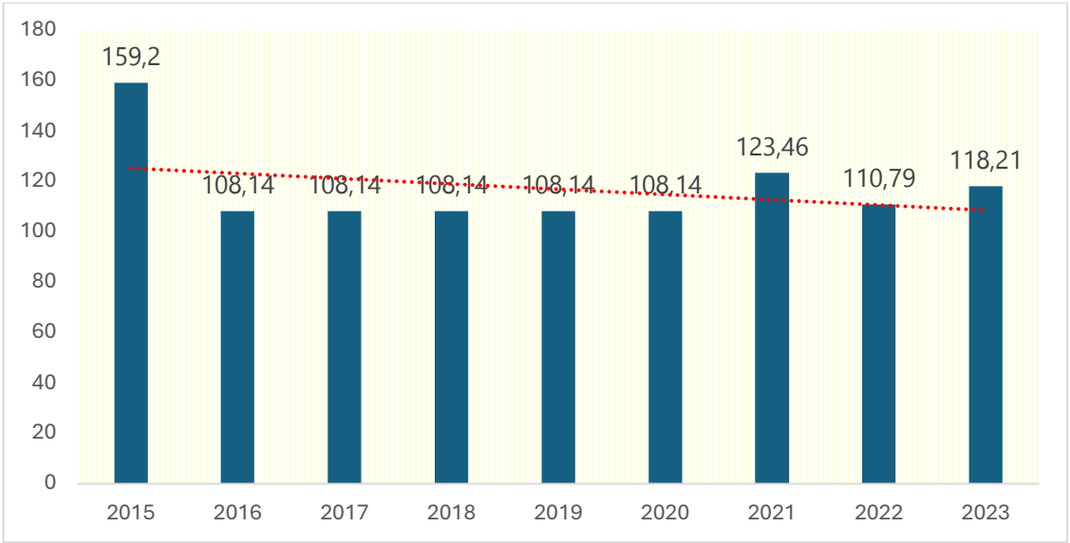
Gambar 2. 13 Potensi penurunan emisi

Sumber: Bappenas, 2025

Upaya terhadap penurunan intensitas emisi GRK, diantaranya dapat dilakukan terhadap berbagai sektor pembangunan, yang sekiranya dinilai memberikan kontribusi besar terhadap emisi GRK di Kota Balikpapan. Apabila tidak dilakukan respon yang tepat terhadap pengurangan emisi GRK dalam berbagai sektor pembangunan tersebut, dikhawatirkan Kota Balikpapan dapat mengalami dampak signifikan dari dinamika perubahan iklim global. Beberapa dampak perubahan iklim tersebut, lebih lanjut lagi juga memberikan dampak kebencanaan bagi suatu daerah termasuk di Kota Balikpapan. Kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, hingga bencana kekeringan merupakan beberapa contoh bencana yang dapat terjadi akibat perubahan iklim di Kota Balikpapan. Dengan demikian berbagai upaya sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di Kota Balikpapan perlu untuk dilakukan.

2.1.6.2 Indeks Risiko Bencana

Wilayah rawan bencana alam adalah wilayah yang mempunyai pola kejadian bencana yang terjadi dari tahun ke tahun sebagai akibat dari karakteristik fisik dan sosial daerah tersebut. Salah satu indikator yang menilai terkait kerawanan bencana adalah Indeks Kerawanan Bencana Indonesia (IRBI). Indeks risiko bencana Kota Balikpapan tahun 2015-2023 disajikan sebagai berikut ini.



Gambar 2. 14 Indeks risiko bencana Kota Balikpapan Tahun 2015-2023

Sumber: BNPB, 2024

Indeks risiko bencana di Kota Balikpapan memiliki tren yang cenderung menurun, dan termasuk dalam kategori sedang hingga capaian termutakhir di tahun 2023. Artinya, kapasitas dalam penanggulangan bencana yakni dari sisi struktural maupun non struktural semakin optimal di Kota Balikpapan. Adapun nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan seperti yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2020.

2.1.6.3 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks ketahanan daerah merupakan komponen dari tingkat kapasitas daerah dinilai berdasarkan capaian para pemangku kebijakan (instansi/lembaga) di level pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu. Ketahanan daerah Kota Balikpapan berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah sebesar 0,630 yang berarti kapasitas daerah berada pada kelas Sedang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dan komponen terkait pengurangan risiko bencana di Kota Balikpapan belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan dukungan kebijakan sistematis. Capaian yang diperoleh masih dapat ditingkatkan dengan meningkatkan komitmen dan pelaksanaan kebijakan yang lebih komprehensif sehingga dapat memaksimalkan pengurangan dampak negatif dari bencana, terutama untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana serta perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

2.1.7 Demografi

Demografi memiliki peran penting dalam perencanaan di suatu wilayah karena perubahan struktur penduduk secara langsung memengaruhi kebutuhan akan infrastruktur, layanan publik, serta tata guna lahan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, kepadatan, dan pola migrasi menentukan bagaimana suatu wilayah berkembang dan beradaptasi terhadap tantangan masa depan.

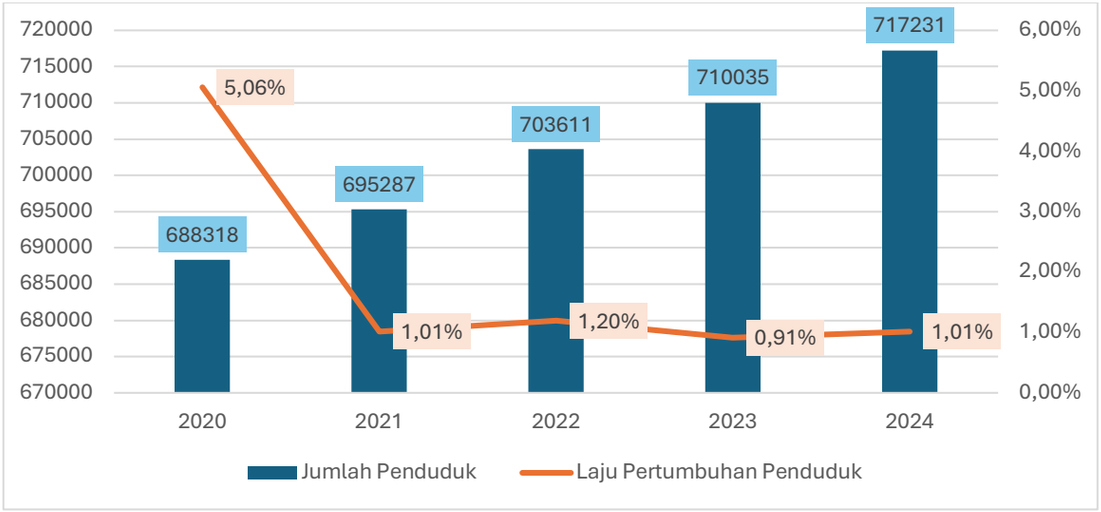
Wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi memerlukan perencanaan yang matang dalam penyediaan perumahan, transportasi, dan fasilitas umum. Selain itu, pergerakan penduduk dari desa ke kota menciptakan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi yang harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, integrasi data demografi dalam proses perencanaan di suatu wilayah menjadi suatu keharusan guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.

Demografi di Kota Balikpapan bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, serta migrasi penduduk baik masuk maupun keluar daerah. Data kependudukan mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan komposisi penduduk. Informasi demografi yang tersedia akan menjadi dasar dalam perencanaan proyeksi kependudukan untuk lima tahun ke depan di Kota Balikpapan.

2.1.7.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator utama dalam analisis demografi suatu wilayah. Jumlah penduduk mencerminkan besaran populasi yang menetap di suatu daerah pada periode tertentu, sedangkan laju pertumbuhan penduduk menggambarkan dinamika perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk. Analisis terhadap kedua aspek ini penting untuk memahami perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan infrastruktur serta layanan publik di suatu wilayah. Dengan mengetahui tren pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Badan Pusat Statistik melalui laporan tahunan Kota Balikpapan dalam Angka 2025 menyebutkan bahwa terdapat 717.231 penduduk yang berada di Kota Balikpapan pada tahun 2024. Data tersebut merupakan gabungan dari 366.045 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 351.186 lainnya adalah perempuan. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan sebanyak 7.196 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Banyaknya jumlah penambahan jumlah penduduk di Kota Balikpapan dipengaruhi oleh persentase laju pertumbuhan penduduk. Berikut merupakan grafik jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga 2024 di Kota Balikpapan.



Gambar 2. 15 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan 2020-2024

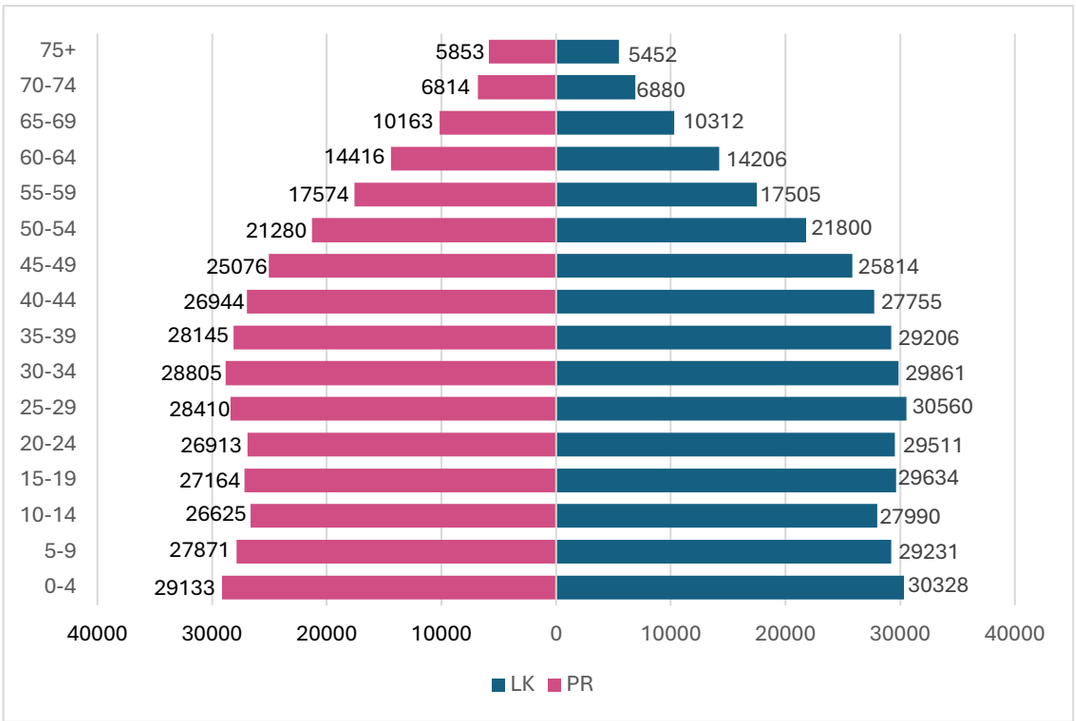
Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka, 2025, diolah

Jumlah penduduk di Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan pada rentang tahun 2020-2024. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi di Kota Balikpapan terjadi pada tahun 2020, yakni bertambah hingga 33.140 jiwa dengan laju pertumbuhan mencapai 5,06 persen. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan mengalami fluktuasi akibat adanya pendataan ulang melalui sensus penduduk 10 tahunan. Adanya sensus penduduk pada tahun 2020 menyebabkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2019. Hal itu mengindikasikan bahwa data kependudukan tahun 2019 yang menggunakan angka proyeksi dengan data dasar sensus penduduk tahun 2010 lebih kecil dibandingkan jumlah riil penduduk sebelum dilakukan sensus penduduk 2020. Implikasi lain dari pembaharuan data kependudukan melalui sensus penduduk tersebut adalah adanya laju pertumbuhan penduduk yang lebih stabil pada tahun 2021 hingga 2024. Hal itu dibuktikan dengan laju pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan yang cenderung berada pada angka 0,9 persen hingga 1,20 persen setelah basis data sensus penduduk 10 tahunan diperbaharui. Selain itu, adanya disrupsi pandemi Covid-19 juga turut andil dalam lebih rendahnya laju pertumbuhan penduduk dibandingkan sebelum sensus.

2.1.7.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merujuk pada pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, seperti aspek geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Komposisi penduduk di suatu wilayah dapat dianalisis melalui kategori usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk memberikan gambaran mengenai berbagai aspek, seperti proporsi tenaga kerja produktif dan non-produktif, potensi bonus demografi, serta angka ketergantungan. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan

penetapan kebijakan. Komposisi penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2024 berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2. 16 Piramida Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2024

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2025

Komposisi penduduk di Kota Balikpapan berdasarkan usia dan jenis kelamin pada tahun 2024 menunjukkan bentuk struktur piramida stasioner. Bentuk piramida yang demikian mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk relatif stabil antara kelompok usia produktif maupun non produktif. Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin di Kota Balikpapan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni sebesar 69,79 persen dengan rincian 51,11 persen di antaranya laki-laki dan 48,89 persen lainnya adalah perempuan. Penduduk yang berada dalam usia non-produktif didominasi oleh kelompok usia 0-14 tahun yang mencapai 23,87 persen, sedangkan kelompok usia non-produktif lansia hanya 6,34 persen. Usia produktif dianggap sebagai masa seorang individu memasuki usia kerja, yakni 15-64 tahun. Kelompok usia produktif yang lebih banyak dibandingkan non produktif menunjukkan bahwa Kota Balikpapan sedang dalam fase bonus demografi, terutama ketika mempertimbangkan besaran angka ketergantungan yang dimiliki. Data pada piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki angka ketergantungan sebesar 38,54 persen. Angka ketergantungan yang masih berada di bawah angka 45 persen menunjukkan bahwa Kota Balikpapan mengalami bonus demografi pada tahun 2024. Bonus demografi mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan Kota

Balikpapan, tetapi bonus demografi juga perlu dikelola dengan baik karena akan memengaruhi kondisi di Kota Balikpapan ke depannya.

2.1.7.3 Rasio Penduduk

Rasio penduduk di Kota Balikpapan dapat dianalisis melalui perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Penghitungan rasio ini berperan dalam memahami proporsi penduduk laki-laki dan perempuan, yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih terarah. Perbandingan jumlah penduduk ini tercermin dalam data rasio jenis kelamin atau *sex ratio* yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Informasi mengenai *sex ratio* penduduk Kota Balikpapan, berdasarkan data awal tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 9 Sex Ratio Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2020	352.802	335.516	688.318	105,15
2021	355.848	339.439	695.287	104,83
2022	359.563	344.048	703.611	104,51
2023	362.767	347.268	710.035	104,54
2024	366.045	351.186	717.231	104,54

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2021-2025

Angka *sex ratio* di Kota Balikpapan mengalami penurunan pada rentang tahun 2020 hingga 2024. Angka *sex ratio* yang mencapai 105,15 poin pada tahun 2020 menunjukkan adanya 105 hingga 106 laki-laki untuk setiap 100 perempuan yang ada di Kota Balikpapan. Penurunan angka *sex ratio* yang semakin mendekati angka 100 mengindikasikan adanya keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Balikpapan. Penurunan angka *sex ratio* dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti banyaknya kelahiran bayi perempuan yang ada di Kota Balikpapan, bertambahnya jumlah penduduk perempuan melalui migrasi masuk, dan adanya penurunan jumlah laki-laki di wilayah tersebut yang dapat diakibatkan oleh peningkatan angka mortalitas maupun peningkatan migrasi keluar wilayah

2.1.7.4 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan indikator yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk menghitung jumlah individu pada suatu populasi dibagi dengan satuan luas atau ruang yang ditempati pada periode tertentu. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Balikpapan pada rentang tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 Tingkat Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Balikpapan Selatan	38,81	145.007	3.689,75	146.689	3.732,54	148.650	3.782,44	158.320	4.079,36	163.660	4.164,38
2	Balikpapan Timur	119,16	90.243	752,09	92.542	771,25	95.064	792,27	102.959	864,04	106.968	891,47
3	Balikpapan Utara	138,24	169.150	1.237,65	172.117	1.259,36	175.440	1.283,68	188.605	1.364,33	195.158	1.427,95
4	Balikpapan Tengah	10,83	106.952	9.8748,25	106.960	9.848,99	107.155	9.866,94	105.749	9.764,45	106.282	9.814
5	Balikpapan Barat	192,88	94.123	488,09	94.130	488,12	94.302	489,02	85.078	441,09	99.404	515
6	Balikpapan Kota	11,1	82.843	7.292,52	82.849	7.293,05	83.000	7.306,34	97.821	8.812,70	85.946	7.743
Kota Balikpapan		511,01	688.318	1.346,98	695.287	1.360,61	703.611	1.376,90	738.532	1.445,24	757.418	1.482,2

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2021-2025

Kepadatan penduduk di Kota Balikpapan mengalami tren peningkatan pada tahun 2020 hingga 2024. Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Balikpapan, yakni mencapai 9.814 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024. Pada sisi yang berlawanan, tingkat kepadatan penduduk terendah ditempati oleh Balikpapan Barat yang hanya mencapai 5,25 persen dari tingkat kepadatan penduduk di Balikpapan Tengah. Perbedaan tingkat kepadatan yang cukup tinggi tersebut dikarenakan luas wilayah antara dua wilayah tersebut juga berbeda. Selain itu faktor kondisi ekonomi, lingkungan, geografis, politik juga dapat memengaruhi persebaran penduduk di Kota Balikpapan.

2.1.7.5 Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat merujuk pada kelompok atau komunitas yang tumbuh tak terpisahkan dan memiliki hubungan organik dengan lingkungannya. Masyarakat adat cenderung memiliki ikatan yang kuat antar anggota kelompoknya dan bersifat sukarela. Umumnya setiap anggota masyarakat adat memiliki hukum adat yang mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai macam persoalan yang terjadi pada lingkungan adat terkait. Kota Balikpapan belum memiliki masyarakat adat yang dikukuhkan dalam masyarakat hukum adat (MHA) melalui peraturan daerah. Hal itu dikarenakan Kota Balikpapan memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dan multikultur layaknya kota besar lainnya. Daya tarik Kota Balikpapan sebagai daerah perkotaan mendorong berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda, baik dari segi suku, etnis, dan budaya berkumpul dan menjadi penduduk di Kota Balikpapan. Meskipun begitu, mengacu pada sejarah Kota Balikpapan, penamaan Balikpapan berasal dari Suku Balik yang mendiami pesisir Kota Balikpapan. Penambahan kata papan dikarenakan Suku Balik pada zaman dahulu kerap membuat papan untuk menyuplai kebutuhan kerajaan saat itu, yakni Kerajaan Kutai. Namun, ketika ditarik garis historis yang jauh, Suku Balik juga bukan suku asli dari Kota Balikpapan, melainkan dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

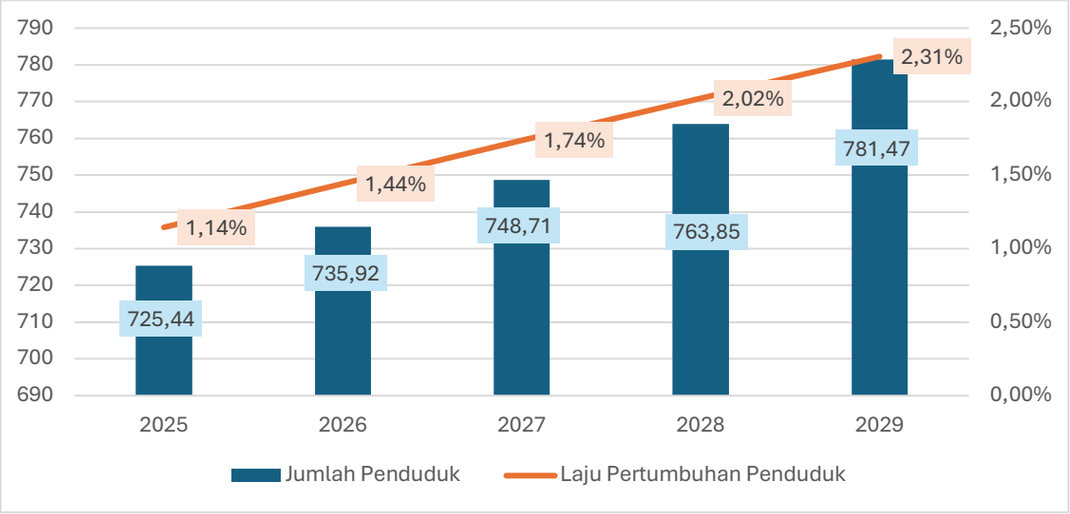
2.1.7.6 Proyeksi Penduduk

Proyeksi demografi berfokus untuk menganalisis perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan pengelompokannya, seperti data penduduk berdasarkan jumlah, kepadatan penduduk, dan penduduk berdasarkan umur di Kota Balikpapan. Data tersebut dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui kondisi penduduk lanjut usia, penduduk usia sekolah, angka ketergantungan, dan bonus demografi. Berikut merupakan hasil proyeksi kependudukan di Kota Balikpapan selama rentang tahun 2025 hingga 2029

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan penduduk

Analisis terhadap dinamika kependudukan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Salah satu aspek yang penting untuk dianalisis adalah jumlah, laju pertumbuhan penduduk, dan tingkat kepadatan

penduduk. Masing-masing dari indikator tersebut memberikan gambaran kondisi kependudukan yang berbeda-beda dan saling melengkapi satu sama lain. Proyeksi demografi Kota Balikpapan memanfaatkan data kependudukan tahun 2020 sebagai data dasar. Berikut merupakan hasil proyeksi demografi Kota Balikpapan pada aspek jumlah dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2025 hingga 2029.



Gambar 2. 17 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk pada periode 2025 hingga 2029. Hal serupa terjadi dengan laju pertumbuhan penduduknya yang diproyeksikan secara konsisten mengalami peningkatan selama periode yang sama dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,73 persen. Jumlah penduduk di Kota Balikpapan diproyeksikan bertambah sebanyak 56,03 ribu jiwa selama periode 2025-2029. Hasil proyeksi yang demikian tetap mempertimbangkan *total fertility rate* (TFR) yang berada pada angka 2,04. TFR mengindikasikan bahwa pada tahun 2025 hingga 2029, populasi di Kota Balikpapan akan cenderung bertumbuh. Hal itu dikarenakan TFR menunjukkan jumlah anak secara rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada masa reproduksinya. Angka TFR 2,04 merujuk rata-rata seorang perempuan di Kota Balikpapan melahirkan dua orang anak yang diharapkan mampu meneruskan keturunan sehingga menjaga laju pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan.

Proyeksi jumlah dan laju penduduk di atas dijabarkan lebih rinci dengan pembagian jenis kelamin per kecamatan di Kota Balikpapan. Penjabaram proyeksi

kota ke tingkat kecamatan dilakukan dengan memperhatikan struktur jenis kelamin dasar dan pola persebaran historis. Proporsi laki-laki dan perempuan per kecamatan pada tahun dasar digunakan sebagai bobot awal, lalu disesuaikan secara iteratif agar jumlahnya setiap tahun tetap memiliki jumlah yang tepat ketika dijumlahkan pada proyeksi kota, serta tetap konsisten dengan laju pertumbuhan penduduk di level kota. Dengan pendekatan ini, setiap kecamatan memperoleh proyeksi laki-laki dan perempuan yang merefleksikan dua hal sekaligus, yakni pertumbuhan agregat kota melalui laju pertumbuhan penduduk dan kekhasan struktur gender spasial setempat.

b. Kepadatan Penduduk

Aspek demografi yang juga menjadi pokok pertimbangan kebijakan adalah tingkat kepadatan penduduk. Kota Balikpapan yang menyandang status sebagai kota besar dan menjadi salah satu mitra IKN memiliki peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan harus didasarkan pada kondisi kependudukan dalam hal ini tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan geografis daerah. Berikut merupakan hasil proyeksi kepadatan penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2025 hingga 2029.

Tabel 2. 11 Proyeksi Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	2025	2026	2027	2028	2029
Balikpapan Selatan	38,81	3988,10	4073,85	4158,77	4257,00	4369,23
Balikpapan Timur	119,16	840,27	867,73	895,05	925,25	958,59
Balikpapan Utara	138,24	1327,97	1363,43	1398,56	1438,11	1482,35
Balikpapan Tengah	10,83	9920,68	9721,24	9747,55	9803,97	9890,30
Balikpapan Barat	192,88	501,37	505,75	510,05	515,95	523,48
Balikpapan Kota	11,1	7460,63	7485,95	7510,18	7558,02	7629,37
Kota Balikpapan	511,01	1419,62	1440,11	1465,14	1494,80	1529,29

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035;
hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kota Balikpapan terpusat di wilayah perkotaan. Pola kepadatan penduduk dari hasil proyeksi di atas sejalan dengan pola kepadatan penduduk eksisting saat ini. Dari 6 kecamatan, terdapat tiga kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi secara berurutan, yaitu Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Kota, dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Selatan disebabkan oleh wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Balikpapan Kota, yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Kota Balikpapan. Sementara Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah merupakan kecamatan-kecamatan yang wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan, seperti Kecamatan Balikpapan Barat.

Dalam konteks perkotaan, pertambahan penduduk akan selalu meningkat karena kota selalu memiliki daya tarik bagi masyarakat terutama seperti Kota Balikpapan. Kota menyediakan berbagai fasilitas layanan dasar yang memadai dan berkualitas sehingga membuat sebuah kota selalu diminati masyarakat untuk ditempati. Di satu sisi, daya tarik kota menjadi peluang dalam meningkatkan perekonomian daerah karena adanya mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Namun di sisi lain menimbulkan tantangan bahkan permasalahan khas perkotaan, seperti wilayah kumuh, kriminalitas, perilaku agresif dan sejenisnya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepadatan penduduk. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan sehingga permasalahan khas perkotaan dapat diminimalisir untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni.

c. Penduduk Usia Produktif

Proyeksi penduduk yang dapat menjadi dasar kebijakan di Kota Balikpapan salah satunya adalah proyeksi penduduk usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif menjadi salah satu kriteria yang diproyeksi karena mampu memberikan gambaran penduduk yang masuk dalam usia kerja di Kota Balikpapan. Penduduk usia kerja tersebut berada di antara usia 15-64 tahun. Berikut merupakan hasil proyeksi penduduk berdasarkan komposisi umur yang termasuk pula penduduk usia produktif di Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Tabel 2. 12 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Komposisi Umur Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Komposisi umur	2025	2026	2027	2028	2029
0-14	171,32	171,93	172,96	174,43	176,33
15-64	505,82	512,64	521,21	531,57	543,89
65+	48,3	51,35	54,54	57,85	61,25
Angka ketergantungan	43,42%	43,55%	43,65%	43,70%	43,68%

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi penduduk usia produktif yang berada pada usia 15-64 tahun menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia kerja diproyeksikan sebanyak 505,82 ribu jiwa dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,67 persen. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk usia non produktif pada rentang usia 10-14 tahun pada tahun 2020-2025. Kelompok penduduk usia tersebut memasuki usia produktif dan ikut menyumbang proporsi dan jumlah penduduk usia produktif sebelumnya.

Implikasi dari semakin banyaknya jumlah penduduk usia produktif yakni semakin banyak pula penduduk usia kerja yang ada di Kota Balikpapan. Banyaknya penduduk usia produktif yang diproyeksikan mencapai 69,60 persen pada tahun 2029 dari total keseluruhan jumlah penduduk dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat tersebut dapat diperoleh apabila jumlah penduduk usia produktif yang tersedia juga memiliki kualitas yang baik dan mampu mengoptimalkan kesempatan yang ada pada aspek ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka pada kondisi eksisting perlu mendapatkan perhatian lebih jauh, terutama ketika merespon peningkatan penduduk usia produktif selama lima tahun ke depan. Masalah tingginya TPT yang tidak diselesaikan pada masa kini berpotensi mengalami peningkatan selama lima tahun ke depan. Hal itu dapat mengakibatkan berbagai problematika turunan bagi Kota Balikpapan, terutama apabila banyaknya kuantitas dari penduduk usia produktif tidak sejalan dengan kualitas sumber daya manusia yang ada.

d. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia kerja dengan penduduk usia tidak bekerja. Angka ketergantungan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Angka ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi angka ketergantungan

maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Hasil proyeksi angka ketergantungan Kota Balikpapan yang dikeluarkan oleh BPS Kalimantan Timur dalam buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan tren peningkatan setiap periode. Pada tahun 2025 proyeksi menunjukkan angka ketergantungan sebesar 43,42 persen dan meningkat menjadi 43,68 persen pada tahun 2029. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2025, setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja akan menanggung 43 hingga 44 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif. Dari segi jumlah, tanggungan penduduk usia produktif pada tahun 2029 tidak bertambah atau maksimal bertambah satu penduduk non produktif per 100 penduduk usia produktif apabila dibandingkan dengan tahun 2025. Hasil proyeksi yang dirilis pada buku tersebut pada tahun 2025 berbeda dengan yang diliris di *website* BPS Provinsi Kalimantan Timur, yakni yang dirilis oleh oleh *website* 4,62 poin lebih rendah dibandingkan yang termuat dalam buku proyeksi tahun 2020-2035. Hal tersebut dikarenakan data yang digunakan pada *website* menggunakan data dasar tahun 2015, sedangkan proyeksi 2020-2035 menggunakan data dasar tahun 2020. Pada subbab proyeksi angka ketergantungan menggunakan data yang dirilis pada Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020. Hal tersebut untuk menjaga keselarasan dengan hasil proyeksi dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Capaian angka ketergantungan juga perlahan memberikan pengaruh terhadap produktivitas penduduk usia produktif di Kota Balikpapan. Implikasi dari beban tanggungan yang terus bertambah adalah adanya potensi perlambatan kemajuan daerah karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif. Meningkatnya angka ketergantungan di Kota Balikpapan disebabkan oleh laju pertumbuhan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif. Hasil proyeksi terhadap penduduk umur 0-14 tahun mengalami penambahan mulai tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 171,32 ribu jiwa, mengalami peningkatan menjadi 176,33 ribu jiwa pada tahun 2029. Hal itu dipengaruhi dengan laju pertumbuhannya yang cenderung lambat, namun terus mengalami peningkatan hingga menjadi rata-rata pertumbuhan sebesar 0,60 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang diproyeksikan menurun yang berpengaruh terhadap penduduk umur 0-14 tahun. Selain itu, tren serupa terjadi pada kelompok usia non produktif yang berusia di atas 65 tahun. Laju pertumbuhan dari kelompok usia non produktif 65 tahun ke atas menunjukkan tren peningkatan yang cukup tinggi di setiap periode dengan rata-

rata pertumbuhan sebesar 6,14 persen. Secara absolut penduduk usia 65 tahun ke atas diproyeksikan mengalami peningkatan selama periode 2025 hingga 2029, yakni sebanyak 12,95 ribu jiwa. Penambahan penduduk usia tersebut menandakan bahwa harapan hidup penduduk Kota Balikpapan ke depannya semakin baik. Namun, kondisi ini perlu diantisipasi mengingat semakin bertambah penduduk yang tidak produktif atau lanjut usia maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan kelompok usia tersebut.

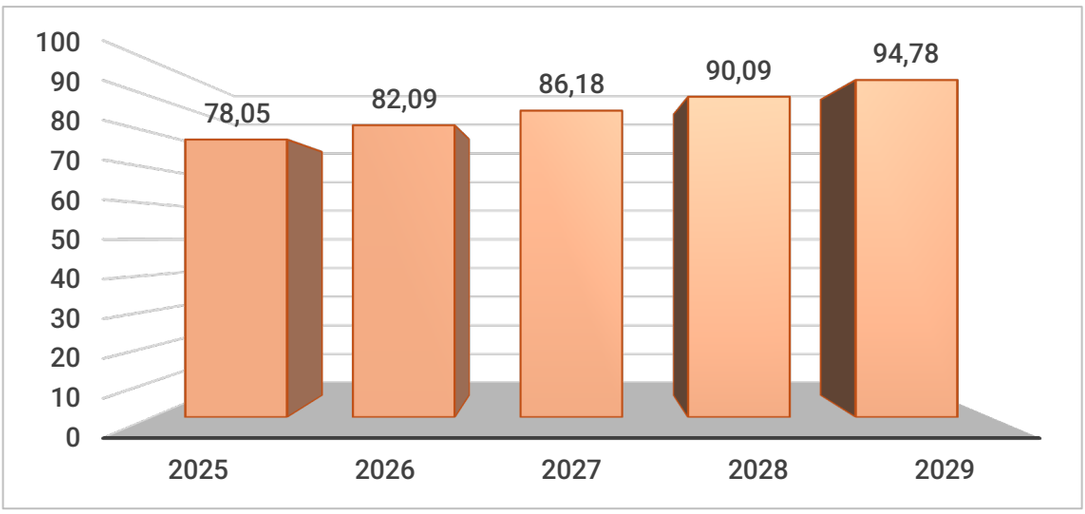
e. Bonus Demografi

Bonus demografi dimaknai sebagai masa yang penduduk usia produktifnya lebih besar dibanding usia non produktif dengan proporsi lebih dari 60 persen. dari total jumlah penduduk. Proporsi tersebut dapat dilihat melalui hasil proyeksi komposisi penduduk di Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Selain dari aspek komposisi penduduk, ada atau tidaknya momentum bonus demografi di Kota Balikpapan dapat dilihat melalui angka ketergantungan yang dimiliki. Kota Balikpapan dianggap mendapatkan bonus demografi apabila angka ketergantungannya di bawah 45 persen.

Data hasil proyeksi komposisi penduduk dan angka ketergantungan pada tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa Kota Balikpapan akan menghadapi fase bonus demografi pada periode yang sama. Meskipun begitu, Kota Balikpapan harus mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan optimal karena terdapat tren peningkatan angka ketergantungan pada tahun 2025-2029. Hal itu ditandai pula dengan penduduk usia produktif semakin berkurang, sementara penduduk usia non produktif semakin meningkat. Semakin tingginya angka ketergantungan di suatu daerah akan memengaruhi tingkat produktivitas di daerah tersebut akibat semakin tinggi pula beban tanggungan penduduk produktif terhadap penduduk non produktif. Oleh karena itu, pemerintah Kota Balikpapan harus mampu memanfaatkan sekaligus mengantisipasi dinamika kependudukan selama lima tahun ke depan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera

f. Penduduk Usia Lanjut

Perubahan komposisi penduduk Kota Balikpapan di atas berdampak pada bertambahnya penduduk lanjut usia karena adanya penurunan fertilitas dan peningkatan angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Berikut merupakan hasil proyeksi penduduk usia lanjut di Kota Balikpapan pada tahun 2025-2029.



Gambar 2. 18 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Lanjut (Ribu Jiwa) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Pada tahun 2025 jumlah lansia sebanyak 78,05 ribu jiwa dan mengalami penambahan secara signifikan menjadi 94,78 ribu jiwa pada tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 4,94 persen. Bertambahnya penduduk lansia yang tinggi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Balikpapan karena di satu sisi Pemerintah Kota harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kondisi lansia. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan mampu memberdayakan penduduk lanjut usia supaya lebih mandiri

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini akan mengulas dua aspek utama yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Balikpapan, yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Aspek kesejahteraan ekonomi mencakup data ekonomi makro yang menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut, sementara aspek kesejahteraan sosial budaya berisi berbagai data makro yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial dan budaya.

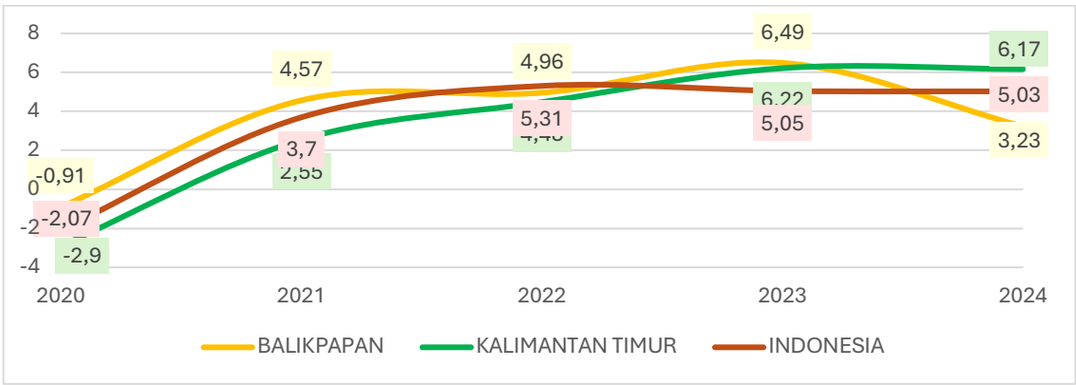
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan masyarakat dari aspek kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, maupun papan. Kondisi ekonomi daerah dan masyarakat Kota Balikpapan diantaranya dapat digambarkan melalui beberapa indikator makro seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia. Berikut

penjabaran berbagai data tersebut yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Balikpapan.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah indikator ekonomi makro yang menunjukkan seberapa besar keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan kegiatan ekonomi yang berdampak pada peningkatan produksi barang dan jasa. Berikut laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



Gambar 2. 19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024.

Sumber : BPS Kalimantan Timur; BPS RI, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan memiliki tren fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dengan pertumbuhan negatif pada tahun 2020 kemudian meningkat hingga 6,49 persen pada tahun 2023 dan menurun lagi pada tahun 2024 menjadi 3,23 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2020-2024 sebesar 3,6 persen. Rata-rata pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,3 persen dan nasional sebesar 3,4. Penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 disebabkan karena akibat pandemi Covid-19 namun kembali tumbuh positif sejak tahun 2021.

Tabel 2. 13 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	752.931,32	770.543,55	785.789,68	798.413,90	793.320
B	Pertambangan dan Penggalian	37.656,73	39.076,39	37.185,60	37.804,24	42.140
C	Industri Pengolahan	46.877.785,28	49.028.621,09	51.352.469,24	54.532.519,46	54.512.240

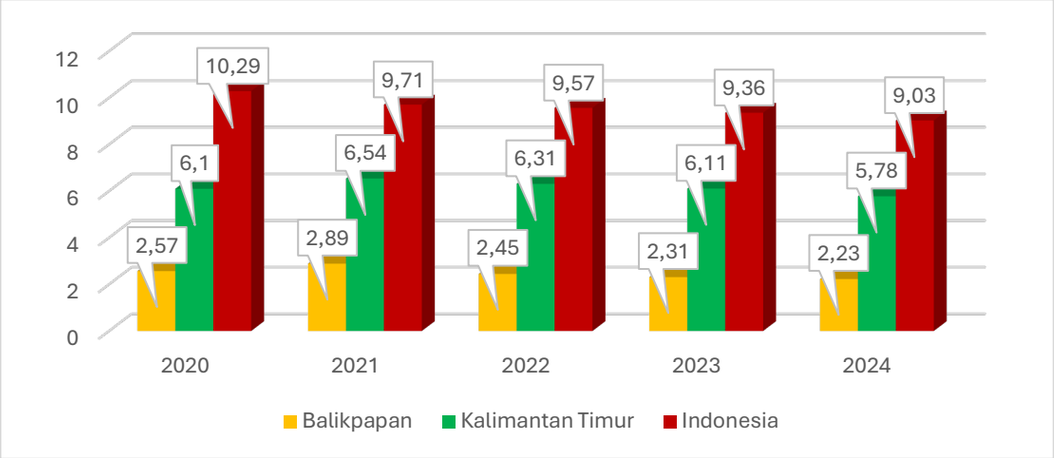
No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
D	Pengadaan Listrik dan Gas	81.902,24	85.086,57	88.876,75	102.415,08	109.910
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	62.757,80	63.934,81	68.045,58	71.439,66	76.450
F	Konstruksi	11.084.167,31	11.646.022,83	11.268.748,09	12.040.816,68	12.800.090
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.757.018,53	7.235.431,54	7.844.556,64	8.288.549,61	9.098.150
H	Transportasi dan Pergudangan	5.405.994,30	5.527.050,52	6.406.269,54	7.097.481,50	7.667.270
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.206.931,44	1.230.154,74	1.347.790,15	1.412.207,58	1.570.640
J	Informasi dan Komunikasi	3.237.909,36	3.493.220,02	3.770.314,31	3.975.197,07	4.267.270
K	Jasa Keuangan	2.670.128,50	2.748.497,58	2.993.329,46	3.291.333,01	3.468.140
L	Real Estate	1.401.437,25	1.403.667,74	1.434.419,68	1.476.411,21	1.552.230
M,N	Jasa Perusahaan	207.173,56	215.291,98	226.766,54	238.034,20	254.780
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	939.939,35	954.811,42	1.035.751,99	1.106.280,22	1.212.830
P	Jasa Pendidikan	1.195.361,44	1.208.434,40	1.233.191,98	1.282.070,63	1.352.440
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	552.151,62	611.164,30	641.041,18	678.601,67	714.420
R,S,T, U	Jasa Lainnya	563.464,84	570.681,06	607.610,01	630.577,09	699.420
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		83.034.710,87	86.831.690,55	91.142.156,42	97.060.152,81	100.191.740

Sumber : BPS Kota Balikpapan, 2025

Sektor industri pengolahan Kota Balikpapan secara keseluruhan mengalami penurunan kontribusi terhadap perlambatan ekonomi. Pada tahun 2023, sektor ini tumbuh lebih pesat dengan kontribusi sebesar 53,74 persen, namun pada 2024 mengalami kontraksi hingga 0,65 persen.

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Salah satu cara untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah dengan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik yang berkaitan dengan makanan maupun non-makanan, yang diukur melalui tingkat pengeluaran. Penduduk dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Berikut tingkat kemiskinan Kota Balikpapan 2020-2024.



Gambar 2. 20 Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Indonesia tahun 2020-2024.

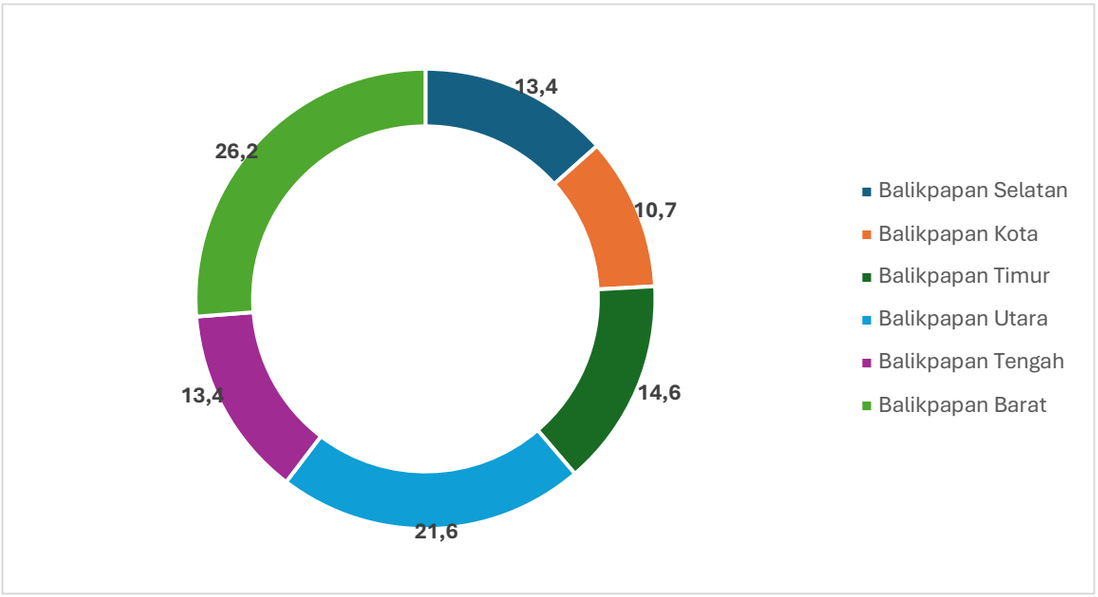
Sumber : BPS Kalimantan Timur; BPS RI, 2025

Tingkat kemiskinan di Balikpapan menunjukkan tren penurunan yang positif dari tahun 2020 hingga 2024. Tingkat kemiskinan di Balikpapan berkurang dari 2,57 persen pada tahun 2020 menjadi 2,23 persen pada tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 2,99 persen per tahun. Penurunan kemiskinan Kota Balikpapan selaras dengan penurunan tingkat provinsi maupun tingkat nasional dengan angka yang jauh lebih rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan keberhasilan penanganan kemiskinan di Kota Balikpapan.

Penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Balikpapan juga menunjukkan kinerja yang baik dengan angka kemiskinan ekstrem yang sebelumnya sebesar 0,79 persen pada tahun 2021 terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,20 persen pada tahun 2024 (BPS, 2024). Penurunan tersebut mengindikasikan jumlah penduduk Kota Balikpapan yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem atau kurang dari 1,9 USD per orang per hari semakin berkurang. Penurunan kemiskinan di Kota Balikpapan selama periode 2020-2024 didukung oleh beberapa faktor seperti subsidi kesehatan melalui BPJS Kesehatan, bantuan pendidikan berupa penghapusan biaya SPP, serta peningkatan infrastruktur dan akses layanan kesehatan dan pendidikan.

Tingkat kemiskinan tetap menjadi salah satu fokus perhatian peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Balikpapan meskipun penanganan kemiskinan

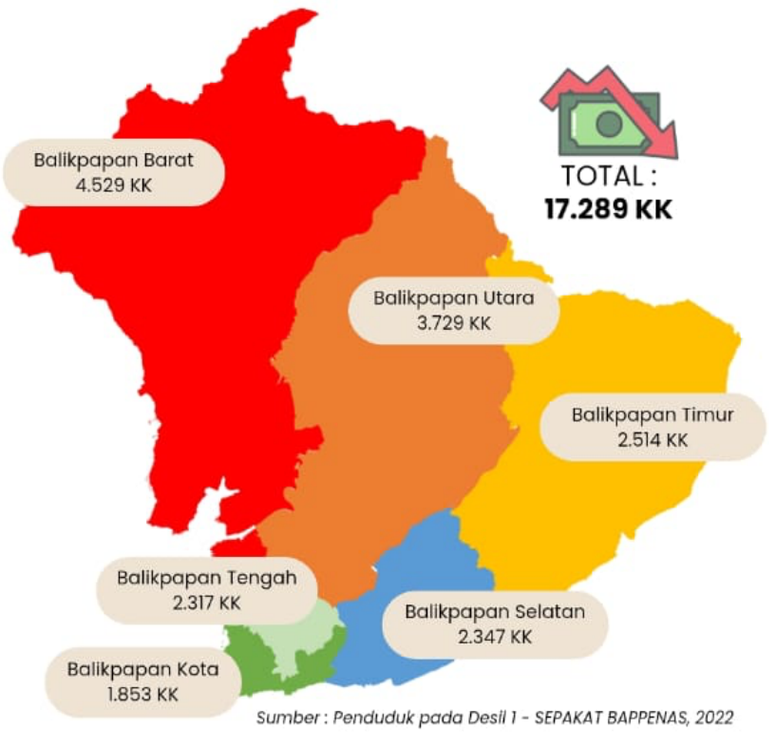
Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang baik. Persebaran kemiskinan yang cukup merata di seluruh kecamatan di Kota Balikpapan mengindikasikan penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan masih menjadi tantangan yang cukup besar.



Gambar 2. 21 Persentase Penduduk Miskin di Kota Balikpapan per Kecamatan Tahun 2022

Sumber: Sepakat Bappenas, 2022

Berdasarkan data yang tersedia pada tahun 2022, kemiskinan tertinggi tercatat di Kecamatan Balikpapan Barat yakni mencapai 26,2 persen atau sebanyak 4.529 penduduk miskin dibandingkan total penduduk miskin Kota Balikpapan tahun 2022. Karakteristik wilayah Kecamatan Balikpapan Barat yang berbukit dan tergolong cukup jauh dari pusat kota menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan di wilayah tersebut yang turut berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang serupa juga menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Kecamatan Balikpapan Utara yakni mencapai 21,6 persen atau sejumlah 3.729 penduduk miskin.



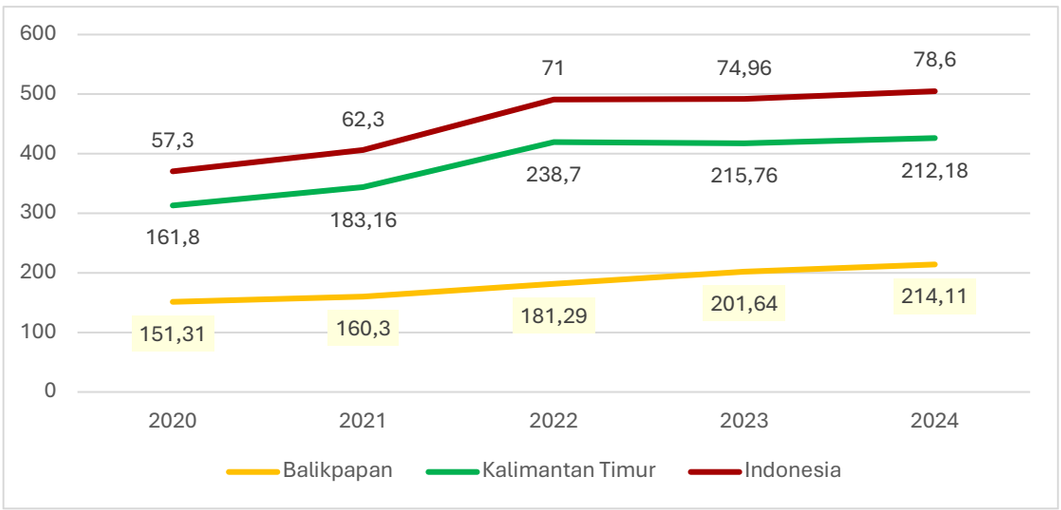
Gambar 2. 22 Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan Tahun 2022

Sumber: Sepakat Bappenas, 2022

Karakteristik wilayah yang cukup jauh dari pusat Kota Balikpapan dan luas wilayah yang sangat luas menjadi sejumlah faktor penyebab tingginya kemiskinan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara. Pembangunan wilayah yang belum merata dan masih terpusat di wilayah kota menyebabkan keterbatasan akses untuk kegiatan perekonomian dan pelayanan publik sehingga menyulitkan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pembangunan kewilayahan yang merata, khususnya dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan dapat membuka peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat di sekitar.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang menjelaskan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu daerah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total PDRB daerah dengan jumlah penduduknya, sehingga memberikan gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan individu dalam satu tahun. PDRB per kapita yang tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah mampu menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikut PDRB per kapita Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



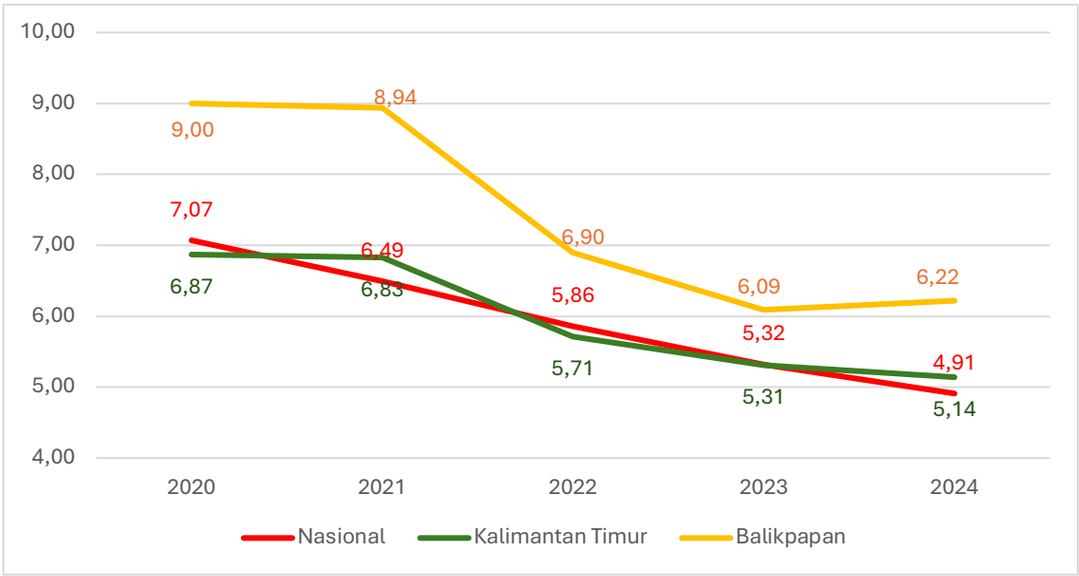
Gambar 2. 23 PDRB Per Kapita Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Indonesia tahun 2020-2024.

Sumber : BPS Balikpapan; BPS Kalimantan Timur; BPS RI, 2025

PDRB per kapita Kota Balikpapan menunjukkan tren positif yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. PDRB per kapita ini meningkat sebesar 62,8 juta rupiah dari 151,31 juta rupiah menjadi 214,11 juta rupiah. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan sektor jasa dan industri yang pesat. Akan tetapi, pertumbuhan yang terjadi masih dibawah PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Peningkatan PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh keberadaan PSN RDMP Kota Balikpapan yang mulai dibangun sejak tahun 2017 dan direncanakan selesai pada tahun 2025. Proyek tersebut menyerap tenaga kerja hingga 22.000 orang selama masa konstruksi dan turut menggerakkan sektor perekonomian lainnya seperti pada sektor akomodasi dan makan minum.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas, yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka sendiri merujuk pada angkatan kerja yang tidak bekerja atau belum memulai pekerjaan. TPT yang tinggi mengindikasikan adanya masalah dalam penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri, minimnya pengalaman kerja, diskriminasi dalam rekrutmen, rendahnya permintaan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, kondisi ekonomi yang buruk, atau perubahan dalam struktur industri akibat adopsi teknologi. Tingkat pengangguran terbuka dapat berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berikut tingkat pengangguran terbuka Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



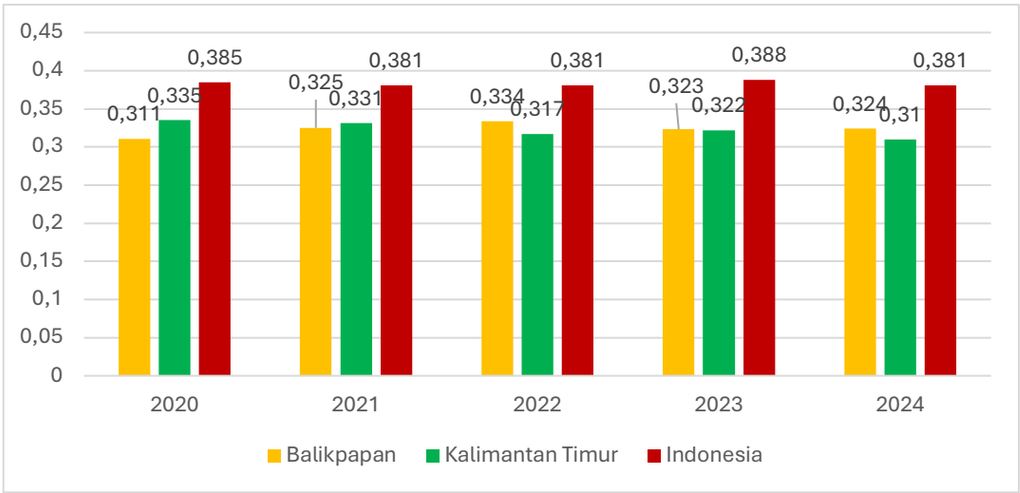
Gambar 2. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Tingkat pengangguran terbuka Kota Balikpapan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Tingkat pengangguran terbuka Kota Balikpapan mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 9 persen menjadi 6,09 persen tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 0.13 persen menjadi 6,22 persen. Tingkat pengangguran terbuka yang meningkat ini selaras dengan penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki tantangan dalam penyerapan tenaga kerja seperti meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

2.2.1.5 Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan di antara masyarakat dapat dianalisis melalui indeks gini. Indeks ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat. Indeks Gini mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah dengan nilai yang berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sangat merata, yang ditunjukkan dengan kondisi setiap individu memiliki jumlah pendapatan yang sama. Sebaliknya, nilai 1 mencerminkan ketimpangan yang ekstrem, yang ditunjukkan dengan kondisi seluruh pendapatan dikuasai oleh satu orang atau kelompok. Semakin tinggi angka Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, penting melakukan upaya agar Indeks Gini tetap mendekati angka 0, yang menandakan adanya pemerataan distribusi pendapatan di antara masyarakat. Berikut Indeks Gini Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



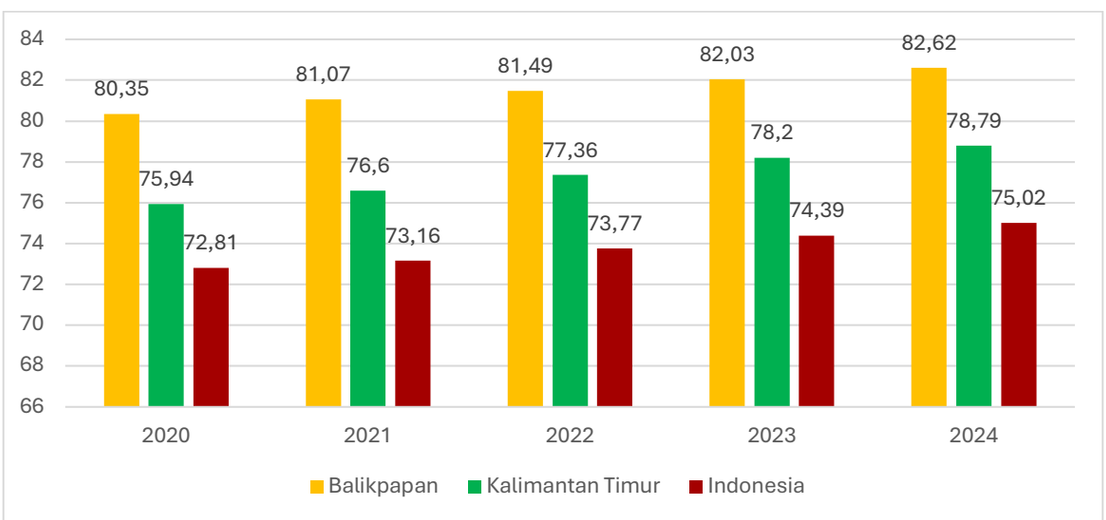
Gambar 2. 25 Indeks Gini Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Balikpapan; BPS Kalimantan Timur; BPS RI 2025

Indeks gini Kota Balikpapan menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dengan nilai rasio yang sedikit meningkat dari 0,311 di tahun 2020 menjadi 0,334 di tahun 2022, sebelum mengalami penurunan kembali menjadi 0,323 pada tahun 2023 dan sedikit meningkat lagi menjadi 0,324 pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Indeks Gini di Balikpapan tercatat sebesar 0,324, yang menandakan adanya ketimpangan pengeluaran penduduk yang terkendali dan lebih baik dibandingkan dengan angka nasional yang berada di sekitar 0,381. Pada tahun 2024, indeks gini Kota Balikpapan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas hidup dan pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dihitung pada tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi IPM ini dikonversi menjadi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita. Berikut capaian IPM Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



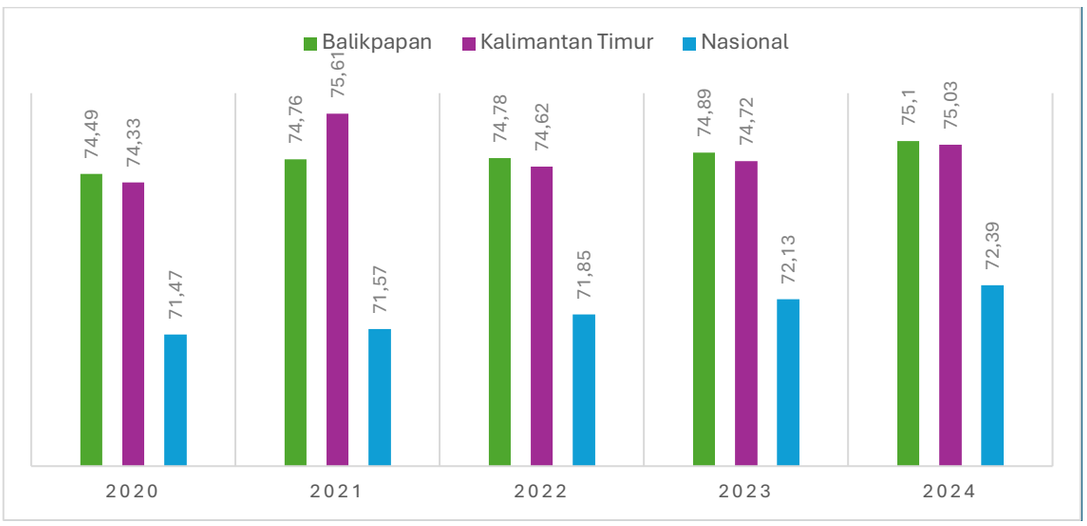
Gambar 2. 26 Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan tahun 2020-2024

Sumber : BPS Balikpapan; BPS Kalimantan Timur; BPS RI 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Balikpapan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, mencapai 82,62 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek kualitas hidup, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dalam periode tersebut, IPM Balikpapan meningkat dari 80,35 persen pada tahun 2020 menjadi 82,62 persen pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Kalimantan Timur yang mencapai 78,79 persen dan IPM nasional yang berada di angka 75,02 persen. Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan usia harapan hidup dan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, dimensi pendidikan juga menunjukkan kemajuan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Meskipun Kota Balikpapan mengalami kemajuan signifikan dalam IPM, masih terdapat tantangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, dan menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk mendukung pertumbuhan populasi.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative, serta peningkatan askes dan kualitas layanan kesehatan. Salah satu indikator yang mencerimkan kualitas kesehatan yakni usia harapan hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir pada tahun suatu tahun tertentu. UHH menjadi salah satu indikator pembentuk dari indeks pembangunan manusia (IPM). Semakin tinggi UHH mengindikasikan semakin baik derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Berikut capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Balikpapan.



Gambar 2. 27 Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Nasional, 2025

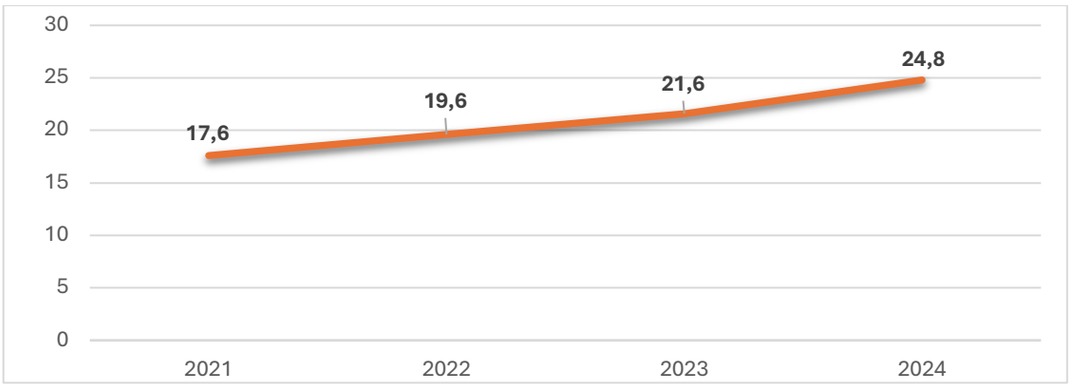
Selama periode 2020-2024, capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Balikpapan menunjukan trend yang meningkat. Selama periode tersebut, capaian UHH Kota Balikpapan meningkat sebesar 0,61 poin dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,2 persen per tahun. Kenaikan UHH mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan berjalan cukup baik, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, capaian UHH Kota Balikpapan sebesar 75,1. Artinya, bayi yang baru lahir di tahun 2024 memiliki kesempatan rata-rata usia hingga 75,1 tahun.

Selama periode 2020-2024, capaian UHH Kota Balikpapan selalu berada diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Kondisi tersebut menunjukan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan berjalan lebih baik dibanding Provinsi dan Nasional. Namun demikian, jika dilihat dari tingkat kenaikan UHH Kota Balikpapan masih lebih rendah dibanding Provinsi. Selama lima tahun terakhir, UHH Provinsi Kalimantan Timur naik 0,7 poin dengan rata-rata kenaikan 0,24 persen. Sedangkan UHH Kota Balikpapan mengalami kenaikan 0,61 poin dengan ratap-rata kenaikan 0,20 persen. Dengan demikian, perlu upaya percepatan pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan.

Berdasarkan dokumen Grand Desain Kesehatan Kota Balikpapan terdapat rencana aksi jangka menengah yang dapat menjadi panduan dalam pembangunan kesehatan. Adapun strategi yang bisa dilaksankan yakni peningkatan program promosi kesehatan masyarakat; peningkatan kesehatan ibu hamil, melahirkan, dan nifas; pemenuhan gizi; pemantauan tumbuh kembang anak; peningkatan skrining berkala untuk deteksi dini, peningkatan kesehatan lansia; layanan kesehatan jiwa; surveilans kesehatan; penguatan posyandu; pengembangan layanan unggulan rumah sakit; peningkatan jumlah dan jenis tenaga medis dan non medis; peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM kesehatan; integrasi informasi kesehatan daerah; peningkatan kalibrasi alat secara rutin; pemanfaatan teknologi AI dan peralatan diagnostic, peningkatan layanan telemedicine, serta pendampingan akredetasi fasilitas kesehatan.

Selain upaya dibidang kesehatan, terdapat aspek non kesehatan yang juga perlu diperhatikan. Aspek tersebut diantaranya mekanisme pemberian jaminan kesehatan tepat sasaran, optimalisasi sumber pembiayaan kesehatan, pengelolaan tenaga cadangan kesehatan, peningkatan mitigasi bencana, peningkatan akses air bersih dan sanitasi aman, optimalisasi pengelolaan sampah rumah tangga, penguatan pasokan pangan berkelanjutan, penguatan kerjasama lintas sektor, serta penguatan pengawasan dan regulasi kesehatan.

Selain UHH, capaian kesehatan lain yang perlu diperhatikan yaitu prevalensi stunting. Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dimasa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Berikut capaian prevalensi stunting Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



Gambar 2. 28 Grafik Prevalensi Stunting Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber: Diolah dari Laporan Studi Status Gizi Indoenesia (SSGI) tahun 2020-2022 dan
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2025

Selama periode 2021-2024, prevalensi stunting Kota Balikpapan memiliki tren meningkat. Prevalensi stunting terendah pada tahun 2021 sebesar 17,6 persen, kemudian terus naik dan terakhir sebesar 24,8 persen pada tahun 2024. Capaian tersebut cukup tinggi dan mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan bayi di Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut berkebalikan dengan capaian UHH yang cukup tinggi. Selain itu, jika dibandingkan dengan target prevalensi stunting pada perencanaan jangka panjang Kota Balikpapan tahun 2045 sebesar 4,5 persen, maka diperlukan percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan hasil rembuk stunting Kota Balikpapan tahun 2025 menyebutkan bahwa tingginya stunting Kota di Balikpapan disebabkan masih banyaknya bayi yang lahir dengan berat dibawah 2.500 gram. Selain itu, jumlah kelurahan yang memiliki kasus stunting diatas 10 persen dan keluarga beresiko naik dari 10 kelurahan menjadi 17 kelurahan. Adapun kendala penanganan stunting yakni belum optimalnya pemahaman dan edukasi terkait bahaya stunting, pola asuh, pola makan, serta status sosial ekonomi dalam akses pemenuhan gizi dan lingkungan sehat,. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih komprehensif dengan pendekatan ke hulu mulai dari remaja, calon pengantin dan ibu hamil. Upaya tersebut memerlukan kerjasama lintas sektor mulai dari kecamatan, kelurahan, puskesmas, perangkat daerah terkait, hingga pihak swasta dan masyarakat.

Tabel 2. 14 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2024

Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik
Balikpapan Barat	6	2	-	1	4
Balikpapan Kota	4	-	2	-	5
Balikpapan Selatan	2	2	5	-	7
Balikpapan Tengah	6	-	2	1	5
Balikpapan Timur	4	2	1	-	2
Balikpapan Utara	5	3	1	-	6
Total	27	9	11	2	29

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kota Balikpapan, 2025

Secara umum, jumlah fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan cukup memadai mulai dari tingkat dasar hingga rujukan. Kota Balikpapan memiliki 13 Rumah Sakit yang terdiri dari 11 rumah sakit umum dan 2 rumah sakit bersalin. Dari enam kecamatan, hanya Kecamatan Balikpapan Barat yang belum memiliki rumah sakit umum. Namun, Kecamatan Balikpapan Barat memiliki rumah sakit bersalin bersama dengan Kecamatan Balikpapan Tengah. Untuk fasilitas kesehatan Puskesmas dan Poliklinik sudah tersedia diseluruh kecamatan. Selain rumah sakit, puskesmas, dan poliklinik, fasilitas kesehatan lainnya juga terdapat laboratorium, toko obat, toko optik, alat kesehatan, ambulance, dan pelayanan kesehatan tradisional. Selain fasilitas kesehatan, perlu diidentifikasi ketersediaan dan sebaran tenaga kesehatan Kota Balikpapan yang berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan. Berikut data tenaga kesehatan di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 15 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2024

Kecamatan	Tenaga Medis	Psikologi Kllinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian
Balikpapan Selatan	236	2	469	81	60
Balikpapan Kota	381	1	1.149	186	164
Balikpapan Timur	36	0	59	30	19
Balikpapan Utara	146	1	1.259	113	143
Balikpapan Tengah	124	0	232	58	45
Balikpapan Barat	41	0	110	64	30

Kecamatan	Tenaga Medis	Psikologi Kllinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian
Total	964	4	3.278	532	461

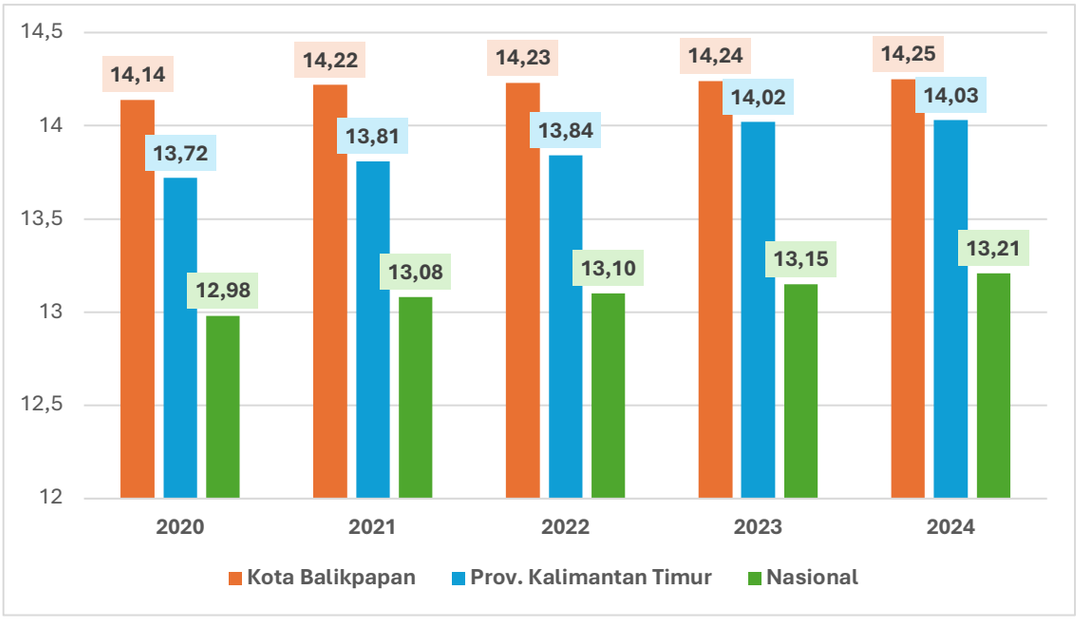
Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kota Balikpapan, 2025

Secara umum, sebaran tenaga kesehatan sudah mencakup seluruh kecamatan di Kota Balikpapan yang meliputi tenaga medis, perawat, bidan, dan tenaga kefarmasian. Namun, untuk tenaga psikologis klinik belum tersedia di Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Barat. Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, SDM kesehatan masih perlu ditingkatkan baik dari segi jumlah, kompetensi, distribusi, serta peningkatan jumlah dokter spesialis dan sub spesialis.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Urusan pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam konteks pembangunan sumber daya manusia. Urusan pendidikan menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana merupakan indikator makro untuk melihat kinerja pembangunan manusia di suatu daerah. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah harapan masyarakat dalam menempuh pendidikan, dan lama masyarakat usia sekolah dalam menempuh pendidikan.

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator makro yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah di suatu daerah. Capaian Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah di suatu daerah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut merupakan capaian Harapan Lama Sekolah di Kota Balikpapan Tahun 2020 hingga 2024.

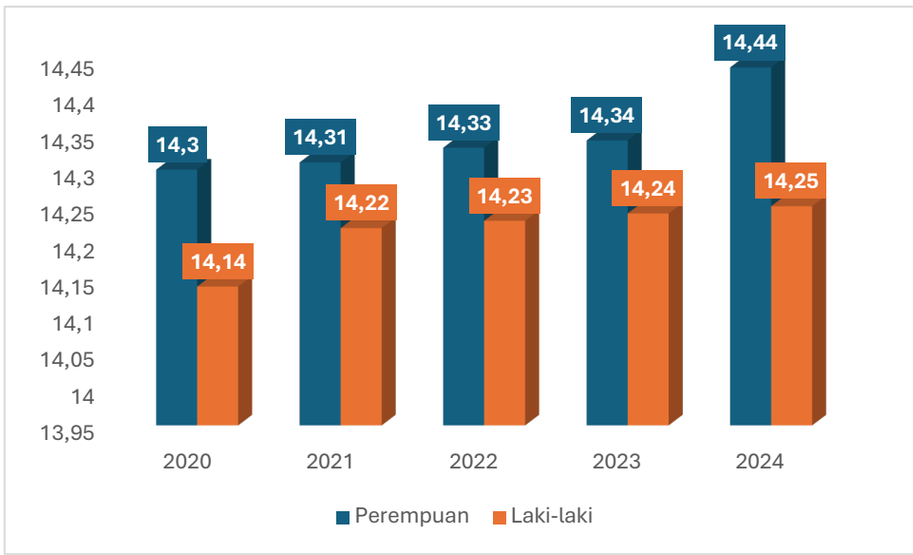


Gambar 2. 29 Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam durasi pendidikan yang dapat dinikmati oleh penduduk usia sekolah di masa depan. Pada tahun 2024, HLS Kota Balikpapan mencapai angka 14,25 tahun, yang berarti masyarakat usia sekolah memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan formal selama 14 tahun atau setara dengan jenjang Diploma 2 (D2). Selain itu, capaian HLS Kota Balikpapan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan HLS Provinsi Kalimantan Timur dan nasional dalam periode yang sama. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses pendidikan agar tren positif ini dapat terus dipertahankan.

Capaian HLS yang tinggi mengindikasikan bahwa anak-anak di Kota Balikpapan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah Kota Balikpapan memiliki peran strategis dalam peningkatan angka HLS melalui berbagai kebijakan yang memperluas dan mempermudah akses pendidikan, seperti program wajib belajar, pemberian beasiswa, pembangunan sekolah di daerah terpencil, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Diharapkan, peningkatan HLS ini dapat menghasilkan generasi yang lebih kompeten, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga mendukung pembangunan Kota Balikpapan yang berkelanjutan. Berikut disajikan data perkembangan angka harapan lama sekolah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Balikpapan pada periode tahun 2020-2024.

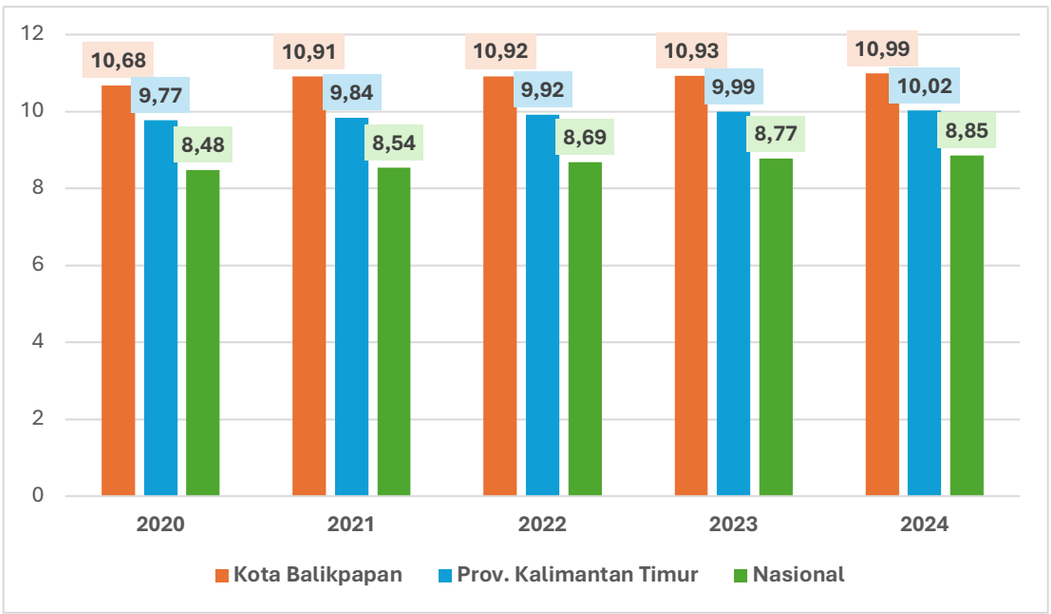


Gambar 2. 30 Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Nasional, 2025

Selama periode 2020-2024, angka harapan lama sekolah di Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan yang positif pada kedua jenis kelamin. Penduduk perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,14 tahun, sedangkan penduduk laki-laki meningkat sebesar 0,11 tahun. Secara umum, penduduk perempuan memiliki angka harapan lama sekolah yang sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dengan selisih sekitar 0,1 tahun yang relatif stabil sepanjang periode tersebut. Kecenderungan ini mencerminkan meningkatnya peluang pendidikan yang setara bagi seluruh penduduk serta keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesetaraan gender dalam kesempatan memperoleh pendidikan.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk dalam mengikuti pendidikan formal, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. RLS menjadi bagian dari perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena berperan dalam menunjukkan tingkat akses dan partisipasi masyarakat terhadap sistem pendidikan. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan mengalami tren yang positif selama periode lima tahun terakhir. Berikut merupakan capaian Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia sekolah di Kota Balikpapan selama periode 2020 hingga 2024.

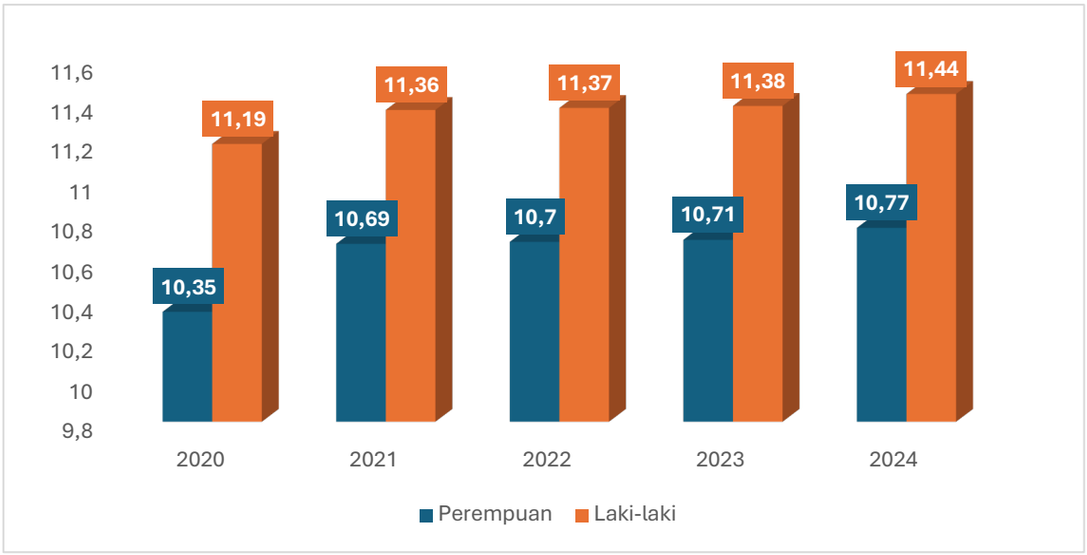


Gambar 2. 31 Rata-rata Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Dalam lima tahun terakhir, RLS di kota ini meningkat sebesar 0,31 poin. Pada tahun 2024, angka RLS Kota Balikpapan mencapai 10,99 tahun, yang berarti rata-rata masyarakat usia sekolah telah menempuh pendidikan hingga setara dengan kelas 1 SMA. Selain itu, capaian RLS Kota Balikpapan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata RLS di Provinsi Kalimantan Timur dan nasional selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini merupakan pertanda positif dalam hal upaya pembangunan pada sektor pendidikan di Kota Balikpapan.

Meskipun demikian, capaian RLS Kota Balikpapan masih perlu terus didorong agar sesuai dengan program pemerintah mengenai wajib belajar 13 tahun. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang lebih lama dan berkualitas, sehingga mendukung peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik di Kota Balikpapan. Untuk melihat perkembangan capaian pendidikan di Kota Balikpapan secara lebih holistik, berikut disajikan data rata-rata lama sekolah penduduk menurut jenis kelamin pada periode tahun 2020-2024.



Gambar 2. 32 Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Nasional, 2025

Selama periode 2020-2024, rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan positif pada kedua jenis kelamin. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan meningkat sebesar 0,42 tahun, sedangkan penduduk laki-laki naik sebesar 0,25 tahun. Meskipun demikian, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan relatif stabil di kisaran 0,6-0,7 tahun. Kecenderungan peningkatan ini mengindikasikan perbaikan akses dan partisipasi pendidikan yang merata, sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan daerah dalam memperluas kesempatan belajar.

Rapor Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi capaian dan kualitas pendidikan di berbagai jenjang pendidikan yang berada di bawah kewenangan kabupaten/kota maupun provinsi. Capaian ini menyajikan gambaran menyeluruh terkait indikator-indikator kunci seperti kemampuan literasi dan numerasi murid, karakter murid, kualitas pembelajaran, iklim sekolah, serta kesiapan lulusan SMK terhadap dunia kerja. Hasil rapor ini mencerminkan kekuatan dan tantangan yang dihadapi Kota Balikpapan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang inklusif, merata, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami capaian yang telah diraih serta area yang memerlukan perbaikan, Pemerintah Kota Balikpapan dapat merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Berikut adalah gambaran capaian rapor pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2024 pada jenjang SD dan SMP.

Tabel 2. 16 Ringkasan Hasil Capaian Rapor Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Indikator	PAUD	SD Umum	SD Agama	SD Setara	SMP Umum	SMP Agama	SMP Setara
1	Kemampuan Literasi Murid		Baik	Sedang	Sedang	Baik		Baik
2	Kemampuan Numerasi Murid		Baik	Sedang	Sedang	Baik		Baik
3	Karakter Murid		Baik	Baik	Baik	Baik		Baik
4	Kualitas Pembelajaran		Sedang	Sedang	Baik	Baik	Sedang	Baik
5	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Sedang						
6	Proses Belajar yang Sesuai Bagi Anak Usia Dini	Sedang						
7	Pembelajaran yang Membangun Kemampuan Fondasi	Baik						
8	Iklim Keamanan Sekolah	Sedang	Baik			Baik	Baik	Baik
9	Iklim Kebinekaan Sekolah		Baik	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik
10	Iklim Inklusivitas Sekolah		Baik	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik
11	Iklim Inklusivitas & Kebinekaan PAUD	Baik						

Sumber: Kemendikdasmen, 2025

Data Ringkasan Hasil Capaian Rapor Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pada jenjang pendidikan di bawah kewenangan kabupaten/kota memiliki capaian yang cukup baik. Indikator seperti *Karakter Murid*, *Kualitas Pembelajaran*, dan *Pembelajaran yang Membangun Kemampuan Fondasi* secara umum mendapatkan predikat "Baik" di hampir semua jenjang SD dan SMP, baik umum maupun agama. Hal ini mencerminkan upaya yang positif dalam penguatan kompetensi dasar dan pembentukan karakter siswa di Kota Balikpapan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa catatan seperti pada indikator *Kemampuan Literasi* dan *Numerasi Murid* di SD Agama dan SD Setara yang masih mendapat nilai "Sedang", kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap peningkatan kemampuan dasar pada jenjang tersebut. Selain itu, masih perlu dilakukan beberapa langkah strategis guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Balikpapan seperti penguatan strategi pembelajaran

yang lebih adaptif, penyediaan guru pendamping profesional, serta fasilitas pendidikan inklusif yang memadai. Perbaikan menyeluruh terhadap aspek inklusivitas dan dukungan pembelajaran menjadi kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata di Kota Balikpapan.

Skor literasi dan numerasi merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai kemampuan dasar peserta didik dalam memahami, mengolah, serta menerapkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi mengukur sejauh mana siswa mampu membaca, memahami, dan menganalisis teks, sedangkan numerasi menilai kemampuan berpikir matematis, termasuk dalam menyelesaikan masalah berbasis angka dan logika. Kedua aspek ini menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran karena tidak hanya mencerminkan penguasaan pengetahuan dasar, tetapi juga menentukan kesiapan generasi muda menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi di masa depan. Dengan demikian, pemetaan skor literasi dan numerasi berperan strategis bagi pemerintah maupun sekolah untuk merancang kebijakan dan program peningkatan mutu pendidikan secara lebih terarah.

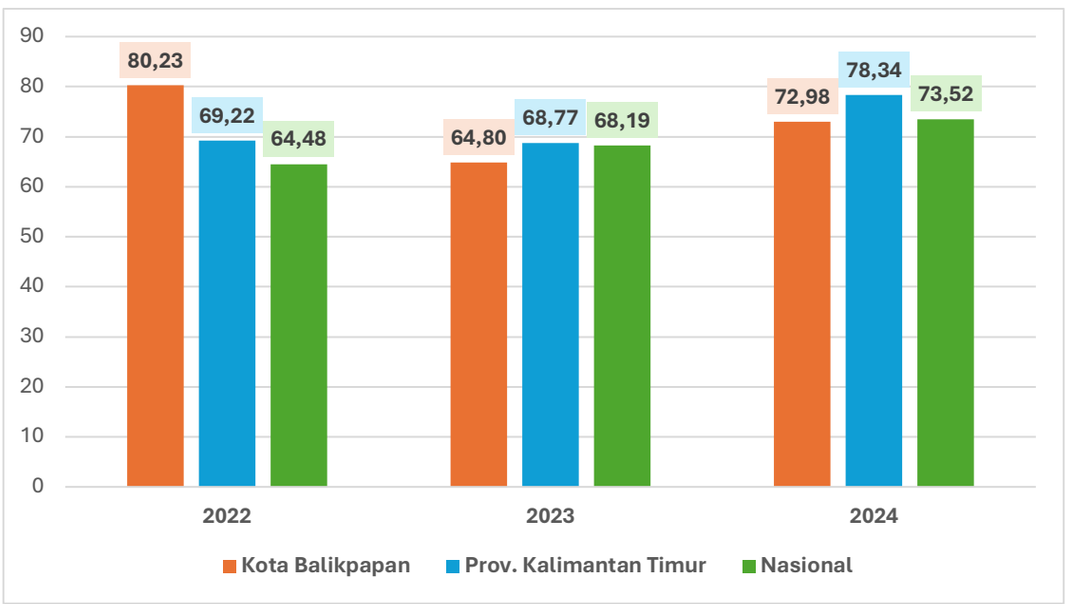
Indikator	2023	2024
Numerasi - SD Umum (Negeri dan Swasta)	72,25	78,31
Numerasi - SD Kesetaraan	56,18	52,38
Numerasi - SMP Umum (Negeri dan Swasta)	72	72
Numerasi - SMP Kesetaraan		
Literasi - SD Umum (Negeri dan Swasta)	87,1	85,56
Literasi - SD Kesetaraan	67,45	62,5
Literasi - SMP Umum (Negeri dan Swasta)	89,75	91,82
Literasi - SMP Kesetaraan	75,92	64,98
Kebudayaan - benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	27	30
Kebudayaan - total pendaftaran	133	133
Kebudayaan - persentase	22,55	22,56

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, 2025

Berdasarkan data indikator numerasi, literasi, dan kebudayaan tahun 2023–2024, terlihat adanya dinamika capaian yang bervariasi. Pada aspek numerasi, siswa SD umum mengalami peningkatan dari 72,25 menjadi 78,31, sementara SD kesetaraan mengalami penurunan dari 56,18 menjadi 52,38. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pembelajaran antara jalur formal dan

kesetaraan. Sementara itu, di tingkat SMP umum, capaian numerasi stagnan di angka 72, dan data SMP kesetaraan tidak tersedia sehingga sulit diukur perkembangannya. Pada indikator literasi, capaian SD umum sedikit menurun dari 87,1 ke 85,56, sementara SD kesetaraan juga turun dari 67,45 menjadi 62,5. Sebaliknya, SMP umum menunjukkan peningkatan dari 89,75 menjadi 91,82, meski SMP kesetaraan turun cukup signifikan dari 75,92 menjadi 64,98. Dari sisi kebudayaan, terdapat peningkatan jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan dari 27 menjadi 30, meskipun total pendaftaran tetap 133 dan persentase hanya naik tipis dari 22,55% ke 22,56%. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa kualitas numerasi dan literasi masih belum merata, khususnya pada jalur pendidikan kesetaraan, sementara bidang kebudayaan menunjukkan progres yang relatif lambat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dihitung oleh perpustakaan nasional guna mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. IPLM diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), terdiri dari 7 komponen yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Berikut merupakan capaian IPLM Kota Balikpapan tahun 2022 dan 2024.



Gambar 2. 33 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Balikpapan Tahun 2022-2024

Sumber: Perpusnas, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Balikpapan mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung menurun selama periode 2022 hingga 2024. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya minat membaca serta menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Dalam tiga tahun terakhir, IPLM Kota Balikpapan turun sebesar 7,25 persen, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia di kota ini. Selain itu, pada tahun 2022 dan 2023 IPLM Kota Balikpapan berada di bawah rata-rata capaian provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Hal ini menjadi indikasi bahwa budaya literasi masyarakat di Kota Balikpapan perlu mendapat perhatian lebih guna mencapai tren yang positif.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan perlu menerapkan berbagai strategi guna meningkatkan minat baca masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur perpustakaan yang lebih baik, dilengkapi dengan koleksi buku yang beragam serta tenaga pustakawan yang profesional dan kompeten.

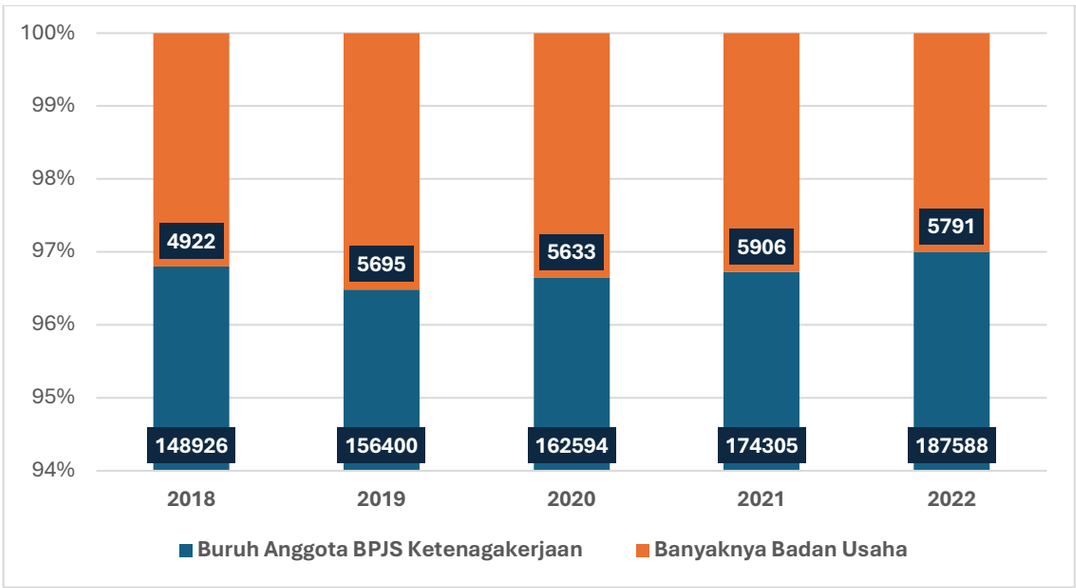
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan instrumen strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan, mengurangi kerentanan kelompok rentan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dalam konteks dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berubah, pendekatan perlindungan sosial perlu bersifat adaptif, responsif, dan inklusif terhadap berbagai risiko dan tantangan, baik yang bersifat kronis maupun yang bersifat mendadak, seperti bencana alam, pandemi, atau gejolak ekonomi.

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan penguatan sistem perlindungan sosial dengan menambahkan elemen ketangguhan terhadap risiko iklim, bencana, dan guncangan ekonomi. Sistem ini memadukan tiga pilar utama: bantuan sosial, jaminan sosial, dan program ketenagakerjaan aktif yang dirancang secara fleksibel dan terintegrasi dengan sistem peringatan dini, data kependudukan yang dinamis, serta mekanisme respons cepat. Dengan mengintegrasikan prinsip adaptif dalam perencanaan perlindungan sosial diharapkan kebijakan dan program yang dijalankan mampu meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap guncangan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial yang adaptif dapat dilihat melalui cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja mengacu pada jumlah atau persentase tenaga kerja yang terdaftar dan memperoleh perlindungan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari berbagai risiko, seperti kecelakaan

kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan. Cakupan kepesertaan dapat mencakup pekerja formal maupun informal. Semakin tinggi cakupan kepesertaan, semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi dari risiko sosial ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Balikpapan tahun 2018 hingga 2022.



Gambar 2. 34 Jumlah Anggota Buruh dan Badan Usaha yang Menjadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2025

Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan menunjukkan tren yang meningkat. Jumlah buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan secara bertahap dari 148.826 orang pada tahun 2018 menjadi 187.588 orang pada tahun 2022. Sementara itu, jumlah badan usaha yang terdaftar juga mengalami kenaikan, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, dari 4.922 badan usaha pada tahun 2018 menjadi 5.791 pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi baik dari pekerja maupun perusahaan terhadap pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan. Meskipun demikian, upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan perlu terus dilakukan, terutama bagi pekerja di sektor informal yang mungkin belum sepenuhnya terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari data makro tersebut, terdapat beberapa rincian indikator lain terkait cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan. Berikut merupakan rincian jumlah perusahaan dan pekerja yang mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Tabel 2. 17 Data Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

Indikator	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perusahaan yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan	5.906	5.791	5.705	5.948

Indikator	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pekerja Mandiri yang Terdaftar menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Pekerja Penerima Upah yang Aktif membayar dan menyetor iuran	170.572	187.588	164.356	125.410
Jumlah Pekerja Bukan Penerima Upah yang Aktif membayar dan menyetor iuran	15.361	35.557	34.442	32.675
Jumlah perusahaan yang terdapat kasus kecelakaan kerja	N/A	N/A	378	479
Jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja	N/A	N/A	441	1.008
Jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelaan kerja di luar tempat kerja (jalan)	N/A	N/A	131	197

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, 2025

Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan dalam periode 2021-2024 menunjukkan perkembangan yang dinamis. Jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan relatif stabil, dengan kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2021 tercatat 5.906 perusahaan, kemudian sempat menurun hingga 5.705 perusahaan pada tahun 2023, namun kembali meningkat menjadi 5.948 perusahaan pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan adanya kesinambungan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban kepesertaan meskipun menghadapi tekanan ekonomi yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan hubungan kerja.

Dari sisi tenaga kerja, jumlah pekerja penerima upah yang aktif membayar iuran memperlihatkan tren penurunan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Jika pada tahun 2022 jumlahnya mencapai 187.588 orang, maka pada tahun 2024 jumlah tersebut menurun drastis menjadi 125.410 orang. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena mencerminkan belum optimalnya keberlanjutan kepesertaan pekerja formal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, kepesertaan pekerja bukan penerima upah cenderung menunjukkan capaian yang lebih positif dibandingkan tahun awal. Pada tahun 2021 jumlah pekerja bukan penerima upah yang aktif hanya 15.361 orang, namun meningkat signifikan menjadi 35.557 orang pada tahun 2022. Meski demikian, jumlah ini mengalami sedikit penurunan di tahun-tahun berikutnya hingga berada di angka 32.675 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya potensi basis kepesertaan baru dari sektor informal yang perlu terus diperluas dan dijaga keberlanjutannya.

Di sisi lain, data kecelakaan kerja yang mulai terdokumentasi sejak tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan. Tercatat 378 perusahaan mengalami kasus kecelakaan kerja pada tahun 2023 dengan jumlah korban sebanyak 441 tenaga kerja, dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 479 perusahaan dengan 1.008 tenaga kerja terdampak. Dari jumlah tersebut, kecelakaan kerja di luar tempat kerja (terutama di perjalanan) juga meningkat dari

131 kasus pada tahun 2023 menjadi 197 kasus pada tahun 2024. Perkembangan tersebut mengindikasikan dua hal utama. Pertama, masih adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan kepesertaan pekerja formal yang berimplikasi terhadap perlindungan tenaga kerja di sektor penerima upah. Kedua, meningkatnya angka kecelakaan kerja menunjukkan pentingnya penguatan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan, serta peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong perusahaan lebih patuh terhadap regulasi ketenagakerjaan.

Pemerintah Kota Balikpapan perlu mendorong strategi peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baik dari sisi perusahaan maupun tenaga kerja, khususnya sektor informal yang masih memiliki ruang pertumbuhan. Selain itu, penguatan regulasi, pengawasan, dan sinergi program perlindungan tenaga kerja dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan perlu diperkuat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja, serta mendukung terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kota Balikpapan.

Perlindungan sosial yang adaptif tidak hanya mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika risiko sosial dan ekonomi, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Penerapan prinsip perlindungan sosial yang adaptif di Kota Balikpapan dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam memperluas cakupan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap guncangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kelompok ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis bantuan jangka pendek, tetapi juga upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui penguatan data terpadu kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas layanan sosial dasar, serta kolaborasi lintas sektor dan masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan tanggap terhadap kebutuhan PPKS. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip adaptif dalam perlindungan sosial, dengan kata lain kebijakan dan program disesuaikan dengan perubahan kondisi dan risiko yang dihadapi oleh kelompok rentan di tingkat lokal. Berikut merupakan data jumlah PPKS berdasarkan jenisnya di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 18 Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

No	Jenis PPKS	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	5	0	3	25	45
2	Anak Terlantar	2.270	435	1.097	92	1.236

No	Jenis PPKS	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Anak yang Berhadapan Hukum	28	14	16	120	136
4	Anak Jalanan	213	74	74	69	96
5	Anak dengan Kedisabilitasan	347	249	249	340	521
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	52	83	66	4	3
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2	9	11	122	566
8	Lanjut Usia Terlantar	1.721	633	150	702	1.322
9	Penyandang Disabilitas	1.276	1.276	1.276	982	2.010
10	Tuna Susila	0	4	0	2	1
11	Gelandangan	11	11	11	44	22
12	Pengemis	17	17	17	5	12
13	Pemulung	91	251	251	57	20
14	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	109	109	109	9	3
16	Orang dengan HIV/AIDS	1	1	1	2	3
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0	115	115	1	3
18	Korban *Trafficking*	0	0	0	0	0
19	Korban Tindak kekerasan	0	0	0	11	3
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial.	0	0	0	119	292
21	Korban Bencana Alam	34	439	8.175	875	14
22	Korban Bencana Sosial	35	780	411	122	7
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.	395	395	395	1.061	509
24	Fakir Miskin	25.497	153.220	155.135	114.265	115.495
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis.	0	0	0	50	5
26	Komunitas Adat Terpencil.	0	0	0	0	0
Jumlah		32.104	158.115	167.562	119.079	122.324

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2025

Jumlah PPKS di Kota Balikpapn menunjukkan adanya peningkatan tren sejak tahun 2020 hingga 2022, lalu menurun pada tahun 2023 dan kembali mengalami peningkatan pada 2024. Sejak 2020, PPKS Kota Balikpapan didominasi oleh fakir miskin yang mulanya memiliki proporsi sebesar 79,42 persen, kemudian meningkat menjadi 98,12 persen pada tahun 2022. Hal ini bisa

disebabkan oleh proses pemulihan akibat adanya pandemi Covid-19. Data jumlah fakir miskin yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan ini mengalami perbedaan dengan data jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Perbedaan data ini karena perbedaan metode pencatatan dan perhitungan penduduk miskin.

Selain kemiskinan, kelompok penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar juga menunjukkan tren yang cukup signifikan. Penyandang disabilitas yang semula konsisten pada kisaran 1.200 jiwa, meningkat drastis pada 2024 menjadi lebih dari 2.000 jiwa, sehingga menuntut penguatan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas. Demikian pula, jumlah lanjut usia terlantar yang sempat menurun pada 2022 kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yang mengindikasikan kebutuhan pelayanan sosial berbasis usia lanjut yang lebih adaptif.

Pada sisi lain, kategori anak terlantar, anak jalanan, serta anak dengan kedisabilitasan memperlihatkan variasi angka dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan pada kelompok anak masih cukup tinggi, baik akibat faktor keluarga, lingkungan sosial, maupun kondisi ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak harus diperkuat dengan pendekatan preventif dan kuratif yang lebih komprehensif.

Sementara itu, kategori PPKS yang terkait kondisi insidental seperti korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan, serta pekerja migran bermasalah sosial, walaupun jumlahnya relatif lebih kecil, tetap perlu mendapat perhatian. Fluktuasi yang cukup tinggi, seperti lonjakan korban bencana alam hingga 8.175 jiwa pada 2022 menunjukkan adanya kerentanan Kota Balikpapan terhadap kejadian bencana dan pentingnya sistem mitigasi serta respons kebencanaan yang cepat dan efektif.

Secara keseluruhan, pola PPKS di Kota Balikpapan menegaskan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial bersifat multi-dimensional, mencakup aspek kemiskinan struktural, kerentanan kelompok rentan (anak, lansia, disabilitas), hingga permasalahan temporer akibat dinamika sosial dan bencana.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju mencerminkan keseimbangan antara kehidupan beragama yang memberikan manfaat dan perkembangan budaya yang tetap menghormati nilai-nilai kearifan lokal sembari menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Beragama maslahat merujuk pada praktik keagamaan yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Kehidupan beragama yang demikian mendorong sikap toleransi, kepedulian, dan keharmonisan antarindividu serta kelompok dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, berkebudayaan maju menggambarkan budaya yang terus berkembang tanpa kehilangan identitas dan akar tradisinya. Kemajuan budaya

mencakup kemampuan dalam menghargai warisan leluhur namun mampu beradaptasi dengan perubahan global. Sinergi antara nilai-nilai agama yang membawa maslahat dan budaya yang dinamis menciptakan masyarakat yang harmonis, berdaya saing, dan memiliki karakter kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Kondisi ini dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat. Upaya keberlanjutan dibutuhkan untuk membangun, memelihara, dan menguatkan toleransi serta kerja sama antar umat beragama. Angka konflik SARA hadir sebagai instrumen untuk mengukur tingkat harmoni antar pemeluk agama di suatu wilayah. Indeks ini tidak hanya menggambarkan kondisi aktual kerukunan, tetapi juga memberikan pemetaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk memperkuat kohesi sosial. Berikut merupakan capaian data Angka Konflik SARA di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 19 Angka Konflik SARA di Kota Balikpapan Tahun 2020-2025

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Konflik SARA	0	0	0	0	0

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka Tahun 2025

Kota Balikpapan menunjukkan capaian positif dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan antarumat beragama selama periode tahun 2020 hingga 2024. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya laporan konflik sosial berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Hal ini mencerminkan kondisi sosial yang kondusif dan harmonis, serta keberhasilan berbagai pihak dalam mendorong kehidupan bermasyarakat yang inklusif dan toleran. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Balikpapan merupakan kota yang harmonis dan memiliki toleransi yang tinggi. Meskipun begitu, konflik SARA harus terus menjadi perhatian dan dipertahankan capaian positifnya, salah satunya melalui pendidikan multikultural, dialog lintas agama, serta penguatan kelembagaan lokal yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial perlu terus dikembangkan.

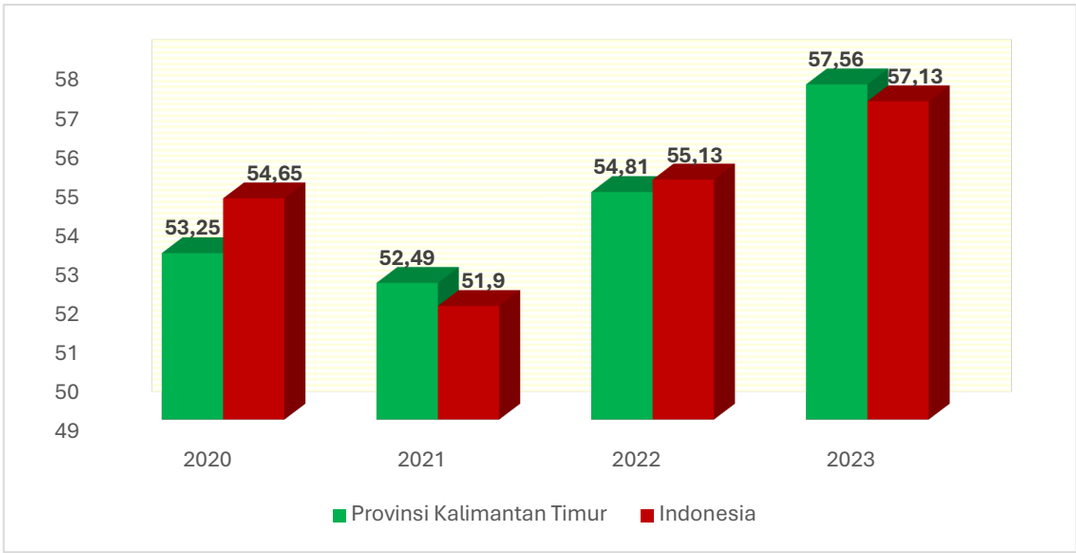
Capaian ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan dalam membangun dialog lintas iman, memperkuat moderasi beragama, dan menangkal potensi intoleransi sejak dini. Selain itu, pendekatan kultural dan edukatif yang melibatkan generasi muda melalui pendidikan nilai-nilai kebhinekaan juga berkontribusi menjaga tatanan sosial yang damai.

Kondisi ini menjadi modal sosial penting bagi pembangunan Kota Balikpapan ke depan mengingat stabilitas sosial merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah Kota Balikpapan dapat terus mempertahankan kondisi ini dengan mekanisme deteksi dini serta forum-forum dialog lintas komunitas sebagai bentuk komitmen menjaga ruang sosial yang terbuka, aman, dan menghargai perbedaan. Tren peningkatan kerukunan umat beragama di Kalimantan Timur, termasuk di Kota Balikpapan perlu dijaga melalui kebijakan inklusif, pendidikan toleransi, serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.

Kerukunan umat beragama di Balikpapan tidak hanya ditopang oleh regulasi, tetapi juga oleh kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kohesi sosial. Dalam kerangka beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju, pembangunan sosial di Balikpapan diarahkan untuk menciptakan ruang-ruang interaksi yang sehat, memperkuat nilai gotong royong, serta mendorong tata kelola kehidupan bersama yang adil dan inklusif.

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan fondasi utama dalam membangun identitas, karakter, dan daya saing suatu bangsa. Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai warisan yang harus dijaga, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang dapat menggambarkan sejauh mana kebudayaan berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) hadir sebagai instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pembangunan kebudayaan secara komprehensif. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi kebudayaan suatu negara atau daerah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berikut merupakan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2020 hingga 2023.



Gambar 2. 35 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur 2020-2023

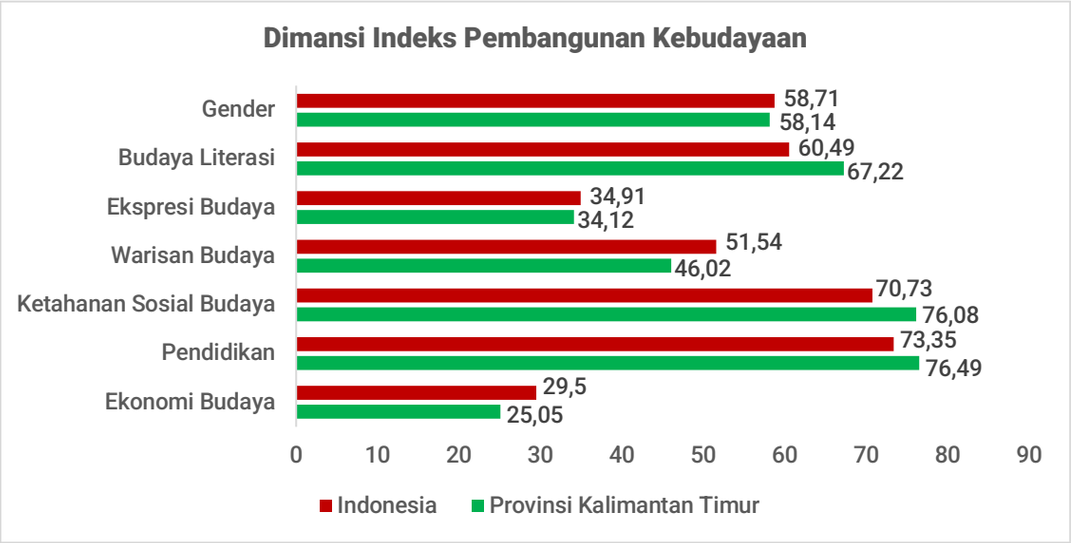
Sumber: Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemendikbud, 2024

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai perkembangan sektor kebudayaan di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan berbagai aspek, seperti pelestarian budaya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, serta kontribusi budaya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. IPK Kota Balikpapan menggunakan data proksi dari Provinsi Kalimantan Timur karena pengukuran IPK hanya dilakukan hingga level provinsi.

Dinamika Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kalimantan Timur dalam rentang tahun 2020 hingga 2023 secara umum mengalami fluktuasi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Penurunan data IPK yang cukup signifikan baik di tingkat provinsi maupun nasional terjadi pada tahun 2021 sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas kebudayaan, seperti pagelaran seni, kegiatan komunitas budaya, dan pelestarian warisan budaya yang membutuhkan interaksi sosial. Peningkatan capaian IPK dapat dilakukan pada tahun 2022 yang menandakan bahwa adanya upaya pemulihan budaya pasca pandemi, termasuk kebijakan dari Pemerintah Kota Balikpapan dalam menghidupkan kembali kegiatan seni dan budaya, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal.

Fluktuasi data capaian IPK yang mengarah pada tren peningkatan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti Revitalisasi warisan budaya lokal, seperti seni tradisional, rumah adat, dan bahasa daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, dukungan kebijakan pemerintah daerah termasuk bantuan bagi pelaku seni dan budaya, pemanfaatan teknologi digital untuk promosi budaya lokal dan menarik generasi muda dalam pelestarian budaya.

Capaian IPK disusun oleh tujuh dimensi, yakni gender, budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya, ketahanan sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi budaya. Berikut merupakan capaian ketujuh dimensi komposit IPK Provinsi Kalimatan Timur pada tahun 2023.



Gambar 2. 36 Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur 2023

Sumber : Kemendikbud, 2024

Data dari Kemendikbud mengenai capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menunjukkan bahwa beberapa dimensi IPK di Provinsi Kalimantan Timur masih berada di bawah rata-rata nasional, seperti aspek gender, ekspresi budaya, warisan budaya, dan ekonomi budaya. Diagram batang di atas memperlihatkan perbandingan IPK antara tingkat nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, Kalimantan Timur memiliki keunggulan dalam budaya literasi, ketahanan sosial budaya, serta pendidikan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun, tantangan masih ditemukan dalam bidang warisan budaya, ekspresi budaya, dan ekonomi budaya, yang memerlukan perhatian lebih guna mendukung pembangunan kebudayaan yang lebih berkelanjutan.

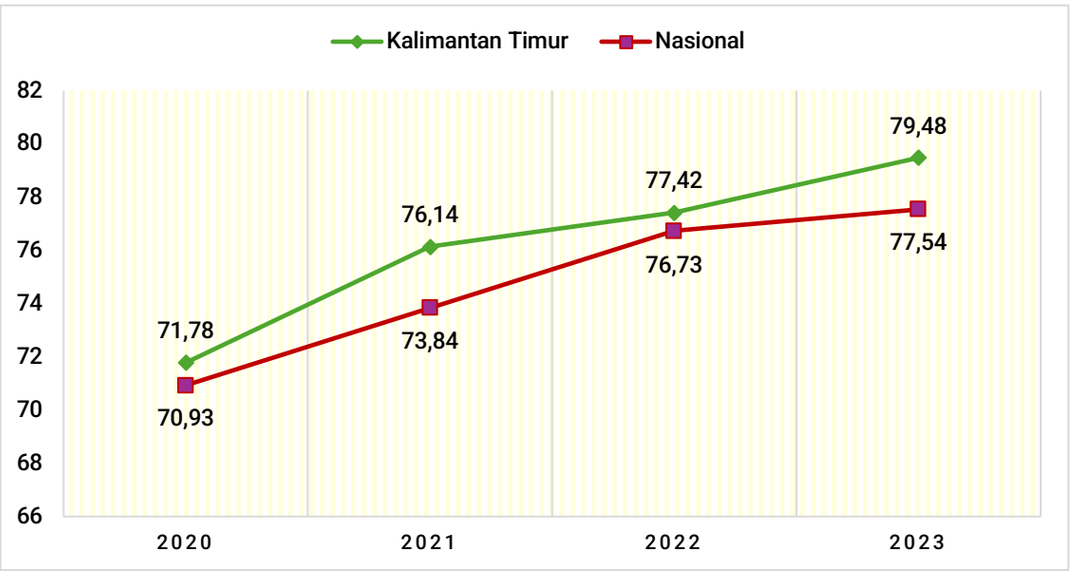
Indikator	2023	2024
Kebudayaan - benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	27	30
Kebudayaan - total pendaftaran	133	133
Kebudayaan - persentase	22,55	22,56

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan aspek untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, menciptakan lingkungan sosial yang adil, setara, dan mendukung semua individu tanpa diskriminasi. Beberapa indikator yang mencerminkan kondisi tersebut diantaranya indeks kualitas keluarga (IKK), indeks perlindungan anak (IPA), indeks ketimpangan gender (IKG), dan indeks pembangunan pemuda (IPP). Berikut capaian IKK, IPA, IKG, dan IPP Kota Balikpapan.

2.2.6.1 Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Indeks kualitas keluarga (IKK) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Indeks kualitas keluarga (IKK) diukur melalui 5 dimensi yakni dimensi legalitas dan struktur ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Kelima dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukan fungsi keluarga serta perannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM). Nilai Indeks kualitas keluarga (IKK) berkisar dari 0-100 dan bermakna positif. Semakin tinggi nilai IKK maka menunjukan kualitas keluarga semakin meningkat. Ada tiga kategori IKK yakni kurang responsif gender dan hak anak (<50), cukup responsif gender dan hak anak (50-75), dan responsif gender dan hak anak (>75). Indeks kualitas keluarga (IKK) diukur oleh KemenPPPA bersama BPS. Namun, perhitungan tersebut baru sampai pada level provinsi belum sampai kabupaten/kota. Untuk itu, capaian indeks kualitas keluarga (IKK) Kota Balikpapan menggunakan proxy capaian IKK Provinsi Kalimantan Timur.



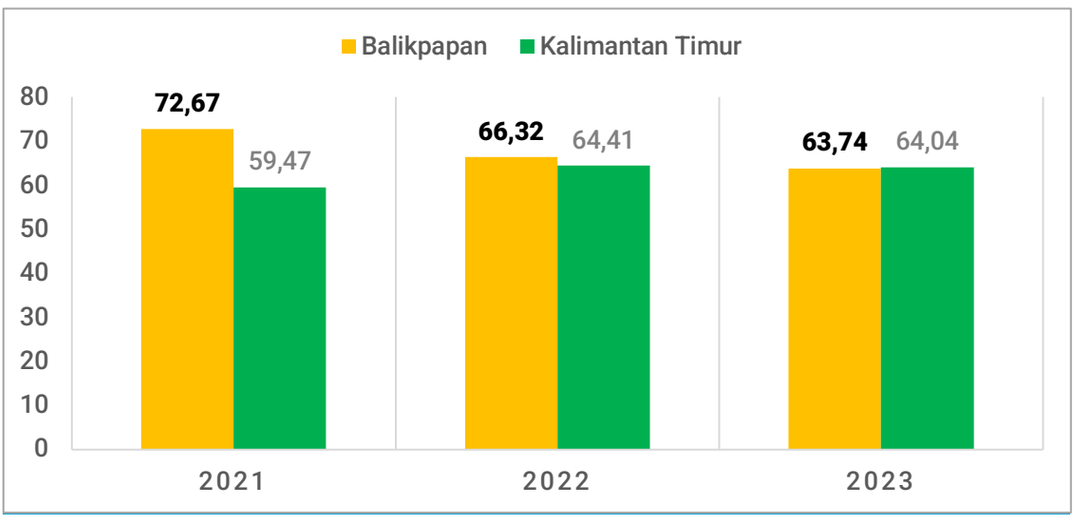
Gambar 2. 37 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2020-2023

Sumber: Laporan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2020-2023, KemenPPPA

Selama periode 2020-2023, capaian indeks kualitas keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Timur memiliki trend meningkat dan selalu berada diatas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukan bahwa pembangunan kualitas keluarga di Provinsi Kalimantan Timur relatif berjalan baik, dalam hal ini termasuk Kota Balikpapan. Pada tahun 2023, capaian IKK Provinsi Kalimantan Timur sebesar 79,84 masuk kategori responsif gender dan hak anak (>75). Capaian tersebut lebih tinggi 1,94 poin dibanding rata-rata nasional. Meskipun capaian pembangunan kualitas keluarga cukup positif, upaya peningkatan masih perlu dilakukan. Hal tersebut mengingat perubahan sosial yang cukup dinamis dapat berpengaruh terhadap fungsi dan peran keluarga sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan pada setiap dimensi pembentuk kualitas keluarga seperti dimensi legalitas dan struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.

2.2.6.2 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks perlindungan anak (IPA) merupakan indikator untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks perlindungan anak (IPA) diukur dari 5 kluster dan 27 indikator. Kluster 1 hingga kluster 4 mengacu pada 4 kluster pemenuhan hak anak sebagai pembentuk indeks pemenuhan hak anak (IPHA). Kluster 5 membentuk indeks perlindungan khusus anak (IPKA). Sedangkan gabungan dari kluster 1 hingga kluster 5 membentuk indeks perlindungan anak (IPA). Nilai IPA berkisar 0-100 dan bermakna positif. Semakin tinggi nilai IPA, maka semakin baik upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Berikut capaian IPA Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2. 38 Indeks Perlindungam Anak (IPA) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

Sumber: Laporan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2021-2023, KemenPPPA dengan BPS

Selama periode 2021-2023, capaian indeks perlindungan anak (IPA) Kota Balikpapan menunjukan trend yang menurun. Pada tahun 2022, capaian IPA Kota Balikpapan turun 6,35 poin dari tahun sebelumnya. Kemudian mengalami penurunan kembali 2,58 poin pada tahun 2023. Meskipun capaian tersebut turun, namun masih berada diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, indeks perlindungan anak (IPA) Kota Balikpapan 63,74, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur 64,04. Dengan demikian, upaya perlindungan anak baik di Kota Balikpapan maupun Provinsi Kalimantan Timur masih perlu ditingkatkan. Berikut lima kluster pembentuk indeks perlindungan anak (IPA) Kota Balikpapan tahun 2023.

Tabel 2. 20 Hasil Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kota	Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan	Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Kluster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Kluster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Kluster 5 Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
1	Kota Balikpapan	40,6	86,27	82,23	33,41	72,06	63,74	61,27	79,33

Sumber: Laporan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2023, KemenPPPA dan BPS

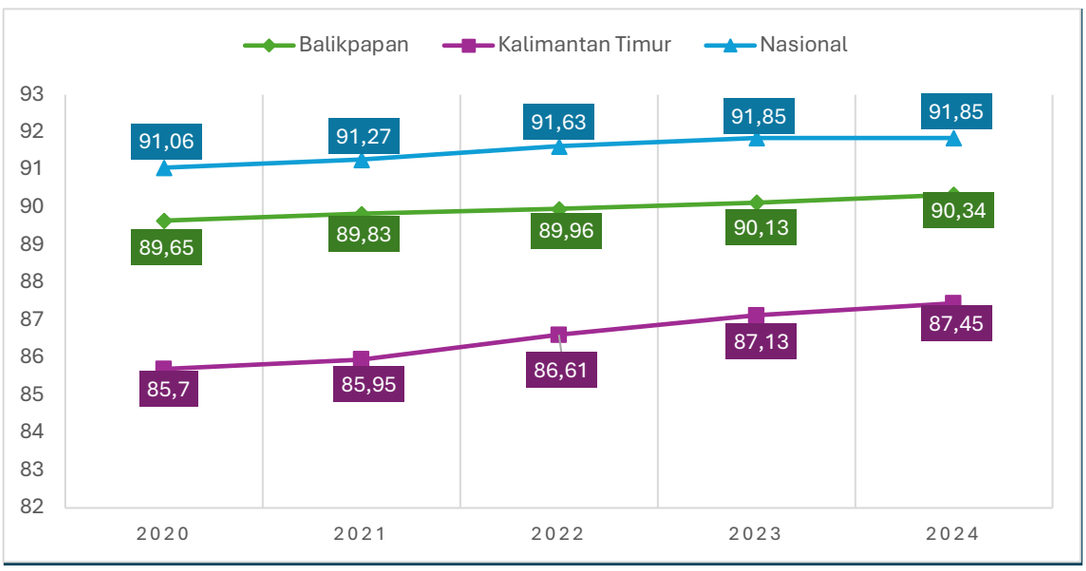
Berdasarkan lima kluster pembentuk indeks perlindungan anak (IPA) Kota Balikpapan, terdapat tiga kluster memiliki capaian cukup baik yakni kluster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 86,27, kluster 3 kesehatan dasar dan ksejahteraan 82,33, dan kluster 5 pelindungan khusus 72,06. Kluster 2 diukur dari lima indikator yaitu jumlah perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, jumlah balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, jumlah anak yang tidak tinggal bersama orangtua, dan angka kesiapan sekolah. Kluster 3 diukur dari sembilan indikator yaitu jumlah anak yang melahirkan di fasilitas kesehatan, balita stunting, anak yang mendapatkan ASI ekslusif, anak yang terpenuhi kebutuhan kalorinya, anak yang memiliki akses sanitasi dan air minum layak, anak yang merokok, serta anak yang mendapat imunisasi lengkap. Kluster 5 diukur dari lima indikator yaitu jumlah anak yang bekerja, rasio anak yang

mengakses internet, rasio angka partisipasi sekolah, jumlah anak dibawah garis kemiskinan, dan jumlah anak yang terlantar.

Sedangkan dua kluster lainnya memiliki capaian kurang optimal yakni kluster 1 hak sipil dan kebebasan 40,6 dan kluster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 33,41. Kluster 1 diukur dari lima indikator yaitu tingkat kepemilikan akta, partisipasi anak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan organisasi, jumlah anak yang memanfaatkan taman bacaan, serta jumlah anak yang mengakses internet. Kluster 4 diukur dari lima indikator yaitu jumlah anak yang tidak sekolah, jumlah anak yang mengunjungi peninggalan sejarah dan budaya, jumlah anak yang mengikuti kursus, jumlah anak yang mengikuti ekstrakurikuler, dan jumlah anak yang terlibat dalam pertunjukan seni. Dengan demikian, untuk meningkatkan upaya perlindungan anak maka pemenuhan aspek pada masing-masing kluster perlu lebih dioptimalkan pada periode pembangunan mendatang.

2.2.6.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) membandingkan rasio capaian IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Apabila nilai IPG mendekati angka 100 maka semakin kecil kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Berikut capaian IPG Kota Balikpapan.



Gambar 2. 39 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

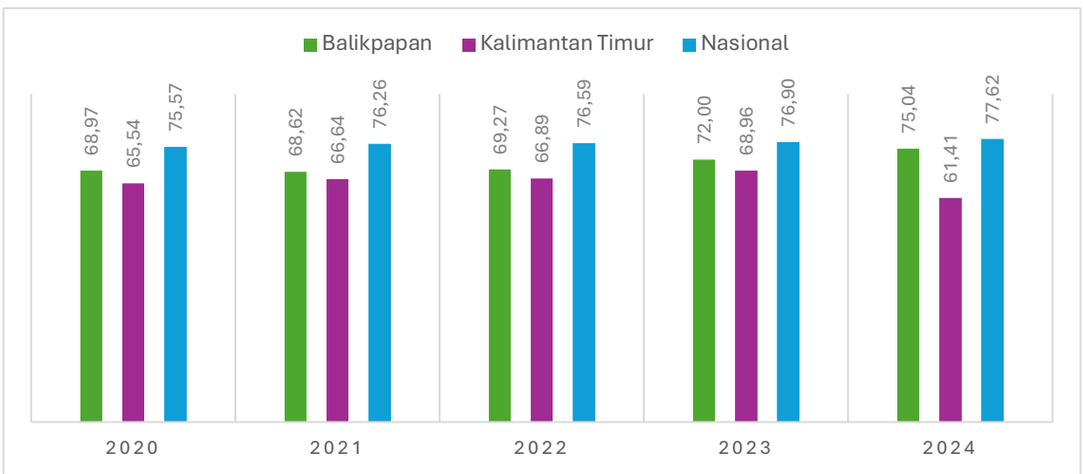
Sumber: BPS, 2025

Selama periode 2020-2024, capaian IPG Kota Balikpapan mengalami trend meningkat. Selama periode tersebut IPG Balikpapan naik sebesar 0,016 poin.

Selain itu, capaian IPG Balikpapan selalu berada diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2024, IPG Kota Balikpapan sebesar 90,34. Capaian tersebut lebih tinggi 2,89 poin dibanding Kalimantan Timur sebesar 87,45. Dengan demikian, pembangunan yang setara antara laki-laki dan perempuan di Kota Balikpapan masih lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Timur. Namun, capaian IPG Balikpapan masih berada dibawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2024, IPG Balikpapan lebih rendah 1,51 poin dibanding IPG Nasional. Untuk itu, upaya peningkatan kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan. Adapun langkah yang bisa dilakukan diantaranya peningkatan akses layanan pendidikan, keshatan, dan standar hidup layak yang setara antara laki-laki dan perempuan.

2.2.6.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG terdiri dari tiga komponen indikator yaitu persentase perempuan dalam parlemen, persentase perempuan dalam tenaga profesional dan persentase kontribusi pendapatan perempuan.



Gambar 2. 40 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Selama periode 2020-2024, capaian IDG Kota Balikpapan menunjukan trend yang meningkat. Selama periode tersebut IDG Balikpapan naik 6,07 poin. Selain itu, capaian IDG Balikpapan selalu berada diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2024, IDG Kota Balikpapan sebesar 75,04. Capaian tersebut lebih tinggi 13,63 poin dibanding Provinsi Kalimantan Timur sebesar 61,41. Dengan demikian, pemberdayaan gender di Kota Balikpapan masih lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Timur. Namun, capaian IDG

Balikpapan masih berada dibawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2024, IDG Balikpapan lebih rendah 2,58 poin dibanding IDG Nasional. Untuk itu, upaya peningkatan pemberdayaan gender di Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan. Adapun langkah yang bisa dilakukan diantaranya peningkatan partisipasi perempuan pada ranah publik, memperkuat kebijakan pengarusutamaan gender (PUG), serta peningkatan layanan pengaduan dan pendampingan perempuan.

Tabel 2. 21 Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perempuan dalam parlemen	20	20	20	22,73	26,67
2	Persentase perempuan dalam tenaga professional	41,76	48,91	49,72	47,64	52,33
3	Persentase kontribusi pendapatan perempuan	26,61	26,75	26,41	26,46	27,56

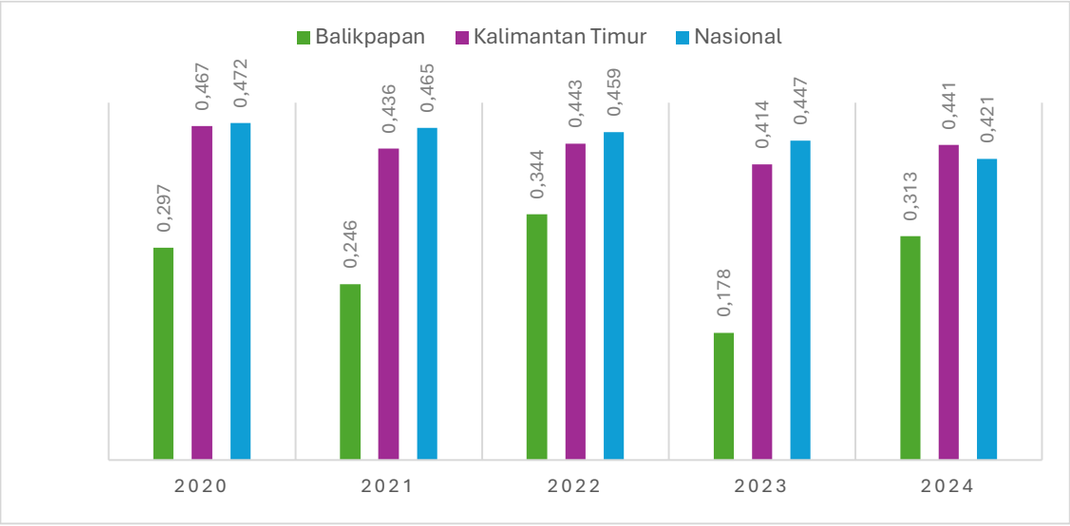
Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan komponen pembentuk IDG, terlihat bahwa persentase perempuan pada parlemen masih berada pada angka 26,67 persen, sehingga belum memenuhi kuota minimal 30 persen. Selain itu persentase perempuan pada tenaga professional masih pada angka 52,33 persen dan kontribusi pendapatan perempuan sebesar 27,56 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi perempuan pada sektor publik, baik di bidang ekonomi maupun politik masih perlu ditingkatkan. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya afirmasi dan pelatihan kepemimpinan pada perempuan; peningkatan akses modal, pelatihan usaha, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha perempuan; memperkuat layanan perlindungan perempuan; integrasi perspektif gender dalam semua kebijakan; serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye kesetaraan gender dan pendidikan keluarga yang inklusif.

2.2.6.5 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks ketimpangan gender (IKG) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat hidup lebih sejahtera. Indeks ketimpangan gender (IKG) diukur dari 3 dimensi dan 5 indikator. Dimensi kesehatan reproduksi diukur dari persetanse perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan persentase perempuan yang melahirkan berumur kurang dari 20 tahun. Dimensi pemberdayaan diukur dari persentase laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas lulus SMA ke atas dan persentase laki-laki dan perempuan menjadi anggota legislatif. Dimensi pasar tenaga kerja diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan. IKG bernilai 0-1 dan bermakna negatif.

Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin tinggi ketimpangan gender dan sebaliknya semakin rendah nilai IKG maka semakin rendah ketimpangan gender yang berarti semakin besar kesetaraan gender yang terwujud. Berikut capaian Indeks ketimpangan gender (IKG) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2. 41 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

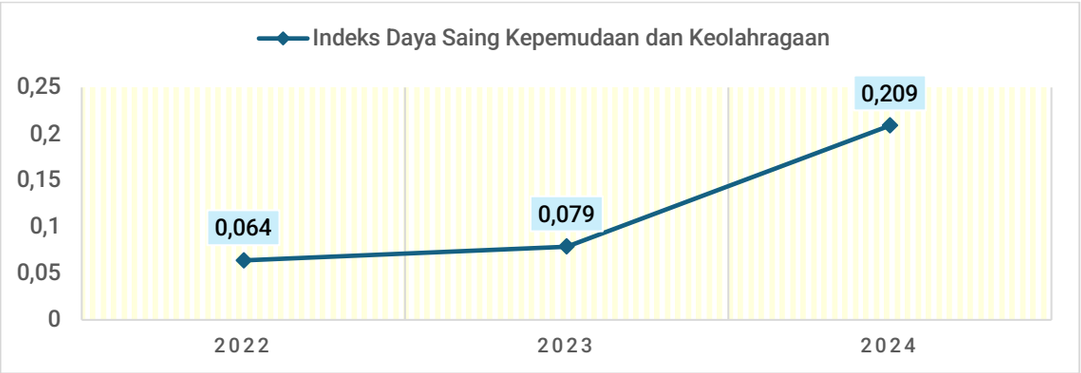
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Selama periode 2020-2024, capaia IKG Kota Balikpapan cukup fluktuatif. Capaian terendah pada tahun 2023 sebesar 0,178. Capaian tersebut kemudian naik cukup signifikan pada tahun 2024 sebesar 0,313. Meskipun cenderung naik, capaian IKG Balikpapan masih berada dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Hal tersebut mengindikasikan kesetaraan gender di Balikpapan masih lebih baik dibanding kesetaraan gender di Kalimantan Timur dan Nasional. Namun demikian, upaya perwujudan kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, memperluas akses dan mutu pendidikan perempuan, peningkatan kesehatan perempuan dan akses reproduksi, serta peningkatan keterwakilan perempuan dalam poltik dan pengambilan keputusan.

2.2.6.6 Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan

Pembangunan kepemudaan dan olahraga di daerah sangat penting untuk menyiapakan generasi muda yang lebih berkualitas. Salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga yakni indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan. Indikator tersebut diukur dari jumlah prestasi pemuda dibidang non olahraga ditambah jumlah prestasi dibidang keolahragaan dibagi total pemuda dan atlet yang dibina. Berikut capaian indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan Kota Balikpapan.

Tabel 2. 22 Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Balikpapan Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan, 2025

Selama periode 2022-2024, capaian indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan Kota Balikpapan mengalami trend meningkat, terutama pada tahun 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan berjalan cukup baik. Partisipasi pemuda dalam pemberdayaa pemuda dan organisasi kepemudaan daerah meningkat, serta pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi yang berjalan cukup baik. Namun demikian, capaian tersebut masih perlu didorong lebih baik pada periode pembangunan berikutnya.

Tabel 2. 23 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Balikpapan Tahun 2022-2024

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan prestasi olahraga	45,83	23,45	20,77
2	Persentase Atlet yang Berprestasi	32,64	21,32	15,11
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	10,07	11,22	13,45
4	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	1,03	2,7	2,28

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan, 2025

Selama periode 2022-2024, capaian kinerja pembangunan kepemudaan dan olahraga Kota Balikpapan masih perlu dioptimalkan. Dilihat dari capaian prestasi olahraga, atlet yang berprestasi, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi, dan pemuda yang kreatif, inovatif, dan mandiri memiliki trend capaian kinerja yang fluktuatif dan cenderung rendah karena dibawah 50 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan prestasi dan atlet olahraga, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan masih perlu mendapatkan perhatian lebih pada periode pembangunan berikutnya.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing suatu daerah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan wilayah, daya saing tidak hanya mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi andalan, tetapi juga mencakup berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan aspek lainnya.

Daya saing daerah dapat diukur melalui indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks Daya Saing Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur kemampuan suatu daerah dalam menciptakan iklim pembangunan yang kondusif, inovatif, dan berkelanjutan. Indeks ini tidak hanya mencerminkan kapasitas ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, serta efisiensi pemerintahan dalam mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengukuran daya saing, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, IDSD berfungsi sebagai landasan analitis untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Daerah yang memiliki daya saing tinggi umumnya mampu menarik investasi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakatnya. Berikut merupakan capaian IDSD Kota Balikpapan Tahun 2022-2024.

Tabel 2. 24 Indeks Daya Saing Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022-2024

		2022	2023	2024
Skor IDSD		3,71	3,59	4,07
Lingkungan Pendukung	Pilar 1: Institusi	4,58	4,56	4,36
	Pilar 2: Infrastruktur	2,94	2,8	3,59
	Pilar 3: Adopsi TIK	4,99	4,94	4,9
	Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro	4,19	3,42	4,44
SDM	Pilar 5: Kesehatan	4,23	4,21	4,16
	Pilar 6: Keterampilan	3,75	2,44	4,05
	Pilar 7: Pasar produk	1,88	4,17	5

Pasar	Pilar 8: Pasar tenaga kerja	3,79	1,62	3,59
	Pilar 9: Sistem keuangan	2,1	5	3,39
	Pilar 10: Ukuran pasar	5	5	5
Ekosistem Inovasi	Pilar 11: Dinamisme bisnis	5	3,05	3,14
	Pilar 12: Kapabilitas inovasi	2,05	2,68	2,56

Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Kota Balikpapan menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Secara umum, skor IDSD meningkat dari 3,71 pada tahun 2022 menjadi 4,07 pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan skor 3,59. Hal ini mencerminkan adanya tantangan sekaligus perbaikan signifikan di beberapa pilar yang menjadi penopang daya saing.

Pada komponen Lingkungan Pendukung, pilar Institusi cenderung mengalami penurunan sebesar 0,22 poin selama tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola dan regulasi. Namun, perbaikan signifikan terlihat pada Infrastruktur yang naik dari 2,8 di 2023 menjadi 3,59 pada tahun 2024, serta pada Stabilitas Ekonomi Makro yang pulih dari 3,42 di 2023 menjadi 4,44 di 2024. Pilar Adopsi TIK relatif stabil dengan skor tinggi di kisaran 4,9-4,99, menandakan kesiapan digital yang konsisten.

Dari komponen Sumber Daya Manusia (SDM), indikator Kesehatan cukup stabil meskipun sedikit menurun. Pada sisi lain, pilar Keterampilan juga sempat turun cukup banyak pada tahun 2023, namun kembali meningkat signifikan menjadi 4,05 pada 2024. Pilar Pasar Produk menunjukkan peningkatan paling mencolok dari 1,88 di 2022 menjadi 5 pada 2024 yang menandakan adanya peningkatan besar dalam efisiensi dan daya saing produk daerah.

Pada komponen Pasar, terjadi fluktuasi cukup tinggi. Pasar Tenaga Kerja turun pada 2023, namun kembali membaik ke level 3,59 pada 2024. Pada sisi lain, Sistem Keuangan menunjukkan gejolak dengan lonjakan di 2023, namun kembali turun menjadi 3,39 pada 2024 yang menandakan masih adanya ketidakstabilan dalam sektor keuangan daerah. Ukuran Pasar stabil dengan skor maksimum 5 sepanjang periode.

Sementara itu, pada komponen Ekosistem Inovasi, terlihat adanya kelemahan struktural. Dinamisme Bisnis menurun signifikan dari 5 di 2022 menjadi 3,14 di 2024, sedangkan Kapabilitas Inovasi relatif rendah meskipun sempat meningkat pada 2023 (2,68) dan turun kembali ke 2,56 di 2024. Hal ini menunjukkan bahwa aspek inovasi dan pengembangan usaha masih menjadi titik lemah dalam daya saing daerah.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbaikan pada sejumlah pilar strategis seperti Pasar Produk, Infrastruktur, Stabilitas Makro, dan Keterampilan SDM, tantangan masih perlu diatasi di Kota Balikpapan pada pilar Institusi, Dinamisme Bisnis, serta Kapabilitas Inovasi agar daya saing daerah dapat lebih berkelanjutan dan inklusif.

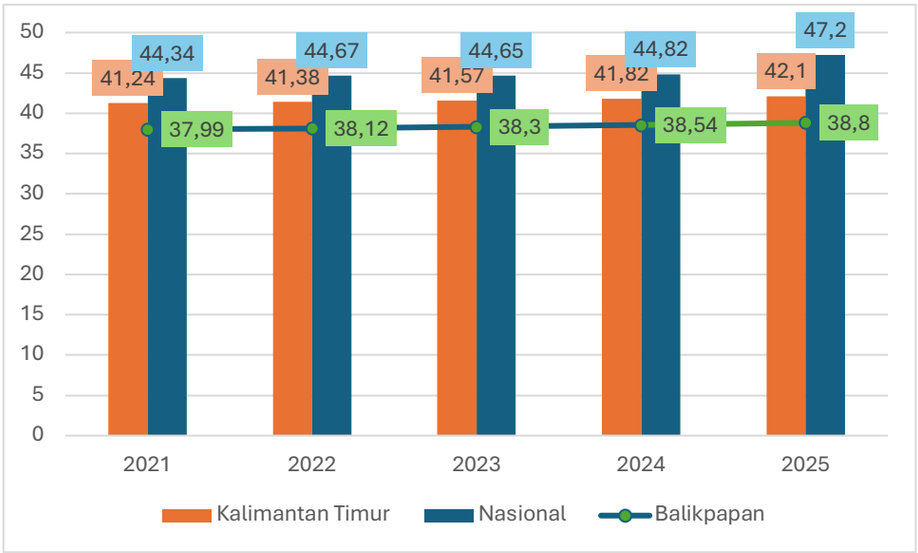
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam menentukan kemajuan suatu daerah. SDM yang kompetitif tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan global, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan individu dalam menguasai keterampilan, pendidikan, serta inovasi menentukan efektivitas mereka dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Tingkat produktivitas berkaitan erat dengan kualitas SDM yang ada pada daerah terkait. SDM yang unggul akan lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, menghasilkan *output* yang lebih tinggi, serta meningkatkan efisiensi kerja. Produktivitas yang meningkat secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Daya saing SDM juga berkorelasi dengan angka ketergantungan, yaitu rasio antara penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia) dengan penduduk usia produktif. Daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi cenderung menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar karena beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif lebih tinggi. Sebaliknya, jika angka ketergantungan menurun dan diimbangi dengan peningkatan produktivitas, suatu daerah dapat menikmati "bonus demografi," yang terjadi karena sebagian besar penduduk berada dalam usia kerja dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Angka ketergantungan adalah indikator demografis yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (kombinasi usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Semakin tinggi angka ketergantungan maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam membiayai kebutuhan kelompok usia tidak produktif. Faktor-faktor yang memengaruhi angka ketergantungan meliputi tingkat kelahiran, angka harapan hidup, serta migrasi penduduk. Daerah dengan angka kelahiran tinggi cenderung memiliki angka ketergantungan tinggi karena banyaknya anak-anak yang belum memasuki usia produktif. Berikut merupakan capaian angka ketergantungan di Kota Balikpapan.



Gambar 2. 42 Angka Ketergantungan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Angka ketergantungan di Kota Balikpapan secara konsisten lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2021 hingga 2025. Angka ketergantungan di Balikpapan mengalami peningkatan secara bertahap dari 37,99 pada tahun 2021 menjadi 38,80 pada tahun 2025 Kondisi tersebut mencerminkan adanya kenaikan beban penduduk usia non-produktif terhadap penduduk usia produktif. Sementara itu, angka ketergantungan Provinsi Kaltim menunjukkan tren peningkatan yang relatif lebih stabil walaupun berada di angka yang lebih tinggi, dari 41,24 di tahun 2021 menjadi 42,10 di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum beban ketergantungan di Provinsi Kaltim lebih besar dibandingkan dengan Kota Balikpapan. Selisih angka ketergantungan yang lebih jauh ada pada nasional yang secara umum hampir mencapai 45 persen pada tahun 2021 hingga 2024, dan mencapai 47 persen pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesehatan yang lebih baik sehingga meningkatkan jumlah penduduk kelompok lanjut usia yang masuk dalam kategori non produktif. Data angka ketergantungan nasional pada tahun 2025 meningkat 2,38 persen karena menggunakan data proyeksi penduduk 2025-2035. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki struktur penduduk yang relatif lebih produktif dan berpotensi menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih kuat.

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

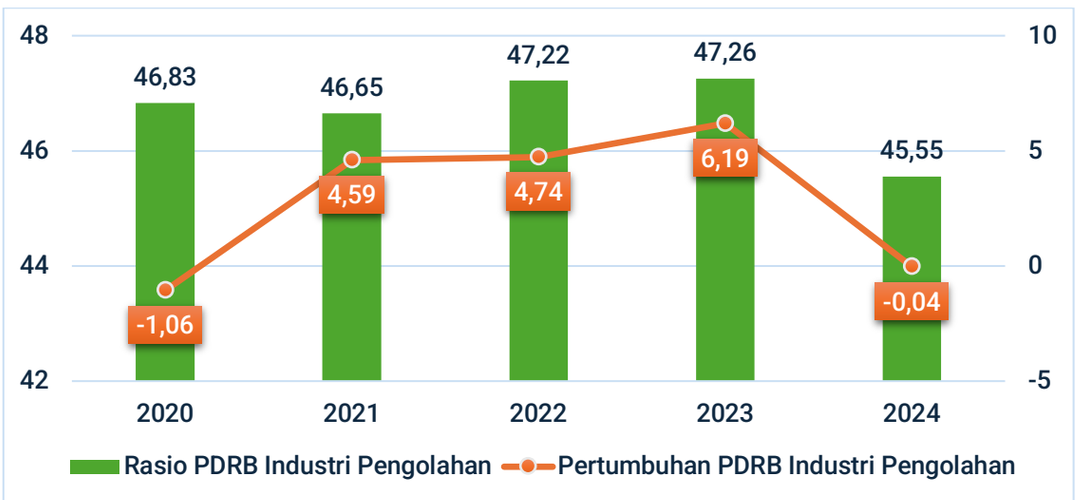
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta inovasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan produktivitas ekonomi suatu wilayah. Kemampuan suatu daerah dalam mengadopsi serta mengembangkan teknologi dan inovasi menjadi faktor utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi pada era globalisasi dan transformasi

digital. Iptek dan inovasi tidak hanya mendorong efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, tetapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan industri kreatif, ekonomi digital, serta diversifikasi usaha. Dengan meningkatkan adopsi teknologi dan memperkuat ekosistem inovasi, suatu wilayah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta mempercepat proses industrialisasi yang inklusif dan ramah lingkungan. Sub bagian ini dijabarkan beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi ini, seperti rasio PDRB industri pengolahan, rasio PDRB akomodasi makan dan minum, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan indeks inovasi daerah.

2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Agenda hilirisasi menjadi salah satu agenda besar guna meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah. Rasio PDRB industri pengolahan menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah. Rasio PDRB industri pengolahan yang semakin tinggi mengindikasikan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri terhadap perekonomian daerah semakin tinggi dan diharapkan dapat mendorong kenaikan PDRB daerah.

Rasio PDRB industri pengolahan dihitung dengan membandingkan nilai PDRB sektor industri pengolahan terhadap nilai total PDRB daerah. Kenaikan dan penurunan rasio tidak hanya ditentukan oleh kinerja dan harga komoditas sektor industri pengolahan tetapi juga dipengaruhi oleh nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor lainnya karena bersifat *zero sum game.*



Gambar 2. 43 Rasio dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kota Balikpapan Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2025

Pada periode 2020-2024, pergerakan rasio PDRB industri pengolahan cukup mengalami fluktuasi. PDRB nominal industri pengolahan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun meskipun secara riilnya sempat mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2020 dan 2024. PDRB nominal industri

pengolahan mencapai 69,95 triliun rupiah pada tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 2,3 triliun rupiah dibandingkan tahun 2023. Namun demikian, rasio terhadap PDRB daerah mengalami penurunan sebesar 1,71 persen poin. Turunnya rasio PDRB industri pengolahan disebabkan oleh kenaikan PDRB dari sejumlah lapangan usaha lain yang tidak kalah tinggi. PDRB sektor konstruksi tercatat naik sebesar 2,10 triliun rupiah, sektor perdagangan besar dan eceran naik 1,77 triliun rupiah, dan sektor transportasi dan pergudangan naik 2,05 triliun rupiah.

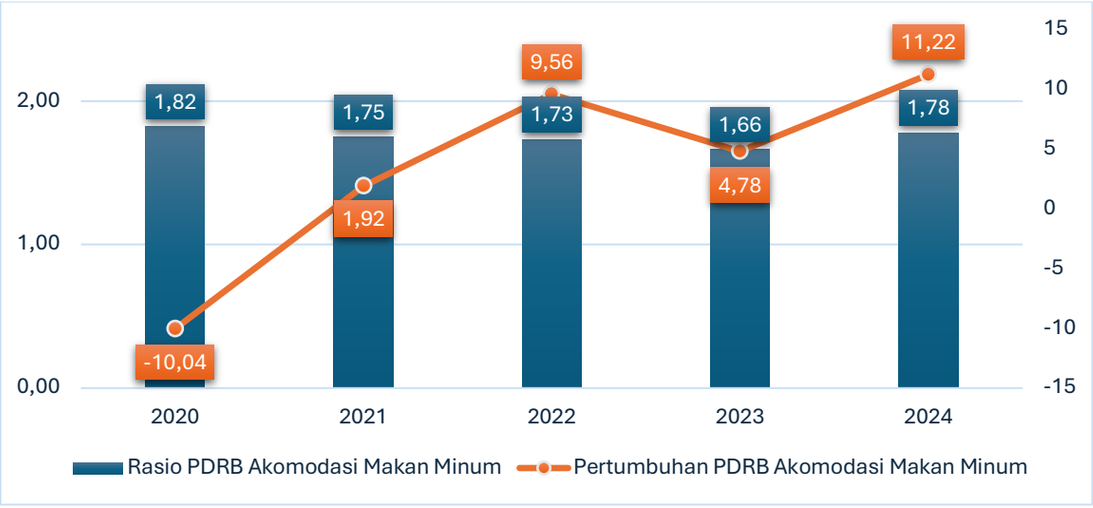
Turunnya rasio PDRB industri pengolahan di Kota Balikpapan pada tahun 2024 tidak mengubah struktur perekonomian daerah. Industri pengolahan tetap menjadi lapangan usaha yang paling mendominasi nilai tambah yang dihasilkan oleh Kota Balikpapan dengan rata-rata mencapai 46,70 persen per tahun pada periode 2020-2024. Tingginya kontribusi sektor industri pengolahan didorong oleh tingginya aktivitas produksi kilang minyak milik PT Pertamina yaitu Pertamina Refinery Unit V. Kapasitas produksi kilang minyak Balikpapan mencapai 360 ribu barel per hari dan diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan penyelesaian proyek RDMP pada tahun 2025. Selain itu, proyek RDMP ini juga ditargetkan dapat menghasilkan produk petrokimia melalui unit Residual Fluid Catalytic Cracking (PT Kilang Pertamina Internasional, 2024). Selain industri kilang minyak, beberapa industri besar dan sedang lainnya juga turut menyumbang PDRB sektor industri pengolahan Kota Balikpapan. Pada tahun 2024, tercatat terdapat 104 perusahaan industri besar dan sedang yang bergerak di berbagai macam lapangan usaha seperti industri makanan, industri barang logam, dan lain sebagainya.

Kontribusi industri pengolahan di Kota Balikpapan juga didukung oleh keberadaan industri mikro dan kecil (IMK). Berdasarkan hasil survei IMK tahun 2023, Kota Balikpapan memiliki 4.759 usaha/perusahaan IMK dan menduduki peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. IMK di Kota Balikpapan juga menjadi salah satu sektor yang menyerap ribuan tenaga kerja. Jumlah pekerja di sektor IMK mencapai 9.394 orang pada tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan IMK tidak hanya berkontribusi pada peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan secara umum tetapi juga memperluas lapangan kerja bagi penduduk di Kota Balikpapan.

Sektor industri pengolahan diperkirakan akan terus bertumbuh seiring dengan berbagai agenda pengembangan industri, baik industri berskala besar dan sedang maupun skala mikro dan kecil. Intervensi dalam pelayanan perizinan, permodalan, pemasaran, dan peningkatan kapasitas pelaku industri perlu ditingkatkan guna mendorong kenaikan nilai PDRB sektor industri pengolahan di Kota Balikpapan.

2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

PDRB akomodasi makan dan minum merupakan indikator yang digunakan untuk mewakili pengukuran nilai tambah yang dihasilkan melalui kegiatan pariwisata. Pemahaman pariwisata saat ini tidak hanya terbatas pada kegiatan rekreasi tetapi juga meliputi kegiatan perjalanan dengan tujuan bisnis dan pendidikan yang bersifat jangka pendek. Rasio PDRB akomodasi makan dan minum dihitung dengan membandingkan nilai PDRB sektor akomodasi makan dan minum terhadap total PDRB daerah. Rasio ini ditujukan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan pariwisata terhadap perekonomian daerah.



Gambar 2. 44 Rasio dan Pertumbuhan PDRB Akomodasi Makan Minum Kota Balikpapan
Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2025

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum Kota Balikpapan tergolong sangat kecil yaitu 1,75 persen per tahun. Angka tersebut sangat jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio PDRB industri pengolahan sebagai lapangan usaha utama di Kota Balikpapan. Sebagai daerah perkotaan, potensi pariwisata Kota Balikpapan tidak terletak pada potensi wisata alam. Namun, jika mengacu pada konsep pariwisata saat ini, kegiatan wisata dengan tujuan bisnis dapat menjadi faktor penarik bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan ke Kota Balikpapan.

Nilai PDRB akomodasi makan dan minum Kota Balikpapan secara nominal maupun riil terus menunjukkan kenaikan. PDRB nominal sektor ini mencapai 2,73 triliun pada tahun 2024, sedangkan PDRB riil sebesar 1,57 triliun rupiah. Meskipun rasio PDRB akomodasi makan dan minum Kota Balikpapan selama periode 2020-2024 tergolong kecil, pertumbuhan sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang tinggi mencapai 11,22 persen pada tahun 2024. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sektor akomodasi makan dan minum merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan.

2.3.2.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif semakin menjadi sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor ekonomi kreatif mencerminkan kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian suatu daerah, seperti seni, desain, media, kuliner, hingga teknologi berbasis kreativitas. Ekonomi kreatif menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada kreativitas, pengetahuan, dan budaya seiring dengan berkembangnya inovasi dan teknologi digital.

Penguatan ekosistem ekonomi kreatif memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, komunitas kreatif, serta akademisi. Faktor-faktor seperti akses terhadap pembiayaan, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta infrastruktur pendukung menjadi aspek penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini.

2.3.2.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan indikator yang menghitung perbandingan antara jumlah orang yang berusaha dibantu dengan buruh tetap dengan total angkatan kerja di daerah tersebut. Berusaha dibantu dengan buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Besarnya rasio kewirausahaan dapat mengindikasikan seberapa banyak penduduk yang mau berwirausaha dan membuka lapangan kerja.

Tabel 2. 25 Rasio Kewirausahaan Daerah Kota Balikpapan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Berusaha Dibantu Buruh Tetap	11.750	11.466	9.591	11.450	13.113
Total Angkatan Kerja	310.169	320.117	329.542	343.384	366.791
Rasio Kewirausahaan Daerah	3,79	3,58	2,91	3,33	3,58

Sumber: Kondisi Angkatan Kerja Kota Balikpapan Tahun 2020-2024, Diolah

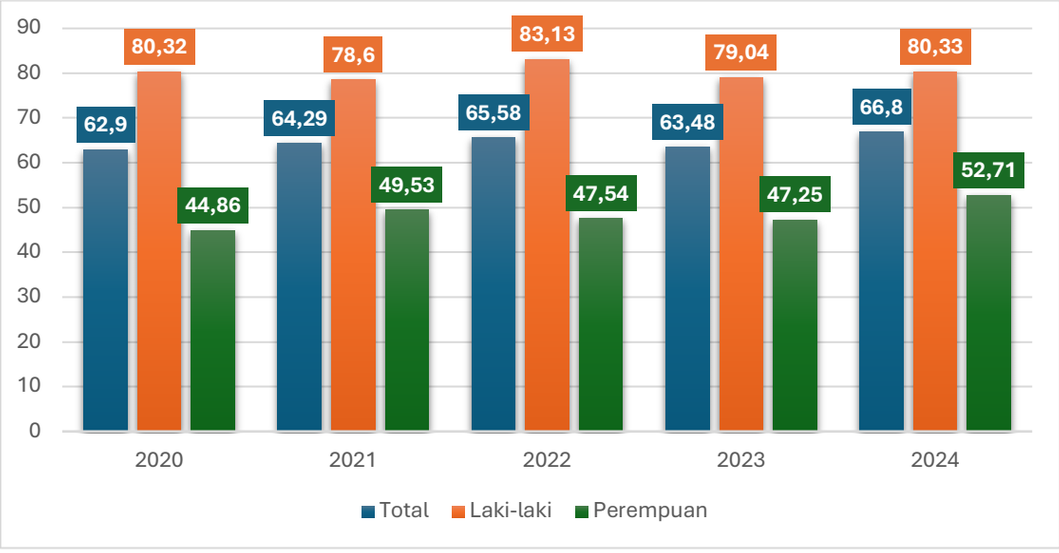
Jumlah penduduk yang menjadi wirausaha dan mempekerjakan karyawan tetap mengalami fluktuasi di saat total angkatan kerja terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan masyarakat Kota Balikpapan sebetulnya sudah memiliki minat untuk berwirausaha tetapi beberapa diantaranya belum mampu mempertahankan skala usahanya. Kondisi usaha yang belum stabil dapat menyebabkan naik turunnya rasio kewirausahaan. Hal ini umum terjadi pada usaha yang baru berjalan dan masih berskala mikro karena penerimaan yang diperoleh belum dapat menjanjikan keuntungan jangka panjang. Selain itu, faktor target pasar dan target produksi yang tersegmentasi juga turut

mempengaruhi keputusan untuk mempekerjakan karyawan tetap atau cukup menjalankan usahanya sendiri.

Pada segmen Industri Mikro dan Kecil (IMK), misalnya, keterbatasan modal menjadi salah satu persoalan yang dihadapi di Kota Balikpapan. Pada tahun 2024, setidaknya 87,48 persen IMK menggunakan modal milik sendiri. Padahal, untuk mengembangkan usaha diperlukan modal yang tidak sedikit, terlebih jika ingin menambah kapasitas produksi, termasuk menambah pekerja di dalamnya. Persoalan seperti suku bunga yang tinggi, persyaratan yang sulit, dan tidak memiliki agunan menjadi sejumlah alasan IMK memilih untuk tidak memanfaatkan pinjaman dari bank. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk bantuan permodalan, pemasaran, peningkatan kapasitas produksi sangat diperlukan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan minat dan keberlanjutan kewirausahaan di Kota Balikpapan.

2.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Tinggi rendahnya TPAK dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan tuntutan ekonomi.

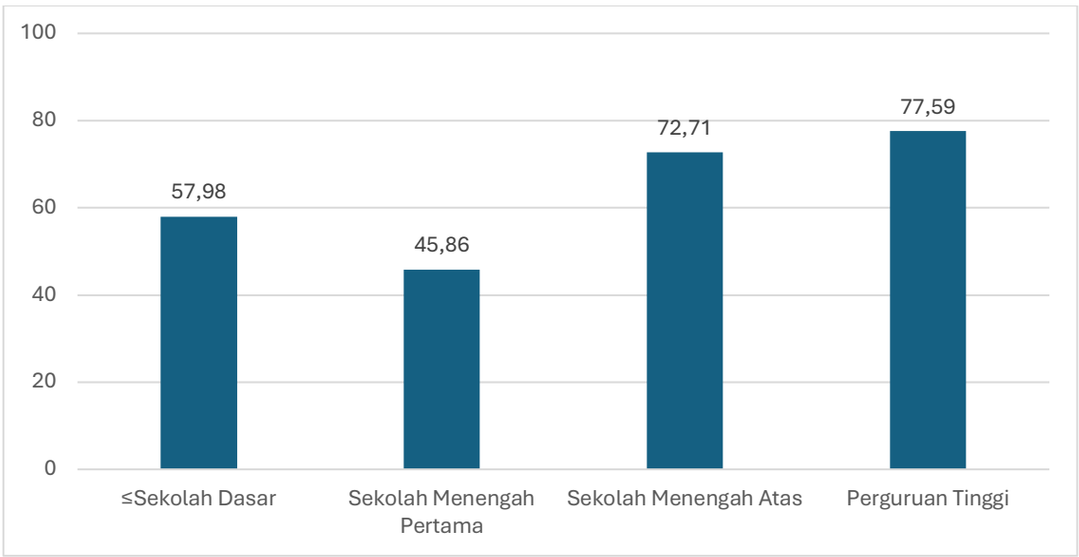


Gambar 2. 45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Balikpapan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Balikpapan 2025, Keadaan Angkatan Kerja Kota Balikpapan Tahun 2020-2023 dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2024, Diolah

Penduduk usia kerja yang memasuki angkatan kerja Kota Balikpapan secara umum menunjukkan kenaikan hingga 1,56 persen per tahun pada periode 2020-2024. Kondisi ini mengindikasikan keinginan penduduk usia kerja untuk

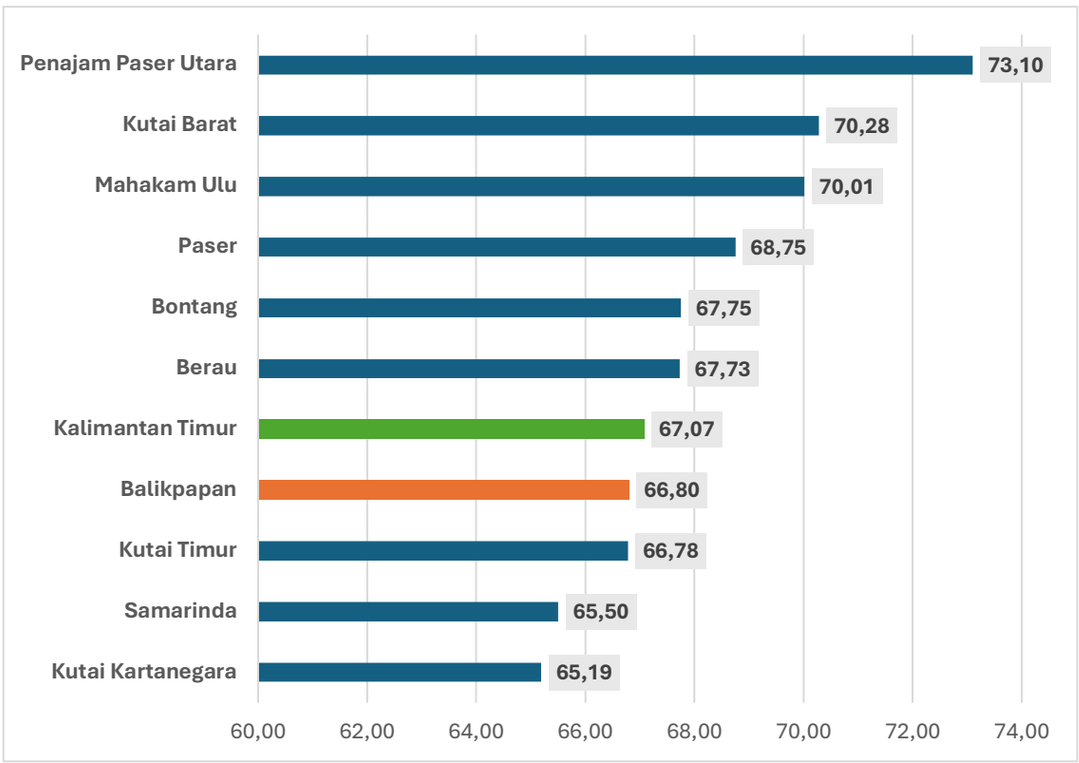
masuk ke dalam pasar kerja terus meningkat, baik yang sudah memiliki pekerjaan maupun masih mencari pekerjaan. Pada periode 2020-2023, TPAK laki-laki maupun perempuan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yakni mencapai 80,27 persen per tahun sedangkan TPAK perempuan sebesar 47,30 persen per tahun. Kondisi ini umum terjadi di Kota Balikpapan maupun Indonesia mengingat laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga, sedangkan bagi angkatan kerja perempuan keputusan untuk masuk ke dalam pasar kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti umur dan status perkawinan.



Gambar 2. 46 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Balikpapan Tahun 2024

Sumber: Balikpapan dalam Angka 2025, diolah

TPAK Kota Balikpapan menurut pendidikan menggambarkan seberapa besar proporsi angkatan kerja terhadap penduduk bukan angkatan kerja pada setiap jenjang pendidikan yang ditamatkan. Jumlah TPAK tertinggi tercatat pada jenjang pendidikan perguruan tinggi diikuti dengan jenjang pendidikan SMA. Prasyarat lulusan perguruan tinggi saat ini menjadi prasyarat yang sering diminta oleh perusahaan sehingga 77,59 persen penduduk berpendidikan tinggi memilih masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Kondisi yang serupa juga ditunjukkan oleh TPAK pada jenjang SMA yang jumlahnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan TPAK perguruan tinggi karena permintaan akan lulusan SMA juga cukup diminati oleh perusahaan.



Gambar 2. 47 TPAK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

TPAK Kota Balikpapan selama periode 2020-2024 menunjukkan kenaikan tetapi masih menjadikan Kota Balikpapan sebagai daerah dengan TPAK terendah keempat se-Provinsi Kalimantan Timur. TPAK Kota Balikpapan lebih rendah 0,27 persen poin dibandingkan dengan TPAK Provinsi Kalimantan Timur dan 6,30 persen poin lebih rendah dibandingkan TPAK Kabupaten Penajam Paser Utara. Rendahnya TPAK di Kota Balikpapan mengindikasikan rendahnya penduduk usia kerja yang masuk ke dalam pasar kerja.

Perekonomian Kota Balikpapan yang hingga saat ini didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja di pasar kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja berkeahlian dan berpendidikan tinggi serta bentuk industri padat modal menjadi salah satu penyebab belum terserapnya angkatan kerja dengan optimal. Kondisi ini membuat sebagian penduduk usia kerja memilih untuk mengurus rumah tangga atau tidak melakukan aktivitas apa pun karena merasa putus asa dalam mencari pekerjaan. Intervensi untuk meningkatkan keinginan penduduk usia kerja untuk aktif secara ekonomi sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi tingkat produktivitas dan kesejahteraan penduduk. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas angkatan kerja perlu menjadi prioritas pembangunan daerah guna menjamin daya saing ekonomi daerah.

2.3.2.6 Indeks Inovasi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif perlu untuk ditumbuhkembangkan sehingga untuk mendorong praktik inovasi tersebut

diselenggarakan penilaian inovasi daerah yang diukur melalui indeks inovasi daerah. Penilaian indeks inovasi daerah didasarkan pada sejumlah kriteria dan jumlah inovasi yang diajukan.

Tabel 2. 26 Indeks Inovasi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Skor	Predikat
2020	1.117	Sangat inovatif
2021	39,2	Inovatif
2022	53,88	Inovatif
2023	39,14	Inovatif
2024	57,21	Inovatif

Sumber: SK Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020 sampai 2024, Diolah

Perhitungan indeks inovasi daerah mengalami perubahan sejak tahun 2021 sehingga skor pada tahun 2020 dihitung dalam skala yang berbeda. Indeks inovasi daerah Kota Balikpapan menunjukkan hasil yang cukup baik dengan capaian tertingginya diraih pada tahun 2024. Skor indeks inovasi daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 18,07 poin dibandingkan tahun 2023, menduduki peringkat ke-37 dari 93 kota se-Indonesia. Ada pun inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama periode 2020-2024 diantaranya Mall Pelayanan Publik, Pantai Balikpapan (Pelayanan terpadu dan terintegrasi buat layanan kependudukan dan pencatatan sipil), juga inovasi layanan digital. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Balikpapan juga menerima penghargaan “Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2024” atas kinerja Mall Pelayanan Publik yang cepat dan mudah.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi agenda penting dalam menjamin pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan yang setinggi-tingginya tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk generasi berikutnya. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana penerapan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan digunakan Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru. Perhitungan Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru hingga saat ini baru dihitung di tingkat nasional dan provinsi sehingga untuk menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu menggunakan proksi indikator lain yang dianggap dapat mewakili. Berikut besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Balikpapan Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 27 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha	1.036.780,23	1.114.844,81	1.207.705,85	1.281.748,86	1.318.903
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)	1,00	1,00	0,95	0,90	0,86
PDRB ADHB	103.918.750,64	111.400.693,73	127.371.534,38	143.169.188,91	153.567.096

Sumber: BPS Kota Balikapapan, 2025

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada PDRB ADHB menurut lapangan usaha Kota Balikpapan merupakan bagian dari beberapa sektor PDRB dengan nilai rata-rata distribusi terendah selama tahun 2020-2024. Distribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kota Balikpapan menempati urutan 11 dari 17 sektor lapangan usaha PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memerlukan upaya tambahan mengingat bahwa Kota Balikpapan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kota Balikpapan akan meningkat secara nominal dan memberikan kontribusi lebih signifikan pada PDRB.

2.3.4 Transformasi Digital

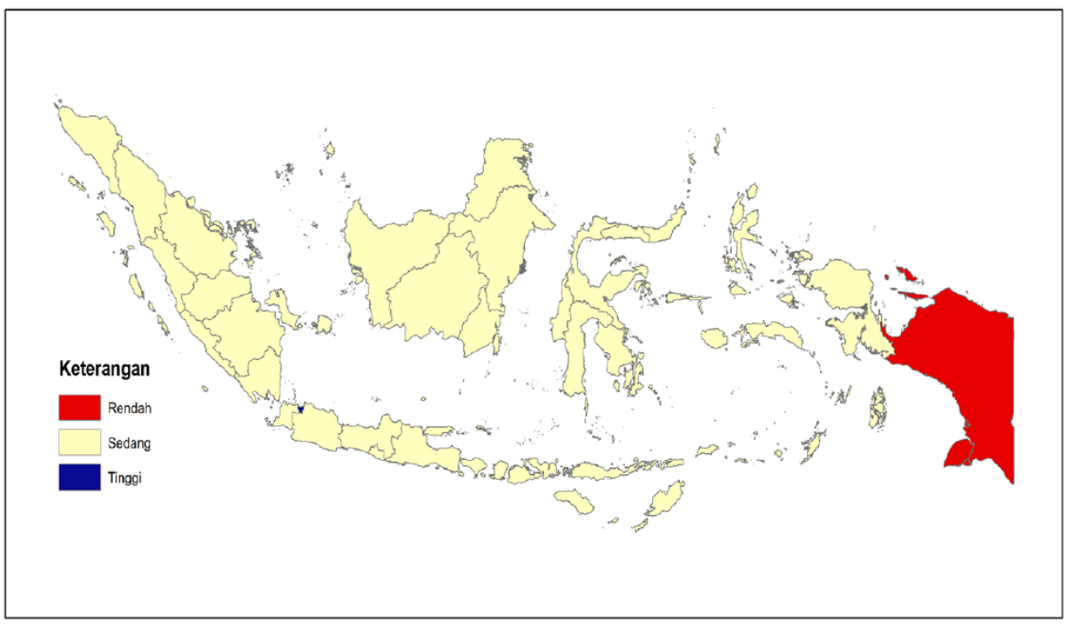
Transformasi digital menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi dan merespons dinamika perkembangan global, transformasi digital dapat menjadi katalisator untuk mewujudkan Indonesia Digital yang kuat, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Transformasi digital juga merupakan proses untuk meningkatkan produktivitas, menumbuhkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi pilar utama dalam transformasi digital yang meliputi berbagai bidang kehidupan. . Penerapan teknologi digital mampu mendorong efisiensi dalam proses produksi, mempercepat arus informasi, dan meningkatkan aksesibilitas layanan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan inovatif. Pembangunan TIK yang semakin baik akan mendorong terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi guna mendukung transformasi digital.

2.3.4.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) yang merupakan salah satu indikator

penting dalam mengukur tingkat kemajuan pembangunan TIK di wilayah Indonesia. IP-TIK terdiri dari 11 indikator yang dikelompokkan dalam tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan, dan keahlian. IP-TIK menggunakan skala 0-10, artinya semakin tinggi nilai indeks maka pembangunan TIK semakin optimal, sedangkan jika nilai indeks semakin rendah menunjukan pembangunan TIK yang kurang optimal di suatu wilayah.

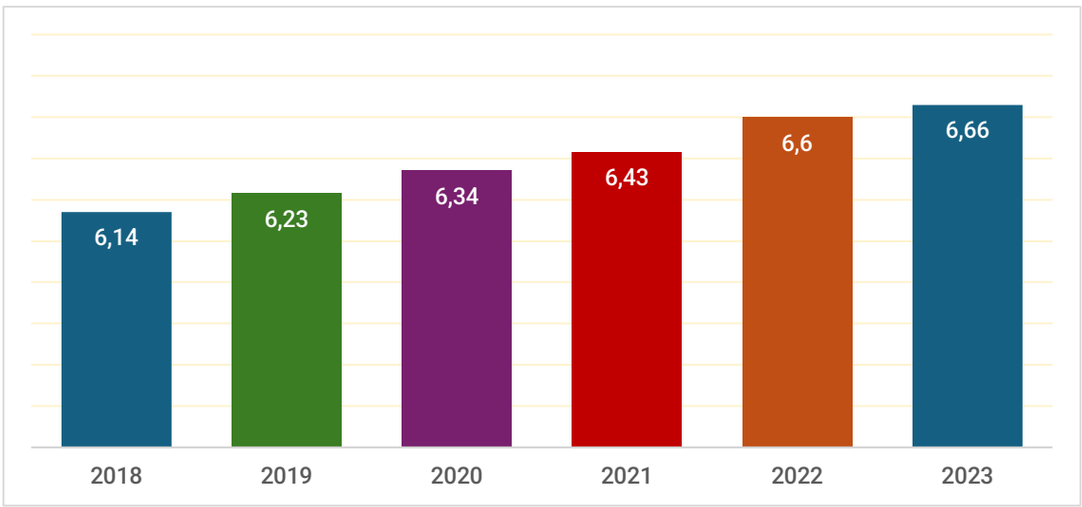
Sejak tahun 2016 BPS mengembangnkan IP-TIK pada level nasional dan provinsi mengacu pada metodelogi yang dirilis oleh *International Telecommunication Union* (ITU) dengan nama *ICT Development Index* (ICT-DI) sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK yang dapat diperbandingkan secara internasional. Indeks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pembangunan TIK, tetapi juga sebagai indikator untuk menilai pertumbuhan TIK, kesenjangan digital, dan potensi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah.



Gambar 2. 48 Visualisasi Sebaran Indeks Pembangunan TIK Indonesia menurut Provinsi, 2023

Sumber: BPS (2024)

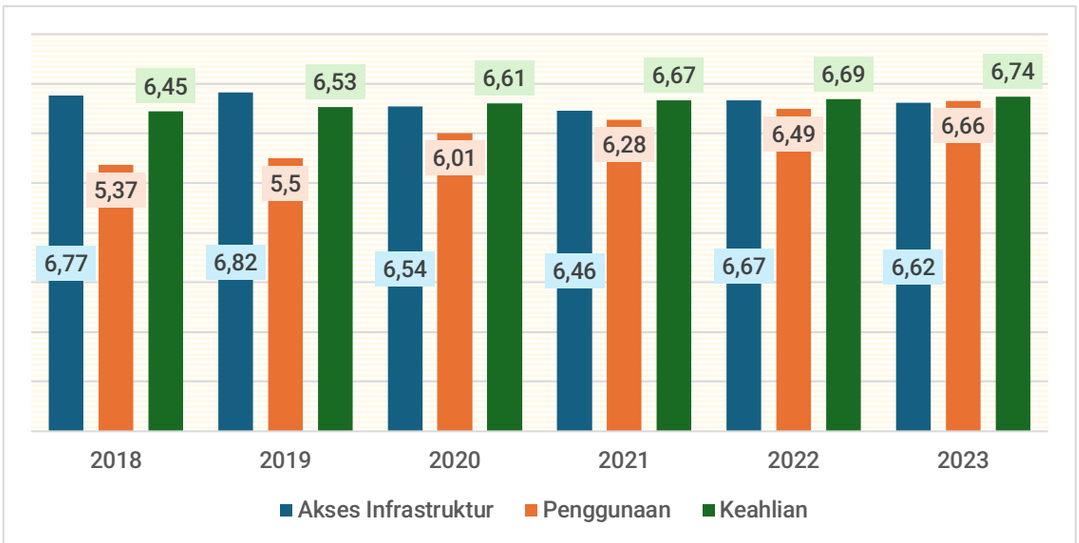
Nilai Indeks Pembangunan TIK dikategorikan dalam 3 kategori yaitu, tinggi (7,51–10,00), sedang (5,01–7,50), rendah (2,51–5,00), dan sangat rendah (0–2,50). Pada tahun 2023 sebagian besar provinsi berada pada kelompok IP-TIK yang dengan kategori sedang, baik pada tahun 2022 maupun 2023 termasuk Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi Wilayah induk dari Kota Balikpapan.



Gambar 2. 49 Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 sebagai Proksi

Sumber: *BPS (2024)*

Nilai IP-TIK Kota Balikpapan saat ini masih menggunakan proksi data dari Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data pada tahun 2023, IP-TIK Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 6,66, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,60. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan penggunaan layanan TIK, serta peningkatan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital dalam pembangunan TIK di wilayah Kalimantan Timur.



Gambar 2. 50 Nilai Subindeks IP-TIK Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 sebagai Proksi

Sumber: BPS (2024)

Berdasarkan data subindeks IP-TIK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mengalami peningkatan pada ketiga aspek yang diukur. Subindeks Penggunaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 6,49 pada tahun 2022 menjadi 6,66 pada tahun 2023. Sementara itu, subindeks Keahlian juga menunjukkan peningkatan dari 6,69 pada tahun 2022 menjadi 6,74 pada tahun

2023. Namun, subindeks Akses dan Infrastruktur mengalami sedikit penurunan dari 6,67 pada tahun 2022 menjadi 6,62 pada tahun 2023.

Peningkatan nilai IP-TIK dan nilai ketiga subindeks tersebut menunjukkan adanya upaya yang berkelanjutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan TIK, serta peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Namun, sangat penting untuk terus memperkuat pembangunan TIK di seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur guna mengurangi kesenjangan digital antarwilayah. Dengan demikian, manfaat TIK dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk di Kota Balikpapan.

2.3.4.2 Tingkat Penetrasi dan Kontribusi Internet

Pada Tahun 2024 Tingkat penetrasi internet di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 80,63 persen, dengan jumlah pengguna internet sekitar 3,1 juta jiwa dari total populasi sekitar 4 juta jiwa. Angka tersebut menempatkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan peringkat kedua tertinggi di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Tengah (82,40%). Dari sisi kontribusi, Kalimantan Timur berkontribusi sebesar 1,42 persen secara nasional dan 23,53 persen kontribusi terhadap total penetrasi internet di Pulau Kalimantan. Kota Balikpapan sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian penetrasi internet tersebut, dengan akses internet yang memadai dan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya konektivitas digital.

Tabel 2. 28 Tingkat Penetrasi dan Kontribusi Internet di Pulau Kalimantan Tahun 2024 sebagai Proksi

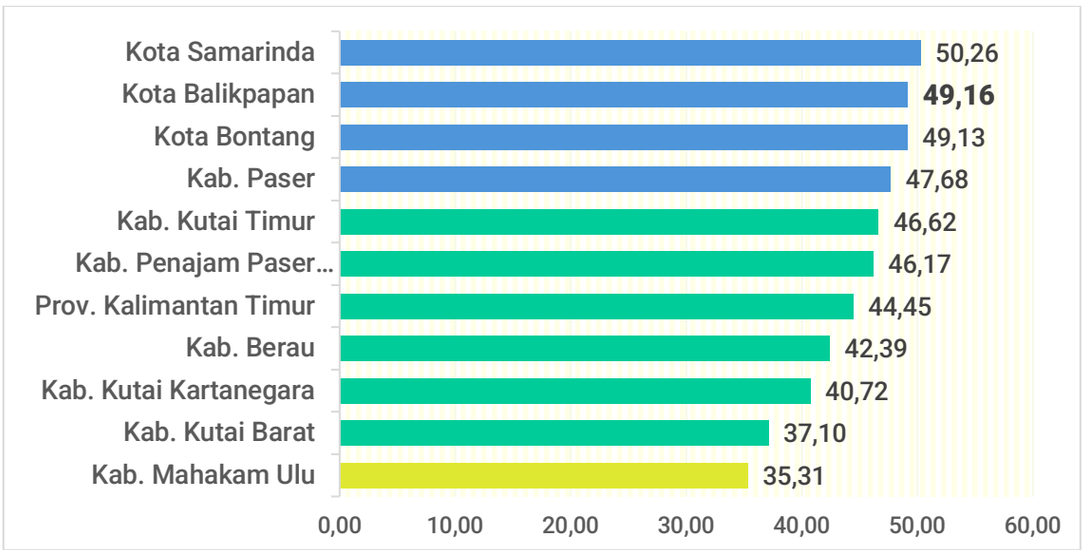
Provinsi	Penetrasi	Kontribusi (Nasional)	Kontribusi (Pulau)
Kalimantan Barat	79,03%	2,01%	33,17%
Kalimantan Timur	80,63%	1,42%	23,53%
Kalimantan Selatan	71,76%	1,37%	22,61%
Kalimantan Tengah	82,40%	1,03%	17,06%
Kalimantan Utara	66,69%	0,22%	3,63%

Sumber: Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2024

Metode koneksi internet di Kalimantan Timur, termasuk Kota Balikpapan, mayoritas menggunakan mobile data dengan operator seluler sebesar 71,43 persen, disusul oleh penggunaan Wifi di rumah sebesar 26,79 persen, dan Wifi di kantor, sekolah, atau kampus sebesar 1,79 persen. Pola penggunaan ini mencerminkan preferensi masyarakat akan akses internet yang mudah dan fleksibel dengan perangkat mobile. Dengan tingkat penetrasi yang tinggi dan pola penggunaan yang didominasi mobile data, Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur secara umum menjadi wilayah yang siap menghadapi transformasi digital dan mendorong perkembangan ekonomi digital di kawasan Kalimantan.

2.3.4.3 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan indikator yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (BPSDM Komdigi Kemkomdigi RI). IMDI bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat perkembangan masyarakat digital di suatu wilayah. IMDI disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu infrastruktur dan ekosistem digital, pemberdayaan masyarakat, keterampilan digital, serta peluang lapangan kerja. Keempat pilar tersebut menjadi landasan fundamental dalam membangun dan memperkuat komunitas digital di Indonesia. Berikut gambar grafik kondisi masyarakat digital di Kota Balikpapan berdasarkan hasil pengukuran IMDI pada Tahun 2024.

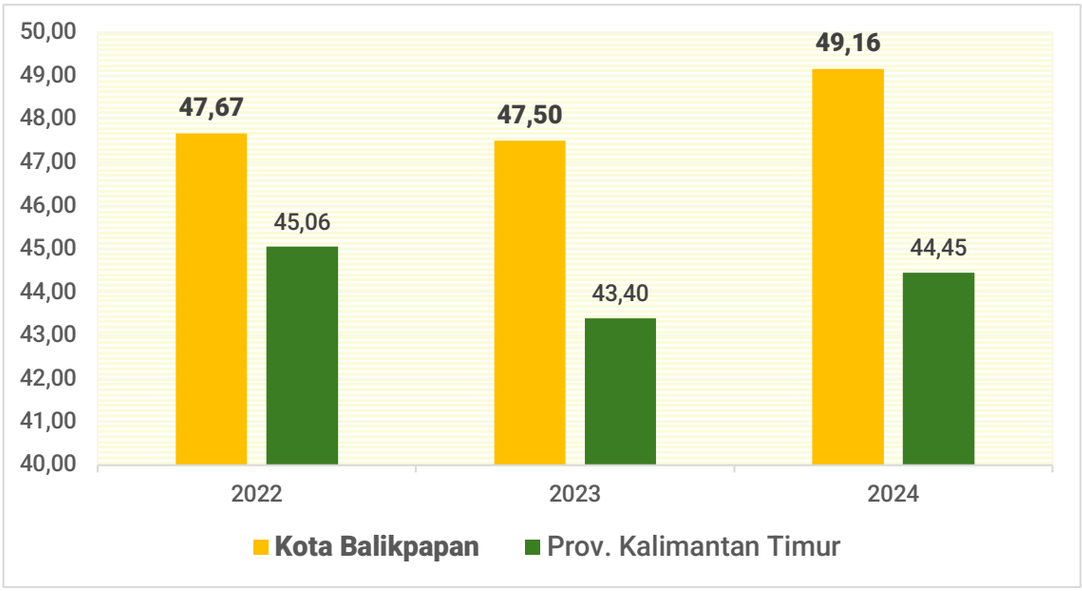


Gambar 2. 51 Perbandingan Nilai IMDI Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024

Sumber: Buku IMDI 2024, BPSDM Komdigi Kemkomdigi RI
Keterangan kategori nilai IMDI:

- *Sangat Rendah: nilai IMDI kurang dari 30,88*
- *Rendah: nilai IMDI berada di antara 30,88 hingga 36,27*
- *Cukup: nilai IMDI berada di kisaran 36,28 hingga 47,06*
- *Tinggi: nilai IMDI berada di antara 47,07 hingga 52,47*
- *Sangat Tinggi: nilai IMDI lebih besar dari 52,47*

Pada tahun 2024, Kota Balikpapan mencatat nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) sebesar 49,16 yang termasuk dalam kategori tinggi. Nilai ini menempatkan Balikpapan di peringkat kedua di Provinsi Kalimantan Timur, sedikit di bawah Kota Samarinda yang meraih nilai tertinggi 50,26. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki tingkat pemanfaatan teknologi digital yang cukup baik di kalangan masyarakatnya.



Gambar 2. 52 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Balikpapan Tahun 2022-2024 (Nilai)

Sumber: Buku IMDI 2024, BPSDM Komdigi Kemkomdigi RI

Nilai IMDI Kota Balikpapan menunjukkan tren positif dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, nilai IMDI mencapai 47,67, kemudian sedikit menurun menjadi 47,50 pada tahun 2023, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 49,16. Nilai tersebut secara konsisten berada di atas nilai rata-rata Provinsi Kalimantan Timur, yang selama periode yang sama menunjukkan nilai 45,06 (2022), 43,40 (2023), dan 44,45 (2024). Pencapaian ini menegaskan posisi Kota Balikpapan sebagai daerah dengan tingkat kemajuan digital yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Dengan nilai 49,16 pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Balikpapan memiliki tingkat pemanfaatan teknologi dan digitalisasi yang cukup baik. Kondisi ini menjadi modal kuat untuk pengembangan lebih lanjut layanan digital dan transformasi digital di berbagai sektor di Kota Balikpapan.

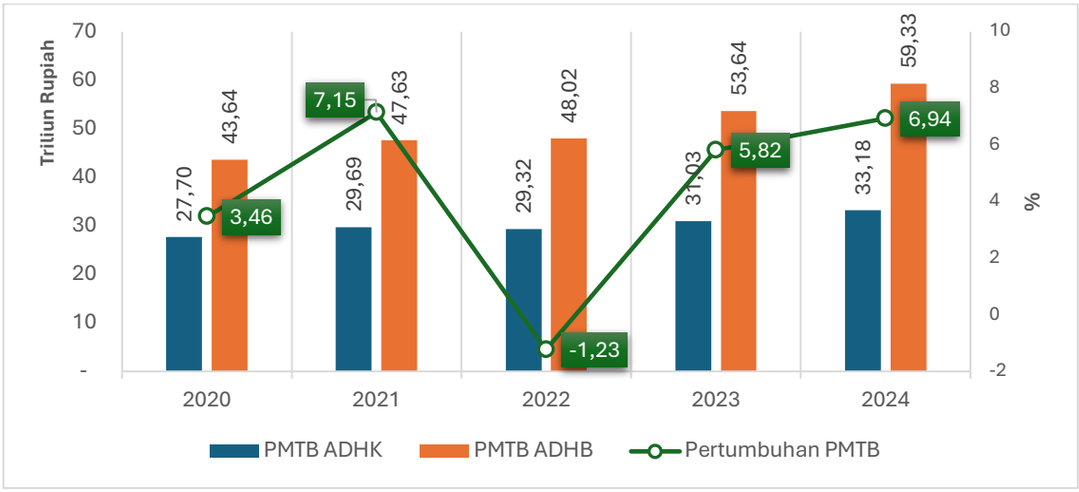
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Sub bab ini menjelaskan kondisi integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian daerah dalam mendukung rantai pasok global. Kondisi perekonomian yang semakin terbuka memberikan peluang bagi Kota Balikpapan untuk mengambil kebijakan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah seperti kegiatan ekspor dan investasi. Gambaran mengenai kondisi investasi dan kegiatan ekspor-impor daerah dijelaskan pada bagian berikut ini.

2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi dapat berbentuk investasi fisik dan finansial. Dalam konteks PDRB, investasi fisik digambarkan oleh indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori. PMTB merupakan indikator yang

menunjukkan penambahan atau pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu.



Gambar 2. 53 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2025

Nilai nominal PMTB Kota Balikpapan menunjukkan kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 59,33 triliun rupiah pada tahun 2024. Apabila dilihat dari harga konstan, nilai PMTB menunjukkan kenaikan dengan pertumbuhan yang berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 4,43 persen per tahun pada periode 20202-2024. Pertumbuhan PMTB yang positif mengindikasikan adanya kenaikan investasi fisik berupa bangunan, infrastruktur, mesin, dan kendaraan di Kota Balikpapan.

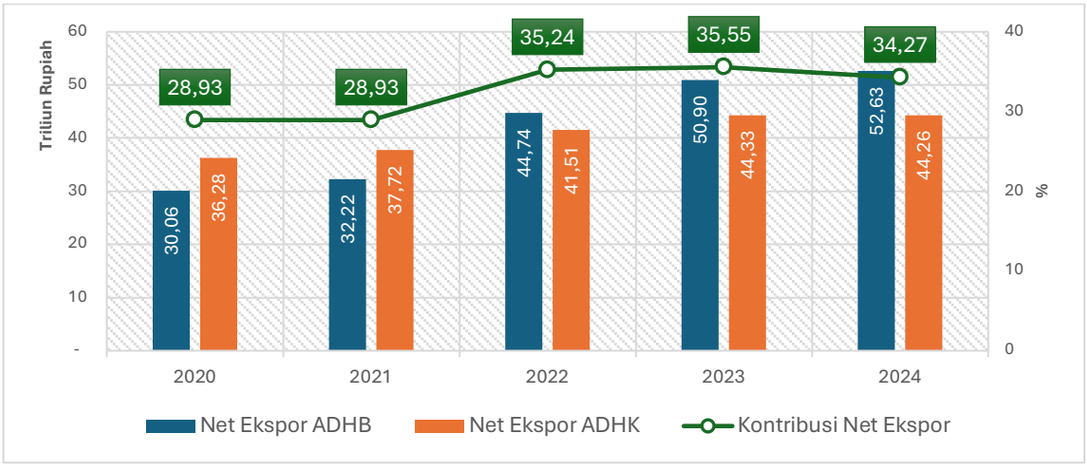
Tingginya PMTB Kota Balikpapan menjadikan PMTB sebagai komponen pengeluaran tertinggi yang berkontribusi terhadap pembentukan PDRB daerah. Kontribusi PMTB terhadap perekonomian Kota Balikpapan mencapai 39,71 persen per tahun. Investasi fisik yang masuk ke Kota Balikpapan tergolong tinggi sejalan dengan pembangunan berbagai infrastruktur fisik, terutama sejak proyek RDMP RU V Pertamina dan peningkatan infrastruktur pendukung IKN berjalan.

2.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Kegiatan ekspor dan impor muncul akibat keterbatasan barang dan jasa yang dapat diproduksi di suatu wilayah. Persoalan bahan baku, ketersediaan sarana prasarana, disparitas harga menjadi sejumlah alasan terjadinya aktivitas ekspor dan impor. Bagi daerah yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dapat mendatangkan barang dan jasa dari luar daerah melalui aktivitas impor, sedangkan bagi daerah yang memiliki kelebihan produksi dapat memenuhi permintaan dari wilayah lain dengan melakukan kegiatan ekspor.

Tingginya ekspor dapat menggambarkan seberapa besar produktivitas daerah dalam menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan oleh daerahnya dan wilayah lain. Semakin tinggi ekspor maka semakin pula dorongan untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk menggambarkan kemampuan ekspor Kota

Balikpapan digunakan indikator net ekspor yang sudah dikurangi besaran impor. Berikut adalah gambaran net ekspor Kota Balikpapan.



Gambar 2. 54 PDRB dan Rasio PDRB Net Ekspor Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber: Diolah dari BPS Kota Balikpapan, 2025

Besaran net ekspor Kota Balikpapan menunjukkan angka yang positif yang mengindikasikan besaran ekspor daerah lebih besar daripada impor. Net ekspor Kota Balikpapan menunjukkan tren yang menaik dengan pertumbuhan mencapai 5,16 persen per tahun. Pada tahun 2024, net ekspor Kota Balikpapan mencapai 52,63 triliun rupiah atas dasar harga berlaku atau 44,26 triliun rupiah atas dasar harga konstan.

Pada periode 2020-2024, rasio PDRB net ekspor terhadap total PDRB Kota Balikpapan menunjukkan tren yang menaik meskipun pada tahun 2024 menurun 1,28 persen poin ke angka 34,27. Turunnya rasio PDRB net ekspor disebabkan oleh kenaikan PMTB daerah yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan net ekspor. Pada tahun 2024, nilai PMTB naik 5,69 triliun rupiah sedangkan kenaikan net ekspor sebesar 1,73 triliun rupiah. PDRB net ekspor menjadi kontributor terbesar kedua setelah PMTB dengan rata-rata kontribusi mencapai 32,59 persen per tahun yang mengindikasikan tingginya kegiatan ekspor daerah.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kota Balikpapan yang memiliki konsep sebagai kota nyaman huni atau *liveable* city sesungguhnya merupakan representasi dari sebuah kota yang berkelanjutan (*sustainable city*) dengan harapan kualitas hidup masyarakat dapat dipertahankan dan meningkat. Selain itu, sebagai sebuah kota yang terus berkembang ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi fasilitas yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Secara khusus kondisi infrastruktur wilayah dapat dilihat pada tabel nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2023 berikut:

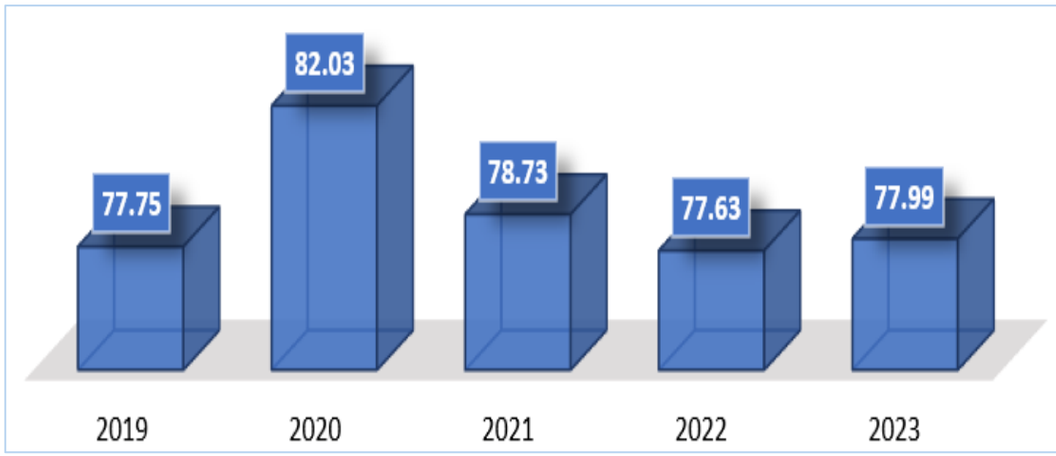
Tabel 2. 29 Nilai Infrastruktur dalam Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Dimensi Lingkungan Pendukung				Skor IDSD
	Pilar 1 (Institusi)	Pilar 2 (Infrastruktur)	Pilar 3 (Adopsi TIK)	Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi)	
Nasional*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,44
Provinsi Kalimantan Timur	4,48	2,41	4,02	3,63	3,30
Rata-Rata Kab/Kota	4,31	2,19	4,15	3,40	3,11
Paser	4,32	2,31	4,17	3,51	2,86
Kutai Barat	4,13	2,04	4,02	3,28	2,75
Kutau Kartanegara	4,21	2,56	3,85	3,61	3,09
Kutai Timur	4,13	2,17	3,85	3,12	2,78
Berau	4,24	2,33	3,69	3,31	2,92
Penajam Paser Utara	4,22	2,41	4,19	3,76	2,98
Mahakam Hulu	-	0,78	2,81	3,46	-
Balikpapan	4,56	2,80	4,94	3,42	3,59
Samarinda	4,38	2,32	4,99	3,62	3,79
Bontang	4,59	2,14	5,00	2,88	3,18

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN

Kondisi Infrastruktur berdasarkan IDSD Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki nilai yang cukup baik pada Dimensi Lingkungan Pendukung, yang pilar kedua yaitu infrastruktur memiliki nilai 2,80. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IDSD Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 2,41.

Infrastruktur wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah yang akan menyokong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) Kota Balikpapan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 yang diukur dari pendapat warga Kota Balikpapan tentang kepuasan layanan infrastruktur dari berbagai aspek seperti infrastruktur jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, realisasi indikator ini sebesar 77,75 yang kemudian meningkat signifikan menjadi 82,03 pada tahun 2020, dan terakhir menjadi 77,99 pada tahun 2023. Secara umum capaian indikator IKLI Kota Balikpapan mengalami fluktuasi meskipun dalam tren yang meningkat pada akhir tahun perhitungan.



Gambar 2. 55 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) Tahun 2021-2023

Sumber: Kajian Survey Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni Kota Balikpapan, 2023

Berdasarkan kinerja penyelenggaraan jalan, sesuai Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-415/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Balikpapan maka total panjang jalan kota adalah sepanjang 501,185 km, yang kondisi jalan dan jembatan Kota Balikpapan yang dilakukan berdasarkan survei oleh DPU Kota Balikpapan dari tahun 2016-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 30 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Balikpapan (km) Tahun 2016-2023

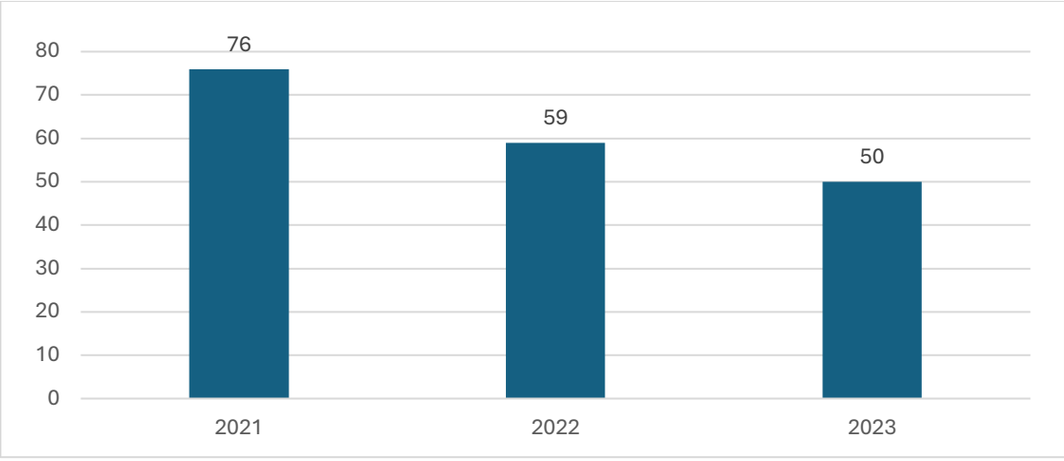
Kualitas	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km
Baik	396,58	95,39	288,95	268,99	365,31	344,947	322,279	137,584	347,595
Sedang	85,93	295,56	133,24	150,13	96,59	102,363	169,129	218,351	116,723
Rusak	18,66	58,60	30,55	54,44	38,91	53,870	27,240	24,297	22,192
Rusak Berat	-	51,63	48,44	27.61	0,38	-	-	62,561	14,669
Jumlah	501,18	501,18	501,18	501,18	501,18	501,180	518,648	442,793	501,185

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam angka 2024

Persentase kemantapan jalan yang dihitung dari jalan baik dan sedang dibandingkan total panjang jalan, pada tahun tahun 2024 adalah sebesar 92,64% atau turun jika dibandingkan capaian pada tahun 2016 sebesar 96,28%. Hal ini

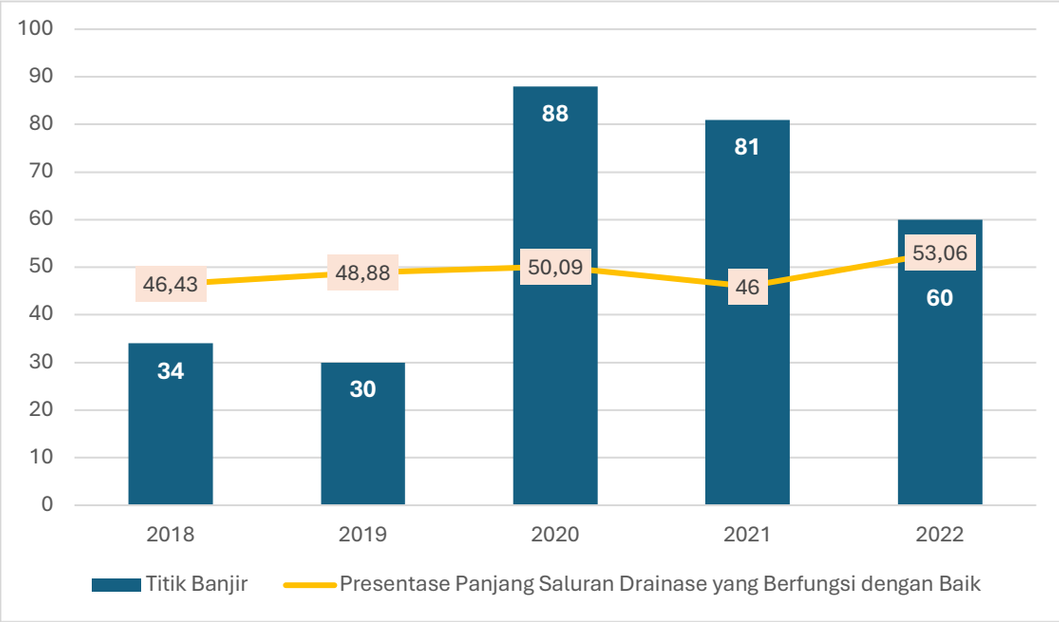
seiring dengan perbaikan data dan perencanaan kondisi jalan melalui pemanfaatan sistem informasi jalan dan jembatan.

Berdasarkan kinerja pengelolaan sumber daya air, terdapat beberapa indikator sehubungan dengan fokus penyelenggaran urusan pemerintahan di Kota Balikpapan yaitu pengendalian banjir, pengelolaan saluran irigasi dan penyediaan sumber air baku. Sehubungan dengan pengendalian banjir, penyelenggaran drainase di Kota Balikpapan selama ini mengacu pada *Masterplan* Drainase yang telah disusun dengan pengaturan rencana dimensi drainase dan rencana pembangunan bendungan pengendali (bendali) banjir di beberapa titik.



Gambar 2. 56 Penurunan Titik Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2021-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2022



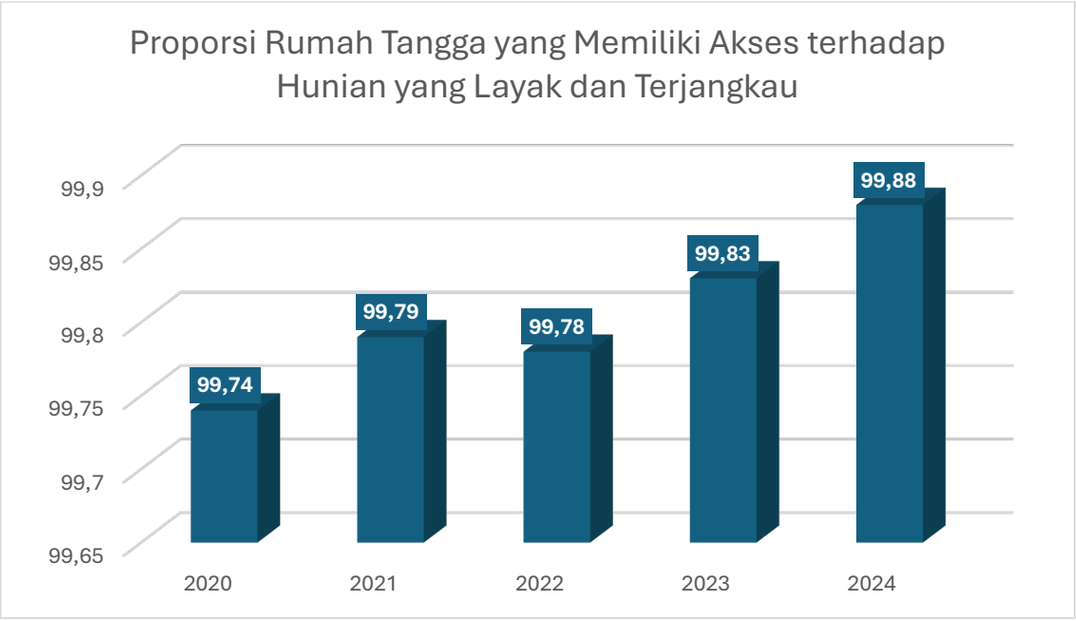
Gambar 2. 57 Persentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik dan Titik Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2022

Jika dilihat berdasarkan kondisi drainase, terjadi peningkatan pemeliharaan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase

drainase yang berfungsi baik. Adapun titik banjir sesuai dengan *baseline* pada tahun 2015 yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, titik banjir pada tahun 2015 adalah sebanyak 50 titik dan menurun menjadi 30 titik pada tahun 2019. Sedangkan berdasarkan *baseline* titik banjir yang disusun pada tahun 2020, titik banjir mengalami peningkatan menjadi 88 titik.

Selanjutnya, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau mencapai 99,88 persen. Berikut gambaran proporsi rumah tangga yang memiliki akses hunian yang layak di Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



Gambar 2. 55 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, 2024

Rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau jika memenuhi empat kriteria, yaitu:

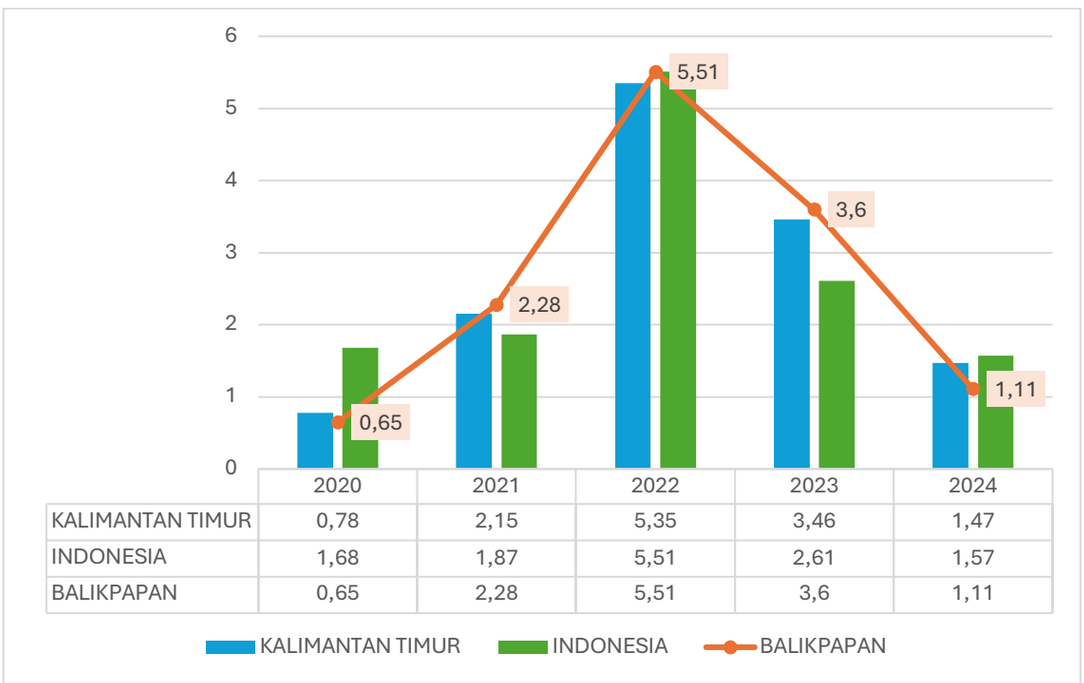
1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita;
2. Memiliki akses terhadap air minum layak;
3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak;
4. Ketahanan bangunan yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi perekonomian suatu daerah stabil tanpa fluktuasi yang signifikan, mencakup pengendalian inflasi, tingkat pengangguran yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk menjaga stabilitas moneter, mendukung sektor keuangan, dan mewujudkan kesinambungan fiskal. Indikator yang digunakan untuk mengetahui stabilitas ekonomi makro salah satunya adalah tingkat inflasi.

2.3.7.1 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Inflasi menurut BPS adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, terutama kebutuhan pokok masyarakat, atau penurunan daya beli mata uang suatu negara. Inflasi diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen (IHK), yang mencatat perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Terdapat berbagai kategori inflasi, seperti inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi, yang masing-masing mencerminkan tingkat keparahan kenaikan harga. Inflasi yang terkendali dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi inflasi yang tinggi atau tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berikut tingkat inflasi Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



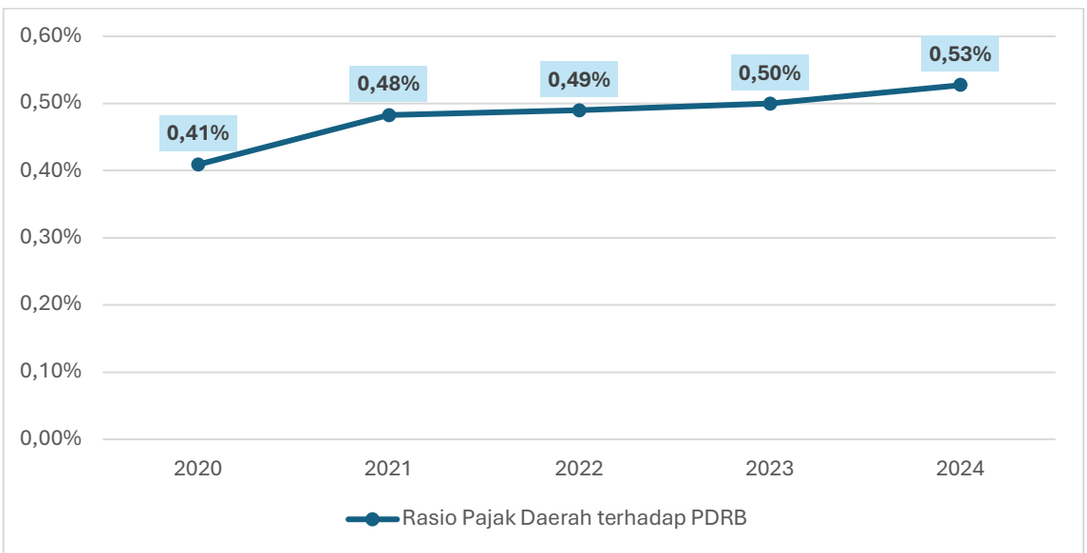
	2020	2021	2022	2023	2024
KALIMANTAN TIMUR	0,78	2,15	5,35	3,46	1,47
INDONESIA	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
BALIKPAPAN	0,65	2,28	5,51	3,6	1,11

Data inflasi *year-on-year* (YoY) di Balikpapan menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, inflasi di Balikpapan tercatat sebesar 0,65 persen, meningkat menjadi 2,28 persen pada tahun 2021. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang mulai terlihat, yang ditunjukkan dengan permintaan barang dan jasa mulai meningkat. Namun, inflasi mengalami lonjakan tajam pada tahun 2022 mencapai 5,51 persen

yang menunjukkan adanya tekanan inflasi yang lebih besar. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan dan energi serta gangguan rantai pasokan. Pada tahun 2023, inflasi di Kota Balikpapan turun menjadi 3,6 persen, mencerminkan upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat, meskipun masih berada pada tingkat yang relatif tinggi. Memasuki tahun 2024, inflasi kembali menurun menjadi 1,11 persen menunjukkan stabilitas harga yang lebih baik dan pengendalian inflasi yang efektif. Jika dibandingkan dengan Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan, inflasi di Balikpapan cenderung lebih rendah pada tahun 2024. Kalimantan Timur mencatat inflasi sebesar 1,47 persen, sedangkan Indonesia secara nasional berada di angka 1,57 persen. Penurunan inflasi di Balikpapan ini dapat dipahami sebagai hasil dari kebijakan ekonomi yang berhasil menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga meskipun tantangan dalam pengendalian inflasi tetap ada.

2.3.7.2 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui besaran konstribusi pajak daerah terhadap PDRB daerah. Besaran rasio pajak merupakan cerminan kemampuan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah dari pajak daerah. Berikut data rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



Gambar 2. 58 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Balikpapan 2020-2024

Sumber: LRA Kota Balikpapan (Audited) & BPS Kota Balikpapan, 2025

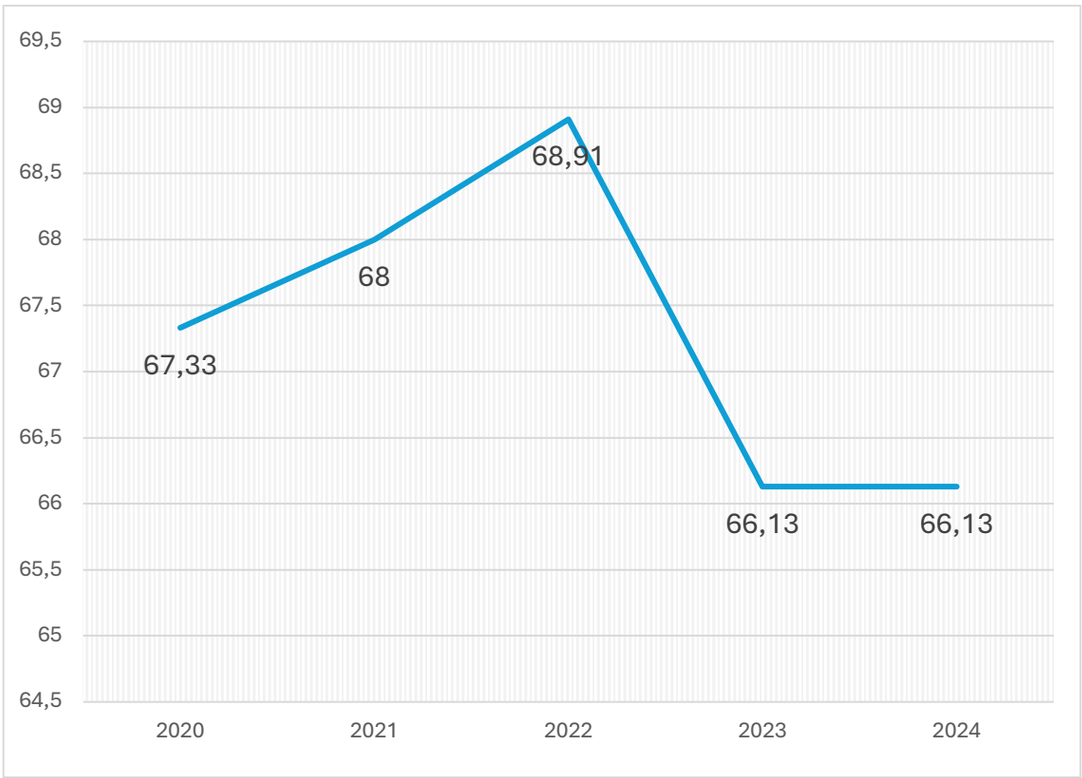
Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Balikpapan memiliki tren yang meningkat hingga 0,53 persen pada tahun 2024. Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukan bahwa penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah mendorong kemandirian keuangan daerah. Hal ini akan mengurangi ketergantuan daerah pada dana transfer pemerintah pusat. Peningkatan rasio pajak daerah harus tetap didukung oleh pengelolaan pajak yang lebih optimal.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Sub bab ini menguraikan gambaran umum terkait kondisi Kota Balikpapan dari aspek pelayanan umum. Kedua aspek tersebut dijelaskan secara rinci dan sistematis secara komprehensif. Gambaran aspek pelayanan umum di Kota Balikpapan dijabarkan sebagai berikut.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Aspek ini memberikan gambaran pelayanan umum dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Adapun indikator yang digunakan dalam menggambarkan kinerja aspek pelayanan umum, antara lain adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai AKIP, Indeks SPBE, dan Indeks Pelayanan Publik.



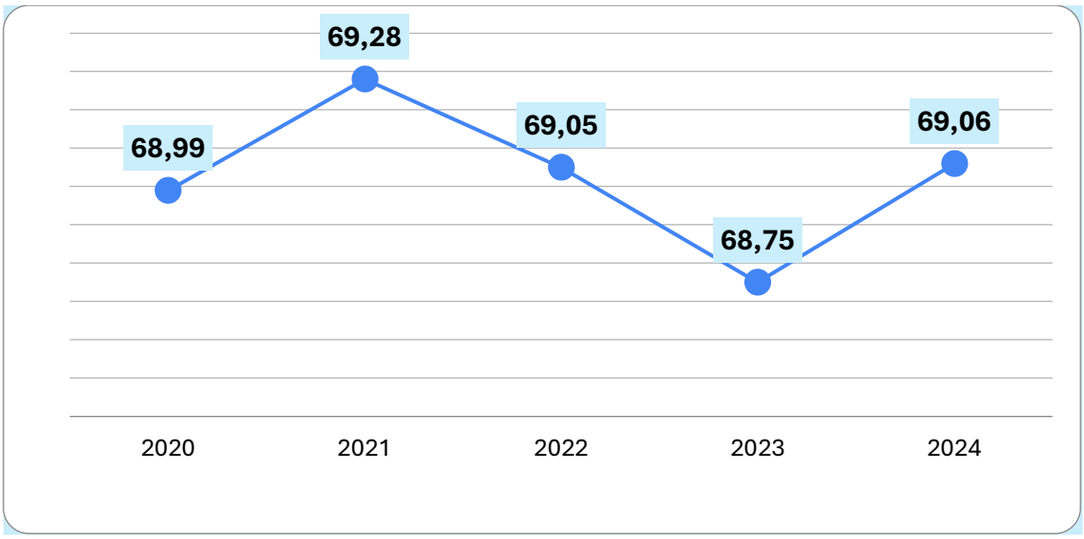
Gambar 2. 59 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretraiat Daerah, 2025

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Balikpapan mendapatkan predikat B pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 10,89 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016. Meskipun demikian, kinerja reformasi birokrasi belum optimal yang ditandai belum adanya peningkatan nilai RB hingga tahuan 2024. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa komponen RB yang belum optimal.

Indikator selanjutnya yang menggambarkan capaian kinerja bidang tata kelola adalah nilai AKIP. Indikator ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah mempertanggungjawabkan aktivitas pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Nilai AKIP secara jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mencapai target

kinerja yang telah disusun pada awal periode tertentu dan kesesuaiannya dengan anggaran yang ditetapkan. Adapun capaian nilai AKIP Kota Balikpapan tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut:

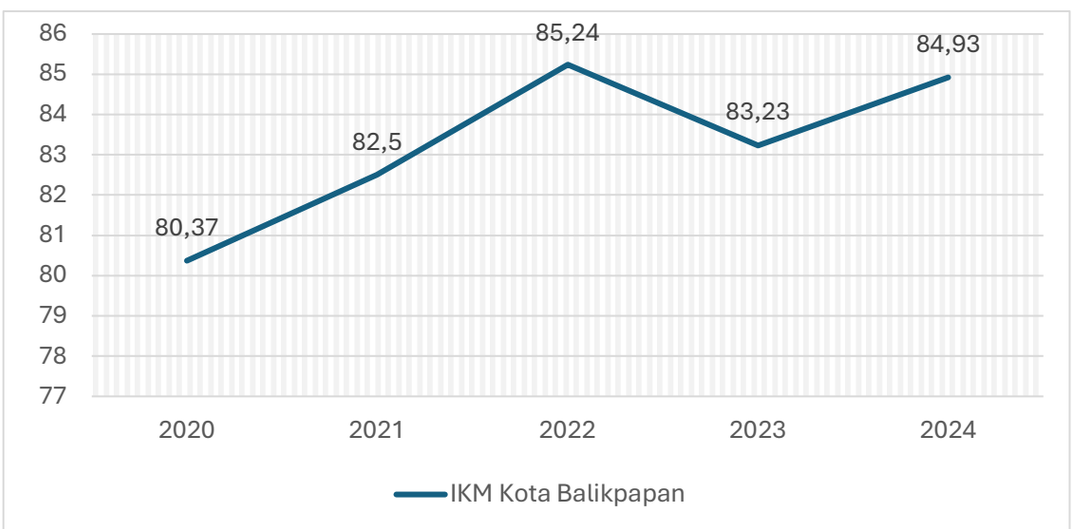


Gambar 2. 60 Nilai AKIP Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, 2025

Capaian Nilai AKIP Pemerintah Kota Balikpapan memperoleh predikat B selamat 5 tahun terakhir. Meskipun demikian, kinerja akuntablitas belum optimal yang ditandai dengan adanya fluktiatif nilai AKIP. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja masih menghadapi tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas indikator kinerja yang belum optimal, keterpaduan perencanaan, serta mekanisme *cascading* kinerja belum berpedoman pada peta proses bisnis organisasi, proses bisnis masih sama dengan nomenklatur.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator selanjutnya yang digunakan untuk mengetahui aspek pelayanan umum. Sumber data IKM didapat dari hasil survei berdasarkan beberapa komposisi pelayanan. Adapun capaian IKM Pemerintah Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

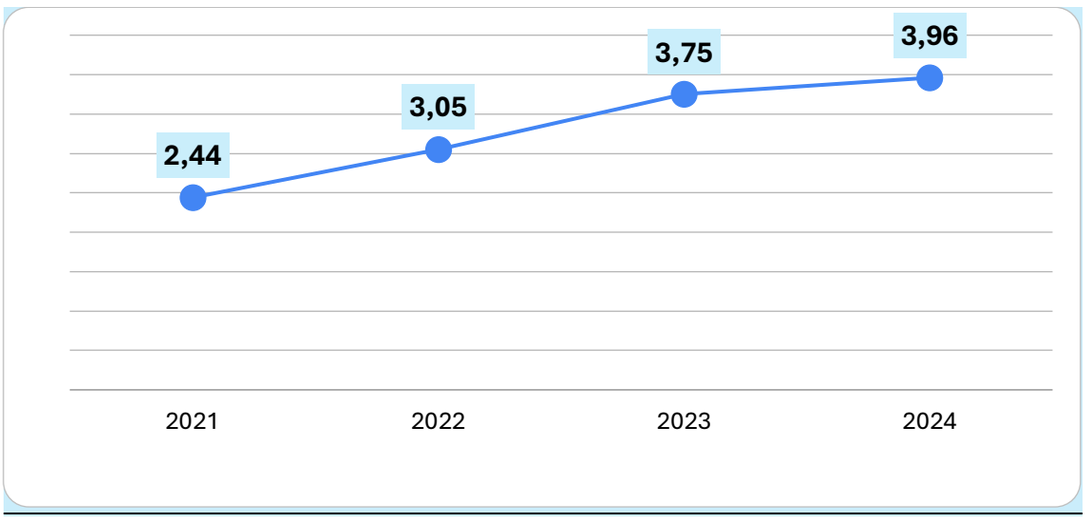


Gambar 2. 61 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber: Bappedalitbang Kota Balikpapan, 2025

IKM Kota Balikpapan berjalan fluktuatif dan cenderung menurun pada 2024, dengan rata-rata capaian 79,97. Penurunan tersebut disebabkan oleh tindaklanjut pengaduan masyarakat belum optimal terutama di dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum (Hasil Evaluasi RKPD 2023), namun berhasil kembali dipulihkan pada tahun 2024. Selain itu, kinerja IKM ini sejalan dengan kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan RB. Pada tahun 2024, nilai IPP sebesar 4,19 yang menadakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Balikpapan sudah berjalan sangat baik. Dengan demikian, capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Pemerintah Kota Balikpapan sudah baik terutama dalam merespon kebutuhan masyarakat.

Kinerja pelayanan publik dari sisi digitalisasi perlu dianalisis terutama dalam menciptakan Balikpapan sebagai kota cerdas dan nyaman. TIK memiliki peran penting dalam mengakselerasi pembangunan kota. Adapun kinerja digitalisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2. 62 Indeks SPBE Tahun 2021-2024

Sumber: https://1data.menpan.go.id/

Digitalisasi sektor pemerintahan dan pelayanan publik sudah berjalan optimal di Kota Balikpapan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai SPBE Kota Balikpapan yang semakin meningkat. Selain itu, selama 4 tahun terakhir nilai SPBE juga menunjukkan kinerja positif dengan rata-rata peningkatan, yaitu sebesar 3,08. Di samping itu, peningkatan kinerja paling tinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 0,70. Hal ini menandakan bahwa digitalisasi pemerintahan sudah berjalan baik dan menjadi modal utama Kota Balikpapan sebagai kota cerdas ke depan.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Aspek ini menjelaskan tentang penegakan hukum dan pelaksanaan demokrasi substansial dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut dapat dinilai dari tingkat kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan sejauh mana diselesaikan oleh aparat. Adapun tingkat kejahatan atau pelanggaran di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

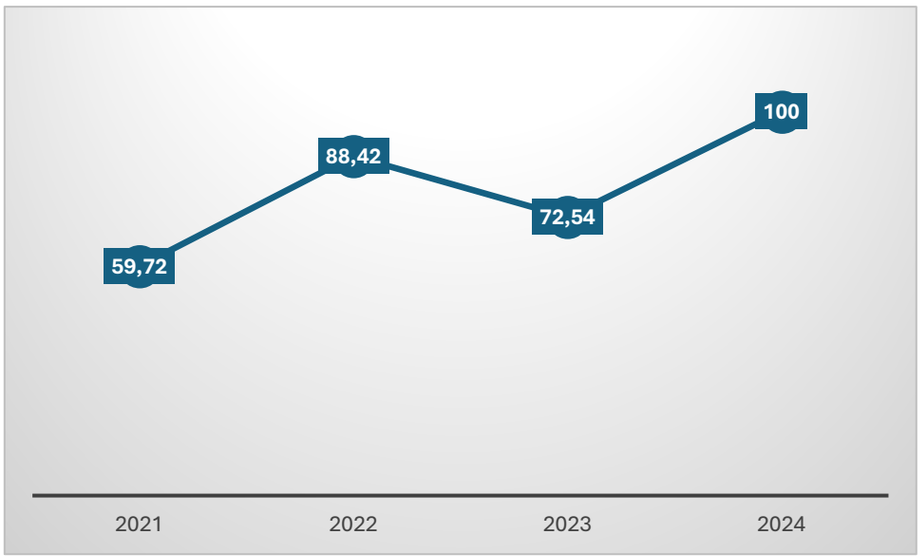
Tabel 2. 31 Jenis Kejahatan/Pelanggaran di Kota Balikpapan Tahun 2021-2024

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Dilaporkan	405	738	1224	1.406
Diselesaikan	276	538	666	854

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2025

Tingkat kejahatan atau pelanggaran di Kota Balikpapan berdasarkan jenisnya menunjukkan peningkatan setiap tahun. Hal ini ditandai dengan jenis kejahatan atau pelanggaran yang dilaporkan kepada aparat kepolisian. Terdapat tiga jenis pelanggaran yang dilaporkan dengan kasus terbanyak pada tahun 2024, yakni BBM illegal sebanyak 22,5 persen dibandingkan keseluruhan kasus, pencurian kendaraan bermotor yang mencapai 11,73 persen, dan penganiayaan ringan sebesar 10,38 persen. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang dilaporkan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Meskipun demikian, persentase penyelesaiannya mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa Kota Balikpapan masih menghadapi tantangan dalam penegakan dan penertiban setiap pelanggaran yang berimplikasi pada belum optimalnya tingkat keamanan daerah.

Selain kejahatan/pelanggaran, aspek hukum berkeadilan, keamanan nasioanl dan demokrasi substansi juga dapat dinilai dari capaiain aksi HAM. Implementasi aksi HAM sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, khususnya 4 (empat) kelompok sasaran Aksi HAM, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Adapun capaian aksi HAM Kota Balikpapan dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2. 63 Capaian Aksi HAM Kota Balikpapan Tahun 2021-2024

Sumber: Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, 2024

Capaian aksi HAM Kota Balikpapan mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung meningkat selama 2021 hingga 2024. Penurunan aksi HAM terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 16 poin dan kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024, yaitu sebesar 27,46 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi aksi HAM dalam rangka melindungi dan memenuhi hak asasi seluruh warga negara di Kota Balikpapan, terutama kelompok masyarakat yang menjadi sasaran aksi HAM semakin baik. Dengan demikian, perlu dipertahankan kinerja tersebut agar seluruh masyarakat merasa aman dan tentram dalam beraktivitas.

Aspek hukum berkeadilan, keamanan nasioanl dan demokrasi substansi ini juga dapat dinilai dari Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kota Balikpapan. Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 32 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan tahun 2022-2024

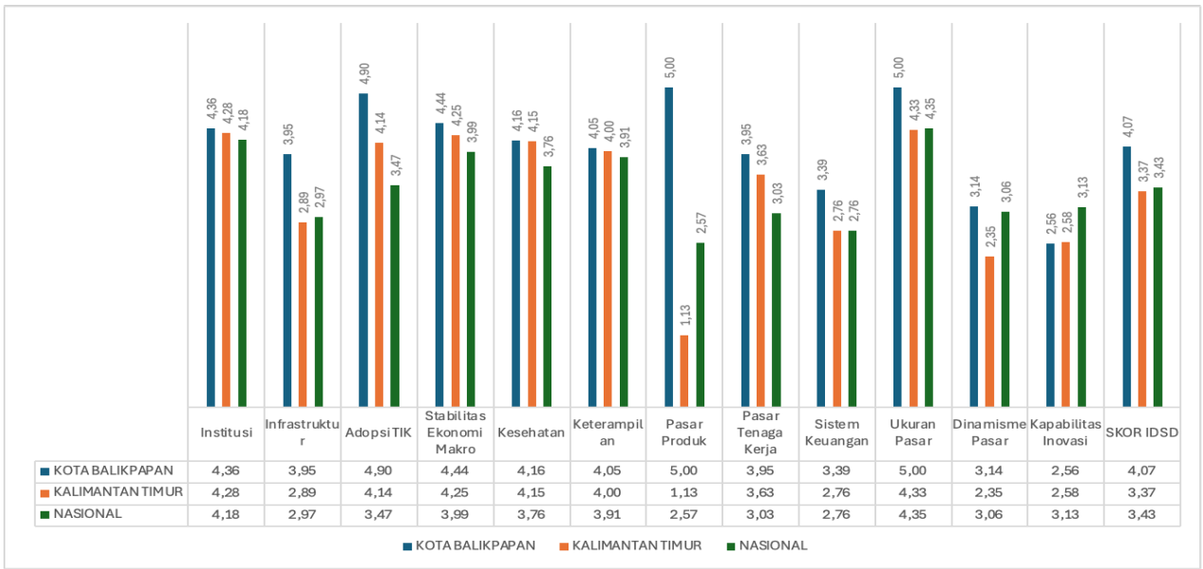
Uraian	2022	2023	2024
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100

Sumber: Satpol-PP, 2024

Selama 3 (tiga) tahun terakhir kinerja penegakan Perda dan Perkada berjalan optimal. Hal ini menandakan bahwa dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sudah berjalan optimal. Oleh karena itu, kinerja tersebut harus dipertahankan dalam rangka menjaga kondusivitas daerah yang semakin baik.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan diukur melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Daya saing dikaitkan dengan masalah produktivitas. Dalam konteks ini, daya saing sangat menentukan ketangguhan daerah maupun negara. Konsep pengukuran daya saing dalam IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Faktor penentu daya saing kemudian diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2024 di Kota Balikpapan dapat dilihat sebagai berikut:



	Institusi	Infrastruktur	Adopsi TIK	Stabilitas Ekonomi Makro	Kesehatan	Keterampilan	Pasar Produk	Pasar Tenaga Kerja	Sistem Keuangan	Ukuran Pasar	Dinamisme Pasar	Kapabilitas Inovasi	SKOR IDSD
KOTA BALIKPAPAN	4,36	3,95	4,90	4,44	4,16	4,05	5,00	3,95	3,39	5,00	3,14	2,56	4,07
KALIMANTAN TIMUR	4,28	2,89	4,14	4,25	4,15	4,00	1,13	3,63	2,76	4,33	2,35	2,58	3,37
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43

Gambar 2. 64 Skor Indeks Daya Saing Daerah

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2024

Pada tahun 2024 skor IDSD Kota Balikpapan lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Skor tertinggi berada pada pilar Ukuran Pasar dan Pasar Produk dengan skor 5,00, sedangkan skor terendah berada pada pilar Kapabilitas Inovasi. Hal tersebut mengindikasikan perlu adanya pengembangan kapabilitas inovasi untuk mendukung daya saing Kota Balikpapan.

2.4.4 Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, pemerintah daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Penyusunan RPJMD ini mengintegrasikan SPM sebagai bagian penting dari arah kebijakan pembangunan daerah dengan memastikan bahwa setiap perangkat daerah yang memiliki urusan wajib pelayanan dasar dapat menyusun strategi pencapaian SPM secara bertahap, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemenuhan SPM tidak hanya menjadi indikator kinerja pelayanan publik, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh berbagai daerah beracuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018. Berikut capain Standar Pelayaanan Minimal (SPM) di Kota Balikpapan tahun 2021-2024.

Tabel 2. 33 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Balikpapan Tahun 2021-2024

Jenis Pelayanan	2021	2022	2023	2024
Urusan Pendidikan				
Pendidikan Anak Usia Dini	33,2	55	99,92	97,28
Pendidikan Dasar	84,56	88,57	91,83	93,32
Pendidikan Kesetaraan	2,2	30,65	83,66	97,65
Urusan Kesehatan				
Pelayanan kesehatan ibu hamil	96,67	98,74	96,52	100
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	96,7	96,54	99,14	100
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,63	100	100	100
Pelayanan kesehatan balita	83,42	98,28	89,99	100
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	54,26	100	97,21	100
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	39,95	81,38	90,1	100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	41,51	66,61	96,54	100
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	20,96	80,51	98,45	100
Pelayanan kesehatan diabetes melitus	56,32	100	100	100
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	73,83	88,75	93,07	100
Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	29,84	88,43	100	100
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	97,77	90,52	98,32	100
Urusan Pekerjaan Umum				
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	78,14	93,33	98,96	100
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	0	14,11	94,28	100
Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman				
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	70,59	91,22	100	100
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah/Kab/Kota	0	0	100	100
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat				
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	93,88	100	94,14	100
Pelayanan informasi rawan bencana	172,73	72,68	100	100
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	98,77	100
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	83,54	100
Urusan Sosial				
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	44,93	48,08	99,46	100
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	31,82	94,52	100	100

Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	92,95	99,08	100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (gelandangan dan pengemis) di luar panti	0	95,67	99,64	100
Perlindungan dan jaminan sosial saat & setelah tanggap darurat bagi korban bencana Kab/Kota	399,67	90,93	22,07	100

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2024

2.4.5 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah Kota Balikpapan diukur dengan melihat capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah Kota Balikpapan memiliki IKK sebanyak 494 indikator dan telah dipenuhi seluruhnya. Berikut capaian IKK Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2019-2023.

Tabel 2. 34 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	PDRB per kapita	Juta Rupiah	151,31	160,3	181,29	201,64	214,11
2	Inflasi	%	0,65	2,28	5,51	3,6	1,11
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,33	68	68,91	66,13	66,13
4	Nilai SAKIP	Poin	68,99	69,28	69,5	68,75	69,06
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	N/A	N/A	76,551	81,251	82,068
6	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	24,21	33,14	28,28	26,6	26,9
7	Indeks SPBE	Poin	N/A	2,44	3,05	3,75	3,96
8	Maturitas SPIP	Level	N/A	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
9	Indeks Sistem Merit	Poin	N/A	N/A	0,65	0,68	0,68
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,37	82,5	85,24	83,23	84,93
11	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,35	81,07	81,49	82,03	82,62
12	Indeks Pendidikan	Poin	0,7488	0,7587	0,7593	0,7599	0,7622
13	Indeks Kesehatan	Poin	N/A	N/A	0,843	0,8315	0,8595
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	N/A	N/A	11,69	14,43	15,33
15	Indeks Warisan Budaya	Poin	N/A	N/A	0,464	0,4955	0,4956
16	Indeks Liveable City	Poin	81,69	78,48	77,71	77,85	74,87
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,54	69,96	63,96	67,64	68,4
18	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukkan	%	N/A	N/A	85,14	85,14	96,85
19	Indeks Resiko Bencana	Poin	108,14	123,46	110,79	118,21	101,43
20	Indeks Gini	Poin	0,311	0,325	0,334	0,323	0,324
21	Presentase Pertumbuhan UMKM	%	N/A	N/A	29,55	20,21	19,23
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9	8,94	6,9	6,09	6,22
23	Tingkat Kemiskinan	%	2,57	2,89	2,45	2,31	2,23
24	Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,91	4,57	4,96	6,49	3,23
25	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	N/A	N/A	15,426	24,125	25,705
26	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	N/A	N/A	86,1	88,6	87,35
27	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	N/A	1,449	1,759	2,559	2,67
28	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	N/A	N/A	28,46	33,53	38,57
29	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-3,07	7,08	8,42	5,66	9,77

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	82,03	78,73	77,63	77,96	74,03
2	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	N/A	N/A	77,63	77,98	81,62
3	Persentase Permukiman Layak Huni	%	N/A	N/A	99,07	99,11	99,85
ASPEK PELAYANAN UMUM							
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	Harapan lama sekolah	Tahun	14,14	14,22	14,23	14,24	14,25
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,68	10,91	10,92	10,93	10,99
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	69,36	69,36	64,39
4	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	Tahun	N/A	N/A	90,81	90,08	107,45
5	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	%	N/A	N/A	54,01	N/A	380
6	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	%	N/A	N/A	95,16	95,16	81,86
7	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)	%	N/A	N/A	98,21	N/A	N/A
8	Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	85,89	85,89	87,07
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,2	75,5	74,68	75,64	75,87
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	81,37	81,37	81,67
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	N/A	84	83	84,58
4	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	%	N/A	N/A	82	100	100
5	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	%	N/A	N/A	100	100	100
6	Persentase UKBM Aktif	%	N/A	N/A	80	100	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	81	82	75,92
8	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	12.643	10.633	10.825	10.838	10.926
9	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	12.248	10.148	10.072	10.346	10.441
10	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	12.127	10.148	9.976	10.252	10.315
11	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	36.419	41.451	56.791	N/A	51.614
12	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	14.481	31.972	337.682	84.632	101.088
13	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	142.028	175.414	337.682	391.273	313.962
14	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	12.988	24.104	37.288	35.812	41.011
15	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	35.138	38.722	132.970	63.242	64.603
16	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	8.223	9.633	17.263	19.279	20.253
17	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Jiwa	550	522	611	668	773
18	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	3.844	4.058	12.361	15.885	18.032

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
19	Jumlah Warga Negara Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	10.310	13.887	15.686	N/A	22.835
20	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	N/A	N/A	86,67	100	100
21	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	N/A	96,67	98,74	96,52	100,2
22	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	N/A	96,7	96,54	99,14	100,31
23	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	N/A	100,63	100	100	104,06
24	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	N/A	83,42	98,28	89,99	105,82
25	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	N/A	54,26	100	97,21	119,99
26	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	N/A	39,95	81,38	90,1	100
27	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	N/A	41,51	66,61	96,54	101,39
28	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	N/A	20,96	80,51	98,45	100
29	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	N/A	56,32	100	100	115,39
30	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	N/A	73,83	88,75	93,07	107,66
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR						
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Poin	N/A	N/A	77,63	78,78	84,67
2	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	N/A	N/A	55,79	60,43	61,05
3	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	N/A	N/A	97,85	97,11	97,11
4	Persentase infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	N/A	N/A	79,95	79,92	79,92
5	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	%	N/A	N/A	45	94	94
6	Persentase pelayanan jasa kontruksi	%	N/A	N/A	29,12	29,73	25,46
7	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	78,87	78,87	79,8
8	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	N/A	N/A	89,74	89,74	96,85
9	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	N/A	N/A	20	25	42,86
10	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	%	N/A	N/A	55,88	67,65	67,65
11	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	N/A	N/A	53,06	53,47	54,22
12	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	%	N/A	N/A	97,18	93,39	96,76

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
13	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	%	N/A	N/A	98,54	99,51	99,7
14	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	%	N/A	N/A	97,82	97,96	98
15	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	%	N/A	N/A	85,36	80	92,64
16	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	%	N/A	N/A	79	79,45	0
17	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	%	N/A	N/A	92,8	92,57	93,59
18	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	N/A	N/A	100	100	100
19	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	N/A	N/A	20	25	42,86
20	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	N/A	N/A	0,14	0,2	0,25
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	100	82	100
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	76	82	84,32
23	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	656.848	550.185	711.140	N/A	N/A
24	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	N/A	566.055	502.969	N/A	N/A
25	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Orang	N/A	N/A	84,93	86	99
26	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Liter/detik	N/A	N/A	1.510	1.570	1.720
27	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	%	N/A	N/A	79,05	80,37	98,97
28	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	N/A	N/A	97,18	93,32	96,76
29	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	%	N/A	N/A	0,7	0,77	96,39
30	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	N/A	N/A	3,5	N/A	3,42
31	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kota	N/A	N/A	1	1	0
32	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Institusi/ Lembaga	N/A	N/A	66	66	66
33	Panjang pembangunan jalan tol	km	N/A	N/A	33,12	33,12	27,44
34	Panjang pembangunan jalan kota (km)	km	N/A	N/A	518,65	442,79	6,32
35	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	N/A	N/A	53,06	53,47	54,2
36	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	N/A	N/A	22,25	22,25	95,67

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
37	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	N/A	N/A	92,27	75,67	95,99
38	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	N/A	N/A	92,8	100	95,77
39	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	N/A	N/A	4,69	4,13	10
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	N/A	N/A	0	0	0
2	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	%	N/A	N/A	21,97	20,13	24,56
3	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	N/A	N/A	34,19	36,8	89,27
4	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	72,55	72,55	0
5	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	0
6	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	Ha	N/A	N/A	100,88	96,89	21,67
7	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	N/A	N/A	0,03	0	0,04
8	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	%	N/A	N/A	1,39	2,08	3,07
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	77,29	76,5	76,78
10	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	0	0	0
11	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	0	0
12	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	%	N/A	N/A	0,22	0,17	0,12
13	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	N/A	N/A	99,81	99,83	99,98
14	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	0	0	0	0	0
15	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	0
16	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	N/A	N/A	26,11	100	89,27
17	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	N/A	N/A	0,23	0,19	0,13
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Persentase Penurunan Dampak Buruk Yang Diakibatkan Bencana	%	N/A	N/A	11,62	4,93	2,05
2	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	%	N/A	N/A	13,15		18,93
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	55,5	55,5	0
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	Poin	N/A	N/A	81,25	93,13	97
5	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	60,98	60,98	0
6	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	%	N/A	N/A	14	14	64,7

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	N/A	N/A	79,64	93,24	90
8	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	N/A	N/A	77,52	93,8	90
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	71,69	91,45	84,98
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	77	81,09	95
11	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Layanan	N/A	N/A	100	100	1
12	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	90
13	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
1	Persentase PPKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	%	N/A	N/A	43,43	73,42	85
2	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	%	N/A	N/A	79	80	82
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	62,74	62,74	0
4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	%	N/A	N/A	83,65	80	80,56
5	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi	%	N/A	N/A	43,43	83	85
6	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	N/A	N/A	81,46	73,92	55,07
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	91,68
8	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	N/A	N/A	79	80	82
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	93	92	94
10	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	RTS	N/A	N/A	5.970	5625	5.670
11	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	%	N/A	N/A	81	85	100
12	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	orang	N/A	N/A	0	0	100
13	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	%	28,60	41,32	12,05	74,23	62
14	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	77,51	100	12,05	91,21	65,42
15	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	91,68
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	N/A	N/A	65,58	63,48	66,8
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	63,81	63,81	0
3	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	N/A	N/A	2,92	2,8	3,07
4	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	%	N/A	N/A	61	51,52	75
5	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	N/A	N/A	25	38,11	36,99
6	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	N/A	N/A	87,5	60,53	54,9
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	87,72	91,78	92,16
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	%	N/A	N/A	77,78	91,18	91,8
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	%	N/A	N/A	21,06	31,85	46,53
3	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	%	N/A	N/A	83,33	100	100
4	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	%	N/A	N/A	27,77	33,33	38,24
5	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	%	N/A	N/A	67,1	70,05	80
6	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	%	N/A	N/A	66,37	98,08	96,36
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	82,19	83,37	81,75
8	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Poin	N/A	N/A	1	38	38
9	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%	N/A	N/A	21,56	20	29,87
10	Presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	%	N/A	N/A	20,74	20,74	26,67
11	Presentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di Lembaga Eksekutif (eselon II)	%	N/A	N/A	40	32,14	34,38
12	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	%	N/A	N/A	0,05	0,09	0,001
13	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan yang mendapat layanan komperehensif	%	N/A	N/A	100	100	100
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
1	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	%	N/A	N/A	7,9	2	13,09
2	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	%	N/A	N/A	95	94,9	94,5
3	Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	%	N/A	N/A	115	116	114
4	Persentase Keamanan Pangan	%	N/A	N/A	100	100	100
5	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	81,91	80,08	0
6	Persentase Infrastruktur yang Tersedia	%	N/A	N/A	20	40	N/A

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	N/A	N/A	0,03	0,17	0,1
8	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	N/A	N/A	100	100	100
9	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	%	N/A	N/A	100	100	100
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	73	75	77,54
11	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Poin	N/A	N/A	86,1	88,6	87,35
12	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	N/A	N/A	0,03	0,17	0,097
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
1	Prosentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah)	%	N/A	N/A	88,86	75	85,53
2	Prosentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	N/A	N/A	62,96	67	80,21
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	67,79	67,81	0
4	Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0
5	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	%	N/A	N/A	56	44,4	40
6	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	%	N/A	N/A	62,96	80,2	80,21
7	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	%	N/A	N/A	63,12	80	88
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
1	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	N/A	N/A	50,32	48,91	59,2
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	N/A	N/A	84,29	89,98	86,28
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	N/A	N/A	50	54,5	54,49
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	N/A	N/A	71	79,21	81,28
5	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	70,85	70,85	0
6	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	%	N/A	N/A	35,29	50	89
7	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	%	N/A	N/A	63,96	100	100
8	Persentase RTH yang dikelola	%	N/A	N/A	5,74	10,59	10,63
9	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya	%	N/A	N/A	24,48	44,74	65,79
10	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	%	N/A	N/A	40,36	29,27	32,93
11	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	%	N/A	N/A	61,15	100	100
12	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	%	N/A	N/A	20	100	100
13	Persentase Penanganan Pengaduan yang tertangani	%	N/A	N/A	152	100	100
14	Persentase pengelolaan persampahan	%	N/A	N/A	99,1	99	99
15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	77,66	77,66	78,16
16	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	N/A	N/A	73,1	99,47	99
17	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang	Ton	N/A	N/A	159.079	117.527	48.128

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).						
18	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	N/A	N/A	35.705,36	38.514,69	4
19	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	N/A	N/A	1	1	0
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	Nilai	N/A	N/A	90,86	93,75	93,27
2	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	Nilai	N/A	N/A	93,75	94,38	94,41
3	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Nilai	N/A	N/A	78,47	80	80,56
4	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	71,58	71,58	0
5	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	%	N/A	N/A	91,12	91,63	99,81
6	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	%	N/A	N/A	95,76	97,38	97,43
7	Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	%	N/A	N/A	100	100	100
8	Persentase Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun	%	N/A	N/A	0	0	0
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	86,2	84,16	87,82
10	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	%	N/A	N/A	99,58	99,65	99,76
11	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Poin	N/A	N/A	99,91	99,9	99,94
12	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	%	N/A	N/A	99,58	99,65	99,76
13	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%	N/A	N/A	99,58	99,65	99,76
14	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistic Register)	Keterangan	N/A	N/A	Ada	Ada	Ada
15	Perekaman KTP elektronik	%	N/A	N/A	98,95	99,99	100
16	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	N/A	N/A	66,2	80,17	99,42
17	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	N/A	N/A	25	43,33	62,86
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	%	N/A	N/A	38,24	100	100
2	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	%	N/A	N/A	100	100	100
3	Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	Rupiah	N/A	N/A	85.176.853.583	85.377.255.459	85.377.255.459
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi	%	N/A	N/A	52,81	61,02	64,45
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	52,98	52,98	0

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	%	N/A	N/A	64	68	80
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	N/A	N/A	30,57	17,59	12,2
5	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan	%	N/A	N/A	8,25	8,4	8,54
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Poin	N/A	N/A	77,63	N/A	78,56
2	VC Ratio di Jalan Kota	Indeks	N/A	N/A	0,51	0,5	0,55
3	Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola	%	N/A	N/A	62	63	63
4	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	68,55	68,55	0
5	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.	%	N/A	N/A	113,64	118	84
6	Persentase load faktor angkutan orang umum.	%	N/A	N/A	37,5	29,6	53
7	Persentase pelayanan kepelabuhanan	%	N/A	N/A	62,21	63	66
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	77	86,37	78
9	Jumlah dermaga penyebrangan	lokasi	N/A	N/A	1	1	1
10	Jumlah pelabuhan strategis	lokasi	N/A	N/A	4	4	4
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	N/A	N/A	3,1	4,6	4,5
2	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	N/A	N/A	3,82	4,07	4,32
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	N/A	N/A	2,6	3,7	3,9
4	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	N/A	N/A	1,55	2,27	2,64
5	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	N/A	N/A	87	95,16	94,64
6	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	70,28	70,28	0
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	N/A	N/A	65	89	80
8	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	%	N/A	N/A	100	100	92
9	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegerasi	%	N/A	N/A	90	96,5	85
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	86,89	86,91	87,08
11	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telpon genggam	%	N/A	N/A	91,83	88,72	92,35
12	Proporsi individu yang menggunakan internet	%	N/A	N/A	85,6	83,64	88,7
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
1	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	N/A	N/A	20	15,69	16,74
2	Persentase Pertumbuhan Omset UMK	Persen	N/A	N/A	10,96	32,62	3,68
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	80,28	67,26	0
4	Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	N/A	N/A	5,98	5,44	5,44
5	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	%	N/A	N/A	20	15,69	16,74
6	Persentase Koperasi yang Meningkat Status Kesehatannya	%	N/A	N/A	6,53	44,44	53,57

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	N/A	N/A	28,41	9,07	8,37
8	Persentase Koperasi Sehat	%	N/A	N/A	2,76	2,51	6,28
9	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	%	N/A	N/A	70,52	78,33	81,94
10	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	%	N/A	N/A	3,19	8	8,48
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	81,77	82,22	83,02
12	Persentase kredit UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap seluruh jumlah kredit di bank	%	N/A	N/A	26,2	27,95	34,81
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
1	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	%	N/A	N/A	463,26	156,39	128,02
2	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	N/A	N/A	4,72	2,01	0,39
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	77,57	73,91	0
4	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	%	N/A	N/A	0	0	0
5	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	N/A	N/A	80	85	95
6	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	%	N/A	N/A	88,17	96,63	93,91
7	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	%	N/A	N/A	100	100	100
8	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	%	N/A	N/A	91,04	94,44	93,88
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	78,02	92,77	94,32
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	N/A	N/A	10,07	11,22	13,45
2	Peningkatan prestasi olahraga	%	N/A	N/A	45,83	23,45	20,77
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	67,38	65,95	0
4	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	%	N/A	N/A	1,03	2,7	2,28
5	Persentase Atlet yang Berprestasi	%	N/A	N/A	32,64	21,32	15,11
6	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	%	N/A	N/A	100	100	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	82,05	86,48	88,79
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	N/A	N/A	95	100	100
O	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
1	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah	%	N/A	N/A	100	80	100
2	Persentase perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan komunikasi sandi	%	N/A	N/A	80	80	80
P	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
1	Nilai pemajuan kebudayaan	Nilai	N/A	N/A	0,24	N/A	0,93

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	N/A	N/A	22,9	22,9	90,33
3	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	%	N/A	N/A	24,87	24,87	44
4	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	%	N/A	N/A	26,66	26,66	66,67
5	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	N/A	N/A	85,63	85,63	96,77
6	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi	%	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
1	Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan	%	N/A	N/A	10,83	21,43	24,91
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	67,38	67,38	0
3	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	%	N/A	N/A	5	6,6	7
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	80	92,16	95,45
5	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	N/A	N/A	42,28	51,76	81,04
R	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
1	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	N/A	N/A	32,71	65,04	71,78
2	Persentase Arsip yang dikelola	%	N/A	N/A	60	70	79
3	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	%	N/A	N/A	7	55	76
4	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	%	N/A	N/A	0	0	0
6	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	N/A	N/A	80	33	67
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN						
1	Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	N/A	N/A	4.800	4.660	4.183
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	N/A	N/A	4.251	4.308	4.019
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	N/A	N/A	549	352,1	164
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
1	Tingkat Hunian akomodasi	%	N/A	N/A	31,72	45,25	53,54
2	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	%	N/A	N/A	0	13,45	34,68
3	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	%	N/A	N/A	10,61	3,9	3,8
4	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	%	N/A	N/A	17	25	4,37
5	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	%	N/A	N/A	12	18	29,49
6	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	%	N/A	N/A	8	33	33,33
7	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	%	N/A	N/A	1,45	1,48	1,66
8	Jumlah wisatawan mancanegara	orang	N/A	N/A	11.704	24.511	36.450
9	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang	N/A	N/A	1.748.085	2.534.015	2.633.919
10	Jumlah kunjungan wisatawan kota Balikpapan	orang	N/A	N/A	1.759.789	2.558.526	2.670.369
11	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	orang	N/A	N/A	9920	11583	3,93
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	N/A	N/A	14.081	16.956	21.832
2	Total Produksi Sub Sektor Hortikultura	Ton	N/A	N/A	187.540	185.175	146.789
3	Total Produksi Sub Sektor Perkebunan	Ton	N/A	N/A	16.087	16.568	15.274
4	Total Produksi sub sektor peternakan	Ton	N/A	N/A	17.714	17.095	24.199
5	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	N/A	N/A	41,54	47	63,38
6	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	%	N/A	N/A	15	44	25
7	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	%	N/A	N/A	75	75	85
8	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	%	N/A	N/A	246	343	148,88
9	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	%	N/A	N/A	40	97,57	52,65
10	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan (persen)	%	N/A	N/A	50	100	N/A
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
1	pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	N/A	N/A	19,84	-20,04	-16,73
2	persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	%	N/A	N/A	69,19	72,81	88,69
3	inflasi pangan bergejolak	%	N/A	N/A	5,81	6,76	3,54
4	persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi	%	N/A	N/A	8,33	8,33	8,33
5	persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	N/A	N/A	6,8	6,34	25,07
6	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	69,98	69,41	0
7	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	%	N/A	N/A	35,06	38,1	41
8	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	%	N/A	N/A	80	80	80
9	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	%	N/A	N/A	10,61	6,22	4,7
10	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	Juta Dollar	N/A	N/A	4029,26	4422,09	4.145
11	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	N/A	N/A	68,96	88,26	75,7
12	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	%	N/A	N/A	76,92	70,91	100
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	77,45	80,35	75,62
14	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	N/A	N/A	13	87	75,17
15	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	N/A	N/A	68,96	88,26	97,3
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
1	Persentase Pertumbuhan Investasi IKM	Persen	N/A	N/A	6,92	13,51	13,32
2	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	N/A	N/A	1,1	7,86	11,27
3	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	N/A	N/A	12,01	12,74	14,41

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	%	N/A	N/A	45,45	29,02	30,57
5	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	%	N/A	N/A	4,59	4,74	6,19
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		N/A	N/A	40	100	30,57
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
A	SEKRETARIAT DAERAH						
1	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	N/A	N/A	100	100	100
2	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, pbj yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	N/A	N/A	100	100	100
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	76,05	76,05	0
4	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	%	N/A	N/A	97,73	100	100
5	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	%	N/A	N/A	100	100	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	77,45	76,34	76,54
7	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Poin	N/A	N/A	100	N/A	N/A
8	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	N/A	N/A	87,12	90,16	95,57
B	SEKRETARIAT DPRD						
1	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	64,86	0	0
2	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Nilai	N/A	N/A	65,85	72,79	74,51
3	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Funsgi DPRD yang terfasilitasi	%	N/A	N/A	72,1	82,5	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	78,04	85,47	86,97
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
A	PERENCANAAN						
1	Nilai SAKIP (Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja)	Poin	N/A	N/A	41,7	42,76	42,87
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	68,43	0	0
3	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Poin	N/A	N/A	19,35	20,26	20,34
4	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	N/A	N/A	22,35	22,5	22,53
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	82,14	78,61	83,08

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Proyek	N/A	N/A	2	2	3
7	Jumlah Alokasi Pemerintah Menyiapkan Proyek, Transaksi Proyek, dan dukungan Pemerintah Dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Rp	N/A	N/A	740.894.850	732.907.000	3.178.610.230
8	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	%	N/A	N/A	29,55	25,8	20,54
9	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Nilai	N/A	N/A	13,09	11,22	11,22
10	PDB per kapita	Nilai	N/A	N/A	181,29	201,64	201,64
11	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Nilai	N/A	N/A	4,96	6,49	1,32
B	KEUANGAN						
1	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	58,66	58,66	0
2	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	N/A	N/A	WTP	WTP	WTP
3	Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	N/A	N/A	14,34	15,68	15,23
4	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	61,02	65	0
5	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	%	N/A	N/A	100	100	100
6	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	%	N/A	N/A	100	100	100
7	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Milyar	N/A	N/A	663,69	767,76	885,11
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	74,5	N/A	77,5
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	88,93	89,53	89,53
10	Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran yang Disetujui	%	N/A	N/A	95	95	95
11	Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	%	N/A	N/A	100	100	100
12	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi terhadap PDB menurut Sumbernya	%	N/A	N/A	0,64	0,67	0,624
13	Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	%	N/A	N/A	0,49	0,5	0,5
C	KEPEGAWAIAN						
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	N/A	48,48	51,21	62,72	78,59
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	89,95	87,49	0
3	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	%	N/A	N/A	88	89,44	84,21
4	Persentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	%	N/A	N/A	20	40	60
5	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	%	N/A	N/A	97,81	95,26	88,75
6	Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	%	N/A	N/A	0,69	79,01	1,34
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	77,08	83,83	83,74
8	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS	%	N/A	N/A	107,97	55,08	57,37

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)						
9	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N/A	N/A	20,16	24,65	23,11
10	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N/A	N/A	59,39	34,04	8,01
11	Indeks NSPK Manajemen ASN	Poin	N/A	N/A	61	73,5	72,68
D	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	%	N/A	N/A	17,39	18,94	22,13
E	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	1117	39,2	53,88	39,14	57,21
2	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	%	N/A	N/A	100	100	100
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
A	INSPEKTORAT DAERAH						
1	Kapabilitas APIP	Level	N/A	N/A	Level 3	Level 3	Level 3
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Evaluasi	Poin	N/A	N/A	16,7	16,53	16,71
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	76,89	76,89	0
4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	N/A	N/A	83,33	86,5	91,9
5	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	%	N/A	N/A	51,67	63,33	75
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	84,5	85	81,44
VII	UNSUR KEWILAYAHAN						
A	KECAMATAN						
1	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	N/A	N/A	61,13	69,9	60,04
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	N/A	N/A	82,25	84,25	70
3	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	N/A	N/A	63,39	63,39	69,44
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	N/A	N/A	85,93	84,38	90,6
5	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	N/A	N/A	69,22	73,58	70,31
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	N/A	N/A	81,11	80,92	81,33
7	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	N/A	N/A	65,56	65,56	67,67
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	N/A	N/A	79,44	83,57	83,15
9	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	N/A	N/A	66,25	66,25	68,26
10	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	N/A	N/A	81,51	81,03	89,46
11	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	N/A	N/A	74,2	70,84	70,38
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	N/A	N/A	81	80	88,8
13	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin	N/A	N/A	100	100	100
14	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	N/A	N/A	16	23,37	14
15	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	N/A	N/A	100	98	100
16	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin	N/A	N/A	100	100	100
17	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	N/A	N/A	8	19,33	20,28

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
18	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	N/A	N/A	100	100	100
19	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin	N/A	N/A	100	100	100
20	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	N/A	N/A	10	51	24,76
21	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	N/A	N/A	100	100	100
22	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Poin	N/A	N/A	100	100	100
23	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	N/A	N/A	16,35	16,52	17,01
24	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	N/A	N/A	100	100	100
25	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin	N/A	N/A	100	100	100
26	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	N/A	N/A	15,27	15,9	17,11
27	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	N/A	N/A	81	98	100
28	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin	N/A	N/A	100	100	100
29	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	N/A	N/A	23,37	23,7	23,37
30	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	N/A	N/A	100	100	100
31	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	70,5	88	70
32	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	79,21	84,38	79,62
33	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	80,22	80,22	75,98
34	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	79,32	69,14	79,8
35	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	81,83	81,98	82,88
36	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	86,63	77,31	86,63
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	N/A	60,46	60,46	0
2	Persentase partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	%	N/A	N/A	67	100	100
3	Presentase Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	%	N/A	N/A	81	85	100
4	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	%	N/A	N/A	100	75	80
5	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	%	N/A	N/A	66,6	100	100
6	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah	%	N/A	N/A	83	95	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan						
7	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	%	N/A	N/A	80	90	100
8	Persentase Potensi Konflik yang telah dilakukan monitoring	%	N/A	N/A	80	85	100
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	80,02	79,43	80,2

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

2.5.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Gambaran ringkas kondisi keuangan daerah merupakan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024. Analisis dilakukan terhadap komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk melihat sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis ini juga menjadi basis dalam melakukan proyeksi terhadap target pendapatan dan belanja daerah untuk periode 2026-2030. Kinerja APBD Kota Balikpapan pada periode 2020-2024 digambarkan melalui komponen penyusun APBD yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berikut adalah ringkasan realisasi dan pertumbuhan APBD Kota Balikpapan tahun 2020-2024.

Tabel 2. 35 Realisasi dan Pertumbuhan APBD Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

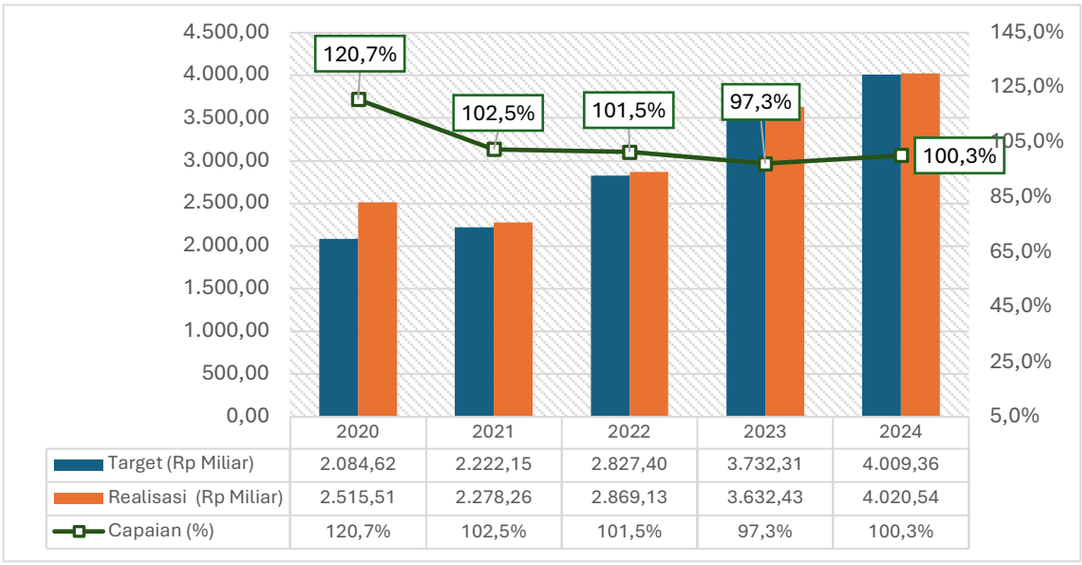
NO	URAIAN	REALISASI TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	606.079.950.753,42	755.062.500.914,79	811.255.755.825,56	966.208.071.540,23	1.066.692.925.336,93	8,17%
	B. Pendapatan Transfer	1.830.196.140.055,00	1.443.258.420.222,00	1.987.807.473.947,00	2.661.560.594.348,00	2.887.703.799.448,00	13,30%
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	79.232.396.955,72	79.938.926.052,90	70.066.891.133,17	4.656.459.849,00	66.138.300.277,69	751,32%
	JUMLAH PENDAPATAN	2.515.508.487.764,14	2.278.259.847.189,69	2.869.130.120.905,73	3.632.425.125.737,23	4.020.535.025.062,62	11,13%
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	1.596.079.114.613,10	1.744.051.495.995,90	1.915.925.588.616,51	2.331.395.721.553,33	2.487.779.432.633,22	8,11%
	B. Belanja Modal	428.692.685.694,51	545.701.475.495,62	795.946.626.435,12	1.391.243.269.229,31	1.442.250.144.883,62	22,79%
	C. Belanja Tak Terduga	120.435.934.469,68	85.268.846.303,70	33.526.006.109,37	22.464.664.572,00	12.135.375.577,00	1237,26%
	D. Belanja Transfer	-	-	-	1.500.000.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	2.145.207.734.777,29	2.375.021.817.795,22	2.745.398.221.161,00	3.746.603.655.354,64	3.942.164.953.093,84	11,41%
	SURPLUS/DEFISIT	370.300.752.986,85	-96.761.970.605,53	123.731.899.744,73	-114.178.529.617,41	78.370.071.968,78	-16,85%
3	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan	323.831.718.088,05	679.472.471.074,81	556.781.496.283,18	657.612.998.070,97	536.370.834.984,38	20,50%
	B. Pengeluaran Pembiayaan	14.660.000.000,00	25.935.933.186,04	22.919.455.000,00	6.812.000.000,00	-	-10,84%
	PEMBIAYAAN NETTO	309.171.718.088,05	653.536.537.888,77	533.862.041.283,18	650.800.998.070,97	536.370.834.984,38	23,01%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	679.472.471.074,90	556.774.567.283,24	657.593.941.027,91	536.622.468.453,56	614.740.906.953,16	21,21%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024, Olah Data 2025

Kinerja APBD Kota Balikpapan pada tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan setiap tahun yang dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan dan belanja yang positif. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 11,13 persen sedangkan belanja sebesar 11,41 persen yang menunjukkan pertumbuhan belanja sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan belanja yang lebih besar menimbulkan risiko terjadinya defisit anggaran dan berdampak pada cadangan kas daerah. Oleh karena itu, efisiensi pengeluaran, optimalisasi dan perluasan sumber pendapatan perlu dilakukan ke depannya untuk menjamin pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Kinerja pelaksanaan APBD menurut masing-masing komponen dijabarkan pada sub bab berikut ini.

2.5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (PP No.12 Tahun 2019). Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberian pelayanan kepada publik didukung oleh pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pemasukan di dalam APBD. Pendapatan daerah dikelompokkan ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.



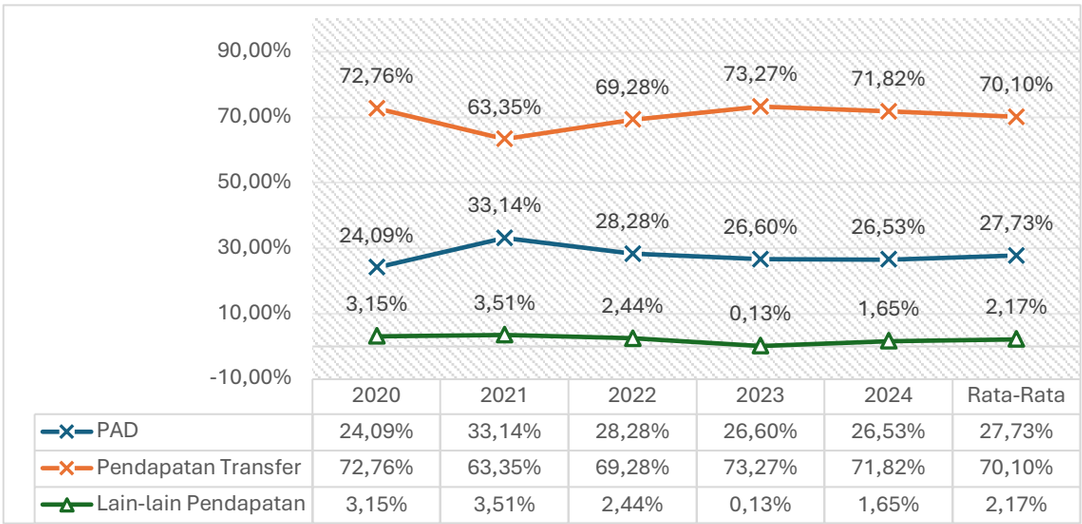
	2020	2021	2022	2023	2024
Target (Rp Miliar)	2.084,62	2.222,15	2.827,40	3.732,31	4.009,36
Realisasi (Rp Miliar)	2.515,51	2.278,26	2.869,13	3.632,43	4.020,54
Capaian (%)	120,7%	102,5%	101,5%	97,3%	100,3%

Gambar 2. 65 Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2020-2024 (Diolah, 2025)

Penetapan target pendapatan daerah ditetapkan secara optimis jika melihat rata-rata pertumbuhannya. Pertumbuhan realisasi pendapatan tertinggi dicapai pada tahun 2023 sebesar 26,60 persen mendorong realisasi pendapatan daerah mencapai 3,63 triliun rupiah. Jika dilihat dari tingkat capaiannya, realisasi pendapatan tahun 2020 merupakan capaian tertinggi. Tingginya tingkat capaian

tersebut didorong oleh realisasi pendapatan transfer yang mencapai 119,30 persen. Selain didorong oleh pendapatan transfer, PAD juga mampu melebihi target pendapatan yaitu sebesar 129,17 persen yang berasal dari pendapatan pajak daerah dengan capaian realisasi sebesar 128,24 persen, retribusi daerah tercapai 114,28 persen, dan lain-lain PAD yang sah tercapai 146,75 persen.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
PAD	24,09%	33,14%	28,28%	26,60%	26,53%	27,73%
Pendapatan Transfer	72,76%	63,35%	69,28%	73,27%	71,82%	70,10%
Lain-lain Pendapatan	3,15%	3,51%	2,44%	0,13%	1,65%	2,17%

Gambar 2. 66 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2020-2024 (Diolah, 2025)

Kontributor terbesar realisasi pendapatan daerah Kota Balikpapan berasal dari pendapatan transfer dengan rata-rata kontribusi mencapai 70,10 persen per tahun pada periode 2020-2024. Sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing sebesar 27,73 persen dan 2,17 persen. Kondisi ini mengindikasikan sumber pendapatan terbesar berasal dari penerimaan transfer, khususnya dari pemerintah pusat, sedangkan kinerja PAD masih belum optimal. Berikut penjelasan dari setiap komponen pendapatan daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah

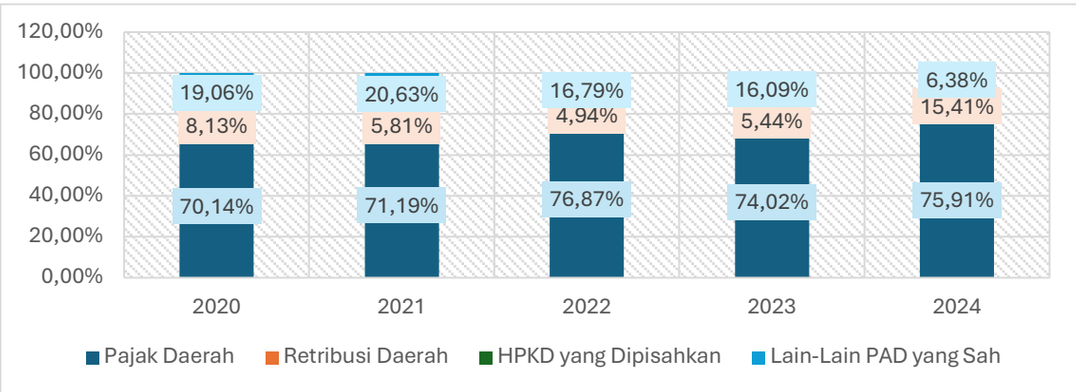
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah. Berikut adalah capaian kinerja PAD Kota Balikpapan pada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 36 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	471,52	606,08	(31,51)	(20,68)	128,54
2021	675,71	755,06	43,31	24,58	111,74
2022	785,52	811,26	16,25	7,44	103,28
2023	985,51	966,21	25,46	19,10	98,04
2024	1.196,86	1.066,69	21,45	10,40	89,12
Rata-rata	721,34	780,54	14,99	8,17	106,14

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi PAD Kota Balikpapan tumbuh sebesar 8,17 persen per tahun dengan rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 106,14 persen pada periode 2020-2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 24,58 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111,74 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan pajak daerah sebesar 26,43 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh penurunan seluruh sumber PAD akibat Pandemi Covid-19, meskipun secara tingkat capaian mampu melebih target.



Gambar 2. 67 PAD Kota Balikpapan Menurut Komponen Pendapatan Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

PAD Kota Balikpapan didominasi oleh komponen pajak daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 73,62 persen per tahun pada periode 2020-2024. Selanjutnya, diikuti oleh lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata sebesar 15,79 persen, sedangkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang

dipisahkan sebesar 7,95 persen per tahun dan 2,64 persen per tahun. Kontribusi pajak yang tinggi mencerminkan potensi ekonomi yang cukup besar di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 37 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	331,50	425,13	(33,96)	(24,79)	128,24
2021	515,00	537,49	55,35	26,43	104,37
2022	576,08	623,58	11,86	16,02	108,25
2023	771,89	715,20	33,99	14,69	92,66
2024	958,00	809,68	24,11	13,21	84,52
Rata-rata			18,27	9,11	103,61

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Pada periode 2020-2024, realisasi pajak daerah Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan sebesar 9,11 persen per tahun dengan rata-rata capaian sebesar 103,61 persen. Pertumbuhan realisasi pajak tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 24,53 persen yang didorong oleh pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tumbuh positif masing-masing sebesar 1,74 persen, 18,14 persen, dan 91,65 persen. Apabila dilihat dari tingkat pertumbuhannya, pertumbuhan komponen pajak tertinggi yaitu pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tumbuh sebesar 386,66 persen dari yang sebelumnya sebesar 954 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 4,65 miliar rupiah pada tahun 2021. Kondisi tersebut mendorong rata-rata pertumbuhan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mencapai 133,39 persen per tahun pada periode 2020-2024.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan terbesar dengan kontribusi mencapai 73,62 persen per tahun terhadap total PAD. Pajak daerah terdiri dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tabel 2. 38 Realisasi Pajak Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Rincian	Realisasi Pajak Daerah (Rp Miliar)					Rata-rata (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan	Proporsi
1. Pajak Hotel	23,29	36,49	52,60	65,87	77,74	18,86	7,90

Rincian	Realisasi Pajak Daerah (Rp Miliar)					Rata-rata (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan	Proporsi
2. Pajak Restoran	70,97	76,74	112,71	147,27	165,55	13,30	18,02
3. Pajak Hiburan	8,37	6,11	18,14	26,73	26,39	29,68	2,60
4. Pajak Reklame	8,51	9,45	9,76	10,68	11,31	3,43	1,64
5. Pajak Penerangan Jalan	121,05	123,15	128,47	138,82	154,49	4,84	22,10
6. Pajak Parkir	12,69	12,55	18,18	24,05	10,49	(3,13)	2,58
7. Pajak Air Tanah	2,01	1,94	2,36	2,51	7,49	39,64	0,50
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,95	4,65	1,09	1,05	1,75	58,95	0,33
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	99,77	117,87	127,39	131,34	154,59	9,15	20,66
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	77,50	148,53	152,85	166,85	199,87	16,71	23,68
Jumlah	425,11	537,46	623,54	715,17	809,68	9,11	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Pada periode 2020-2024, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan sumber pendapatan pajak terbesar dengan kontribusi mencapai 23,68 persen per tahun. Pajak Penerangan Jalan menjadi kontributor terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 22,10 persen per tahun sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) menjadi kontributor terbesar ketiga dengan kontribusi sebesar 20,66 persen per tahun.

Sumber PAD lainnya yang cukup strategis adalah retribusi daerah. Retribusi daerah berkontribusi sebesar 7,59 persen per tahun. Meskipun kontribusinya terhadap PAD lebih kecil dibandingkan dengan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah, pengelolaan retribusi yang optimal dapat mendorong peningkatan PAD yang lebih tinggi. Retribusi sendiri mencakup penerimaan dari pelayanan publik atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah yang artinya jika pelayanan publik atau fasilitas meningkat maka PAD daerah dapat ditingkatkan.

Tabel 2. 39 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Retribusi Daerah (Rp Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	43,11	49,29	(37,54)	(11,48)	114,31
2021	48,44	43,88	12,36	(10,97)	90,58
2022	74,12	40,11	53,01	(8,59)	54,11
2023	61,57	52,55	(16,94)	31,02	85,36
2024	173,67	164,39	182,08	212,81	94,65
Rata-Rata			38,60	42,56	87,80

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Pada periode 2020-2025, retribusi daerah Kota Balikpapan tumbuh 42,56 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 mencapai 212,81 persen, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi hingga 11,48 persen. Target retribusi daerah cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya. Realisasi retribusi tumbuh 3,96 persen per tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan dalam realisasi penganggaran daerah sudah optimal.

Sumber PAD lainnya yang tidak kalah berkontribusi terhadap PAD daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan kontribusi sebesar 4,44 persen per tahun. Pendapatan tersebut bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal atau investasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Balikpapan yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan, dan Perumda Manuntung Sukses Kota Balikpapan. Berikut ini adalah rincian perkembangan target dan realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 40 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	16,17	16,17	14,66	(4,13)	100,04
2021	18,80	17,91	16,28	10,71	95,25
2022	10,77	11,32	(42,73)	(36,79)	105,11
2023	21,04	42,96	95,42	279,58	204,17
2024	24,97	24,52	18,67	(42,93)	98,19
Rata-rata			20,46	41,29	120,55

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kota Balikpapan menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tumbuh 41,29 persen per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 mencapai 279,58 persen. Jika dilihat dari rata-rata capaian kinerja, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 124,84 persen per tahun dengan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2023 sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2024. Penetapan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasinya yang mengindikasikan penetapan anggaran cenderung pesimis.

Sumber PAD lainnya yang berperan cukup besar terhadap PAD Kota Balikpapan adalah penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kontribusi lain-lain PAD yang sah mencapai 15,79 persen per tahun. Pendapatan tersebut bersumber dari Hasil Penjualan dan pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain; Pendapatan Denda (Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; Pajak dan Retribusi Daerah); Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan BLUD; Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan Lain-lain PAD yang Sah Lain-lainnya.

Tabel 2. 41 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	80,74	115,49	(21,88)	(8,56)	143,04
2021	93,47	155,78	15,77	34,89	166,66
2022	124,55	136,24	33,25	(12,54)	109,39
2023	131,01	155,49	5,19	14,13	118,69
2024	40,21	68,10	(69,30)	(56,20)	169,35
Rata-rata			(7,40)	(5,66)	141,43

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah menunjukkan perkembangan yang cukup berfluktuasi selama periode 2020-2024, dengan penurunan sebesar

5,66 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan target. Realisasi capaian kinerja mencapai 141,43 persen per tahun dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 166,66 persen sedangkan yang terendah sebesar 109,39 persen pada tahun 2022.

b. Pendapatan Transfer

Sumber pendapatan lain yang berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah Kota Balikpapan adalah pendapatan transfer. Pendapatan Transfer adalah Transfer ke Daerah (TKD). TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa.

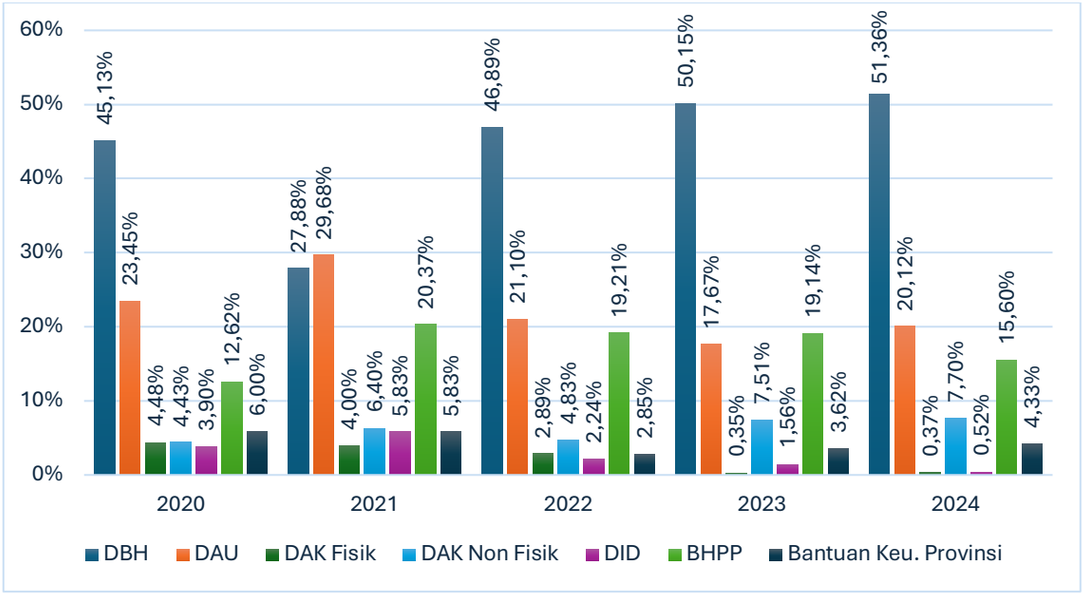
Tabel 2. 42 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	1.534,13	1.830,20	(16,42)	7,50	119,30
2021	1.466,66	1.443,26	(4,40)	(21,14)	98,40
2022	1.939,61	1.987,81	32,25	37,73	102,48
2023	2.740,21	2.661,56	41,28	33,89	97,13
2024	2.751,41	2.887,70	0,41	8,50	104,95
Rata-rata			10,62	13,30	104,45

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi pendapatan transfer Kota Balikpapan cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan sebesar 13,30 persen per tahun pada periode 2020-2024. Pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 37,73 persen dengan tingkat capaian sebesar 102,48 persen dari target. Pertumbuhan realisasi pendapatan transfer terendah terjadi pada tahun 2021 yang terkontraksi 21,14 persen dengan tingkat capaian sebesar 98,40 persen. Kondisi tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29.

Pendapatan transfer terdiri dari (a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana alokasi Khusus), Dana Insentif Daerah (DID) dan (b) Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Besarnya kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 68 Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Pendapatan Transfer di Kota Balikpapan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 didominasi oleh komponen DBH dengan rata-rata 44,28 persen per tahun. Sumber pendapatan transfer terbesar kedua adalah DAU dengan rata-rata sebesar 22,40 persen per tahun dan yang ketiga adalah BHPP sebesar 17,39 persen per tahun. Perencanaan keuangan Kota Balikpapan harus mempertimbangkan prediksi dan ketepatan penerimaan DBH karena DBH merupakan sumber pendapatan yang mendominasi. Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara efisien dan efektif untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Tabel 2. 43 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	545,51	825,89	(10,83)	57,35	151,40
2021	370,63	402,43	(32,06)	(51,27)	108,58
2022	851,86	932,15	129,84	131,63	109,43
2023	1.370,84	1.334,89	60,92	43,21	97,38
2024	1.245,38	1.483,10	(9,15)	11,10	119,09
Rata-rata			27,75	38,40	117,17

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi pendapatan transfer dana bagi hasil (pajak dan bukan pajak) cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,40 persen per tahun pada periode 2020-2024. Pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 131,63 persen dengan capaian kinerja mencapai 109,43 persen. Pertumbuhan dan capaian kinerja yang tinggi didorong oleh pendapatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29. Pertumbuhan realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yang terkontraksi sebesar 51,27 persen meskipun capaiannya mampu melebihi target. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 hingga 98,34 persen dibandingkan tahun 2020.

Tabel 2. 44 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Umum Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	437,73	429,20	(1,82)	(2,41)	98,05
2021	428,31	428,31	(2,15)	(0,21)	100,00
2022	428,31	419,35	0,00	(2,09)	97,91
2023	471,14	470,20	10,00	12,13	99,80
2024	592,55	581,09	25,77	23,58	98,07
Rata-rata			6,36	6,20	98,77

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Komponen dana perimbangan lainnya yang juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Realisasi Pendapatan Transfer DAU Kota Balikpapan cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 6,20 persen pada tahun 2020-2024. Pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 23,58 persen dengan tingkat capaian sebesar 98,07 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi 2,41 persen dengan tingkat capaian sebesar 98,05 persen. Kinerja DAU Kota Balikpapan secara umum menunjukkan kinerja yang baik dengan tingkat capaian berkisar pada 98,88 persen per tahun. Kebijakan terkait DAU diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kebijakan ini memastikan alokasi dan penyaluran DAU tepat waktu sehingga membantu menjaga konsistensi antara proyeksi dan realisasi.

Tabel 2. 45 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Khusus Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	149,27	163,06	36,25	68,14	109,24
2021	186,07	150,15	24,65	(7,92)	80,69
2022	182,18	153,45	(2,09)	2,20	84,23
2023	223,46	209,15	22,66	36,30	93,60
2024	12,16	10,74	(94,56)	(94,86)	88,30
Rata-rata			(2,62)	0,77	91,21

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Komponen penting lainnya dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan adalah dana alokasi khusus (DAK). DAK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah, sedangkan DAK non fisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah. Pada periode 2020-2024, realisasi DAK yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan sebesar 0,77 persen per tahun dengan tingkat capaian sebesar 91,21 persen per tahun. Realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 109,24 persen dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2024 dengan tingkat capaian yang terkontraksi sebesar 94,86 persen dari target yang ditetapkan sebelumnya yang terutama dipengaruhi oleh turunnya pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Komponen pendapatan transfer lainnya dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan adalah Dana Insentif Daerah (DID). DID adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 46 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Insentif Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Dana Insentif Daerah (DID) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	60,63	71,30	(68,08)	(61,55)	117,60
2021	84,21	84,21	38,89	18,10	100,00
2022	44,43	44,43	(47,24)	(47,24)	100,00
2023	44,63	41,60	0,45	(6,36)	93,22
2024	22,82	14,95	(48,87)	(64,05)	65,54
Rata-rata			(24,97)	(32,22)	95,27

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Pada periode 2020-2024, pendapatan DID yang diterima oleh Pemerintah Kota Balikpapan berfluktuasi dengan tren yang semakin menurun. Pendapatan DID terus mengalami penurunan sebesar 32,22 persen per tahun dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2024 mencapai 64,05 persen. Apabila dilihat dari capaian kinerjanya, realisasi pendapatan DID mampu mendekati target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95,27 persen per tahun. Kondisi ini terjadi dikarenakan bila terdapat sisa dana, pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan rencana penggunaan dan realisasi dari sisa dana DID tersebut untuk pendidikan (termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan), kesehatan (termasuk penanganan pandemi COVID-19 dan digitalisasi pelayanan kesehatan), pemberdayaan UMKM, dan perlindungan sosial.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 2. 47 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Balikpapan
Tahun 2020-2024

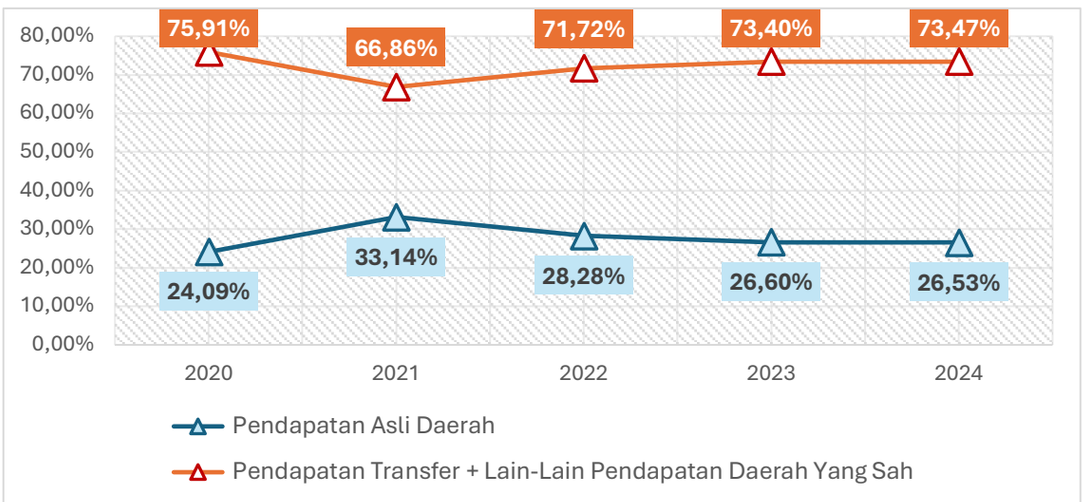
Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	78,97	79,23	2532,38	2541,08	100,33
2021	79,78	79,94	1,02	0,89	100,20
2022	102,27	70,07	28,20	(12,35)	68,51
2023	6,58	4,66	(93,56)	(93,35)	70,73
2024	61,09	66,14	827,98	1320,36	108,26
Rata-rata			659,20	751,32	89,61

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Balikpapan cenderung berfluktuasi pada tahun 2020-2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 751,32 persen per tahun. Tingginya pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pada lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 2024.

Kemandirian Fiskal dan Ketergantungan Fiskal

Kinerja keuangan pada periode 2020-2024 juga dapat dilihat dari derajat kemandirian fiskal (DKF) dan rasio ketergantungan fiskal (RKF). Kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh proporsi PAD terhadap total pendapatan. Semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka ketergantungan daerah semakin kecil. Berbanding terbalik dengan derajat kemandirian fiskal, rasio ketergantungan fiskal ditunjukkan oleh proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan. Semakin besar proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal.



Gambar 2. 69 Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2020-2024

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2020-2024 (Diolah, 2025)

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Balikpapan cenderung berfluktuasi pada periode 2020-2024. Derajat kemandirian fiskal tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 33,14 persen sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 24,09 persen. Derajat kemandirian fiskal Kota Balikpapan termasuk dalam kategori "Sedang" (20<DDF≤30) dengan rata-rata sebesar 27 persen pada periode 2020-2024.

Rasio ketergantungan fiskal Kota Balikpapan termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi" (RK>50) dengan rata-rata mencapai 72 persen per tahun pada periode 2020-2024. Kondisi tersebut mengindikasikan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah didominasi oleh pendanaan dari pihak eksternal, khususnya pemerintah pusat.

2.5.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Dalam menentukan alokasi anggaran belanja, pemerintah daerah harus melihat sejauh mana kapasitas pendapatan dan kebutuhan pembangunan daerah agar anggaran yang dibelanjakan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Tabel 2. 48 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Daerah (Rp Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	2.393,72	2.145,21	(14,19)	(10,93)	89,62
2021	2.826,44	2.375,02	18,08	10,71	84,03
2022	3.273,13	2.745,40	15,80	15,59	83,88
2023	4.280,18	3.746,60	30,77	36,47	87,53
2024	4.545,98	3.942,16	6,21	5,22	86,72
Rata-rata			11,33	11,41	86,36

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi Belanja Daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,41 persen per tahun. Pertumbuhan realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -10,93 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan terjadi penurunan pos Belanja Modal sebesar 37,67 persen atau turun dari Rp687,77 miliar menjadi Rp428,69 miliar. Pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 36,41 persen. Tingginya capaian

realisasi didorong oleh kenaikan pos Belanja Modal sebesar 74,79 persen meningkat dari Rp795,94 miliar menjadi Rp1,39 triliun.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk belanja daerah Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 86,36 persen pada periode 2020-2024. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat capaian sebesar 89,67 persen dari target belanja daerah Kota Balikpapan yang telah direncanakan sebelumnya.

Belanja daerah diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer (UU HKPD). Keempat kategori tersebut kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama periode 2020-2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja operasi Kota Balikpapan pada periode 2020-2024.

Tabel 2. 49 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Operasi (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	1.808,67	1.596,08	(6,93)	(6,97)	88,25
2021	2.063,98	1.744,05	14,12	9,27	84,50
2022	2.248,01	1.915,93	8,92	9,85	85,23
2023	2.652,87	2.331,40	18,01	21,69	87,88
2024	2.882,99	2.487,78	8,67	6,71	86,29
Rata-rata			8,56	8,11	86,43

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi belanja operasi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,11 persen per tahun pada periode 2020-2024. Realisasi belanja mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar 6,97 persen. Penurunan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh penurunan pos belanja barang dan jasa sebesar minus 17,76 persen atau turun dari Rp849,56 miliar menjadi Rp697,38 miliar. Pertumbuhan realisasi belanja tertinggi terjadi

pada tahun 2023 sebesar 21,69 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan seluruh pos belanja seperti belanja pegawai yang tumbuh sebesar 11,43 persen, pos belanja barang dan jasa yang tumbuh 17,61 persen, dan pos belanja hibah yang tumbuh 131,59 persen.

Belanja Operasi Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 86,43 persen selama periode 2020-2024. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat capaian sebesar 88,25 persen dari target belanja operasi Kota Balikpapan yang telah direncanakan sebelumnya.

Porsi belanja pegawai perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Menurut Pasal 146 ayat (1) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30 persen dari total belanja. Belanja pegawai daerah yang dimaksud pada pasal tersebut tidak termasuk belanja khusus untuk tambahan penghasilan guru dan tunjangan guru yang berasal dari TKD.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja modal Kota Balikpapan selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 50 Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Modal (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	438,75	428,69	(47,25)	(37,67)	97,71
2021	648,45	545,70	47,80	27,29	84,16
2022	975,01	795,95	50,36	45,86	81,63
2023	1.587,12	1.391,24	62,78	74,79	87,66
2024	1.649,75	1.442,25	3,95	3,67	87,42
Rata-rata			23,53	22,79	87,72

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi Belanja Modal mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,79 persen per tahun. Pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 37,67 persen. Rendahnya pertumbuhan realisasi belanja modal pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan seluruh pos belanja modal seperti belanja modal tanah yang turun sebesar 99,62 persen atau turun dari Rp13,02 miliar pada tahun 2019 menjadi

Rp48 juta pada tahun 2020, belanja modal gedung dan bangunan yang turun 45,24 persen, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang turun 37,22 persen. Pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 74,79 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang tumbuh 77,40 persen, belanja modal peralatan dan mesin yang tumbuh 77,43 persen sebagai pos belanja modal dengan alokasi terbesar. Capaian kinerja belanja modal Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata sebesar 87,72 persen per tahun pada periode 2020-2024.

c. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan belanja yang dialokasikan kepada entitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Transfer dana ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan, dan memperkuat layanan publik di tingkat lokal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Transfer didefinisikan sebagai pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah kelurahan. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk Belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja transfer Kota Balikpapan selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 51 Target dan Realisasi Belanja Transfer Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Modal (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	1,30	0,00	(58,86)	(100,00)	0,00
2021	0,00	0,00	(100,00)	0,00	69,89
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)
2023	1,50	1,50	0,00	0,00	100,00
2024	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)	0,00
Rata-rata			(51,77)	(40,00)	13,98

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi Belanja Transfer mengalami pertumbuhan yang cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 40 persen per tahun. Rendahnya pertumbuhan realisasi belanja transfer ini dikarenakan tidak ada realisasi selama lima tahun kecuali tahun 2023. Pada 2023, terjadi peningkatan realisasi belanja transfer sebesar Rp1,5 miliar yang kemudian tidak ditargetkan dan tidak direalisasikan pada tahun 2024. Capaian kinerja belanja transfer Kota

Balikpapan memiliki rata-rata sebesar 13,98 persen per tahun pada periode 2020-2024.

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja tidak terduga Kota Balikpapan pada periode 2020-2024.

Tabel 2. 52 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Tidak Terduga (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	145,00	120,44	1189,87	6355,18	83,06
2021	114,01	85,27	(21,37)	(29,20)	74,79
2022	50,11	33,53	(56,05)	(60,68)	66,90
2023	38,68	22,46	(22,81)	(32,99)	58,08
2024	13,24	12,14	(65,78)	(45,98)	91,67
Rata-rata			204,77	1237,26	74,90

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Pada tahun 2020–2024, realisasi capaian kinerja untuk belanja tidak terduga Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 74,90 persen per tahun. Sementara itu, realisasi belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.237,26 persen per tahun. Pandemi Covid-19 menyebabkan tingginya belanja tidak terduga pada tahun 2020 ditunjukkan pertumbuhannya mencapai 6.355,18 persen dibandingkan tahun 2019.

2.5.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Analisis pembiayaan ditujukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi pembiayaan akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja. Sumber pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Tabel 2. 53 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Pembiayaan Daerah (Rp Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	309,10	309,17	17,79	17,66	100,02
2021	604,29	653,54	95,50	111,38	108,15
2022	445,73	533,86	(26,24)	(18,31)	119,77
2023	547,87	650,80	22,91	21,90	118,79
2024	536,62	536,37	(2,05)	(17,58)	99,95
Rata-rata			21,58	23,01	109,34

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2020-2024 (Diolah, 2025)

Realisasi pembiayaan tumbuh sebesar 23,01 persen per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 111,38 persen, meskipun selanjutnya terkontraksi 18,31 persen pada tahun 2022. Apabila dilihat dari tingkat capaian kinerja, pembiayaan daerah secara umum mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian mencapai 109,34 persen pada periode 2020-2024. Berikut ini adalah rincian komponen pembiayaan daerah Kota Balikpapan.

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pada periode 2020-2024, satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kota Balikpapan selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 54 Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	323,83	323,83	11,04	11,04	100,00
2021	635,73	679,47	96,31	109,82	106,88
2022	473,32	556,78	(25,55)	(18,06)	117,63
2023	558,52	657,61	18,00	18,11	117,74
2024	536,62	536,37	(3,92)	(18,44)	99,95
Rata-rata			19,18	20,50	108,44

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Penerimaan pembiayaan daerah Kota Balikpapan memperlihatkan kinerja yang optimal pada periode 2020-2024. Tingkat capaian kinerja untuk penerimaan pembiayaan daerah mencapai 108,44 persen per tahun yang mengindikasikan terlampauinya target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 117,74 persen. Capaian tersebut didorong oleh tingginya pelampauan penerimaan pendapatan transfer dari yang mulanya ditargetkan sebesar 2,64 miliar rupiah terealisasi hingga 107,37 miliar rupiah (4.060%).

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kota Balikpapan pada periode 2020-2024.

Tabel 2. 55 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	14,73	14,66	(49,59)	(49,21)	99,51
2021	31,44	25,94	113,41	76,92	82,49
2022	27,59	22,92	(12,24)	(11,63)	83,06
2023	10,65	6,81	(61,41)	(70,28)	63,97
2024	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)	0,00
Rata-rata			(21,97)	(30,84)	65,81

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Pengeluaran pembiayaan Kota Balikpapan selama kurun waktu 2020-2024 mengalami penurunan sebesar 30,84 persen per tahun dengan tingkat capaian kinerja sebesar 65,81 persen per tahun. Pengeluaran pembiayaan Kota Balikpapan dialokasikan sepenuhnya untuk penyertaan modal daerah pada BUMD. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Balikpapan tidak menganggarkan adanya pengeluaran pembiayaan.

c. Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Balikpapan

Selama periode lima tahun terakhir, tren realisasi pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni dari Rp2,52 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,02 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer, maupun pendapatan lainnya yang sah.

Meskipun demikian, fluktuasi terjadi pada pos belanja daerah, yang pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp2,15 triliun dan meningkat drastis hingga Rp3,94 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan pelayanan publik, namun tetap perlu dicermati efisiensi dan efektivitas realisasinya. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan daerah tergolong relatif kecil dan tidak konsisten setiap tahunnya, bahkan nihil pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa kebijakan penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan dilakukan secara selektif.

Tabel 2. 56 Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.515.508.487.764	2.278.259.847.190	2.869.130.120.906	3.632.425.125.737	4.020.535.025.063
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	2.145.207.734.777	2.375.021.817.795	2.745.398.221.161	3.746.603.655.355	3.942.164.953.094
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.660.000.000	25.935.933.186	22.919.455.000	6.812.000.000	-
A	Defisit riil	355.640.752.987	(122.697.903.792)	100.812.444.745	(120.990.529.617)	78.370.071.969
	Realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	323.831.718.088	679.472.471.075	556.781.496.283	657.612.998.071	536.370.834.984
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	323.831.718.088	679.472.471.075	556.781.496.283	657.612.998.071	536.370.834.984
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	679.472.471.075	556.774.567.283	657.593.941.028	536.622.468.454	614.740.906.953

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Defisit riil anggaran menunjukkan dinamika fiskal yang cukup kompleks. Pada tahun 2020 dan 2022, tercatat defisit riil masing-masing sebesar Rp355,64 miliar dan Rp100,81 miliar. Namun, pada tahun 2021 dan 2023, justru terjadi surplus riil, ditandai dengan nilai defisit yang bernilai negatif, yaitu sebesar Rp122,70 miliar dan Rp120,99 miliar. Adapun pada tahun 2024, kembali terjadi defisit riil sebesar Rp78,37 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Kota Balikpapan mengalami fluktuasi, baik karena faktor pendapatan maupun belanja yang belum sepenuhnya seimbang dari tahun ke tahun.

Dalam mengantisipasi defisit tersebut, penerimaan pembiayaan daerah yang mayoritas berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun-tahun sebelumnya menjadi andalan utama. Selama lima tahun terakhir, nilai SiLPA selalu tersedia dan cukup besar, misalnya Rp679,47 miliar pada tahun 2021 dan masih cukup kuat pada tahun 2024 sebesar Rp536,37 miliar. Ketergantungan pada SiLPA ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat defisit riil dalam beberapa tahun, posisi keuangan daerah tetap dapat dijaga stabil dengan penggunaan surplus anggaran dari tahun sebelumnya.

Akhirnya, jika dilihat dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (A + B), dapat disimpulkan bahwa Kota Balikpapan secara konsisten berhasil menutup defisit riil melalui mekanisme pembiayaan yang memadai, sehingga tetap menghasilkan SiLPA positif setiap tahun. Ini mencerminkan manajemen fiskal daerah yang relatif hati-hati dan terkontrol, meskipun perlu diantisipasi terhadap kemungkinan tekanan fiskal yang lebih besar di masa mendatang jika pendapatan tidak tumbuh seiring dengan peningkatan kebutuhan belanja publik.

2.5.1.4 Neraca Daerah

Neraca Daerah menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut diterbitkan. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat dan dapat diukur dalam satuan uang. Kewajiban (utang) dimana ini adalah utang yang timbul melalui keadaan masa lampau yang peneyelesaiannya melibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Eukitas dapat dijelaskan yakni adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Keberadaan Neraca Daerah pada dokumen perencanaan ini dinilai sangat berperan penting untuk pemerintahan Kota Balikpapan dalam mengukur kemampuan keuangan pemerintah. Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah pada setiap tahunnya terdapat dampak pada perubahan kondisi keuangan baik pada posisi aset, kewajiban maupun pada ekuitas.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Balikpapan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan positif dan stabil. Nilai total aset daerah meningkat dari Rp12,10 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp14,87 triliun pada tahun 2024, atau naik sekitar 22,8 persen dalam kurun waktu lima tahun. Peningkatan ini mencerminkan kemampuan fiskal dan tata kelola keuangan daerah yang solid, sejalan dengan peran Balikpapan sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di Kalimantan Timur. Pertumbuhan aset juga mengindikasikan adanya penguatan investasi pemerintah pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik, yang menjadi bagian integral dalam mendukung pembangunan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Berikut ini adalah perkembangan data Neraca Daerah Kota Balikpapan Periode (2020-2024).

Tabel 2. 57 Realisasi Neraca Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
1	ASET	12.101.350.613.568,10	12.416.371.980.064,30	13.169.795.358.965,20	14.326.031.895.463,40	14.867.479.671.916,40
A.	ASET LANCAR	938.341.948.122,82	921.392.287.210,03	998.247.611.772,02	929.055.411.074,61	926.926.553.696,89
	Kas	679.559.534.547,81	556.963.262.323,18	657.615.144.010,13	536.622.468.453,56	614.758.421.204,16
	Piutang	173.826.475.092,98	213.110.668.141,22	233.906.825.175,58	280.235.427.440,64	209.305.655.191,07
	Persediaan	83.245.738.228,80	151.093.398.389,47	93.292.599.620,92	111.666.422.042,41	100.817.148.592,09
	Beban Dibayar Dimuka	1.710.200.253,23	224.958.356,16	13.433.042.965,39	531.093.138,00	2.045.328.709,57
B.	INVESTASI JANGKA PANJANG	584.736.515.351,24	645.628.094.622,22	675.169.926.969,56	682.060.068.371,38	668.668.779.393,33
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.056.509.256,56	3.081.189.365,91	3.105.797.940,73	3.122.048.623,01	3.149.387.440,02
	Investasi Jangka Panjang Permanen	581.680.006.094,68	642.546.905.256,31	672.064.129.028,83	678.938.019.748,37	665.519.391.953,31
C.	ASET TETAP	10.313.106.847.790,60	10.596.187.367.813,70	10.757.222.254.746,00	10.277.030.720.633,10	11.190.632.943.972,60
	Tanah	5.368.852.714.404,30	5.433.536.745.894,30	5.319.352.832.370,05	5.220.946.074.936,78	5.382.278.050.303,78
	Peralatan dan Mesin	909.928.319.765,36	1.030.795.987.258,84	1.206.855.944.949,04	1.564.882.370.460,36	1.845.484.517.682,34
	Gedung dan Bangunan	3.880.708.672.740,10	3.850.428.544.906,83	3.987.529.772.273,90	2.729.111.734.469,30	2.959.176.638.065,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.186.760.130.538,50	3.674.736.753.098,45	4.064.222.801.667,91	4.635.262.099.654,93	5.508.759.727.538,96
	Aset tetap Lainnya	70.399.499.845,85	71.018.937.116,35	70.972.197.416,35	72.197.979.447,35	73.211.407.628,95
	Konstruksi dalam pengerjaan	133.261.868.724,28	147.460.559.821,06	156.961.061.824,14	363.775.928.647,93	340.858.259.793,03
	Akumulasi Penyusutan	(3.236.804.358.227,80)	(3.611.790.160.282,09)	(4.048.672.355.755,39)	(4.309.145.466.983,55)	(4.919.135.657.039,44)
D.	ASET LAINNYA	265.165.302.303,40	253.164.230.418,33	739.155.565.477,65	1.022.670.210.322,86	699.313.173.042,65
	Tagihan Penjualan Angsuran	10.428.294.191,50	9.119.567.046,50	7.938.403.825,50	7.469.060.047,50	6.789.529.776,00
	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	239.829.543,96	377.396.827,78	3.566.513.788,44	2.128.182.674,43	8.716.701.403,13
	Kemitraan dengan pihak ketiga	145.500.096.000,00	145.500.096.000,00	145.500.096.000,00	145.500.096.000,00	145.500.096.000,00

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
	Aset tak berwujud	34.194.128.182,68	19.700.198.134,38	28.028.545.330,14	34.002.502.778,49	38.138.851.675,81
	Aset Lain-lain	74.802.954.385,26	78.466.972.409,67	554.122.006.533,57	833.570.368.822,44	500.167.994.187,71
	Properti Investasi					
E.	PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00	0,00	1.415.215.485.061,48	1.381.938.221.810,90
	Tanah	-	-	-	163.145.540.921,80	163.145.540.921,80
	Gedung dan Bangunan	-	-	-	1.510.898.700.384,38	1.511.557.093.951,80
	Jalan Jaringan Irigasi	-	-	-	34.042.276.624,30	34.042.276.624,30
	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	(292.871.032.869,00)	(326.806.689.687,00)
2	KEWAJIBAN	42.076.815.264,52	80.436.155.940,83	46.103.461.977,27	52.964.172.650,05	52.045.706.026,99
A.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	42.076.815.264,52	80.436.155.940,83	46.103.461.977,27	52.964.172.650,05	52.045.706.026,99
	Utang perhitungan pihak ketiga	88.776.565,00	177.120.241,00	21.202.982,22	-	-
	Pendapatan diterima dimuka	2.284.620.928,97	2.825.330.248,83	2.492.419.207,35	2.625.186.421,80	894.513.401,34
	Utang belanja	31.080.244.102,57	74.980.113.783,35	41.094.389.620,05	47.760.797.560,60	48.439.642.008,00
	Utang jangka pendek lainnya	8.623.173.667,98	2.453.591.667,65	2.495.450.167,65	2.578.188.667,65	2.711.550.617,65
B.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-
3	EKUITAS	12.059.273.798.303,50	12.335.935.824.123,50	13.123.691.896.986,20	14.273.067.722.813,30	14.815.433.965.889,40
	Ekuitas	12.059.273.798.303,50	12.335.935.824.123,50	13.123.691.896.986,20	14.273.067.722.813,30	14.815.433.965.889,40
4	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	12.101.350.613.568,00	12.416.371.980.064,30	13.169.795.358.963,50	14.326.031.895.463,40	14.867.479.671.916,40

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kota Balikpapan 2020-2024

Komponen aset lancar menunjukkan fluktuasi yang relatif moderat sepanjang periode pengamatan. Nilai aset lancar menurun dari Rp938,34 miliar (2020) menjadi Rp926,92 miliar (2024). Penurunan ini terutama disebabkan oleh fluktuasi kas daerah, yang sempat mencapai Rp679,56 miliar pada 2020, turun menjadi Rp536,62 miliar pada 2023, dan kembali naik ke Rp614,76 miliar pada 2024.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan mengoptimalkan likuiditasnya untuk mendukung kegiatan pembangunan, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dan percepatan infrastruktur penyangga IKN. Meskipun nilai kas menurun, piutang dan persediaan menunjukkan stabilitas, yang berarti kegiatan ekonomi dan pelayanan publik tetap berjalan secara berkesinambungan.

Nilai investasi jangka panjang meningkat dari Rp584,73 miliar (2020) menjadi Rp668,67 miliar (2024). Peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat aset produktifnya melalui investasi permanen, khususnya pada bidang yang mendukung sektor jasa, energi, dan infrastruktur publik. Balikpapan, sebagai kota dengan basis ekonomi minyak dan gas bumi, cenderung menerapkan strategi investasi konservatif namun berorientasi jangka panjang. Langkah ini sejalan dengan upaya diversifikasi ekonomi daerah dari ketergantungan pada sektor migas menuju sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata berkelanjutan.

Komponen aset tetap merupakan bagian terbesar dari total aset daerah, yakni mencapai lebih dari 75 persen total kekayaan pemerintah. Nilainya meningkat dari Rp10,31 triliun (2020) menjadi Rp11,19 triliun (2024). Pertumbuhan signifikan terjadi pada kategori jalan, irigasi, dan jaringan, yang naik dari Rp3,18 triliun (2020) menjadi Rp5,51 triliun (2024). Peningkatan ini merefleksikan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam membangun dan memperkuat konektivitas wilayah, baik antar-kecamatan maupun dengan kawasan strategis nasional di sekitarnya. Kenaikan pada peralatan dan mesin juga menunjukkan upaya peningkatan kapasitas operasional pelayanan publik, termasuk digitalisasi layanan pemerintahan dan penanganan lingkungan. Meski demikian, akumulasi penyusutan yang meningkat hingga Rp4,9 triliun pada 2024 mengindikasikan perlunya strategi pemeliharaan dan revaluasi aset agar nilai guna infrastruktur tetap optimal.

Sementara itu, aset lainnya menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dengan lonjakan pada tahun 2023 mencapai Rp1,02 triliun. Kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan pengembangan aset non-fisik atau kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga (kemitraan publik-swasta) dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. Kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan daerah yang berorientasi pada pemanfaatan aset secara ekonomis dan berkelanjutan, terutama dalam mendukung sektor real estat, logistik, dan layanan perkotaan yang berkembang pesat.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Balikpapan mulai mencatat properti investasi senilai Rp1,41 triliun, yang sedikit menurun menjadi Rp1,38 triliun pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya transformasi pengelolaan aset daerah menuju aset produktif, seperti tanah dan gedung yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Properti investasi merupakan aset berupa properti yang dimiliki pemerintah daerah dengan tujuan utama untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau meningkatkan nilai ekonomis aset tersebut. Keberadaan properti investasi juga menjadi penanda adanya diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, sekaligus sebagai strategi penguatan aset produktif daerah dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya arah kebijakan keuangan yang mulai

mempertimbangkan pendekatan kewirausahaan sektor publik (*entrepreneurial government*).

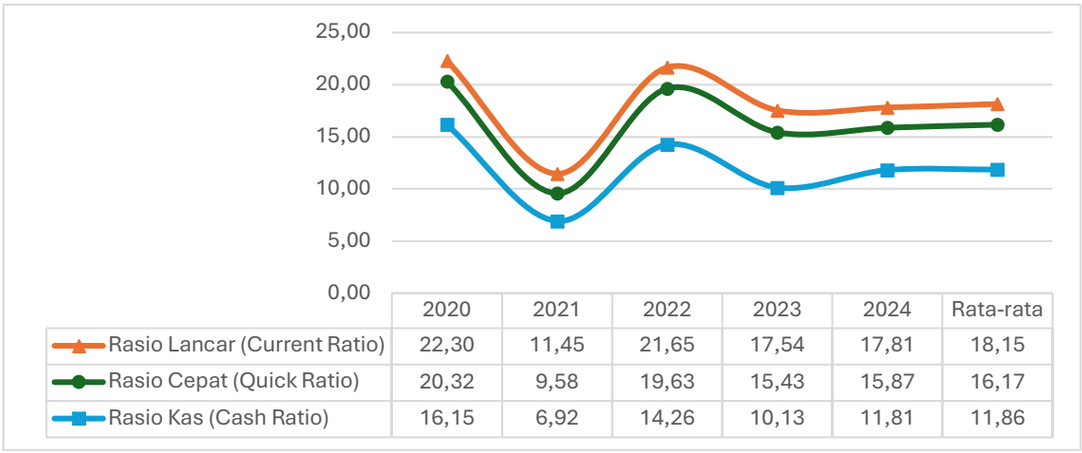
Struktur kewajiban Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan rasio utang yang sangat rendah, hanya sekitar 0,35 persen dari total aset pada 2024. Seluruh kewajiban bersifat jangka pendek, dengan nilai sekitar Rp52 miliar, dan tidak terdapat utang jangka panjang kepada lembaga keuangan. Hal ini menggambarkan kondisi solvabilitas daerah yang sangat kuat, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan tidak bergantung pada utang untuk membiayai pembangunan. Keadaan ini menjadi modal penting untuk menjaga kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi nasional maupun transisi pembangunan menuju IKN.

Nilai ekuitas daerah meningkat secara konsisten dari Rp12,05 triliun (2020) menjadi Rp14,81 triliun (2024). Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan aset dan efisiensi pengelolaan kewajiban. Peningkatan ekuitas menandakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan berhasil memperkuat posisi keuangan bersihnya melalui pengelolaan aset yang efektif, optimalisasi pendapatan daerah, dan pengendalian belanja. Dalam konteks RPJMD, kondisi ini menjadi indikator keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk pembiayaan pembangunan jangka menengah dan program strategis daerah.

Analisis neraca juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja keuangan daerah, terutama dalam memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas dalam mengelola utang, serta efektivitas dalam pengelolaan aset dan kewajiban lainnya. Analisis ini menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

a. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan mudah aset pemerintah daerah dapat dikonversi menjadi kas guna membayar kewajiban jangka pendek. Analisis rasio likuiditas mencakup rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Rasio Lancar (Current Ratio)	22,30	11,45	21,65	17,54	17,81	18,15
Rasio Cepat (Quick Ratio)	20,32	9,58	19,63	15,43	15,87	16,17
Rasio Kas (Cash Ratio)	16,15	6,92	14,26	10,13	11,81	11,86

Gambar 2. 70 Rasio Likuiditas Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Melihat pada hasil perhitungan rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*), dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024, kondisi keuangan Pemerintah Kota Balikpapan tidak mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga aktivitas keuangan untuk membayar kewajibannya berjalan dengan lancar.

1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan potensi risiko likuiditas.

Rata-rata rasio lancar selama periode ini adalah 18,15. Angka ini secara umum mencerminkan kondisi likuiditas yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun demikian, fluktuasi tahunan yang cukup signifikan, terutama penurunan tajam pada tahun 2021 (sebesar 11,45) setelah berada di angka 22,30 pada tahun 2020, mengindikasikan adanya tekanan pengelolaan kas yang perlu menjadi perhatian.

2) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mempertimbangkan persediaan. Persediaan sering kali memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas, sehingga rasio ini lebih mencerminkan kondisi likuiditas yang sebenarnya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan lebih baik dalam memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan.

Rata-rata rasio cepat selama lima tahun adalah 16,17, dengan titik terendah tercatat pada tahun 2021 sebesar 9,58. Meskipun terjadi

pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, konsistensi penguatan rasio cepat tetap perlu dijaga agar ketersediaan aset likuid nonpersediaan mampu menjamin pembayaran kewajiban jangka pendek secara efisien. Nilai 16,17 menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki aset likuid yang cukup tanpa harus mengandalkan persediaan.

3) Rasio Kas (*Cash Ratio*)

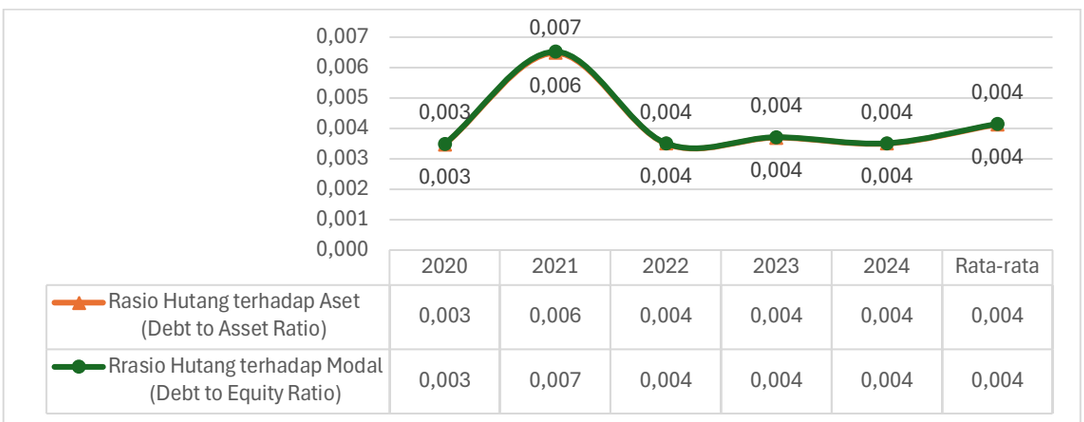
Rasio kas mengukur sejauh mana kas dan setara kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini memberikan gambaran paling konservatif mengenai likuiditas pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara langsung.

Rata-rata rasio kas selama lima tahun adalah 11,86. Meskipun masih dalam kategori aman, nilai rasio kas ini juga menunjukkan tren penurunan yang relatif dalam dari tahun 2020 (16,15) ke 2021 (6,92), sebelum akhirnya berangsur membaik hingga 2024.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi likuiditas Kota Balikpapan masih dalam taraf yang relatif sehat, terdapat indikasi ketergantungan pada fluktuasi penerimaan kas yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas fiskal jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pengelolaan kas yang terencana dan antisipatif, agar keberlanjutan pelayanan publik tidak terganggu akibat potensi keketatan likuiditas di masa depan.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset daerah dibiayai oleh utang dan seberapa mampu daerah melunasi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) dan Rasio hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*).



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Rasio Hutang terhadap Aset (Debt to Asset Ratio)	0,003	0,006	0,004	0,004	0,004	0,004
Rrasio Hutang terhadap Modal (Debt to Equity Ratio)	0,003	0,007	0,004	0,004	0,004	0,004

Gambar 2. 71 Rasio Solvabilitas Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Rasio solvabilitas Kota Balikpapan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan posisi keuangan yang relatif sehat dan terjaga dari sisi kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

1) Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio ini mengukur proporsi aset daerah yang didanai oleh utang. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pembiayaan eksternal. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko solvabilitas daerah karena ketergantungan yang tinggi terhadap utang.

Rata-rata rasio utang terhadap aset (Debt *to Asset Ratio*) selama lima tahun tercatat sebesar 0,004, yang berarti hanya sekitar 0,4 persen dari total aset yang berasal dari kewajiban atau utang. Nilai ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan sangat tidak tergantung pada pembiayaan berbasis utang dalam mengelola aset daerahnya.

2) Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

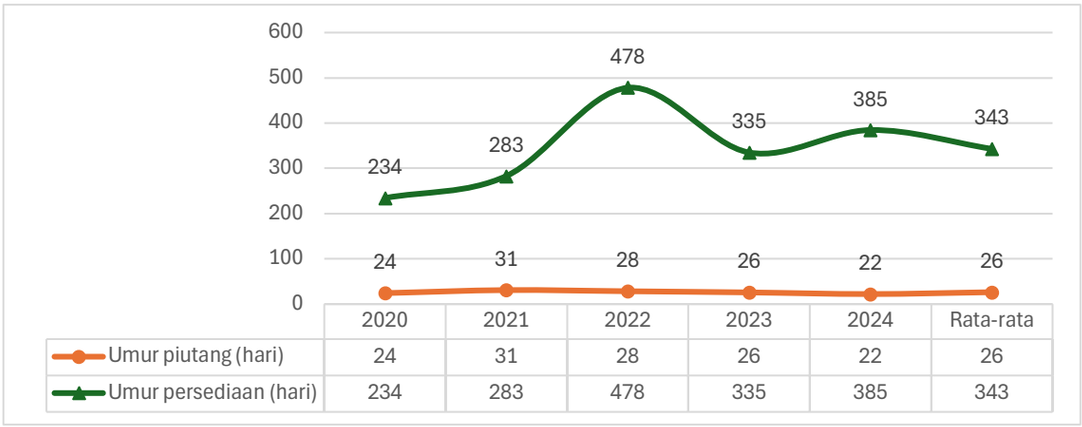
Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas pemerintah daerah. Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara sumber pendanaan dari utang dan sumber internal. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal sendiri untuk membiayai aktivitasnya.

Rasio hutang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) tercatat dengan rata-rata yang sama, yaitu 0,004. Angka ini merefleksikan bahwa hampir seluruh modal atau ekuitas yang dimiliki berasal dari sumber internal pemerintah daerah, bukan dari kewajiban kepada pihak ketiga. Kondisi ini merupakan indikator positif terhadap ketahanan fiskal jangka panjang, karena Kota Balikpapan dinilai memiliki fleksibilitas fiskal yang tinggi dan risiko gagal bayar yang sangat rendah.

Meskipun rasio solvabilitas yang sangat rendah ini mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, hal ini juga dapat menjadi sinyal perlunya eksplorasi alternatif pembiayaan jangka panjang yang tetap terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang membutuhkan investasi besar dapat didukung secara optimal tanpa membebani fiskal di masa depan.

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola asetnya, khususnya dalam mengelola piutang dan persediaan. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu umur piutang dan umur persediaan.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Umur piutang (hari)	24	31	28	26	22	26
Umur persediaan (hari)	234	283	478	335	385	343

Gambar 2. 72 Rasio Aktivitas Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

1) Umur Piutang

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menagih piutang dari pihak ketiga. Semakin lama umur piutang, semakin besar risiko ketidakmampuan daerah dalam mengonversi piutang menjadi kas. Umur piutang yang tinggi dapat mengindikasikan kelemahan dalam pengelolaan penerimaan daerah. Dalam lima tahun terakhir, umur piutang rata-rata berada pada angka 26 hari, dengan tren yang relatif stabil dan bahkan menunjukkan perbaikan pada tahun 2024 menjadi 22 hari, dari sebelumnya mencapai 31 hari di tahun 2021. Perbaikan ini mengindikasikan peningkatan efektivitas dalam penagihan atau pengelolaan piutang daerah, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap likuiditas kas pemerintah daerah. Semakin pendek umur piutang, semakin cepat pula konversi piutang menjadi kas, yang sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional pemerintahan.

2) Umur Persediaan

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menghabiskan persediaan yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset lancar. Semakin tinggi angka umur persediaan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas atau penggunaan yang produktif.

Rata-rata umur persediaan selama lima tahun mencapai 343 hari, dan bahkan menyentuh 478 hari pada tahun 2022, hal ini mencerminkan adanya akumulasi barang yang tidak segera dimanfaatkan atau dikeluarkan dalam waktu yang efisien. Situasi ini berpotensi menimbulkan pemborosan, baik dalam bentuk biaya penyimpanan maupun risiko penurunan nilai barang akibat kedaluwarsa atau kerusakan. Umur persediaan yang tinggi berpotensi menyebabkan inefisiensi, terutama jika menyangkut barang yang cepat usang atau memiliki biaya penyimpanan tinggi.

Secara keseluruhan, analisis ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pengelolaan piutang, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan persediaan. Diperlukan langkah strategis untuk mengefisienkan sistem perencanaan kebutuhan barang dan distribusi logistik antar unit kerja, agar nilai aset tidak hanya besar di atas kertas, tetapi benar-benar produktif dalam mendukung pelayanan publik secara optimal.

2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode Tahun Anggaran 2020-2024, maka disusun suatu analisis proyeksi keuangan daerah dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2026-2030. Analisis bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama serta program-program pembangunan jangka menengah daerah tahun 2026-2030.

Tabel 2. 58 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	APBD MURNI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
1	PENDAPATAN							
	A. Pendapatan Asli Daerah	1.066.692.925.336,93	1.301.282.969.500,00	1.550.167.750.357,71	1.601.932.010.000,00	1.841.715.551.000,00	2.025.887.107.000,00	2.248.847.964.000,00
	B. Pendapatan Transfer	2.887.703.799.448,00	2.913.292.954.013,00	2.247.322.731.500,00	2.825.342.699.000,00	3.234.914.007.000,00	3.225.967.637.000,00	3.191.300.017.000,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	66.138.300.277,69	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.020.535.025.062,62	4.219.075.923.513,00	3.801.990.481.857,71	4.427.274.709.000,00	5.076.629.558.000,00	5.251.854.744.000,00	5.440.147.981.000,00
2	BELANJA							
	A. Belanja Operasi	2.487.779.432.633,22	3.133.659.120.633,47	3.146.141.828.180,55	3.377.230.980.000,00	3.961.223.553.000,00	4.069.771.547.000,00	4.192.032.525.000,00
	B. Belanja Modal	1.442.250.144.883,62	1.451.589.188.671,53	1.093.842.703.353,16	1.421.995.514.000,00	1.464.655.379.000,00	1.508.595.040.000,00	1.553.852.891.000,00
	C. Belanja Tak Terduga	12.135.375.577,00	12.805.950.324,00	12.005.950.324,00	14.048.215.000,00	14.750.626.000,00	15.488.157.000,00	16.262.565.000,00
	D. Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	3.942.164.953.093,84	4.598.054.259.629,00	4.251.990.481.857,71	4.813.274.709.000,00	5.440.629.558.000,00	5.593.854.744.000,00	5.762.147.981.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	78.370.071.968,78	(378.978.336.116)	(450.000.000.000)	(386.000.000.000)	(364.000.000.000)	(342.000.000.000)	(322.000.000.000)
3	PEMBIAYAAN							
	A. Penerimaan	536.370.834.984,38	378.978.336.116,00	450.000.000.000,00	400.000.000.000,00	380.000.000.000,00	360.000.000.000,00	340.000.000.000,00
	B. Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	14.000.000.000,00	16.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	536.370.834.984,38	378.978.336.116,00	450.000.000.000,00	414.000.000.000,00	396.000.000.000,00	378.000.000.000,00	358.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	536.370.834.984,38	378.978.336.116,00	450.000.000.000,00	386.000.000.000,00	364.000.000.000,00	342.000.000.000,00	322.000.000.000,00

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Berdasarkan data proyeksi keuangan tahun 2026–2030, kerangka pendanaan Pemerintah Kota Balikpapan periode 2026–2030 memperlihatkan komitmen kuat dalam mempertahankan stabilitas fiskal di tengah dinamika pembangunan yang kian kompleks. Data baseline realisasi tahun 2024 sebesar Rp4,02 triliun pendapatan dan Rp3,94 triliun belanja, posisi fiskal Kota Balikpapan berada dalam kondisi surplus sebesar Rp78,37 miliar. Proyeksi hingga tahun 2030 menunjukkan adanya penyesuaian struktur fiskal menuju keseimbangan yang terkendali, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan fiskal dan efisiensi belanja publik.

Total pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp3,80 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp5,44 triliun pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 9,3 persen. Peningkatan pendapatan ini terutama ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh signifikan dari Rp1,55 triliun (2026) menjadi Rp2,25 triliun (2030). Tren ini menandakan upaya nyata Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah. Sebaliknya, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi menunjukkan tren fluktuatif, dengan nilai tertinggi pada tahun 2028 sebesar Rp3,23 triliun sebelum sedikit menurun menjadi Rp3,19 triliun pada tahun 2030. Hal ini menggambarkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer perlahan berkurang seiring meningkatnya kapasitas fiskal daerah. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan drastis di 2026 dan bahkan tidak diproyeksikan lagi pada tahun 2027–2030. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap sumber penerimaan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Belanja daerah diproyeksikan tumbuh dari Rp4,25 triliun (2026) menjadi Rp5,76 triliun (2030), dengan peningkatan rata-rata sekitar 7,8 persen per tahun. Kenaikan terbesar terjadi pada belanja operasi, yang mencerminkan peningkatan kebutuhan untuk pembiayaan layanan dasar, kesejahteraan pegawai, dan pemeliharaan infrastruktur publik. Secara rinci, belanja operasi meningkat dari Rp3,15 triliun pada 2026 menjadi Rp4,19 triliun pada 2030, sementara belanja modal—yang mencerminkan investasi pemerintah dalam pembangunan fisik—menunjukkan peningkatan yang lebih terkendali, dari Rp1,09 triliun (2026) menjadi Rp1,55 triliun (2030). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran strategi belanja dari pembangunan infrastruktur fisik menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kapasitas institusional.

Di sisi lain, belanja tak terduga tetap dijaga dalam kisaran yang relatif kecil dan stabil, sekitar Rp12–16 miliar per tahun. Ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian fiskal dalam menghadapi risiko ketidakpastian ekonomi dan sosial.

Meskipun pada baseline 2024 Kota Balikpapan masih mencatat surplus Rp78,37 miliar, proyeksi mulai 2026 memperkirakan munculnya defisit anggaran yang berkisar antara Rp450 miliar (2026) hingga Rp322 miliar (2030). Kendati demikian, defisit tersebut sepenuhnya ditutupi oleh pembiayaan netto, yang berasal dari penerimaan pembiayaan seperti pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan sumber lainnya.

Nilai pembiayaan netto direncanakan menurun secara gradual, dari Rp450 miliar (2026) menjadi Rp322 miliar (2030), mencerminkan konsolidasi fiskal yang terencana dan disiplin dalam manajemen anggaran. Penurunan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan berupaya mengarahkan kebijakan fiskalnya menuju keseimbangan primer positif dalam jangka menengah.

Secara keseluruhan, proyeksi kerangka pendanaan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2026–2030 menggambarkan arah fiskal yang stabil, terukur, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah. Peningkatan PAD menjadi motor utama kemandirian fiskal, sementara pengendalian belanja dan pembiayaan menunjukkan adanya disiplin anggaran dan tata kelola yang baik. Dalam konteks pelaksanaan RPJMD 2026–2030, struktur fiskal yang direncanakan ini memberikan dasar yang kuat bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di kawasan strategis Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara.

2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pertimbangan utama dalam proyeksi pendapatan didasarkan pada analisis tren dari data historis beberapa tahun terakhir untuk setiap objek pendapatan. Proyeksi ini juga mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan historis, kondisi ekonomi makro yang berlaku, serta kebijakan dan strategi terkait pendapatan daerah di masa depan, sehingga hasil proyeksi menjadi lebih realistis. Selanjutnya, kebijakan dan strategi untuk pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah di masa mendatang akan diarahkan pada:

a. Penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi pengelolaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Peningkatan kerja sama dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada PP Nomor 35 Tahun 2023;
c. Pemerintah Daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan untuk mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah. Ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besaran pajak dan retribusi yang terutang, hingga penagihan dan pengawasan penyetoran pajak dan retribusi, dengan memanfaatkan teknologi;
d. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
e. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi perangkat daerah penghasil;
f. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
g. Kebijakan terkait pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus mempertimbangkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan serta perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
h. Meningkatkan evaluasi, monitoring, dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah;
i. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota dalam upaya meningkatkan pendapatan, khususnya yang bersumber dari dana transfer ke daerah; dan
j. Pembiayaan pembangunan daerah akan dilakukan melalui pendanaan kreatif dengan mekanisme kerja sama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, atau stakeholders lainnya dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan RPJMD yang menempatkan Balikpapan sebagai wilayah penyangga IKN. Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan ditampilkan pada tabel di bawah ini:

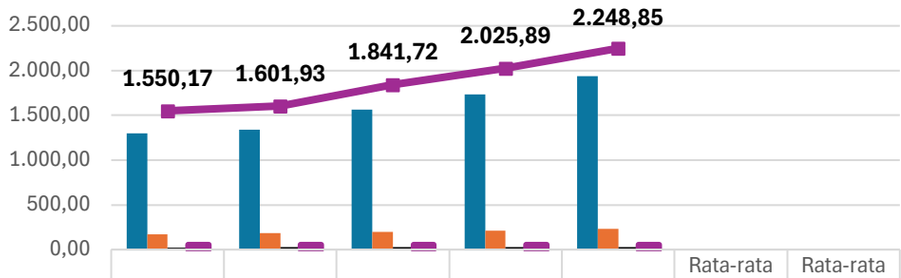
Tabel 2. 59 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	APBD MURNI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
1	PENDAPATAN							
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.066.692.925.336,93	1.301.282.969.500,00	1.550.167.750.357,71	1.601.932.010.000,00	1.841.715.551.000,00	2.025.887.107.000,00	2.248.847.964.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	809.678.302.867,00	1.053.276.645.000,00	1.302.161.425.857,71	1.339.315.874.000,00	1.563.457.786.000,00	1.730.880.348.000,00	1.935.903.712.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	164.391.311.694,00	171.835.366.500,00	171.835.366.500,00	184.723.019.000,00	198.577.245.000,00	213.470.538.000,00	229.480.828.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.519.393.509,81	24.011.240.000,00	24.011.240.000,00	25.211.802.000,00	26.472.392.000,00	27.796.012.000,00	29.185.813.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	68.103.917.266,12	52.159.718.000,00	52.159.718.000,00	52.681.315.000,00	53.208.128.000,00	53.740.209.000,00	54.277.611.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.887.703.799.448,00	2.913.292.954.013,00	2.247.322.731.500,00	2.825.342.699.000,00	3.234.914.007.000,00	3.225.967.637.000,00	3.191.300.017.000,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.312.207.705.739,00	2.361.537.446.899,00	1.873.643.207.000,00	2.432.979.198.000,00	2.822.932.331.000,00	2.793.386.877.000,00	2.737.090.219.000,00
1.2.2	Transfer antar – daerah	575.496.093.709,00	551.755.507.114,00	373.679.524.500,00	392.363.501.000,00	411.981.676.000,00	432.580.760.000,00	454.209.798.000,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	66.138.300.277,69	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	66.138.300.277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.020.535.025.062,62	4.219.075.923.513,00	3.801.990.481.857,71	4.427.274.709.000,00	5.076.629.558.000,00	5.251.854.744.000,00	5.440.147.981.000,00

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Secara umum, pendapatan daerah Kota Balikpapan menunjukkan tren pertumbuhan positif dan konsisten selama periode proyeksi 2026–2030. Berdasarkan data, total pendapatan meningkat dari Rp4,02 triliun pada tahun 2024 (baseline) menjadi Rp5,44 triliun pada tahun 2030, atau mengalami kenaikan kumulatif sebesar 35,3 persen, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) sekitar 5,17 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2026 (Rp3,80 triliun) sebagai titik awal horizon proyeksi, pertumbuhan menuju tahun 2030 mencapai 43,1 persen, dengan *compound annual growth rate* (CAGR) sekitar 9,37 persen. Kedua ukuran ini menggambarkan arah fiskal yang realistis namun optimistis, yang diupayakan dengan cara meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tetap menjaga kredibilitas perencanaan keuangan. Kenaikan pendapatan tersebut utamanya disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terus meningkat secara signifikan, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi tetap menjadi komponen dominan namun cenderung stabil.

PAD menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp1,07 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,30 triliun pada tahun 2025, dan terus meningkat hingga mencapai Rp2,25 triliun pada tahun 2030. Secara rata-rata, PAD tumbuh sekitar 9,75 persen per tahun, menandakan adanya peningkatan kemampuan fiskal dan efektivitas kebijakan pendapatan daerah. Berikut grafik Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PAD Kota Balikpapan Tahun 2026-2030.



	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Pajak Daerah	1.302,16	1.339,32	1.563,46	1.730,88	1.935,90	84,80	10,42
Retribusi Daerah	171,84	184,72	198,58	213,47	229,48	10,83	7,50
HPKD yang Dipisahkan	24,01	25,21	26,47	27,80	29,19	1,45	5,00
Lain-lain PAD Yang Sah	52,16	52,68	53,21	53,74	54,28	2,92	1,00
TOTAL PAD	1.550,17	1.601,93	1.841,72	2.025,89	2.248,85	100,00	9,75

Gambar 2. 73 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PAD Kota Balikpapan Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan proyeksi komponen PAD Kota Balikpapan tahun 2026 hingga 2030, terlihat bahwa kontribusi utama PAD masih didominasi oleh pajak daerah, dengan rata-rata kontribusi sebesar 84,80 persen terhadap total PAD. Pajak daerah diperkirakan tumbuh secara konsisten dari Rp1,3 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,94 triliun pada tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar

10,42 persen per tahun. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak sektor jasa dan perdagangan, serta optimalisasi pajak properti, hotel, restoran, dan hiburan. Posisi strategis Balikpapan sebagai kota jasa dan pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mempercepat pertumbuhan basis pajak. Peningkatan aktivitas ekonomi, investasi properti, dan konsumsi masyarakat di sekitar kawasan metropolitan IKN memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang kuat terhadap penerimaan pajak daerah.

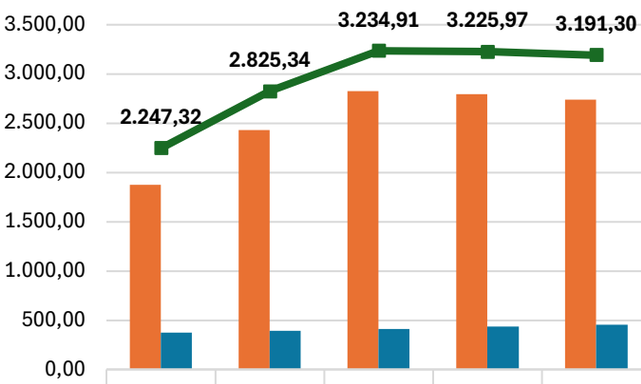
Kontributor kedua terbesar berasal dari retribusi daerah dengan kontribusi rata-rata sebesar 10,83 persen, dan tingkat pertumbuhan mencapai 7,5 persen per tahun. Nilai retribusi meningkat dari Rp171,8 miliar (2026) menjadi Rp229,4 miliar (2030). Pertumbuhan ini mengindikasikan potensi besar pada layanan publik berbayar yang dikelola oleh pemerintah daerah, serta meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan tersebut. Namun demikian, dibutuhkan penguatan sistem pelayanan publik yang efisien dan akuntabel agar peningkatan pendapatan ini diikuti oleh peningkatan kualitas layanan.

Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HKPD) menunjukkan kontribusi yang relatif kecil, yaitu hanya 1,45 persen terhadap total PAD. Meski demikian, laju pertumbuhan komponen ini cukup menjanjikan, dengan rata-rata 5,00 persen per tahun. Komponen ini tumbuh dari Rp24 miliar (2026) menjadi Rp29 miliar (2030). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan penguatan kinerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau aset produktif daerah yang dikelola secara profesional. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta tata kelola investasi yang baik menjadi penting untuk menjaga tren positif ini.

Komponen terakhir, yaitu lain-lain PAD yang sah, berkontribusi sekitar 2,92 persen terhadap total PAD, dengan rata-rata pertumbuhan yang cukup stabil sebesar 1,00 persen per tahun. Komponen ini bersifat stabil dengan tren moderat, naik dari Rp52,1 miliar (2026) menjadi Rp54,3 miliar (2030). Penerimaan ini umumnya berasal dari bunga bank, hasil penjualan aset kecil, dan denda keterlambatan. Stabilitas pada pos ini menunjukkan manajemen keuangan daerah yang tertib dan transparan.

Secara keseluruhan, struktur PAD Kota Balikpapan menunjukkan ketergantungan yang besar pada pajak daerah, dengan potensi pertumbuhan signifikan dari retribusi dan HKPD yang dipisahkan. Oleh karena itu, arah kebijakan keuangan daerah ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas perpajakan lokal, peningkatan kualitas layanan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta perluasan basis pendapatan sah lainnya. Hal ini penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar-daerah tetap menjadi tulang punggung keuangan daerah dengan proporsi terbesar dengan rata-rata sebesar 85,82 persen terhadap total pendapatan transfer. Pada tahun 2024, nilai transfer tercatat sebesar Rp2,89 triliun, dan meskipun mengalami fluktuasi, proyeksi menunjukkan kenaikan hingga Rp3,19 triliun pada 2030 dengan tingkat pertumbuhan CAGR sekitar 9,16 persen. Berikut grafik Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kota Balikpapan Tahun 2026-2030.



	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Transfer Pemerintah Pusat	1.873,64	2.432,98	2.822,93	2.793,39	2.737,09	85,82	9,94
Transfer antar – daerah	373,68	392,36	411,98	432,58	454,21	14,18	5,00
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	2.247,32	2.825,34	3.234,91	3.225,97	3.191,30	100,00	9,16

Gambar 2. 74 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kota Balikpapan Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Nilai transfer dari pemerintah pusat meningkat dari Rp1.873,64 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp2.737,09 miliar pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 9,94 persen. Angka ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal Kota Balikpapan terhadap alokasi dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Meskipun demikian, peningkatan nilai transfer pusat juga mencerminkan dukungan yang konsisten dari pemerintah nasional dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan yang dinamis.

Sementara itu, komponen transfer antar-daerah memiliki kontribusi yang jauh lebih kecil, yakni 14,18 persen dari total pendapatan transfer. Walaupun proporsinya relatif rendah, komponen ini memperlihatkan pertumbuhan yang stabil dari Rp373,68 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp454,21 miliar pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,00 persen per tahun. Pertumbuhan ini menandakan adanya peningkatan potensi kerja sama

antardaerah, baik melalui mekanisme bagi hasil maupun bentuk kolaborasi fiskal lainnya, yang dapat memperluas basis pendapatan daerah.

Secara agregat, tren peningkatan pada kedua komponen transfer menggambarkan arah yang positif bagi penguatan kemandirian fiskal Kota Balikpapan. Namun, masih diperlukan strategi diversifikasi sumber pendapatan agar ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap. Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pengembangan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan publik menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Komponen pendapatan daerah terakhir adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komponen ini relatif kecil dan cenderung menurun secara drastis setelah tahun 2025. Pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp66,14 miliar, sebagian besar berasal dari pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, sejak tahun 2026, kategori ini tidak lagi memiliki nilai signifikan, yang dapat menandakan penghentian program hibah atau perubahan klasifikasi sumber pendapatan. Fenomena ini perlu diantisipasi agar tidak mengurangi fleksibilitas fiskal daerah.

2.5.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Proyeksi belanja daerah didasarkan pada analisis tren data historis dalam beberapa tahun terakhir untuk setiap objek belanja, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat. Selain itu, kebijakan pembiayaan daerah juga menjadi faktor utama agar hasil proyeksi lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Proyeksi Belanja Daerah Kota Balikpapan memperhitungkan kebutuhan belanja secara proporsional, mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Alokasi belanja ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Pemerintah Kota Balikpapan memprioritaskan belanja daerah untuk mendukung program strategis yang bersifat mendesak serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah periode 2026–2030 diarahkan pada beberapa prinsip utama.

a. penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pencapaian hasil guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

b. belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektivitas tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan, dengan peningkatan alokasi yang terukur dan diikuti oleh peningkatan kinerja serta kualitas layanan publik.
c. belanja daerah dialokasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional.
d. Belanja honorarium bagi ASN dianggarkan dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan efektivitas dalam mendukung pencapaian sasaran program. Pemberian honorarium dibatasi dan hanya diberikan kepada pegawai yang memiliki kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan.
e. penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai, serta volume pekerjaan, dengan memperhitungkan estimasi sisa persediaan tahun anggaran berjalan. Ketujuh, alokasi belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana yang mendukung peningkatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
f. pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan yang sehat, serta akuntabilitas, dengan mengutamakan produk dalam negeri. Perencanaan kebutuhan BMD menjadi dasar bagi SKPD dalam mengusulkan anggaran, baik untuk pengadaan baru maupun pemeliharaan, dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. belanja modal diprioritaskan pada proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi langsung, seperti jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
h. Optimalisasi skema Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek besar guna mengurangi beban APBD.
i. Efisiensi dalam realisasi belanja modal, dengan memastikan proyek yang direncanakan dapat dieksekusi sesuai target waktu dan anggaran.
j. belanja bantuan keuangan difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah desa, agar bantuan keuangan dapat digunakan secara optimal dan tidak hanya untuk belanja rutin desa.
k. Monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan keuangan lebih diperketat, guna menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana.

Berikut ini adalah Proyeksi Belanja Kota Balikpapan untuk periode 2026–2030:

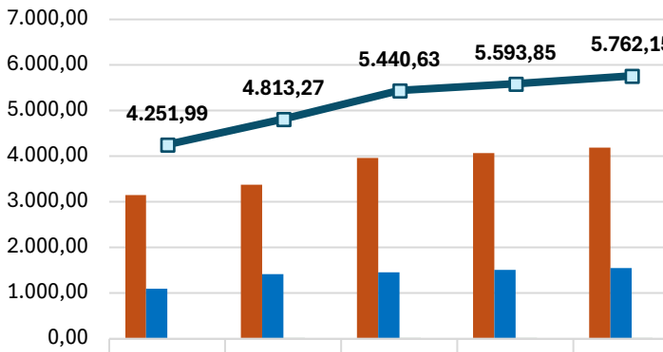
Tabel 2. 60 Proyeksi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	APBD MURNI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
2.	BELANJA							
2.1	Belanja Operasi	2.487.779.432.633,22	3.133.659.120.633,47	3.146.141.828.180,55	3.377.230.980.000,00	3.961.223.553.000,00	4.069.771.547.000,00	4.192.032.525.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	948.731.492.872,02	1.365.718.784.826,00	1.485.549.883.209,71	1.559.827.377.000,00	1.637.818.746.000,00	1.719.709.683.000,00	1.805.695.167.000,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.371.045.528.426,11	1.618.463.647.495,47	1.519.863.522.770,84	1.675.194.457.000,00	2.179.692.786.000,00	2.204.823.860.000,00	2.159.549.225.000,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	163.812.269.486,59	146.306.688.312,00	139.912.422.200,00	141.311.546.000,00	142.724.661.000,00	144.151.908.000,00	225.593.427.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.190.141.848,50	3.170.000.000,00	816.000.000,00	897.600.000,00	987.360.000,00	1.086.096.000,00	1.194.706.000,00
2.2	Belanja Modal	1.442.250.144.883,62	1.451.589.188.671,53	1.093.842.703.353,16	1.421.995.514.000,00	1.464.655.379.000,00	1.508.595.040.000,00	1.553.852.891.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	12.135.375.577,00	12.805.950.324,00	12.005.950.324,00	14.048.215.000,00	14.750.626.000,00	15.488.157.000,00	16.262.565.000,00
2.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	3.942.164.953.093,84	4.598.054.259.629,00	4.251.990.481.857,71	4.813.274.709.000,00	5.440.629.558.000,00	5.593.854.744.000,00	5.762.147.981.000,00

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi tahun 2024 sebagai baseline, analisis terhadap proyeksi belanja daerah Pemerintah Kota Balikpapan untuk periode 2026 hingga 2030 menunjukkan tren meningkat secara bertahap dari Rp3,94 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp5,76 triliun pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7,89 persen. Pola ini mencerminkan arah kebijakan fiskal yang ekspansif dan berorientasi pada penguatan kapasitas pelayanan publik serta peningkatan pembangunan fisik. Pertumbuhan belanja ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas kapasitas fiskal untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pada tahun 2026 terjadi sedikit penurunan realisasi proyeksi belanja menjadi Rp4,25 triliun, tren selanjutnya kembali meningkat hingga akhir periode proyeksi. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal jangka menengah, baik dari sisi efisiensi penggunaan anggaran maupun sinkronisasi dengan pendapatan yang tersedia.

Meskipun kenaikan ini menunjukkan dinamika positif dalam kapasitas keuangan daerah, komposisi belanja masih didominasi oleh belanja operasi. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar anggaran masih diarahkan pada kegiatan rutin dan administrasi pemerintahan, bukan pada belanja yang berorientasi produktif seperti belanja modal. Berikut grafik Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Kota Balikpapan Tahun 2026-2030



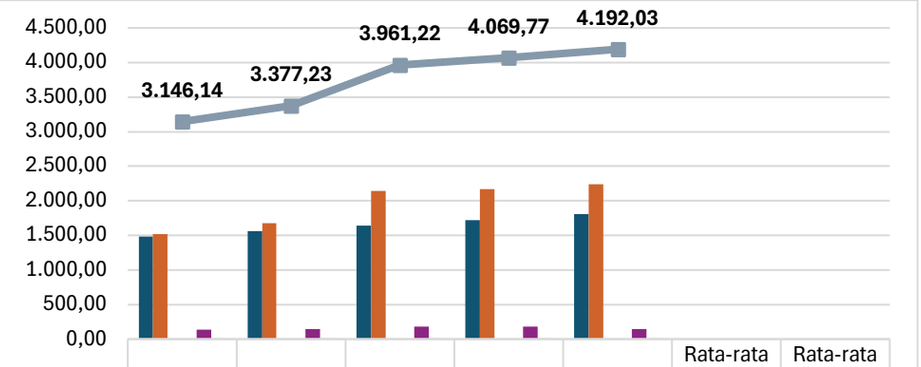
	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Belanja Operasi	3.146,14	3.377,23	3.961,22	4.069,77	4.192,03	72,49	7,44
Belanja Modal	1.093,84	1.422,00	1.464,66	1.508,60	1.553,85	27,22	9,17
Belanja Tidak Terduga	12,01	14,05	14,75	15,49	16,26	0,28	7,88
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BELANJA	4.251,99	4.813,27	5.440,63	5.593,85	5.762,15	100,00	7,89

Gambar 2. 75 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Belanja Kota Balikpapan Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Komponen belanja operasi menjadi kontributor terbesar dalam struktur belanja daerah, dengan proporsi rata-rata 72,49 persen dari total belanja tahunan. Nilainya meningkat dari Rp2,49 triliun pada 2024 menjadi Rp4,19 triliun pada 2030, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7,44 persen. Pertumbuhan

ini menandakan adanya konsistensi dalam penguatan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Berikut grafik Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi Kota Balikpapan Tahun 2026-2030.



	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Belanja Pegawai	1.485,55	1.559,83	1.637,82	1.719,71	1.805,70	44,02	5,00
Belanja Barang dan Jasa	1.519,86	1.675,19	2.139,69	2.164,82	2.239,55	51,71	10,18
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	139,91	141,31	182,72	184,15	145,59	4,25	1,00
Belanja Bantuan Sosial	0,82	0,90	0,99	1,09	1,19	0,03	10,00
TOTAL BELANJA OPERASI	3.146,14	3.377,23	3.961,22	4.069,77	4.192,03	100,00	7,44

Gambar 2. 76 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi Kota Balikpapan Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Belanja Pegawai terus meningkat, dari Rp948,73 miliar (2024) menjadi Rp1,81 triliun (2030). Hal ini mencerminkan kebijakan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) serta penyesuaian terhadap struktur gaji dan tunjangan. Komponen ini menyumbang hampir setengah dari total belanja operasi. Nilainya meningkat dari Rp1,49 triliun (2026) menjadi Rp1,81 triliun (2030) dengan rata-rata pertumbuhan 5 persen per tahun. Peningkatan ini menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan menyesuaikan kebijakan penggajian dengan regulasi nasional. Meskipun penting untuk stabilitas birokrasi, porsi belanja pegawai yang besar juga menunjukkan beban rutin yang perlu dikelola secara efisien agar tidak menghambat alokasi untuk belanja produktif.

Belanja Barang dan Jasa mengalami fluktuasi, dengan peningkatan signifikan hingga Rp2,18 triliun pada 2028, menandakan peningkatan aktivitas operasional pemerintah, proyek pelayanan publik, dan penguatan infrastruktur dasar. Sebagai komponen terbesar dengan kontribusi 51,71 persen dari total belanja operasi, belanja barang dan jasa tumbuh rata-rata 9,18 persen per tahun, dari Rp1,52 triliun (2026) menjadi Rp2,16 triliun (2030). Kenaikan signifikan ini mencerminkan peningkatan aktivitas pelayanan publik, proyek pemeliharaan

infrastruktur, serta pembiayaan kegiatan rutin pemerintahan. Dominasi pos ini menegaskan orientasi fiskal Balikpapan yang kuat pada operasionalisasi pelayanan masyarakat, meski perlu diimbangi dengan efisiensi agar tidak menimbulkan pemborosan.

Belanja hibah menunjukkan tren fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata hanya 1 persen per tahun, naik dari Rp139,91 miliar (2026) menjadi Rp145,59 miliar (2030). Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerapkan pendekatan yang lebih selektif dan terkendali terhadap pemberian hibah, dengan fokus pada dukungan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kegiatan masyarakat sipil. Pos ini berperan dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meskipun secara fiskal tidak signifikan terhadap total anggaran. Pemerintah daerah berupaya memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung pembangunan sosial. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2028-2029 sebagai antisipasi pemerintah daerah untuk persiapan dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

Belanja bantuan sosial, meskipun hanya berkontribusi sekitar 0,03 persen, menunjukkan tren pertumbuhan tertinggi, yakni 10,00 persen per tahun. Peningkatan ini dari Rp0,82 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp1,19 miliar pada tahun 2030 menunjukkan perhatian yang meningkat terhadap perlindungan sosial masyarakat rentan. Komponen ini menjadi penting dalam konteks respons kebijakan terhadap ketimpangan sosial, dampak ekonomi, serta upaya penguatan jaring pengaman sosial daerah.

Adapun belanja bunga dan belanja subsidi tidak dialokasikan dalam periode proyeksi ini, yang dapat diartikan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan tidak merencanakan pembiayaan melalui pinjaman berbunga atau intervensi ekonomi berbentuk subsidi langsung, atau belum menjadi kebijakan prioritas dalam lima tahun ke depan.

Secara keseluruhan, struktur belanja operasi Kota Balikpapan mencerminkan orientasi pada pemeliharaan pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai, disertai peningkatan belanja sosial secara bertahap. Oleh karena itu, tantangan ke depan terletak pada bagaimana menjaga keseimbangan antara efisiensi birokrasi, efektivitas layanan, dan daya dukung fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara Belanja modal menunjukkan tren peningkatan moderat, dari Rp1,44 triliun (2024) menjadi Rp1,55 triliun (2030). Komponen belanja modal menunjukkan peran yang signifikan dalam memperkuat infrastruktur daerah dan investasi publik, dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,22 persen dan pertumbuhan tahunan 9,17 persen—lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan belanja operasi. Pertumbuhan ini juga menggambarkan arah kebijakan yang lebih produktif, walaupun secara proporsional masih di bawah satu pertiga dari total belanja daerah. Memperbesar alokasi belanja modal, pemerintah daerah dapat

memperkuat efek ganda pembangunan terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada (a) pembangunan infrastruktur jalan, dan jaringan, yang berfungsi menopang mobilitas ekonomi perkotaan, (b) Pembangunan gedung dan fasilitas publik, (c) Belanja modal tanah dan peralatan, sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk mendukung efisiensi pemerintahan. Meskipun meningkat, proporsi belanja modal terhadap total belanja masih dapat diperkuat untuk memperbesar dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Belanja tidak terduga relatif kecil dalam struktur belanja daerah, dengan nilai berkisar antara Rp12,01 miliar hingga Rp16,26 miliar selama periode 2026–2030. Rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 7,88 persen, menunjukkan adanya peningkatan kewaspadaan fiskal terhadap potensi risiko bencana, darurat sosial, atau kondisi ekonomi yang tidak terduga. Meski proporsinya hanya 0,28 persen, keberadaannya penting sebagai bentuk kesiapsiagaan fiskal daerah untuk menjaga stabilitas keuangan dalam situasi luar biasa.

Secara keseluruhan, proyeksi belanja daerah Kota Balikpapan menunjukkan orientasi anggaran yang berimbang antara aspek operasional dan investasi jangka panjang, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta menciptakan tata kelola fiskal yang efisien dan berdaya tahan di masa depan.

2.5.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal daerah beriorientasi keuntungan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan daerah ke depan, sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran, diarahkan pada:

a. Pembiayaan mencakup setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
b. Pembiayaan netto digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran;
c. Jika diperkirakan ada defisit dalam APBD, defisit tersebut dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;

d. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional, dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya, untuk menghindari kemungkinan pengeluaran pada tahun anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai jika SiLPA yang direncanakan tidak tercapai;
e. Jika APBD diperkirakan surplus, surplus tersebut dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan
f. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilakukan jika jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Balikpapan dijelaskan pada tabel di bawah berikut ini.

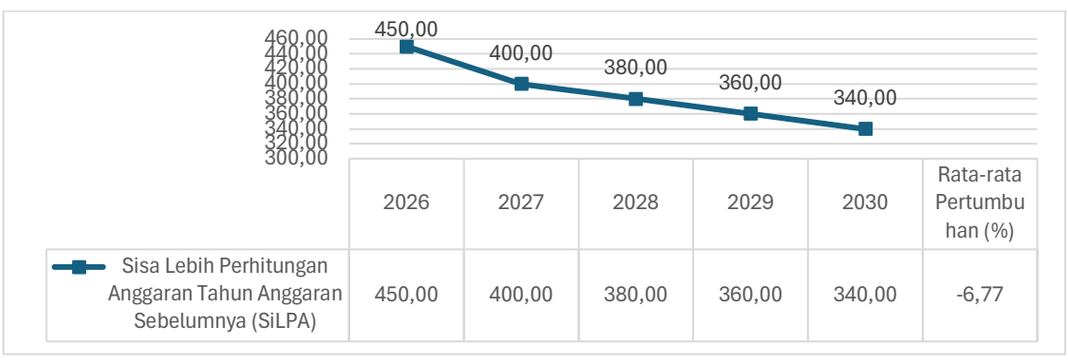
Tabel 2. 61 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	APBD MURNI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
3.1	Penerimaan Pembiayaan	536.370.834.984,38	378.978.336.116,00	450.000.000.000,00	400.000.000.000,00	380.000.000.000,00	360.000.000.000,00	340.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	536.370.834.984,38	378.978.336.116,00	450.000.000.000,00	400.000.000.000,00	380.000.000.000,00	360.000.000.000,00	340.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	14.000.000.000,00	16.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00
3.1.1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00		14.000.000.000,00	16.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	536.370.834.984,38	378.978.336.116,00	450.000.000.000,00	386.000.000.000,00	364.000.000.000,00	342.000.000.000,00	322.000.000.000,00

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Pembiayaan daerah merupakan instrumen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi menutup defisit atau mengelola surplus anggaran. Berdasarkan data, pembiayaan netto Kota Balikpapan mengalami tren menurun dari Rp536,37 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp322,00 miliar pada tahun 2030. Penurunan ini menandakan adanya upaya pemerintah daerah dalam melakukan konsolidasi fiskal, dengan cara mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan nonreguler secara bertahap untuk menjaga keberlanjutan anggaran. Rata-rata pembiayaan netto selama periode proyeksi berkisar antara Rp300–400 miliar per tahun, yang sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Tidak adanya komponen pinjaman atau pembiayaan eksternal menunjukkan bahwa struktur keuangan daerah berada dalam kondisi sehat dan terkendali.

Seluruh penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang nilainya mengalami penurunan bertahap. Kondisi ini menunjukkan bahwa SiLPA masih menjadi tumpuan utama pembiayaan daerah, mencerminkan adanya efisiensi pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, tren penurunan yang berkelanjutan mengindikasikan bahwa kapasitas surplus anggaran mulai menyempit, yang bisa berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan prioritas tanpa menambah pendapatan baru. Secara prinsip fiskal, semakin kecil SiLPA dapat diartikan sebagai peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran, karena menunjukkan bahwa dana APBD lebih banyak terserap untuk membiayai program pembangunan. Namun, di sisi lain, ketiadaan diversifikasi sumber pembiayaan (misalnya melalui pinjaman daerah atau obligasi daerah) bisa membatasi ruang fiskal untuk pembiayaan strategis di masa depan. Berikut grafik Proyeksi Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Kota Balikpapan Tahun 2026-2030.



	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	450,00	400,00	380,00	360,00	340,00	-6,77

Gambar 2. 77 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Kota Balikpapan Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan mulai muncul pada tahun 2027 sebesar Rp14 miliar, dan terus meningkat hingga Rp18 miliar pada 2029–2030. Komponen ini seluruhnya merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau lembaga investasi publik. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat posisi keuangan jangka panjang melalui investasi produktif yang diharapkan memberikan imbal hasil di masa mendatang. Namun, nominalnya yang relatif kecil menandakan bahwa strategi investasi masih bersifat konservatif dan berhati-hati. Tidak terdapat pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, yang berarti Kota Balikpapan tidak memiliki kewajiban utang daerah, sehingga risiko fiskal relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan kemandirian fiskal dan tata kelola keuangan yang prudent (berhati-hati).

Tren pembiayaan netto yang menurun dari Rp450 miliar pada 2026 menjadi Rp322 miliar pada 2030 menggambarkan arah kebijakan pengetatan fiskal secara bertahap (*gradual fiscal consolidation*). Pemerintah daerah tampak berusaha untuk menyesuaikan kapasitas fiskal dengan realisasi pendapatan, guna menjaga keseimbangan anggaran (*budget equilibrium*). Kebijakan ini dapat diinterpretasikan sebagai langkah menuju kemandirian fiskal berkelanjutan, dengan mengandalkan pendapatan murni (PAD dan transfer) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, bukan dari akumulasi sisa anggaran tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, proyeksi pembiayaan daerah Kota Balikpapan menunjukkan potensi menurunnya kapasitas pembiayaan netto dalam lima tahun mendatang dibandingkan tahun dasar 2024. Hal ini mencerminkan semakin terbatasnya ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan melalui pembiayaan, terutama karena tren penurunan SiLPA sebagai satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan dan meningkatnya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi kondisi ini dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan penguatan pendapatan asli daerah guna menjaga keseimbangan fiskal yang sehat serta mencari alternatif sumber pembiayaan lain guna menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

2.5.2.4 Proyeksi Perhitungan Kerangka Pendanaan 2026-2030

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menggambarkan kemampuan nyata pemerintah daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, baik yang bersumber dari pendapatan daerah maupun dari pembiayaan. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan

belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama tahun 2026-2030.

Berdasarkan data, total penerimaan Kota Balikpapan menunjukkan tren meningkat dari Rp4,56 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp5,78 triliun pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 4,3 persen. Tren ini mencerminkan bahwa secara umum kesehatan fiskal daerah terjaga, meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2026 dengan turunnya total penerimaan menjadi Rp4,25 triliun. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika fiskal yang perlu dikelola dengan hati-hati, karena pada satu sisi terdapat peningkatan kapasitas fiskal, namun di sisi lain terdapat ketergantungan terhadap faktor eksternal seperti transfer pusat dan pembiayaan dari sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Balikpapan tahun 2026-2030 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 62 Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	APBD MURNI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
1	Pendapatan	4.020.535.025.062,62	4.219.075.923.513	3.801.990.481.857,71	4.427.274.709.000,00	5.076.629.558.000,00	5.251.854.744.000,00	5.440.147.981.000,00
2	Penerimaan Pembiayaan	536.370.834.984,38	378.978.336.116	450.000.000.000,00	400.000.000.000,00	380.000.000.000,00	360.000.000.000,00	340.000.000.000,00
	Total Penerimaan	4.556.905.860.047,00	4.598.054.259.629	4.251.990.481.857,71	4.827.274.709.000,00	5.456.629.558.000,00	5.611.854.744.000,00	5.780.147.981.000,00
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	4.556.905.860.047,00		4.251.990.481.857,71	4.827.274.709.000,00	5.456.629.558.000,00	5.611.854.744.000,00	5.780.147.981.000,00

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Pendapatan daerah merupakan tulang punggung kemampuan keuangan Balikpapan. Nilainya naik dari Rp4,02 triliun (2024) menjadi Rp5,44 triliun (2030), atau meningkat sekitar 35 persen dalam enam tahun. Peningkatan ini didorong oleh dua komponen utama: pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tumbuh pesat akibat peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi jasa publik, dan kedua, Pendapatan Transfer, terutama dari pemerintah pusat, yang tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap total pendapatan dengan proporsi lebih dari 60 persen. Kenaikan yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas sumber pendapatan, baik dari internal maupun eksternal, meskipun ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi.

Penerimaan pembiayaan didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Nilainya menurun dari Rp536,37 miliar (2024) menjadi Rp340,00 miliar (2030). Penurunan ini mengindikasikan peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran, yang ditunjukkan dengan jumlah dana yang tersisa dari tahun sebelumnya semakin kecil. Meskipun demikian, hal ini juga menunjukkan menyempitnya ruang fiskal cadangan, sehingga pemerintah daerah perlu memperkuat kinerja pendapatan agar pembiayaan dari SiLPA tidak lagi menjadi ketergantungan utama.

Total penerimaan daerah, yang merupakan penjumlahan dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan, meningkat stabil dari Rp4,56 triliun (2024) menjadi Rp5,78 triliun (2030). Peningkatan ini memperlihatkan kemampuan fiskal yang solid dan berkelanjutan, serta menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk membiayai belanja operasional dan pembangunan; dan menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Kenaikan penerimaan terbesar terjadi pada periode 2027–2029, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan belanja modal dan optimalisasi PAD.

Secara keseluruhan, kapasitas riil keuangan Balikpapan dapat dikategorikan kuat, namun tetap perlu strategi fiskal adaptif untuk menjaga keberlanjutan dan fleksibilitas pembiayaan pembangunan. Mengingat keterbatasan anggaran, pengalokasiannya harus dilakukan berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan prioritas daerah. Oleh karena itu, pendanaan pembangunan harus diarahkan sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah pusat dan daerah, dengan fokus utama pada pendanaan prioritas pembangunan, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah. Kebijakan penganggaran belanja daerah juga mempertimbangkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program dan kegiatan. Untuk memastikan penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien, dan efektif, arah kebijakan belanja daerah untuk periode 2026-2030 akan diarahkan sebagai berikut:

a. Mendesain perencanaan anggaran belanja berdasarkan prinsip *value for money*, yaitu dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efisien, dan efektif;
b. Penganggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan hasil yang diharapkan dari kegiatan/sub-kegiatan, serta manfaat yang diperoleh dan efisiensi dalam pencapaian hasil tersebut;
c. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, dengan fokus pada pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
d. Belanja untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah memastikan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik;
e. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan, bukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau alokasi anggaran tahun sebelumnya;
f. Belanja Daerah mengikuti standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka pendanaan penting untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Selain dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang tersedia, dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat, terutama yang terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN 2025-2029), juga sangat diperlukan. Berdasarkan kebijakan alokasi belanja untuk periode 2026-2030, program-program prioritas Kota Balikpapan akan diarahkan pada:

a. Balikpapan Kota Inovatif dan Kreatif
b. Balikpapan Kota MICE dan Wisata
c. Balikpapan Kota Ramah Anak
d. Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sehat dan Nyaman
e. Mengatasi stunting
f. Pengendalian Banjir
g. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
h. Penyediaan Air Bersih yang Sehat dan Merata
i. Transformasi birokrasi

Secara keseluruhan, proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kota Balikpapan mencerminkan arah kebijakan fiskal yang cermat dan terukur, dengan upaya mempertahankan disiplin anggaran serta mengoptimalkan sumber pendapatan daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Peningkatan pendapatan asli daerah dan efisiensi dalam pengeluaran pembiayaan menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan fiskal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Balikpapan pada periode 2026–2030. Sumber pendanaan lainnya sangat diperlukan untuk mendukung pembiayaan selama 5 tahun kedepan, antara lain:

a. KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)

KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) sangat strategis untuk pembangunan infrastruktur skala besar yang membutuhkan modal dan keahlian tinggi, di mana APBD tidak memadai. Ini dapat diterapkan untuk proyek penyediaan air minum sehat dan merata (misalnya, pembangunan instalasi pengolahan air minum baru), proyek infrastruktur pengendalian banjir yang kompleks, atau pembangunan pusat-pusat MICE modern. Melalui KPBU, risiko proyek dibagi dan kualitas pelayanan diharapkan meningkat berkat efisiensi sektor swasta.

b. TJSL (Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)

TJSL (Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) Sebagai kota yang dikelilingi banyak perusahaan besar, terutama migas dan yang terkait dengan IKN, TJSL atau Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang lebih dikenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility) dapat dimobilisasi secara terintegrasi dengan program Pemkot. Dana ini idealnya difokuskan pada program-program sosial dan lingkungan yang spesifik, seperti upaya penanganan stunting, pembangunan ruang publik ramah anak, atau program pemberdayaan UMKM untuk mendukung Balikpapan sebagai kota kreatif dan inovatif.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah digunakan sebagai opsi percepatan untuk membiayai proyek investasi fisik yang mendesak dan memiliki dampak ekonomi cepat, terutama ketika APBD mengalami tekanan fiskal, seperti akibat pemotongan Dana

Bagi Hasil (DBH). Contohnya adalah percepatan pembangunan rumah sakit atau proyek penguatan infrastruktur jalan dan penataan kabel bawah tanah yang vital untuk mendukung peran Balikpapan sebagai mitra IKN.

d. Obligasi Daerah

Obligasi Daerah merupakan terobosan inovatif untuk mendapatkan dana segar dalam jumlah besar langsung dari pasar modal. Dana ini dapat dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki potensi pendapatan jelas, seperti pembangunan terminal modern, pasar, atau fasilitas publik berbayar. Mekanisme ini memungkinkan pembangunan infrastruktur ambisius yang tercantum dalam RPJMD dapat dimulai tanpa menunggu ketersediaan dana APBD penuh.

e. Asset Recycling

Asset Recycling melibatkan monetisasi aset daerah yang ada dan kurang produktif (misalnya, melalui konsesi atau sewa jangka panjang kepada swasta) untuk kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur baru. Dengan melepaskan aset yang tidak inti, Pemkot Balikpapan dapat memperoleh modal cepat untuk membiayai proyek prioritas RPJMD, seperti revitalisasi kawasan kumuh atau pembangunan infrastruktur dasar di kawasan pinggiran.

f. LVC (Land Value Capture)

LVC (Land Value Capture) LVC adalah mekanisme inovatif untuk menangkap peningkatan nilai properti yang terjadi sebagai akibat dari investasi publik (misalnya, pembangunan jembatan atau jalan baru). Dengan menjadi mitra IKN, kenaikan nilai tanah di Balikpapan dipastikan akan terjadi. Pemkot dapat menerapkan instrumen LVC, seperti retribusi tambahan atau kontribusi pembangunan, untuk membiayai kembali proyek yang menciptakan kenaikan nilai tersebut, menjadikannya mekanisme pembiayaan mandiri (self-financing) untuk pembangunan infrastruktur dan penataan kota.

g. Carbon Trading

Carbon Trading (Perdagangan Karbon) Balikpapan, yang dikenal dengan kawasan hijau dan upaya konservasi, dapat memanfaatkan aset lingkungannya. Dengan program penurunan emisi atau perlindungan hutan kota, Balikpapan dapat menghasilkan kredit karbon yang memiliki nilai jual di pasar karbon nasional maupun internasional. Pendapatan dari Perdagangan Karbon ini merupakan sumber daya inovatif yang harus dialokasikan secara eksklusif untuk program pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sejalan dengan tujuan Balikpapan mewujudkan kota global yang nyaman, hijau, dan ramah lingkungan.



Gambar 2. 78 Jenis Pembiayaan Alternatif Berkelanjutan untuk Pembangunan Perkotaan

Sumber: Bappenas, 2024

Sejak tahun 2023 Kota Balikpapan telah menginisiasi pemanfaatan pembiayaan melalui KPBU untuk pengelolaan penyediaan air baku dan pengelolaan persampahan, yang sampai dengan tahun 2025 masih dalam proses penyelesaian. Untuk memenuhi kekurangan kebutuhan pembiayaan, tahapan pertama masih memfokuskan pada optimalisasi penggunaan APBD khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan.

Selain komponen pendapatan daerah di atas, Pemerintah Kota Balikpapan optimis dapat mengakses pembiayaan alternatif lainnya guna membiayai pembangunan infrastruktur kota. Adapun rincian proyeksi pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 63 Proyeksi Pembiayaan Alternatif

No	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
1	APBD	796.770.527.981	888.571.301.000	1.192.521.195.000	1.256.910.981.000	1.326.014.497.000
2	Non APBD		1.285.300.652.750	1.324.989.708.750	1.075.883.203.850	1.056.981.251.175
Total		796.770.527.981	2.173.871.953.750	2.517.510.903.750	2.332.794.184.850	2.382.995.748.175

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini menyajikan analisis atas permasalahan pembangunan daerah yang dihasilkan dari penelahan atas data-data yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Permasalahan pembangunan daerah merupakan titik pangkal dari proses perencanaan yang akan dirumuskan. Bab ini secara umum akan menyajikan dua hal, yaitu permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kedua hal ini merupakan landasan bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk merumuskan intervensi-intervensi yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang.

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kota Balikpapan secara umum akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu permasalahan lintas sektor dan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan daerah. Kedua permasalahan ini pada umumnya merupakan upaya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan pembangunan yang perlu direspons oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang

2.6.1.1 Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

Permasalahan pembangunan daerah lintas sektor Kota Balikpapan diidentifikasi melalui analisis berbasis landasan transformasi, yang secara umum dikategorikan berdasarkan dimensi pembangunan berkelanjutan dan landasan transformasi dalam perencanaan jangka panjang. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan meninjau capaian kinerja serta melalui diskusi kelompok terfokus bersama organisasi perangkat daerah. Selanjutnya, permasalahan dipetakan menggunakan pendekatan pohon masalah yang mencakup masalah utama, masalah pendukung, dan akar permasalahan. Hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah jangka menengah di Kota Balikpapan dirinci sebagai berikut.

Tabel 2. 64 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

No.	Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Transformasi Ekonomi	Pembangunan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan berkelanjutan	Perekonomian daerah didominasi oleh industri besar	Ekosistem industri belum mendukung pengembangan IKM secara optimal
			Partisipasi angkatan kerja rendah	Angkatan kerja belum sepenuhnya berdaya saing
				Mismatch antara ketersediaan lapangan kerja dengan ketersediaan tenaga kerja
				Penyerapan Tenaga Kerja disabilitas belum optimal
			Kontribusi UMKM terhadap perekonomian belum optimal	Rendahnya minat berwirausaha
				Kapasitas produksi dan pemasaran pelaku UMKM belum optimal
			Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian belum optimal	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif belum optimal
				Kunjungan wisatawan belum optimal
				Keterbatasan fasilitas MICE yang berstandard nasional dan internasional
			Belum optimalnya investasi daerah	Penggalian potensi investasi daerah belum optimal
				Belum optimalnya promosi investasi
			Kecukupan, keamanan, dan pemanfaatan pangan	Belum optimalnya sistem ketahanan pangan daerah
				Rendahnya produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian lokal
2	Transformasi Sosial	Penguatan SDM yang berdaya saing	Belum optimalnya	pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta

No.	Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		masih belum optimal	kualitas layanan kesehatan	perbaikan gizi masih belum optimal
				Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi
				Pengendalian dan pencegahan penyakit menular, tidak menular, dan cakupan imunisasi dasar lengkap masih perlu dioptimalkan
				Kualitas sarana prasarana, alat kesehatan, dan obat di fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan
				Pemenuhan jumlah, jenis, dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan
				Penguatan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi dan respon penanganan, serta perluasan jaringan kesehatan (kader kesehatan, masyarakat, swasta) masih perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas	Kualitas sarana dan prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan
				Jumlah dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu ditingkatkan
				Tata kelola dan manajemen layanan pendidikan masih perlu ditingkatkan
				Percepatan partisipasi pendidikan dan pengembangan layanan pendidikan dasar

No.	Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				(PAUD-SD-SMP-Kesetaraan) masih perlu ditingkatkan
				Belum terintegrasinya pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran
				Belum optimalnya kolaborasi dengan stakeholders dalam peningkatan kualitas pendidikan
			Perwujudan kesetaraan gender dan keluarga berkualitas masih perlu dioptimalkan	Masih adanya ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan
				Belum optimalnya upaya pemenuhan hak anak
				Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan
				Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
			Upaya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan masih perlu dioptimalkan	Cakupan pemberian bantuan sosial kepada kelompok rentan dan disabilitas masih perlu ditingkatkan
				Penguatan Data sosial kemiskinan daerah yang komprehensif dan termutakhirkan masih perlu dioptimalkan
				Layanan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) masih perlu ditingkatkan
				Penguatan kerjasama dan peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) seperti pekerja sosial, tenaga kesejahteraan

No.	Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				sosial kecamatan (TKSK), LSM, dsb dalam perlindungan sosial masih perlu dioptimalkan
			Perwujudan ketrentraman dan ketertiban serta Kenyamanan masyarakat belum optimal	belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketrentraman dan ketertiban
				pemenuhan dan penyediaan keselamatan jalan yang belum optimal
				lemahnya koordinasi lintas sektor
3	Transformasi Tata Kelola	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Akuntabilitas kinerja belum optimal	Belum optimlannya perencanaan dan pengukuruan kinerja terutama di tingkat PD
				Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kinerja
				Kualitas indikator kinerja yang belum optimal
				Keterpaduan perencanaan serta mekanisme cascading kinerja belum berpedoman pada peta proses bisnis organisasi, proses bisnis masih sama dengan nomenklatur
			Kemandirian keuangan daerah belum optimal	Tantangan dalam menjalankan UU HKPD
				Banyak potensi pembiayaan belum dimanfaatkan secara optimal
			Kolaborasi lintas sektor belum optimal	Sinergi program pemerintah dengan swasta masih menghadapi tantangan
			Belum optimalnya layanan publik	Belum optimalnya layanan publik berbasis digital

No.	Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Belum optimalnya ketahanan sosial budaya	masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya	Pemenuhan ruang dan hak anak yang masih belum optimal
				Belum optimalnya pengarusutamaan gender
				Belum optimalnya pemanfaatan wadah dan ruang ekspresi sosial dan budaya
				menurunnya nilai-nilai kearifan lokal dan kohesi sosial
		Belum optimalnya kelestarian lingkungan serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup & kawasan perkotaan belum optimal	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup belum terkendali secara optimal
				Belum optimalnya ketaatan perizinan lingkungan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan
				Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau perkotaan
				Belum optimalnya tata kelola persampah secara terpadu dari hulu ke hilir dan peningkatan kapasitas sirkular ekonomi
				Kualitas penataan ruang (compact city) belum optimal / tren urban sprawl
				Belum optimalnya pemanfaatan data dan teknologi untuk pemantauan kualitas lingkungan
			Belum optimalnya ketahanan bencana dan perubahan iklim	Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi bencana
				Belum optimalnya pengendalian banjir
				Pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal

No.	Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				Konservasi lingkungan belum berjalan maksimal
				Belum optimalnya transisi energi baru dan terbarukan
			Belum optimalnya layanan infrastruktur berkelanjutan	Belum optimalnya layanan transportasi publik
				Belum optimalnya perumahan dan kawasan permukiman layak huni
				Belum optimalnya penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada permukiman formal
				Akses air minum aman belum optimal
				Rendahnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
				Belum optimalnya penyediaan infrastruktur yang inklusif
				Masih rendahnya implementasi infrastruktur berwawasan rendah energi dan emisi

2.6.1.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah mengalami berbagai tantangan dalam pelaksanaannya yang perlu dijawab melalui proses pembangunan daerah. Pemetaan permasalahan pembangunan berbasis urusan menjadi perlu untuk dilakukan dalam rangka pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Berikut merupakan pemetaan permasalahan urusan pemerintah daerah RPJMD Kota BalikpapanTahun 2025-2029.

Tabel 2. 65 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan	Belum optimalnya partisipasi pendidikan di semua jenjang (pendidikan dasar, menengahn dan tinggi)
			Belum meratanya distribusi tenaga pendidik yang berkualitas
			Masih perlu ditingkatkannya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
			Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal masih perlu ditingkatkan
			Kolaborasi lintas sektor dalam bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan
			Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pendidikan dasar masih belum optimal
			Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasaranan penunjang layanan pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah
2	Kesehatan	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya kualitas kesehatan ibu, bayi dan balita
			Belum optimalnya upaya penanganan dan pencegahan stunting
			Pengendalian, pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular perlu dioptimalkan
			Sarana prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan masih perlu ditingkatkan
			Pemenuhan jumlah, jenis, dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Peningkatan jaringan lintas sektor dibidang kesehatan perlu dioptimalkan (kader kesehatan, masyarakat, swasta, dll)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum meratanya jalan dalam kondisi mantap	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan belum optimal, masih terdapat sekitar 19,6 persen jalan Kota dengan kondisi rusak dan rusak berat
		Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	
		Sumber daya air baku belum memadai	Ketersediaan sumber air baku masih kurang jika dibanding dengan kebutuhan, belum dapat dilakukan penambahan saluran rumah tangga
			Jaringan pipa yang sudah tua mengakibatkan rawan kebocoran
		Kapasitas TPA sudah overload	• Pengelolaan sampah dari sumbernya belum efektif
			Banyak rumah kompos dan bank sampah yang kurang aktif akibat pandemi covid-19
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Akses permukiman layak belum optimal	Belum optimalnya rumah tangga terfasilitasi sanitasi layak
			Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kawasan kumuh
		Belum optimalnya akses dan kualitas perumahan	Belum tersedianya data perumahan dan data rumah di kawasan rawan bencana yang ter-update secara periodik
			Perencanaan dan pengembangan perumahan belum optimal
			Belum optimalnya penyediaan rumah yang memenuhi standar rumah layak huni
			Belum optimalnya pelayanan penghunian rusunawa
		Belum terpenuhinya PSU pada lingkungan perumahan	Belum intensifnya pelaksanaan monitoring pemanfaatan PSU
			Pendataan dan informasi belum optimal

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana	Kondisi lahan dan lingkungan biofisik yang cenderung meningkatkan ancaman risiko bencana alam
			Belum optimalnya manajemen kebencanaan dalam bidang sistem informasi dan publikasi kebencanaan
			Belum lengkapnya sarana dan prasarana mitigasi bencana yang berkualitas
			Kurangnya penguatan kapasitas masyarakat
		Masih adanya ancaman dan gangguan stabilitas sosial masyarakat	Masih adanya tindak kriminalitas
			Belum optimalnya deteksi dini gangguan stabilitas wilayah
			Belum optimalnya kerjasama, pembinaan, dan pengawasan organisasi masyarakat
6	Sosial	Belum optimalnya kesejahteraan kelompok rentan	Perlunya peningkatan bantuan sosial untuk kelompok rentan
			Pengelolaan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya kualitas pelayanan rumah singgah atau penampungan
Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
7	Tenaga Kerja	Belum optimalnya serapan tenaga kerja	Etos kerja masyarakat usia produktif yang belum optimal
			Daya saing tenaga kerja lokal lebih rendah dibanding tenaga kerja luar
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya kualitas hidup perempuan dan anak	Masih adanya ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan
			Belum optimalnya upaya pemenuhan hak anak
			Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
9	Pangan	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Keterbatasan lahan pertanian
			Biaya distribusi bahan pangan tinggi
			Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan sistem pertanian kota
10	Pertanahan	Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	Belum optimalnya izin pengelolaan tanah
			Antisipasi persoalan migrasi dan konflik lahan masih kurang
11	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Menurunnya kualitas udara karena pertumbuhan pembangunan sektor industri perdagangan dan jasa di Kota Balikpapan relatif cepat
			Ancaman alih fungsi lahan produktif
			Belum optimalnya pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
			Potensi pencemaran dan dampak lingkungan bangkitan IKN
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Sistem manajemen keamanan data kependudukan belum optimal
			Layanan kependudukan belum optimal
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya peran lembaga pemberdayaan di tingkat kelurahan dan kecamatan	Perlunya peningkatan kualitas program pemberdayaan
			Perlunya mempertahankan kinerja kolaborasi lintas sektor
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk
			Belum optimalnya pelaksanaan kampung KB. Kampung KB bertujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang kuat dan bhagia, melalui adanya Kelompok Kegiatan (Poktan) di dalamnya seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			(PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA
15	Perhubungan	Layanan transportasi publik belum optimal	Menurunnya ketersediaan angkutan umum. Jumlah angkutan umum mengalami penurunan dari 1.807 unit pada tahun 2016 menjadi 782 unit di tahun 2021
16	Komunikasi dan Informatika	Pelayanan jaringan telekomunikasi	Belum semua wilayah di Kota Balikpapan sudah terkoneksi jaringan telekomunikasi dengan layanan menara BTS
		Pelayanan *e-government* perangkat daerah	Belum seluruh perangkat daerah telah terkoneksi internet dan melaksanakan *e-government*
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Optimalisasi kualitas koperasi	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT hanya &% persen pada tahun 2023
		Menurunnya jumlah kemitraan UMKM dengan perusahaan	Penurunan jumlah penanaman modal asing sebesar Rp121,08 miliar
18	Penanaman Modal	Pertumbuhan realisasi investasi berfluktuasi	Potensi investasi daerah belum seluruhnya dikembangkan secara optimal
			Promosi investasi belum optimal
19	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya prestasi atlet
			Belum optimalnya pembinaan terhadap atlet
			Masih terbatasnya sarana dan prasraana penunjang olahraga prestasi
			Belum optimalnya pembinaan kelompok wirausaha muda
			Masih terbtasanya penyelenggaraan event keolahragaan dan kewirausahaan
20	Statistik	Strukturisasi data belum optimal	Standardisasi metadata belum implementatif

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
21	Persandian	Ancaman interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik	Belum optimalnya sistem keamanan siber dan perlindungan data.
22	Kebudayaan	Belum optimalnya pemajuan kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian kebudayaan
			Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap seni dan budaya lokal
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pemajuan kebudayaan
			Masih terbatasnya kelompok seni dan budaya yang aktif
23	Perpustakaan	Belum optimalnya tingkat literasi masyarakat	Budaya baca masyarakat masih perlu ditingkatkan
			Sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan masih terbatas
			Distribusi bahan bacaan masih perlu ditingkatkan
			Kompetensi pemustaka masih perlu ditingkatkan
24	Kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan kearsipan	Digitalisasi arsip perlu ditingkatkan
Urusan Pemerintahan Pilihan			
25	Kelautan dan Perikanan	Kontribusi sektor perikanan belum optimal	Produksi perikanan belum optimal
26	Pariwisata	Kontribusi sektor wisata belum optimal	Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan
27	Pertanian	Belum optimalnya produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian daerah cenderung fluktuatif
28	Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan belum optimal	Belum optimalnya pengawasan perdagangan daerah

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
29	Perindustrian	Kontribusi sektor industri belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi industri
			Menurunnya jumlah pelaku usaha yang melakukan sertifikasi kompetensi
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
30	Sekretariat Daerah	Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi berdampak	Akuntabilitas kinerja terus meningkat tapi belum optimal
31	Sekretariat DPRD	Dinamika politik yang sangat fluktuatif	Agenda DPRD yang belum terlalu sinergi dengan aksekutif
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
32	Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya konsistensi dan sinergitas perencanaan daerah	Adanya *mandatory* aspek-aspek perencanaan secara vertikal dari pusat dan provinsi
			Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan juga dengan dokumen perencanaan vertikal (RPJPN, RPJMN, RKP)
			Refocusing anggaran percepatan pencapaian dari level program hingga sub kegiatan dalam rangka mendukung pembangunan Kota Balikpapan.
33	Keuangan	Kemandirian keuangan daerah belum optimal	Potensi daerah belum dimanfaatkan secara optimal
			Tantangan UU HKPD
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya implementasi sistem merit pada aparatur birokrasi Kota Balikpapan.	Kualifikasi dan kompetensi ASN belum sesuai dengan standar yang berlaku
35	Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai produk kebijakan dan bahan pengambilan kebijakan

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Belum optimalnya kapasitas tim penelitian dan pengembangan daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
36	Inspektorat Daerah	Tantangan dalam melaksanakan pengawasan di tengah dinamika kebijakan lokal dan nasional	Tantangan memperkuat evaluasi kinerja dan keuangan
Unsur Kewilayahan			
37	Kecamatan	Belum optimalnya peran aktif masyarakat di level kecamatan dan kelurahan dalam partisipasi pembangunan	Peran aktif LPM, PKK, Karang Taruna dan LKM di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Balikpapan masih perlu dioptimalkan
Unsur Pemerintahan Umum			
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	Belum optimalnya pemetaan potensi konflik horizontal	Belum sinkronnya data potensi konflik
			Belum semua ormas terdata dan memiliki badan hukum

2.6.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis Kota Balikpapan dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki Kota Balikpapan serta berbagai isu pada level internasional, nasional, dan regional. Oleh karena itu, selain menelaah gambaran umum kondisi daerah dan identifikasi permasalahan pembangunan, perumusan isu strategis juga perlu didahului dengan menelaah berbagai dokumen yang memuat tentang berbagai isu strategis baik di level internasional, nasional dan regional serta isu-isu kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan

2.6.2.1 Isu Internasional

Rencana pembangunan jangka menengah perlu diarahkan dengan integrasi isu strategis internasional atau global agar membentuk linearitas interaksi antara perkembangan masyarakat, transformasi ekonomi, perubahan lingkungan, pergeseran demografi, dan kemajuan teknologi. Integrasi isu strategis internasional ini memberikan wawasan jangka panjang mengenai peluang dan tantangan baru yang akan membentuk kerangka kehidupan masyarakat di suatu daerah. Dengan mempertimbangkan isu stategis internasional ini, rencana

pembangunan akan mendorong inovasi dalam mengembangkan daya saing di tengah-tengah lingkungan global yang terus berubah untuk memenuhi perubahan tuntutan yang diprediksi hadir di masa depan. Secara mendetail, tabel dibawah ini akan menjelaskan mengenai sepuluh isu strategis internasional yang diadopsi dari RPJPN 2025-2045.

Tabel 2. 66 Telaah Isu Strategis Internasional RPJPN 2025-2045

Isu Strategis Internasional	Deskripsi
Demografi Global	• Peningkatan pesat populasi dunia yang mencapai 9,45 miliar jiwa. • Peningkatan pesat populasi lansia
Perkembangan Teknologi	• Ancaman hilangnya hampir 40 persen pekerjaan yang digantikan oleh teknologi • Urgensi peningkatan kualitas tenaga kerja yang berpendidikan dan terlatih
Konstelasi Perdagangan Global	• Perdagangan global bertumbuh secara stabil di angka 3,4 persen per tahun • Urgensi pemanfaatan peluang melalui pembangunan ekonomi, penyebaran inovasi, hingga kerja sama tingkat regional
Urbanisasi Dunia	• Proyeksi lonjakan populasi perkotaan hingga 65 persen dari populasi global • Perkotaan akan menjadi pusat perekonomian dan kehidupan • Kontribusi perkotaan hingga 70 persen dari PDB global
Luar Angkasa	• Peluang inovasi teknologi luar angkasa yang memberikan nilai tambah perekonomian • Limbah luar angkasa yang mengancam operasional satelit
Tata Kelola Keuangan Global	• Kemajuan teknologi keuangan dan perubahan kebijakan fiskal • Potensi kerentanan infrastruktur keuangan dan keamanan siber
Perubahan Iklim	• Peningkatan suhu global • Kejadian cuaca ekstrim • Bencana alam
Persaingan Sumber Daya Alam	• Meningkatnya komoditas penting akibat urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan populasi di Asia.

Isu Strategis Internasional	Deskripsi
	• Potensi penipisan sumber daya, degradasi lingkungan, dan konflik atas kelangkaan.
Pertumbuhan Kelas Menengah	• Pertumbuhan kelas menengah hingga 90 persen dari seluruh populasi global. • Fenomena generasi *sandwich*, peran ganda dalam memenuhi kebutuhan sebagai bentuk ketergantungan.
Geopolitik dan Geoekonomi	• Persaingan antar negara yang menegang • Munculnya poros kekuatan baru • Pengaruh signifikan pada investasi dan perdagangan.

2.6.2.2 Isu Nasional RPJMN 2025-2029

Dokumen RPJPN tahun 2025-2045 dan dokumen RPJMN tahun 2025-2029 telah merumuskan berbagai isu-isu strategis nasional. Isu-isu strategis tersebut dibentuk dari dinamika global dan respon atas persoalan pembangunan nasional yang mendesak. Isu-isu nasional ini penting untuk direspon oleh daerah dan mulai diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini mengingat isu nasional yang membawa dampak bagi daerah dan kinerja pembangunan nasional yang ikut ditentukan oleh kinerja pembangunan daerah.

Isu-isu jangka panjang nasional menentukan efetivitas pencapaian transformasi pembangunan sebagai agenda besar nasional 20 tahun mendatang. Jika isu-isu pembangunan mampu dikelola dan direspon dengan baik, diharapkan dapat menjadi lompatan bagi pembangunan nasional dan daerah. Isu-isu jangka panjang yang telah diidentifikasi di dalam dokumen RPJPN, yaitu

Tabel 2. 67 Isu dan Tantangn Pembangunan Nasional

Isu dan Tantangan	Penjelasan
Produktivitas rendah	Gambar 6.1. SDM jauh tertinggal terlebih pada perempuan. Gambar 6.2. Produktivitas sektor ekonomi yang rendah. Gambar 6.3. Kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal. Gambar 6.4. Sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah.

Isu dan Tantangan	Penjelasan
IPTEKIN dan riset lemah	• Anggaran IPTEKIN hanya mencapai 0,28 persen dari PDB. • Kualitas dan kuantitas SDM peneliti belum memadai. • Ekosistem riset dan inovasi masih lemah. • Belum berkembangnya kesadaran ilmiah.
Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	• Pelemahan sektor manufaktur • Rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi • Terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi. • Keterbatasan dukungan ekosisten industri di luar Jawa. • Terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. • Lambatnya regenerasi petani dan nelayan. • Kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan. • Terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan. • Belum adanya standar proses • Lemahnya kelembagaan petani dan nelayan yang berbadan hukum. • Semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.
Pariwisata di bawah potensinya	• Terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenitas, serta kapasitas pengelola. • Pengelolaan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. • Perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. • Kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai untuk ekonomi kreatif. • Transformasi digital belum merata • Inovasi dan pengembangan produk ekonomi kreatif masih rendah.

Isu dan Tantangan	Penjelasan
	• Ekosistem untuk mendukung komersialisasi belum terbentuk. • Akses ke pasar internasional untuk ekonomi kreatif masih terbatas.
Ekonomi laut belum optimal	• Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut • Belum berkembangnya pemanfaatan Sea Lines of Communication (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). • Belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan. • Belum berkembangnya diversifikasi industri dan *emerging sector* lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. • Terbatasnya riset dan pengembangan teknologi kelautan. • Rendahnyan penanganan sampah plastik • Masih tingginya kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF). • Belum optimalnya tata kelola dan regulasi ruang laut.
Kontribusi UMKM dan koperasi kecil	• Sebagian besar UMKM memiliki pekerja yang berkeahlian rendah dan banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah. • Rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha. • Rendahnya kapasitas pengelolaan. • Rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi. • Rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.
Produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal	• Rendahnya kualitas SDM dengan sebagian besar tenaga kerja didominasi lulusan SMP ke bawah. • Ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) • Informasi pasar tenaga kerja belum optimal

Isu dan Tantangan	Penjelasan
	• Pasar tenaga kerja belum mampu merespon perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk dan pola budaya kerja.
Infrastruktur dan literasi digital rendah	• Kesiapan infrastruktur TIK masih rendah • Pembangunan infrastruktur TIK menghadapi kendala kesulitas geografis di beberapa daerah. • Rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal tidak produktif, konten lokal yang belum memadai, dan daya beli rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet. • Kondisi ekosistem pendukung digitalisasi belum memadai • Produk digital Indonesia menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri.
Pembangunan belum berkelanjutan	• Penggunaan energi fosil yang masih tinggi • Akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah • Rendahnya penggunaan energi terbarukan • Rendahnya efisiensi energi • Pencemaran dan kerusakan lingkungan • Pemanfaatan SDA yang cenderung merusak ekosistem • Sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau masih lemah
Integrasi domestik terbatas	• Pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa • Biaya logistik tinggi karena infrastruktur konektivitas belum memadi dan terintegrasi. • Banyak regulasi yang menghambat • Kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa. • Terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya.

Isu dan Tantangan	Penjelasan
	• Ketimpangan pembangunan masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan. • Kapasitas pengelolaan perkotaan masih terbatas • Kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun
Tantangan tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045	• Persoalan kesehatan berupa meningkatnya beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk masalah kesehatan penduduk usia lanjut dan kesehatan jiwa karena transisi demografi yang diiringi meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi dan perilaku hidup tidak sehat. • Persoalan pendidikan berupa sarpras pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi ke seluruh daerah dan satuan pendidikan, pendidikan non-formal yang berkualitas belum memadai, produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global masih rendah, kualifikasi pendidikan penduduk masih rendah yang berdampak pada keterserapan tenaga kerja pada pasar kerja. • Tantangan jaminan sosial berupa belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan terutama untuk pekerja informal, tingkat kepatuhan pembayaran iuran rendah. • Tantangan bantuan sosial berupa pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong

Isu dan Tantangan	Penjelasan
	ketahanan terhadap bencana alam dan non-alam serta perubahan iklim, dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan.
Tata kelola pemerintahan belum optimal	• Regulasi yang berlebih dan kualitas regulasi yang rendah. • Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. • Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif. • Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D • ASN berada dalam posisi rentan terhadap intervensi politik • Belum meratanya kualitas pelayanan publik • Transformasi digital pemerintahan dihadapkan oleh tantangan mendasar
Kepastian dan penegakan hukum masih lemah	• Pemulihan aset tindak pidana masih lemah • Potensi pelanggaran HAM masih tinggi • Pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah • Budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah.
Demokrasi belum optimal	• Permasalahan terkait integritas partai politik • Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal. • Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. • Demokrasi terbatas pada hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan.
Tantangan stabilitas	• Perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.

Isu dan Tantangan	Penjelasan
	• Meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan • Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan.
Tantangan ketahanan sosial budaya	• Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan. • Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global. • Kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat. • Kebebasan beragama belum disertai kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat dan berorientasi kemaslahatan. • Penghormatan terhadap keragaman agama dan kebudayaan masih lemah. • Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia belum optimal.
Tantangan ketahanan ekologi	• Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaregaman hayati yang berkelanjutan. • Kurang efektifnya mitigasi bencana, sistem peringatan dini dan penanganan pasca bencana. • Pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal. • Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi dan air di berbagai wilayah.
Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	• Masih kurangnya ketersediaan SDM berkualitas dan penyebarannya belum merata. • Belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang

Isu dan Tantangan	Penjelasan
	tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia. • Masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran.

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, diolah

Isu-isu jangka panjang nasional tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional dan daerah masih menghadapi berbagai persoalan dan tantangan untuk mewujudkan transformasi dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Persoalan membentang dari aspek ekonomi, kualitas SDM hingga persoalan fondasi berupa tata kelola pemerintahan dan pembangunan hukum. Terdapat pula isu besar yang telah lama menjadi perhatian tetapi masih menjadi persoalan, yaitu pembangunan belum berkelanjutan dan kesenjangan Jawa dan Luar Jawa.

Sedikit berbeda dengan isu jangka panjang yang mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan mendesak dan mempengaruhi masa depan Indonesia, identifikasi isu jangka menengah memberikan rumusan tantangan sekaligus peluang. Isu jangka menengah yang dirumuskan di dalam dokumen Rantek RPJMN tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia: hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar;
- *aging population* negara maju: usia produktif negara maju menurun, dan potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia.
- tantangan transisi energi, tetapi ada peluang untuk pemerataan: perlu *national grid* yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau, perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan;
- penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global: produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global;
- sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral: sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional.

Peluang yang diidentifikasi dari isu strategis jangka menengah yaitu hilirisasi yang telah memberikan dampak positif bagi nilai tambah perekonomian, pemerataan transisi energi di luar Jawa, serta peluang untuk menyediakan pariwisata kesehatan bagi lansia dengan adanya *aging population* di negara maju. Meskipun demikian, juga terdapat tantangan yang perlu direspon secara tepat berupa tantangan transisi energi, penerapan standar *sustainability* yang tinggi di

level global sehingga produk Indonesia harus ramah lingkungan, dan aspek tata kelola pemerintahan yang masih menjadi tantangan berupa sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral.

2.6.2.3 Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan analisis terhadap potensi daerah, permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, serta KLHS, dihasilkan 9 (sembilan) isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Timur sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Isu strategis dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur terletak pada perlunya integrasi rencana pembangunan SDM sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi. Kualitas SDM menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Akses merata terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu kunci untuk mengatasi kesenjangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM juga berkaitan dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja. Masih minimnya keselarasan antara keahlian dan kompetensi SDM sesuai dengan pengembangan sektor ekonomi masa depan akan memperbesar potensi ketidaksiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan pasar kerja.

Perubahan struktur ekonomi dalam proses diversifikasi dan transformasi ekonomi juga berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat terdampak, misalnya hilangnya pekerjaan dan usaha yang berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan usaha memerlukan dukungan untuk mendapatkan pekerjaan atau usaha baru. Isu ini memerlukan mitigasi komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam penyusunan program pelatihan yang sesuai kebutuhan dunia usaha di berbagai tingkat serta penyediaan data dan analisis untuk merumuskan kebijakan peningkatan kualitas SDM yang tepat sasaran. Melalui pendekatan yang terintegrasi, Kalimantan Timur dapat menciptakan SDM unggul yang siap bersaing secara lokal maupun global, serta berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

b. Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan

Isu strategis pengentasan kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian utama. Ketergantungan ekonomi pada sektor industri ekstraktif cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan kesejahteraan sehingga belum semua masyarakat di Kalimantan Timur dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut. Selain itu, akses

masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang belum merata memperburuk kondisi sosial-ekonomi, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi, yang semakin memperlebar jurang kesejahteraan. Bertambahnya jumlah penduduk yang di iringi dengan semakin tingginya kebutuhan hidup masyarakat serta semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya alam, mengakibatkan tantangan terhadap perlindungan sosial masyarakat untuk pengurangan kemiskinan menjadi semakin besar.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan menyeluruh serta komitmen berbagai pihak dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di Kalimantan Timur. Perlindungan sosial adaptif perlu dirancang untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan seperti program keluarga harapan, bantuan pangan, bantuan sosial, program jaminan kesehatan, program jaminan ketenagakerjaan, dan lain-lain. Hal tersebut juga perlu didukung dengan peningkatan akses infrastruktur dasar, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin untuk memperoleh kesempatan kerja bagi, serta penguatan sektor ekonomi berbasis masyarakat. Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan, pembangunan di Kalimantan Timur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan antarwilayah secara merata.

c. Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif

Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah transformasi ekonomi berbasis industrialisasi yang inklusif. Ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur terhadap sumberdaya tidak terbarukan masih tinggi dimana kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kalimantan Timur pada periode Tahun 2013-2024 selalu mendominasi pada kisaran 40-57 persen. Keberlanjutan dan resiliensi ekonomi Kalimantan Timur ditentukan oleh percepatan diversifikasi dan transformasi ekonomi daerah terutama untuk mengatasi dampak kebijakan transisi energi yang telah disepakati secara internasional. Transformasi ekonomi yang lambat dapat menghambat kemampuan daerah untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global, serta dapat mempengaruhi tingkat inklusifitas dan keberlanjutan pembangunan. Selain itu, kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat dapat terjadi akibat lambatnya transformasi ekonomi.

Faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya transformasi ekonomi di Kalimantan Timur antara lain adalah karena belum optimalnya diversifikasi ekonomi baik secara horisontal maupun vertikal, masih rendahnya investasi pada sektor non migas dan batubara, serta belum berfungsi optimalnya kawasan-

kawasan industri. Pelaksanaan transformasi ekonomi diyakini akan membangun resiliensi ekonomi daerah untuk menghadapi tantangan eksternal, seperti krisis ekonomi global dan/atau bencana, serta meningkatkan inklusifitas pembangunan. Peran Kalimantan Timur ke depan sebagai *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN diyakini akan mengakselerasi upaya transformasi ekonomi daerah menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

d. Pemerataan Pembangunan Wilayah

Isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah pemerataan pembangunan wilayah. Kesenjangan antar wilayah di Kalimantan Timur masih cukup tinggi yakni mencakup disparitas ekonomi, infrastruktur, dan akses terhadap pelayanan publik di berbagai wilayah Kalimantan Timur, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan. Fenomena ini memperlihatkan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat pembangunan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk pemerataan antarwilayah menjadi esensial agar pembangunan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Kesenjangan yang tinggi akan menyebabkan sebagian wilayah menjadi semakin tertinggal dan kesulitan mengakses peluang pembangunan. Pemerataan pembangunan wilayah secara terfokus dan proporsional sangat dibutuhkan agar inklusifitas pembangunan dapat terwujud. Pemerataan distribusi investasi, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik perlu menjadi agenda utama pembangunan wilayah di Kalimantan Timur. Belum optimalnya kebijakan pembangunan wilayah yang didasarkan pada analisa karakteristik, potensi, serta keunggulan komparatif dan kompetitif suatu wilayah menjadi salah satu hal strategis yang perlu segera diantisipasi, terlebih dengan hadirnya IKN sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru NKRI.

e. Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi

Isu strategis yang juga masih memerlukan perhatian dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi. Infrastruktur yang belum merata dapat menciptakan kesenjangan antarwilayah, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Selain itu, tidak terintegrasinya sistem konektivitas dapat mengurangi efisiensi dalam pergerakan orang dan barang, membatasi pertumbuhan ekonomi, dan memperlambat pengembangan wilayah.

Wilayah-wilayah yang masih tertinggal di Kalimantan Timur pada umumnya masih menghadapi masalah dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar. Hal ini perlu segera diantisipasi agar masyarakat yang tinggal pada wilayah-wilayah tersebut mendapatkan hak kehidupan yang layak, untuk selanjutnya

masyarakat tersebut mampu menjadi penopang pembangunan daerahnya. Di sisi lain, persoalan konektivitas antar-wilayah juga muncul karena belum optimalnya sistem transportasi publik yang terintegrasi, baik transportasi darat, sungai, laut dan udara yang menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur teknologi informasi di era digitalisasi masa kini juga dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas digital di seluruh wilayah. Akses internet yang cepat dan terjangkau akan mengakselerasi pertukaran informasi, memfasilitasi bisnis, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap perkembangan informasi dan kemudahan layanan publik.

f. Peluang Pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN

Isu strategis paling aktual dalam pembangunan Kalimantan Timur kedepan adalah peluang dari pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rincian Rencana Induk Ibukota Nusantara. Keberhasilan daerah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh IKN menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan *Superhub* Ekonomi IKN memiliki konsep pengembangan kawasan-kawasan industri dengan pendekatan aglomerasi serta pengembangan konsep *tri-city* Balikpapan-Samarinda-IKN yang didukung rantai pasok dari daerah-daerah Mitra IKN. Kedepannya, *Superhub* Ekonomi IKN diproyeksikan dapat menjadi katalisator untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang strategis di Provinsi Kalimantan Timur.

Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan perolehan manfaat dari pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN, sekaligus meminimalisir risiko dan dampak negatif yang mungkin muncul. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah aspek peningkatan kapasitas SDM sesuai kualifikasi pasar industri. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan industri-industri yang dikembangkan sesuai klaster *Superhub* Ekonomi IKN, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, tantangan yang perlu diantisipasi sebagai dampak dari Pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN adalah pemerataan pembangunan antar-wilayah dan keberlanjutan lingkungan. Kedua hal ini harus dapat dikendalikan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara beriringan dan berkelanjutan.

g. Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK

Isu strategis yang wajib diperhatikan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Sebagai daerah yang ekonominya digerakan oleh sektor

ekonomi berbasis lahan, resiko penurunan kualitas lingkungan hidup akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari paru-paru dunia, upaya penurunan emisi gas rumah kaca menjadi prioritas dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan pencegahan kerusakan lingkungan. Upaya tersebut perlu difokuskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang berpotensi menjadi sumber utama emisi GRK Kalimantan Timur hingga tahun 2045 yaitu penggunaan energi fosil, alih fungsi lahan, dan kegiatan produksi yang berisiko meningkatkan emisi GRK. Transisi menuju energi bersih, perlindungan lahan berhutan dan lahan gambut, dan penerapan perkebunan dan produksi pangan berkelanjutan merupakan langkah kunci mencapai *net zero emissions* yang ditargetkan terwujud pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Dinamika pembangunan daerah akan sangat mempengaruhi pola tekanan terhadap lingkungan hidup. Kehadiran IKN diyakini akan menarik jumlah penduduk yang cukup besar ke Kalimantan Timur yang juga akan meningkatkan resiko penurunan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, konsepsi transformasi ekonomi yang berfokus pada pengembangan kawasan- kawasan industri juga perlu diiringi dengan kesiapan pengelolaan limbah industri untuk mencegah masifnya polusi udara, kerusakan ekosistem, serta penurunan kualitas air. Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup. Isu mengenai kualitas lingkungan hidup dan emisi GRK tidak hanya berfokus pada pelestarian alam saja, namun juga mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan pembangunan wilayah.

h. Kemandirian Pangan

Isu strategis yang krusial perlu diperhatikan dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah terkait dengan kemandirian pangan. Sebagai daerah yang terdampak langsung dari pembangunan IKN, kebutuhan pangan di Kalimantan Timur akan meningkat secara signifikan. Padahal saat ini Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan pertanian produktif yang menyebabkan keterbatasan produksi pangan secara mandiri. Hal ini menyebabkan Kalimantan Timur memiliki ketergantungan impor bahan pangan dari daerah lain. Selain itu, permasalahan terkait kemandirian pangan yang dihadapi adalah akses distribusi pangan yang belum memadai karena kondisi geografis yang luas dan infrastruktur pendukung pertanian yang belum merata, masih kurangnya jumlah petani muda terampil yang mampu menerapkan konsep pertanian modern, perubahan iklim yang mempengaruhi pola curah hujan dan kondisi tanah yang berdampak pada produktivitas pertanian, serta distribusi,

integrasi dan pengelolaan sumberdaya air untuk irigasi yang masih perlu diperbaiki. Keseluruhan isu tersebut memerlukan pendekatan strategis yang terintegrasi dan komprehensif, agar Kalimantan Timur dapat memperkuat sektor pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan untuk menciptakan kemandirian pangan yang berkelanjutan

i. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan tata pemerintahan yang profesional melibatkan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM di sektor pemerintahan. Hingga saat ini, masih terdapat disparitas dalam kemampuan teknis, manajerial, dan penggunaan teknologi di berbagai instansi pemerintahan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan strategis. Pemerintahan harus membangun SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pekerja keras, dinamis, *agile*, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar mampu bersaing dan menjawab tantangan pembangunan di masa depan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga masih menjadi tantangan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Tingginya harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi memerlukan penguatan sistem pengawasan internal, penerapan *e-governance* secara menyeluruh, serta integrasi sistem informasi di seluruh perangkat daerah. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik juga penting untuk menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi publik. Melalui konsep pembangunan yang terukur, monitoring yang intensif, dan evaluasi berkelanjutan, Kalimantan Timur dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mewujudkan pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berdaya saing global.

2.6.2.4 Isu Strategis Jangka Panjang Kota Balikpapan

Penelaahan terhadap isu strategis jangka panjang yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 menjadi salah satu bagian penting dalam perumusan isu strategis jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Upaya ini dilakukan guna menjaga keselarasan antara kebijakan jangka panjang dengan kebijakan jangka menengah di Kota Balikpapan. Isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan disusun berdasarkan hasil telaahan terhadap isu global, isu nasional, isu kewilayahan, isu regional,

hasil evaluasi RPJPD, FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan observasi lapangan, serta penelaahan KLHS RPJPD. Berikut merupakan isu strategis jangka panjang Kota Balikpapan periode 2025-2045.

a. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

Persoalan tenaga kerja masih menjadi tugas yang cukup berat bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Angka pengangguran Kota Balikpapan tergolong tinggi, baik dibandingkan dengan nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6,09 persen pada tahun 2023. Selain persoalan pengangguran, ketimpangan pendapatan yang digambarkan oleh rasio gini di Kota Balikpapan juga menunjukkan tren yang semakin naik mencapai 0,323 pada tahun 2023. Tingginya pengangguran dan naiknya ketimpangan mengindikasikan pembangunan ekonomi yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya mampu mengikutsertakan seluruh kelompok masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh struktur perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi mencapai 49,21 persen per tahun pada periode 2010-2023. Industri pengolahan di Kota Balikpapan digerakkan oleh sejumlah industri besar dengan karakteristik industri padat modal dengan penerapan teknologi tinggi sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan cenderung lebih sedikit dengan kompetensi yang tinggi dibandingkan dengan industri padat karya. Hal tersebut mengindikasikan pembangunan ekonomi yang dilakukan di Kota Balikpapan masih berfokus pada pertumbuhan yang tinggi tetapi belum dapat menjamin ketersediaan akses lapangan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat dan manfaatnya baru dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat saja.

Keberadaan Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah penyangga IKN juga menjadi salah satu urgensi pentingnya menerapkan pembangunan berkelanjutan. Kehadiran IKN dapat memengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Balikpapan karena adanya potensi penambahan jumlah penduduk dan wisatawan yang dapat memengaruhi permintaan komoditas barang dan jasa yang harus disediakan oleh Kota Balikpapan. Naiknya permintaan barang dan jasa dapat mendorong kenaikan produksi. Apabila aktivitasnya tidak dikendalikan secara tepat, dapat memberikan eksternalitas negatif, baik terhadap kehidupan sosial maupun kualitas lingkungan.

Pembangunan ekonomi Kota Balikpapan ke depannya perlu diarahkan pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi inklusif menekankan pada upaya mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan melalui perluasan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat sedangkan pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan pada upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem. Secara lebih

spesifik, konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan saat ini dikembangkan melalui penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular. Ekonomi hijau menekankan pada pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, sedangkan ekonomi biru menekankan pada optimalisasi potensi ekonomi di kawasan pesisir atau potensi sumber daya laut, dan ekonomi sirkular menekankan pada penerapan siklus hidup produk, bahan baku, dan sumber daya yang dapat digunakan selama mungkin. Ketiga pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

b. Penguatan SDM Berdaya Saing dan Perlindungan Sosial

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan manusia di suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Balikpapan sudah relatif berada pada posisi yang baik. Namun demikian, meskipun capaian IPM Kota Balikpapan cukup tinggi, masih terdapat kendala pada pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Balikpapan sebesar 10,92 atau setara kelas 1 SMA. Capaian tersebut belum memenuhi wajib belajar yang ditetapkan pemerintah pusat yakni 12 tahun atau setara kelas 3 SMA. Selain itu, dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan menengah pertama dan atas menunjukkan tren fluktuatif dan belum mencapai 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa belum semua penduduk di Kota Balikpapan mengenyam pendidikan menengah dan atas.

Pada aspek kesehatan, capaian Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukan tren yang meningkat, dan secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, AHH Kota Balikpapan 75,64 dan Provinsi Kalimantan Timur 74,72. Meskipun adanya peningkatan pada capaian AHH, upaya peningkatan pelayanan kesehatan masih perlu dioptimalkan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa capaian berikut: angka kematian ibu yakni 39,59 per 100.000 kelahiran hidup (2022), prevalensi stunting 19,6 persen (2022), cakupan pengobatan TBC 69 persen (2022), prevalensi kusta 0,2 per 1.000 penduduk (2022), jumlah kasus HIV 338 (2022), (sumber: profil kesehatan Kota Balikpapan tahun 2022). Sedangkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Kota Balikpapan tahun 2022 sudah 100 persen. Capaian tersebut perlu dipertahankan untuk memastikan seluruh masyarakat Kota Balikpapan tercover dalam pelayanan kesehatan yang memadai.

Secara umum, upaya perlindungan sosial di Kota Balikpapan diwujudkan melalui program penurunan kemiskinan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Upaya perlindungan sosial selama ini masih terkendala pada beberapa hal antara lain terbatasnya tenaga kesejahteraan sosial (TKSK, Pekerja Sosial, dan

lain-lain), belum tersedianya tempat rehabilitasi sosial yang representatif untuk proses pemulihan individu/keluarga/kelompok yang mengalami disfungsi sosial, dan belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam upaya pengelolaan perlindungan sosial (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Selain itu, cakupan program perlindungan sosial lebih banyak bantuan sosial yang bersifat karikatif daripada bersifat pemberdayaan dan jaminan sosial (asuransi sosial).

c. Reformasi Birokrasi Berdampak dan Tata Kelola Kolaboratif

Perwujudan good governance sebagai tujuan utama dari reformasi birokrasi memerlukan penguatan dalam sistem dan tatanan birokrasi yang lebih berdampak. Penguatan ini lebih menekankan kepada akuntabilitas sosial dan tidak hanya akuntabilitas kinerja. Capaian bidang tata kelola pemerintahan Kota Balikpapan hingga tahun 2022 relatif meningkat. Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 68,91; Indeks Profesionalisme ASN mencapai 93,07; Nilai AKIP mencapai 69,5 atau predikat B; dan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 85,24. Secara keseluruhan, capaian indikator-indikator ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang telah terpenuhi.

Terlepas dari capaian sektoral yang baik, kinerja bidang tata kelola Kota Balikpapan belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada capaian Indeks Gini Kota Balikpapan yang masih terus meningkat. Upaya reformasi birokrasi Kota Balikpapan belum cukup optimal untuk menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan yang semakin melebar. Meskipun tingkat kepuasan masyarakat Kota Balikpapan cukup tinggi, isu pengangguran di tengah dinamika ekonomi dan kemiskinan juga menjadi masalah periodik yang selalu dihadapi oleh pemerintah. Penyandingan kondisi-kondisi ini mengindikasikan bahwa pelayanan pemerintah Kota Balikpapan perlu diarahkan, tidak lagi pada pemenuhan target internal saja, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan yang bertumpu pada luaran/outcome.

Tata kelola kolaboratif juga turut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam jangka panjang. Upaya kolaborasi pemerintah perlu dipertegas mengingat banyaknya pemangku kepentingan/stakeholders yang terlibat dalam mengejar misi pembangunan Kota Balikpapan. Salah satu misi yang mendapatkan atensi cukup tinggi adalah pengusungan Kota Balikpapan sebagai superhub atau mitra IKN. Kerjasama dan sinergi antar pihak terkait sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok sebagai kawasan transit dan penunjang ibukota, yang juga diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian sekitar. Selain itu, inisiasi untuk mempromosikan Kota Balikpapan sebagai Kota MICE (Meeting, Incentives, Convention, and Exhibition) juga memerlukan peningkatan kapasitas di seluruh lapisan, baik masyarakat, pengusaha, maupun pekerja. Dengan

demikian, pendekatan tata kelola yang kolaboratif menjadi agenda penting dalam setiap tahapan pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan

d. Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan HIdup, dan Ketahanan Bencana

Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah krusial yang menopang pembangunan daerah berkelanjutan. Berbagai aspek pendukung kualitas lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan cukup baik. Meskipun demikian, kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup masih terkendala dalam beberapa sektor. Berbagai keterbatasan dalam proses pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, konservasi sumberdaya air, sarana prasarana, dan kapasitas masyarakat masih menjadi persoalan sehingga berdampak juga terhadap ketahanan daerah menghadapi bencana.

Fokus penyelenggaran lingkungan hidup dan ketahanan bencana merupakan salah satu bagian penting dalam mandat masyarakat global. Mandat tersebut dieksplisitkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11, ke-13 dan ke-15 fokus pada upaya menghadirkan kota dan permukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, melindungi dan memulihkan ekosistem secara berkelanjutan. Selain itu, kepentingan untuk melindungi kualitas lingkungan hidup juga menjadi prioritas dalam rencana jangka panjang provinsi dan nasional.

Kebijakan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana membutuhkan upaya secara komprehensif dan bukan hanya secara parsial. Untuk itu diperlukan integrasi perencanaan pola dan struktur ruang perkotaan dan pengelolaan sumberdaya alam dari hulu ke hilir melalui pendekatan kolaboratif. Pembangunan ekonomi yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

e. Infrastruktur Berkualitas Terpadu dan Penataan Utilitas Kota

Kualitas infrastruktur yang terpadu dan penataan utilitas kota adalah faktor penting dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan diharapkan dapat memberikan dampak pada kualitas hidup penduduk menjadi lebih baik. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang baik dan wilayah dengan utilitas yang tertata, tentu membutuhkan perencanaan jangka panjang yang cermat dan diimplementasikan secara bertahap. Kualitas infrastruktur yang baik dan utilitas kota yang tertata, diharapkan menjadikan Kota Balikpapan dapat menjadi tempat yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan untuk tinggal dan berkembang bagi masyarakatnya.

f. Peningkatan Kota Cerdas dan Nyaman Huni

Mewujudkan kota cerdas yang nyaman huni harus didukung dengan konsep kota berkelanjutan atau *sustainable city*. Hal tersebut penting untuk mempertahankan kualitas hidup warga Kota Balikpapan saat ini dan masa depan. Kota yang menerapkan *sustainable city* dalam penyelenggaraan tata kelola kotanya akan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan harapan generasi penerus dapat merasakan kota yang nyaman huni. Dalam perencanaan tata kelola kota, konsep yang digunakan juga akan mengacu pada kelestarian alam, termasuk pemanfaatan energi terbarukan sebagai alternatif baik dalam menjaga lingkungan. Karakteristik Kota Balikpapan sebagai kota yang nyaman huni perlu diperkuat dengan menjaga kualitas hidup dan kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Artinya, teknologi bukan sekadar aplikasi digital, tetapi sebagai enabler agar tetap aman dan efektif digunakan secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan Kota Balikpapan dengan konsep kota cerdas yang nyaman huni perlu melibatkan masyarakat dengan mempertimbangkan pembangunan berbasis kawasan yang kontekstual sesuai dengan karakteristik Kota Balikpapan. Kota Balikpapan sebagai mitra Ibu Kota Negara akan memiliki peran strategis yang berkembang dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan komitmen kuat dari pemerintah, stakeholder terkait dan masyarakat Kota Balikpapan untuk bersama-sama mewujudkan konsep kota cerdas dan nyaman huni.

g. Maju sebagai Mitra IKN

Kota Balikpapan sebagai mitra IKN yang menjadi bagian dari superhub ekonomi memiliki peran strategis dalam peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antarsuperhub ekonomi Ibu Kota Nusantara dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam struktur Tiga Kota bersama IKN dan Samarinda, Balikpapan akan menjadi “otot” atau pusat aktivitas pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan distribusinya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran Superhub Ibu Kota Nusantara dalam arus perdagangan antar dan intraregional.

Kesiapan Kota Balikpapan yang menjadi beranda IKN sekaligus kawasan penyangga IKN menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur berupa penyediaan fasilitas dalam hal permukiman, transportasi, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan jasa yang mendukung jalannya fungsi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemerintah Pusat supaya persiapan dapat berjalan optimal melalui dukungan

pendanaan dan penyediaan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, pengendalian banjir, penataan pergerakan transportasi, penyelenggaraan pendidikan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.

2.6.2.5 Telaah RTRW Kota Balikpapan

Posisi strategis Kota Balikpapan sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara mendorong adanya kebijakan pengembangan kawasan yang lebih khusus melalui revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032. Dalam revisi RTRW Kota Balikpapan telah memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis yang menghasilkan sembilan isu strategis prioritas yaitu pertumbuhan dan migrasi penduduk, rawan banjir, keterbatasan sumber dan penurunan kualitas air bersih, degradasi dan pencemaran wilayah pesisir, pengelolaan sampah yang belum optimal, alih fungsi dan konflik lahan, potensi terjadinya bencana alam berupa ancaman longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta keterancaman biodiversity.

Dalam revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043, tujuan penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan daerah sebagai kota industri dan jasa yang nyaman, dinamis, selaras, berkelanjutan, dan berketahanan bencana guna mendukung fungsinya sebagai pusat pertumbuhan nasional dan bagian dari *superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

a. penguatan struktur ruang dalam rangka menunjang fungsi Kota Balikpapan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
b. penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan;
c. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarkawasan, dan
d. peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang merata dan ramah lingkungan, terpadu, dan modern.

Adapun kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

a. perwujudan kelestarian kawasan lindung;
b. peningkatan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota, dan
c. pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK) meliputi:

a. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan

c. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Revisi RTRW juga merespon peluang investasi yang mendukung potensi pengembangan perekonomian di Kota Balikpapan sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan telah direvisi untuk merespon Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut memberikan konsekuensi pada perubahan pola ruang, Dalam pola ruang kawasan lindung terdapat usulan perubahan, antara lain:

1) Perubahan Badan Air menjadi Kawasan Perdagangan dan Jasa di wilayah pesisir Kecamatan Balikpapan Selatan dan wilayah pesisir Kecamatan Balikpapan Kota, serta usulan perubahan Badan Air menjadi Kawasan Transportasi di wilayah pesisir Kecamatan Balikpapan Selatan.
2) Kawasan Ekosistem Mangrove terdapat rencana pembangunan Bendungan Sungai Wain yang ditetapkan sebagai zona tunda *(holding zone)* yaitu kawasan Ekosistem Mangrove menjadi Badan Air di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara.
3) Kawasan Holtikultura terdapat rencana pembangunan Bendungan Sungai Wain yang ditetapkan ditetapkan sebagai zona tunda *(holding zone)* yaitu Kawasan Holtikultura menjadi Badan Air di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara.

2.6.2.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Balikpapan

Kota Balikpapan apabila dilihat dari kewenangan sesuai dengan target dan indikator TPB sesuai Perpres 59/2017 yaitu 222 indikator. Berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator terkait kondisi geografis, terdapat 195 indikator TPB yang relevan bagi Kota Balikpapan. Terdapat 56,92 persen dari 195 indikator TPB di Kota Balikpapan yang telah mencapai target nasional pada tahun 2022. Untuk TPB yang sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional di Kota Balikpapan sebesar 17,59 persen dan 1,03 persen untuk TPB yang belum dilaksanakan serta 24,10 persen untuk TPB yang tidak ada data.

Analisis terhadap 7 TPB Strategis dan mempertimbangkan gap capaian indikator, telaahan dokumen, isu muatan lingkungan hidup, serta hasil masukan dari Konsultasi Publik maka diperoleh daftar isu pendek PB di Kota Balikpapan yaitu :

1) Ketersediaan air baku;
2) Pengendalian emisi GRK;
3) Dampak bangkitan pembangunan IKN ;
4) Optimalisasi pengelolaan sanitasi, limbah dan sampah;
5) Degradasi kawasan pesisir dan laut;

6) Keterbatasan dan kerusakan lahan;
7) Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan.

2.6.2.7 Penetapan Isu Strategis Kota Balikpapan

Dari permasalahan pembangunan daerah baik yang bersifat multisektor maupun sektoral menjadi bahan lebih lanjut dalam perumusan isu strategis daerah melalui pertimbangan urgensi (*urgency*), kegentingan (*seriousness*), dan pertumbuhan (*growth*). Isu strategis dapat berupa masalah, potensi, maupun isu sesuai konteks. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, capaian kinerja pemerintah, laporan KLHS RPJMD 2025-2029, maupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Secara teknis, perumusan isu strategis daerah mempertimbangkan beberapa hal berikut di antanyara: potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat, permasalahan pembangunan daerah, isu KLHS RPJMD, serta isu lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan penjelasan masing-masing isu strategis jangka menengah daerah Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang.

Tabel 2. 68 Perumusan Isu Strategis Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional (Isu RPJMN)	Regional (Isu RPJMD Provinsi)	
Pembangunan kualitas dan daya saing SDM mengalami tren peningkatan	Belum optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas		Urbanisasi masyarakat dunia	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Penguatan SDM Berdaya Saing dan Perlindungan Sosial
	Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan					
Tren peningkatan usia produktif dan harapan hidup	Partisipasi angkatan kerja rendah		Globalisasi tenaga kerja			
Infrastruktur yang representatif dalam mendorong kegiatan MICE	Perekonomian daerah didominasi oleh industri besar		Perubahan geopolitik dan peta ekonomi dunia	Ketahanan Ekonomi	-Transformasi Ekonomi Berbasis Indutrialisasi yang Inklusif -Peluang pembangunan	Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan
	Kontribusi sektor pariwisata dan					

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional (Isu RPJMN)	Regional (Isu RPJMD Provinsi)	
	ekonomi kreatif terhadap perekonomian belum optimal				superhub Ekonomi dan Mitra IKN - Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi - Pemerataan Pembangunan Wilayah	
- Ketersediaan dan pengembangan kawasan industri di wilayah sekitar IKN, yaitu kawasan Kilang Balikpapan dan KPI Kariangau yang menjadi pendukung superhub ekonomi IKN dan pendorong pertumbuhan ekonomi - Pengembangan Kawasan Metropolitan	Kontribusi UMKM terhadap perekonomian belum optimal					
	Kecukupan, keamanan, dan pemanfaatan pangan	Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan	Ketahanan pangan		Kemandirian Pangan	
	Belum optimalnya investasi daerah		Perubahan geopolitik dan peta ekonomi dunia	- Pembangunan IKN, Superhub Ekonomi IKN, dan Mitra IKN	-Transformasi Ekonomi Berbasis Indutrialisasi yang Inklusif	Maju sebagai Mitra IKN

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional (Isu RPJMN)	Regional (Isu RPJMD Provinsi)	
Tiga Kota IKN - Balikpapan - Samarinda - Wilayah Kota Balikpapan yang termasuk dalam jalur pelayaran ALKI II - Ketersediaan simpul transportasi darat, laut dan Udara	Belum optimalnya layanan infrastruktur berkelanjutan	- Keterbatasan ketersediaan dan kualitas air bersih - Dampak Bangkitan Pembangunan IKN	Urbanisasi masyarakat dunia	- Penguatan Infrastruktur - Pengembangan Wilayah	-Peluang pembangunan superhub Ekonomi dan Mitra IKN - Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi - Pemerataan Pembangunan Wilayah	
Komitmen pemerintah daerah yang kuat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup & kawasan perkotaan belum optimal	- Optimalisasi Pengolahan Sanitasi, Limbah dan Sampah - Keterbatasan dan kerusakan lahan	*Biodiversity Loss*	Pembangunan lingkungan hidup	Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK	Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional (Isu RPJMN)	Regional (Isu RPJMD Provinsi)	
	Belum optimalnya ketahanan bencana dan perubahan iklim	- Buruknya kualitas udara dan pengendalian emisi GRK - Degradasi Kawasan Pesisir dan Laut	- Tantangan perubahan iklim - Komitmen transisi energi			Ketahanan Bencana
Kohesi sosial dan multikulturalisme yang kuat	Perwujudan kesetaraan gender dan keluarga berkualitas masih perlu dioptimalkan		Urbanisasi masyarakat dunia	Penanggulangan kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan	Peningkatan Kota Cerdas dan Nyaman Huni
	Upaya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan					

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional (Isu RPJMN)	Regional (Isu RPJMD Provinsi)	
	masih perlu dioptimalkan					
	Perwujudan ketrentraman dan ketertiban serta Kenyamanan masyarakat belum optimal			Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan		
	masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya					
Kuatnya komitmen pemerintah daerah	Akuntabilitas kinerja belum optimal			Tiga Agenda Transformasi	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional (Isu RPJMN)	Regional (Isu RPJMD Provinsi)	
dalam implementasi reformasi birokrasi	Kemandirian keuangan daerah belum optimal					
	Kolaborasi lintas sektor belum optimal					
	Belum optimalnya layanan publik		Perkembangan teknologi			

a. Penguatan SDM Berdaya Saing dan Perlindungan Sosial

Isu strategis terkait penguatan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing serta perlindungan sosial berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan SDM berkualitas dan sistem perlindungan sosial yang memadai. Salah satu indikator utama dalam menilai kualitas SDM suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan dalam IPM, dengan kenaikan sebesar 2,22 poin dalam periode 2018-2023. Pada tahun 2023, IPM Kota Balikpapan mencapai 82,03, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang berada di angka 78,2. Pencapaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota Balikpapan. Namun, meskipun hasilnya positif, upaya untuk memperkuat daya saing SDM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang belum sepenuhnya optimal.

Pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Balikpapan mencapai 10,92 tahun atau setara dengan tingkat kelas 1 SMA. Angka ini masih belum memenuhi standar wajib belajar 13 tahun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) di jenjang pendidikan menengah pertama dan atas masih berfluktuasi serta belum mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk Kota Balikpapan yang belum mendapatkan akses ke pendidikan menengah dan atas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam layanan pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas serta mendorong partisipasi pendidikan di semua jenjang.

Di bidang kesehatan, beberapa indikator masih perlu dioptimalkan. Pada tahun 2022, prevalensi stunting tercatat sebesar 19,6 persen, angka kematian ibu (AKI) mencapai 39,59 per 100.000 kelahiran hidup, cakupan pengobatan tuberkulosis (TBC) berada di angka 69 persen, prevalensi kusta sebesar 0,2 per 1.000 penduduk, serta terdapat 338 kasus HIV. Namun, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Balikpapan telah mencapai 100 persen pada tahun 2022. Keberhasilan ini perlu dijaga agar seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Ke depan, pengembangan sektor kesehatan harus mencakup penguatan sistem layanan kesehatan primer dan rujukan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, optimalisasi pembiayaan kesehatan, penguatan ketahanan kesehatan, pemanfaatan teknologi medis, serta perbaikan tata kelola sistem kesehatan.

Dalam aspek perlindungan sosial, Kota Balikpapan berupaya melindungi kelompok rentan dan menekan angka kemiskinan melalui berbagai program sosial. Namun, upaya ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan tenaga kesejahteraan sosial (TKSK, pekerja sosial, dan lainnya),

belum tersedianya fasilitas rehabilitasi sosial yang memadai bagi individu, keluarga, atau kelompok yang mengalami disfungsi sosial, serta cakupan bantuan sosial yang masih belum mencukupi. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan perlindungan sosial belum optimal. Saat ini, program perlindungan sosial lebih banyak berfokus pada bantuan sosial yang bersifat karitatif dibandingkan dengan pendekatan berbasis pemberdayaan dan jaminan sosial seperti asuransi sosial.

b. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

Perekonomian Kota Balikpapan ditopang oleh kinerja sektor industri pengolahan. Pada tahun 2020-2024, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 46,70 persen per tahun. Tingginya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kota Balikpapan didorong oleh keberadaan sejumlah industri besar dengan karakteristik industri padat modal yang di sisi lain menyebabkan serapan tenaga kerja rendah. Pada tahun 2024, persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor industri pengolahan tercatat sebesar 26,32 persen. Tingginya dominasi sektor industri pengolahan yang tidak dibarengi dengan serapan tenaga kerja mengindikasikan perekonomian Kota Balikpapan saat ini baru bisa menghasilkan nilai tambah yang tinggi tetapi belum sepenuhnya inklusif.

Persoalan kedua yang turut dihadapi dalam pembangunan Kota Balikpapan adalah rendahnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah. Padahal, Kota Balikpapan telah memiliki dukungan infrastruktur untuk mendorong peningkatan nilai tambah yang dapat dihasilkan melalui kegiatan MICE. Sebagai pintu gerbang wilayah Kalimantan bagian timur, Kota Balikpapan memiliki potensi untuk menarik wisatawan untuk singgah dan menikmati berbagai daya tarik wisata dan produk ekonomi kreatif yang disajikan sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah lainnya. Meskipun keberadaan UMKM belum mampu menggerakkan perekonomian kota sepenuhnya, produk-produk UMKM dan IKM di Kota Balikpapan memiliki daya tarik tersendiri. Kota Balikpapan juga memiliki berbagai sarana prasarana MICE yang mumpuni mulai dari ketersediaan sejumlah hotel berbintang, gedung pertemuan dengan kapasitas yang besar, dan tentunya ketersediaan Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan yang memudahkan jalur transportasi bagi para wisatawan dari luar Kota Balikpapan. Namun demikian, kontribusi sektor pariwisata yang dilihat dari kontribusi PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum hanya berkisar pada 1,75 persen per tahun pada periode 2020-2024.

Pembangunan Kota Balikpapan juga dihadapkan pada persoalan pangan mengingat karakteristik wilayah perkotaan. Keterbatasan lahan menjadi tantangan terbesar dalam menjamin upaya daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan, dimana hanya 15 persen lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pangan. Selain itu, mahalnya biaya logistik juga menjadi salah satu hambatan yang turut mempengaruhi distribusi bahan pangan. Kota Balikpapan masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah yang sering kali mempengaruhi stabilitas harga pangan.

Dengan mempertimbangkan persoalan-persoalan tersebut, pembangunan ekonomi Kota Balikpapan perlu diarahkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya ditargetkan pada peningkatan nilai tambah yang tinggi tetapi juga melibatkan seluruh kelompok masyarakat yang aktif secara ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi juga wajib memperhatikan aspek lingkungan atau berprinsip pada berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan hingga ke generasi berikutnya.

c. Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang Ketahanan Bencana

Perubahan iklim, degradasi lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta pencemaran dan limbah merupakan tiga isu utama yang dihadapi secara global. Salah satu faktor pemicunya adalah pertumbuhan populasi yang menyebabkan peningkatan aktivitas manusia dan berpotensi memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan. Fenomena seperti alih fungsi lahan, ketidaksesuaian tata ruang, serta peningkatan volume limbah muncul sebagai konsekuensi dari semakin beragamnya kegiatan manusia.

Lingkungan hidup menjadi salah satu aspek krusial dalam pemerintahan daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk di Kota Balikpapan. Sejumlah langkah untuk menjaga kualitas lingkungan telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam beberapa sektor. Tantangan dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan, konservasi sumber daya air, keterbatasan infrastruktur, serta kapasitas masyarakat menjadi persoalan yang turut mempengaruhi ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

Fokus pada pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana merupakan bagian penting dari agenda global. Hal ini tercermin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada tujuan ke-11, ke-13, dan ke-15 yang menitikberatkan pada pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, serta perlindungan dan pemulihan ekosistem. Selain menjadi perhatian di tingkat global, upaya pelestarian lingkungan juga menjadi

prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka panjang baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Sebagai salah satu pusat ekonomi di Kalimantan Timur sekaligus daerah yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Balikpapan mengalami peningkatan aktivitas pembangunan yang signifikan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, perlu adanya pengawasan terhadap aspek lingkungan agar ekosistem tetap terjaga. Salah satu langkah penting adalah memastikan pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Meskipun indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Balikpapan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, indeks kualitas tutupan lahannya justru mengalami penurunan. Oleh karena itu, pengelolaan tata ruang harus menjadi perhatian utama guna menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, meningkatnya keberagaman aktivitas di Kota Balikpapan turut berdampak pada peningkatan volume sampah setiap harinya. Terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah memperburuk kompleksitas permasalahan ini. Kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat, seperti jalan, selokan, sungai, atau lahan terbuka, serta praktik pembakaran sampah menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Balikpapan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap permasalahan persampahan sangat diperlukan. Peningkatan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi langkah penting guna memastikan sampah dapat ditangani dengan baik, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Ketahanan terhadap bencana juga menjadi isu yang membutuhkan pendekatan holistik, bukan sekadar tindakan parsial. Keamanan dan ketahanan Kota Balikpapan dalam menghadapi bencana merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan kota, bertujuan untuk melindungi masyarakat serta infrastruktur dari berbagai ancaman bencana. Perencanaan tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana harus diterapkan secara optimal, termasuk pembangunan infrastruktur tahan bencana dan sistem drainase yang efektif guna mengurangi risiko banjir. Namun, masih terdapat tantangan dalam ketersediaan dan kualitas sarana penyelamatan, baik untuk kebakaran maupun bencana non-kebakaran.

Untuk mengatasi isu tersebut, diperlukan integrasi antara perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan kolaboratif. Perencanaan kontingensi yang komprehensif harus mencakup berbagai skenario bencana, didukung oleh pemanfaatan teknologi dalam pemantauan, analisis data, serta sistem komunikasi. Upaya konservasi lingkungan, seperti pengelolaan ekosistem mangrove, dapat berperan dalam mengurangi risiko bencana alam. Selain itu, pelestarian ekosistem alami juga dapat berfungsi sebagai benteng alami

terhadap bencana seperti banjir dan erosi. Kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penanganan bencana serta memperkuat keselamatan masyarakat, guna mewujudkan Kota Balikpapan yang lebih kondusif dan tangguh terhadap berbagai tantangan lingkungan.

d. Infrastruktur Berkualitas Terpadu dan Penataan Utilitas Kota serta Maju sebagai Mitra IKN

Dalam upaya mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, integrasi infrastruktur dan penataan utilitas kota berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang berkualitas serta utilitas yang tertata dengan baik memerlukan perencanaan yang berkesinambungan dan implementasi bertahap dalam periode lima tahunan. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai dan utilitas yang tertata, Kota Balikpapan diharapkan dapat menjadi kota yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi warganya. Pencapaian ini dapat diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) Kota Balikpapan.

Berdasarkan survei IKLI Kota Balikpapan dari tahun 2019 hingga 2023, yang mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur jalan, jembatan, transportasi, jaringan air bersih, irigasi, dan perumahan, terjadi dinamika dalam tingkat kepuasan masyarakat. Pada tahun 2019, IKLI tercatat sebesar 77,75, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 menjadi 82,03. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 77,99. Secara keseluruhan, meskipun mengalami fluktuasi, tren IKLI Kota Balikpapan masih menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu tantangan dalam pengembangan infrastruktur terpadu di Kota Balikpapan adalah kualitas infrastruktur jalan. Pada tahun 2023, persentase kemantapan jalan tercatat sebesar 92,16%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 96,28%. Selain itu, pengelolaan sumber daya air juga masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pengendalian banjir, pengelolaan saluran irigasi, dan penyediaan sumber air baku yang belum optimal. Upaya pengendalian banjir dan pengelolaan drainase di Kota Balikpapan selama ini mengacu pada Masterplan Drainase, yang mencakup perencanaan dimensi saluran serta pembangunan bendungan pengendali (bendali) di beberapa titik strategis. Namun, cakupan penyediaan sumber air baku masih belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh wilayah Kota Balikpapan, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut dalam pengembangannya.

Pembangunan serta penyediaan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan inklusif menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi kota. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat daya saing daerah

dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Balikpapan juga perlu memperkuat sinergi pembangunan dengan IKN guna mendukung fungsi pemerintahan serta mencapai tujuan utama pembangunan ibu kota baru.

Dalam perannya sebagai beranda sekaligus kawasan penyangga IKN, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penataan kota. Di antaranya adalah peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan, seperti penyediaan hunian yang layak, perbaikan kondisi jalan, pengembangan transportasi publik yang inklusif dan ramah lingkungan, serta peningkatan layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, penguatan layanan teknologi informasi dan jasa yang mendukung operasional pemerintahan di IKN juga menjadi faktor penting dalam memastikan integrasi dan efisiensi pembangunan di wilayah ini.

Sebagai mitra strategis IKN dalam konsep superhub ekonomi, Kota Balikpapan memainkan peran penting dalam memperkuat keterkaitan ekonomi serta rantai pasok antarwilayah. Dalam struktur Tiga Kota bersama IKN dan Samarinda, Kota Balikpapan berperan sebagai pusat utama aktivitas ekonomi, dengan memanfaatkan keunggulannya dalam sektor logistik dan distribusi untuk mendukung perdagangan ekspor dan impor. Selain itu, kota ini juga berkontribusi dalam memperkuat peran Superhub IKN dalam arus perdagangan nasional dan regional. Untuk memastikan kesiapan dalam menjalankan peran strategis ini, diperlukan sinergi erat antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal penyediaan infrastruktur dan pendanaan yang mendukung kelancaran pemerintahan di IKN. Lebih lanjut, sebagai respon terhadap kebijakan IKN dan dengan memerhatikan situasi serta kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan, diperlukan dukungan terhadap kebijakan tata ruang (RDTR) dan transportasi (Masterplan Transportasi) dengan beberapa penguatan sebagai berikut:

- Perlu adanya antisipasi bahwa Pusat Pelayanan Kota baru di Karang Joang dan sekitarnya akan menjadi pusat pelayanan yang berskala regional (melayani daerah sekitar Balikpapan).
- Mengingat luasnya kawasan budidaya di Balikpapan Utara yang berada pada kelerengan tinggi dan risiko bencana tinggi, perlu ada upaya mengendalikan pertumbuhan di Balikpapan Utara dengan:
  - Mempertegas peraturan zonasi dan ketentuan konstruksi di Balikpapan Utara
  - Mempermudah pertumbuhan di Balikpapan Timur (kecamatan dengan akses ke jalan tol) dengan insentif pembangunan (peraturan zonasi, keringanan pajak, keringanan retribusi, dll).

- Pertumbuhan kegiatan permukiman dan jasa diarahkan ke utara dan timur Balikpapan agar tidak memberikan beban tambahan bagi bagian tengah dan selatan Balikpapan yang memiliki persoalan kemacetan, sulitnya air bersih, dan kerentanan terhadap bencana banjir.
- Perlu ada perencanaan dan penataan ruang bagi kawasan perkantoran dan jasa yang kemungkinan akan berkembang pesat apabila IKN telah beroperasi.
- Prioritas penyelenggaraan sistem angkutan umum massal perkotaan untuk memperbaiki kinerja jalan di Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Selatan dimana mayoritas penduduk Balikpapan tinggal dan tingkat pelayanan jalannya (LoS) masih rendah (*travel demand management*).
- Perluasan rute dan perencanaan sistem transportasi yang mempertimbangkan konektivitas pada skala lingkungan hingga perkotaan serta potensi paratransit.

Secara spesifik, konsep pergerakan penumpang dan barang dalam sistem perkotaan Balikpapan dalam konteks kawasan IKN adalah sebagai berikut:

- Bersamaan dengan menangkap peluang peran Balikpapan sebagai otot IKN dan juga kota jasa, Balikpapan perlu mengendalikan perkembangan kota (*controlled urban sprawl*) di Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur yang akan menjadi lintasan utama konektivitas dari IKN ke Balikpapan.
- Jalur kereta api regional Trans Kalimantan perlu diintegrasikan dengan jalur kereta api perkotaan dan/atau jalur angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) di dalam Kota Balikpapan, menghubungkan ke Bandara dan aktivitas rekreasi.
- Langkah mendasar adalah menentukan simpul-simpul utama yang akan menjadi stasiun dan merencanaan pengembangan kawasan berorientasi transit di simpul-simpul tersebut. Kemudian direncanakan rute-rute pengumpan dalam kota.
- Memulai perencanaan dan pengembangan kota berbasis transit dengan melakukan *land banking*.
- Mendorong angkutan barang multimoda (integrasi moda darat melalui jalan tol/arteri dan kereta barang).
- Untuk mengendalikan *urban sprawl*, perlu pemisahan antara koridor logistik dengan koridor penumpang yang melintasi Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Pemisahan dapat dilakukan secara spasial maupun temporal.

e. Peningkatan Kota Cerdas dan Nyaman Huni

Isu strategis dalam peningkatan kota cerdas dan nyaman huni kota Balikpapan mencerminkan berbagai tantangan dan peluang dalam pembangunan kota yang modern, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kota Balikpapan mengusung konsep sebagai kota layak huni (*liveable city*), yang pada dasarnya mencerminkan prinsip kota berkelanjutan (*sustainable city*) dengan tujuan utama menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penerapan konsep kota berkelanjutan menjadi dasar utama dalam menciptakan kota cerdas (*smart city*) yang nyaman untuk dihuni. Pengembangan infrastruktur berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, seperti transportasi, keamanan, dan administrasi pemerintahan. Penerapan sistem digital dalam pelayanan publik, termasuk *e-government*, *smart traffic management*, dan pemantauan lingkungan. Penyediaan akses internet yang luas dan berkualitas untuk mendukung ekonomi digital serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota.

Pengembangan Kota Balikpapan sebagai kota cerdas telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, terutama di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini tercermin dari peningkatan kinerja digitalisasi, dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus mengalami peningkatan dan mencapai kategori sangat baik dengan skor 3,75 pada tahun 2023. Namun, tingkat kenyamanan hunian di kota yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih menghadapi tantangan, dengan kinerja yang fluktuatif dan kecenderungan menurun pada tahun 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh tindak lanjut pengaduan masyarakat yang belum optimal. Selain itu, kompleksitas dan keberagaman sosial di Kota Balikpapan yang tinggi turut berkontribusi pada meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah kota.

Sebagai kota yang terus berkembang, Balikpapan perlu memaksimalkan penyediaan infrastruktur, mengelola pemanfaatan ruang secara terkendali, serta menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan yang memungkinkan generasi mendatang untuk tetap menikmati lingkungan sehat dan nyaman. Perencanaan kota juga harus memperhatikan kelestarian ekosistem, termasuk penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, pemanfaatan teknologi yang tepat guna berperan sebagai alat pendukung dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan kota.

Dalam perencanaan pembangunan Kota Balikpapan, pemerintah perlu beradaptasi dengan dinamika yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan warga secara lebih efektif. Pengembangan kota cerdas dan layak huni harus melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan dan masyarakat serta

mempertimbangkan pembangunan berbasis kawasan yang selaras dengan karakteristik kota.

f. Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif

Tata kelola yang kolaboratif dan inovatif menjadi salah satu isu strategis utama bagi Kota Balikpapan dalam lima tahun ke depan. Percepatan pembangunan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), komunitas internasional, media, serta perguruan tinggi. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, seperti arus migrasi, peran Balikpapan sebagai mitra IKN, perubahan iklim, serta isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).

Selain dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal, sinergi juga perlu diperkuat dalam birokrasi pemerintahan, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah. Tantangan utama saat ini adalah memperkuat pertanggungjawaban kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, kerja sama antarperangkat daerah, khususnya di bidang perencanaan, pengawasan, kepegawaian, dan koordinasi kebijakan, perlu ditingkatkan untuk memperkuat efektivitas organisasi serta menghubungkan capaian kinerja organisasi dengan kontribusi individu. Selain itu, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) menjadi hal krusial, terutama dalam kebijakan promosi dan mutasi ASN yang harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan mendukung sistem akuntabilitas daerah.

Selain aspek kolaborasi, inovasi dalam tata kelola juga menjadi elemen kunci, khususnya dalam pelayanan publik. Layanan publik di Kota Balikpapan telah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui inovasi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Penguatan ekosistem inovasi, mulai dari kebijakan, kelembagaan, kemitraan, budaya inovatif, hingga keterpaduan antar-inovasi, menjadi faktor penting dalam mewujudkan layanan publik yang lebih responsif dan efisien.

Untuk mendukung peningkatan kolaborasi dan inovasi dalam pelayanan publik, pengembangan smart governance juga perlu dioptimalkan. Hal ini mencakup perbaikan proses bisnis, peningkatan kapasitas serta integritas ASN, yang pada akhirnya dapat mendorong implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh di Kota Balikpapan. Reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada perbaikan tata kelola internal pemerintahan, tetapi juga harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pembangunan daerah serta menjawab isu-isu strategis yang berkembang.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi tentang penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, strategi dan arah kebijakan, serta progam prioritas daerah. Visi dan Misi pada dokumen RPJMD merupakan hasil visi misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi kemudian diturunkan dalam rumusan tujuan dan sasaran daerah, serta mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Untuk mendukung tercapaianya visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah secara lebih operasional.

3.1 RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Tahap I Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memiliki peran strategis sebagai Tahap I dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2045. Periode ini menjadi fondasi awal dalam mewujudkan visi jangka panjang pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk dua dekade ke depan.

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai periode awal perencanaan memiliki arah pembangunan “Penguatan Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif”. Arah pembangunan tersebut dilaksanakan melalui penguatan berbagai aspek pembangunan, seperti peningkatan akses pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, penguatan ekosistem sebagai superhub industri dan jasa serta pengembangan sektor ekonomi potensial, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis dan kolaboratif serta peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kualitas hukum dan demokrasi, peningkatan layanan perkotaan terpadu berbasis teknologi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung perekonomian serta memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan aspek tata ruang sebagai modal Pembangunan berkelanjutan.

RPJMD ini juga menjadi instrumen pengintegrasian dan sinkronisasi perencanaan sektoral lintas perangkat daerah serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan anggaran, guna memastikan keterpaduan dan keberlanjutan antar tahap pembangunan. Dengan pelaksanaan RPJMD 2025–2029 yang terencana dan partisipatif, Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan tercapainya pijakan awal yang kuat untuk melanjutkan pembangunan pada tahap-tahap berikutnya hingga terwujudnya Balikpapan sebagai kota berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan pada tahun 2045.

Tabel 3. 1 Indikator Sasaran Visi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Target Tahap 1 Tahun 2029	Target Akhir Tahun 2045
1	Peningkatan perekonomian dan pendapatan perkapita		
	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,60-7,20	7,00-8,00
	2. PDRB per kapita	378,228-513,384	988,90-1.664,68
	3. Kontribusi PDRB terhadap Provinsi	17,8	21,99
	4. Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	49,76	58,82
	5. Persentase Pekerja di Sektor Jasa	78,57	82
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	6. Tingkat Kemiskinan	1,73-1,80	0,04-0,18
	7. Rasio Gini	0,296-0,33	0,280-0,330
3	Peningkatan daya saing dan inovasi daerah		
	8. Indeks Daya Saing Daerah	3,90	4,30
	9. Indeks Inovasi Daerah	66	85
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia		
	10. Indeks Pembangunan Manusia	84,59	91,71
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission		
	11. Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	45,04	79,8
	12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,48	75,22

Sumber: RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan pada sasaran visi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-20245 perlu dikawal pencapapaiannya pada setiap tahapan pelaksanaan RPJMD. Pengarusutamaan target kinerja sasaran visi tahap I yang telah ditetapkan dalam RPJPD ke dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dapat disesuaikan dengan memperhatikan pendistribusian target indikator makro pembangunan serta dinamika di Kota Balikpapan.

3.2 RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai Integral Pencapaian Visi RPJMD Provinsi dan Nasional Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yakni “Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman” turut serta dalam mendukung visi Provinsi dan Nasional. Visi Provinsi Kalimantan Timur pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang berbunyi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” dan nasional “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang ditetapkan pada masing-masing level dalam rangka menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat,

dan terukur. Berikut merupakan penyandingan misi RPJMD Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025-2029.

3.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.3.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi merupakan rumusan umum tentang keadaan atau kondisi daerah yang akan terwujud pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebagai hasil pembangunan selama lima tahun. Perumusan visi RPJMD berdasarkan visi kepala daerah terpilih. Visi Kepala Daerah Kota Balikpapan merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai kondisi pendukung, baik pada level misi, tujuan, sasaran, hingga program prioritas daerah. Adapun visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu:

"Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman"

Visi tersebut mencerminkan Kota Balikpapan sebagai kota maju berperadapan tinggi yang nyaman dihuni dengan spriritualitas yang mewarnai seluruh aktifitas penduduk kota. Dalam kallimat visi tersebut terdapat tiga kata kunci yaitu kota global, nyaman untuk semua, dan madinatul iman. Berikut penjelasan masing-masing dari kata kunci visi:

1. Kota Global

   Kota global merujuk pada kondisi yang mencerminkan Kota Balikpapan yang maju, modern, tangguh, inovatif, dan setara dengan kemajuan kota besar yang ada didunia. Kota global juga mencerminkan kesinambungan pembangunan yang semakin progresif diberbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan, dan pelayanan publik. Kota Balikpapan sendiri memiliki posisi dan peran penting dalam pembangunan regional, nasional, maupun global. Balikpapan mendukung peran pembangunan wilayah Pulau Kalimantan sebagai *Superhub* Ekonomi Nusantara untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Sebagai Kawasan Perkotaan Besar, Kota Balikpapan juga memiliki peran besar terhadap pusat perdagangan barang dan jasa, serta industri yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Nyaman untuk Semua

   Nyaman untuk semua mencerminkan upaya menciptakan lingkungan, layanan, dan kebijakan yang dapat dinikmati dan diakses oleh semua kalangan tanpa memandang latar belakang, fisik, usia, dan status sosial. Nyaman untuk semua bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan secara inklusif yang berfokus pada kenyamanan dan aksesibilitas

bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk semua juga merujuk pada realitas sosiokultural bahwa masyarakat Balikpapan yang cukup heterogen dan multikultur, sehingga menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota milik bersama yang inklusif, damai dan kondusif.

3. Madinatul Iman

Madinatul Iman merujuk kepada aspek spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas penduduk Kota Balikpapan. Sebagai aspek spiritual, konsep madinatul iman memiliki lima prinsip Sebagai aspek spiritual, konsep madinatul iman memiliki lima prinsip yaitu: 1) Spiritualitas menjadi roh dari seluruh kegiatan masyarakat; 2) Manusia dengan spiritualitas menjadi pusat pembangunan; 3) Seluruh masyarakat ikut terlibat aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana kota; 4) Transparansi dalam seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah; 5) Kolaborasi/kerjasama lebih diprioritaskan daripada kompetisi disegala aspek kehidupan.

Tabel 3. 2 Keselarasan Visi RPJMD, RPJMN, dan RPJPD

Visi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029	Visi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Visi RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029	Visi RPJMN 2025-2029
"Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman"	*Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman*	*"Kalimantan Timur Sukses Menuju Generasi Emas"*	*"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"*

Sumber: Analisis, 2025

Visi RPJMD Kota Balikpapan merupakan bagian penting untuk mencapai Visi RPJPD Kota Balikpapan, Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJMN. Visi RPJMD Kota Balikpapan mendukung pencapaian visi jangka panjang Kota Balikpapan yang nyaman untuk semua 2045, superhub industri dan jasa yang maju dan berkelanjutan dengan semanat madinatul iman. Visi RPJMD Kota Balikpapan dalam konteks Provinsi Kalimantan Timur mendukung terwujudnya visi Kalimantan Timur sukses menuju generasi emas. Dalam konteks nasional, RPJMD Kota Balikpapan mendukung pencapaian visi Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

3.3.2 Misi Pembangunan Daerah

Kondisi dan cita-cita yang telah dirumuskan melalui visi daerah dicapai melalui berbagai langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan ini dituangkan dalam bentuk misi daerah yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang. Misi RPJMD Kota Balikpapan sudah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN. Berikut

merupakan tabel penyandingan misi di dalam RPJMD Kota Balikpapan, Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJMN pada tahun 2025-2029.

Tabel 3. 3 Penyandingan Misi RPJMD Kota Balikpapan, Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029	Misi (Astacita) Presiden 2025-2029
Misi 1 Membangun dan Mengembangan Pemerintah yang Bersih dan Professional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat	Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi	Astacita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
Misi 2 Membangun dan Mengembangan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan	Misi 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan	Astacita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Misi 3 Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan terdidik	Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
Misi 4 Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua	Misi 2 Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Indutrialisasi Komoditas Unggulan Daerah	Astacita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		Astacita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		Astacita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Misi 5 Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua	Misi 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal	Astacita 1 Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
	Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan	Astacita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, terdapat lima misi besar yang memandu proses pembangunan daerah yang telah menggambarkan empat

dimensi utama pembangunan, yaitu: sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Kelima misi pembangunan di dalam RPJMD Kota Balikpapan dijabarkan secara lebih terperinci pada subbab di bawah ini.

Misi 1: Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Professional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pemerintahan yang bersih menjadi landasan utama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Balikpapan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat.

Selain itu, profesionalitas ASN menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi ASN, pemanfaatan TIK, dan peningkatan penerapan standar pelayanan pemerintah daerah sehingga dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Dari hal tersebut masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah yang benar-benar berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan daerah.

Berangkat dari hal tersebut, pemerintahan yang bersih dan profesionalitas tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kinerja birokrasi semata, melainkan juga untuk memperkuat demokrasi lokal dan keadilan sosial. Pemerintah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perekonomian daerah, stabilitas daerah, dan kesejahteraan masyarakat serta mampu menciptakan Kota Balikpapan yang nyaman untuk semua. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mendorong misi ini adalah komitmen yang kuat dan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat yang semakin meningkat.

Misi 2: Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan

Misi “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan” bertujuan untuk memberikan layanan infrastruktur terpadu dan menjangkau seluruh wilayah yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Balikpapan. Infrastruktur terpadu meliputi pengembangan infrastruktur dasar wilayah dan utilitas perkotaan yang menitikberatkan pada penyediaan air minum, pengendalian banjir, pengembangan konektivitas berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana transportasi massal, penataan pedestrian dan utilitas kota, pengembangan

kawasan permukiman yang layak huni, penataan kawasan kumuh, dan mewujudkan Kota Balikpapan Terang.

Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk mengembangkan layanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah Kota Balikpapan, sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Keterpaduan layanan infrastruktur diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan kehidupan sosial masyarakat, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Balikpapan, sehingga mampu meningkatkan daya saing kota.

Misi 3: Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik

Rumusan misi *"Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik"* bertujuan untuk memberikan penekanan terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif mencakup berbagai aspek, seperti toleransi antarwarga, ketertiban umum, serta layanan publik yang inklusif, merujuk pada keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban individu di masyarakat. Adanya kondisi lingkungan sosial yang harmonis dan kondusif dapat mendukung aktivitas sehari-hari Masyarakat secara lebih nyaman, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mengakses berbagai fasilitas dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Selain itu, misi ini juga memberikan penekanan pada dua aspek utama pembangunan yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan Masyarakat secara lebih merata, guna mewujudkan Masyarakat yang sehat dan sejahtera. Pada bidang pendidikan, pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas guna menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing. Dengan adanya masyarakat yang sehat dan terdidik, diharapkan pembangunan Kota Balkpapan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan sosial dan ekonomi Kota Balikpapan semakin meningkat.

Misi 4: Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua

Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua menjadi fokus pembangunan ekonomi yang menjamin pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Balikpapan. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga memastikan seluruh penduduk di Kota Balikpapan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pengembangan sektor industri dan jasa yang bernilai tambah tinggi menjadi kunci pembangunan ekonomi yang berkeadilan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih spesifik, UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif akan diarahkan menjadi pengungkit perekonomian Kota Balikpapan ke depan. Karakteristik UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif yang dapat diakses oleh siapa saja menjadi kunci dalam mewujudkan perekonomian yang berkeadilan untuk semua. Selain itu, nilai tambah yang dihasilkan oleh ketiga kelompok ini dapat memberikan *multiplier effect* kepada seluruh lapangan usaha di Kota Balikpapan sehingga produktivitas ekonomi daerah dapat meningkat.

Misi 5: Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua

Misi ini merepresentasikan tekad untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan agar lingkungan tetap terjaga dan lestari. Muara lebih lanjut lagi dari kondisi tersebut yakni lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara pelestarian lingkungan dan pembangunan daerah harus dilakukan dengan bijak dan perencanaan yang matang.

Diantara aspek penting dalam menjaga lingkungan dalam pembangunan daerah adalah mengurangi pencemaran yang dapat muncul akibat aktivitas industri, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat serta ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan, seperti pengelolaan limbah yang efektif, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pengurangan emisi karbon, harus diterapkan secara konsisten dalam setiap proyek pembangunan di Kota Balikpapan.

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan juga sangat penting. Upaya pelibatan tersebut ditempuh melalui peningkatan kapasitas dalam menjaga lingkungan, diantaranya dalam bentuk edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan, dengan harapan agar masyarakat dapat memahami pentingnya keseimbangan ekosistem dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, pola kinerja kolaborasi antar pihak perlu dikuatkan untuk menjaga lingkungan, diantaranya melalui kerjasama dalam mengadakan program penghijauan, perlindungan daerah tangkapan air, serta inisiatif yang mendorong gaya hidup ramah lingkungan di tingkat lokal. Dengan langkah-langkah konkret yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap keputusan pembangunan, kedepan diharapkan dapat menciptakan daerah yang maju tanpa mengorbankan keseimbangan alam, sehingga memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.

5 (lima) misi pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dirumuskan telah sejalan dengan 6 (misi) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, 8 (delapan) Asta Cita RPJM Nasional, dan 8 (delapan) misi RPJPD Kota Balikapan.

Tabel 3. 4 Keselarasan Misi RPJMD, RPJMN, dan RPJPD

Misi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029	Misi (Astacita) Presiden 2025-2029	Misi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
Misi 1 Membangun dan Mengembangan Pemerintah yang Bersih dan Professional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat	Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi	Astacita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Misi 3 Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif
			Misi 8 Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan
			Misi 4 Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial
Misi 2 Membangun dan Mengembangan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan	Misi 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan	Astacita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi 6 Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan
			Misi 7 Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan
Misi 3 Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan terdidik	Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Misi 1 Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global
Misi 4 Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua	Misi 2 Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif	Astacita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	Misi 2 Mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan

Misi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029	Misi (Astacita) Presiden 2025-2029	Misi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
	Berbasis Indutrialisasi Komoditas Unggulan Daerah	melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	
		Astacita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	
		Astacita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
Misi 5 Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua	Misi 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal	Astacita 1 Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Misi 5 Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan
	Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan	Astacita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	

Sumber: Analisis, 2025

Rumusan misi RPJMD Kota Balikpapan dirumuskan dengan memerhatikan rencana Pembangunan pada dokumen lainnya, baik di level daerah, provinsi dan nasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pembangunan antara perencanaan pembangunan di level nasional, perencanaan Pembangunan di level Provinsi Kalimantan Timur dan perencanaan Pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan. Keselarasan tersebut untuk kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan, strategi dan program prioritas pembangunan daerah.

3.3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan, serta menjawab dari isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan RPJMD adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran RPJMD merupakan rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan Sasaran kemudian dijabarkan lebih detail dalam rumusan outcome. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat ukur untuk memastikan kondisi yang diinginkan dapat terwujud. Berikut tujuan, sasaran, dan indikator RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029.

Tabel 3. 5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Beserta Indikator RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman - MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN PROFESSIONAL BERORIENTASI PADA PELAYANAN MASYARAKAT - MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR TERPADU YANG DAPAT MEMENUHI SELURUH KEBUTUHAN MASYARAKAT BALIKPAPAN - MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN SOSIAL YANG KONDUSIF UNTUK MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG SEHAT DAN TERDIDIK - MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG TUMBUH BERKEADILAN UNTUK SEMUA - - KONSISTEN MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP	Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,23	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	
			Tingkat Kemiskinan ((%))	2,23	2,15	2,06	1,98	1,89	1,81	1,72	
			Indeks Gini (Indeks)	0,324	0,312	0,307	0,301	0,296	0,290	0,285	
		Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	214,11	223,74	234,37	246,09	259,01	273,26	288,97	
			Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa (%)	7,75	7,87	7,99	8,12	8,25	8,38	8,52	
			Tingkat Inflasi ((%))	1,1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	
			Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	7,11	7,12	7,13	7,13	7,14	7,14	7,15	
		Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Indeks)	64,50	66,10	67,69	69,69	72,26	75,05	78,15	
		Meningkatnya kesempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,22	6,12	5,94	5,75	5,57	5,38	5,20	
		Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	N/A	78,93	79,56	80,20	80,84	81,49	82,14	
		Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	70,61	73,01	75,41	77,81	80,20	82,60	85,00	
			Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	50,62	50,62	51,12	51,62	52,12	52,62	53,12	
	Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim		Penurunan intensitas emisi GRK ((%))	12,67*	24,84	38,99	41,02	43,05	45,04	47,25	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	68,40	71,64	71,81	71,98	72,15	72,32	72,49	
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	101,43	99,43	97,34	95,43	93,43	91,43	89,43	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
YANG SEHAT DAN NYAMAN UNTUK SEMUA	SDM yang berdaya saing		Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	4,07	4,08	4,10	4,11	4,13	4,14	4,15	
		SDM Balikpapan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	82,62	83,09	83,39	83,69	84,00	84,30	84,60	
		Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,178	0,176	0,174	0,172	0,170	0,168	0,166	
	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	78,06	78,30	78,52	78,64	78,76	78,88	79,00	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai AKIP (Nilai)	69,06	70,02	70,42	70,70	70,98	71,26	71,54	
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)	82,068	82,890	83,090	83,290	83,490	83,690	83,890	
			Indeks integritas pemerintah (Indeks)	75,08	77,50	78,20	79,00	79,70	80,50	81,20	
		Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	84,93	84,95	85,64	86,34	87,05	87,76	88,48	
			Indeks SPBE (Indeks)	3,96	3,85	-	-	-	-	-	
			Indeks Pemerintah Digital (Indeks)	N/A	N/A	2,00	2,00	2,50	2,50	3,00	

Sumber: Analisis, 202

3.4 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan berbagai langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Upaya tersebut dirancang untuk mencapai target dalam lima tahun ke depan melalui strategi serta kebijakan pembangunan daerah. Secara garis besar, bab ini mencakup tiga aspek utama, yaitu tahapan pembangunan RPJMD, strategi dan kebijakan arah pembangunan, serta program prioritas pembangunan daerah.

3.4.1 Strategi Penahapan Pembangunan RPJMD

Penahapan pembangunan RPJMD merupakan bagian dari strategi dalam RPJMD. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan sendiri merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Adanya tahapan pembangunan akan menciptakan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Tahapan pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar dalam menentukan tema dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Berikut merupakan tahapan pembangunan jangka menegah Kota Balikpapan selama periode 2025-2029.



Gambar 3. 1 Penahapan Pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Sumber: Analisis, 2025

Tahapan pembangunan RPJMD Kota Balikpapan memiliki tema pembangunan setiap tahunnya. Tema tersebut selaras dengan tema periode pertama RPJPD Kota Balikpapan 2025-2029 yaitu penguatan transformasi, Balikpapan kota cerdas dan

kolaboratif. Adapun tema pembangunan per tahun pada RPJMD Kota Balikpapan yaitu:

- Tahap 1 tahun 2026, Pemantapan Fondasi Pembangunan sebagai Kota Global yang nyaman untuk semua
- Tahap 2 tahun 2027, Peningkatan kota nyaman untuk semua berbasis SDM berkarakter, ekonomi bernilai tambah, infrastruktur tangguh dan tate kelola inovatif
- Tahap 3 tahun 2028, Akselerasi kota nyaman untuk semua berbasis SDM berkualitas, ekonomi bernilai tambah, infrastruktur ramah lingkungan, dan tata kelola kolaboratif
- Tahap 4 tahun 2029: Peningkatan daya saing menuju kota global berbasis SDM unggul, ekonomi dan infrastruktur berkelanjutan, serta tata kelola adaptif

3.4.1.1 Lokus Pembangunan Wilayah

Lokus pembangunan wilayah merupakan bagian dari strategi yang memiliki peran penting untuk memandu pembangunan kewilayahan secara lebih komprehensif. Lokus pembangunan wilayah dapat merujuk pada beberapa arahan yang ada pada dokumen perencanaan lainnya seperti dokumen RPJMN (lampiran IV), dokumen RTRW dan program prioritas kepala daerah terpilih. Berikut merupakan lokus pembangunan wilayah berdasarkan highlight indikasi intervensi RPJMN di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 6 Highlight Indikasi Intervensi RPJMN 2025-2029 untuk Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

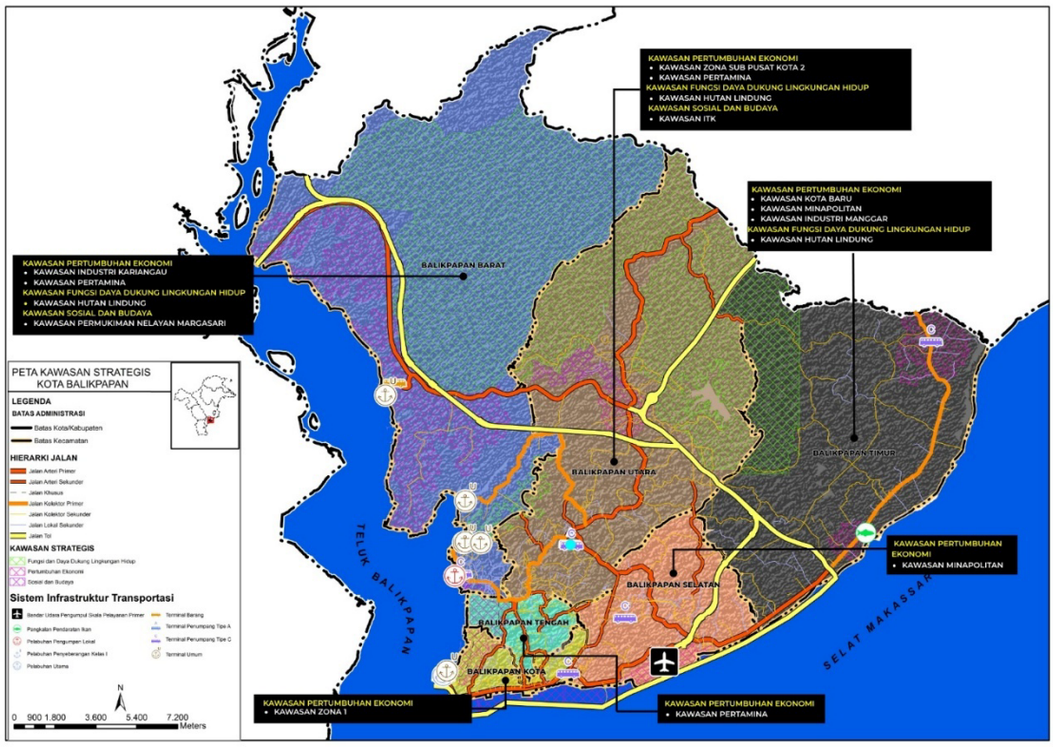
No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
1.	Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara A2: Kota Samarinda A3: Kota Balikpapan A4: Kota Bontang A5: Kabupaten Penajam Paser Utara A6: Kabupaten Kutai Kartanegara A7: Kabupaten Kutai Timur	Pengembangan kawasan superhub ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, melalui: 1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung dengan output: pembangunan SPAM Regional Kalimantan Timur
		2. Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara dengan output: Pengembangan objek wisata desa dan perdesaan, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, desa wisata di wilayah destinasi II yang terpadu, serta fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi di wilayah destinasi II, serta event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dalam negeri yang didukung
		3. Pengembangan klaster ekonomi kreatif di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara dengan output: Kabupaten/Kota Kreatif yang dikembangkan, penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik, penguatan ekosistem fesyen dan kriya, penguatan ekosistem aplikasi dan gim, penguatan ekosistem

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		kuliner, pelatihan SDM ekonomi kreatif, sertifikasi SDM bidang ekonomi kreatfi, serta edukasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, inkubasi produk kreatif subsektor film, animasi, dan video serta music
		4. Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara
		5. Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandardisasi pada agroindustri hilir kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan output: kriteria standar Crude Palm Oil (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, fasilitasi investasi hilir kelapa sawit, penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF - hydrogenated vegetable oil/sustainable aviation fuel) berbahan baku technical oil, promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri, peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, promosi produk rumput laut skala internasional, pengembaangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani dan pengadaan asuransi pertanian
		6. Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandarisasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar), dengan output rekomendasi dan regulasi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis minyak bumi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis gas bumi, fasilitasi investor dalam rangka pembangunan fasilitas *coal to ammonia* di Kutai Timur, pendampingan implementasi sektor industri, gasifikasi batubara di Kutai Timur, rekomendasi percepatan peningkatan nilai tambah batubara, pengembangan dan pembangunan kilang minyak bumi (Kilang Balikpapan), pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang dan Bangka (Indonesia Deepwater Development Project/IDD), percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon dan penyediaan serta permintaan produk turunan
		7. Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki), dengan output: penyusunan data *supply-demand* dan tingkat komponen dalam negeri industri kecil pada sektor tekstil, kulit dan alas kaki
		8. Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil, dengan output: pendampingan penerapan industri 4.0 pada sektor minuman, hasil tembakau, serta bahan penyegar dan

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		penerapan making Indonesia 4.0 pada Industri Kecil Menengah (IKM) pada industri aneka dan IKM kimia, sandang dan kerajinan
		9. Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil, dengan output: pengembangan sektor industri aneka, layanan pemberdayaan penyuluh, rekomendasi kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki serta layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
		10. Peningkatan produksi pangan nabati, dengan outpur: alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan dan holtikultura
		11. Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik, dengan output: preservasi pada sejumlah jalan/jembatan koridor logistic
		12. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan output: pengembangan pelabuhan
		13. Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara, dengan output: pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Kota Balikpapan), Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Kota Samarinda) dan pengembangan Bandara Ibu Kota Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara)
		14. Pembangunan jalan nasional akses perbatasan untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi, dengan output: pembangunan jalan koridor logistik Tering-Long Bagun 5
		15. Pengembangan transportasi berkelanjutan, dengan output: pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan BTS (*Bus the Service*) di Kota Balikpapan
2.	Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan A8: Kota Samarinda A9: Kota Balikpapan	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan, dengan output: bantuan PSU bidang perumahan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan sanitasi, bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI, pemugaran permukiman kumuh, peremajaan permukiman kumuh, permukiman kembali permukiman kumuh, bantuan pembangunan rumah swadaya, bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi, penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu untuk kota besar (Samarinda dan Balikpapan), penataan kawasan prioritas pada Kota Samarinda (Blok Teras Samarinda-Zona Kota Tua), pembangunan fasilitas pendidikan politeknik pariwisata di Samarinda untuk mendukung pengembangan pariwisata di IKN dan sekitarnya, serta penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan dan generasi z.

Sumber: RPJMN 2025-2029

Strategi pembangunan wilayah Kota Balikpapan disesuaikan dengan Pola Ruang, Struktur Ruang dan penetapan Kawasan Strategis Kota serta Indikasi Program yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2024-2043. Adapun lokus pembangunan wilayah diarahkan apda pengembangan kawasan strategis kota yang mengedepankan pada nilai ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.



Gambar 3. 2 Peta Strategi Pengembangan Wilayah Kota Balikpapan
Sumber: Analisis, 2025

Strategi pengembangan wilayah Kota Balikpapan berdasarkan peta kawasan strategis di atas menekankan optimalisasi potensi wilayah, sinergi pertumbuhan ekonomi, serta pelestarian lingkungan hidup. Pembagian zona strategis di masing-masing kecamatan menjadi dasar pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

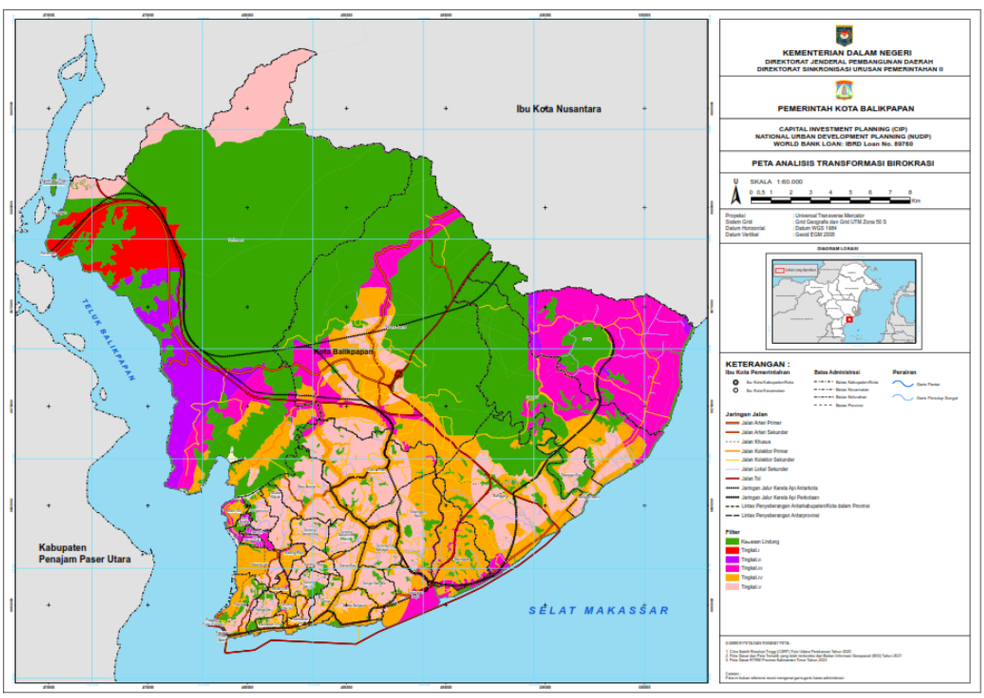
Kota Balikpapan sebagai salah satu kota yang mengikuti National Urban Development Project (NUDP) atau Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional. NUDP dilaksanakan di 23 (dua puluh tiga) kota di Indonesia. Proyek ini dikembangkan sebagai platform nasional pembangunan kota yang selanjutnya dapat menjadi contoh untuk diperluas di seluruh kota-kota di Indonesia. Salah satu instrumen yang dikembangkan dalam NUDP adalah *Capital Investment Planning (CIP)* melalui pendekatan kawasan prioritas sesuai rencana tata ruang dan rencana proyek prioritas sesuai dokumen rencana pembangunan. CIP berfungsi sebagai jembatan antara dokumen perencanaan sehingga mampu

memastikan kegiatan pembangunan yang diusulkan sejalan dengan visi, misi, dan prioritas kepala daerah.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi visi dan misi Wali Kota Balikpapan, CIP dirancang dengan mengacu pada kebutuhan spesifik yang terpetakan dalam lima misi pembangunan. Setiap misi dianalisis melalui peta tematik yang relevan, sehingga prioritas kegiatan yang ditetapkan benar-benar menjawab permasalahan sekaligus mendorong pencapaian target pembangunan Kota Balikpapan.

Misi 1: Mengembangkan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat

Pemerintah berkomitmen melakukan transformasi birokrasi melalui penguatan akuntabilitas kinerja, penerapan sistem meritokrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain itu, integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan terus diperkuat agar pelayanan publik menjadi lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



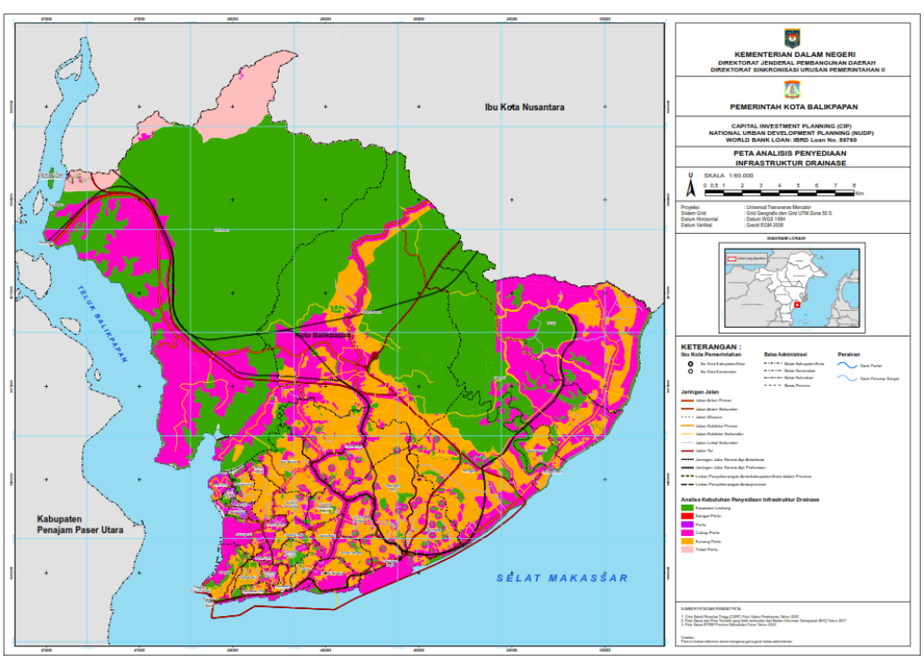
Gambar 3. 3 Peta Misi 1 Analisa Transformasi Birokrasi Kota Balikpapan
Sumber: Analisis, 2025

Peta analisis transformasi birokrasi Kota Balikpapan menunjukkan pembagian wilayah berdasarkan status filter warna yang menggambarkan peruntukan lahan dan perencanaan kawasan. Zona hijau menunjukkan kawasan yang dilindungi atau terpelihara, seperti area konservasi dan ruang terbuka hijau yang mendukung keberlanjutan ekosistem. Zona merah mewakili kawasan dengan

prioritas pengelolaan tinggi atau daerah yang memerlukan perhatian lebih dalam pengawasan dan transformasi birokrasi. Zona kuning mengindikasikan kawasan yang sedang dalam tahap pengembangan atau perencanaan pembangunan, sementara zona ungu menandakan daerah dengan karakteristik administratif atau pelayanan publik khusus. Zona coklat menunjukkan wilayah yang sudah berkembang dengan infrastruktur lengkap dan siap mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Zona biru mewakili kawasan perairan atau jalur transportasi laut yang penting bagi kegiatan ekonomi dan mobilitas kota. Zona pink menandakan kawasan yang sedang mengalami transformasi besar, baik dalam pengembangan pemukiman maupun infrastruktur, sedangkan zona abu-abu menunjukkan wilayah dengan status yang masih dalam evaluasi atau penataan lebih lanjut. Peta ini memberikan gambaran komprehensif tentang status administrasi dan perencanaan wilayah di Kota Balikpapan, mencerminkan transformasi birokrasi yang sedang berlangsung di setiap zona.

Misi 2: Mengembangkan Infrastruktur Terpadu untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat

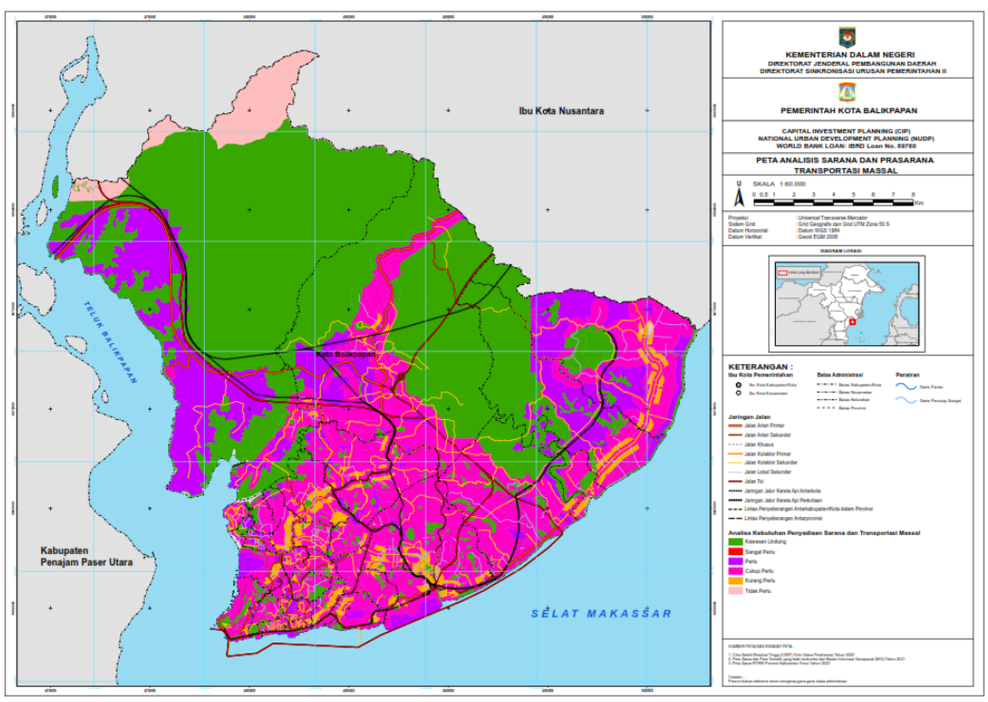
Pembangunan infrastruktur diarahkan pada penyediaan layanan dasar dan penataan kota yang berkelanjutan. Prioritas utama meliputi penyediaan air bersih yang merata, pengendalian banjir untuk mengurangi risiko bencana, pengembangan transportasi massal yang ramah lingkungan, serta penataan jaringan utilitas kota agar lebih terintegrasi dan efisien dalam mendukung aktivitas masyarakat.



Gambar 3. 4 Peta Misi 2: Analisa Kebutuhan Penyediaan Infrastruktur Drainase Kota Balikpapan

Sumber: Analisis, 2025

Peta analisis penyediaan infrastruktur drainase di Kota Balikpapan menunjukkan pembagian wilayah berdasarkan status filter warna yang menggambarkan peruntukan lahan dan kesiapan infrastruktur drainase. Zona hijau menunjukkan kawasan yang memiliki sistem drainase yang baik atau kawasan yang terpelihara dengan baik, mendukung aliran air yang optimal. Zona merah mewakili kawasan yang memiliki kebutuhan mendesak dalam pengelolaan drainase, mungkin karena tingginya risiko banjir atau masalah drainase yang belum teratasi dengan baik. Zona kuning mengindikasikan kawasan dengan infrastruktur drainase yang sedang dalam tahap pengembangan atau perbaikan, sementara zona ungu menunjukkan daerah yang membutuhkan perencanaan drainase yang lebih strategis atau peningkatan kualitas infrastruktur. Zona coklat menunjukkan wilayah yang sudah memiliki drainase yang relatif baik dan siap mendukung aktivitas ekonomi serta sosial. Zona biru menggambarkan kawasan yang berhubungan dengan perairan atau daerah pesisir yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pengelolaan drainase. Zona pink menandakan kawasan yang sangat membutuhkan pembenahan infrastruktur drainase untuk mencegah masalah banjir atau genangan air yang berkelanjutan. Peta ini memberikan gambaran komprehensif tentang status pengelolaan dan perencanaan infrastruktur drainase di Kota Balikpapan, menunjukkan daerah-daerah yang memerlukan intervensi untuk meningkatkan sistem drainase yang ada.



Gambar 3. 5 Peta Misi 2: Analisa Kebutuhan Penyediaan Sarana dan Transportasi Massal Kota Balikpapan

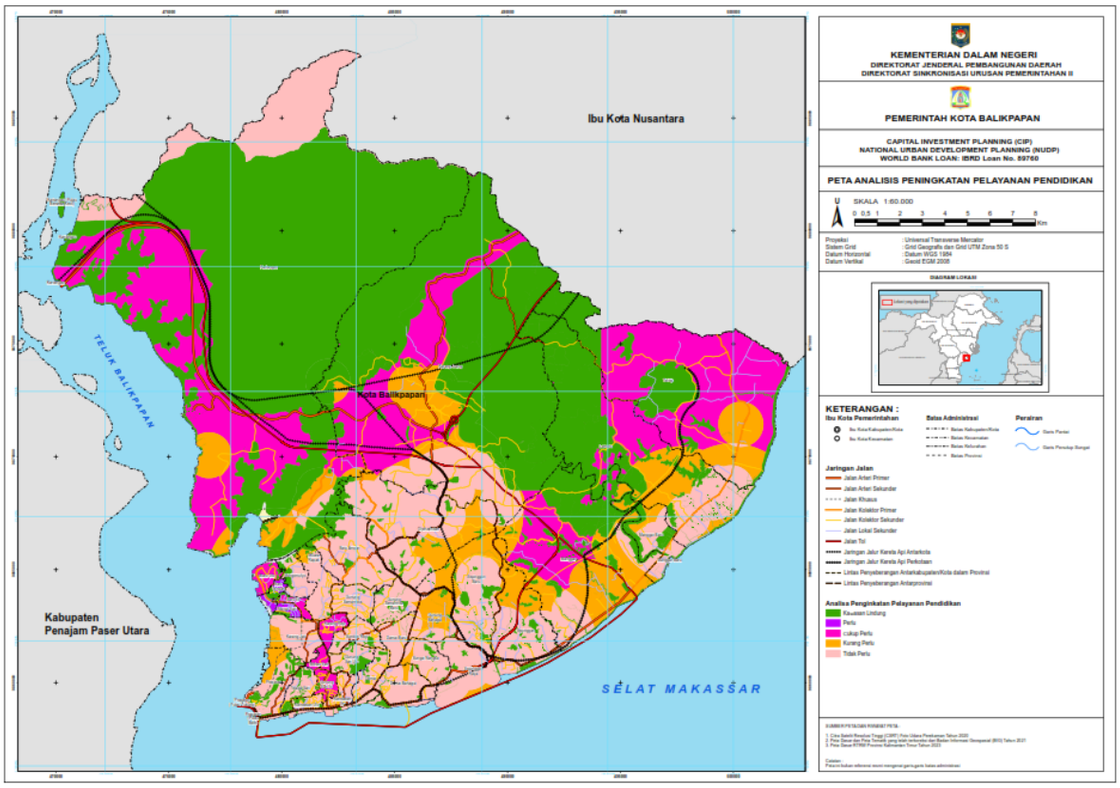
Sumber: Analisis, 2025

Peta analisis sarana dan prasarana transportasi massal di Kota Balikpapan menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan status filter warna

yang mencerminkan kesiapan infrastruktur transportasi massal di berbagai area. Zona hijau menunjukkan wilayah dengan infrastruktur transportasi massal yang terintegrasi dengan baik, memungkinkan mobilitas yang efisien dan akses yang mudah untuk penduduk. Zona merah mewakili kawasan yang memiliki kebutuhan mendesak terkait pengembangan sarana transportasi massal, seperti daerah yang kurang terlayani atau tidak memiliki akses transportasi publik yang memadai. Zona kuning mengindikasikan kawasan yang sedang dalam tahap pengembangan infrastruktur transportasi massal, yang artinya proyek atau rencana untuk memperbaiki sistem transportasi sedang berlangsung. Zona ungu menunjukkan daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pengembangan atau perbaikan sarana transportasi massal untuk mendukung pertumbuhan kota. Zona coklat menunjukkan wilayah dengan transportasi massal yang sudah ada dan terjangkau, meskipun masih memerlukan peningkatan kualitas layanan. Zona biru mengindikasikan kawasan yang berhubungan dengan akses perairan atau jalur transportasi laut yang turut mendukung mobilitas kota, seperti pelabuhan. Zona pink menandakan daerah yang sangat membutuhkan pengembangan sarana transportasi massal, baik dari sisi aksesibilitas maupun infrastruktur. Peta ini memberikan gambaran menyeluruh tentang status pengelolaan dan perencanaan sarana transportasi massal di Kota Balikpapan, menunjukkan area yang memerlukan intervensi untuk meningkatkan sistem transportasi publik yang ada.

Misi 3: Menjaga Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Masyarakat Sehat dan Terdidik

Upaya menjaga kehidupan sosial difokuskan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, termasuk penurunan angka stunting secara berkelanjutan. Pemerintah juga menargetkan terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Ramah Anak melalui penyediaan fasilitas dan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak. Perlindungan terhadap masyarakat rentan menjadi prioritas agar semua warga dapat merasakan rasa aman, keadilan, dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari.

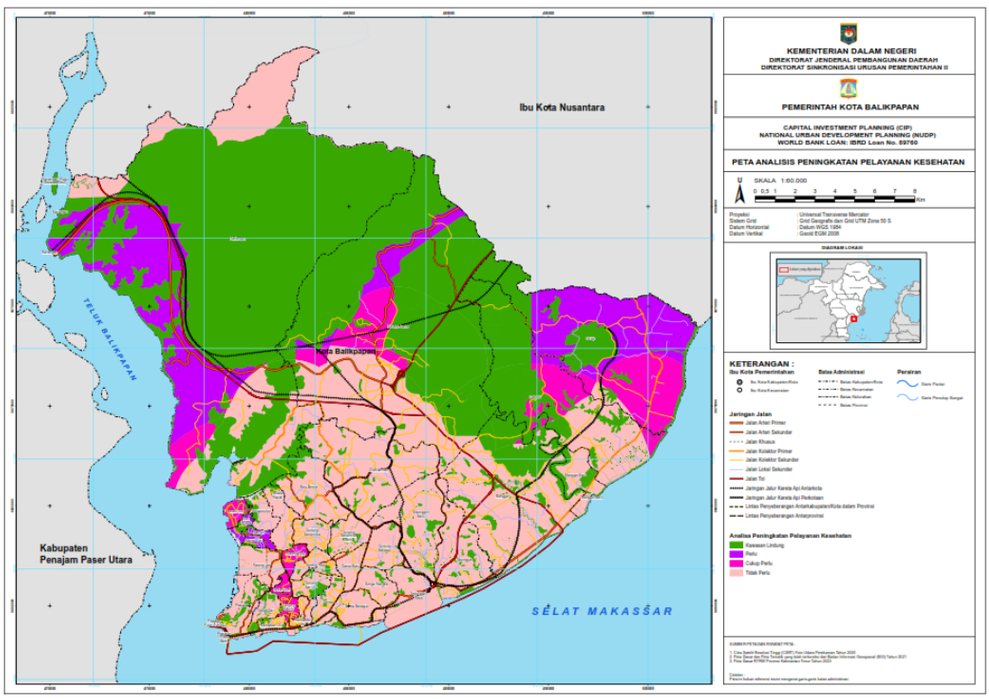


Gambar 3. 6 Peta Misi 3 : Analisa Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kota Balikpapan

Sumber: Analisis, 2025

Peta analisis peningkatan pelayanan pendidikan di Kota Balikpapan menunjukkan pembagian wilayah berdasarkan status filter warna yang menggambarkan tingkat pengelolaan dan perkembangan sarana pendidikan di berbagai area. Zona hijau menunjukkan kawasan yang memiliki infrastruktur pendidikan yang baik dan layanan yang memadai, dengan akses pendidikan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Zona merah mewakili kawasan yang membutuhkan perhatian lebih dalam pengembangan sarana pendidikan, baik dari segi jumlah fasilitas maupun kualitas layanan pendidikan yang ada. Zona kuning mengindikasikan kawasan yang sedang dalam tahap pengembangan fasilitas pendidikan, yang berarti proyek untuk meningkatkan layanan pendidikan sedang berjalan. Zona ungu menunjukkan daerah dengan kebutuhan besar akan peningkatan sarana pendidikan dan pelayanan yang lebih merata untuk mendukung pertumbuhan kualitas pendidikan. Zona coklat menandakan wilayah dengan fasilitas pendidikan yang sudah ada namun membutuhkan peningkatan kualitas dan kapasitas untuk memenuhi permintaan yang terus berkembang. Zona biru menggambarkan kawasan dengan akses pendidikan yang sangat terbatas, yang memerlukan pembangunan infrastruktur pendidikan untuk mendukung pemerataan akses. Zona pink menandakan kawasan yang membutuhkan prioritas besar dalam pengembangan sarana pendidikan untuk memastikan semua warga memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan. Peta ini memberikan gambaran yang jelas tentang status pengelolaan

dan perencanaan peningkatan pelayanan pendidikan di Kota Balikpapan, mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

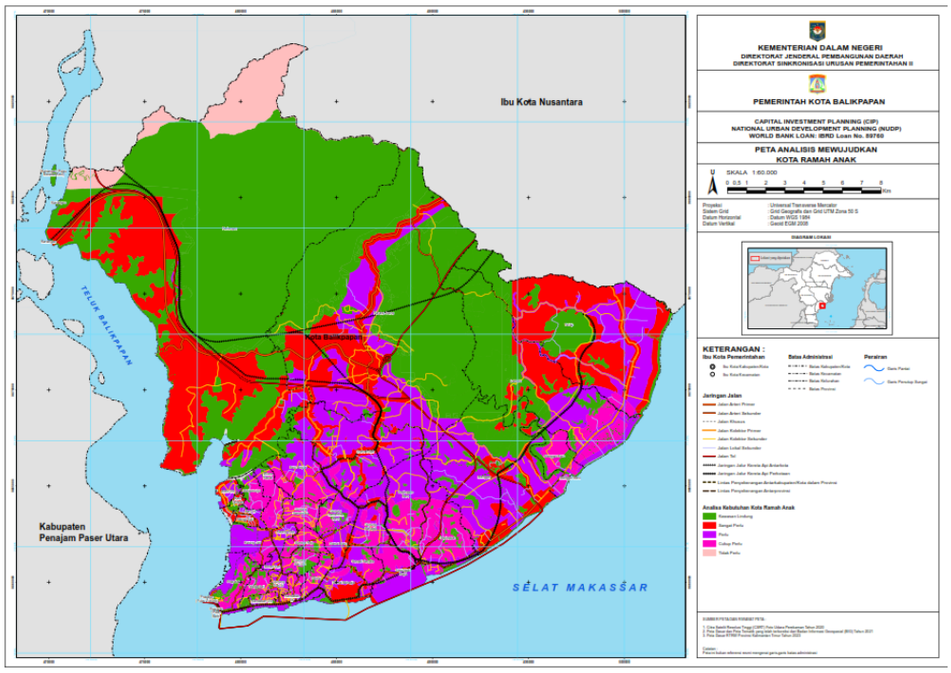


Gambar 3. 7 Peta Misi 3: Analisa Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kota Balikpapan

Sumber: Analisis, 2025

Peta analisis peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan menunjukkan pembagian wilayah berdasarkan status filter warna yang menggambarkan kesiapan dan kualitas layanan kesehatan di berbagai area. Zona hijau menunjukkan kawasan dengan akses layanan kesehatan yang baik, dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Zona merah mewakili kawasan yang membutuhkan perhatian mendalam dalam peningkatan pelayanan kesehatan, dengan kemungkinan kekurangan fasilitas atau sumber daya medis yang memadai. Zona kuning mengindikasikan kawasan yang sedang dalam tahap pengembangan layanan kesehatan, artinya fasilitas kesehatan sedang diperbaiki atau dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Zona ungu menunjukkan daerah yang memerlukan intervensi besar dalam peningkatan layanan kesehatan, baik dari sisi infrastruktur maupun tenaga medis. Zona coklat menunjukkan wilayah yang sudah memiliki fasilitas kesehatan namun memerlukan peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Zona biru menggambarkan kawasan yang sangat membutuhkan pengembangan fasilitas kesehatan, yang mungkin masih terbatas dalam akses dan ketersediaan layanan. Zona pink menandakan kawasan yang memerlukan prioritas utama dalam pengembangan sistem kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

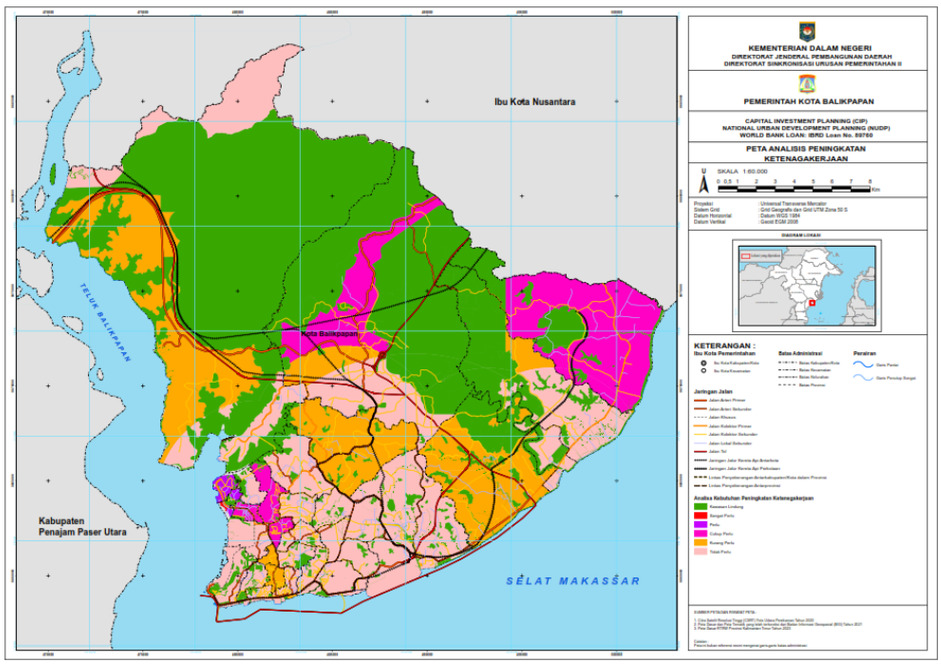
masyarakat. Peta ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai status pengelolaan dan perencanaan peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan, menunjukkan daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.



Gambar 3. 8 Peta Misi 3: Analisa Kebutuhan Kota Ramah Anak Kota Balikpapan
Sumber: Analisis, 2025

Peta analisis mewujudkan Kota Ramah Anak di Kota Balikpapan menunjukkan pembagian wilayah berdasarkan status filter warna yang menggambarkan kesiapan dan upaya kota dalam menyediakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Zona hijau menunjukkan kawasan yang telah berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan ramah untuk anak, dengan akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ruang terbuka yang mendukung aktivitas anak-anak. Zona merah mewakili kawasan yang membutuhkan perhatian serius dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak, karena mungkin terdapat masalah dalam infrastruktur atau fasilitas yang menghambat kebutuhan anak-anak, seperti kurangnya area bermain atau fasilitas pendidikan yang memadai. Zona kuning mengindikasikan kawasan yang sedang dalam tahap perbaikan atau pengembangan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak, termasuk peningkatan fasilitas publik dan keamanan. Zona ungu menunjukkan daerah yang membutuhkan rencana intervensi lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan sebagai kota yang ramah anak, baik dalam aspek sosial, fisik, maupun lingkungan. Zona coklat menandakan wilayah yang sudah memiliki beberapa fasilitas ramah anak tetapi masih membutuhkan perbaikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Zona biru menggambarkan kawasan yang berpotensi untuk dijadikan ruang ramah anak, namun memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam hal aksesibilitas dan

fasilitas. Zona pink menunjukkan daerah yang sangat membutuhkan perhatian untuk mewujudkan lingkungan yang benar-benar mendukung hak-hak anak, dengan perbaikan yang mendesak dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. Peta ini memberikan gambaran komprehensif tentang status pengelolaan dan perencanaan untuk menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota yang ramah anak, dengan mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi dan pengembangan lebih lanjut



Gambar 3. 9 Peta Misi 3: Analisa Kebutuhan peningkatan Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

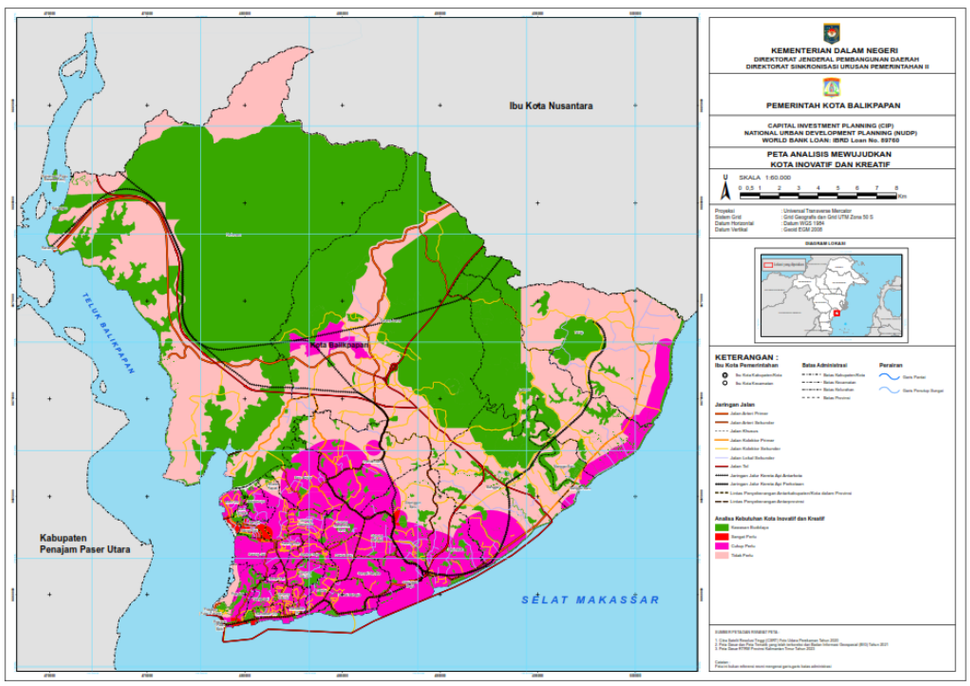
Sumber: Analisis, 2025

Peta analisis peningkatan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan menunjukkan pembagian wilayah berdasarkan status filter warna yang menggambarkan kesiapan dan pengelolaan sektor ketenagakerjaan di berbagai area. Zona hijau menunjukkan kawasan dengan tingkat ketenagakerjaan yang baik, dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Zona merah mewakili kawasan yang memiliki tantangan besar dalam hal ketenagakerjaan, dengan tingkat pengangguran yang tinggi atau kesulitan dalam menyediakan pekerjaan yang memadai bagi penduduk. Zona kuning mengindikasikan kawasan yang sedang dalam tahap pengembangan atau peningkatan sektor ketenagakerjaan, yang berarti peluang kerja dan pelatihan sedang ditingkatkan. Zona ungu menunjukkan daerah yang membutuhkan intervensi besar untuk menciptakan peluang ketenagakerjaan, dengan potensi pengangguran yang tinggi atau sektor pekerjaan yang kurang berkembang. Zona coklat menunjukkan wilayah yang sudah memiliki lapangan pekerjaan namun masih memerlukan peningkatan dalam hal kualitas pekerjaan dan akses ke peluang karir yang lebih baik. Zona biru menggambarkan kawasan yang perlu difokuskan untuk pengembangan

sektor ketenagakerjaan, baik dari sisi pelatihan keterampilan maupun penciptaan lapangan kerja baru. Zona pink menandakan kawasan yang sangat membutuhkan perhatian dalam peningkatan ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap peluang kerja yang berkualitas. Peta ini memberikan gambaran komprehensif tentang status dan perencanaan pengelolaan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan, serta menunjukkan area-area yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Misi 4: Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua

. Penguatan perekonomian daerah dilakukan dengan menjadikan Balikpapan sebagai kota Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) serta destinasi pariwisata unggulan. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, dan percepatan kawasan industri akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

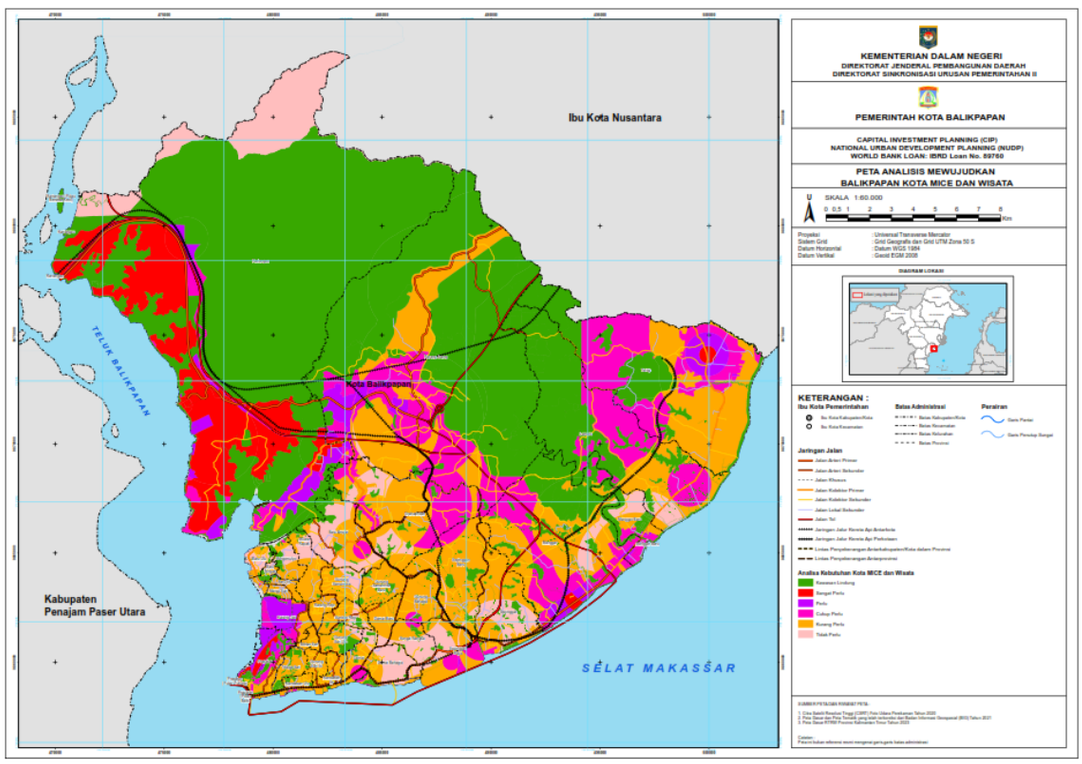


Gambar 3. 10 Peta Misi 4: Analisa Kebutuhan Kota Inovatif Kreatif Kota Balikpapan

Sumber: Analisis, 2025

Peta analisis mewujudkan Kota Inovatif dan Kreatif di Kota Balikpapan menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan status filter warna yang mencerminkan tingkat kesiapan dan pengelolaan kota dalam mendukung sektor inovasi dan kreativitas. Zona hijau menunjukkan kawasan dengan dukungan yang baik untuk inovasi dan kreativitas, artinya terdapat banyak fasilitas dan infrastruktur yang mendukung perkembangan ide-ide kreatif serta kegiatan inovatif. Zona merah mewakili kawasan yang masih memerlukan banyak perhatian dan pengembangan dalam sektor inovasi, dengan kurangnya fasilitas

atau dukungan untuk mendorong kreativitas di daerah tersebut. Zona kuning mengindikasikan wilayah yang sedang dalam tahap pengembangan untuk meningkatkan sektor inovasi dan kreativitas, artinya upaya-upaya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung sedang berlangsung. Zona ungu menunjukkan daerah yang memiliki potensi besar namun membutuhkan perencanaan yang lebih strategis untuk mendorong inovasi dan kreativitas secara maksimal. Zona coklat menandakan wilayah yang sudah memiliki beberapa fasilitas kreatif tetapi masih perlu penguatan dalam hal kualitas dan kapasitas untuk mendukung perkembangan lebih lanjut. Zona biru menggambarkan kawasan yang memiliki potensi besar dalam sektor ini, namun masih membutuhkan pengembangan infrastruktur atau akses yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan inovasi masyarakat. Zona pink menandakan kawasan yang memerlukan perhatian lebih untuk menciptakan ruang yang benar-benar mendukung kreativitas dan inovasi, dengan investasi yang lebih besar dalam fasilitas dan sistem yang mendukung. Peta ini memberikan gambaran menyeluruh tentang status dan perencanaan untuk menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota yang inovatif dan kreatif, dengan identifikasi area yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut dalam menciptakan ekosistem yang mendukung ide-ide baru dan solusi kreatif.



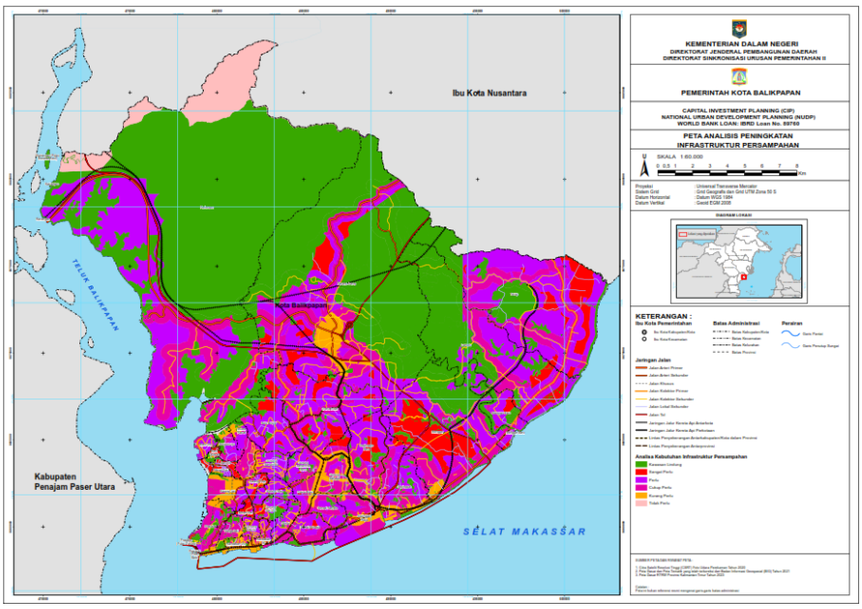
Gambar 3. 11 Peta Misi 4: Analisa Kebutuhan Kota MICE Wisata Kota Balikpapan
Sumber: Analisis, 2025

Peta analisis mewujudkan Balikpapan sebagai Kota MICE dan Wisata menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan status filter warna yang mencerminkan kesiapan dan pengelolaan kawasan untuk mendukung sektor

MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) serta pariwisata. Zona hijau menunjukkan kawasan yang siap untuk menjadi pusat MICE dan wisata, dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan fasilitas yang sesuai untuk kegiatan pertemuan besar, pameran, dan kegiatan wisata lainnya. Zona merah mewakili kawasan yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk menjadi destinasi MICE dan wisata yang kompetitif, dengan kemungkinan terbatasnya fasilitas atau aksesibilitas yang perlu diperbaiki. Zona kuning mengindikasikan kawasan yang sedang dalam tahap perencanaan atau pengembangan untuk menjadi pusat MICE dan wisata, artinya proyek infrastruktur sedang dilaksanakan untuk meningkatkan daya tarik kawasan tersebut. Zona ungu menunjukkan daerah yang memerlukan perhatian besar dalam hal pengembangan dan perencanaan untuk memanfaatkan potensi wisata dan MICE, serta meningkatkan fasilitas yang mendukung sektor ini. Zona coklat menunjukkan wilayah yang sudah memiliki sebagian infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung sektor ini, tetapi masih memerlukan peningkatan kualitas dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggara acara. Zona biru menggambarkan kawasan yang berpotensi tinggi namun memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam sektor MICE dan wisata, dengan perhatian khusus pada aksesibilitas dan fasilitas pendukung lainnya. Zona pink menandakan kawasan yang sangat membutuhkan intervensi dalam hal pengembangan infrastruktur, aksesibilitas, dan promosi untuk menjadi destinasi MICE dan wisata yang menarik. Peta ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai status dan perencanaan pengembangan sektor MICE dan pariwisata di Kota Balikpapan, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk menjadikan kota ini sebagai tujuan utama MICE dan wisata.

Misi 5: Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua

Komitmen menjaga lingkungan hidup diwujudkan melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi, pengolahan air limbah yang lebih efektif, serta konservasi sumber daya air untuk keberlanjutan ekosistem. Upaya penghijauan kota juga terus dilakukan agar kualitas udara dan ruang terbuka hijau semakin baik, disertai langkah-langkah dekarbonisasi guna mendukung target pembangunan rendah emisi dan menjaga kenyamanan lingkungan bagi generasi mendatang.

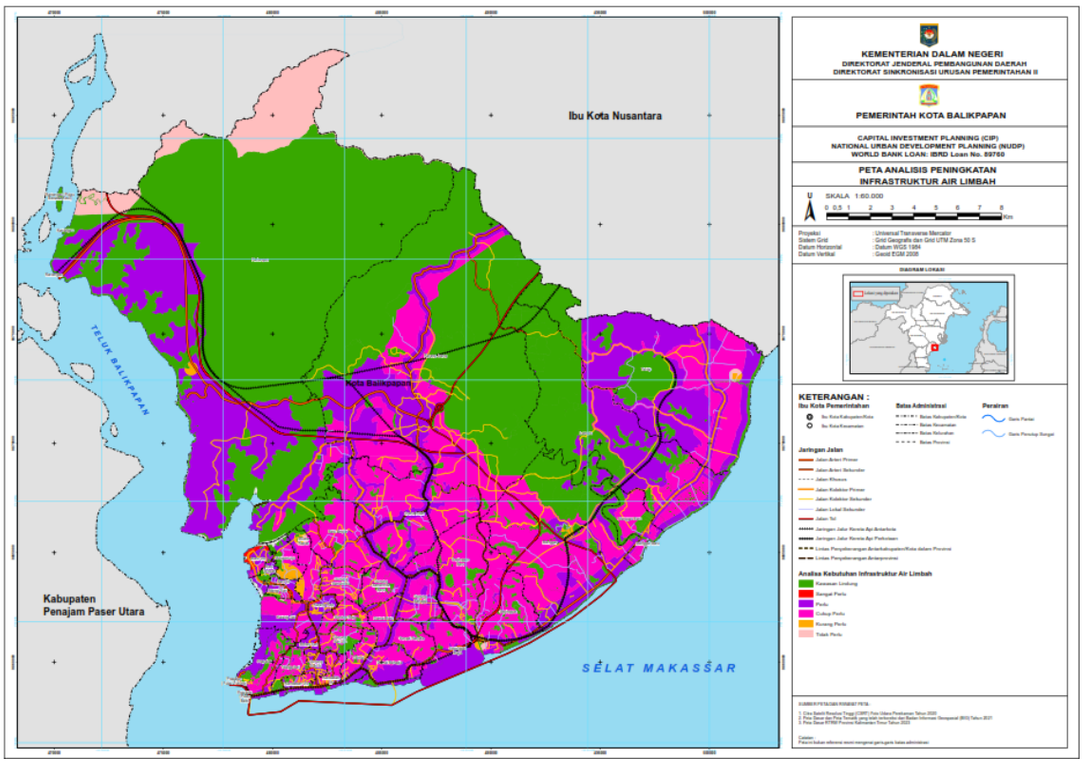


Gambar 3. 12 Peta Misi 5: Analisa Kebutuhan Infrstruktur persampahan Kota Balikpapan

Sumber: Analisis, 2025

Peta analisis peningkatan infrastruktur persampahan di Kota Balikpapan menunjukkan pembagian wilayah berdasarkan status filter warna yang menggambarkan kesiapan dan pengelolaan sistem pengelolaan sampah di berbagai area. Zona hijau menunjukkan kawasan dengan infrastruktur pengelolaan sampah yang baik, aartinya sistem pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan sampah sudah terorganisir dengan efektif, mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan. Zona merah mewakili kawasan yang membutuhkan perhatian besar dalam pengelolaan sampah, dengan infrastruktur yang tidak memadai atau kurang optimal, yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Zona kuning mengindikasikan kawasan yang sedang dalam tahap pengembangan atau peningkatan sistem persampahan, yang berarti proyek untuk memperbaiki atau memperluas sistem pengelolaan sampah sedang berjalan. Zona ungu menunjukkan daerah yang membutuhkan perencanaan dan intervensi lebih lanjut dalam pengelolaan sampah, baik dalam hal infrastruktur maupun edukasi masyarakat untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Zona coklat menunjukkan wilayah yang sudah memiliki fasilitas pengelolaan sampah namun masih memerlukan peningkatan dalam hal kapasitas dan efisiensi pengolahan sampah. Zona biru menggambarkan kawasan yang berpotensi tinggi untuk pengembangan sistem pengelolaan sampah, namun memerlukan tambahan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Zona pink menandakan kawasan yang sangat membutuhkan perhatian untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, termasuk pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peta ini memberikan gambaran menyeluruh tentang status dan perencanaan pengelolaan sampah di Kota Balikpapan, mengidentifikasi area-area yang memerlukan

perhatian khusus untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.



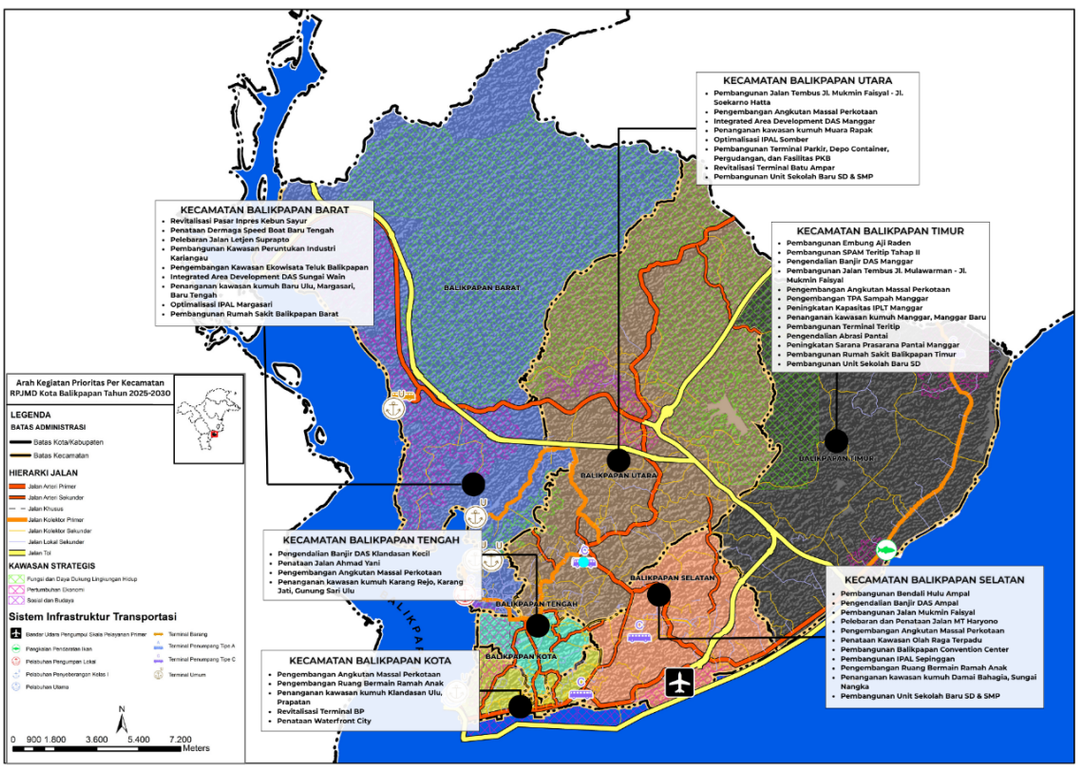
Gambar 3. 13 Peta Misi 5: Analisa Kebutuhan Infrstruktur Limbah Kota Balikpapan

Sumber: Analisis, 2025

Peta analisis peningkatan infrastruktur air limbah di Kota Balikpapan menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan status filter warna yang mencerminkan kesiapan dan pengelolaan infrastruktur air limbah di berbagai area. Zona hijau menunjukkan kawasan dengan sistem pengelolaan air limbah yang baik, yang berarti fasilitas dan jaringan air limbah sudah terintegrasi dengan baik, memastikan kualitas sanitasi yang memadai. Zona merah mewakili kawasan yang sangat membutuhkan perhatian dalam pengelolaan air limbah, dengan infrastruktur yang tidak memadai atau belum ada sama sekali, sehingga menimbulkan potensi risiko terhadap kesehatan lingkungan. Zona kuning mengindikasikan kawasan yang sedang dalam tahap pengembangan atau peningkatan sistem air limbah, dengan proyek yang sedang dilaksanakan untuk memperbaiki atau memperluas jaringan sanitasi. Zona ungu menunjukkan daerah yang memerlukan perencanaan dan intervensi lebih lanjut dalam hal pengelolaan air limbah, baik dari sisi infrastruktur maupun pengelolaan kualitas air. Zona coklat menunjukkan wilayah yang sudah memiliki infrastruktur air limbah namun masih membutuhkan perbaikan atau perluasan untuk mencakup area yang lebih luas dan mendukung pengelolaan limbah yang lebih efisien. Zona biru menggambarkan kawasan yang berpotensi tinggi dalam pengembangan sistem air limbah, namun membutuhkan investasi tambahan dalam pembangunan

infrastruktur yang lebih baik. Zona pink menandakan kawasan yang sangat membutuhkan pengembangan infrastruktur air limbah dengan segera, dengan fokus pada pembangunan dan perbaikan fasilitas sanitasi yang memadai untuk mendukung kualitas hidup masyarakat. Peta ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai status dan perencanaan pengelolaan infrastruktur air limbah di Kota Balikpapan, mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan sistem sanitasi dan menjaga lingkungan yang sehat.

Berdasarkan arahan pembangunan wilayah dan program prioritas kepala daerah terpilih, maka arah kegiatan prioritas per kecamatan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 14 arah kegiatan prioritas per kecamatan Kota Balikpapan
Sumber: Analisis, 2025

Peta ini memberikan gambaran tentang rencana pembangunan infrastruktur dan strategi di setiap kecamatan Kota Balikpapan, yang dibagi menjadi enam kecamatan utama, yaitu Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, dan Balikpapan Kota.

Di Kecamatan Balikpapan Barat, prioritas kegiatan meliputi revitalisasi pelabuhan, pembangunan kawasan perindustrian, pengembangan kawasan Ekowisata Teluk Balikpapan, dan pembangunan rumah sakit. Di Kecamatan Balikpapan Utara, fokus utama adalah pengembangan jalur tembus, pembangunan pasar tradisional, serta pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Kecamatan Balikpapan Timur memprioritaskan pembangunan jalur transportasi, pasar, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, serta peningkatan akses ke kawasan perumahan dan pelabuhan. Kecamatan Balikpapan Tengah difokuskan pada pembangunan jalan, kawasan permukiman, serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah ini.

Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki prioritas pembangunan taman kota, pembangunan unit sekolah, dan pengembangan kawasan perumahan serta fasilitas pendukung lainnya. Terakhir, Kecamatan Balikpapan Kota memfokuskan pengembangan kawasan wisata, pemukiman, serta penguatan infrastruktur jalan dan transportasi.

Peta ini menunjukkan pentingnya pengembangan yang terintegrasi antara sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di setiap kecamatan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan daya saing Kota Balikpapan.

3.4.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan secara lebih operasional. Arah kebijakan setiap misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Misi	Arah Kebijakan
-1	-2
Misi 1: Membangun dan mengembangkan pemerintah yang bersih dan profesional yang beriorientasi pada pelayanan masyarakat	• Perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi • Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional • Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel • Pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan • Menguatkan aksi pencegahan korupsi • penguatan Inovasi dan Riset Daerah
Misi 2: Membangun dan mengembangkan infrastruktur yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Balikpapan	• Penguatan kualitas layanan infrastruktur • pendukung perekonomian dan pusat pusat • pertumbuhan skala kota, regional, nasional berbasis smartcity • Penguatan peran Kota Balikpapan sebagai daerah mitra IKN • Pengembangan konektivitas terintegrasi dan Sarana dan Prasarana perhubungan • Pengembangan infrastruktur dengan konsep green dan universal design • Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan • Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas

Misi	Arah Kebijakan
-1	-2
Misi 3: Membangun dan mengembangkan kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan terdidik	• Penguatan Pengembangan Early Child • Development yang holistik dan integratif • Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi • Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan peningkatan cakupan imunisasi • Penguatan sistem pelayanan kesehatan meliputi sarana prasarana dan alat, obat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan • Penguatan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi dan respon penanganan, serta perluasan jaringan kesehatan (kader kesehatan, masyarakat, swasta) • Integrasi layanan primer • Pembangunan Prasarana Layanan Kesehatan Berupa Rumah Sakit Tipe B dan Tipe C • Percepatan partisipasi pendidikan dan pengembangan layanan pendidikan dasar (PAUD-SD-SMP-Kesetaraan) sesuai dengan kebutuhan daerah • Penguatan keluarga berkualitas, pendidikan karakter, dan pemenuhan hak anak serta kesetaraan gender • Penyediaan beasiswa untuk masyarakat dalam percepatan partisipasi pendidikan di semua jenjang • Peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga • Penguatan kelembagaan dan fungsi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pemenuhan 6 SPM lintas bidang (kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibumlinmas, dan sosial)
Misi 4: Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua	• Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagai pusat hilirisasi • Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif dan inovatif yang berkelanjutan. • Pengembangan daya tarik wisata kota, infrastruktur pendukung MICE, dan industri hospitality. • Penguatan iklim investasi berkelanjutan • Pengembangan ekonomi dengan pendekatan ekonomi hijau dan ekonomi biru • Pengembangan IKM dan UMKM yang berdayasaing serta penumbuhan wirausaha baru. • Pengendalian inflasi daerah • Penguatan kemandirian pangan daerah • Pengembangan ekonomi digital dan ekonomi syariah • Pengembangan dan pemberdayaan koperasi merah putih

Misi	Arah Kebijakan
-1	-2
	• Penguatan kualitas ketenagakerjaan dan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan
Misi 5: Konsisten menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk semua	· Pembangunan ruang kota sesuai dengan peruntukkan yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup. · Peningkatan atau Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) · Peningkatan konservasi sumber daya air berkelanjutan · Peningkatan partisipasi masyarakat berbasis kawasan terintegrasi · Peningkatan pengelolaan sampah kolaboratif berbasis hulu-hilir dan ekonomi sirkular · Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mitigasi struktural dan non struktural · Pengembangan sistem ketangguhan terhadap perubahan iklim. · Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dan pelestraian keanekaragaman hayati melalui koridor hijau · Pengembangan pembangunan rendah karbon

Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai peta jalan strategis pembangunan kota dalam lima tahun mendatang. Dokumen ini disusun melalui kolaborasi erat antara pemerintah, DPRD, dan melibatkan masukan masyarakat, menjadikan RPJMD bukan sekadar dokumen formal, namun pedoman utama arah kebijakan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat luas.

3.4.3 Program Prioritas Daerah

Program prioritas daerah Kota Balikpapan untuk periode RPJMD 2025 – 2029 merupakan turunan operasional dari konsepsi pencapaian visi dan keberhasilan misi pembangunan yang lebih luas. Program prioritas daerah ini bertujuan untuk memfokuskan upaya pada sektor-sektor strategis. Program prioritas daerah terdiri dari 9 prioritas yang mendukung perwujudan pembangunan daerah, yaitu:

a. Transformasi birokrasi

Program prioritas Kota Balikpapan terkait Transformasi Birokrasi adalah didasari oleh kebutuhan untuk mengubah wajah pemerintahan dari pola kerja yang tradisional, kaku, dan lambat menjadi sistem tata kelola yang modern, adaptif, berkelas dunia, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Transformasi

ini secara fundamental mencakup perubahan dalam pola pikir *(mindset)*, budaya kerja *(culture set)*, dan struktur kelembagaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tujuan utama dari transformasi ini adalah menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government* di Kota Balikpapan, yang berarti mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik secara signifikan. Selain itu, tujuan prioritas ini adalah menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap kebijakan dan layanan, sehingga setiap urusan birokrasi, perizinan, dan administrasi dapat diselesaikan dengan cepat, transparan, dan mudah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang diimplementasikan berfokus pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government*. Pilar ini melibatkan digitalisasi seluruh layanan publik, mulai dari perizinan *(Mal Pelayanan Publik berbasis digital)*, perencanaan anggaran, hingga manajemen kepegawaian. Digitalisasi bertujuan memangkas jalur birokrasi yang panjang (*debottlenecking*) dan mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi memicu pungutan liar. Pilar kedua adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN melalui *Talent Management* yang profesional. Strategi ini mencakup pelatihan berbasis kompetensi, penegakan integritas, dan promosi yang didasarkan pada kinerja *(merit system)*. Pilar ketiga adalah Penyederhanaan dan Penataan Kelembagaan. Ini meliputi penyederhanaan struktur organisasi yang dinilai terlalu gemuk, khususnya melalui kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional, untuk menciptakan organisasi yang lebih lincah (*agile*) dan responsif terhadap dinamika pembangunan kota.

Tabel 3. 7 Indikator Kinerja Prioritas Transformasi Birokrasi

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Meritokrasi ASN)	Pengelolaan Assessment Center	Terbangunnya Assessment Center	0	1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Optimalisasi SPIP	Pengembangan e-SPIP	Tersedianya Sistem Informasi SPIP berbasis Elektornik	0	1	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Penguatan SPBE Terintegrasi	pengembangan fitur layanan publik dasar (Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Ketenagakerjaan, Aduan Masyarakat dsb.) pada e-Manuntung	Tersedianya fitur layanan publik dasar (Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Ketenagakerjaan, Aduan Masyarakat dsb.) pada e-Manuntung	3,96	4,14	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	Penyediaan wifi gratis di wilayah Kota Balikpapan	Tersedianya wifi gratis di wilayah Kota Balikpapan	185 titik	462 titik	
Penguatan Akuntabilitas dalam Zona Integritas	Penguatan Nilai AKIP	Meningkatnya Nilai AKIP Kota	69,06	71,54	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

b. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan

Program prioritas peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Balikpapan yang semakin tinggi dan merata. Di sektor kesehatan, tujuannya adalah memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan merata bagi seluruh warga. Strategi yang ditempuh meliputi penguatan fasilitas layanan kesehatan primer (Puskesmas) melalui peningkatan sarana prasarana dan ketersediaan alat medis modern, hingga peningkatan kompetensi dan kuantitas tenaga kesehatan. Selain itu, program difokuskan pada digitalisasi layanan kesehatan seperti pendaftaran online, serta penggalakan program preventif dan promotif berbasis komunitas, seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dalam rangka menekan angka stunting dan penyakit degeneratif. Peningkatan infrastruktur rujukan juga menjadi perhatian, termasuk optimalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Beriman dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu Kota Balikpapan.

Pada sektor pendidikan, tujuan strategisnya adalah menciptakan sumber daya manusia Balikpapan yang cerdas, kompeten, dan berdaya saing global untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan Kota Balikpapan. Strategi yang diimplementasikan berfokus pada pemerataan akses dan kualitas pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMP. Hal ini dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah serta penyediaan sarana pendukung digitalisasi pembelajaran. Selain itu, kurikulum dikembangkan untuk lebih mengarah pada pendidikan vokasional dan keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan industri Balikpapan. Program unggulan seperti sekolah gratis untuk jenjang PAUD sampai dengan SMP Negeri, subsidi biaya operasional pendidikan dasar sekolah swasta, subsidi SPP peserta didik sekolah swasta, bantuan seragam sekolah untuk siswa pendidikan usia dini dan pendidikan dasar, beasiswa peserta didik sekolah,

peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru melalui pelatihan berkala dan pemberian insentif yang layak. Kolaborasi dengan dunia usaha dan industri akan terus ditingkatkan guna menyelaraskan kualitas lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

Tabel 3. 8 Indikator Kinerja Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
Peningkatan akses layanan kesehatan (Subsidi BPJS)	cakupan layanan BPJS Kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) dengan mengutamakan keluarga tidak mampu	tersedianya layanan Kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) diutamakan kategori keluarga tidak mampu	202.753	256.547	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terbangun dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kesehatan			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	- Puskesmas		25	27	
	- Rumah Sakit		2	3	
	- Puskesmas Pembantu		14	14	
	- UPTD non Puskesmas		3	3	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan				
	- Puskesmas		27	27	
	- Rumah Sakit		2	2	
	- Puskesmas Pembantu		14	14	
	- UPTD non Puskesmas		3	3	
	Penyediaan Tenaga Kesehatan	Tersedianya Tenaga Kesehatan	1.920	2.520	
Peningkatan akses layanan Pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (Subsidi SPP, Seragam	Pembangunan Sekolah Pendidikan Dasar	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	- SD		0	3	
	- SMP		2	4	
	- PAUD		0	1	

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
Sekolah, Beasiswa)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	- SD		139	144	
	- SMP		26	30	
	- PAUD		1	6	
	Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Tersedianya Tenaga Pendidik dan Kependidikan	2.450	4.748	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Subsidi Biaya Pendidikan Dasar Sekolah Swasta	Tersedianya Biaya Pendidikan Dasar Sekolah Swasta bagi Keluarga Tidak Mampu	30.761	39.374	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Bantuan Seragam Sekolah untuk siswa Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar	Tersedianya Bantuan Seragam Sekolah untuk siswa Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar	45.305	57.990	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pemberian makanan bergizi gratis	Fasilitasi pelaksanaan MBG	Pembentukan Satgas MBG	0	1	
	Pemberian makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan siswa pendidikan dasar	Terlaksananya pemberian makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan siswa pendidikan dasar	0	66.145	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKP UKM)

c. Mengatasi Stunting

Program prioritas untuk mengatasi stunting merupakan investasi krusial dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting secara signifikan hingga mencapai target nasional yang telah ditetapkan. Selain itu program prioritas ini bertujuan memastikan setiap anak di Kota Balikpapan tumbuh dengan optimal, sehat, cerdas, dan produktif, sehingga terhindar dari dampak jangka panjang stunting terhadap kualitas SDM.

Strategi yang diimplementasikan di Balikpapan mengadopsi pendekatan "*konvergensi*" lintas sektor dan multi-pihak, berfokus pada dua intervensi utama: Spesifik dan Sensitif. Intervensi Spesifik mencakup kegiatan yang langsung menangani penyebab stunting pada ibu hamil dan anak balita, seperti pemberian

makanan tambahan (PMT) bergizi kepada ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita gizi kurang, peningkatan cakupan tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil, serta promosi dan dukungan eksklusif Air Susu Ibu (ASI) dan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat. Hal ini perlu didukung oleh optimalisasi peran Puskesmas dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar dan pemantauan tumbuh kembang anak.

Intervensi Sensitif berfokus pada faktor-faktor tidak langsung penyebab stunting, seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta ketahanan pangan keluarga. Strategi ini mencakup penyediaan akses air minum yang layak dan sanitasi di seluruh permukiman, penguatan program Keluarga Berencana (KB) untuk mengatur jarak kelahiran, dan edukasi pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada keluarga melalui kader dan tokoh masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan data dan sistem pelaporan *stunting* terintegrasi hingga tingkat kelurahan, serta peningkatan koordinasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Pekerjaan Umum, hingga PKK. Dengan strategi terpadu ini, Kota Balikpapan berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal anak, memastikan generasi emas yang siap menyambut masa depan kota.

Tabel 3. 9 Indikator Kinerja Prioritas Mengatasi Stunting

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
Penurunan Stunting	Penguatan Data Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Tersedianya Data Akurat untuk intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran	1	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK, Anak dengan Gizi kronis	terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK, Anak dengan Gizi kronis	15.400	16.400	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Penguatan Kelembagaan Posyandu dan kinerja kader	terlaksananya penguatan kelembagaan posyandu dan kinerja kader	1.648	1.848	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
	Cakupan Layanan terhadap 42 Indikator Aksi Bangda	terlaksananya Cakupan Layanan terhadap 42 Indikator Aksi Bangda	90%	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

d. Penyediaan Air Bersih yang Sehat dan Merata

Program prioritas penyediaan air bersih yang sehat dan merata merupakan komitmen fundamental untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan keberlanjutan kota. Tujuan utama dari program ini adalah terbangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM) dan jaringan perpipaan yang aman serta berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Balikpapan. Hal ini dinilai sangat mendesak dikarenakan terbatasnya sumber daya air baku, terutama saat musim kemarau, dan tingginya tingkat sedimentasi di waduk-waduk utama seperti Waduk Manggar dan Waduk Teritip.

Strategi yang diterapkan berfokus pada tiga pilar utama: peningkatan kapasitas produksi, pengembangan sumber air baku baru, dan optimalisasi jaringan distribusi. Untuk peningkatan kapasitas produksi, Perumda Tirta Manuntung (PDAM) ditargetkan dapat melakukan revitalisasi dan modernisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang sudah ada agar efisiensi pengolahan meningkat dan kuantitas produksi air bersih bertambah. Di sisi pengembangan sumber air baku, strategi mencakup eksplorasi dan pemanfaatan sumber air alternatif, termasuk pemanfaatan bendungan sepaku semoi serta pembangunan jaringan perpipaan sistem Mahakam. Sementara itu, optimalisasi jaringan distribusi melibatkan penggantian pipa tua yang rawan kebocoran (menekan tingkat kehilangan air non-pendapatan atau *Non-Revenue Water*/NRW), pembangunan *reservoir* di titik-titik strategis untuk menjamin kontinuitas dan tekanan air, serta pemerataan jaringan ke wilayah-wilayah pinggiran atau perbukitan yang sebelumnya sulit terjangkau. Selain itu, aspek konservasi sumber daya air dan perlindungan daerah tangkapan air waduk akan terus ditingkatkan guna menjamin kuantitas air baku yang berkelanjutan.

Tabel 3. 10 Indikator Kinerja Prioritas Penyediaan Air Bersih yang Sehat dan Merata

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
Penyediaan air minum	Pembangunan Embung Aji Raden, Penyiapan Pemanfaatan Waduk Sepaku Semoi dan Pemanfaatan Sungai Mahakam	Terbangunnya Embung Aji Raden, Penyiapan Pemanfaatan Waduk Sepaku Semoi dan Pemanfaatan Sungai Mahakam	7 SPAM	9 SPAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	Optimaliasi SPAM Eksisting (Uprating dan Penurunan NRW)	Terlaksananya optimaliasi SPAM Eksisting	29,10%	26,00%	

e. Pengendalian Banjir

Program prioritas pengendalian banjir adalah sebuah upaya mendesak untuk meningkatkan daya tahan kota (resiliensi) terhadap bencana hidrometeorologi. Tujuan utama dari program ini adalah meminimalisir frekuensi dan dampak genangan air/banjir di titik-titik rawan, terutama di kawasan padat penduduk dan pusat ekonomi, serta memastikan sistem drainase perkotaan berfungsi optimal dalam menampung dan mengalirkan curah hujan tinggi. Kota Balikpapan menghadapi tantangan unik yang berasal dari kombinasi intensitas hujan tinggi, topografi berbukit, dan sedimentasi saluran yang diperparah oleh perkembangan tata ruang yang masif.

Strategi yang diimplementasikan berfokus pada pendekatan terpadu yang mencakup aspek struktural, non-struktural, dan konservasi. Dari segi struktural, strategi utama meliputi normalisasi dan pelebaran sungai/drainase primer di kawasan langganan banjir seperti di daerah Balikpapan Utara dan Balikpapan Tengah, pembangunan *boezem* atau kolam retensi baru di daerah rendah untuk menampung air sementara sebelum dialirkan, serta perbaikan dan rehabilitasi gorong-gorong yang tidak memadai. Intervensi non-struktural melibatkan penegakan tata ruang (RTRW) yang ketat, terutama di daerah resapan air. Aspek konservasi sangat ditekankan melalui perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS), reboisasi di kawasan hulu, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan kebersihan saluran air agar tidak terjadi penyumbatan. Program ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Gerakan Pengerukan Saluran secara berkala. Dengan kombinasi upaya teknis, penegakan regulasi, dan kesadaran lingkungan, Balikpapan berupaya menciptakan sistem pengendalian banjir yang lebih efektif, mengurangi kerugian ekonomi, dan meningkatkan kenyamanan hidup warganya.

Tabel 3. 11 Indikator Kinerja Prioritas Pengendalian Banjir

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
Pengendalian Banjir	Pembangunan Bendali Hulu Sungai Ampal	Terbangunnya dan termanfaatkannya Bendali Hulu Sungai Ampal	0	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Peningkatan Drainase DAS Ampal, Klandasan Kecil & Manggar	Meningkatnya kapasitas drainase DAS Ampal, Klandasan Kecil dan Manggar			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
	Pembangunan dan pemeliharaan drainase kota	Terbangun dan terpeliharanya drainase kota	73.97%	78.98%	

f. Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sehat dan Nyaman

Program prioritas terkait lingkungan hidup dan sosial yang sehat dan nyaman bertujuan menciptakan lingkungan fisik yang bersih, hijau, dan bebas polusi, sekaligus membangun tatanan sosial yang harmonis, inklusif, dan berbudaya sehat. Secara umum prioritas tersebut terdiri dari 2 pilar utama yakni pembangunan fisik dan konektivitas serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan kesejahteraan sosial.

Strategi pada pilar Pembangunan Fisik dan Konektivitas mencakup pembangunan jalan penghubung Balikpapan Timur-Utara, jalan menuju kawasan industri, Terminal dan Depo Kontainer, koridor transportasi massal, jalur sepeda di jalan protokol, peningkatan Trotoar dan Jaringan Utilitas, serta penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh wilayah. Tujuan pembangunan infrastruktur ini adalah untuk meningkatkan mobilitas, efisiensi logistik, dan keamanan kota, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi kemacetan. Bersamaan dengan itu, penyediaan dan pemeliharaan rumah layak huni (di kawasan kumuh maupun non-kumuh) serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan merupakan upaya untuk mengatasi isu permukiman dan meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal warga.

Pilar kedua adalah Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial. Dalam aspek lingkungan, fokus strategisnya adalah pada sanitasi, manajemen limbah, dan keberlanjutan energi. Ini diwujudkan melalui pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Skala Kota, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah sistem Hulu dan Hilir dengan teknologi *Waste to Energy*, peningkatan nilai indeks kualitas air, serta penyediaan sarana pemanenan air hujan di berbagai jenis bangunan. Strategi ini ditujukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi pencemaran, dan mewujudkan kota yang tangguh terhadap perubahan iklim (termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca). Di sisi sosial, program ini berupaya menciptakan masyarakat yang berdaya, terlindungi, dan sehat. Ini dilakukan melalui perluasan sasaran iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, peningkatan jumlah pencari kerja tersertifikasi melalui pelatihan ketenagakerjaan, penyediaan bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, dan pemeliharaan sarana prasarana PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Pelaksanaan pembinaan olah

raga masyarakat dan prestasi juga dimaksudkan guna mendorong gaya hidup sehat warga Kota Balikpapan.

Tabel 3. 12 Indikator Kinerja Prioritas Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sehat dan Nyaman

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
Pembangunan konektivitas berkelanjutan	Pembangunan jalan penghubung kawasan Balikpapan Timur dan Utara serta jalan menuju kawasan peruntukan industri	Terbangunnya jalan penghubung kawasan Balikpapan Timur dan Utara serta jalan menuju kawasan peruntukan industri	0	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Pembangunan Terminal dan Fasilitas Depo Kontainer	Terbangunnya Terminal dan Fasilitas Depo Kontainer	0	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Penyediaan sarana prasarana pendukung kelaikan jalan di Kota Balikpapan	Penyediaan sarana prasarana pendukungan kelaikan jalan di Kota Balikpapan	1 Paket	1 Paket	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Mewujudkan Balikpapan Terang	Penyediaan penerangan di seluruh wilayah Kota Balikpapan	Penyediaan penerangan di seluruh wilayah Kota Balikpapan	17.214	30.621	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			580	2.753	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Penyediaan Rumah Layak Huni	Pembangunan dan peningkatan rumah layak huni (kawasan kumuh)	Tersedianya dan terpeliharanya rumah layak huni (kawasan kumuh)	15 unit	1.000 unit	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Pembangunan dan peningkatan rumah layak huni (di luar	Tersedianya dan terpeliharanya rumah layak huni (di luar kawasan kumuh)	85 unit	751 unit	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
	kawasan kumuh)				
	Penyediaan dan pemeliharaan prasarana sarana umum perumahan	Tersedianya dan terpeliharanya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	1 kawasan	3 kawasan	
Penyediaan sarana dan prasarana transportasi massal	Pengembangan Balikpapan City Trans	Terbangunnya koridor transportasi massal	3	6	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Penataan Pedestrian dan Utilitas	Peningkatan Trotoar dan Jaringan Utilitas di jalan dalam kota	Meningkatnya Trotoar dan Jaringan Utilitas di jalan dalam kota	1 kawasan	3 kawasan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	Pembangunan Jalur Sepeda di jalan protokol	Terbangunnya jalur sepeda di jalan protokol	12 ruas	16 ruas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Pelayanan jaminan ketenagakerjaan (perluasan sasaran penerima pekerja rentan)	Bantuan iuran jaminan ketenagakerjaan (perluasan sasaran penerima pekerja rentan)	Terbayarnya iuran jaminan ketenagakerjaan (perluasan sasaran penerima pekerja rentan)	7.140	7.200	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Penguatan Kompetensi Tenaga Kerja	Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan	Meningkatnya jumlah pencari kerja tersertifikasi	96	165	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	Perluasan jenis pelatihan ketenagakerjaan	Bertambahnya jumlah jenis pelatihan ketenagakerjaan	8	10	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	Penguatan kerjasama pelatihan ketenagakerjaan	Jumlah kerjasama pelatihan ketenagakerjaan	7	10	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Perlindungan Sosial Masyarakat Rentan dan Penyediaan sarana dan prasarana PPKS	Penyediaan bantuan perlindungan sosial masyarakat rentan dan pekerja rentan	Penyediaan bantuan perlindungan sosial masyarakat rentan dan pekerja rentan	0	7500	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana PPKS	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana PPKS	1	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Penguatan pembinaan Olah Raga Masyarakat dan Prestasi	Pelaksanaan lomba dan pembinaan olah raga masyarakat dan prestasi	Pelaksanaan lomba dan pembinaan olah raga masyarakat dan prestasi			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Pengelolaan Air Limbah	Respon terhadap nilai Indeks Kualitas Air	Pelaksanaan kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air	-	4 kegiatan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pembangunan IPAL Skala Kota dan Permukiman	Terbangunnya IPAL Skala Kota dan Permukiman	6 unit	4 unit	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air limbah	Terbangun dan terpeliharanya sarana prasarana pengelolaan air limbah		77.008 meter	
				2 unit 100 orang 1000 SR	
Pengelolaan Sampah	Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sistem Hulu	Terbangunnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sistem Hulu		22 unit	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sistem Hilir dengan Waste to Energy	Terbagunnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sistem Hilir dengan Waste to Energy	0	1 unit	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Konservasi Sumber Daya Air	Penyediaan sarana prasarana pemanenan air hujan di perkantoran, komersiil serta perumahan dan permukiman	Penyediaan sarana prasarana pemanenan air hujan di perkantoran, komersiil serta perumahan dan permukiman	1 Unit	5 Unit	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
Dekarbonisasi	Pengelolaan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca	Jumlah pengurangan emisi gas rumah kaca	12,67%	47,25%	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Taman Kota dan Penghijauan	Pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kota	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kota	1		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	Pengadaan pohon peneduh	Tersedianya pohon peneduh untuk penghijauan dan konservasi lingkungan	100	500	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Pengendalian Inflasi	Pengembangan Urban Farming sebagai upaya ketahanan pangan	Terlaksananya urban farming dalam satu lokasi sesuai advis teknis	4 Lokus	4 Lokus	- PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	Pembangunan Pasar Induk	Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Induk	0	1 unit	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

g. Balikpapan Kota MICE dan Wisata

Program prioritas terkait pengembangan Balikpapan Kota MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) dan Wisata memiliki tujuan utama untuk melakukan diversifikasi ekonomi kota, mengurangi ketergantungan pada sektor migas dan batu bara, serta memposisikan Balikpapan sebagai gerbang utama (*Gateway*) dan pusat kegiatan bisnis regional di Kalimantan Timur, khususnya dalam mendukung peran IKN. Pengembangan ini bertujuan menjadikan Balikpapan sebagai destinasi unggulan bagi pertemuan bisnis skala nasional maupun internasional, serta tujuan wisata yang menarik dan nyaman, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Strategi yang diimplementasikan berfokus pada tiga pilar utama: penguatan infrastruktur MICE, pengembangan destinasi wisata, dan peningkatan promosi terintegrasi. Pada pilar penguatan infrastruktur MICE, strategi mencakup

revitalisasi dan pembangunan fasilitas pertemuan dan pameran berstandar internasional, serta peningkatan kualitas dan kuantitas hotel dan akomodasi pendukung. Selain itu, Bandara Internasional SAMS Sepinggan sebagai pintu masuk utama terus dioptimalkan konektivitasnya. Di sektor pengembangan destinasi wisata, fokus diarahkan pada pemanfaatan potensi alam, serta pengembangan wisata bahari di pesisir. Strategi ini juga mendorong pengembangan wisata kuliner dan ekonomi kreatif lokal sebagai daya tarik pendukung. Promosi terintegrasi dilakukan dengan menjalin kolaborasi aktif antara pemerintah, asosiasi pariwisata (ASITA), perhimpunan hotel (PHRI), dan *event organizer* lokal untuk menarik *event* dan *meeting* besar yang dapat diselenggarakan di Kota Balikpapan, sekaligus memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan paket wisata dan MICE secara *branding* Kota Balikpapan yang nyaman, modern, hijau, dan strategis.

Tabel 3. 13 Indikator Kinerja Prioritas Balikpapan Kota MICE dan Wisata

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
Penguatan peran Balikpapan sebagai Kota MICE & Pariwisata	Penyelenggaraan event skala nasional/internasional di Kota Balikpapan	Penyelenggaraan event skala nasional/internasional di Kota Balikpapan	3	8	- PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	Pembangunan Balikpapan Convention Center	Terbangun dan terkelolanya Balikpapan Convention Center	0 unit	1 unit	
	Revitalisasi Pasar Inpres Kebun Sayur sebagai salah satu *icon* pusat oleh-oleh/wisata belanja Kota Balikpapan	Pasar Inpres Kebun Sayur yang telah terevitalisasi	0 unit	1 unit	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata	Meningkatnya jumlah obyek daya tarik wisata dan kunjungan wisatawan	85 obyek daya tarik wisata ; 2.670.369 kunjungan wisata	86 obyek daya tarik wisata ; 3.464.189 kunjungan wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

h. Balikpapan Kota Inovatif dan Kreatif

Program prioritas terkait pengembangan Balikpapan sebagai Kota Inovatif dan Kreatif bertujuan untuk mentransformasi struktur ekonomi dan sosial kota menjadi ekosistem yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Tujuan spesifiknya adalah mendorong lahirnya pelaku ekonomi kreatif baru, meningkatkan daya saing produk dan jasa lokal melalui inovasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *smart* dan efisien.

Strategi yang diimplementasikan berfokus pada dua pilar utama: fasilitasi ekonomi kreatif, dan penciptaan inovasi publik. Pada pilar fasilitasi ekonomi kreatif, fokusnya adalah memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengintegrasikan teknologi dalam produk dan pemasaran mereka, serta penyediaan ruang dan fasilitas bagi komunitas seni dan kreatif untuk berekspresi dan berjejaring. Sementara itu, pilar penciptaan inovasi publik diwujudkan melalui implementasi *Smart City* secara menyeluruh, di mana inovasi teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, industri kreatif dan penguatan kapasitas pelaku usaha kreatif.

Tabel 3. 14 Indikator Kinerja Prioritas Balikpapan Kota Inovatif dan Kreatif

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
Pengembangan Kawasan Industri	Peningkatan Sentra Industri Kecil Somber dan Teritip	Meningkatnya jumlah pelaku usaha di SIKS dan SIKT	SIKS = 76 IKM SIKT = 21 IKM	SIKS = 80 IKM SIKT = 24 IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Pengembangan Kawasan Industri Kariangau	Meningkatnya jumlah pelaku usaha di KIK			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Peningkatan sektor ekonomi kreatif	Penyelenggaraan ruang/event kreatif setiap tahun	Terselenggaranya ruang/event kreatif setiap tahun	6 kecamatan	6 kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Fasilitasi HKI bagi subsektor/pelaku ekonomi kreatif setiap tahun	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Kekayaan Intelektual	60	299 (kumulatif)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
Pemberdayaan UMKM	1. Penyelenggaraan Layanan UMKM Terpadu 2. Pelaksanaan Kurasi, Pendampingan, Fasilitas Registrasi dan Pelatihan UMKM 3. Kolaborasi Kemitraan Pelaku UMKM	Pertumbuhan Usaha Mikro Formal	1.25%	2.13%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	1. Peningkatan kompetensi dan apasitas SDM bagi UMKM 2. Fasilitasi sarana dan prasarana promosi untuk pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	11.14%	12.72%	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

i. Balikpapan Kota Ramah Anak

Program prioritas terkait pengembangan Balikpapan sebagai Kota Ramah Anak (KRA) bertujuan untuk memenuhi, melindungi, dan menjamin hak-hak anak secara menyeluruh serta memastikan Balikpapan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang optimal bagi semua anak. Tujuan spesifiknya adalah meraih predikat KRA tingkat utama/paripurna dan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak.

Strategi yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan Kota Ramah Anak berfokus pada lima kluster hak anak yang meliputi: Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus. Strategi utamanya adalah penguatan kelembagaan Forum Anak Balikpapan sebagai wadah partisipasi suara anak dalam perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang), serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang siaga 24 jam untuk penanganan kasus kekerasan. Selain itu, penyediaan fasilitas publik yang aman dan layak anak menjadi kunci, seperti pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di setiap kelurahan dan kawasan publik, serta memastikan sekolah di Balikpapan menjadi Sekolah Ramah

Anak (SRA) yang bebas perundungan. Aspek kesehatan diperkuat melalui pemantauan gizi dan kesehatan reproduksi remaja. Secara keseluruhan, strategi ini menekankan pada konvergensi kebijakan lintas sektor (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, PU) dan pelibatan aktif masyarakat, keluarga, dan media untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang suportif dan akuntabel terhadap hak-hak anak Balikpapan.

Tabel 3. 15 Indikator Kinerja Prioritas Balikpapan Kota Ramah Anak

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
Penguatan Layanan Perlindungan Anak Terpadu	Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	terlaksananya Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1	1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	Penguatan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak	terlaksananya Penguatan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak	50 KK	100 KK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Anak	Implementasi Sekolah Ramah Anak	Jumlah Sekolah Ramah Anak	795	823	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penguatan Fasilitas Kesehatan (RS, Puskesmas, Posyandu) yang ramah anak dan menyenangkan	terlaksananya Penguatan Fasilitas Kesehatan (RS, Puskesmas, Posyandu) yang ramah anak dan menyenangkan	29	37	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Penguatan Pendampingan AkreditasI Lembaga Pengasuhan Alternatif	terlaksananya Penguatan Pendampingan Akreditas Lembaga Pengasuhan Alternatif			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Pengembangan Ruang Publik	Pemenuhan standarisasi infrastruktur	terpenuhinya standarisasi infrastruktur	1 Lokasi	4 Lokasi	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Indikator Output	Baseline 2024	Target Akhir (2030)	Program Kepmendagri
dan Fasilitas Ramah Anak	dan fasilitas publik yang ramah anak	dan fasilitas publik yang ramah anak			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan	Penguatan Forum Anak di setiap tingkatan	terlaksananya Penguatan Forum Anak di setiap tingkatan	40	40	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

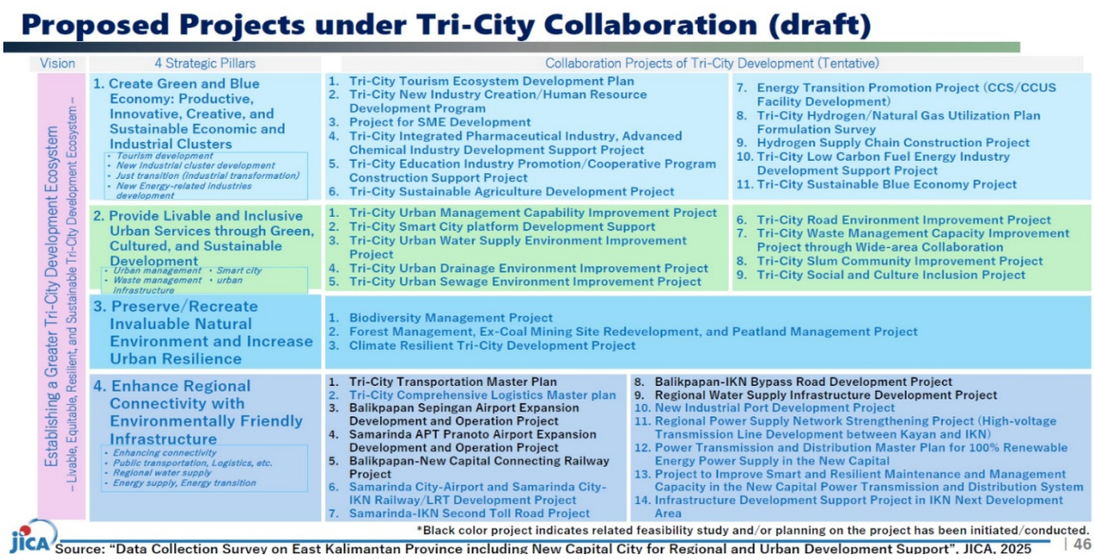
3.4.4 Projek Kolaborasi Tri-City Balikpapan

The Tri-City Development Plan (TCDP) merupakan rencana pembangunan wilayah terpadu tiga kota, yaitu Ibu Kota Negara Nusantara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda, yang akan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan perkotaan dan pedesaan yang saling melengkapi dan berkelanjutan berdasarkan tiga pilar, yaitu Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan.

Proyek ini bertujuan untuk berkontribusi dalam mendorong perencanaan daerah yang saling melengkapi dan berkelanjutan di antara ketiga kota tersebut dengan pilar, Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan.

Wilayah sasaran utama proyek ini adalah kawasan tiga kota, yaitu Ibu Kota Nasional Nusantara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

Proyek Kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) ini akan berlangsung selama 36 bulan terhitung mulai tanggal 11 Juli 2025 hingga 10 Juli 2028 yang dikomandani oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS bersama-sama dengan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kota Samarinda.



3.4.5 Strategi

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD diperlukan strategi yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Strategi pembangunan daerah disusun sebagai kerangka umum untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2030, strategi pembangunan daerah harus memperhatikan arah kebijakan nasional, capaian pembangunan sebelumnya, permasalahan dan isu strategis daerah, serta prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Strategi juga dirumuskan dengan memperhatikan integrasi antar sektor, antar wilayah, dan keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang serta dokumen perencanaan lainnya. Berikut indikasi Strategi dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Tabel 3. 16 Penyelarasan Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	pembangunan dan pengembangan kawasan industri
		pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
		pengembangan digitalisasi ekonomi daerah
		pengembangan pariwisata kota dan MICE
		- Pemberian insentif kemudahan berusaha/berinvestasi
	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Penguatan konektivitas dan sarana prasarana perhubungan antar pusat pertumbuhan ekonomi
		Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan berkelanjutan
		Pengendalian banjir
		Pengembangan konsep gedung hijau
		Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak huni dan berketahanan
	Menurunnya pengangguran	pengembangan UMKM dan penumbuhan wirausaha baru
		peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
		penguatan link and match dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA)
		Penguatan kapasitas, aksesibilitas, dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas
		penguatan rantai distribusi pangan dan kerja sama antar daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas	Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi
		pengembangan *urban farming*
	Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Penguatan sinergi antar pemangku kepentingan
		Peningkatan kapasitas Satlinmas
		Penguatan dialog dengan masyarakat
Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Penguatan pengawasan penataan ruang dan pemanfaatan tata ruang wilayah
	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Penguatan kapasitas penanggulangan bencana
		Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
SDM yang berdaya saing	SDM Balikpapan yang berkualitas	Pememenuhan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan
		Penguatan sistem pembinaan dan peningkatan kompetensi pendidik secara berkelanjutan
		pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang berkualitas
		Peningkatan partisipasi pendidikan di semua jenjang
		Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
		penguatan pendidikan inklusif dan berkarakter
		Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal
		penguatan tata kelola dan manajemen pendidikan
		Penguatan Komunitas Belajar literasi dan numerasi
		Perluasan akses layanan PAUD dan pengembangan PAUD Holistik-Integratif
		Percepatan pengembangan layanan pendidikan dasar (SD, dan SMP) dan kesetaraan
		Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam layanan pendidikan
		Pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan
		Pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana pendukung layanan kesehatan yang berkualitas
		Peningkatan kesadaran dan peran orang tua terhadap penerapan pengasuhan layak dan stimulasi dini
		Peningkatan kompetensi SDM kesehatan
		Peningkatan dan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat
		Penguatan deteksi dini dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Penguatan Literasi Masyarakat
		Pencegahan dan Penanganan Stunting
		Penguatan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (POSYANDU, RT, LPM DAN KARANG TARUNA)
		Peningkatan Edukasi dan Pengenalan Cagar Budaya
	Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Peningkatan penghargaan, toleransi, dan kerukunan antar suku dan umat beragama
		Optimalisasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan
		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan
		Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak
		Peningkatan kualitas keluarga
Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
		Peningkatan integritas birokrasi
		Penguatan kebijakan daerah yang adaptif
		Penerapan sistem merit dan profesionalitas ASN
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
		Penguatan riset dan inovasi pemerintahan beserta penerapannya
		Peningkatan Tata Kelola Kearsipan
		Penerapan strategi perencanaan pembiayaan kreatif
	Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Penguatan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi
		Penguatan penerapan satu data daerah
		Peningkatan inovasi pelayanan publik

Berikut penjelasan per masing-masing strategi sesuai tujuan dan sasaran Kota Balikpapan

Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	pembangunan dan pengembangan kawasan industri
		pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
		pengembangan digitalisasi ekonomi daerah
		pengembangan pariwisata kota dan MICE
		Pemberian insentif kemudahan berusaha/berinvestasi

Sasaran Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan merupakan sasaran pertama dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029

dalam rangka mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah upaya mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan 5 (lima) strategi antara lain:

Strategi 1: Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri difokuskan pada pengembangan Sentra Industri Kecil Somber (SIKS), Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT) serta pengembangan Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau dalam rangka mendukung percepatan hilirisasi industri dan efisiensi rantai nilai industri sebagai upaya mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan. Sentra Industri Kecil Somber fokus pada hilirisasi industri tahu dan tempe, sedangkan Sentra Industri Kecil Teritip fokus pada hilirisasi industri pengolahan hasil pertanian dan kelautan. Dalam pengembangan kawasan industri diperlukan sinergitas pembangunan antara Pemerintah Pusat, OIKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun strategi yang dilakukan meliputi:

- Pengembangan Kawasan Industri Kariangau dan pengolahan minyak (oleochemical) berbasis green industry dalam rangka mendukung hilirisasi berbasis SDA Unggulan.
- Peningkatan sarana dan prasarana SIKS dan SIKT
- Hilirisasi komoditi unggulan dan pengembangan potensi sektor ekonomi baru dan berkelanjutan
- Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan
- Penyediaan sumber daya manusia/tenaga kerja lokal antara lain melalui penyiapan tenaga kerja terampil (termasuk untuk industri hilir) dan pelatihan vokasi.

Strategi 2: Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Kota Balikpapan sebagai salah satu kota yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Kalimantan Timur, terus berupaya mendorong sektor-sektor baru yang bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui pengembangan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi dalam menciptakan produk dan layanan yang bernilai tinggi. Sektor ini meliputi berbagai sub sektor, seperti pengembangan aplikasi dan permainan (*games*/gim), desain produk, desain komunikasi visual, fashion, kriya, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, seni pertunjukan, dll. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi dapat menghasilkan produk dan layanan yang memiliki daya tarik

lokal, nasional, bahkan internasional, yang berkontribusi pada peningkatan daya saing dan perekonomian lokal.

Terdapat beberapa strategi yang melibatkan kolaborasi pentahelix yang nyata antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas/masyarakat, dan media dalam rangka meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif berkelanjutan di Kota Balikpapan:

- Mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia dengan mempertimbangkan potensi jumlah penduduk utamanya kategori generasi muda; mengintegrasikan teknologi dalam sektor-sektor strategis; serta mendukung inovasi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing daerah. Upaya peningkatan kompetensi pelaku ekonomi kreatif yang akan dilakukan meliputi sosialisasi, workshop, bimtek, diklat, *benchmarking* dan sertifikasi serta pendaftaran kekayaan intelektual atas produk/jasa/layanan yang dihasilkan.
- Pengembangan ekonomi kreatif tidak dapat dilakukan tanpa menciptakan ekosistem yang mendukung. Salah satu langkah penting adalah dengan menciptakan ruang kolaborasi bagi para pelaku industri kreatif, seperti inkubator bisnis, pusat kreativitas, dan pusat riset yang dapat menghubungkan para pelaku usaha dengan pemangku kepentingan lain, termasuk investor, pemerintah, dan lembaga pendidikan.
- Mendorong sinergi dan kemitraan dengan pelaku ekraf nasional dan internasional untuk mendukung percepatan pengembangan industri kreatif, baik melalui fasilitasi transfer teknologi, pengetahuan, dan kapasitas dalam pengelolaan industri kreatif, maupun peningkatan kualitas produk lokal dan pembukaan akses pasar.
- Memfasilitasi dukungan infrastruktur/prasarana (ruang kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif seperti pusat hub kreasi, studio fashion, kriya dan animasi, ruang pameran produk ekraf, inkubator bisnis, serta ruang kerja bersama (*co-working space*) yang dapat menghubungkan para pelaku usaha dengan pemangku kepentingan lain, termasuk investor dan lembaga pendidikan. Pengembangan aplikasi juga diperlukan untuk mendukung pelatihan, produksi dan akses pasar, sehingga dapat menumbuhkan ekosistem dan lingkungan kondusif bagi pelaku ekonomi kreatif.
- Kota Balikpapan harus memastikan tersedianya teknologi yang memadai, termasuk akses internet yang cepat dan stabil, untuk mendukung para pelaku ekonomi kreatif dalam memasarkan produk mereka ke pasar global. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga

memungkinkan para pelaku usaha kreatif untuk mengoptimalkan proses produksi, distribusi, dan pemasaran, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi.

- Mendorong pertumbuhan sub sektor unggulan/prioritas Kota Balikpapan seperti kuliner, aplikasi, fashion, kriya serta film, animasi dan video untuk menghela pertumbuhan subsektor lainnya.

Strategi 3: Pengembangan digitalisasi ekonomi daerah

Transformasi global dan percepatan revolusi industri 4.0 menuntut Pemerintah Kota Balikpapan untuk menempatkan pengembangan digitalisasi ekonomi daerah sebagai strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing. Pemanfaatan teknologi digital menjadi katalis dalam memperluas peluang ekonomi, meningkatkan efisiensi sektor usaha, serta memperkuat keterhubungan antara pelaku ekonomi lokal dengan pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

Strategi ini diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi di berbagai sektor, terutama pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, industri kreatif, serta sektor jasa dan pariwisata. Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen menciptakan ekosistem ekonomi digital yang kondusif dengan memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan literasi digital masyarakat dan pelaku usaha, serta mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.

Upaya pengembangan digitalisasi ekonomi juga dilakukan melalui penguatan sistem data dan informasi daerah dan integrasi layanan digital yang mendukung aktivitas perdagangan dan investasi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan transformasi digital ekonomi daerah. Digitalisasi diharapkan tidak hanya mendorong efisiensi dan inovasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, dan mempercepat terwujudnya Balikpapan sebagai kota cerdas yang adaptif.

Strategi 4: Pengembangan Pariwisata Kota dan MICE

Strategi pengembangan pariwisata Kota dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)* bertujuan untuk memperkuat daya saing kota di tingkat nasional dan internasional, sekaligus menciptakan multiplier effect bagi sektor lain seperti UMKM, ekonomi kreatif, dan jasa. Dengan memanfaatkan potensi geografis Balikpapan sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara dan pusat industri, pengembangan pariwisata Kota dan MICE diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas jaringan bisnis, serta membuka lapangan kerja baru yang berdampak

langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam lima tahun ke depan, pengembangan pariwisata diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada kualitas layanan dan pengalaman yang ditawarkan. Upaya ini mencakup pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi pemandu wisata, pengembangan atraksi lokal yang inovatif, serta peningkatan infrastruktur pendukung seperti hotel, pusat konvensi, dan ruang publik yang representatif. Perencanaan tersebut tentunya jangan sampai menghilangkan keunikan dari wisata kota Balikpapan, yaitu tropical forest dan binatang khusus yang hanya terdapat di kota Balikpapan bahkan dijadikan sebagai branding image dalam menarik penyelenggara MICE. Penyelenggaraan acara-acara besar juga diharapkan memberi efek berganda pada sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan UMKM, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi dengan memanfaatkan sudah terdapatnya event yang rutin diadakan setiap tahun di kota Balikpapan, dengan adanya event tahunan ini maka dapat memicu pemerintah kota dapat lebih bisa lebih aktif serta mengoptimalkan integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi badan, dinas dan asosiasi atau pengusaha pariwisata. Mengemas daya tarik yang ada di Kota Balikpapan dalam paket city tour yang menarik untuk memenuhi kebutuhan pre-post convention tour yang menjadi bagian dari wisata MICE di Kota Balikpapan. Selain itu, dengan strategi ini Balikpapan berkomitmen membangun ekosistem MICE yang profesional dan berstandar nasional, guna menarik lebih banyak event berskala regional maupun internasional serta diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga tercipta ekosistem ekonomi lokal yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan posisi Balikpapan sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara

Strategi 5: Pemberian insentif kemudahan berusaha/berinvestasi

Strategi ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Balikpapan memperluas kebijakan insentif yang dapat mendorong peningkatan investasi, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan, pengurangan biaya administrasi, serta pemberian kemudahan bagi investor yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat fungsi layanan terpadu satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memastikan proses perizinan berjalan lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi digital. Strategi pemberian insentif dan

kemudahan berusaha diharapkan mampu mendorong iklim investasi Kota Balikpapan yang semakin kompetitif, inovatif, dan ramah terhadap pelaku usaha. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah menuju pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

a. Sasaran 2: Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi
Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Penguatan konektivitas dan sarana prasarana perhubungan antar pusat pertumbuhan ekonomi
		Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan berkelanjutan
		Pengendalian banjir
		Pengembangan konsep gedung hijau
		Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak huni dan berketahanan

Sasaran meningkatnya infrastruktur yang berkualitas merupakan sasaran kedua dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah upaya mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan 5 (lima) strategi antara lain:

Strategi 1: Penguatan konektivitas perhubungan antar pusat pertumbuhan ekonomi

Penguatan konektivitas perhubungan antar pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, mempercepat mobilitas penduduk, serta mendorong pertumbuhan wilayah secara merata. Kota Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, dan jasa di Kalimantan Timur juga memiliki peran penting sebagai gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Penguatan konektivitas dilaksanakan melalui pembangunan jalan yang difokuskan pada akses kawasan industri kariangau, kawasan pariwisata serta yang menghubungkan antara kawasan Balikpapan Utara - Balikpapan Timur serta kawasan Balikpapan Utara - Balikpapan Barat. Selain itu, penguatan konektivitas dilaksanakan dengan pengembangan koridor sarana transportasi massal yang terintegrasi dengan angkutan kota untuk melayani kawasan perkotaan yang menghubungkan antar simpul transportasi dengan simpul aktivitas masyarakat seperti kawasan perdagangan, pariwisata serta pendidikan.

Strategi 2: Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan berkelanjutan

Pemenuhan akses terhadap air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan Kota Balikpapan. Strategi ini diarahkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, serta layanan sanitasi yang aman dan ramah lingkungan. Penguatan kinerja penyediaan air minum dilakukan melalui peningkatan kapasitas sistem distribusi, perluasan jaringan pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat peran PDAM sebagai penyedia utama air minum, sekaligus mendorong kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber air baku.

Pengelolaan sanitasi difokuskan pada peningkatan cakupan layanan sanitasi layak dan aman. Pemerintah Kota Balikpapan juga mendorong penerapan sistem pengelolaan air limbah domestik, peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Pendekatan berbasis masyarakat dan kolaboratif akan menjadi landasan penting dalam memastikan keberlanjutan program sanitasi di tingkat lingkungan. Strategi ini diharapkan dapat membuat seluruh masyarakat Kota Balikpapan menikmati layanan air minum dan sanitasi yang aman, merata, dan berkelanjutan

Strategi 3: Pengendalian banjir

Pengendalian banjir merupakan salah satu prioritas strategis Pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan berketahanan terhadap bencana. Kota Balikpapan menghadapi tantangan kompleks terkait alih fungsi lahan, meningkatnya air permukaan, serta keterbatasan kapasitas drainase di beberapa wilayah. Oleh karena itu, strategi pengendalian banjir diarahkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan tata kelola lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Balikpapan menempuh pendekatan terpadu dan berbasis kawasan dalam mengendalikan risiko banjir. Upaya ini meliputi pembangunan dan revitalisasi jaringan drainase perkotaan, normalisasi saluran air, serta rehabilitasi daerah tangkapan air. Pendekatan berbasis alam seperti penghijauan kawasan resapan dan pengembalian fungsi ruang terbuka hijau menjadi bagian penting dari strategi ini. Pengendalian banjir juga diperkuat melalui penataan tata ruang yang adaptif terhadap risiko bencana dan pengendalian izin pemanfaatan lahan.

Strategi 4: Pengembangan konsep gedung hijau

Pemerintah Kota Balikpapan menempatkan pengembangan konsep gedung hijau sebagai salah satu strategi penting dalam mewujudkan kota yang ramah lingkungan, efisien energi, dan berketahanan iklim. Penerapan konsep gedung hijau diarahkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap pembangunan fisik, mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga operasional bangunan. Penerapan desain arsitektur yang hemat energi, efisien dalam penggunaan air, minimalisasi limbah, serta memanfaatkan material ramah lingkungan dan teknologi bangunan cerdas diperlukan dalam perwujudan strategi ini.

Strategi ini juga ditujukan untuk mendorong partisipasi sektor swasta melalui insentif dan regulasi yang mendukung pembangunan gedung hijau di sektor komersial, perumahan, maupun industri. Pengembangan konsep gedung hijau juga dikaitkan dengan penerapan sistem sertifikasi bangunan hijau, pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya dan ventilasi alami, serta peningkatan efisiensi operasional gedung . Upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi jejak karbon dan konsumsi energi, tetapi juga menciptakan lingkungan hunian dan kerja yang sehat, produktif, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Implementasi prinsip gedung hijau diharapkan dapat menjadi transformasi menuju tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, hemat energi, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.

Strategi 5: Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak huni dan berketahanan

Strategi ini diarahkan untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang aman, terjangkau, dan dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang memadai. Strategi ini menekankan pentingnya ketahanan permukiman terhadap bencana dan perubahan iklim. Penataan kawasan permukiman juga dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepadatan penduduk, ketersediaan sarana prasarana dasar, dan kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah Kota Balikpapan mendorong program kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman layak huni dan berketahanan ini diharapkan dapat mewujudkan Kota Balikpapan yang memiliki hunian tertata, aman, sehat, dan adaptif terhadap dinamika perkotaan maupun tantangan perubahan iklim.

b. Sasaran 3: Menurunnya Pengangguran

Tujuan	Sasaran	Strategi

Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan	Menurunnya pengangguran	pengembangan UMKM dan penumbuhan wirausaha baru
		peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
		penguatan link and match dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA)
		Penguatan kapasitas, aksesibilitas, dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas

Sasaran meningkatnya menurunnya pengangguran merupakan sasaran ketiga dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah upaya mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan 4 (empat) strategi antara lain:

Strategi 1: Pengembangan UMKM dan Penumbuhan Wirausaha Baru

Strategi pengembangan UMKM dan penumbuhan wirausaha baru sebagai strategi kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan. Dalam lima tahun ke depan, Balikpapan menargetkan peningkatan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif serta lahirnya wirausaha baru yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai program, seperti pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis, fasilitasi akses permodalan, serta pendampingan usaha berbasis digital. Pemerintah juga mendorong kemitraan antara UMKM dengan sektor industri dan pasar global, agar produk lokal dapat masuk dalam rantai pasok yang lebih luas. Pemerintah Kota menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui pemberdayaan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru yang inovatif dan berdaya saing. Upaya ini diwujudkan melalui program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan yang lebih mudah, pendampingan usaha, serta fasilitasi pemasaran baik secara konvensional maupun digital. Melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, pendampingan bisnis, serta digitalisasi UMKM, strategi ini diharapkan mampu membuka peluang kerja baru, meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, dan memperluas basis ekonomi masyarakat. Penumbuhan wirausaha baru juga menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan memanfaatkan potensi Balikpapan sebagai mitra IKN. Dengan strategi ini, Balikpapan diharapkan tidak hanya mampu menekan angka pengangguran, tetapi juga menumbuhkan ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan pasar, sejalan dengan perannya sebagai mitra IKN.

Strategi 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja

Strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja Kota Balikpapan untuk periode 2025–2030 diarahkan agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Pemkot Balikpapan berfokus pada penguatan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, pelaksanaan program pemagangan di perusahaan dan UMKM, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, institusi pendidikan, dan dunia usaha untuk memastikan link and match antara kurikulum dan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, pengembangan soft skill melalui workshop karir dan pendampingan juga menjadi prioritas, termasuk penyiapan layanan bagi pekerja disabilitas. Upaya ini didukung dengan rencana kerja terstruktur, regulasi ketenagakerjaan, dan optimalisasi lembaga pelatihan kerja. Dengan strategi yang agresif dan kolaboratif ini, diharapkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 5,2 persen pada 2030 dapat tercapai melalui peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal.

Strategi 3: Penguatan Link and Match Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA)

Penguatan link and match DUDIKA menjadi salah satu strategi penting untuk menurunkan jumlah pengangguran dengan menjembatani gap antara kebutuhan industri dan keterampilan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan. Penguatan strategi link and match dimulai dengan pemetaan kebutuhan dunia usaha dan industri untuk mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dalam berbagai sektor. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, pendidikan akan dapat menyesuaikan kurikulum dengan standar yang relevan, sehingga lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja.

Penerapan strategi link and match yang efektif dapat memperkecil kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dengan menyelaraskan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, diperkuat dengan pemberian pengalaman kerja melalui magang, serta meningkatkan kualitas pelatihan dan sertifikasi kompetensi, jumlah pengangguran terbuka dapat ditekan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor industri, strategi ini tidak hanya menurunkan TPT, tetapi juga menciptakan SDM yang lebih siap dan kompetitif di dunia kerja, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Strategi 4: Penguatan Kapasitas, Aksesibilitas, dan Peluang Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Kota Balikpapan menunjukkan komitmen untuk memastikan keterbukaan akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja. Melalui peraturan tersebut Pemerintah Kota Balikpapan menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada pencari kerja penyandang disabilitas. Dalam peraturan tersebut juga mewajibkan pemberi kerja Badan Usaha Milik Daerah mempekerjakan 2 persen tenaga kerja penyandang disabilitas dan perusahaan atau pengusaha swasta mempekerjakan 1 persen tenaga kerja penyandang disabilitas.

Meskipun langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam mendukung penyandang disabilitas, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Strategi untuk menjawab tantangan ini dilakukan dengan:

- Penguatan kapasitas yang mencakup pengembangan keterampilan dan kompetensi penyandang disabilitas agar mereka siap untuk bersaing di pasar kerja. Pendidikan dan pelatihan yang berbasis keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) mereka. Penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan.
- Penguatan aksesibilitas yang mencakup kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk bekerja, seperti infrastruktur yang ramah disabilitas, perangkat bantu, transportasi, serta kebijakan yang inklusif di tempat kerja. Peningkatan aksesibilitas memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat umum.
- Perluasan peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas yang mencakup kebijakan yang mendorong perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, memberikan insentif bagi pengusaha yang mempekerjakan mereka, dan memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang di tempat kerja.
- Peningkatan kapasitas, aksesibilitas, dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas berperan sangat penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di kalangan kelompok penyandang disabilitas. Selain itu dapat juga berkontribusi pada penurunan TPT secara umum, menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan

c. Sasaran 4: Terpenuhinya Kebutuhan Pangan yang Berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi
Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan	Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas	penguatan rantai distribusi pangan dan kerja sama antar daerah
		Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi
		pengembangan *urban farming*

Sasaran meningkatnya infrastruktur yang berkualitas merupakan sasaran keempat dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah upaya mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan 3 (tiga) strategi antara lain:

Strategi 1: Penguatan Rantai Distribusi Pangan dan Kerja Sama Antar Daerah

Dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas diarahkan melalui strategi penguatan rantai distribusi pangan dan kerja sama antar daerah. Mengingat Balikpapan bukan wilayah produksi pangan utama, pemerintah kota menekankan pentingnya membangun sistem distribusi yang efisien, aman, dan terintegrasi untuk menjamin ketersediaan pangan yang stabil dan bergizi bagi seluruh masyarakat. Strategi ini mencakup peningkatan infrastruktur logistik, digitalisasi rantai pasok, serta penguatan peran pasar rakyat sebagai simpul distribusi. Selain itu, kerja sama antar daerah menjadi kunci dalam menjamin pasokan pangan, terutama melalui kemitraan dengan daerah penghasil komoditas utama di Kalimantan dan wilayah sekitarnya. Kerja sama ini mencakup mekanisme pasokan, perdagangan antarwilayah, serta pengelolaan cadangan pangan yang saling mendukung. Dengan strategi tersebut, Kota Balikpapan diharapkan mampu menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas, aman, dan bergizi bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dalam menghadapi dinamika kebutuhan dan tantangan global pada periode 2025-2029.

Strategi 2: Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi

Ketahanan pangan dan peningkatan status gizi masyarakat di Kota Balikpapan menjadi titik tekan pada strategi penguatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi. Strategi ini diarahkan untuk memastikan keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang bergizi seimbang bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Upaya penguatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawasan pangan dan gizi dilakukan melalui sinergi antara perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan, kesehatan, pertanian, sosial, dan pendidikan, serta dengan dukungan lembaga nonpemerintah dan masyarakat, sehingga penanganan kerawanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat tidak berjalan parsial. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan efektivitas koordinasi antarinstansi menjadi fokus untuk mempercepat upaya penanganan kerawanan pangan dan gizi. Penguatan koordinasi juga mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program pangan dan gizi di tingkat kelurahan hingga kota.

Strategi 3: Pengembangan *Urban Farming*

Solusi mengatasi tantangan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kota Balikpapan, maka salah satu strategi yang terus dilakukan adalah pengembangan urban farming atau Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dengan memaksimalkan lahan yang terbatas melalui pemberdayaan pertanian berbasis masyarakat yang melibatkan PKK, kelompok wanita tani (KWT), kelompok tani, dan penggiat pertanian. Strategi yang dilakukan antara lain meliputii:

- Memaksimalkan lahan pekarangan dan atap bangunan (rooftop) sebagai upaya diversifikasi pangan, menyediakan sumber pangan segar, sehat, dan terjangkau di level rumah tangga dalam rangka ketahanan pangan keluarga.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pertanian berkelanjutan
- Pelatihan dan pendampingan urban farming, dalam hal ini meliputi pertanian dan perikanan budidaya, seperti teknik pertanian modern (hidroponik, akuaponik, greenhouse, bioflok, dll), manajemen usaha, dan pemasaran serta sekolah lapang kelompok tani, pelatihan diversifikasi usaha nelayan dan pembuatan alat penangkapan ikan
- Penyediaan bantuan dan/atau fasilitasi pemanfaatan sarana/prasarana pertanian dan perikanan seperti benih, bibit, saprodi, alsintan, bioflok ataupun teknologi lainnya, termasuk melalui program Brigade Alsintan
- Hilirisasi produk unggulan pertanian

Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan pangan dan pengeluaran rumah tangga melalui konsumsi hasil panen sendiri dan meningkatkan pendapatan bila hasilnya dijual.

d. Sasaran 5: Meningkatnya Kondusivitas dan Perlindungan Sosial Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi
Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan	Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Penguatan sinergi antar pemangku kepentingan
		Peningkatan kapasitas Satlinmas
		Penguatan dialog dengan masyarakat

Sasaran meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat merupakan sasaran kelima dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah upaya mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan 3 (tiga) strategi antara lain:

Strategi 1: Penguatan sinergi antarpemangku kepentingan

Penguatan sinergi antar pemangku kepentingan di Kota Balikpapan penting dilakukan untuk mencapai terciptanya kondusivitas dan perlindungan masyarakat. Antarpemangku kepentingan meliputi pemerintah kota, sektor swasta, dan masyarakat.

Pemerintah Kota Balikpapan aktif menjalin komunikasi dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah lain dan pelaku usaha, untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan modern. Dalam sektor swasta, peran tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) perusahaan sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Kota Balikpapan mendorong peningkatan pemanfaatan CSR untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Forum CSR diharapkan dapat memperkuat hubungan antara sektor bisnis dan pemerintah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kualitas infrastruktur dan iklim investasi yang kondusif menjadi fokus penting dalam upaya menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota.

Strategi 2: Peningkatan kapasitas Satlinmas

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, diatur bahwa Wali Kota diamanatkan untuk membentuk Satgas Linmas di tingkat Kecamatan. Pada perencanaan strategis 2025-2030, Satuan Polisi Pamong Praja mendelegasikan kewenangan hingga penganggaran Satgas Linmas ke tingkat Kecamatan hingga Kelurahan. Pembagian kewenangan ini memberi kesempatan yang merata bagi seluruh Satgas Linmas di Kota Balikpapan untuk mendapatkan peningkatan kapasitas

melalui saluran-saluran penganggaran yang lebih fleksibel yang sebelumnya hanya terpusat di Satpol PP yang memiliki waktu dan SDM terbatas. Peningkatan kapasitas Satgas Linmas yang dapat dilaksanakan oleh Kecamatan maupun Kelurahan tersebut juga lebih memberi kesempatan untuk menerapkan kekhasan lokal yang berbeda perlakuannya di tiap wilayah.

Strategi 3: Penguatan dialog dengan masyarakat

Penguatan dialog dengan masyarakat merupakan langkah penting untuk membangun komunikasi efektif, memperkuat hubungan sosial, dan mendorong partisipasi aktif. Dialog yang terbuka dan inklusif memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, berdiskusi secara konstruktif, dan mencari solusi bersama yang memperkuat solidaritas dan menjaga harmoni sosial.

Dialog juga menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain, sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik dan keputusan yang demokratis. Melalui forum lintas agama, budaya, dan kelompok sosial, dialog memperkuat toleransi, kerukunan, dan rasa kebangsaan.

Strategi sasaran penguatan dialog dengan masyarakat :

- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, sehingga aspirasi dan kebutuhan warga dapat terserap dengan baik dan menjadi dasar kebijakan yang inklusif dan responsif.
- Membangun jejaring komunikasi yang kuat antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi sosial, untuk memperkuat kebersamaan, toleransi, dan kerukunan sosial.
- Menciptakan ruang dan forum dialog yang aman dan konstruktif, baik formal maupun informal, yang dapat menampung berbagai pandangan dan menekan potensi konflik sosial sejak dini.
- Penguatan kapasitas literasi sosial, politik, dan budaya masyarakat melalui dialog sebagai media edukasi agar warga lebih sadar hak dan kewajibannya serta dapat berperan aktif secara bertanggung jawab dalam pembangunan komunitas.
- Pengarusutamaan nilai kearifan lokal, moderasi beragama, dan budaya inklusif sebagai landasan dialog demi memperkuat harmonisasi sosial yang berkelanjutan.
- Pemberdayaan masyarakat secara sosial-ekonomi yang terkoneksi dengan fungsi dialog sebagai fasilitator kerja sama antar kelompok masyarakat dan pemerintah untuk kesejahteraan bersama

e. Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi
Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Penguatan pengawasan penataan ruang dan pemanfaatan tata ruang wilayah

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup merupakan sasaran keenam dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung tujuan lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim. Berikut adalah upaya mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan 2 (dua) strategi antara lain:

Strategi 1: Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, selain itu juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran, deforestasi dan perubahan iklim. Sebagai bentuk pengendalian dalam perlindungan lingkungan tersebut diperlukan arahan kebijakan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang secara langsung juga akan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Balikpapan.

Strategi penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

a. Penguatan Koordinasi dan Tata Kelola
    - Memperkuat koordinasi antara berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan
    - Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di dalam pengelolaan lingkungan, termasuk akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik
    - Mengembangkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat
    - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan melalui program edukasi dan sosialisasi
    - Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, pemantauan dan pelestarian lingkungan
    - Memberdayakan komunitas lokal untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

c. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan

- Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam berbagai sektor industri dan kegiatan ekonomi
- Melakukan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan energi untuk mengurangi dampak lingkungan
- Menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif untuk mengurangi untuk mengurangi pencemaran

d. Penegakan Hukum yang Tegas

- Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan
- Menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku pelanggaran lingkungan
- Menerapakn sanksi yang efektif bagi pelanggar hukum lingkungan

e. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

- Melakukan upaya konservasi sumber daya alam, termasuk hutan, lahan basah dan keanekaragaman hayati
- Memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem
- Melindungi ekosistem penting seperti mangrove dan terumbu karang

f. Peningkatan Kapasitas

- Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparat pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan
- Memperkuat kelembagaan yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- Mendukung penelitian dan pengembangan untuk mencari solusi inovatif dalam pengelolaan lingkungan

Strategi 2: Penguatan pengawasan penataan ruang dan pemanfaatan tata ruang wilayah

Penguatan pengawasan terhadap penataan ruang dan pemanfaatan tata ruang wilayah di Kota Balikpapan merupakan langkah strategis yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan di Kota Balikpapan. Kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, menjadikan Kota Balikpapan yang berbatasan langsung berpotensi menghadapi tekanan tinggi dari berbagai aktivitas pembangunan infrastruktur, permukiman, dan industri. Tanpa pengawasan yang ketat dan penegakan aturan yang konsisten, risiko terjadinya penyimpangan terhadap rencana tata ruang sangat besar, yang pada akhirnya dapat menimbulkan degradasi lingkungan, konflik lahan, serta ketimpangan akses ruang bagi Masyarakat di Kota Balikpapan.

Strategi penguatan pengawasan ini dimulai dengan memperjelas dan mempertegas dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai landasan utama pembangunan kota. Seluruh perangkat daerah yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama dan menjalankan fungsi koordinasi yang efektif, agar setiap izin pemanfaatan ruang diberikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Integrasi sistem informasi geospasial menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi dan akurasi pengawasan, memungkinkan pemantauan penggunaan ruang dilakukan secara *real-time* dan berbasis data.

Selain itu, pengawasan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Pelibatan aktif masyarakat, akademisi, dan organisasi sipil perlu menjadi bagian dari sistem pengawasan partisipatif. Kanal pelaporan publik atas dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang dibuka selebar mungkin, didukung dengan mekanisme tindak lanjut yang responsif dan terbuka. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan proses pengawasan menjadi lebih inklusif

Penegakan hukum juga harus menjadi aspek utama dalam strategi ini. Setiap bentuk pelanggaran tata ruang, mulai dari pembangunan di kawasan lindung, reklamasi ilegal, hingga penyalahgunaan izin, harus ditindak secara tegas dan konsisten. Lebih lanjut lagi, penguatan pengawasan juga harus berorientasi ke depan, dengan mendorong penerapan prinsip tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim, risiko bencana, serta dinamika sosial ekonomi. Kota Balikpapan perlu memastikan bahwa penataan ruangnya tidak hanya legal dan terstruktur, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap ekosistem kritis, menjamin akses yang adil terhadap ruang, serta mendukung kualitas hidup yang nyaman bagi masyarakat secara berkelanjutan.

f. Sasaran 7: Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi
Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Penguatan kapasitas penanggulangan bencana
		Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Sasaran meningkatnya ketangguhan terhadap bencana merupakan sasaran keenam dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung tujuan lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim. Berikut adalah upaya mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan 2 (dua) strategi antara lain:

Strategi 1: Penguatan kapasitas penanggulangan bencana

Letak geografis Kota Balikpapan yang berada di kawasan pesisir dan rawan terhadap berbagai jenis bencana seperti banjir, tanah longsor, dan bencana terkait perubahan iklim, memerlukan penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan daerah. Penguatan kapasitas penanggulangan bencana melibatkan perbaikan dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, hingga kolaborasi antar pihak terkait. Strategi pertama yang dapat diimplementasikan adalah memperkuat sistem peringatan dini yang berbasis teknologi, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana. Adapun upaya lain yang harus dikembangkan adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, terutama bagi petugas penanggulangan bencana dan masyarakat umum. Program pelatihan ini dapat mencakup teknik evakuasi yang efektif, pengetahuan tentang pengelolaan bencana, serta keterampilan untuk merespons situasi darurat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga harus diperkuat untuk memastikan adanya dukungan logistik dan sumber daya saat terjadi bencana.

Strategi 2: Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Strategi Adaptasi dengan memanfaatkan ekosistem untuk melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim seperti perlindungan mangrove, mengelola sumber daya air secara bijaksana termasuk konservasi air dan pembangunan infrastruktur yang tahan banjir, diversifikasi tanaman dan penggunaan varietas unggul, membangun sistem peringatan dini untuk kejadian cuaca ektrem, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan iklim dan membangun infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim.

Strategi Mitigasi dengan melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca, beralih dari energi fosil ke nergi terbarukan (surya, angin dll) untuk mengurangi emisi karbon, menggunakan energi secara lebih efisien di berbagai sektor untuk mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan, menerapkan sistem pengelolan sampah yang baik, melakukan penanaman pohon dan menjaga kawasan resapan air untuk menyerap karbondioksida.

g. Sasaran 8: Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Tujuan	Sasaran	Strategi
SDM yang berdaya saing	SDM Balikpapan yang berkualitas	Pememenuhan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Penguatan sistem pembinaan dan peningkatan kompetensi pendidik secara berkelanjutan
		pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang berkualitas
		Peningkatan partisipasi pendidikan di semua jenjang
		Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
		penguatan pendidikan inklusif dan berkarakter
		Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal
		penguatan tata kelola dan manajemen pendidikan
		Penguatan Komunitas Belajar literasi dan numerasi
		Perluasan akses layanan PAUD dan pengembangan PAUD Holistik-Integratif
		Percepatan pengembangan layanan pendidikan dasar (SD, dan SMP) dan kesetaraan
		Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam layanan pendidikan
		Pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan
		Pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana pendukung layanan kesehatan yang berkualitas
		Peningkatan kesadaran dan peran orang tua terhadap penerapan pengasuhan layak dan stimulasi dini
		Peningkatan kompetensi SDM kesehatan
		Peningkatan dan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat
		Penguatan deteksi dini dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular
		Penguatan Literasi Masyarakat
		Pencegahan dan Penanganan Stunting
		Penguatan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (POSYANDU, RT, LPM DAN KARANG TARUNA)
		Peningkatan Edukasi dan Pengenalan Cagar Budaya

Sasaran SDM Balikpapan yang berkualitas merupakan sasaran kedelapan dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung tujuan SDM yang berdaya saing. Berikut adalah upaya mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan 22 (dua puluh dua) strategi antara lain:

Strategi 1: Pemenuhan dan Pemerataan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan

Pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan upaya untuk memastikan bahwa semua satuan pendidikan memiliki jumlah dan kualitas guru serta tenaga kependidikan yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi semua peserta didik. Ini mencakup penataan dan distribusi guru yang adil, serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan di pemerintah daerah merupakan peran strategis untuk menjamin mutu pendidikan yang merata dan berkualitas. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyerap lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK), khususnya untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayahnya, termasuk daerah terpencil dan 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Strategi nyata pemerintah daerah meliputi:

- Menyerap dan menempatkan guru profesional bersertifikat secara merata dengan kebijakan distribusi yang diatur, seperti penggunaan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk mengurangi kesenjangan guru antar sekolah.
- Memberikan insentif, seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), untuk meningkatkan motivasi dan retensi guru, terutama di daerah terpencil.
- Meningkatkan kapabilitas guru melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi sistematis secara berkelanjutan.
- Menjalin kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk optimalisasi program nasional dan penggunaan dana khusus pendidikan.
- Mendukung pendidikan lanjutan guru hingga jenjang S2 dan S3 melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.
- Menggunakan data dan perencanaan strategis berbasis kebutuhan riil daerah untuk memastikan penempatan guru tepat sasaran

Strategi 2: Penguatan Sistem Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pendidikan Secara Berkelanjutan

Penguatan sistem pembinaan dan peningkatan kompetensi pendidik secara berkelanjutan adalah hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik dan relevansi kurikulum yang terus berkembang. Beberapa langkah yang dapat diambil Pemerintah Kota Balikpapan untuk mencapai hal ini antara lain:

a. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

- Pelatihan Profesional: Menyediakan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk para pendidik, termasuk program pelatihan di luar negeri dan kerjasama internasional.

- Workshop dan Seminar: Secara rutin mengadakan workshop dan seminar yang memberikan pemahaman mendalam tentang pedagogi terkini dan strategi mengajar yang lebih inovatif.

b. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi
   - Kurikulum yang Fleksibel: Menyusun kurikulum yang adaptif dan berbasis kompetensi untuk memenuhi kebutuhan zaman. Hal ini juga dapat mencakup integrasi teknologi dalam pendidikan.
   - Evaluasi dan Pembaruan Kurikulum: Secara teratur mengevaluasi dan memperbaharui kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran
   - E-Learning: Memperkenalkan platform pembelajaran digital yang memudahkan pendidik untuk mengakses materi pembelajaran, serta berinteraksi dengan rekan sejawat dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan.
   - Peningkatan Keterampilan Digital: Meningkatkan keterampilan digital pendidik melalui pelatihan penggunaan perangkat dan aplikasi pendidikan yang inovatif.

d. Mentoring dan Pembinaan Profesional
   - Mentor bagi Guru Baru: Menyediakan program mentoring untuk guru-guru baru dengan melibatkan pendidik yang lebih berpengalaman. Ini tidak hanya membantu guru baru dalam adaptasi, tetapi juga memperkuat komunitas pembelajaran.
   - Pembinaan Berkelanjutan: Pembinaan yang melibatkan evaluasi dan pengembangan secara berkala, termasuk coaching bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka.

e. Peningkatan Kesejahteraan Guru
   - Insentif dan Penghargaan: Memberikan insentif yang layak, baik dalam bentuk tunjangan, penghargaan, atau pengakuan lainnya bagi pendidik yang berprestasi dalam pengembangan diri dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
   - Keseimbangan Kerja dan Kehidupan: Menciptakan kondisi kerja yang mendukung kesejahteraan guru, sehingga mereka dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan memiliki kualitas hidup yang baik.

f. Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat
   - Kerja Sama Lintas Sektor: Mengembangkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidik melalui program-program kolaboratif.
   - Riset dan Pengembangan: Mendukung riset yang berfokus pada pengembangan pendidikan dan profesionalisme pendidik, sehingga

mereka bisa selalu terdepan dalam penerapan metodologi dan teknologi terbaru.

Strategi 3: Pemenuhan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan yang Berkualitas

Kota Balikpapan, meskipun sudah relatif maju dibandingkan daerah lainnya, masih perlu memastikan akses pendidikan yang berkualitas merata di semua kawasan, termasuk daerah-daerah yang lebih terpencil. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di Balikpapan:

a) Penyediaan Infrastruktur Pendidikan yang Memadai
   - Renovasi dan Pembangunan Sekolah: Beberapa sekolah di Balikpapan mungkin sudah berusia tua atau kurang memadai. Pemerintah daerah perlu fokus pada renovasi dan pembangunan sekolah baru, terutama di kawasan yang padat penduduk atau daerah pinggiran yang mungkin belum memiliki fasilitas pendidikan yang layak.
   - Sekolah Ramah Lingkungan: Memastikan bangunan sekolah memadai dan ramah lingkungan, dengan memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan alami, dan penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman.

b) Peningkatan Akses Teknologi dan Infrastruktur Digital
   - Penyediaan Internet Berkecepatan Tinggi: Balikpapan yang merupakan kota besar harus memastikan bahwa setiap sekolah memiliki akses internet yang cepat dan stabil, mendukung penggunaan teknologi dalam proses belajar-mengajar, terutama untuk mata pelajaran berbasis digital.
   - Perangkat Pembelajaran: Menyediakan komputer, tablet, atau perangkat pembelajaran lainnya yang memadai, sehingga setiap siswa dapat mengakses informasi dan materi pembelajaran dengan lebih mudah.
   - E-Learning dan Platform Pembelajaran: Mengembangkan dan memanfaatkan platform pembelajaran daring yang dapat diakses oleh semua siswa, terutama di masa-masa darurat seperti pandemi COVID-19 atau untuk pembelajaran jarak jauh.

c) Pemerataan Akses Pendidikan di Daerah Pinggiran
   - Membangun Infrastruktur di Kawasan Terpencil: Walaupun Balikpapan merupakan kota yang berkembang, ada daerah pinggiran yang mungkin belum sepenuhnya terjangkau pendidikan yang berkualitas. Pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih untuk membangun sekolah atau pusat pembelajaran di wilayah ini.

- Transportasi Pendidikan: Memberikan sarana transportasi gratis atau subsidi bagi siswa yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota, agar mereka dapat mengakses pendidikan dengan lebih mudah.
- Membangun Sekolah Khusus di Kawasan Terpencil: Mendirikan sekolah atau pusat pendidikan di daerah yang minim sarana pendidikan dengan kualitas yang setara dengan sekolah di pusat kota.

d) Fasilitas Penunjang Pembelajaran yang Memadai
- Laboratorium dan Ruang Praktikum: Mengutamakan pembangunan atau perbaikan laboratorium sains, komputer, dan ruang keterampilan lainnya di sekolah-sekolah, untuk mendukung pembelajaran berbasis keterampilan.
- Perpustakaan Digital dan Fisik: Menyediakan perpustakaan yang lengkap dengan koleksi buku-buku yang relevan serta fasilitas untuk pembelajaran digital. Perpustakaan yang baik dapat menjadi pusat pembelajaran tambahan bagi siswa dan guru.
- Fasilitas Olahraga dan Seni: Menyediakan ruang dan fasilitas untuk kegiatan ekstrakurikuler, seperti olahraga, musik, dan seni. Hal ini penting untuk mendukung pengembangan potensi siswa di luar akademik.

e) Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Guru
- Pelatihan Penggunaan Teknologi untuk Guru: Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi guru-guru di Balikpapan, khususnya dalam penggunaan teknologi pembelajaran modern. Hal ini bisa dilakukan dengan menggandeng lembaga pendidikan atau perusahaan teknologi untuk memberi pelatihan.
- Pelatihan dan Pengembangan Profesionalisme Guru: Mendorong guru untuk mengikuti program pengembangan profesional, workshop, seminar, atau kursus yang relevan dengan tren pendidikan terkini.

f) Kerja Sama dengan Sektor Swasta dan Masyarakat
- Program CSR dari Perusahaan: Kota Balikpapan sebagai pusat industri dapat melibatkan sektor swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mendukung pembangunan sarana pendidikan, seperti penyediaan alat belajar, perbaikan fasilitas sekolah, atau pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi.
- Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan Tinggi: Balikpapan dapat menjalin kerja sama dengan universitas atau lembaga pendidikan tinggi untuk menyediakan pelatihan bagi guru atau fasilitas pembelajaran lainnya. Ini juga membuka peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

g) Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran Jarak Jauh

- Platform Pembelajaran yang Merata: Mengembangkan platform pembelajaran yang memungkinkan siswa di Balikpapan untuk tetap belajar secara daring, baik untuk sekolah dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.
- Pelatihan bagi Orang Tua: Untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, penting untuk melibatkan orang tua dalam memahami bagaimana cara mendampingi anak-anak mereka menggunakan teknologi untuk belajar.

h) Monitoring dan Evaluasi
- Audit Sarana dan Prasarana: Melakukan audit rutin terhadap sarana dan prasarana pendidikan di Balikpapan untuk memastikan bahwa fasilitas yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan dan standar pendidikan.
- Evaluasi Kinerja Sekolah: Pemerintah kota perlu memastikan bahwa kualitas pendidikan di setiap sekolah dievaluasi secara berkala, dengan melibatkan guru, siswa, dan orang tua dalam proses evaluasi.

i) Keterlibatan Pemerintah Daerah dan Pusat
- Sinergi Pemerintah Kota dan Provinsi: Pemerintah daerah Balikpapan perlu bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mendapatkan anggaran yang cukup dalam membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan.
- Alokasi Anggaran untuk Pendidikan: Memastikan adanya alokasi anggaran yang cukup dari pemerintah kota untuk pemenuhan dan pemerataan fasilitas pendidikan.

j) Kampanye Kesadaran Masyarakat
- Meningkatkan Kesadaran Tentang Pendidikan: Mengadakan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang berkualitas, termasuk pentingnya peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka

Strategi 4: Peningkatan Partisipasi Pendidikan di Semua Jenjang

Sasaran strategis peningkatan partisipasi pendidikan di semua jenjang penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Balikpapan yang cerdas dan sehat. Rata-rata lama sekolah (RLS) saat ini mencapai 10,92 tahun atau setara kelas 1 SMA, masih di bawah standar wajib belajar 13 tahun. Angka partisipasi kasar (APK) dan murni (APM) di pendidikan menengah juga belum mencapai 100 persen, menunjukkan masih ada penduduk yang belum terjangkau pendidikan menengah dan atas.

Strategi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye, memberikan beasiswa bagi keluarga kurang mampu, memperbaiki kualitas dan fasilitas pendidikan, memanfaatkan teknologi pembelajaran jarak jauh, meningkatkan profesionalisme guru, serta melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Monitoring dan evaluasi rutin juga

diperlukan untuk memastikan capaian yang tepat sasaran. Dengan langkah ini, diharapkan partisipasi pendidikan meningkat hingga mencapai target wajib belajar 13 tahun serta meningkatkan kualitas SDM Kota Balikpapan.

Strategi 5: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Sasaran strategis peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan di semua jenjang pendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Kota Balikpapan yang cerdas dan sehat. Penguatan pengelolaan tenaga pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi yang modern dan adaptif, pemenuhan kebutuhan tenaga secara memadai, serta peningkatan proporsi dosen berkualifikasi Strata-3. Berbagai upaya dilaksanakan seperti, penggunaan teknologi digital dan media pembelajaran inovatif juga diperkuat, disertai dukungan fasilitas dan kesejahteraan tenaga pendidik agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, Kota Balikpapan berkomitmen menyiapkan tenaga pendidik yang profesional dan adaptif sebagai fondasi sistem pendidikan unggul yang menciptakan sumber daya manusia berdaya saing tinggi.

Strategi 6: penguatan pendidikan inklusif dan berkarakter

Saat ini, Kota Balikpapan belum begitu menerapkan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada semua siswa tanpa terkecuali. Untuk itu, berikut 4 cara meningkatkan penyelenggaran pendidikan inklusi dapat dilakukan melalui:

a) Menyadari hak-hak disabilitas
   Sampai saat ini, orang dengan disabilitas masih mengalami stigma, stereotip, dan diskriminasi dari masyarakat. Kondisi ini menghambat mereka dalam meraih haknya, bahkan hanya untuk sekadar hidup dengan nyaman seperti orang pada umumnya. Oleh karena itu, kita perlu menyadari betapa pentingnya hak-hak orang dengan disabilitas. Hal ini hanyalah sebuah langkah awal untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Sebab, anak-anak dengan disabilitas dan keluarganya, sering mengalami hambatan dalam mendapatkan berbagai hak dasarnya sebagai manusia di masyarakat. Salah satunya adalah hak dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dengan memahami bahwa anak-anak dengan disabilitas juga berhak mendapatkan pendidikan, akses mereka akan lebih terbuka karena semakin banyak pihak yang mendukung akan penyelenggaraan pendidikan inklusi.
b) Memastikan tenaga pendidik dilatih dengan baik

Cara meningkatkan pendidikan inklusi selanjutnya adalah dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Sebagai figur utama yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan system pendidikan, guru sangat perlu dan mampu memahami konsep akan keberagaman peserta didik, pendidikan inklusi, maupun sistem layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan bagi setiap peserta didik. Hal ini sangat penting agar Pendidikan inklusi terlaksana dengan tepat.

Lingkungan belajar yang inklusif tidak hanya akan berdampak kepada terhapusnya sistem pendidikan yang diskriminasi namun juga siswa dari populasi umum dapat diperkenalkan dan dibesarkan pada lingkungan yang beragam dan tidak eksklusif karena hal ini mencerminkan realitas sesungguhnya di masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas diharapkan tenaga pendidik mampu mendidik anak-anak sesuai dengan kebutuhannya, dan menerapkan pembelajaran yang beragam serta mendorong para orang tua untuk menyekolahkan anak di Sekolah Inklusi, serta mendorong para pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan yang mendukung penyelenggaran Pendidikan inklusi serta kebijakan-kebijakan yang dapat menghapuskan diskriminasi.

c) Menciptakan ruang aman bagi siswa

Layaknya orang dewasa, siswa juga membutuhkan waktu untuk membangun koneksi dengan teman-temannya. Salah satu caara yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian membuat permainan yang mendorong mereka untuk menyuarakan pendapatnya, terkait peristiwa yang baru terjadi ataupun hal-hal baru yang dipelajari. Dengan demikian, para siswa akan mendengarkan dan menghargai opini satu sama lain, serta terlibat dalam percakapan yang meningkatkan empati mereka. Kedua hal itulah yang dibutuhkan untuk membangun inklusivitas, dengan memperkuat kemampuan sosial dan emosional siswa—sekaligus menciptakan interaksi yang positif.

d) Melibatkan peran seluruh komunitas

Meningkatkan pendidikan inklusi tak lepas dari peran kolektif, yakni keterlibatan seluruh pihak dari berbagai komunitas. Seperti pendidik mainstreaming, pekerja sosial, orang tua, dan siswa, untuk bekerja sama dalam perancangan, penyampaian, dan pemantauan pendidikan. Dari hal tersebut diharapkan dapat membingkai pendidikan inklusi sebagai tanggung jawab bersama. Sebab, inklusivitas dapat direalisasikan apabila semua pihak memberikan dukungan

Strategi 7: Pengembangan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal

Sasaran strategis SDM yang cerdas dan sehat diwujudkan melalui pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai budaya, tradisi, dan pengetahuan daerah ke dalam pembelajaran. Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal ini bertujuan mendorong pola hidup sehat sesuai konteks daerah, mengasah kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial, serta membentuk karakter peserta didik yang berakar pada budaya setempat. Pendidikan diarahkan untuk menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta menjadi agen pelestarian budaya dan penggerak pembangunan daerah. Integrasi kearifan lokal ke dalam mata pelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat sesuai konteks budaya setempat, mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan rasa bangga terhadap identitas daerah. Dengan pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal ini, pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan modern, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang relevan, berakar pada budaya lokal, serta mampu beradaptasi dengan tantangan global. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing, yang mampu menjadi agen pelestarian budaya sekaligus motor penggerak pembangunan daerah

Strategi 8: Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan

Penguatan tata kelola dan manajemen pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan di Kota Balikpapan berjalan dengan efektif, efisen dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Strategi tata kelola pendidikan mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program pendidikan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. selain itu perlu ada penerapan sistem pengendalian yang efektif untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Dalam penguatan tata kelola pendidikan penting pula untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efekti dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Partisipasi aktif dari masyarakat, siswa, orang tua dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam pengawasan mutu pendidikan.

Manajemen pendidikan di Kota Balikpapan bertujuan untuk merencanakan pendidikan yang merata, bermutu, akuntabel, dan juga meningkatkan mutu pendidikan. Aspek yang menjadi perhatian pada manajemen pendidikan adalah penyusunan rencana pendidikan yang terarah sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah, mengatur sumber daya pendidikan yang efektif

melaksanakan pendidikan, melakukan pemantauan dan evaluasi secata berkala untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana.

Strategi 9: Penguatan Ekosistem Pembelajaran Literasi dan Numerasi

Sasaran strategis penguatan ekosistem pembelajaran literasi dan numerasi merupakan salah satu langkah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Balikpapan yang cerdas dan sehat. Kemampuan Literasi dan numerasi adalah dua kompetensi dasar yang menjadi fondasi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, dalam hasil capaian rapor pendidikan terdapat indikator-indikator kunci yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengevaluasi kualitas dan capaian pendidikan di bawah kewenangan kabupaten/kota maupun provinsi. Salah satu indikator utama adalah kemampuan literasi dan numerasi murid dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) setara. Dari hasil evaluasi rapor tersebut, di Kota Balikpapan khususnya pada jenjang SD Agama dan SD setara, nilai capaian kemampuan literasi dan numerasi murid masih tergolong “Sedang”. Kondisi ini menandakan perlunya perhatian yang lebih serius dalam upaya peningkatan kemampuan dasar pada jenjang pendidikan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan penguatan strategi pembelajaran yang lebih adaptif dan inovatif, serta penyediaan guru pendamping yang profesional dan terlatih secara khusus. Selain itu, fasilitas pendidikan inklusif yang memadai harus disediakan agar seluruh peserta didik, tanpa terkecuali, dapat memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas. Perbaikan menyeluruh terhadap aspek inklusivitas dan dukungan pembelajaran menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas di Kota Balikpapan. Dengan demikian, penguatan ekosistem pembelajaran literasi dan numerasi tidak hanya akan meningkatkan kompetensi dasar peserta didik, tetapi juga turut mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berkontribusi optimal dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan

Strategi 10: Perluasan Akses Layanan PAUD dan Pengembangan PAUD Holistik-Integratif

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah pondasi pendidikan yang menentukan tumbuh kembang anak di masa emas (golden age, 0–6 tahun). Pemerintah menargetkan agar setiap anak mendapat layanan pendidikan berkualitas sejak dini, bukan hanya untuk kesiapan sekolah dasar, tetapi juga untuk perkembangan fisik, kognitif, sosial-emosional, moral, dan spiritual.

Sasaran ini memiliki dua fokus utama. Fokus pertama yaitu Perluasan Akses Layanan PAUD yang bertujuan Meningkatkan jumlah anak usia dini yang mendapatkan layanan PAUD, baik formal (TK, RA, KB) maupun nonformal (TPA,

SPS) dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Fokus kedua yaitu Pengembangan PAUD Holistik-Integratif (PAUD HI) yang bertujuan memberikan layanan PAUD yang tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga kesehatan, gizi, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak secara terpadu.

Konsep PAUD HI mengintegrasikan layanan dari berbagai sektor pendidikan, kesehatan, sosial, perlindungan anak dengan meilbatkan Dinas Pendidikan, Puskesmas/Posyandu, Dinas Sosial, Lembaga Pendidikan Anak, Masyarakat dan orang tua. Adapun komponen PAUD HI meliputi:

- Layanan pendidikan dengan memberikan pembelajaran sesuai tahap perkembangan anak;
- Layanan kesehatan dan gizi dengan pemberian imunisasi, pemantauan tumbuh kembang dan pemberian makanan bergizi;
- Perlindungan anak dengan aksi pencegahan terhadap kekerasan, eksloitasi dan penelantaran;
- Pengasuhan dengan memberikan edukasi orang tua dan keluarga untuk stimulasi tumbuh kembang anak;
- Kesejahteraan anak dengan memberikan dukungan bagi anak dari keluarga miskin atau rentan.

Strategi ini sangat terkait dengan kebijakan nasional dan didukung oleh regulasi Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nsaional PAUD dan kebijakan PAUD HI dari Bappenas. Dampak yang diharapkan dari sasaran ini yaitu lebih banyak anak usia dini yang terlayani PAUD, kesehatan anak lebih terpantau dan mendapat gizi lebih baik, anak siap masuk SD baik secara akademis maupun sosial-emosional, mampu meningkatkan kualitas SDM, serta mengurangi kesenjangan pendidikan.

Strategi 11: Percepatan Pengembangan Layanan Pendidikan Dasar (PAUD, TK, SD, SMP) dan Kesetaraan

Strategi Percepatan Pengembangan Layanan Pendidikan Dasar (PAUD, TK, SD, dan SMP) dan Kesetaraan merupakan langkah kunci dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan yakni Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Sehat. Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas, pemerataan, serta keterjangkauan layanan pendidikan dasar sebagai fondasi utama pembentukan karakter dan kompetensi generasi muda Balikpapan.

Upaya percepatan pengembangan pendidikan dasar diarahkan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses yang setara terhadap layanan pendidikan, mulai dari tingkat pra-sekolah (PAUD dan TK) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Pemerintah Kota Balikpapan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai, pemerataan tenaga pendidik, serta penguatan kurikulum berbasis karakter dan literasi digital. Selain itu, pengembangan

pendidikan kesetaraan menjadi bagian penting dalam strategi ini, guna memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Program pendidikan kesetaraan diarahkan untuk mendukung peningkatan keterampilan dan produktivitas masyarakat, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi daerah.

Percepatan layanan pendidikan dasar dan kesetaraan juga selaras dengan upaya menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi murni dan kasar, serta memperluas akses terhadap pendidikan inklusif. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan capaian indikator pendidikan, tetapi juga membentuk SDM Balikpapan yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter sehat, baik secara intelektual maupun sosial, sebagai fondasi keberlanjutan pembangunan kota.

Strategi 12: Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Layanan Pendidikan

Dalam proses pencapaian implementasi kebijakan pendidikan nasional dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan (standar pendidikan) di Kota Balikpapan, hasil observasi dan pendalaman masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi, salah satunya masih rendahnya kompetensi Guru khususnya didalam penguasaan Teknologi Informasi, padahal kemampuan tersebut untuk saat ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar. Dalam inovasi pembelajaran, terutama penerapan Kurikulum Merdeka Belajar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan terus berupaya memajukan pendidikan di semua tingkat, dari TK hingga SMP. Sebagian besar guru telah menggunakan aplikasi teknologi meskipun akses jaringan dan data masih menjadi kendala seperti fasilitas layanan internet di sekolah dari pemerintah kota belum mencukupi, dan belum optimal menjadi penghambat pengembangan profesionalitas guru dan siswa dalam berkreasi. Meskipun mayoritas guru aktif telah menggunakan teknologi dalam pembelajaran literasi, namun hanya sedikit yang merasa yakin dalam mengadopsi kecerdasan buatan (AI) dan Digital Literasi dalam kelas mereka. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan teknologi pendukung, pelatihan dalam penggunaan AI dan Digital Literasi, serta penemuan aplikasi digital yang tepat guna untuk memperkuat pembelajaran literasi di kelas. Tema kurikulum Merdeka turut mendorong integrasi teknologi yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini kualitas guru, dapat ditingkatkan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran untuk memudahkan guru dan siswa dalam pembelajaran.

Strategi 13: Pemenuhan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan

Pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor strategis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tenaga kesehatan memiliki peran sentral dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa jumlah dan distribusi tenaga kesehatan di daerah belum sepenuhnya memenuhi standar ketenagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data terakhir, jumlah tenaga kesehatan yang tersedia, meliputi dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga farmasi, tenaga kesehatan lingkungan, dan tenaga kesehatan lainnya, belum seimbang dengan kebutuhan riil di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di beberapa wilayah masih di bawah standar nasional, sedangkan distribusi tenaga cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan daerah. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Permasalahan utama yang dihadapi antara lain terbatasnya formasi ASN tenaga kesehatan, tingginya angka rotasi dan mutasi yang belum sepenuhnya berbasis analisis kebutuhan, ketidaksesuaian kualifikasi dan kompetensi tenaga kesehatan dengan kebutuhan pelayanan, serta minimnya insentif dan fasilitas penunjang bagi tenaga yang bertugas di daerah sulit.

Arah kebijakan daerah dalam periode RPJMD ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar ketenagaan fasilitas kesehatan dan mendorong distribusi yang merata di seluruh wilayah. Strategi yang akan ditempuh meliputi: (1) perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan berbasis analisis beban kerja dan standar pelayanan, (2) rekrutmen dan penempatan tenaga kesehatan melalui formasi ASN, PPPK, penugasan khusus, dan pemanfaatan program Nusantara Sehat, (3) pemberian insentif dan penyediaan fasilitas pendukung bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan, (4) kemitraan dengan perguruan tinggi kesehatan untuk penempatan lulusan baru, serta (5) pengembangan pemanfaatan teknologi telemedicine untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah kekurangan tenaga spesialis.

Keberhasilan pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan akan diukur melalui indikator kinerja utama, antara lain rasio dokter, perawat, dan bidan terhadap jumlah penduduk, persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketenagaan, serta persentase tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan perbatasan yang sesuai kebutuhan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan dapat terwujud, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan daerah secara optimal.

Strategi 14: Pemenuhan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan Kesehatan yang Berkualitas

Sasaran strategis pemenuhan dan pemerataan sarana serta prasarana pendukung layanan kesehatan yang berkualitas merupakan bagian penting dalam mendukung tujuan pembangunan daerah, yakni dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Balikpapan yang cerdas dan sehat. Pembangunan kesehatan memegang peran strategis dalam meningkatkan kualitas SDM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa upaya pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan. Berdasarkan dokumen Grand Desain Kesehatan Kota Balikpapan, terdapat rencana aksi jangka menengah yang menjadi pedoman pembangunan sektor kesehatan. Secara umum, jumlah fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan sudah mencukupi, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat rujukan. Kota Balikpapan memiliki 13 rumah sakit, terdiri dari 11 rumah sakit umum dan 2 rumah sakit bersalin. Dari enam kecamatan, hanya Kecamatan Balikpapan Barat yang belum memiliki rumah sakit umum, namun kecamatan ini memiliki rumah sakit bersalin bersama Kecamatan Balikpapan Tengah. Selain itu, fasilitas primer seperti puskesmas dan poliklinik tersedia di seluruh kecamatan. Fasilitas pendukung lain seperti laboratorium, toko obat, toko optik, alat kesehatan, ambulans, serta layanan kesehatan tradisional juga tersebar di berbagai wilayah kota. Pemenuhan dan pemerataan sarana serta prasarana kesehatan ini menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan inklusif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Strategi 15: Peningkatan Kesadaran dan Peran Orang Tua terhadap Penerapan Pengasuhan Layak dan Stimulasi Dini

Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya. Kota Balikpapan memiliki visi SDM unggul, adalah sebuah investasi sejak usia dini serta merupakan strategi yang cost-effective untuk mencapainya. Pengasuhan layak mencakup kasih sayang, pemberian gizi yang baik, imunisasi, dan pola hidup sehat mengurangi risiko stunting, penyakit menular, maupun gangguan tumbuh kembang, pendidikan karakter, dan pembentukan kebiasaan positif pada anak. Sedangkan Stimulasi dini mengoptimalkan perkembangan otak, kemampuan bahasa, motorik, emosi, dan sosial pada anak di usia 0 – 6 tahun. Strategi Implementasi yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan adalah:

- Mengedukasi parenting terpadu peran orang tua melalui Posyandu, PAUD, PKK dan kegiatan di RT dengan materi praktis terkait pengenalan gizi, kesehatan mental anak serta melatih motorik anak dengan permainan edukatif.
- Melatih kader Posyandu/bunda PAUD sangat penting sebagai agen perubahan yang mengajarkan stimulasi dini dengan metode sederhana yang mudah diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan mencegah masalah perkembangan di kemudian hari.
- Melakukan Integrasi layanan kesehatan melalui skrining tumbuh kembang di Posyandu yang diikuti konseling orang tua. Perlu Kolaborasi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.

Peningkatan kesadaran dan peran orang tua terhadap pengasuhan layak dan stimulasi dini adalah langkah yang sangat strategis untuk mencetak SDM yang cerdas dan sehat di Kota Balikpapan, karena kedua hal ini menyasar tahap pembangunan manusia paling awal yang dampaknya sangat panjang menuju generasi emas 2045.

Strategi 16: Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan

Strategi Peningkatan kompetensi SDM kesehatan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat Kota Balikpapan. Peningkatan kompetensi ini dilakukan melalui berbagai upaya antara lain pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, mendorong tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pelatihan, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelatihan dan melakukan monitoring dan evaluasi berkala dalam pelaksanaan program

Strategi 17: Peningkatan dan Pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat

Strategi peningkatan dan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat untuk mendukung SDM yang cerdas dan sehat dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pembentukan kebiasaan sehat masyarakat dan penguatan sistem pendukung kesehatan. Strategi ini dilaksanakan dengan mendorong edukasi kesehatan sejak dini di sekolah, kampanye publik tentang gizi seimbang, sanitasi, serta perilaku hidup bersih. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi edukasi kesehatan dan sistem peringatan dini penyakit, juga dapat mempercepat pembudayaan perilaku sehat. Selain itu, dibutuhkan penguatan kapasitas layanan kesehatan dan koordinasi lintas sektor. Tenaga medis dilatih untuk mengenali tanda awal penyakit dan memberikan penanganan cepat, sementara

kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan sektor swasta membantu memperluas jangkauan edukasi dan pencegahan. Sistem surveilans kesehatan masyarakat harus diperbarui secara real-time untuk memantau tren penyakit, sehingga kebijakan dapat responsif terhadap potensi wabah atau peningkatan kasus penyakit kronis.

Strategi 18: Penguatan Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Strategi penguatan deteksi dini dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, dan responsif. Strategi ini dilaksanakan dengan memperluas jangkauan skrining kesehatan rutin di puskesmas, sekolah, dan tempat kerja untuk mendeteksi penyakit sejak awal. Program imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, serta edukasi gaya hidup sehat harus diperkuat, khususnya untuk faktor risiko seperti pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Pemanfaatan teknologi kesehatan, seperti sistem pencatatan medis terintegrasi dan aplikasi pelaporan gejala, akan mempercepat deteksi dan tindak lanjut kasus. Selain itu, dibutuhkan penguatan kapasitas layanan kesehatan dan koordinasi lintas sektor. Tenaga medis dilatih untuk mengenali tanda awal penyakit dan memberikan penanganan cepat, sementara kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan sektor swasta membantu memperluas jangkauan edukasi dan pencegahan. Sistem surveilans kesehatan masyarakat harus diperbarui secara real-time untuk memantau tren penyakit, sehingga kebijakan dapat responsif terhadap potensi wabah atau peningkatan kasus penyakit kronis.

Strategi 19: Penguatan Literasi Masyarakat

Strategi “Penguatan Literasi Masyarakat” merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan sasaran pembangunan “Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Sehat.” Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi digital, finansial, lingkungan, serta literasi budaya yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk beradaptasi dan berdaya dalam menghadapi dinamika pembangunan kota.

Strategi ini diarahkan untuk membangun ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan akses terhadap sumber pengetahuan, penguatan peran lembaga pendidikan dan perpustakaan daerah, serta kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen memperluas jangkauan layanan literasi melalui penyediaan fasilitas baca di ruang publik, program literasi berbasis komunitas, dan optimalisasi teknologi informasi untuk memperkuat budaya belajar sepanjang hayat. Selain itu, penguatan literasi masyarakat juga menjadi instrumen penting dalam mendorong partisipasi publik terhadap pembangunan. Masyarakat yang literat

memiliki kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan yang bijak, serta berperan aktif dalam menjaga kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan sosial ekonomi daerah. Strategi penguatan literasi masyarakat dalam tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kecakapan hidup masyarakat.

Strategi 20: Penurunan dan pencegahan Stunting

Pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kota Balikpapan mencakup intervensi spesifik dan sensitif. Selain itu, ada upaya pendekatan hulu yang fokus pada remaja dan calon pengantin, serta pendekatan lintas sektor melalui gerakan bersama. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat 34 indikator yang harus dicapai oleh pemerintah Kota Balikpapan dalam Penurunan, Percepatan Pencegahan Stunting.

No	Target	Baseline (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)
1	Presentase Prevalensi Stunting	24,80	23,06	21,45	19,95	18,55	17,25
2	Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) atau ibu hamil risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)/multivitamin & mineral supplementation (MMS) untuk ibu hamil minimal 180 tablet selama masa kehamilan	98,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Ibu hamil mengonsumsi makanan beragam	98,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Ibu hamil periksa kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan dalam 42 hari pascapersalinan	82,97	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
7	Bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini	93,39	93,00	93,50	94,00	95,50	95,00
8	Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif	78,87	79,02	80,50	82,00	83,50	85,00
9	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI)	83,05	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
10	Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat air susu ibu (ASI)	78,87	79,02	80,50	82,00	83,50	85,00
11	Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	43,96	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
13	Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	94,98	95,05	95,50	96,00	96,50	97,00

No	Target	Baseline (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)
14	Bayi di bawah usia dua tahun (baduta) yang memperoleh imunisasi rutin lengkap	41,33	85,00	85,00	85,00	85,00	90,00
15	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 6-23 bulan (baduta) yang diare	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada anak usia 6-23 bulan (baduta)	95,14	98,89	98,00	98,00	98,00	98,00
17	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	43,96	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
19	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) bermasalah gizi (gizi kurang) yang mendapat tambahan asupan gizi	94,98	95,05	95,50	96,00	96,50	97,00
20	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan yang diare	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Penemuan kasus pneumonia balita	78,99	70,01	70,05	70,03	70,05	70,02
22	Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada balita	94,54	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
23	Remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)	71,23	73,00	75,00	77,00	79,00	81,00
24	Remaja putri yang diskrining anemia	68,77	75,00	77,00	80,00	83,00	85,00
25	Calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	91,25	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
26	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	86,06	81,64	81,67	81,70	82,75	85,39
28	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	11,68	11,31	11,60	12,59	13,61	14,61
29	Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK	43,43	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
31	Akta kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak) yang diterbitkan	96,70	99,42	99,45	99,47	99,49	99,51
32	Desa/kelurahan yang memiliki program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan pangan (asupan Gizi)	14,71	23,53	29,41	38,24	58,82	70,59

Strategi 21: Penguatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Posyandu, RT, LPM dan Karang Taruna)

Penguatan peran lembaga pemberdayaan masyarakat seperti Posyandu, RT, LPM, dan Karang Taruna bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa, menampung aspirasi, meningkatkan pelayanan publik, melestarikan pembangunan, serta membina dan mengembangkan potensi masyarakat. Penguatan ini melibatkan pembinaan berjenjang dan dukungan dari pemerintah daerah untuk memastikan lembaga-lembaga tersebut berjalan efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

Strategi 22: Peningkatan Edukasi dan Pengenalan Budaya dan Kesenian Kota Balikpapan

Peningkatan edukasi dan pengenalan budaya serta kesenian di Kota Balikpapan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, seperti pelatihan guru, pengembangan budaya melalui festival dan lomba, serta Jelajah Budaya dan Kemah Budaya untuk generasi muda, selain dukungan terhadap event pariwisata seperti Balikpapan Fest dan Borneo Culture Week untuk mempromosikan keberagaman budaya Indonesia secara luas.

h. Sasaran 9: Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif

Tujuan	Sasaran	Strategi
SDM yang berdaya saing	Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Peningkatan penghargaan, toleransi, dan kerukunan antar suku dan umat beragama
		Optimalisasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan
		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan
		Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak
		Peningkatan kualitas keluarga

Sasaran Masyarakat yang harmonis dan inklusif merupakan sasaran kesembilan dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung tujuan SDM yang berdaya saing. Berikut adalah upaya mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan 5 (lima) strategi antara lain:

Strategi 1: Peningkatan penghargaan, toleransi, dan kerukunan antar suku dan umat beragama

Strategi peningkatan penghargaan, toleransi, dan kerukunan antar suku dan umat beragama dilaksanakan melalui penguatan pendidikan karakter multikultural, fasilitasi dialog forum kerukunan, dan revitalisasi kegiatan sosial budaya inklusif. Selain itu, penyediaan fasilitasi perjalanan spiritual, dialog antarumat beragama, serta kerja sama dengan tokoh agama dan organisasi keagamaan dilakukan untuk mempererat solidaritas antarumat. Penguatan

regulasi dan kebijakan difokuskan pada penyusunan peraturan yang menjamin perlindungan hak kelompok minoritas serta penerapan sistem deteksi dini dan penanganan konflik sosial.

Strategi 2: Optimalisasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Strategi meningkatkan optimalisasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan Kota Balikpapan pada 2025-2030 harus berfokus pada pengintegrasian perspektif gender dalam seluruh tahapan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kota. Langkah ini dilakukan melalui penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan yang responsif gender, memperkuat kelembagaan dan kapasitas aparatur, serta mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peningkatan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki juga menjadi prioritas utama, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal akibat diskriminasi gender. Dengan penerapan strategi ini secara konsisten, Kota Balikpapan dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif, di mana keadilan serta kesetaraan gender menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Strategi 3: Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan

Strategi peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan di Kota Balikpapan periode 2025-2030 diarahkan pada penguatan kolaborasi lintas sektor serta keterlibatan masyarakat secara aktif untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Pendekatan ini diwujudkan melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mendekatkan layanan hingga tingkat RT, sehingga masyarakat mudah melaporkan kasus kekerasan dan memperoleh pendampingan serta edukasi mengenai pencegahan kekerasan. Sinergi antara pemerintah, perangkat kelurahan, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan keluarga terus diperkuat lewat sosialisasi, pelatihan, serta pembentukan struktur perlindungan di tingkat lokal. Selain penanganan kasus, inovasi dalam edukasi kepada orang tua, serta pemberian hak pendidikan merata bagi seluruh anak—termasuk bantuan seragam dan subsidi pendidikan—ikut menjadi fokus utama dalam mewujudkan lingkungan ramah perempuan dan anak yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan stigma sosial. Melalui strategi berkelanjutan ini, pemerintah Kota Balikpapan berharap dapat mempercepat terwujudnya masyarakat inklusif, aman, dan berkeadilan dengan mengintegrasikan perspektif gender dan perlindungan anak di semua tahapan pembangunan kota.

Strategi 4 Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak

Dalam rangka mencapai sasaran masyarakat yang harmonis dan inklusif tahun 2025–2030, Kota Balikpapan memperkuat upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui berbagai strategi terintegrasi. Pemerintah Kota telah menetapkan Perda Kota Layak Anak sebagai dasar hukum, yang menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kepentingan anak selalu menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Lautan Rukun Tetangga (RT) digalakkan hingga tingkat lingkungan sebagai langkah nyata mencegah kekerasan serta memperkuat jaringan dukungan sosial dan edukasi di masyarakat. Selain itu, penyediaan fasilitas publik ramah anak seperti taman kota, ruang bermain, serta pendidikan inklusif terus dikembangkan agar akses anak terhadap pendidikan dan perlindungan semakin merata. Seluruh program ini didukung sinergi antara pemerintah, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat agar tumbuh kembang anak berlangsung optimal dalam lingkungan yang aman dan suportif, membangun generasi muda aktif, berdaya, serta menjadikan Balikpapan sebagai kota layak huni, harmonis, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Strategi 5: Peningkatan Kualitas Keluarga

Strategi peningkatan kualitas keluarga di Kota Balikpapan untuk periode 2025–2030 diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi masyarakat yang harmonis dan inklusif. Pemerintah kota menggencarkan kolaborasi lintas sektor, baik dengan organisasi masyarakat, agama, hingga komunitas budaya, guna mendorong lingkungan keluarga yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Langkah-langkah strategis meliputi sosialisasi Perda Ketahanan Keluarga untuk membangun basis ketahanan sosial, penguatan nilai moral dan spiritual, penanganan isu kesehatan mental keluarga, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan anak. Selain itu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus menjadi prioritas, sejalan dengan upaya pelestarian budaya serta penguatan ruang publik yang inklusif bagi seluruh warga. Seluruh inisiatif ini didukung oleh pembentukan relawan keluarga, penguatan konsultasi keluarga, serta peningkatan keterlibatan generasi muda sehingga tercipta ekosistem keluarga yang resilien, harmonis, dan mampu menerima keberagaman sebagai kekuatan sosial utama

i. Sasaran 10: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Tujuan	Sasaran	Strategi
Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
		Peningkatan integritas birokrasi
		Penguatan kebijakan daerah yang adaptif
		Penerapan sistem merit dan profesionalitas ASN
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
		Penguatan riset dan inovasi pemerintahan beserta penerapannya
		Peningkatan Tata Kelola Kearsipan
		Penerapan strategi perencanaan pembiayaan kreatif

Sasaran Masyarakat yang harmonis dan inklusif merupakan sasaran kesepuluh dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung tujuan SDM yang berdaya saing. Berikut adalah upaya mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan 8 (delapan) strategi antara lain:

Strategi 1: Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Strategi peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Melalui peningkatan kualitas ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia, sistem perencanaan, serta mekanisme pengendalian yang terintegrasi dan berbasis data akurat.

Pendekatan strategis ini menitikberatkan pada pengembangan metode perencanaan yang partisipatif, transparan, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis. Selain itu, pengendalian pembangunan dilakukan secara berkesinambungan melalui monitoring dan evaluasi yang ketat, sehingga setiap penyimpangan dapat diidentifikasi lebih awal dan segera dilakukan perbaikan kebijakan.

Peningkatan kualitas perencanaan juga termasuk penguatan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengolahan data pembangunan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, strategi ini bertujuan menciptakan perencanaan daerah yang adaptif dan responsif, yang pada akhirnya memacu percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan misi membangun pemerintahan yang bersih dan profesional.

Strategi 2: Peningkatan Integritas Birokrasi

Strategi peningkatan integritas birokrasi bertujuan untuk membangun aparatur pemerintahan yang jujur, transparan, dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Integritas birokrasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Untuk mencapai hal tersebut, strategi ini menekankan pada penguatan nilai-nilai etika, disiplin, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan, pembinaan, dan pengawasan yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan sistem pengawasan internal yang ketat dan mekanisme pelaporan yang transparan menjadi bagian penting agar setiap penyimpangan dapat dicegah dan ditindaklanjuti secara cepat.

Pengembangan budaya kerja yang bebas dari konflik kepentingan serta pemberdayaan aparat pengawas juga menjadi pilar utama dalam memperkokoh integritas birokrasi. Penerapan prinsip merit system dalam manajemen sumber daya manusia memastikan bahwa setiap pejabat dan pegawai dipilih dan dipromosikan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan karena hubungan personal.

Melalui strategi ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik berkualitas dan terpercaya, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan integritas birokrasi yang tinggi, pemerintahan daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberikan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya. Strategi ini selaras dengan misi Kota Balikpapan untuk menciptakan pemerintahan yang profesional serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi 3: Penguatan Kebijakan Daerah yang Adaptif

Strategi penguatan kebijakan daerah yang adaptif di Kota Balikpapan untuk 2025-2030 diarahkan pada penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui beberapa langkah kunci. Pemerintah Kota berkomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran, memastikan seluruh program prioritas berbasis pada kebutuhan riil masyarakat serta taat regulasi. Pengawasan internal yang sistematis didorong sebagai fondasi utama, di mana setiap kepala perangkat daerah dituntut menetapkan kebijakan adaptif terhadap risiko dan tantangan yang berkembang. Sinergi antar-OPD dan budaya sadar risiko menjadi pilar penting dalam meningkatkan efisiensi dan hasil pembangunan. Selain itu, penyerapan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta percepatan digitalisasi diintegrasikan ke dalam kebijakan perencanaan, sehingga seluruh proses pengelolaan pemerintahan dan pelayanan

publik lebih responsif, inklusif, dan terukur untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Strategi 4: Penerapan Sistem Merit dan Profesionalitas ASN

Strategi penerapan sistem merit dan profesionalitas ASN Kota Balikpapan untuk 2025-2030 diarahkan pada peningkatan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas di seluruh proses manajemen kepegawaian. Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan rekrutmen ASN dan PPPK secara objektif dan transparan sesuai peraturan nasional, memastikan setiap pengangkatan pegawai didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan nyata organisasi. Penataan status kepegawaian juga ditopang oleh pelatihan yang terstruktur untuk membentuk karakter PNS yang integritas serta memperkuat kompetensi teknis di tiap perangkat daerah. Pengawasan internal dan budaya sadar risiko terus diperkuat sehingga tata kelola pemerintahan berjalan efisien dan adaptif terhadap tantangan serta ekspektasi masyarakat. Dengan demikian, target pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel dapat tercapai secara berkelanjutan

Strategi 5: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dilaksanakan melalui penguatan regulasi, mekanisme partisipasi yang inklusif, serta pemanfaatan teknologi. Strategi ini dilakukan melalui penetapan dasar hukum yang jelas, memperluas kanal aspirasi melalui forum tatap muka maupun digital, serta menjamin keterlibatan kelompok rentan. Transparansi ditingkatkan dengan e-Government, sistem pengaduan terintegrasi, dan dashboard real-time yang mempublikasikan anggaran, progres program, dan laporan kinerja secara terbuka.

Selain itu, strategi ini memerlukan edukasi publik dan peningkatan kapasitas aparatur. Masyarakat dibekali literasi anggaran dan mekanisme pengawasan, sementara ASN dilatih untuk responsif, transparan, dan akuntabel. Kolaborasi dengan LSM, perguruan tinggi, serta komunitas dapat memperkuat pemantauan bersama, dengan indikator partisipasi dan evaluasi berkala yang dipublikasikan. Pendekatan ini memastikan partisipasi warga berlangsung dari tahap perencanaan hingga pengawasan, sehingga terwujud kepercayaan publik dan pemerintahan yang bersih.

Strategi 6: Penguatan Riset dan Inovasi Pemerintahan Beserta Penerapannya

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penguatan riset dan inovasi pemerintahan sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan riset dan inovasi dapat meningkatkan kualitas kebijakan

publik, mendukung penerapan teknologi baru, serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih objektif. Disisi lain inovasi juga berperan dalam memperkenalkan teknologi baru yang dapat mempermudah proses administrasi pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan meminimalisasi praktik korupsi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), misalnya, fasilitasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah perlu membangun kolaborasi dengan lembaga riset, universitas, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang mendukung riset dan inovasi. untuk mendorong pengembangan solusi-solusi baru yang bermanfaat bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Strategi 7: Peningkatan Tata Kelola Kearsipan

Pemerintah Kota Balikpapan menempatkan peningkatan tata kelola kearsipan sebagai salah satu prioritas strategis dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Pengelolaan arsip yang tertib dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam menjamin ketersediaan informasi, perlindungan data, serta peningkatan efisiensi administrasi pemerintahan.

Strategi peningkatan tata kelola kearsipan diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan arsip, baik arsip aktif, inaktif, maupun arsip statis. Upaya ini meliputi penataan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam di seluruh perangkat daerah, serta peningkatan kesadaran dan disiplin aparatur terhadap pentingnya pengelolaan arsip sebagai aset organisasi. Pemerintah Kota Balikpapan mendorong percepatan implementasi arsip digital guna mendukung transformasi digitalisasi pemerintahan. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat akses informasi, meningkatkan keamanan data, serta memudahkan proses pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Strategi ini disertai beberapa langkah, seperti penguatan regulasi dan kebijakan kearsipan, pengembangan sistem informasi kearsipan terintegrasi antar-perangkat daerah, peningkatan kapasitas dan kompetensi arsiparis, penataan dan digitalisasi arsip dinamis serta penyelamatan arsip statis, dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kearsipan secara periodik

Strategi 8: Penerapan strategi perencanaan pembiayaan kreatif

Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan menuntut Pemerintah Kota Balikpapan menempuh strategi perencanaan pembiayaan kreatif sebagai upaya untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Strategi ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme pembiayaan

yang inovatif, berkelanjutan, dan berkeadilan, guna mendukung prioritas pembangunan kota tanpa menambah beban fiskal.

Strategi ini diarahkan untuk memperkuat peran perencanaan keuangan daerah yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, sekaligus membuka peluang kemitraan dengan sektor swasta, masyarakat, dan lembaga keuangan. Pendekatan pembiayaan kreatif mencakup optimalisasi pemanfaatan aset daerah, pengembangan pembiayaan *corporate social responsibility* (CSR), dan kerjasama lainnya. Perencanaan pembiayaan akan disusun berbasis analisis risiko dan proyeksi jangka menengah agar kebijakan keuangan daerah lebih terukur dan efisien.

Strategi ini disertai dengan tahapan berikut, seperti penguatan kapasitas perencanaan dan analisis fiskal daerah, pemetaan potensi aset dan sumber daya daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan, peningkatan kolaborasi lintas sektor dengan dunia usaha, lembaga keungan, dan mitra pembangunan, pengembangan instrumen pembiayaan berkelanjutan, dan integrasi perencanaan pembiayaan kreatif dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

j. Sasaran 11: Pelayanan Publik yang Semakin Prima dan Adaptif

Tujuan	Sasaran	Strategi
Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas	Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Penguatan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi
		Penguatan penerapan satu data daerah
		Peningkatan inovasi pelayanan publik

Sasaran Masyarakat yang harmonis dan inklusif merupakan sasaran kesebelas dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung tujuan SDM yang berdaya saing. Berikut adalah upaya mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan 3 (tiga) strategi antara lain:

Strategi 1: Penguatan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi

Strategi digitalisasi pelayanan publik yang prima dan adaptif adalah melalui digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi antar platform layanan publik yang telah tersedia. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi mengunjungi berbagai situs web atau aplikasi yang berbeda untuk mengakses layanan. Namun, hal ini juga harus didukung dengan penyederhanaan alur layanan publik yang jelas dan terbuka, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan digitalisasi layanan publik tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan sumber daya manusia, baik dari pihak pemerintah (ASN) maupun masyarakat selaku pengguna layanan tersebut. Oleh karena itu, upaya yang diperlukan adalah literasi digital bagi

masyarakat, yang dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.

Strategi 2: Penguatan penerapan satu data daerah

Penerapan Satu Data Daerah sebagai strategi kunci dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan yang lebih akurat dan terintegrasi. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menegaskan pentingnya penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan Satu Data Daerah bertujuan untuk membangun sistem pengelolaan data yang konsisten di seluruh perangkat daerah, sehingga setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis pada data yang valid dan terstandar. Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data melalui mekanisme portal data daerah yang terintegrasi.

Strategi ini juga mencakup penguatan kelembagaan pengelola data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik dan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas data sesuai ketentuan nasional. Strategi ini mendorong adanya data yang dihasilkan oleh setiap perangkat daerah dapat diakses lintas sektor secara aman, efisien, dan bermanfaat bagi publik.

Satu Data Daerah juga menjadi instrumen penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik, transparansi anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tersedianya data yang terintegrasi dan dapat diandalkan memudahkan proses perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mengoptimalkan koordinasi antarperangkat daerah maupun dengan pemerintah pusat. Data yang akurat dan terintegrasi akan menjadi fondasi utama dalam memperkuat efektivitas perencanaan, meningkatkan akuntabilitas publik, serta mendukung terwujudnya Balikpapan sebagai kota cerdas yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Strategi 3: Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik

Untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif, strategi yang perlu diterapkan adalah dengan mendorong peningkatan inovasi dalam pelayanan publik itu sendiri. Inovasi menjadi kunci untuk menciptakan layanan yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman.

Selain hal tersebut, pelibatan masyarakat dalam proses inovasi melalui feedback atau masukan yang dapat memberikan wawasan tentang apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Pelaksanaan inovasi harus didukung dengan perubahan mindset pada aparatur sipil negara (ASN).

3.4.6 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis yang memiliki aspek politik dan teknokratik. Pelaksanaan program ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mendukung visi dan misi kepala daerah. Dalam dimensi politik, program prioritas mencakup program unggulan yang sejalan dengan visi dan misi Walikota serta Wakil Walikota terpilih. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari janji politik yang harus direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang integrasi ke dalam dokumen perencanaan. Sementara itu, dalam dimensi teknokratik, program prioritas disusun berdasarkan analisis terhadap isu serta permasalahan yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, program ini diharapkan memiliki relevansi yang tinggi dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan daerah.

Konsepsi pencapaian visi dan keberhasilan pelaksanaan misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang telah dioperasionalkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selanjutnya membutuhkan dukungan pelaksanaan program unggulan. Hasil dari pelaksanaan program unggulan ini dianggap dapat menjadi pengungkit utama upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi dimaksud. Pendefinisian program unggulan yang dimaksud disini bukan merupakan nomenklatur program yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun lebih kepada programprogram kerja yang telah menjadi janji politik Walikota dan Wakil Walikota untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Terdapat 9 (sembilan) program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2025-2030. Kesembilan program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola sebagai sebuah investasi untuk mewujudkan “Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan warga, memperkuat infrastruktur, dan menjaga lingkungan, dengan implementasi bertahap hingga 2030. Program prioritas tersebut antara lain:

1. Transformasi Birokrasi: Membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan efisien untuk pelayanan publik prima.
2. Peningkatan Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Memperluas akses serta mutu layanan agar merata bagi seluruh warga, termasuk program pencegahan stunting melalui data berbasis kelurahan.
3. Pengentasan Stunting: Percepatan identifikasi dan penanganan anak stunting serta ibu hamil berisiko, bekerja sama dengan BPS untuk data akurat.
4. Penyediaan Air Bersih: Pembangunan sumur bor, perluasan waduk, dan optimalisasi bendungan untuk distribusi air sehat merata.

5. Pengendalian Banjir: Revitalisasi drainase dan normalisasi sungai utama seperti di Jalan Ahmad Yani untuk mencegah banjir tahunan.
6. Pengembangan Kota MICE dan Wisata: Memperkuat infrastruktur event nasional-internasional guna mendongkrak sektor perhotelan, UMKM, dan pariwisata.
7. Pengembangan Kota Inovatif: Mendorong ekonomi kreatif dan teknologi melalui ekosistem usaha yang kondusif untuk pertumbuhan baru.
8. Kota Ramah Anak: Penyediaan fasilitas publik, perlindungan hak anak, serta dukungan kesehatan jasmani-rohani.
9. Perlindungan Lingkungan Hidup: Penguatan pemilahan sampah, perbaikan TPA, dan drainase berkelanjutan untuk lingkungan sehat dan nyaman.

Pelaksanaan program unggulan tersebut direalisasikan melalui nomenklatur program yang diampu oleh perangkat daerah. Berikut adalah program prioritas pembangunan daerah RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 17 Program Unggulan pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Program Politik (Prioritas Daerah)	Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Nomenklatur Program
1	Transformasi birokrasi	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Meritokrasi ASN)	Pengelolaan Assessment Center	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
		Optimalisasi SPIP	Pengembangan e-SPIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		Penguatan SPBE Terintegrasi	pengembangan fitur layanan publik dasar (Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Ketenagakerjaan, Aduan Masyarakat dsb.) pada e-Manuntung	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		Penguatan Akuntabilitas dalam Zona Integritas	Penguatan Nilai AKIP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
2	Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan	Peningkatan akses layanan kesehatan (Subsidi BPJS)	cakupan layanan BPJS Kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) dengan mengutamakan keluarga tidak mampu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			- Puskesmas	
			- Rumah Sakit	
			- Puskesmas Pembantu	
			- UPTD non Puskesmas	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	
			- Puskesmas	
			- Rumah Sakit	
			- Puskesmas Pembantu	
			- UPTD non Puskesmas	
			Penyediaan Tenaga Kesehatan	
		Peningkatan akses layanan Pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (Subsidi SPP, Seragam Sekolah, Beasiswa)	Pembangunan Sekolah Pendidikan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			- SD	
			- SMP	
			- PAUD	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Subsidi Biaya Pendidikan Dasar Sekolah Swasta	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

No	Program Politik (Prioritas Daerah)	Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Nomenklatur Program
			Bantuan Seragam Sekolah untuk siswa Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Peningkatan Literasi Digital		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Penyediaan wifi gratis di wilayah Kota Balikpapan	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
		Pemberian makanan bergizi gratis	Fasilitasi pelaksanaan MBG	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Pemberian makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan siswa pendidikan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKP UKM)
3	Mengatasi Stunting	Penurunan Stunting	Penguatan Data Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM
			Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK, Anak dengan Gizi kronis	
			Penguatan Kelembagaan Posyandu dan kinerja kader	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
			Cakupan Layanan terhadap 42 Indikator Aksi Bangda	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
4	Penyediaan Air Bersih yang Sehat dan Merata	Penyediaan air minum	Pembangunan Embung Aji Raden, Penyiapan Pemanfaatan Waduk Sepaku Semoi dan Pemanfaatan Sungai Mahakam	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Optimaliasi SPAM Eksisting (Uprating dan Penurunan NRW)	
5	Pengendalian Banjir	Pengendalian Banjir	Pembangunan Bendali Hulu Sungai Ampal	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Peningkatan Drainase DAS Ampal, Klandasan Kecil & Manggar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			Pembangunan dan pemeliharaan drainase kota	
6	Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sehat dan Nyaman	Pembangunan konektivitas berkelanjutan	Pembangunan jalan penghubung kawasan Balikpapan Timur dan Utara serta jalan menuju kawasan peruntukan industri	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Pembangunan Terminal dan Fasilitas Depo Kontainer	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			Penyediaan sarana prasarana pendukung kelaikan jalan di Kota Balikpapan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		Mewujudkan Balikpapan Terang	Penyediaan penerangan di seluruh wilayah Kota Balikpapan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		Penyediaan Rumah Layak Huni	Pembangunan dan peningkatan rumah layak huni (kawasan kumuh)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
			Pembangunan dan peningkatan rumah layak huni (di luar kawasan kumuh)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
			Penyediaan dan pemeliharaan prasarana sarana umum perumahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		Penyediaan sarana dan prasarana transportasi massal	Pengembangan Balikpapan City Trans	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

No	Program Politik (Prioritas Daerah)	Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Nomenklatur Program
		Penataan Pedestrian dan Utilitas	Peningkatan Trotoar dan Jaringan Utilitas di jalan dalam kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
			Pembangunan Jalur Sepeda di jalan protokol	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		Pelayanan jaminan ketenagakerjaan (perluasan sasaran penerima pekerja rentan)	Bantuan iuran jaminan ketenagakerjaan (perluasan sasaran penerima pekerja rentan)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		Penguatan Kompetensi Tenaga Kerja	Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			Perluasan jenis pelatihan ketenagakerjaan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			Penguatan kerjasama pelatihan ketenagakerjaan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		Perlindungan Sosial Masyarakat Rentan dan Penyediaan sarana dan prasarana PPKS	Penyediaan bantuan perlindungan sosial masyarakat rentan dan pekerja rentan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana PPKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		Penguatan pembinaan Olah Raga Masyarakat dan Prestasi	Pelaksanaan lomba dan pembinaan olah raga masyarakat dan prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Skala Kota dan Permukiman	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Pengelolaan Sampah	Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sistem Hulu	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
			Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sistem Hilir dengan Waste to Energy	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		Konservasi Sumber Daya Air	Penyediaan sarana prasarana pemanenan air hujan di perkantoran, komersiil serta perumahan dan permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		Dekarbonisasi	Pengelolaan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			Implementasi Perhutanan Sosial di HLSW dan HL DAS Manggar	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			Implementasi Transportasi dan Bangunan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		Taman Kota dan Penghijauan	Pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
			Pengadaan pohon peneduh	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
		Pengendalian Inflasi	Pengembangan Urban Farming sebagai upaya ketahanan pangan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			Pembangunan Pasar Induk	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
7	Balikpapan Kota MICE dan Wisata	Penguatan peran Balikpapan sebagai Kota MICE & Pariwisata	Penyelenggaraan event skala nasional/internasional di Kota Balikpapan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

No	Program Politik (Prioritas Daerah)	Program Unggulan / Program prioritas (Program Strategis)	Proyek Strategis	Nomenklatur Program
			Pembangunan Balikpapan *Convention Center*	PROGRAM PENATAAN GEDUNG BANGUNAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Revitalisasi Pasar Inpres Kebun Sayur sebagai salah satu *icon* pusat oleh-oleh/wisata belanja Kota Balikpapan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
			Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
8	Balikpapan Kota Inovatif dan Kreatif	Pengembangan Kawasan Industri	Peningkatan Sentra Industri Kecil Somber dan Teritip	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Pengembangan Kawasan Industri Kariangau	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		Peningkatan sektor ekonomi kreatif	Penyelenggaraan ruang/event kreatif setiap tahun	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN
			Fasilitasi HKI bagi subsektor/pelaku ekonomi kreatif setiap tahun	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
		Pemberdayaan UMKM		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
9	Balikpapan Kota Ramah Anak	Penguatan Layanan Perlindungan Anak Terpadu	Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			Penguatan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
		Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Anak	Implementasi Sekolah Ramah Anak	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Penguatan Fasilitas Kesehatan (RS, Puskesmas, Posyandu) yang ramah anak dan menyenangkan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Penguatan Pendampingan AkreditasI Lembaga Pengasuhan Alternatif	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
		Pengembangan Ruang Publik dan Fasilitas Ramah Anak	Pemenuhan standarisasi infrastruktur dan fasilitas publik yang ramah anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan	Penguatan Forum Anak di setiap tingkatan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Tabel 3. 18 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
20252029 - BALIKPAPAN KOTA GLOBAL NYAMAN UNTUK SEMUA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN - Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat - Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan - Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik - Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua - Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua	Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan			Indeks Gini(Indeks)		
				Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
				Tingkat Kemiskinan((%))		
		Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa (%)		
				Tingkat Inflasi ((%))		
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)		
				PDRB per Kapita (Juta Rupiah)		
			Meningkatnya akses masyarakat penggiat sektor pertanian terhadap sarana pertanian	Persentase Jumlah Masyarakat Penggiat Sektor Pertanian yang Mendapat Akses Bantuan Sarana Pertanian (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi WIsata	Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya dukungan prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase investor potensial (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang mandiri	Pertumbuhan Usaha Mikro Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Komoditi dengan Harga Rata-Rata di Bawah Harga Rata-Rata Provinsi (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Tersediannya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Persentase Kepatuhan Pelaporan SIINas (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya koperasi sehat	Persentase Koperasi Sehat (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Persentase Pertumbuhan pengawasan dan pemeriksaan koperasi (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya Kualitas kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Poin)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Perizinan Sektor Perindustrian (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Persentase Kepatuhan Industri (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kualitasnya (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi atau Berpotensi Ekspor	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berorientasi atau Berpotensi Ekspor (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Wisatawan (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Produk Lokal yang Difasilitasi Promosi (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya perlindungan konsumen melalui tertib ukur	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Persentase Industri yang Memanfaatan EBT (%)	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Indeks)		
			Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman dan Berkelanjutan (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Konektivitas Jalan (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Kepatuhan PBG Kabupaten/kota (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan	Konektivitas Laut (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase Perumahan dengan PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni Melalui Penyediaan Unit Hunian Vertikal (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Terselenggaranya kinerja lalu lintas Kota Balikpapan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang dalam kondisi baik (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Konektivitas Darat (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Meningkatnya kesempatan tenaga kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan di sektor formal	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya pencari kerja yang mendapat pelatihan yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Rencana Tenaga Kerja (RTK) (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
		Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
			Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan kelompok masyarakat penggiat sektor pertanian	Persentase Kelompok Masyarakat Penggiat Pertanian yang Aktif (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan daerah yang beragam, bergizi, aman, dan terjangkau untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat serta menjaga stabilitas pangan	Persentase cadangan pangan (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luas Lahan Pertanian yang Terdampak Perubahan Iklim yang Ditangani (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Menurunnya jumlah wilayah rentan rawan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Terkendalinya penyebaran penyakit hewan menular	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Tersedianya produk olahan perikanan	Volume Produksi Olahan Perikanan (Ton)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
		Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)		
				Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
			Meningkatnya keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah (%)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)		
			Meningkatnya kompetensi SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kompetensi SDM Satlinmas	Persentase Satlinmas yang ditingkatkan kompetensinya (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kualitas penanganan potensi konflik sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Ditangani (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya kualitas penanganan terhadap gangguan trantibum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya peran Partai Politik dalam peningkatan kehidupan demokrasi	Persentase Partai Politik yang aktif melaksanakan Pendidikan Politik kepada masyarakat (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase layanan rehabilitas sosial PPKS terlantar yang terpenuhi (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan (TMP)	Persentase TMP Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim			Penurunan intensitas emisi GRK((%))		
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH yang dikelola (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Nilai Kualitas Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Nilai)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman diluar kawasan permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Presentase Pemenuhan rumah layak huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Ketercukupan Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya pemanfaatan tanah atas IMTN	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan (%)	2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Luas Tanah yang Dibebaskan (%)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya penyelesaian mediasi kasus sengketa tanah	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi (%)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Kebakaran serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Satuan / Lembaga Yang Telah Membentuk SKKL sesuai RISPKP (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Nonkebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Limbah B3 yang Terkelola (Ton)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Bangunan SDA dalam Kondisi Baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Parameter yang Memenuhi Baku Mutu (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Sumber daya manusia yang berdaya saing			Indeks Daya Saing Daerah(Angka)		
		Sumber daya manusia Balikpapan yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
			Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Dokumen Hasil pengawasan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang ditindaklanjuti (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Partisipasi dan/atau kemampuan Peserta Didik yang menjadi kewenangan pemerintah kota	Iklim Keamanan SD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Keamanan SMP (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Keamanan Kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP/Sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SD/Sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi Kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD/Sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Keamanan PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SMP/Sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi (Demand Satisfied) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Medali yang Diraih Atlet dan Pegiat Olahraga pada Tingkat Provinsi (Medali)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Masyarakat yang harmonis dan inklusif		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Dunia Dalam Setahun Terakhir (%)	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
			Meningkatnya Dukungan Fasilitasi Terhadap Agenda DPRD Sebagai Fungsi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda sesuai Standar (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Persentase Fasilitasi Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Persentase Fasilitasi Agenda Pengawasan DPRD sesuai Standar (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya kualitas dana efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Kerja Sama yang Ditindaklanjuti (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat			
				Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Ditindaklanjuti (Poin)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang difasilitasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Ditindaklanjuti (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Difasilitasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Data Gender dan Anak yang Terpilah (%)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni Dalam 3 Bulan Terakhir (%)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya Warisan Budaya Kota Balikpapan yang Ditetapkan	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pencatatan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Terhadap Total Pendaftaran (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas			Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)		
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel		Indeks integritas pemerintah (Indeks)		
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)		
				Nilai AKIP (Nilai)		
			Menguatnya Ekosistem Riset dan Inovasi	Persentase Tindak Lanjut Hasil Riset dan Inovasi (Rekomendasi Tindak Lanjut Dokumen RIPJPID) (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Presentase Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya keselarasan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Persentase keselarasan RKPD dengan renja perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase keselarasan RKPD dengan renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kesesuaian penempatan ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya ketercapaian target Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya kualifikasi ASN	Nilai Dimensi Kualifikasi ASN (Nilai)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas konsultansi dan pencegahan korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (Indeks)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (Indeks)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang berbasis Digital (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya optimalisasi pendataan objek pajak	Persentase Objek Pajak Yang Ditetapkan (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase arsip hasil alih media yang telah autentifikasi (%)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip dinamis dan statis sesuai dengan NSPK (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Menurunnya nilai piutang Pajak Daerah	Presentase Piutang Pajak Daerah Yang Terbayarkan (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
		Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital		Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)		
				Indeks SPBE (Indeks)		
				Indeks Pemerintah Digital (Indeks)		
			Meningkatnya jangkauan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya jumlah layanan digital terintegrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan digital	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Melakukan Publikasi Data Statistik yang Menerapkan Standar Akurasi yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	2.21.02 PROGRAM PEN YELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-18 tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase cakupan perekaman dan pencetakan KTP-elektronik (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Kelengkapan Profil Kependudukan sesuai standar (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan Informasi Kependudukan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	

3.4.7 Dukungan Program Prioritas RPJMD 2025-2029 terhadap Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Program unggulan dari Walikota dan Wakil walikota Balikpapan juga turut serta dalam mendukung capaian program unggulan di level provinsi. Setidaknya terdapat dua program unggulan yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yakni Program Gratispol dan Jospol. Berikut merupakan penyandingan dukungan program unggulan provinsi di Kota Balikpapan pada periode tahun 2025-2029.

Tabel 3. 19 Dukungan Program di Kota Balikpapan terhadap Program Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Dukungan Program
Program Unggulan Gratispol			
1	Gratis Bersekolah SMA/SMK hingga S3	10 Kabupaten/Kota	-
2	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	10 Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
3	Gratis Makanan Bergizi	10 Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makannan minuman Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Rehabilitasi Sosial
4	Gratis Seragam Sekolah	10 Kabupaten/Kota	Program pengelolaan pendidikan
5	Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	10 Kabupaten/Kota	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6	Gratis Haji dan Umroh untuk Marbot	10 Kabupaten/Kota	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program Unggulan Jospol			
Jospol 1. Hilirisasi Industri Pertanian Melalui Peningkatan dan Perluasan Areal Berbasis Pertanian Modern			
1	Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Penunjang Pusat Distribusi Pangan Provinsi	Balikpapan	-

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Dukungan Program
2	Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB)	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Paser, Penajam Paser Utara, Samarinda, Bontang, Balikpapan	Program Penyuluhan Pertanian
4	Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao, Kopi, dan Karet	Karet: Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Paser, Samarinda, Penajam Paser Utara, Balikpapan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
5	Peningkatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pengembangan Agensia Pengendali Hayati (APH)	10 Kabupaten/Kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Jospol 2: Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik			
1	Rehabilitasi dan Revitalisasi Pabrik Es dan Cold Storage sebagai Sarana Sistem Rantai Dingin	Berau, Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Jospol 3: Peningkatan Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, serta Penjaga Rumah Ibadah			
1	Pemberian Insentif Dosen, Guru Sekolah Umum, Pesantren, dan Penjaga Rumah Ibadah	10 Kabupaten/Kota	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Jospol 4: Mendorong Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kreatif dan Digital untuk Mendukung UMKM			
1	Bantuan Permodalan, Peralatan, dan Pembinaan UMKM secara Terpadu	10 Kabupaten/Kota	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi Kreatif	10 Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inetelektual

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Dukungan Program
3	Kemitraan Pelaku Industru dengan UMKM	10 Kabupaten/Kota	Program Pengembangan UMKM
Jospol 7: Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Kaltim Seperti Jalan, Jembatan, Transportasi Umum, Jaringan Komunikasi dan Pelabuhan Internasional			
1	Pembangunan SPAM Regional	Balikpapan, Samarinda, Paser Utara, Paser, dan Kutai Kartanegara	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Ruas Jalan Provinsi	8 Kabupaten/Kota	-
3	Pembangunan Pelabuhan Internasional Kariangau	Balikpapan	-
Jospol 9: Memudahkan Investasi Termasuk Pemberian Insentif dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Pusat, serta Swasta			
1	Pembuatan Peta Peluang Investasi, Penyusunan IPRO, dan Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi	10 Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2	Forum Investasi Daerah	10 Kabupaten/Kota	Program Promosi Penanaman Modal

Selain mendukung capaian program unggulan Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan juga berupaya mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara pusat dan daerah. Berikut merupakan Kegiatan Prioritas Utama dan program prioritas Kota Balikpapan.

Tabel 3. 20 Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Prioritas Nasional 1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	Pengembangan Pangan Hewani	Prioritas Nasional 2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
4	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Prioritas Nasional 2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
5	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Prioritas Nasional 2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
6	Konservasi Sumber Daya Air	Prioritas Nasional 2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
7	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum
8	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Prioritas Nasional 2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
9	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah Pengampu
10	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
12	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Prioritas Nasional 2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
13	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	Prioritas Nasional 2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
14	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
15	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
16	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Prioritas Nasional 2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
17	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Prioritas Nasional 3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
18	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Prioritas Nasional 3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Prioritas Nasional 3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Prioritas Nasional 3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah Pengampu
21	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Prioritas Nasional 4	Program Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah Pengampu
29	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
30	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
31	Penuntasan TBC	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
32	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
33	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
34	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
35	Investasi pelayanan kesehatan primer	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
36	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah Pengampu
37	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
38	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Prioritas Nasional 5	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
39	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Prioritas Nasional 5	Program Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan
40	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Prioritas Nasional 5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
41	Pengembangan Industri Kimia	Prioritas Nasional 5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian
42	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Prioritas Nasional 6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
43	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Prioritas Nasional 6	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Dinas Sosial
44	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	Prioritas Nasional 6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
45	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Prioritas Nasional 6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman
46	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Prioritas Nasional 7	Program Perumusan Kebijakan, pendampingan, dan Asistensi	Inspektorat

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah Pengampu
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
47	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Prioritas Nasional 7	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi
48	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Prioritas Nasional 7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
49	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Prioritas Nasional 7	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
50	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Prioritas Nasional 7	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
51	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Prioritas Nasional 8	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
52	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Prioritas Nasional 8	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	Prioritas Nasional 8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum

Program prioritas di Kota Balikpapan juga turut serta dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tahun 2025-2029. Berikut merupakan rincian dukungan program terhadap proyek strategis nasional.

Tabel 3. 21 Dukungan Program Kota Balikpapan pada Proyek Strategis Nasional Tahun 2025-2029

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
Makan Bergizi Gratis				
1	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional	Badan Gizi Nasional (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makannan minuman Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Rehabilitasi Sosial
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Nasional	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
5	Program Penuntasan TBC	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
Swasembada Pangan				
6	Layanan Irigasi Pendukung Pangan Nasional	Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Swasembada Energi				
7	North Hub Development Project Selat Makassar	Kalimantan	Swasta	-
Hilirisasi, Industrialisasi, dan Transformasi Digital				
8	Pengembangan Layanan Digital pemerintah Terpadu	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
9	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia	Nasional	Badan Informasi Geospasial	-

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Balikpapan yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah, sekaligus memenuhi layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Selain mencakup target program, bab ini juga memuat pagu indikatif sebagai proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk alokasi dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan. Besaran dana yang tersedia merujuk pada sub bab keuangan di Bab II RPJMD, khususnya terkait kerangka pendanaan yang meliputi kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

Penyusunan program perangkat daerah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, memperhatikan prioritas pembangunan daerah, serta mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi Kota Balikpapan. Sub bab ini menyajikan daftar program yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah di Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Tabel 4. 1 Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					874.338.097.858,000		1.083.906.809.000,000		1.115.981.645.500,000		1.137.604.130.625,000		1.159.956.369.219,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					594.907.808.621,000		672.512.584.400,000		700.236.727.269,000		718.743.530.407,000		734.395.495.991,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	-	87,07	88,18	594.907.808.621,000	89,18	672.512.584.400,000	89,39	700.236.727.269,000	89,59	718.743.530.407,000	89,80	734.395.495.991,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					278.470.213.237,000		408.484.224.600,000		413.014.918.231,000		416.245.600.218,000		422.890.873.228,000	
Meningkatnya Partisipasi dan/atau kemampuan Peserta Didik yang menjadi kewenangan pemerintah kota	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Kesetaraan (%)	64,98	67,18	69,38	278.470.213.237,000	71,58	408.484.224.600,000	73,78	413.014.918.231,000	75,98	416.245.600.218,000	78,18	422.890.873.228,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	99,81	99,93	99,94		99,95		99,96		99,97		99,98		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Keamanan SMP (%)	67,31	64,59	66,59		68,59		70,59		72,59		74,59		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	99,26	99,88	99,89		99,91		99,93		99,95		99,97		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Keamanan Kesetaraan (%)	67,31	64,59	66,59		68,59		70,59		72,59		74,59		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	50,01	53,27	55,27		57,27		59,27		62,27		65,27		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	54,44	54,67	55,67		56,67		57,67		58,67		59,67		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SD/Sederajat (%)	85,56	87,71	88,33		88,94		89,56		90,17		90,79		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD/Sederajat (%)	78,31	78,62	78,93		79,25		79,56		79,87		80,18		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SMP/Sederajat (%)	91,82	91,96	92,11		92,25		92,39		92,54		92,68		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP/Sederajat (%)	88,26	88,43	88,60		88,78		88,95		89,12		89,29		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Keamanan PAUD (%)	73,21	74,59	75,59		76,59		77,59		78,59		79,59		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Keamanan SD (%)	73,37	75,23	75,33		75,43		75,53		75,63		75,73		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi Kesetaraan (%)	61,99	63,19	64,39		65,59		66,79		67,99		69,19		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					0,000		1.340.000.000,000		1.160.000.000,000		1.020.000.000,000		1.050.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	0,000	100	1.340.000.000,000	100	1.160.000.000,000	100	1.020.000.000,000	100	1.050.000.000,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					800.000.000,000		1.200.000.000,000		1.200.000.000,000		1.200.000.000,000		1.200.000.000,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	92	93	95	800.000.000,000	96	1.200.000.000,000	100	1.200.000.000,000	100	1.200.000.000,000	100	1.200.000.000,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					160.076.000,000		370.000.000,000		370.000.000,000		395.000.000,000		420.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	0	0	0	160.076.000,000	0	370.000.000,000	0	370.000.000,000	0	395.000.000,000	0	420.000.000,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					647.668.117.000,000		825.713.750.000,000		833.970.888.000,000		842.310.597.000,000		850.733.703.000,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					386.927.139.400,000		381.703.197.000,000		395.180.009.723,000		437.002.676.440,000		478.929.027.254,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92	386.927.139.400,000	80,42	381.703.197.000,000	81,92	395.180.009.723,000	83,42	437.002.676.440,000	83,42	478.929.027.254,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PUSKESMAS TERITIP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PUSKESMAS LAMARU
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD PUSKESMAS DAMAI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0009 - UPTD PUSKESMAS PRAPATAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0010 - UPTD PUSKESMAS TELAGASARI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0011 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0012 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0013 - UPTD PUSKESMAS MEKARSARI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0014 - UPTD PUSKESMAS KARANG JATI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0015 - UPTD PUSKESMAS KARANG REJO
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0016 - UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0017 - UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0018 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0020 - UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0021 - UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0022 - UPTD PUSKESMAS KARIANGAU
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0023 - UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0024 - UPTD PUSKESMAS BARU ILIR
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0025 - UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0026 - UPTD PUSKESMAS BARU ULU
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0027 - UPTD PUSKESMAS MARGASARI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0028 - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0031 - UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		1.02.0.00.0.00.01.0032 - UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					255.135.977.600,000		438.087.500.000,000		432.282.769.277,000		398.513.850.560,000		364.608.448.746,000	
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100	255.135.977.600,000	100	438.087.500.000,000	100	432.282.769.277,000	100	398.513.850.560,000	100	364.608.448.746,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,60	82,52		83,44		84,36		85,28		86,20		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PUSKESMAS TERITIP
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PUSKESMAS TERITIP
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PUSKESMAS TERITIP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PUSKESMAS LAMARU
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PUSKESMAS LAMARU
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PUSKESMAS LAMARU
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD PUSKESMAS DAMAI
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD PUSKESMAS DAMAI
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD PUSKESMAS DAMAI
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0009 - UPTD PUSKESMAS PRAPATAN
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0009 - UPTD PUSKESMAS PRAPATAN
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0009 - UPTD PUSKESMAS PRAPATAN
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0010 - UPTD PUSKESMAS TELAGASARI
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0010 - UPTD PUSKESMAS TELAGASARI
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0010 - UPTD PUSKESMAS TELAGASARI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0011 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0011 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0011 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0012 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0012 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0012 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0013 - UPTD PUSKESMAS MEKARSARI
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0013 - UPTD PUSKESMAS MEKARSARI
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0013 - UPTD PUSKESMAS MEKARSARI
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0014 - UPTD PUSKESMAS KARANG JATI
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0014 - UPTD PUSKESMAS KARANG JATI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0014 - UPTD PUSKESMAS KARANG JATI
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0015 - UPTD PUSKESMAS KARANG REJO
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0015 - UPTD PUSKESMAS KARANG REJO
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0015 - UPTD PUSKESMAS KARANG REJO
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0016 - UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0016 - UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0016 - UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0017 - UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0017 - UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0017 - UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0018 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0018 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0018 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0020 - UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0020 - UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0020 - UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0021 - UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0021 - UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0021 - UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0022 - UPTD PUSKESMAS KARIANGAU
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0022 - UPTD PUSKESMAS KARIANGAU
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0022 - UPTD PUSKESMAS KARIANGAU
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0023 - UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0023 - UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0023 - UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0024 - UPTD PUSKESMAS BARU ILIR
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0024 - UPTD PUSKESMAS BARU ILIR
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0024 - UPTD PUSKESMAS BARU ILIR
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0025 - UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0025 - UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0025 - UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0026 - UPTD PUSKESMAS BARU ULU
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0026 - UPTD PUSKESMAS BARU ULU
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0026 - UPTD PUSKESMAS BARU ULU
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0027 - UPTD PUSKESMAS MARGASARI
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0027 - UPTD PUSKESMAS MARGASARI
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		1.02.0.00.0.00.01.0027 - UPTD PUSKESMAS MARGASARI
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0028 - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0028 - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0029 - UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0029 - UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,60	82,52		83,44		84,36		85,28		86,20		1.02.0.00.0.00.01.0029 - UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0030 - UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0030 - UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,60	82,52		83,44		84,36		85,28		86,20		1.02.0.00.0.00.01.0030 - UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0031 - UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0031 - UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,60	82,52		83,44		84,36		85,28		86,20		1.02.0.00.0.00.01.0031 - UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0032 - UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0032 - UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,60	82,52		83,44		84,36		85,28		86,20		1.02.0.00.0.00.01.0032 - UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.570.000.000,000		1.427.500.000,000		1.533.500.000,000		1.537.500.000,000		1.544.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	1.570.000.000,000	100	1.427.500.000,000	100	1.533.500.000,000	100	1.537.500.000,000	100	1.544.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	85,19	85,19	86,20		87,32		88,30		89,20		90,02		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					1.135.000.000,000		1.405.000.000,000		1.605.000.000,000		1.650.000.000,000		1.850.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	100	100	100	1.135.000.000,000	100	1.405.000.000,000	100	1.605.000.000,000	100	1.650.000.000,000	100	1.850.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Dokumen Hasil pengawasan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.900.000.000,000		3.090.553.000,000		3.369.609.000,000		3.606.570.000,000		3.802.227.000,000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (Persentase)	10	20	30	2.900.000.000,000	40	3.090.553.000,000	50	3.369.609.000,000	60	3.606.570.000,000	70	3.802.227.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					837.263.494.981,000		2.224.137.299.750,000		2.565.497.585.250,000		2.539.945.540.225,000		2.424.996.374.175,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					34.369.976.932,000		41.082.653.750,000		40.337.653.750,000		40.592.653.750,000		40.597.653.750,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	78,00	80,00	81,00	34.369.976.932,000	82,00	41.082.653.750,000	83,00	40.337.653.750,000	84,00	40.592.653.750,000	85,00	40.597.653.750,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					34.853.640.000,000		354.912.500.000,000		543.750.000.000,000		486.687.500.000,000		244.075.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Bangunan SDA dalam Kondisi Baik (%)	57,81	59,38	60,94	34.853.640.000,000	62,50	354.912.500.000,000	64,06	543.750.000.000,000	65,63	486.687.500.000,000	67,19	244.075.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	11,66	14,88	35,23		53,41		71,59		89,77		100		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
	Persentase Bangunan SDA dalam Kondisi Baik (%)	57,81	59,38	60,94		62,50		64,06		65,63		67,19		1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD DRAINASE DAN BOZEM
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					5.000.000.000,000		226.950.000.000,000		425.625.000.000,000		428.185.000.000,000		422.900.000.000,000	
Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	81,63	81,64	81,67	5.000.000.000,000	81,70	226.950.000.000,000	82,75	425.625.000.000,000	85,39	428.185.000.000,000	86,98	422.900.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					45.879.718.900,000		28.000.000.000,000		13.400.000.000,000		69.100.000.000,000		12.300.000.000,000	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Ketercukupan Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional (%)	94,37	94,91	96,51	45.879.718.900,000	97,32	28.000.000.000,000	98,39	13.400.000.000,000	98,93	69.100.000.000,000	100	12.300.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					10.025.000.000,000		202.398.800.000,000		380.868.800.000,000		414.241.200.000,000		557.844.800.000,000	
Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman dan Berkelanjutan (%)	11,08	11,31	11,31	10.025.000.000,000	12,61	202.398.800.000,000	13,61	380.868.800.000,000	14,61	414.241.200.000,000	15,62	557.844.800.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					188.297.375.444,000		388.035.000.000,000		359.800.000.000,000		243.200.000.000,000		319.010.000.000,000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	73,97	74,80	75,64	188.297.375.444,000	76,48	388.035.000.000,000	77,31	359.800.000.000,000	78,15	243.200.000.000,000	78,98	319.010.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	73,97	74,80	75,64		76,48		77,31		78,15		78,98		1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD DRAINASE DAN BOZEM
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					141.690.000.000,000		336.230.000.000,000		205.970.000.000,000		199.543.500.000,000		209.120.675.000,000	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Kepatuhan PBG Kabupaten/kota (%)	90,00	90,00	90,00	141.690.000.000,000	90,84	336.230.000.000,000	91,51	205.970.000.000,000	92,05	199.543.500.000,000	92,48	209.120.675.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					33.357.967.000,000		40.925.418.000,000		36.436.311.000,000		45.252.196.000,000		27.452.196.000,000	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	96,9	100	100	33.357.967.000,000	100	40.925.418.000,000	100	36.436.311.000,000	100	45.252.196.000,000	100	27.452.196.000,000	2.10.1.03.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					334.229.837.825,000		593.588.000.000,000		545.084.450.000,000		599.108.911.100,000		574.472.619.425,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Konektivitas Jalan (%)	84,34	84,73	84,89	334.229.837.825,000	85,43	593.588.000.000,000	85,92	545.084.450.000,000	86,41	599.108.911.100,000	86,90	574.472.619.425,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
	Tingkat Konektivitas Jalan (%)	84,34	84,73	84,89		85,43		85,92		86,41		86,90		1.03.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					2.424.978.880,000		2.675.000.000,000		2.675.000.000,000		2.675.000.000,000		2.675.000.000,000	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi (%)	100	100	100	2.424.978.880,000	100	2.675.000.000,000	100	2.675.000.000,000	100	2.675.000.000,000	100	2.675.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	3,09	3,09	12,94		15,61		18,27		20,93		23,60		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					7.135.000.000,000		9.339.928.000,000		11.550.370.500,000		11.359.579.375,000		14.548.430.000,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Nilai Kualitas Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Nilai)	0	0	0,66	7.135.000.000,000	0,68	9.339.928.000,000	0,68	11.550.370.500,000	0,69	11.359.579.375,000	0,70	14.548.430.000,000	2.10.1.03.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					68.235.038.000,000		70.282.089.000,000		73.796.193.000,000		75.272.117.000,000		77.530.281.000,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.108.864.277,000		15.582.089.000,000		16.046.193.000,000		16.522.117.000,000		16.780.281.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	84,02	85,00	86,00	14.108.864.277,000	87,00	15.582.089.000,000	88,00	16.046.193.000,000	89,00	16.522.117.000,000	90,00	16.780.281.000,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					18.448.933.454,000		15.000.000.000,000		23.000.000.000,000		15.000.000.000,000		15.000.000.000,000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	0,00	15,49	32,39	18.448.933.454,000	49,30	15.000.000.000,000	66,20	23.000.000.000,000	83,10	15.000.000.000,000	100,00	15.000.000.000,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni (%)	0,00	0,00	11,11		33,33		55,56		77,78		100,00		1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni Melalui Penyediaan Unit Hunian Vertikal (%)	80,00	83,38	86,76		90,14		95,51		96,89		100,00		1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	0	17,65	35,29		51,47		67,65		83,82		100,00		1.04.0.00.0.00.01.0001 - UPTD RUSUNAWA
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni (%)	0,00	0,00	21,43		42,86		64,29		85,71		100,00		1.04.0.00.0.00.01.0001 - UPTD RUSUNAWA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni Melalui Penyediaan Unit Hunian Vertikal (%)	80,00	83,38	86,76		90,14		93,51		96,89		100,00		1.04.0.00.0.00.01.0001 - UPTD RUSUNAWA
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.784.901.459,000		10.300.000.000,000		8.750.000.000,000		7.950.000.000,000		8.050.000.000,000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani (%)	0,00	0,00	25,77	2.784.901.459,000	41,41	10.300.000.000,000	60,25	8.750.000.000,000	77,23	7.950.000.000,000	100,00	8.050.000.000,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					5.629.949.750,000		4.300.000.000,000		5.900.000.000,000		7.700.000.000,000		14.600.000.000,000	
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman diluar kawasan permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Presentase Pemenuhan rumah layak huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (%)	7,17	15,60	28,33	5.629.949.750,000	36,76	4.300.000.000,000	49,41	5.900.000.000,000	66,27	7.700.000.000,000	100,00	14.600.000.000,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					27.262.389.060,000		25.000.000.000,000		20.000.000.000,000		28.000.000.000,000		23.000.000.000,000	
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase Perumahan dengan PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota (%)	16,42	25,37	40,30	27.262.389.060,000	55,22	25.000.000.000,000	70,15	20.000.000.000,000	85,07	28.000.000.000,000	100,00	23.000.000.000,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					0,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)	52,44	69,51	75,61	0,000	81,71	100.000.000,000	87,80	100.000.000,000	93,90	100.000.000,000	100,00	100.000.000,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					100.954.246.856,000		103.982.874.000,000		109.182.018.000,000		122.078.599.000,000		113.545.119.000,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					91.049.526.404,000		90.104.624.000,000		94.030.718.000,000		95.901.849.000,000		97.720.119.000,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	83,47	84,00	84,50	91.049.526.404,000	85,00	90.104.624.000,000	85,50	94.030.718.000,000	86,00	95.901.849.000,000	86,50	97.720.119.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	95,07	95,17	95,27		95,37		95,47		95,57		95,67		1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					6.154.792.596,000		5.900.000.000,000		7.362.000.000,000		17.694.000.000,000		6.855.000.000,000	
Meningkatnya kepatuhan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	991.623.831,000	100	1.015.000.000,000	100	1.042.000.000,000	100	1.069.000.000,000	100	1.105.000.000,000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
masyarakat terhadap Perda dan Perkada														
Meningkatnya kualitas penanganan terhadap gangguan trantibum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani (%)	100	100	100	2.379.117.825,000	100	2.495.000.000,000	100	3.010.000.000,000	100	3.770.000.000,000	100	3.030.000.000,000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya kompetensi SDM Satlinmas	Persentase Satlinmas yang ditingkatkan kompetensinya (%)	68,39	70,39	72,39	2.783.050.940,000	74,39	2.340.000.000,000	76,39	3.260.000.000,000	78,39	12.805.000.000,000	80,39	2.670.000.000,000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya kompetensi SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya (%)	100	100	100	1.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.419.968.000,000		4.231.250.000,000		4.392.500.000,000		4.396.750.000,000		4.250.000.000,000	
Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	90	91	92	1.419.968.000,000	93	4.231.250.000,000	94	4.392.500.000,000	95	4.396.750.000,000	96	4.250.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	80	82	84		86		88		90		92		1.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.329.959.856,000		3.747.000.000,000		3.396.800.000,000		4.086.000.000,000		4.720.000.000,000	
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Kebakaran serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Kebakaran (%)	85	86	87	2.329.959.856,000	88	3.747.000.000,000	89	3.396.800.000,000	90	4.086.000.000,000	91	4.720.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Nonkebakaran (%)	97	97,5	98		98,5		99		99,5		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Satuan / Lembaga Yang Telah Membentuk SKKL sesuai RISPKP (%)	76	78	80		82		84		86		88		1.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					23.409.311.000,000		24.111.590.000,000		25.317.170.000,000		25.823.513.000,000		26.598.218.000,000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.113.204.040,000		15.136.590.000,000		15.869.970.000,000		16.107.113.000,000		16.578.218.000,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	87,07	88,18	89,18	14.113.204.040,000	89,39	15.136.590.000,000	89,59	15.869.970.000,000	89,80	16.107.113.000,000	90,00	16.578.218.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.572.564.000,000		2.480.000.000,000		2.480.000.000,000		2.480.000.000,000		2.480.000.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	78	79	80	1.572.564.000,000	85	2.480.000.000,000	90	2.480.000.000,000	95	2.480.000.000,000	100	2.480.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.936.482.960,000		3.065.000.000,000		3.467.000.000,000		3.631.400.000,000		3.875.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase layanan rehabilitas sosial PPKS terlantar yang terpenuhi (%)	84	85	86	2.936.482.960,000	87	3.065.000.000,000	88	3.467.000.000,000	89	3.631.400.000,000	90	3.875.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					3.749.424.000,000		2.400.000.000,000		2.470.000.000,000		2.530.000.000,000		2.595.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	40	50	60	3.749.424.000,000	70	2.400.000.000,000	80	2.470.000.000,000	90	2.530.000.000,000	100	2.595.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					737.636.000,000		760.000.000,000		755.200.000,000		795.000.000,000		785.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	737.636.000,000	100	760.000.000,000	100	755.200.000,000	100	795.000.000,000	100	785.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					300.000.000,000		270.000.000,000		275.000.000,000		280.000.000,000		285.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP Nasional yang Terkelola dengan Baik	82	85	87	300.000.000,000	88	270.000.000,000	89	275.000.000,000	90	280.000.000,000	91	285.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					13.251.393.000,000		18.383.907.000,000		19.303.102.000,000		19.689.164.000,000		20.279.839.000,000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.705.975.939,000		14.367.477.880,000		14.942.176.994,000		15.241.020.534,000		15.698.251.149,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan,	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	93,07	93,08	93,10	10.705.975.939,000	93,20	14.367.477.880,000	93,30	14.942.176.994,000	93,40	15.241.020.534,000	93,50	15.698.251.149,000	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah														
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.000.000,000		383.500.000,000		153.525.000,000		156.595.500,000		161.293.365,000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Rencana Tenaga Kerja (RTK) (%)	3,10	3,50	3,60	100.000.000,000	3,65	383.500.000,000	3,70	153.525.000,000	3,75	156.595.500,000	3,80	161.293.365,000	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.360.781.331,000		1.952.604.633,000		2.275.026.846,000		2.320.527.343,000		2.390.143.244,000	
Meningkatnya pencari kerja yang mendapat pelatihan yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur (%)	75	63	42	1.360.781.331,000	46	1.952.604.633,000	48	2.275.026.846,000	50	2.320.527.343,000	52	2.390.143.244,000	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					492.873.075,000		890.321.343,000		1.023.869.544,000		1.044.346.935,000		1.075.677.343,000	
Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan di sektor formal	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan (%)	36,99	37,00	37,10	492.873.075,000	37,20	890.321.343,000	37,30	1.023.869.544,000	37,40	1.044.346.935,000	37,50	1.075.677.343,000	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					591.762.655,000		790.003.144,000		908.503.616,000		926.673.688,000		954.473.899,000	
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	55,08	55,73	56,39	591.762.655,000	57,04	790.003.144,000	57,69	908.503.616,000	58,35	926.673.688,000	59,00	954.473.899,000	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					17.042.200.464,000		18.942.868.000,000		20.430.861.000,000		20.530.000.000,000		22.210.957.000,000	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.503.280.922,000		15.175.000.000,000		16.330.861.000,000		16.310.000.000,000		17.825.957.000,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	77	77	78	13.503.280.922,000	79	15.175.000.000,000	80	16.330.861.000,000	81	16.310.000.000,000	82	17.825.957.000,000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					152.014.700,000		185.000.000,000		250.000.000,000		270.000.000,000		285.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dana efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	40,02	41	41	152.014.700,000	42	185.000.000,000	43	250.000.000,000	44	270.000.000,000	45	285.000.000,000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	52,71	52,71	53,17		53,40		53,63		53,86		54,07		2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					200.000.000,000		200.000.000,000		220.000.000,000		230.000.000,000		240.000.000,000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	220.000.000,000	100	230.000.000,000	100	240.000.000,000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					295.000.000,000		307.868.000,000		325.000.000,000		325.000.000,000		350.000.000,000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) (Indeks)	89,94	89,95	89,96	295.000.000,000	89,96	307.868.000,000	89,98	325.000.000,000	90,0	325.000.000,000	90,0	350.000.000,000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					62.493.400,000		65.000.000,000		75.000.000,000		85.000.000,000		95.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Data Gender dan Anak yang Terpilah (%)	0	0	26	62.493.400,000	27	65.000.000,000	29	75.000.000,000	30	85.000.000,000	31	95.000.000,000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					1.100.000.000,000		1.190.000.000,000		1.340.000.000,000		1.350.000.000,000		1.360.000.000,000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	61,27	61,28	61,28	1.100.000.000,000	61,29	1.190.000.000,000	61,30	1.340.000.000,000	61,31	1.350.000.000,000	61,32	1.360.000.000,000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					1.729.411.442,000		1.820.000.000,000		1.890.000.000,000		1.960.000.000,000		2.055.000.000,000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	79,33	79,55	79,55	1.729.411.442,000	79,66	1.820.000.000,000	79,74	1.890.000.000,000	79,89	1.960.000.000,000	80,5	2.055.000.000,000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					22.781.337.401,000		22.931.337.401,500		23.131.337.401,500		23.131.337.401,500		23.131.337.401,500	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.696.930.093,500		21.696.930.093,500		21.696.930.093,500		21.696.930.093,500		21.696.930.093,500	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	77,54	77,70	78,00	21.696.930.093,500	78,13	21.696.930.093,500	79,00	21.696.930.093,500	80,00	21.696.930.093,500	80,88	21.696.930.093,500	3.27.3.25.2.09.01.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					848.833.557,500		998.833.558,000		1.198.833.558,000		1.198.833.558,000		1.198.833.558,000	
Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan daerah yang beragam, bergizi, aman, dan terjangkau untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat serta	Persentase cadangan pangan (%)	13,02	70,05	72,41	848.833.557,500	77,00	998.833.558,000	81,07	1.198.833.558,000	84,65	1.198.833.558,000	85,53	1.198.833.558,000	3.27.3.25.2.09.01.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
menjaga stabilitas pangan														
														3.27.3.25.2.09.01.0001 - UPTD Rumah Pemotongan Hewan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000	
Menurunnya jumlah wilayah rentan rawan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	14,70	35,30	35,30	35.000.000,000	32,40	35.000.000,000	29,40	35.000.000,000	26,50	35.000.000,000	23,50	35.000.000,000	3.27.3.25.2.09.01.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					200.573.750,000		200.573.750,000		200.573.750,000		200.573.750,000		200.573.750,000	
Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	76,67	78,67	78,67	200.573.750,000	79,33	200.573.750,000	79,33	200.573.750,000	80,00	200.573.750,000	80,00	200.573.750,000	3.27.3.25.2.09.01.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					65.276.216.000,000		64.350.000.000,000		72.359.431.500,000		66.141.259.625,000		84.435.000.000,000	
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.847.931.300,000		12.945.000.000,000		13.035.000.000,000		13.330.000.000,000		13.980.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan,	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	85,00	85,00	86,00	12.847.931.300,000	87,00	12.945.000.000,000	88,00	13.035.000.000,000	89,00	13.330.000.000,000	90,00	13.980.000.000,000	2.10.1.03.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah														
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					30.000.000,000		55.000.000,000		55.000.000,000		55.000.000,000		55.000.000,000	
Meningkatnya penyelesaian mediasi kasus sengketa tanah	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi (%)	80	80	85	30.000.000,000	90	55.000.000,000	93	55.000.000,000	95	55.000.000,000	100	55.000.000,000	2.10.1.03.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					52.148.284.700,000		51.000.000.000,000		58.894.431.500,000		52.356.259.625,000		70.000.000.000,000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Luas Tanah yang Dibebaskan (%)	-	0	31,43	52.148.284.700,000	31,43	51.000.000.000,000	41,19	58.894.431.500,000	45,25	52.356.259.625,000	56,66	70.000.000.000,000	2.10.1.03.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					250.000.000,000		350.000.000,000		375.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan tanah atas IMTN	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan (%)	87	87	87,5	250.000.000,000	87,5	350.000.000,000	88	375.000.000,000	88	400.000.000,000	88,5	400.000.000,000	2.10.1.03.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					190.094.116.000,000		215.796.939.000,000		396.586.786.000,000		404.518.522.000,000		416.654.078.000,000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.626.244.849,000		32.305.000.000,000		33.052.000.000,000		33.861.100.000,000		34.876.933.340,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	87,07	88,18	89,18	28.626.244.849,000	89,39	32.305.000.000,000	89,59	33.052.000.000,000	89,80	33.861.100.000,000	90,00	34.876.933.340,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					190.000.000,000		1.105.500.000,000		1.126.512.000,000		833.600.000,000		858.608.000,000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	89	100	100	190.000.000,000	100	1.105.500.000,000	100	1.126.512.000,000	100	833.600.000,000	100	858.608.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					3.075.000.000,000		6.930.000.000,000		7.072.680.000,000		7.216.006.000,000		7.432.486.180,000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Parameter yang Memenuhi Baku Mutu (%)	77,9	77,9	78	3.075.000.000,000	79	6.930.000.000,000	80	7.072.680.000,000	81	7.216.006.000,000	82	7.432.486.180,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					67.320.871.151,000		69.982.939.000,000		72.357.000.000,000		73.803.060.000,000		76.017.151.800,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH yang dikelola (%)	16,49	16,54	16,54	67.320.871.151,000	16,54	69.982.939.000,000	16,54	72.357.000.000,000	16,54	73.803.060.000,000	16,54	76.017.151.800,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase RTH yang dikelola (%)	16,49	16,54	16,54		16,54		16,54		16,54		16,54		2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPTD KEBUN RAYA BALIKPAPAN
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN					200.000.000,000		130.000.000,000		132.600.000,000		136.500.000,000		140.595.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BERACUN (LIMBAH B3)														
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Limbah B3 yang Terkelola (Ton)	44.687	44.687	44.787	200.000.000,000	44.887	130.000.000,000	44.987	132.600.000,000	45.087	136.500.000,000	45.187	140.595.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					625.000.000,000		913.500.000,000		1.069.770.000,000		1.124.500.000,000		1.158.235.000,000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis (%)	5,30	5,25	5,20	625.000.000,000	5,15	913.500.000,000	5,10	1.069.770.000,000	5,05	1.124.500.000,000	5,00	1.158.235.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					2.141.000.000,000		1.750.000.000,000		1.880.060.000,000		1.918.000.000,000		1.975.540.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	84,09	84,59	85	2.141.000.000,000	85,5	1.750.000.000,000	86	1.880.060.000,000	86,5	1.918.000.000,000	87	1.975.540.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					716.000.000,000		850.000.000,000		867.000.000,000		884.500.000,000		911.035.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	67,69	67,90	68,00	716.000.000,000	68,50	850.000.000,000	69,00	867.000.000,000	69,50	884.500.000,000	70,00	911.035.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					200.000.000,000		300.000.000,000		306.000.000,000		312.120.000,000		321.483.600,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	300.000.000,000	100	306.000.000,000	100	312.120.000,000	100	321.483.600,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					87.000.000.000,000		101.530.000.000,000		278.723.164.000,000		284.429.136.000,000		292.962.010.080,000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan (%)	99	99,1	99,2	87.000.000.000,000	99,3	101.530.000.000,000	99,4	278.723.164.000,000	99,5	284.429.136.000,000	99,6	292.962.010.080,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Pengelolaan Persampahan (%)	99	99,1	99,2		99,3		99,4		99,5		99,6		2.11.0.00.0.00.01.0002 - UPTD TEMPAT PEMPROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					20.705.866.000,000		21.327.042.000,000		22.393.394.000,000		22.841.262.000,000		23.526.500.000,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.230.048.875,000		18.560.597.875,000		19.815.056.175,000		20.225.329.655,000		20.926.663.683,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan,	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	87,82	87,89	87,94	18.230.048.875,000	88,00	18.560.597.875,000	88,05	19.815.056.175,000	88,10	20.225.329.655,000	88,15	20.926.663.683,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah														
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.815.735.000,000		1.658.900.000,000		1.513.900.500,000		1.513.900.500,000		1.513.900.500,000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase cakupan perekaman dan pencetakan KTP-elektronik (%)	99,950	99,951	99,952	1.815.735.000,000	99,953	1.658.900.000,000	99,954	1.513.900.500,000	99,955	1.513.900.500,000	99,956	1.513.900.500,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase anak usi 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	99,42	99,45	99,47		99,49		99,51		99,53		99,55		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	5,18	15,00	17,50		20,00		22,50		25,00		30,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					117.420.000,000		435.920.000,000		440.000.000,000		474.500.000,000		455.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	95,09	95,15	100	117.420.000,000	100	435.920.000,000	100	440.000.000,000	100	474.500.000,000	100	455.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-18 tahun (%)	99,77	99,78	99,79		99,81		99,83		99,85		99,87		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					518.492.125,000		643.492.125,000		593.492.125,000		593.492.125,000		593.492.125,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan Informasi Kependudukan (%)	0	13,04	82,61	518.492.125,000	86,96	643.492.125,000	91,30	593.492.125,000	95,65	593.492.125,000	100	593.492.125,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					24.170.000,000		28.132.000,000		30.945.200,000		34.039.720,000		37.443.692,000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Kelengkapan Profil Kependudukan sesuai standar (%)	0	100	100	24.170.000,000	100	28.132.000,000	100	30.945.200,000	100	34.039.720,000	100	37.443.692,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7.257.799.506,000		5.455.000.000,000		5.130.000.000,000		5.687.628.000,000		4.735.000.000,000	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					294.680.400,000		295.000.000,000		350.000.000,000		355.000.000,000		375.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi (%)	100	100	100	294.680.400,000	100	295.000.000,000	100	350.000.000,000	100	355.000.000,000	100	375.000.000,000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					6.963.119.106,000		5.160.000.000,000		4.780.000.000,000		5.332.628.000,000		4.360.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota (%)	0	100	100	6.963.119.106,000	100	5.160.000.000,000	100	4.780.000.000,000	100	5.332.628.000,000	100	4.360.000.000,000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2.303.830.084,000		2.472.000.000,000		2.652.500.000,000		2.560.000.000,000		2.695.000.000,000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					498.830.054,000		525.000.000,000		560.000.000,000		360.000.000,000		360.000.000,000	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,19	2,19	2,18	498.830.054,000	2,18	525.000.000,000	2,17	560.000.000,000	2,17	360.000.000,000	2,17	360.000.000,000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	14,5	13.5	12.6		11.9		11.3		10.7		10.2		2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					755.000.000,000		830.000.000,000		895.000.000,000		950.000.000,000		1.020.000.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	64,45	64,45	64,8	755.000.000,000	65	830.000.000,000	65,2	895.000.000,000	65,4	950.000.000,000	65,6	1.020.000.000,000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,20	12,20	12,09		11,98		11,88		11,77		11,67		2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi (Demand Satisfied) (%)	81,6	81,8	82		82,2		82,4		82,6		82,8		2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.050.000.030,000		1.117.000.000,000		1.197.500.000,000		1.250.000.000,000		1.315.000.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	8,5	8,5	8,7	1.050.000.030,000	8,9	1.117.000.000,000	9,09	1.197.500.000,000	9,28	1.250.000.000,000	9,3	1.315.000.000,000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					185.191.400.000,000		190.747.142.000,000		200.284.499.000,000		204.290.189.000,000		210.418.895.000,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					42.795.900.000,000		44.894.142.000,000		44.018.499.000,000		45.742.499.000,000		46.821.205.000,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan,	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	70,00	73,00	75,00	42.795.900.000,000	77,00	44.894.142.000,000	79,00	44.018.499.000,000	81,00	45.742.499.000,000	83,00	46.821.205.000,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah														
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					141.720.500.000,000		144.553.000.000,000		154.966.000.000,000		157.247.690.000,000		162.297.690.000,000	
Terselenggaranya kinerja lalu lintas Kota Balikpapan	Konektivitas Darat (%)	42	42	53	141.720.500.000,000	64	144.553.000.000,000	75	154.966.000.000,000	86	157.247.690.000,000	100	162.297.690.000,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang dalam kondisi baik (%)	64,16	73,33	78,68		81,30		94,98		97,49		100		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Konektivitas Darat (%)	42	42	42		42		80		80		80		2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	90	91	92		93		94		95		96		2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PENGELOLAAN PARKIR
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					675.000.000,000		1.300.000.000,000		1.300.000.000,000		1.300.000.000,000		1.300.000.000,000	
Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan	Konektivitas Laut (%)	50	50	50	675.000.000,000	50	1.300.000.000,000	50	1.300.000.000,000	50	1.300.000.000,000	50	1.300.000.000,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					64.536.286.855,000		48.033.000.000,000		49.841.396.000,000		50.881.684.000,000		52.045.455.000,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.029.928.108,000		13.409.000.000,000		13.892.000.000,000		13.892.000.000,000		14.099.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	87,08	87,00	87,20	31.029.928.108,000	87,50	13.409.000.000,000	87,70	13.892.000.000,000	87,90	13.892.000.000,000	88,00	14.099.000.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					16.480.322.137,000		15.624.000.000,000		16.879.396.000,000		18.204.684.000,000		18.551.455.000,000	
Meningkatnya jangkauan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	86,0	86,2	86,5	16.480.322.137,000	86,7	15.624.000.000,000	86,9	16.879.396.000,000	87,0	18.204.684.000,000	87,2	18.551.455.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					17.026.036.610,000		19.000.000.000,000		19.070.000.000,000		18.785.000.000,000		19.395.000.000,000	
Meningkatnya jumlah layanan digital terintegrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan digital	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi (%)	85,00	85,50	86,00	17.026.036.610,000	86,50	19.000.000.000,000	87,00	19.070.000.000,000	88,00	18.785.000.000,000	89,00	19.395.000.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					20.699.317.536,000		23.462.248.000,000		24.623.948.436,000		24.969.244.000,000		25.718.167.000,000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.137.117.536,000		11.791.706.803,000		12.525.168.592,000		12.689.128.071,000		13.389.147.593,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	82,45	83,00	84,00	11.137.117.536,000	85,00	11.791.706.803,000	86,00	12.525.168.592,000	87,00	12.689.128.071,000	88,00	13.389.147.593,000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					272.900.000,000		602.200.000,000		683.779.844,000		715.115.929,000		764.019.407,000	
Meningkatnya koperasi sehat	Persentase Koperasi Sehat (%)	4,69	4,94	6,17	272.900.000,000	7,41	602.200.000,000	8,64	683.779.844,000	9,88	715.115.929,000	11,11	764.019.407,000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					465.000.000,000		465.000.000,000		465.000.000,000		465.000.000,000		465.000.000,000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kualitasnya (%)	6,25	4,94	6,17	465.000.000,000	6,42	465.000.000,000	6,67	465.000.000,000	6,91	465.000.000,000	7,16	465.000.000,000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					639.300.000,000		450.000.000,000		450.000.000,000		450.000.000,000		450.000.000,000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	23,44	25,95	26,21	639.300.000,000	26,46	450.000.000,000	26,71	450.000.000,000	26,96	450.000.000,000	27,21	450.000.000,000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					2.275.000.000,000		3.205.000.000,000		3.400.000.000,000		3.400.000.000,000		3.400.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas UMKM yang mandiri	Pertumbuhan Usaha Mikro Formal (%)	1,25	1,35	1,39	2.275.000.000,000	1,83	3.205.000.000,000	2,03	3.400.000.000,000	2,09	3.400.000.000,000	2,13	3.400.000.000,000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					5.910.000.000,000		6.948.341.197,000		7.100.000.000,000		7.250.000.000,000		7.250.000.000,000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi (%)	11,14	11,63	11,93	5.910.000.000,000	11,98	6.948.341.197,000	12,50	7.100.000.000,000	12,70	7.250.000.000,000	12,72	7.250.000.000,000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					18.749.639.000,000		19.312.128.000,000		20.277.734.000,000		20.683.289.000,000		21.303.788.000,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.843.690.311,000		16.621.126.711,000		16.873.528.818,000		17.366.043.797,000		17.832.484.755,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	94,32	94,40	94,57	15.843.690.311,000	94,82	16.621.126.711,000	95,07	16.873.528.818,000	95,32	17.366.043.797,000	95,57	17.832.484.755,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					215.000.000,000		465.000.000,000		515.023.443,000		854.873.069,000		935.059.946,000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	128	100	100	215.000.000,000	100	465.000.000,000	100	515.023.443,000	100	854.873.069,000	100	935.059.946,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					912.392.310,000		912.392.310,000		1.512.392.310,000		932.140.156,000		960.104.361,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase investor potensial (%)	8,3	15,38	25	912.392.310,000	33,30	912.392.310,000	35	1.512.392.310,000	37,03	932.140.156,000	37,8	960.104.361,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.011.450.379,000		508.147.679,000		531.055.063,000		543.176.164,000		559.471.449,000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	97,72	97,77	97,82	1.011.450.379,000	97,92	508.147.679,000	98,02	531.055.063,000	98,12	543.176.164,000	98,22	559.471.449,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					343.303.000,000		360.468.150,000		378.491.558,000		510.468.150,000		525.782.195,000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya (%)	100	100	100	343.303.000,000	100	360.468.150,000	100	378.491.558,000	100	510.468.150,000	100	525.782.195,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					423.803.000,000		444.993.150,000		467.242.808,000		476.587.664,000		490.885.294,000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	423.803.000,000	100	444.993.150,000	100	467.242.808,000	100	476.587.664,000	100	490.885.294,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					51.725.221.266,000		53.276.977.836,000		55.940.826.916,000		58.189.535.097,000		67.467.829.681,000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					16.399.505.545,000		16.891.490.690,000		17.736.065.284,000		18.449.019.262,000		21.390.706.891,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	87,07	88,18	89,18	16.399.505.545,000	89,39	16.891.490.690,000	89,59	17.736.065.284,000	89,80	18.449.019.262,000	90,00	21.390.706.891,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					7.530.347.977,000		7.756.258.406,000		8.144.071.354,000		8.471.446.563,000		9.822.214.817,000	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan (%)	2,28	2,28	2,30	7.530.347.977,000	2,32	7.756.258.406,000	2,34	8.144.071.354,000	2,36	8.471.446.563,000	2,38	9.822.214.817,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					27.161.837.744,000		27.976.692.841,000		29.375.527.582,000		30.556.364.420,000		35.428.562.660,000	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Medali yang Diraih Atlet dan Pegiat Olahraga pada Tingkat Provinsi (Medali)	252	252	500	27.161.837.744,000	510	27.976.692.841,000	515	29.375.527.582,000	520	30.556.364.420,000	525	35.428.562.660,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					633.530.000,000		652.535.899,000		685.162.696,000		712.704.852,000		826.345.313,000	
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan (%)	3,23	3,23	3,30	633.530.000,000	3,40	652.535.899,000	3,50	685.162.696,000	3,60	712.704.852,000	3,70	826.345.313,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					980.450.000,000		1.104.520.000,000		1.223.000.000,000		1.244.000.000,000		1.554.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					980.450.000,000		1.104.520.000,000		1.223.000.000,000		1.244.000.000,000		1.554.000.000,000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Melakukan Publikasi Data Statistik yang Menerapkan Standar Akurasi yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	17,64	23,52	29,41	980.450.000,000	35,29	1.104.520.000,000	41,17	1.223.000.000,000	47,05	1.244.000.000,000	52,94	1.554.000.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					980.000.000,000		1.400.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.150.000.000,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					980.000.000,000		1.400.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.150.000.000,000	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	37,83	37,83	38,76	980.000.000,000	40,31	1.400.000.000,000	40,31	2.000.000.000,000	41,09	2.000.000.000,000	41,09	2.150.000.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.249.775.000,000		6.176.500.000,000		6.804.162.500,000		7.525.169.375,000		8.075.516.781,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					892.000.000,000		3.544.750.000,000		3.957.912.500,000		4.442.969.375,000		4.733.771.781,000	
Meningkatnya Warisan Budaya Kota Balikpapan yang Ditetapkan	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pencatatan (%)	-	-	50	892.000.000,000	50	3.544.750.000,000	66,67	3.957.912.500,000	66,67	4.442.969.375,000	75	4.733.771.781,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					390.000.000,000		607.750.000,000		619.850.000,000		633.160.000,000		647.801.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni Dalam 3 Bulan Terakhir (%)	2,54	2,62	2,7	390.000.000,000	2,78	607.750.000,000	2,86	619.850.000,000	2,94	633.160.000,000	3,02	647.801.000,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					20.000.000,000		181.500.000,000		199.650.000,000		219.615.000,000		241.576.500,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Dunia Dalam Setahun Terakhir (%)	0,25	0,33	0,43	20.000.000,000	0,57	181.500.000,000	0,76	199.650.000,000	1	219.615.000,000	1,33	241.576.500,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					947.775.000,000		1.842.500.000,000		2.026.750.000,000		2.229.425.000,000		2.452.367.500,000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Terhadap Total Pendaftaran (%)	22,56	23,70	24,82	947.775.000,000	25,90	1.842.500.000,000	26,95	2.026.750.000,000	27,97	2.229.425.000,000	28,97	2.452.367.500,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					13.413.845.200,000		13.546.211.000,000		16.236.777.000,000		16.541.701.000,000		17.027.106.000,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.146.510.965,000		12.278.876.765,000		14.098.452.000,000		14.296.448.000,000		14.669.585.300,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	95,45	81,00	95,46	12.146.510.965,000	95,47	12.278.876.765,000	95,48	14.098.452.000,000	95,49	14.296.448.000,000	95,50	14.669.585.300,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
akuntabilitas kinerja perangkat daerah														
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.267.334.235,000		1.267.334.235,000		2.138.325.000,000		2.245.253.000,000		2.357.520.700,000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional (%)	7	7	8	1.267.334.235,000	8	1.267.334.235,000	8,5	2.138.325.000,000	9	2.245.253.000,000	9,5	2.357.520.700,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					624.024.395,000		912.795.000,000		945.179.000,000		983.894.000,000		1.024.257.000,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					547.536.610,000		841.758.000,000		871.621.000,000		907.323.000,000		944.545.000,000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip dinamis dan statis sesuai dengan NSPK (%)	100	100	100	547.536.610,000	100	841.758.000,000	100	871.621.000,000	100	907.323.000,000	100	944.545.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					76.487.785,000		71.037.000,000		73.558.000,000		76.571.000,000		79.712.000,000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase arsip hasil alih media yang telah autentifikasi (%)	100	100	100	76.487.785,000	100	71.037.000,000	100	73.558.000,000	100	76.571.000,000	100	79.712.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.970.242.398,000		2.220.242.398,000		2.770.242.398,000		3.020.242.398,000		2.520.242.398,000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					599.771.580,000		599.771.580,000		849.771.580,000		849.771.580,000		849.771.580,000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) (Ton)	4.109	4.500	5,250	599.771.580,000	6.000	599.771.580,000	6.750	849.771.580,000	7.500	849.771.580,000	8.250	849.771.580,000	3.27.3.25.2.09.01.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.370.470.818,000		1.370.470.818,000		1.620.470.818,000		1.870.470.818,000		1.370.470.818,000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) (Ton)	163,473	312	319	1.370.470.818,000	320	1.370.470.818,000	327	1.620.470.818,000	333	1.870.470.818,000	340	1.370.470.818,000	3.27.3.25.2.09.01.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					0,000		250.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Tersedianya produk olahan perikanan	Volume Produksi Olahan Perikanan (Ton)	0	0	0	0,000	1.130	250.000.000,000	1.132	300.000.000,000	1.134	300.000.000,000	1.136	300.000.000,000	3.27.3.25.2.09.01.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					16.943.181.734,000		17.451.477.164,000		18.324.051.084,000		19.060.640.903,000		22.099.851.319,000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					6.464.855.658,000		6.658.801.319,000		6.991.741.409,000		7.272.795.283,000		8.432.439.142,000	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata (%)	3,8	3,8	3,7	6.464.855.658,000	3,6	6.658.801.319,000	3,5	6.991.741.409,000	3,4	7.272.795.283,000	3,3	8.432.439.142,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					7.017.379.826,000		7.227.901.212,000		7.589.296.298,000		7.894.370.670,000		9.153.124.439,000	
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Wisatawan (%)	4,37	4,38	4,40	7.017.379.826,000	4,42	7.227.901.212,000	4,44	7.589.296.298,000	4,47	7.894.370.670,000	4,49	9.153.124.439,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					2.149.185.000,000		2.469.774.633,000		2.400.000.000,000		2.550.000.000,000		2.814.287.738,000	
Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	18	18	18	2.149.185.000,000	20	2.469.774.633,000	23	2.400.000.000,000	25	2.550.000.000,000	29	2.814.287.738,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.311.761.250,000		1.095.000.000,000		1.343.013.377,000		1.343.474.950,000		1.700.000.000,000	
Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	7	7	7	1.311.761.250,000	7,5	1.095.000.000,000	7,7	1.343.013.377,000	7,9	1.343.474.950,000	8	1.700.000.000,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					4.551.517.201,000		5.030.610.201,000		15.789.720.201,000		16.373.546.201,000		17.724.049.201,000	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.000.000.000,000		1.230.000.000,000		1.200.000.000,000		1.560.000.000,000		1.250.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat penggiat sektor pertanian terhadap sarana pertanian	Persentase Jumlah Masyarakat Penggiat Sektor Pertanian yang Mendapat Akses Bantuan Sarana Pertanian (%)	26,00	26,00	26,50	1.000.000.000,000	27,00	1.230.000.000,000	27,50	1.200.000.000,000	28,00	1.560.000.000,000	28,50	1.250.000.000,000	3.27.3.25.2.09.01.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.726.241.370,000		1.666.241.370,000		12.514.444.370,000		12.416.241.370,000		14.648.773.370,000	
Meningkatnya dukungan prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	7	8	8	1.726.241.370,000	9	1.666.241.370,000	9	12.514.444.370,000	10	12.416.241.370,000	10	14.648.773.370,000	3.27.3.25.2.09.01.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	7	8	8		9		9		10		10		3.27.3.25.2.09.01.0001 - UPTD Rumah Pemotongan Hewan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					736.396.921,000		1.045.489.921,000		736.396.921,000		1.008.425.921,000		736.396.921,000	
Terkendalinya penyebaran penyakit hewan menular	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	0	-20	-10	736.396.921,000	-10	1.045.489.921,000	-10	736.396.921,000	-10	1.008.425.921,000	-10	736.396.921,000	3.27.3.25.2.09.01.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					100.000.000,000		175.000.000,000		175.000.000,000		175.000.000,000		400.000.000,000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luas Lahan Pertanian yang Terdampak Perubahan Iklim yang Ditangani (%)	52,65	55	55	100.000.000,000	60	175.000.000,000	60	175.000.000,000	60	175.000.000,000	60	400.000.000,000	3.27.3.25.2.09.01.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					988.878.910,000		913.878.910,000		1.163.878.910,000		1.213.878.910,000		688.878.910,000	
Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan kelompok masyarakat penggiat sektor pertanian	Persentase Kelompok Masyarakat Penggiat Pertanian yang Aktif (%)	0	2,80	5,50	988.878.910,000	4,10	913.878.910,000	4,10	1.163.878.910,000	4,10	1.213.878.910,000	4,10	688.878.910,000	3.27.3.25.2.09.01.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					0,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					0,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Persentase Industri yang Memanfaatan EBT (%)	0	0	0	0,000	0,26	100.000.000,000	0,52	100.000.000,000	0,79	100.000.000,000	1,05	100.000.000,000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					100.522.170.000,000		103.537.835.000,000		108.714.727.000,000		110.889.022.000,000		114.215.693.000,000	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.885.774.272,000		23.590.320.000,000		24.179.950.000,000		24.784.450.000,000		25.404.060.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,62	75,70	75,80	22.885.774.272,000	75,90	23.590.320.000,000	76,00	24.179.950.000,000	76,10	24.784.450.000,000	76,20	25.404.060.000,000	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					130.744.300,000		322.204.000,000		324.840.000,000		328.122.000,000		332.058.000,000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran perusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	-	63	63	130.744.300,000	63	322.204.000,000	64	324.840.000,000	65	328.122.000,000	66	332.058.000,000	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					75.412.091.840,000		76.988.200.000,000		81.510.357.000,000		83.013.550.000,000		85.652.460.000,000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	8,3	100	100	75.412.091.840,000	100	76.988.200.000,000	100	81.510.357.000,000	100	83.013.550.000,000	100	85.652.460.000,000	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	8,3	100	100		100		100		100		100		3.30.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pasar Wilayah I
	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	8,3	100	100		100		100		100		100		3.30.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pasar Wilayah II
	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	8,3	100	100		100		100		100		100		3.30.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Pasar Wilayah III
	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	8,3	100	100		100		100		100		100		3.30.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Pasar Wilayah IV

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					692.036.840,000		727.393.390,000		761.862.390,000		797.182.390,000		833.397.390,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Komoditi dengan Harga Rata-Rata di Bawah Harga Rata-Rata Provinsi (%)	-	83	83	692.036.840,000	83	727.393.390,000	91	761.862.390,000	91	797.182.390,000	91	833.397.390,000	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					460.215.000,000		690.000.000,000		704.000.000,000		714.000.000,000		728.000.000,000	
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi atau Berpotensi Ekspor	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berorientasi atau Berpotensi Ekspor (%)	-	5	5	460.215.000,000	7	690.000.000,000	9	704.000.000,000	12	714.000.000,000	13	728.000.000,000	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					793.713.748,000		984.717.610,000		989.717.610,000		994.717.610,000		999.717.610,000	
Meningkatnya perlindungan konsumen melalui tertib ukur	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	75,70	76,15	77,95	793.713.748,000	78,17	984.717.610,000	78,39	989.717.610,000	78,61	994.717.610,000	78,84	999.717.610,000	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	75,70	76,15	77,95		78,17		78,39		78,61		78,84		3.30.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Metrologi
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					147.594.000,000		235.000.000,000		244.000.000,000		257.000.000,000		266.000.000,000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Produk Lokal yang Difasilitasi Promosi (%)	-	15	15	147.594.000,000	18	235.000.000,000	20	244.000.000,000	22	257.000.000,000	25	266.000.000,000	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.860.180.464,000		4.353.200.000,000		4.587.271.564,000		4.828.200.000,000		4.976.200.000,000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					2.692.042.424,000		3.908.200.000,000		4.142.271.564,000		4.383.200.000,000		4.531.200.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (%)	0,97	1,15	1,32	2.692.042.424,000	1,49	3.908.200.000,000	1,66	4.142.271.564,000	1,81	4.383.200.000,000	1,96	4.531.200.000,000	2.17.3.31.0.00.01.0001 - UPTD Sentra Industri Kecil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (%)	0,97	1,15	1,32		1,49		1,66		1,81		1,96		2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					75.764.290,000		145.000.000,000		145.000.000,000		145.000.000,000		145.000.000,000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Kepatuhan Industri (%)	0,87	2,18	3,49	75.764.290,000	3,93	145.000.000,000	4,37	145.000.000,000	4,80	145.000.000,000	5,24	145.000.000,000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					92.373.750,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Persentase Kepatuhan Pelaporan SIINas (%)	30,57	31,00	32,00	92.373.750,000	33,00	300.000.000,000	34,00	300.000.000,000	35,00	300.000.000,000	36,00	300.000.000,000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					183.424.592.000,000		188.927.330.000,000		198.373.697.000,000		202.341.171.000,000		208.411.406.000,000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					133.498.807.436,000		137.503.765.000,000		144.378.947.000,000		147.266.517.000,000		151.654.574.754,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	76,54	76,80	77,00	133.498.807.436,000	77,30	137.503.765.000,000	77,50	144.378.947.000,000	77,80	147.266.517.000,000	78,00	151.654.574.754,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah														
	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indeks)	78,33	78,40	78,50		79,00		79,50		79,80		80,00		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai AKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan (Nilai)	23,63	24,09	24,20		24,50		24,70		25,00		25,50		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	40	40	41		42		43		44		45		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Poin)	78,33	78,4	78,5		79,0		79,5		79,8		80,0		4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Keuangan
	Nilai AKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan ()	23,63	24,09	24,20		24,5		24,7		25,0		25,5		4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Keuangan
	Indeks Kematangan Organisasi (Poin)	40	40	41		42		43		44		45		4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Organisasi
														4.01.0.00.0.00.01.0005 - Bagian Perekonomian
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	76,54	76,8	77,0		77,3		77,5		77,8		78,0		4.01.0.00.0.00.01.0009 - Bagian Umum dan Perelengkapan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	76,54	76,8	77,00		77,3		77,5		77,8		78,0		4.01.0.00.0.00.01.0010 - Bagian Umum dan Perelengkapan
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					45.036.925.121,000		46.388.037.000,000		48.707.443.000,000		49.681.597.000,000		51.201.979.246,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang difasilitasi (%)	100	100	100	45.036.925.121,000	100	46.388.037.000,000	100	48.707.443.000,000	100	49.681.597.000,000	100	51.201.979.246,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Difasilitasi (%)	95	95	95		95		95		95		95		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Kerja Sama yang Ditindaklanjuti (%)	90	83	85		85		86		87		88		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Pemerintahan
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Ditindaklanjuti (Poin)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Hukum
														4.01.0.00.0.00.01.0005 - Bagian Perekonomian
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Difasilitasi (%)	95	95	95		95		95		95		95		4.01.0.00.0.00.01.0007 - Bagian Kesejahteraan Rakyat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Kerja Sama yang Ditindaklanjuti (%)	83	83	85		85		86		87		88		4.01.0.00.0.00.01.0011 - Bagian Kerjasama dan Perkotaan
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					4.888.859.443,000		5.035.528.000,000		5.287.307.000,000		5.393.057.000,000		5.554.852.000,000	
Meningkatnya Kualitas kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	4.888.859.443,000	100	5.035.528.000,000	100	5.287.307.000,000	100	5.393.057.000,000	100	5.554.852.000,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Indeks)	85,49	85,49	85,50		85,60		85,70		85,80		85,90		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0005 - Bagian Perekonomian
	Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0006 - Bagian Administrasi Pembangunan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Poin)	85,49	85,49	85,5		85,6		85,7		85,8		85,9		4.01.0.00.0.00.01.0008 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					140.319.469.000,000		144.529.053.000,000		151.755.506.000,000		154.790.616.000,000		159.434.334.000,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					75.077.906.190,000		79.001.000.000,000		82.830.506.000,000		86.805.000.000,000		91.084.334.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	86,97	87	87,5	75.077.906.190,000	88	79.001.000.000,000	88,5	82.830.506.000,000	89	86.805.000.000,000	89,5	91.084.334.000,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					65.241.562.810,000		65.528.053.000,000		68.925.000.000,000		67.985.616.000,000		68.350.000.000,000	
Meningkatnya Dukungan Fasilitasi Terhadap Agenda DPRD Sebagai Fungsi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda sesuai Standar (%)	54,55	56,52	58,33	65.241.562.810,000	62,5	65.528.053.000,000	64	68.925.000.000,000	68	67.985.616.000,000	69,23	68.350.000.000,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Fasilitasi Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Fasilitasi Agenda Pengawasan DPRD sesuai Standar (%)	48,72	71,43	73,81		77,38		78,57		80,95		83,33		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					17.793.393.549,000		18.086.543.000,000		19.104.795.000,000		18.974.976.000,000		19.734.224.000,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.291.603.000,000		14.479.699.000,000		15.219.795.000,000		15.051.116.000,000		15.693.258.000,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan,	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	83,08	85,65	85,95	14.291.603.000,000	86,25	14.479.699.000,000	86,55	15.219.795.000,000	86,85	15.051.116.000,000	87,15	15.693.258.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah														
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					3.501.790.549,000		3.606.844.000,000		3.885.000.000,000		3.923.860.000,000		4.040.966.000,000	
Meningkatnya keselarasan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	93,55	94,00	94,50	3.501.790.549,000	95,00	3.606.844.000,000	95,50	3.885.000.000,000	96,00	3.923.860.000,000	96,50	4.040.966.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Persentase keselarasan RKPD dengan renja perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Persentase keselarasan RKPD dengan renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.02 - KEUANGAN					201.376.212.000,000		207.417.498.000,000		217.788.373.000,000		222.144.141.000,000		228.808.466.000,000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					96.958.175.121,000		102.705.414.898,000		108.336.118.898,000		109.226.931.273,000		112.952.467.798,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	78,50	79,50	80,00	96.958.175.121,000	80,50	102.705.414.898,000	81,00	108.336.118.898,000	81,50	109.226.931.273,000	82,00	112.952.467.798,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	85,0	85,0	85,2		85,5		85,7		86,0		86,2		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					26.323.745.094,000		29.229.129.600,000		31.027.625.100,000		31.333.046.425,000		32.916.231.200,000	
Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	40	40	40	26.323.745.094,000	40	29.229.129.600,000	40	31.027.625.100,000	40	31.333.046.425,000	40	32.916.231.200,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	90,25	90,25	90,25		90,25		90,25		90,25		90,25		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					68.351.536.335,000		63.460.971.900,000		66.180.826.900,000		68.345.361.200,000		69.700.964.900,000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	3,48	3,50	3,75	68.351.536.335,000	4,00	63.460.971.900,000	4,25	66.180.826.900,000	4,50	68.345.361.200,000	4,75	69.700.964.900,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					9.742.755.450,000		12.021.981.602,000		12.243.802.102,000		13.238.802.102,000		13.238.802.102,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketercapaian target Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	86,07	87,26	87,78	3.625.393.917,000	88,14	5.671.981.602,000	88,67	5.148.802.102,000	89,23	5.398.802.102,000	89,72	5.398.802.102,000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Meningkatnya optimalisasi pendataan objek pajak	Persentase Objek Pajak Yang Ditetapkan (%)	88,12	88,36	88,87	984.128.035,000	89,14	1.050.000.000,000	89,45	1.200.000.000,000	89,88	1.350.000.000,000	90,04	1.350.000.000,000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Menurunnya nilai piutang Pajak Daerah	Presentase Piutang Pajak Daerah Yang Terbayarkan (%)	88,72	89,27	89,64	1.321.344.733,000	90,13	1.350.000.000,000	90,44	1.550.000.000,000	90,76	1.750.000.000,000	91,05	1.750.000.000,000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Meningkatnya kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Presentase Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (%)	53,03	54,24	54,78	3.811.888.765,000	55,17	3.950.000.000,000	55,62	4.345.000.000,000	56,14	4.740.000.000,000	56,52	4.740.000.000,000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					20.571.609.525,000		19.564.193.999,000		20.266.530.143,000		19.753.461.680,000		20.396.767.091,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.728.259.223,000		10.539.475.440,000		11.089.401.346,000		12.646.725.741,000		12.062.517.737,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	83	83	83,25	14.728.259.223,000	83,5	10.539.475.440,000	83,75	11.089.401.346,000	84	12.646.725.741,000	84,25	12.062.517.737,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					5.843.350.302,000		9.024.718.559,000		9.177.128.797,000		7.106.735.939,000		8.334.249.354,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kesesuaian penempatan ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja (%)	90,59	90,59	91,47	486.191.626,000	92,36	588.596.797,000	93,25	649.086.519,000	94,14	772.469.715,000	95,20	766.000.732,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualifikasi ASN	Nilai Dimensi Kualifikasi ASN (Nilai)	21,17	21,18	21,30	2.142.105.241,000	21,40	5.351.204.394,000	21,60	4.445.112.625,000	21,80	2.044.739.261,000	22,00	2.660.800.362,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang berbasis Digital (%)	41,94	41,94	58,06	2.550.629.275,000	70,97	2.712.855.913,000	83,87	3.669.659.775,000	96,77	3.793.870.994,000	100	4.391.827.570,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik (%)	88	88	85	664.424.160,000	85,19	372.061.455,000	86,64	413.269.878,000	87,28	495.655.969,000	88,99	515.620.690,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.193.389.475,000		3.883.755.001,000		4.353.815.857,000		5.359.291.320,000		5.469.368.909,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.193.389.475,000		3.883.755.001,000		4.353.815.857,000		5.359.291.320,000		5.469.368.909,000	
Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	22,13	14,15	34,70	2.193.389.475,000	45,19	3.883.755.001,000	60,28	4.353.815.857,000	77,77	5.359.291.320,000	100	5.469.368.909,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.960.000.000,000		3.289.452.000,000		3.340.000.000,000		4.030.939.000,000		3.961.868.000,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2.160.000.000,000		1.800.000.000,000		1.985.000.000,000		2.465.817.000,000		2.576.792.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	0	50	55	2.160.000.000,000	60	1.800.000.000,000	65	1.985.000.000,000	70	2.465.817.000,000	75	2.576.792.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					800.000.000,000		1.489.452.000,000		1.355.000.000,000		1.565.122.000,000		1.385.076.000,000	
Menguatnya Ekosistem Riset dan Inovasi	Persentase Tindak Lanjut Hasil Riset dan Inovasi (Rekomendasi Tindak Lanjut Dokumen RIPJPID) (%)	48,00	54,84	60,00	800.000.000,000	62,50	1.489.452.000,000	64,44	1.355.000.000,000	66,00	1.565.122.000,000	67,27	1.385.076.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01 - INSPEKTORAT DAERAH					26.131.989.000,000		31.358.387.000,000		32.926.306.000,000		33.584.832.000,000		34.592.377.000,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.527.201.845,000		26.263.387.000,000		27.171.306.000,000		27.254.832.000,000		28.237.377.000,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	81,44	88,00	88,25	22.527.201.845,000	88,50	26.263.387.000,000	88,75	27.171.306.000,000	89,00	27.254.832.000,000	89,25	28.237.377.000,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
5.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.521.682.155,000		2.495.000.000,000		2.885.000.000,000		3.190.000.000,000		3.195.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (%)	91,90	92,50	92,80	1.521.682.155,000	93,10	2.495.000.000,000	93,40	2.885.000.000,000	93,70	3.190.000.000,000	94,00	3.195.000.000,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2.083.105.000,000		2.600.000.000,000		2.870.000.000,000		3.140.000.000,000		3.160.000.000,000	
Meningkatnya kualitas konsultansi dan pencegahan korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (Indeks)	3,70	3,71	3,73	2.083.105.000,000	3,75	2.600.000.000,000	3,77	2.870.000.000,000	3,80	3.140.000.000,000	3,82	3.160.000.000,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (Indeks)	3,67	3,68	3,69		3,72		3,74		3,77		3,79		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					243.305.913.110,000		250.605.091.001,000		263.135.347.000,000		268.398.054.000,000		276.449.995.000,000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					136.081.582.728,000		151.485.307.611,000		158.174.137.005,000		161.072.917.447,000		165.923.777.042,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	70	71	72	136.081.582.728,000	73	151.485.307.611,000	74	158.174.137.005,000	75	161.072.917.447,000	76	165.923.777.042,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	86,63	87,00	87,25		87,50		87,75		88,00		88,25		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	79,62	79,70	79,80		79,90		80,00		80,10		80,20		7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	82,88	83,25	83,50		83,75		84,00		84,25		84,50		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,98	76	77		78		79		80		81		7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	79,80	80,00	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					14.123.307.447,000		10.551.416.500,000		11.075.101.359,000		11.292.397.526,000		11.579.880.147,000	
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	14.123.307.447,000	100	10.551.416.500,000	100	11.075.101.359,000	100	11.292.397.526,000	100	11.579.880.147,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BARU ILIR
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN BARU TENGAH
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	0	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN BARU ULU
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN MARGASARI
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0005 - KELURAHAN MARGO MULYO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0006 - KELURAHAN KARIANGAU
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN KLANDASAN ULU
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0002 - KELURAHAN KLANDASAN ILIR
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0003 - KELURAHAN DAMAI
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN PRAPATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN TELAGA SARI
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN KARANG JOANG
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN GRAHA INDAH
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0005 - KELURAHAN MUARA RAPAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0006 - KELURAHAN BATU AMPAR
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN DAMAI BARU
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN SEPINGGAN BARU
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN SEPINGGAN
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN MANGGAR BARU
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN TERITIP
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN MANGGAR
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					85.684.556.195,000		79.105.563.590,000		83.666.364.136,000		85.332.257.837,000		87.696.174.197,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	100	100	100	85.684.556.195,000	100	79.105.563.590,000	100	83.666.364.136,000	100	85.332.257.837,000	100	87.696.174.197,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	55	60	62		63		64		65		70		7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	0	0	80		80		80		80		80		7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BARU ILIR
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BARU ILIR
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN BARU TENGAH
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN BARU TENGAH
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN BARU ULU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN BARU ULU
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN MARGASARI
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN MARGASARI
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0005 - KELURAHAN MARGO MULYO
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0005 - KELURAHAN MARGO MULYO
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0006 - KELURAHAN KARIANGAU
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0006 - KELURAHAN KARIANGAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,00	24,50		25,00		25,50		26,00		26,00		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,00	24,50		25,00		25,50		26,00		26,00		7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,00	24,50		25,00		25,50		26,00		26,00		7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,00	24,50		25,00		25,50		26,00		26,00		7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,00	24,50		25,00		25,50		26,00		26,00		7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,00	24,50		25,00		25,50		26,00		26,00		7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,00	24,50		25,00		25,50		26,00		26,00		7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	24,76	26,00	27,50		29,00		30,50		32,00		32,10		7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	98,83	98,83	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	24,76	26,00	27,50		29,00		30,50		32,00		32,10		7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN KLANDASAN ULU
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	98,83	98,83	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN KLANDASAN ULU
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	24,76	26,00	27,50		29,00		30,50		32,00		32,10		7.01.0.00.0.00.03.0002 - KELURAHAN KLANDASAN ILIR
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	98,83	98,83	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0002 - KELURAHAN KLANDASAN ILIR
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	24,76	26,00	27,50		29,00		30,50		32,00		32,10		7.01.0.00.0.00.03.0003 - KELURAHAN DAMAI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	98,83	98,83	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0003 - KELURAHAN DAMAI
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	24,76	26,00	27,50		29,00		30,50		32,00		32,10		7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN PRAPATAN
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	98,83	98,83	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN PRAPATAN
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	24,76	26,00	27,50		29,00		30,50		32,00		32,10		7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN TELAGA SARI
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	98,83	98,83	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN TELAGA SARI
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	17,11	18	19		20		21		22		23		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	17,11	18	19		20		21		22		23		7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	17,11	18	19		20		21		22		23		7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN KARANG JOANG
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN KARANG JOANG
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	17,11	18	19		20		21		22		23		7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN GRAHA INDAH
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN GRAHA INDAH
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	17,11	18	19		20		21		22		23		7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	17,11	18	19		20		21		22		23		7.01.0.00.0.00.04.0005 - KELURAHAN MUARA RAPAK
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0005 - KELURAHAN MUARA RAPAK
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	17,11	18	19		20		21		22		23		7.01.0.00.0.00.04.0006 - KELURAHAN BATU AMPAR
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0006 - KELURAHAN BATU AMPAR
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	22,50	25		27,50		30		32,50		33		7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	22,50	25		27,50		30		32,50		33		7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	22,50	25		27,50		30		32,50		33		7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	22,50	25		27,50		30		32,50		33		7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN DAMAI BARU
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN DAMAI BARU
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	22,50	25		27,50		30		32,50		33		7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN SEPINGGAN BARU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN SEPINGGAN BARU
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	22,50	25		27,50		30		32,50		33		7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	22,50	25		27,50		30		32,50		33		7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN SEPINGGAN
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN SEPINGGAN
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	22,50	25		27,50		30		32,50		33		7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN SUNGAI NANGKA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	16,55	16,65	18,00		20,00		22,00		24,00		26,00		7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	16,55	16,65	18,00		20,00		22,00		24,00		26,00		7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	16,55	16,65	18,00		20,00		22,00		24,00		26,00		7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN MANGGAR BARU
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN MANGGAR BARU
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	16,55	16,65	18,00		20,00		22,00		24,00		26,00		7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN TERITIP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN TERITIP
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	16,55	16,65	18,00		20,00		22,00		24,00		26,00		7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN MANGGAR
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN MANGGAR
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.948.509.010,000		7.615.821.300,000		8.229.293.500,000		8.614.422.190,000		9.051.429.774,000	
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5.948.509.010,000	100	7.615.821.300,000	100	8.229.293.500,000	100	8.614.422.190,000	100	9.051.429.774,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BARU ILIR
	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN BARU TENGAH
	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN BARU ULU
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN MARGASARI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN MARGASARI
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0005 - KELURAHAN MARGO MULYO
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0006 - KELURAHAN KARIANGAU
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0006 - KELURAHAN KARIANGAU
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN KLANDASAN ULU
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0002 - KELURAHAN KLANDASAN ILIR
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0003 - KELURAHAN DAMAI
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN PRAPATAN
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN TELAGA SARI
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN KARANG JOANG
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN GRAHA INDAH
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0005 - KELURAHAN MUARA RAPAK
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0006 - KELURAHAN BATU AMPAR
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN DAMAI BARU
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN SEPINGGAN BARU
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN SEPINGGAN
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	0	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN MANGGAR BARU
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN TERITIP
	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN MANGGAR
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.467.957.730,000		1.846.982.000,000		1.990.451.000,000		2.086.059.000,000		2.198.733.840,000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100	1.467.957.730,000	100	1.846.982.000,000	100	1.990.451.000,000	100	2.086.059.000,000	100	2.198.733.840,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BARU ILIR
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	0	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN BARU TENGAH
	Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN BARU ULU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN MARGASARI
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0005 - KELURAHAN MARGO MULYO
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0006 - KELURAHAN KARIANGAU
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN KLANDASAN ULU
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0002 - KELURAHAN KLANDASAN ILIR
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0003 - KELURAHAN DAMAI
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN PRAPATAN
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN TELAGA SARI
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN KARANG JOANG
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN GRAHA INDAH
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0005 - KELURAHAN MUARA RAPAK
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0006 - KELURAHAN BATU AMPAR
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN SEPINGGAN RAYA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN DAMAI BARU
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN SEPINGGAN BARU
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN SEPINGGAN
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN MANGGAR BARU
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN TERITIP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN MANGGAR
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					37.335.599.000,000		38.455.667.000,000		40.378.450.000,000		41.186.019.000,000		42.421.600.000,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.296.159.091,000		11.419.673.815,000		11.953.456.815,000		12.347.025.815,000		12.526.877.710,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	80,20	86	80,50	10.296.159.091,000	81,00	11.419.673.815,000	81,25	11.953.456.815,000	81,50	12.347.025.815,000	82	12.526.877.710,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					8.063.048.810,000		7.868.733.136,000		8.058.733.136,000		8.118.733.136,000		8.189.733.136,000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaaan (%)	64	66	75	8.063.048.810,000	79	7.868.733.136,000	80	8.058.733.136,000	85	8.118.733.136,000	90	8.189.733.136,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					6.846.698.920,000		9.131.567.870,000		9.431.567.870,000		9.586.567.870,000		10.001.567.870,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya peran Partai Politik dalam peningkatan kehidupan demokrasi	Persentase Partai Politik yang aktif melaksanakan Pendidikan Politik kepada masyarakat (%)	100	100	100	6.846.698.920,000	100	9.131.567.870,000	100	9.431.567.870,000	100	9.586.567.870,000	100	10.001.567.870,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					2.306.355.115,000		2.306.355.115,000		2.496.355.115,000		2.529.355.115,000		2.672.084.220,000	
Meningkatnya keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah (%)	39	46	60	2.306.355.115,000	65	2.306.355.115,000	70	2.496.355.115,000	75	2.529.355.115,000	80	2.672.084.220,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					2.408.759.100,000		1.710.759.100,000		1.860.759.100,000		1.935.759.100,000		2.035.759.100,000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	2.408.759.100,000	100	1.710.759.100,000	100	1.860.759.100,000	100	1.935.759.100,000	100	2.035.759.100,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					7.414.577.964,000		6.018.577.964,000		6.577.577.964,000		6.668.577.964,000		6.995.577.964,000	
Meningkatnya kualitas penanganan potensi konflik sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Ditangani (%)	100	100	100	7.414.577.964,000	100	6.018.577.964,000	100	6.577.577.964,000	100	6.668.577.964,000	100	6.995.577.964,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					**4.251.990.481.858,000**		**6.098.575.361.751,500**		**6.765.619.266.750,500**		**6.820.277.527.850,500**		**6.819.129.232.175,500**	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Subbab ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Balikpapan untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Kota Balikpapan.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	Indikator Tujuan
2	Tingkat Kemiskinan	%	2,06	1,98	1,89	1,81	1,72	Indikator Tujuan
3	Indeks Gini	Indeks	0,307	0,301	0,296	0,290	0,285	Indikator Tujuan
4	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	234,37	246,09	259,01	273,26	288,97	Indikator Sasaran
5	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	7,99	8,12	8,25	8,38	8,52	Indikator Sasaran
6	Tingkat Inflasi	%	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	Indikator Sasaran
7	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	7,13	7,13	7,14	7,14	7,15	Indikator Sasaran
8	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	67,69	69,69	72,26	75,05	78,15	Indikator Sasaran
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,94	5,75	5,57	5,38	5,20	Indikator Sasaran
10	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	79,56	80,20	80,84	81,49	82,14	Indikator Sasaran
11	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	75,41	77,81	80,20	82,60	85,00	Indikator Sasaran
12	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	51,12	51,62	52,12	52,62	53,12	Indikator Sasaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
13	Penurunan intensitas emisi GRK	%	38,99	41,02	43,05	45,04	47,25	Indikator Tujuan
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,81	71,98	72,15	72,32	72,49	Indikator Sasaran
15	Indeks Risiko Bencana	Indeks	97,34	95,43	93,43	91,43	89,43	Indikator Sasaran
16	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,10	4,11	4,13	4,14	4,15	Indikator Tujuan
17	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,39	83,69	84,00	84,30	84,60	Indikator Sasaran
18	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,174	0,172	0,170	0,168	0,166	Indikator Sasaran
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78,52	78,64	78,76	78,88	79,00	Indikator Tujuan
20	Nilai AKIP	Nilai	70,42	70,70	70,98	71,26	71,54	Indikator Sasaran
21	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	83,09	83,29	83,49	83,69	83,89	Indikator Sasaran
22	Indeks integritas pemerintah	Indeks	78,2	79	79,7	80,5	81,2	Indikator Sasaran
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,64	86,34	87,05	87,76	88,48	Indikator Sasaran
24	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	2,00	2,00	2,50	2,50	3,00	Indikator Sasaran

Sumber: Analisis Data, 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berikut adalah target kinerja daerah Kota Balikpapan.

Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Penurunan intensitas emisi GRK	%	12,67	24,84	38,99	41,02	43,05	45,04	47,25	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,40	71,64	71,81	71,98	72,15	72,32	72,49	
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	-	78,93	79,56	80,20	80,84	81,49	82,14	
4	Indeks Risiko Bencana	Indeks	101,43	99,43	97,34	95,43	93,43	91,43	89,43	
5	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	-	0,24	0,9	1,62	2,4	3,24	4,14	
6	Cakupan layanan perkotaan terhadap air minum aman	%	-	38,75	41,81	44,88	47,94	51,00	54,06	
7	Kapasitas air baku	m3/detik	1.300	2.458	2.515	2.572	2.628	2.685	2.742	
8	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	96,76	97,39	97,41	97,43	97,46	97,48	97,50	
9	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	-	-9,22	10,13	12,17	14,45	16,75	19,44	
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	-	30,45	31,26	32,07	32,88	33,69	34,5	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,23	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	
2	Tingkat Kemiskinan	%	2,23	2,15	2,06	1,98	1,89	1,81	1,72	
3	Indeks Gini	Indeks	0,324	0,312	0,307	0,301	0,296	0,290	0,285	
4	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	214,11	223,74	234,37	246,09	259,01	273,26	288,97	
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,62	83,09	83,39	83,69	84,00	84,30	84,60	
6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,178	0,176	0,174	0,172	0,170	0,168	0,166	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,22	6,12	5,94	5,75	5,57	5,38	5,20	
8	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	50,62	50,62	51,12	51,62	52,12	52,62	53,12	
9	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	20,00	20,42	20,84	21,26	21,68	22,10	22,50	
10	Persentase Pekerja di Sektor Jasa	%	70,66	77,71	77,93	78,14	78,36	78,57	78,78	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	64,50	66,10	67,69	69,69	72,26	75,05	78,15	
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	82,068	82,89	83,09	83,29	83,49	83,69	83,89	
3	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	7,75	7,87	7,99	8,12	8,25	8,38	8,52	
4	Tingkat Inflasi	%	1,1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	
5	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	7,11	7,12	7,13	7,13	7,14	7,14	7,15	
6	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	45,55	47,50	48,07	48,63	49,20	49,76	50,33	
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi	%	92,2	92,48	92,76	93,04	93,32	93,60	93,90	
8	Kontribusi net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB	%	34,27	42,34	42,76	43,18	43,6	44,01	44,43	
9	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir	%	88,70	89,00	89,30	89,60	89,90	90,20	90,50	
10	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi	%	17,91	17,98	18,04	18,11	1.817	18,24	18,30	
11	Jumlah usaha ekonomi kreatif	Angka	618	670	782	894	1.006	1.118	1.230	
12	Disparitas Harga	%	-6,00	-5,90	-5,80	-5,60	-5,40	-5,20	-5,00	
13	Persentase penduduk bekerja 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal	%	-	67,17	68,34	69,51	70,67	71,84	73,01	
14	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	-	29,85	32,5955	35,341	38,0865	40,832	43,5775	
15	Return on Asset (ROA) BUMD	%	3,78	6,38	6,46	6,54	6,63	6,71	6,79	
16	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,58	4,02	4,208	4,396	4,584	4,772	4,96	
17	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	%	38,64	33,18	33,06	32,95	32,83	32,71	32,60	
18	Total Kredit/PDRB	%	-	23,01	25,483	27,956	30,429	32,902	35,375	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,07	4,08	4,10	4,11	4,13	4,14	4,15	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78,06	78,30	78,52	78,64	78,76	78,88	79,00	
3	Nilai AKIP	Nilai	69,06	70,02	70,42	70,70	70,98	71,26	71,54	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	70,61	73,01	75,41	77,81	80,20	82,60	85,00	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,93	84,95	85,64	86,34	87,05	87,76	88,48	
6	Indeks SPBE	Indeks	3,96	3,85	-	-	-	-	-	
7	Indeks integritas pemerintah	Indeks	75,08	77,5	78,2	79	79,7	80,5	81,2	
8	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	-	-	2,00	2,00	2,50	2,50	3,00	
9	Jumlah kejadian tindak kriminal	Kasus	1.406	1.167	1.139	1.111	1.082	1.054	1.025	
10	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,19	4,54	4,55	4,56	4,58	4,59	4,6	
11	Jumlah kejadian konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0	0	0	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Rapor pendidikan	Angka	74,94	79,4	80	81	82	83	84	
2	Rata -rata persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi dan numerasi pendidikan dasar dan kesetaraan	%	78,48	79,51	80,29	81,07	81,83	82,61	83,39	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,37	68,04	72,37	74,37	76,37	78,37	80,37	
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,25	14,35	14,40	14,50	14,59	14,68	14,78	
5	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	10,99	11,10	11,20	11,30	11,40	11,50	11,60	
6	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	-	87,07	88,18	89,18	89,39	89,59	89,80	
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,81	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	
9	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Kesetaraan	%	64,98	67,18	69,38	71,58	73,78	75,98	78,18	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	92	93	95	96	100	100	100	
11	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	%	0	0	0	0	0	0	0	
12	Iklim Keamanan SMP	%	67,31	64,59	66,59	68,59	70,59	72,59	74,59	
13	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99,26	99,88	99,89	99,91	99,93	99,95	99,97	
14	Iklim Keamanan Kesetaraan	%	67,31	64,59	66,59	68,59	70,59	72,59	74,59	
15	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	50,01	53,27	55,27	57,27	59,27	62,27	65,27	
16	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	54,44	54,67	55,67	56,67	57,67	58,67	59,67	
17	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SD/Sederajat	%	85,56	87,71	88,33	88,94	89,56	90,17	90,79	
18	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD/Sederajat	%	78,31	78,62	78,93	79,25	79,56	79,87	80,18	
19	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SMP/Sederajat	%	91,82	91,96	92,11	92,25	92,39	92,54	92,68	
20	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP/Sederajat	%	88,26	88,43	88,60	88,78	88,95	89,12	89,29	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21	Iklim Keamanan PAUD	%	73,21	74,59	75,59	76,59	77,59	78,59	79,59	
22	Iklim Keamanan SD	%	73,37	75,23	75,33	75,43	75,53	75,63	75,73	
23	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi Kesetaraan	%	61,99	63,19	64,39	65,59	66,79	67,99	69,19	
24	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,65	99,66	99,67	99,68	99,69	99,70	99,71	
25	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat: (a) perempuan/laki-laki	%	109,05	105,01	106,13	107,25	108,37	109,49	109,55	
26	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	%	95,5	96,5	97,5	98,5	99	99,5	100	
27	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	%	100	100	100	100	100	100	100	
28	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat: (a) perempuan/laki-laki	%	99,02	98,23	98,43	98,63	98,83	99,03	99,04	
29	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	%	70,96	72,96	74,96	76,96	78,96	80,96	82,96	
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,87	75,94	76	76,23	76,47	76,7	76,94	
2	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	9	5	5	5	4	4	4	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,45	81,45	81,76	81,87	81,99	82,12	82,25	
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	24,80	23,06	21,45	19,95	18,55	17,25	16,05	
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	84,00	84,98	85,73	86,48	87,23	87,98	88,74	
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	104	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
7	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	75,92	77,42	78,92	80,42	81,92	83,42	83,42	
9	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan	%	107	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	10	20	30	40	50	60	70	
12	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	-	15	30	45	60	70	80	
13	Persentase Dokumen Hasil pengawasan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	85,19	85,19	86,20	87,32	88,30	89,20	90,02	
15	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC)	%	63,31	81,60	82,52	83,44	84,36	85,28	86,20	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	%	58,03	63,33	70	76,67	83,33	90	90	
18	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	0	20	50	60	75	85	95	
19	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kasus	367	330	297	268	241	193	154	
20	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Nilai	84,58	85,18	85,86	86,55	87,24	87,94	88,64	
21	Persentase rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	%	0	0	0	0	0	0	0	
22	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	18,30	18,15	18	17,85	17,70	17,55	17,40	
23	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	70	72	75	78	80	82	85	
24	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	78	81,30	84,50	87,60	90,70	93,80	96,10	
25	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	57,10	58	60	62	64	66	68	
26	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	%	9,4	9,09	8,5	7,95	7,43	6,95	6,5	
27	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	86,05	87	87,50	88	88,50	89	89,50	
28	Jumlah kematian balita	Jiwa	90	89	88	87	86	85	84	
29	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis	Orang	20	18	16	14	12	10	10	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.									
30	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1000 Penduduk	13,76	13,77	13,78	13,80	13,83	13,86	13,88	
31	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	83,69	83,96	84,96	85,96	86,96	87,96	88,96	
32	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	93,75	100	100	100	100	100	100	
33	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	4,97	4,85	4,70	4,55	4,40	4,25	4,10	
34	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
35	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
36	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	80	82	85	87	90	92	95	
37	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	95	95	95	95	95	95	95	
38	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	98,4	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9	99	
39	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
40	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
41	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Orang	13,76	13,77	13,78	13,80	13,83	13,86	13,88	
42	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	95,43	96	96,5	97	97,5	98	98,5	
43	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	81,38	82	82,50	83	83,50	84	84,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
44	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kasus	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	
45	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
46	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	93	94	95	96	97	98	100	
47	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
48	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun	%	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	
49	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	%	81,5	83	85	87	90	93	95	
50	Persentase merokok pada penduduk umur >=15 tahun	%	22,97	22,80	22,65	22,50	22,35	22,20	22,05	
51	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
52	Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	%	70	72	75	78	80	82	85	
53	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	2,767	2,768	2,769	2,770	2,771	2,772	2,773	
54	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
55	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Orang	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28	0,25	
56	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	70,74	72	74	76	80	83	85	
57	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
58	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	
59	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	
60	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	%	7,03	7,00	6,75	6,50	6,25	6	5,8	
61	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
62	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP IRT sesuai standar	%	70	72	75	78	80	82	85	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Indeks	57,59	58,40	61,68	64,65	67,84	71,26	74,11	
2	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	-	36,04	37,63	39,13	40,69	42,23	45,29	
3	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai	11,45	13,98	25,40	35,00	45,00	55,00	65,00	
4	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	-	60,00	62,50	65,00	67,50	70,00	75,00	
5	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	52,15	52,37	52,60	52,82	53,03	53,25	53,46	
6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	94,39	94,41	94,45	94,49	95,56	98,21	99,81	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan	%	8,92	9,15	9,53	9,90	10,11	10,53	10,81	
8	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,58	79,85	80,00	80,05	80,10	80,15	80,20	
9	Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam Kondisi Aman dan Berkelanjutan	%	52,73	53,11	53,91	54,97	56	56,77	57,81	
10	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	%	56,69	56,81	56,96	57,10	57,26	57,45	57,65	
11	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	83,85	83,88	83,93	84,01	84,09	84,17	84,26	
12	Persentase Kepatuhan PBG Kabupaten/kota	%	90,00	90,00	90,00	90,84	91,51	92,05	92,48	
13	Tingkat Konektivitas Jalan	%	84,34	84,73	84,89	85,43	85,92	86,41	86,90	
14	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman dan Berkelanjutan	%	11,08	11,31	11,31	12,61	13,61	14,61	15,62	
15	Persentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Nilai Kualitas Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Nilai	0	0	0,66	0,68	0,68	0,69	0,70	
17	Persentase Ketercukupan Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional	%	94,37	94,91	96,51	97,32	98,39	98,93	100	
18	Persentase Bangunan SDA dalam Kondisi Baik	%	57,81	59,38	60,94	62,50	64,06	65,63	67,19	
19	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	81,63	81,64	81,67	81,70	82,75	85,39	86,98	
20	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	96,9	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	78,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
22	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	73,97	74,80	75,64	76,48	77,31	78,15	78,98	
23	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	11,66	14,88	35,23	53,41	71,59	89,77	100	
24	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	3,09	3,09	12,94	15,61	18,27	20,93	23,60	
25	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	90,00	90,00	90,00	90,84	91,51	92,05	92,48	
26	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (a) akses layanan air minum; (b) akses layanan sanitasi layak; dan (c) akses fasilitas penyehatan dasar	%	52,73	52,86	52,88	53,55	54,58	56,41	57,71	
27	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	94,39	94,41	94,45	94,49	95,55	98,21	99,81	
28	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	100	
29	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	11,08	11,31	11,31	12,61	13,61	14,61	15,62	
30	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,99	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman	Indeks	0,10	0,14	0,26	0,43	0,61	0,78	1,00	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,25	76,14	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Memadai	%	16,42	25,37	40,30	55,22	70,15	85,07	100,00	
4	persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	97,25	97,29	97,37	97,44	97,54	97,66	97,88	
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0,00	0,00	25,77	41,41	60,25	77,23	100,00	
6	Presentase Pemenuhan rumah layak huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	7,17	15,60	28,33	36,76	49,41	66,27	100,00	
7	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	52,44	69,51	75,61	81,71	87,80	93,90	100,00	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	84,02	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	
9	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	0,00	15,49	32,39	49,30	66,20	83,10	100,00	
10	Persentase Perumahan dengan PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota	%	16,42	25,37	40,30	55,22	70,15	85,07	100,00	
11	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	%	0,00	0,00	11,11	33,33	55,56	77,78	100,00	
12	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni Melalui Penyediaan Unit Hunian Vertikal	%	80,00	83,38	86,76	90,14	95,51	96,89	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	7,14	14,28	25,05	35,76	50,04	67,88	100,00	
14	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Rumah Hak Milik)	%	67,11	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	
2	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum	%	91	91,7	92	93	94	95	96	
3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	
4	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	%	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	
5	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks	84,45	85	85,2	85,4	85,6	85,8	86	
6	Rasio Anggota Linmas Aktif	%	2,66	2,99	3,39	3,77	3,79	4,19	4,59	
7	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	%	85	86	89	91	94	97	98	
8	Persentase Capaian Waktu Tanggap	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,83	68,45	68,65	68,85	69,05	69,25	69,45	
10	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,91	70	71	72	73	74	75	
11	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Kebakaran	%	85	86	87	88	89	90	91	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	90	91	92	93	94	95	96	
14	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	83,47	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00	86,50	
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	95,07	95,17	95,27	95,37	95,47	95,57	95,67	
17	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Satlinmas yang ditingkatkan kompetensinya	%	68,39	70,39	72,39	74,39	76,39	78,39	80,39	
19	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Nonkebakaran	%	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100	
21	Persentase Satuan / Lembaga Yang Telah Membentuk SKKL sesuai RISPKP	%	76	78	80	82	84	86	88	
22	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	80	82	84	86	88	90	92	
23	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	250	250	250	250	250	250	250	
24	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	100.700	101.200	102.000	103.000	104.000	105.000	106.000	
25	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
26	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari	Orang	1.894	1.300	1.200	1.100	1.000	900	800	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota									
27	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
28	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
29	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	300	300	300	300	300	300	300	
30	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	0	0	0	0	0	0	0	
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	%	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,60	68,01	68,61	69,21	69,80	70,40	71,00	
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terlayani	%	84	85	86	87	88	89	90	
4	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	%	0	0	0	70	75	80	85	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	87,07	88,18	89,18	89,39	89,59	89,80	90,00	
6	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	78	79	80	85	90	95	100	
7	Persentase layanan rehabilitas sosial PPKS terlantar yang terpenuhi	%	84	85	86	87	88	89	90	
8	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	40	50	60	70	80	90	100	
9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota									
10	Persentase TMP Nasional yang Terkelola dengan Baik	%	82	85	87	88	89	90	91	
11	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	110	110	110	110	110	110	110	
12	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	280	280	280	280	280	280	280	
13	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Orang	5.748	5.592	6.000	6.500	6.400	6.300	6.200	
14	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	79,33	80,11	80,89	81,67	82,44	83,22	84,00	
15	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Orang	25	25	25	25	25	25	25	
16	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	185	185	185	185	185	185	185	
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,80	67,30	67,80	68,30	68,80	69,30	69,80	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	65,19	69,34	69,54	69,74	69,94	70,14	70,34	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Formal	%	-1,12	0,28	0,38	0,48	0,58	0,68	0,78	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	93,07	93,08	93,10	93,20	93,30	93,40	93,50	
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	55,08	55,73	56,39	57,04	57,69	58,35	59,00	
6	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur	%	75	63	42	46	48	50	52	
7	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	36,99	37,00	37,10	37,20	37,30	37,40	37,50	
8	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Rencana Tenaga Kerja (RTK)	%	3,10	3,50	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	
9	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	71,88	71,90	71,92	71,94	71,96	71,98	72,00	
11	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	38,09	38,41	38,73	39,05	39,36	39,68	40,00	
12	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	57,43	57,86	58,29	58,72	59,14	59,57	60,00	
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	57,75	59,48	61,26	63,10	64,99	66,93	68,94	
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,34	90,36	90,36	90,37	90,38	90,39	90,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	%	81,25	81,25	83	83	85	85	86	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	64,64	71,21	72	73	74	75	76	
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,04	75,05	75,06	75,07	75,08	75,09	75,1	
5	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,74	63,75	63,75	63,76	63,77	63,78	63,79	
6	Persentase Data Gender dan Anak yang Terpilah	%	0	0	26	27	29	30	31	
7	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	79,33	79,55	79,55	79,66	79,74	79,89	80,5	
8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	61,27	61,28	61,28	61,29	61,30	61,31	61,32	
10	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	40,02	41	41	42	43	44	45	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	77	77	78	79	80	81	82	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Indeks	89,94	89,95	89,96	89,96	89,98	90,0	90,0	
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	52,71	52,71	53,17	53,40	53,63	53,86	54,07	
14	Presentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di Lembaga Eksekutif (eselon II)	%	34,38	34,38	35	35	36	36	36	
15	Presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	%	26,67	26,67	28,00	30,50	33,00	35,50	38,00	
16	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat	%	29,87	29,87	30,00	32,50	35,00	37,50	40,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah									
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	5,9	5,67	5,40	5,13	4,86	4,59	4,33	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,03	82,24	82,40	82,60	82,80	83,00	83,20	
3	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	87,35	8.735	87,68	87,98	88,29	88,60	88,91	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	77,54	77,70	78,00	78,13	79,00	80,00	80,88	
5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	76,67	78,67	78,67	79,33	79,33	80,00	80,00	
6	Persentase cadangan pangan	%	13,02	70,05	72,41	77,00	81,07	84,65	85,53	
7	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	14,70	35,30	35,30	32,40	29,40	26,50	23,50	
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,07	73,85	75	76,5	78	79	80	
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	-	0,10	0,33	0,33	0,47	0,58	0,73	
3	Persentase Luas Tanah yang Dibebaskan	%	-	0	31,43	31,43	41,19	45,25	56,66	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	
5	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	%	87	87	87,5	87,5	88	88	88,5	
6	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	%	80	80	85	90	93	95	100	
7	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan									
8	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	0	0	0	0	0	
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	Indeks	61,51	68,75	68,89	69,04	69,18	69,32	69,47	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,40	76,33	77,23	78,13	79,03	79,93	80,83	
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,49	64,40	64,60	64,80	65	65,20	65,40	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	67,60	67,70	67,80	67,90	68	68,10	68,20	
5	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,28	83,83	84,03	84,23	84,43	84,63	84,83	
6	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	59,20	61,51	61,58	61,65	61,72	61,79	61,86	
7	Persentase Parameter yang Memenuhi Baku Mutu	%	77,9	77,9	78	79	80	81	82	
8	Jumlah Limbah B3 yang Terkelola	Ton	44.687	44.687	44.787	44.887	44.987	45.087	45.187	
9	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	89	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	84,09	84,59	85	85,5	86	86,5	87	
11	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	67,69	67,90	68,00	68,50	69,00	69,50	70,00	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	87,07	88,18	89,18	89,39	89,59	89,80	90,00	
13	Persentase RTH yang dikelola	%	16,49	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	
14	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis	%	5,30	5,25	5,20	5,15	5,10	5,05	5,00	
17	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	%	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	
18	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	5,30	5,25	5,20	5,15	5,10	5,05	5,00	
19	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
20	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	55.320,36	60.369,16	65.605,70	68.920,60	72.312,15	75.780,35	79.325,21	
21	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	%	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	
22	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	
23	Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	%	91,42	91,52	91,62	91,72	91,82	91,92	92,02	
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	93,84	93,89	93,93	94,02	94,21	94,4	94,59	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,10	74,44	74,73	75,03	75,41	76,41	76,74	
3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	99,790	99,800	99,807	99,814	99,821	99,828	99,835	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	%	97,43	97,47	99,90	99,91	99,92	99,93	99,94	
5	Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	95,09	95,15	100	100	100	100	100	
8	Persentase OPD yang memanfaatkan Informasi Kependudukan	%	0	13,04	82,61	86,96	91,30	95,65	100	
9	Persentase cakupan perekaman dan pencetakan KTP-elektronik	%	99,950	99,951	99,952	99,953	99,954	99,955	99,956	
10	Persentase Kelengkapan Profil Kependudukan sesuai standar	%	0	100	100	100	100	100	100	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	87,82	87,89	87,94	88,00	88,05	88,10	88,15	
12	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	99,42	99,45	99,47	99,49	99,51	99,53	99,55	
13	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-18 tahun	%	99,77	99,78	99,79	99,81	99,83	99,85	99,87	
14	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	5,18	15,00	17,50	20,00	22,50	25,00	30,00	
15	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat	%	99,900	99,955	99,957	99,959	99,960	99,962	99,965	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur									
18	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	99,710	99,941	99,945	99,947	99,950	99,953	99,955	
19	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota	%	0	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	65,4	66,6	67,8	68,9	70	70,9	71,9	
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	64,45	64,45	64,8	65	65,2	65,4	65,6	
3	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	8,5	8,5	8,7	8,9	9,09	9,28	9,3	
4	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,19	2,19	2,18	2,18	2,17	2,17	2,17	
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	14,5	13.5	12.6	11.9	11.3	10.7	10.2	
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,20	12,20	12,09	11,98	11,88	11,77	11,67	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi (Demand Satisfied)	%	81,6	81,8	82	82,2	82,4	82,6	82,8	
8	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	91,7	91,7	92,1	92,5	92,9	93,3	93,6	
9	Proporsi / Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri / Berkelanjutan	%	50,4	50,4	51,2	52	52,8	53,5	54,2	
10	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	59,6	59,6	60,4	61,2	61,9	62,7	63,4	
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	63	63	66	69	72	76	80	
2	Cakupan Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum Massal	%	42	42	53	64	75	86	100	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,21	71,35	72,25	73,25	74,25	75,25	76,25	
4	V/C Ratio Jalan Kota	%	55	55	54	53	52	51	50	
5	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	64	70	80	85	90	95	100	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	70,00	73,00	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	
7	Konektivitas Laut	%	50	50	50	50	50	50	50	
8	Konektivitas Darat	%	42	42	53	64	75	86	100	
9	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang dalam kondisi baik	%	64,16	73,33	78,68	81,30	94,98	97,49	100	
10	Jumlah pelabuhan strategis	Unit	3	3	3	3	3	3	3	
11	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	%	2,81	2,81	2,90	3,00	3,40	3,50	3,60	
12	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	%	24,91	25,84	26,76	27,68	28,59	29,51	30,42	
13	Jumlah pelabuhan penyeberangan	unit	2	2	2	2	2	2	2	
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Indeks Literasi Digital	Indeks	-	-	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,26	75,18	76,00	77,00	77,50	78,00	78,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	94,64	94,65	94,66	94,68	94,70	94,85	95,00	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Indeks	-	60,0	62,5	65,0	70,0	75,0	80,0	
5	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	86,0	86,2	86,5	86,7	86,9	87,0	87,2	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	87,08	87,00	87,20	87,50	87,70	87,90	88,00	
7	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	%	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	88,00	89,00	
8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	%	79,30	80,00	80,70	81,40	82,10	82,80	83,5	
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	
2	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	%	4,43	4,55	4,64	4,71	4,76	4,80	4,82	
3	Persentase Koperasi Berkualitas	%	64,06	64,34	64,62	64,89	65,15	65,41	65,67	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	63,30	68,70	69,40	70,80	71,50	72,90	73,60	
5	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	%	3,68	3,70	3,72	3,76	3,80	3,85	3,92	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	82,45	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	
7	Persentase Koperasi Aktif	%	23,44	25,95	26,21	26,46	26,71	26,96	27,21	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase Koperasi Sehat	%	4,69	4,94	6,17	7,41	8,64	9,88	11,11	
9	Pertumbuhan Usaha Mikro Formal	%	1,25	1,35	1,39	1,83	2,03	2,09	2,13	
10	Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kualitasnya	%	6,25	4,94	6,17	6,42	6,67	6,91	7,16	
11	Persentase jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	%	11,14	11,63	11,93	11,98	12,50	12,70	12,72	
12	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	1,33	1,35	1,36	1,37	1,38	1,40	1,41	
13	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	%	34,81	35,50	36,50	37,50	38,50	39,50	40,50	
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	20	22	22,11	22,28	22,50	22,78	23,12	
2	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan	%	10,21	15,21	20,21	25,21	30,21	35,21	40,21	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,32	77,62	77,70	77,80	77,90	78	78,10	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Indeks	95,50	95,52	95,54	95,58	95,62	95,66	96,20	
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	97,72	97,77	97,82	97,92	98,02	98,12	98,22	
6	Persentase investor potensial	%	8,3	15,38	25	33,30	35	37,03	37,8	
7	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	128	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	94,32	94,40	94,57	94,82	95,07	95,32	95,57	
11	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	6,55	10	0,5	0,75	1	1,25	1,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Tingkat Daya Saing Pemuda	%	2,036	2,041	2,046	2,051	2,056	2,061	2,066	
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,397	0,397	0,398	0,399	0,400	0,401	0,402	
3	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional	Medali	477	477	250	275	300	375	400	
4	Persentase pemuda yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi	%	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,07	71,07	71,20	71,30	71,40	71,50	71,60	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	87,07	88,18	89,18	89,39	89,59	89,80	90,00	
7	Jumlah Medali yang Diraih Atlet dan Pegiat Olahraga pada Tingkat Provinsi	Medali	252	252	500	510	515	520	525	
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	%	2,28	2,28	2,30	2,32	2,34	2,36	2,38	
9	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan	%	3,23	3,23	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	
10	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	
11	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan	%	9,07	9,07	9,07	9,07	9,08	9,08	9,08	
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,23	2,23	2,28	2,33	2,38	2,43	2,48	
2	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Melakukan Publikasi Data Statistik yang Menerapkan Standar Akurasi yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	17,64	23,52	29,41	35,29	41,17	47,05	52,94	
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	37,83	37,83	38,76	40,31	40,31	41,09	41,09	
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	-	-	48	49	50	51	52	
2	Indeks Dimensi Warisan Budaya	Indeks	-	11,33	24,46	24,77	29,25	29,57	31,99	
3	Indeks Dimensi Ekspresi Budaya	Indeks	-	1,27	26,86	27,31	27,73	28,14	28,49	
4	Indeks Dimensi Pendidikan	Indeks	-	-	15,6	16,7	17,8	18,9	20,0	
5	Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni Dalam 3 Bulan Terakhir	%	2,54	2,62	2,7	2,78	2,86	2,94	3,02	
6	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pencatatan	%	-	-	50	50	66,67	66,67	75	
7	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Dunia Dalam Setahun Terakhir	%	0,25	0,33	0,43	0,57	0,76	1	1,33	
8	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Terhadap Total Pendaftaran	%	22,56	23,70	24,82	25,90	26,95	27,97	28,97	
9	Terlestarikannya cagar budaya	%	-	-	48	49	50	51	52	
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	72,98	73,48	73,98	74,48	74,98	75,48	75,98	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat	Nilai	81,04	81,06	81,08	81,1	81,12	81,14	81,16	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,50	72,36	73,45	74,55	75,67	76,80	77,95	
4	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	%	7	7	8	8	8,5	9	9,5	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	95,45	81,00	95,46	95,47	95,48	95,49	95,50	
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	71,78	72	73	74	75	76	78	
2	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai pengawasan kearsipan dengan kategori minimal baik	%	30	36	42	50	58	69	83	
3	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip dinamis dan statis sesuai dengan NSPK	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase arsip hasil alih media yang telah autentifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	80,25	85	90	92	95	97	100	
6	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	67	67,1	67,2	67,3	67,4	67,5	67,6	
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	163,473	312	319	320	327	333	340	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	4.109	4.500	5,250	6.000	6.750	7.500	8.250	
3	Volume Produksi Olahan Perikanan	Ton	0	0	0	1.130	1.132	1.134	1.136	
4	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	4.182,47	4.812	4.919	4.927	5.019	5.119	5.222	
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB (%)	%	1,78	1,78	2,20	2,46	2,72	2,98	3,23	
2	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	Milyar Rupiah	-	-	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	
3	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,64	1,65	1,67	1,71	1,75	1,78	1,80	
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	18	18	18	20	23	25	29	
5	Persentase Pertumbuhan Wisatawan	%	4,37	4,38	4,40	4,42	4,44	4,47	4,49	
6	Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata	%	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	
7	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	7	7	7	7,5	7,7	7,9	8	
8	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	%	3,94	3,95	3,96	3,97	3,98	3,99	4,00	
9	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	48,70	48,71	48,72	48,73	48,74	48,75	48,76	
10	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	2.633.919	2.746.019	2.863.219	2.985.719	3.113.719	3.247.519	3.387.519	
11	Tingkat hunian akomodasi	%	58,43	58,60	58,75	58,80	58,90	59,00	59,10	
12	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	%	1	1,08	1,17	1,25	1,33	1,42	1,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD	%	34,33	34,48	34,63	34,78	34,93	35,08	35,23	
14	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	36.450	41.250	46.685	52.845	59.820	67.720	76.670	
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0	-20	-10	-10	-10	-10	-10	
2	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	7	8	8	9	9	10	10	
3	Persentase Kelompok Masyarakat Penggiat Pertanian yang Aktif	%	0	2,80	5,50	4,10	4,10	4,10	4,10	
4	Persentase Jumlah Masyarakat Penggiat Sektor Pertanian yang Mendapat Akses Bantuan Sarana Pertanian	%	26,00	26,00	26,50	27,00	27,50	28,00	28,50	
5	Persentase Luas Lahan Pertanian yang Terdampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	52,65	55	55	60	60	60	60	
BB	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
1	Persentase Industri yang Memanfaatan EBT	%	0	0	0	0,26	0,52	0,79	1,05	
BC	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	9,77	9,77	9,78	9,79	9,80	9,81	9,82	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,03	73,12	73,5	74	74,5	75	75,5	
3	Koefisien Variasi Harga antar Waktu	%	5,20	1-5.2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	
4	Persentase Pertumbuhan Omset Pelaku Usaha Perdagangan	%	-	1,5	1,75	2	2,25	2,50	3	
5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	75,70	76,15	77,95	78,17	78,39	78,61	78,84	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berorientasi atau Berpotensi Ekspor	%	-	5	5	7	9	12	13	
7	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	-	63	63	63	64	65	66	
8	Persentase Produk Lokal yang Difasilitasi Promosi	%	-	15	15	18	20	22	25	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	75,62	75,70	75,80	75,90	76,00	76,10	76,20	
10	Persentase Komoditi dengan Harga Rata-Rata di Bawah Harga Rata-Rata Provinsi	%	-	83	83	83	91	91	91	
11	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	8,3	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	75,16	76	77	78	79	80	81	
13	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100	100	
BD	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Realisasi Pertumbuhan Produktivitas Industri Pengolahan	%	3,02	3,05	3,07	3,10	3,12	3,14	3,15	
2	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Pengolahan	%	5,48	5,50	5,52	5,54	5,56	5,58	5,60	
3	Persentase Kepatuhan Industri	%	0,87	2,18	3,49	3,93	4,37	4,80	5,24	
4	Persentase Kepatuhan Pelaporan SIINas	%	30,57	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	
5	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,97	1,15	1,32	1,49	1,66	1,81	1,96	
6	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	%	13,79	15,15	15,79	15,91	17,65	18,33	19,72	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.	%	2,27	2,35	2,43	2,51	2,59	2,67	2,75	
8	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	%	-0,04	3,98	4,34	4,70	5,07	5,43	5,79	
9	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	62,69	63,69	64,69	65,69	66,69	67,69	68,69	
13	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
BE	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	69,96	69,98	70,18	70,28	70,38	70,48	70,58	
2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	8,32	8,32	8,34	8,36	8,38	8,40	8,42	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,25	3,7018	3,703	3,704	3,705	3,706	3,707	
5	Nilai AKIP Komponen Pelaporan	Nilai	9,48	9,72	9,82	9,89	9,96	10,03	10,10	
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,33	77,03	77,5	77,8	78,00	78,3	78,8	
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	73,7	74,0	74,1	74,2	74,3	74,4	74,5	
8	Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	%	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91	91,2	
9	Persentase Rata-Rata Capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan	%	96,49	96,5	96,6	96,65	96,7	96,75	96,8	
10	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	%	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91	91,2	
11	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,32	98,35	98,4	98,45	98,5	98,55	98,6	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	76,54	76,80	77,00	77,30	77,50	77,80	78,00	
13	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Difasilitasi	%	95	95	95	95	95	95	95	
16	Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	78,33	78,40	78,50	79,00	79,50	79,80	80,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
19	Nilai AKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan	Nilai	23,63	24,09	24,20	24,50	24,70	25,00	25,50	
20	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	85,49	85,49	85,50	85,60	85,70	85,80	85,90	
21	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	40	40	41	42	43	44	45	
22	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	%	90	83	85	85	86	87	88	
23	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	96,66	96,67	96,68	96,69	96,70	96,71	96,72	
24	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	100	100	100	100	100	100	100	
25	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	7,67	7,68	7,69	7,70	7,71	7,72	7,73	
26	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	unit	6	6	6	6	6	6	6	
27	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	53,23	53,24	53,25	53,26	53,27	53,28	53,29	
BF	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
1	Indeks Kepuasan DPRD	Indeks	74,51	74,84	75,17	75,50	75,83	76,16	76,50	
2	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi Sesuai dengan Standar	%	71,84	74,04	75,48	78,21	79,17	81,49	82,69	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,77	74,95	75,25	75,55	75,95	76,45	77	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda sesuai Standar	%	54,55	56,52	58,33	62,5	64	68	69,23	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	86,97	87	87,5	88	88,5	89	89,5	
6	Persentase Fasilitasi Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Fasilitasi Agenda Pengawasan DPRD sesuai Standar	%	48,72	71,43	73,81	77,38	78,57	80,95	83,33	
BG	5.01 - PERENCANAAN									
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	84,50	84,80	85,10	85,40	85,70	86,00	86,30	
2	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	22,53	22,77	22,87	22,94	23,01	23,08	23,15	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,98	77,20	77,90	78,60	79,30	80,00	80,70	
4	Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	20,34	20,58	20,68	20,75	20,82	20,89	20,96	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	83,08	85,65	85,95	86,25	86,55	86,85	87,15	
6	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	93,55	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	
7	Persentase keselarasan RKPD dengan renja perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase keselarasan RKPD dengan renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	%	1,32	3,50	4,25	5,00	5,75	6,50	7,25	
10	Jumlah Alokasi Pemerintah Menyiapkan Proyek, Transaksi	Rp	3.187.610.230	3.200.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Proyek, dan Dukungan Pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)									
11	Laju pertumbuhan PDB per kapita	%	6,18	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	
12	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Dokumen	3	3	3	3	4	4	5	
BH	5.02 - KEUANGAN									
1	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	26,53	30,84	40,77	36,18	36,28	38,57	41,34	
2	Indeks Kesesuaian dokumen perencanaan dan pengganggaran	Indeks	13,14	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	
3	Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	Indeks	20	20	20	20	20	20	20	
4	Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah	Indeks	15	15	15	15	15	15	15	
5	Indeks Penyerapan Anggaran	Indeks	15	15	15	15	15	15	15	
6	Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Indeks	3,92	3,92	4,12	4,32	4,52	4,72	4,92	
7	Indeks Capaian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indeks	15	15	15	15	15	15	15	
8	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	0	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	
9	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,16	72,97	73	73,5	74	74,5	75	
10	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,22	73,00	73,14	73,32	74,02	74,68	75,00	
11	Persentase Kesesuaian Pagu KUA PPAS dengan APBD	%	97,75	98	98,15	98,30	98,60	99	99,25	
12	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	%	13,21	30,09	6,00	6,18	6,35	6,53	6,70	
13	Persentase pemenuhan penganggaran mandatory spending	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	%	220	4,53	5,00	7,70	10,40	13,10	15,80	
15	Persentase Pemenuhan Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Daerah yang Dipublikasi Tepat Waktu di Website Resmi Pemda									
16	Persentase Penyerapan Anggaran	%	86,72	86,90	87,15	87,75	89	89,25	89,50	
17	Persentase Perhitungan Rasio keuangan berdasarkan LKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah	Predikat	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	
19	Presentase Piutang Pajak Daerah Yang Terbayarkan	%	88,72	89,27	89,64	90,13	90,44	90,76	91,05	
20	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	86,07	87,26	87,78	88,14	88,67	89,23	89,72	
21	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3,48	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	
22	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40	40	40	40	40	40	40	
23	Persentase Objek Pajak Yang Ditetapkan	%	88,12	88,36	88,87	89,14	89,45	89,88	90,04	
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	78,50	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	85,0	85,0	85,2	85,5	85,7	86,0	86,2	
26	Presentase Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	%	53,03	54,24	54,78	55,17	55,62	56,14	56,52	
27	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	
28	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
29	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	10,88	11,04	11,21	11,38	11,55	11,72	11,90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	13,28	13,48	13,68	13,89	14,09	14,31	14,52	
31	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	%	2,61	2,612	2,614	2,616	2,618	2,620	2,622	
32	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	10,11	10,26	10,42	10,57	10,73	10,89	11,05	
33	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	26,53	26,93	27,33	27,74	28,16	28,58	29,01	
34	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	%	27,06	28,30	36,46	33,28	33,85	36,22	39,03	
35	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	83,57	83,81	84,05	84,28	84,52	84,76	85	
36	Assets Management	Unit Kerja	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	
37	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	100	
38	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	16,42	16,67	16,92	17,17	17,43	17,69	17,95	
39	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	58,85	59,73	60,63	61,54	62,46	63,40	64,35	
40	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,53	0,54	0,55	0,57	0,58	0,59	0,60	
BI	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	87,69	88,02	88,5	88,75	89	89,05	89,25	
3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,59	79	79,5	79,8	80	80,2	80,5	
4	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang berbasis Digital	%	41,94	41,94	58,06	70,97	83,87	96,77	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	%	90,59	90,59	91,47	92,36	93,25	94,14	95,20	
6	Nilai Dimensi Kualifikasi ASN	Nilai	21,17	21,18	21,30	21,40	21,60	21,80	22,00	
7	Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik	%	88	88	85	85,19	86,64	87,28	88,99	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	83	83	83,25	83,5	83,75	84	84,25	
9	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23,10	15,35	16,21	16,97	18,03	28,59	40,34	
10	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	36,60	35,30	38,28	41,30	43,59	30,68	23,92	
11	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	57,40	39,96	49,34	59,52	70,40	82,10	94,46	
BJ	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	22,13	14,15	34,70	45,19	60,28	77,77	100	
BK	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	57,21	58,01	58,86	59,72	60,60	61,52	62,45	
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	0	50	55	60	65	70	75	
3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Riset dan Inovasi (Rekomendasi Tindak Lanjut Dokumen RIPJPID)	%	48,00	54,84	60,00	62,50	64,44	66,00	67,27	
4	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	%	0,00265	0,00322	0,00378	0,00435	0,00491	0,00548	0,00604	
BL	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3,025	3,050	3,075	3,100	3,125	3,150	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,82	81,92	81,97	82,02	82,07	82,12	82,17	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	81,44	88,00	88,25	88,50	88,75	89,00	89,25	
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	3,70	3,71	3,73	3,75	3,77	3,80	3,82	
5	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Indeks	3,67	3,68	3,69	3,72	3,74	3,77	3,79	
6	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	91,90	92,50	92,80	93,10	93,40	93,70	94,00	
7	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) >= B	%	97,2	100	100	100	100	100	100	
BM	7.01 - KECAMATAN									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	87,23	87,30	87,45	87,65	87,90	88,20	88,50	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	88,80	88,85	89,08	89,31	89,54	89,77	90,00	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	81,33	81,50	81,75	82	82,25	82,50	82,75	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	90,31	90,46	90,61	90,76	90,91	91,06	91,21	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	89,46	89,55	89,64	89,73	89,82	89,91	90,00	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	90,60	90,61	90,62	90,63	90,64	90,65	90,66	
7	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,26	69,33	69,50	70,00	71,00	72,00	73,00	
8	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	80,00	80,00	100	100	100	100	100	
9	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,44	70,57	71,45	72,33	73,21	74,09	74,97	
10	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,38	72,04	72,50	72,75	73,00	73,50	74,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	75	100	100	100	100	100	
12	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	66,67	83,33	100	100	100	100	100	
13	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,31	71,22	71,98	72,73	73,49	74,24	75,00	
14	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	66,67	100	100	100	100	100	100	
16	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	61,99	66,10	67,08	68,06	69,04	70,02	71	
17	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	85,71	100	100	100	100	100	
18	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,67	68,84	70,07	71,30	72,53	73,76	75,00	
19	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	70	71	72	73	74	75	76	
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	86,63	87,00	87,25	87,50	87,75	88,00	88,25	
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	79,62	79,70	79,80	79,90	80,00	80,10	80,20	
23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	75,98	76	77	78	79	80	81	
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	79,80	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	82,88	83,25	83,50	83,75	84,00	84,25	84,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
26	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
27	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	24,76	26,00	27,50	29,00	30,50	32,00	32,10	
28	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	17,11	18	19	20	21	22	23	
29	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	16,55	16,65	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	
30	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	20,28	22,50	25	27,50	30	32,50	33	
31	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	23,37	24,00	24,50	25,00	25,50	26,00	26,00	
32	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
33	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
34	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
35	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
36	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
37	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
38	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
39	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
40	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
41	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
42	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
43	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
44	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
45	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
46	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
47	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
48	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
49	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
50	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
51	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
52	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	%	55	60	62	63	64	65	70	
53	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	%	98,83	98,83	100	100	100	100	100	
54	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
BN	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk)	Angka	0,60	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,46	65,96	66,50	67,40	68,30	69,20	70,10	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah Diselesaikan	%	79	80	80	82	84	86	89	
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah	%	39	46	60	65	70	75	80	
5	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaaan	%	64	66	75	79	80	85	90	
7	Persentase Partai Politik yang aktif melaksanakan Pendidikan Politik kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	80,20	86	80,50	81,00	81,25	81,50	82	
9	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber: Analisis Data, 2025

BAB V
PENUTUP

Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang menjadi pedoman pemerintah kota dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi panduan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan daerah secara umum, termasuk perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyusun rencana strategis yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan.

Arah pembangunan Kota Balikpapan selama lima tahun ke depan dipandu oleh visi “Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman”. Visi ini mencerminkan cita-cita untuk menjadikan Balikpapan sebagai kota yang tidak hanya maju secara global tetapi juga memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya dengan berlandaskan nilai-nilai luhur. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima misi strategis dan sembilan program prioritas. Fokus utama pembangunan mencakup transformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, penguatan infrastruktur publik, pemerataan ekonomi, serta perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode berikutnya (atau jika ada penetapan perubahan RPJMD). Untuk menjamin agar pelaksanaan RPJMD berjalan secara efektif, efisien, dan konsisten, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sebagai bagian integral pembangunan nasional, pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 harus menjadi bagian dari upaya pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Visi dan misi Kota Balikpapan wajib dijabarkan secara selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah di Kota Balikpapan wajib diturunkan dalam indikator tujuan RENSTRA Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Perangkat Daerah. Target kinerja setiap tahapan pembangunan dapat diperbarui melalui RKPD dan/atau RENJA Perangkat Daerah, dengan tetap mempertahankan target akhir tahun 2030 sebagai batas minimal.

3. Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, meliputi:
   a. Pengendalian dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran, program, dan program unggulan melalui pemantauan, supervisi, dan penilaian capaian kinerja secara periodik.
   b. Penyusunan dan pelaksanaan manajemen risiko pembangunan daerah sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
4. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses penyusunan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan sesuai ketentuan yang berlaku, serta terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD lebih dari 3 (tiga) tahun.
5. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Balikpapan harus didiseminasikan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik secara elektronik maupun non-elektronik, untuk menjamin keterbukaan dan partisipasi publik.
6. Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan melalui:
   a. Pengembangan pembiayaan alternatif dan kreatif, baik yang bersumber dari dana pemerintah maupun non-pemerintah.
   b. Optimalisasi peran sektor keuangan untuk mendukung pencapaian visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.
7. Pada saat Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ditetapkan, Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dinyatakan tidak berlaku.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELYZABETH E.R.L. TORUAN